

**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 88 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 88 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2017 serta prakiraan maju Tahun 2018.

- (4) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017; dan
  - pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2017.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
  - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
  - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
  - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; dan
  - BAB VI : PENUTUP.
- (2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

### Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2017.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

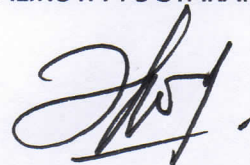
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 2016

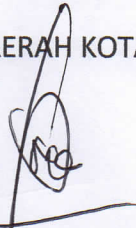
WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 88

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i

BAB I PENDAHULUAN ..... I-1

1.1. Latar Belakang ..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-2

1.3. Hubungan antar Dokumen ..... I-3

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 ..... I-4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ..... II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1

2.1.1.1. Aspek Geografi..... II-1

2.1.1.1.2. Aspek Demografi ..... II-12

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-18

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-18

2.1.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II-51

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-56

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ..... II- 56

2.1.3.2. ....Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... II-155

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan..... II-247

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-264

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-264

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... II-267

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-280

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia..... II-287

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN  
KEUANGAN DAERAH ..... III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 ..... III-2

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..... III-5

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-16

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... III-16

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-19

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-19

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-25

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-32

BAB IV TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1

4.1. Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah ..... IV-1

4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	IV-2
4.3.	Penyelarasan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta dengan Nasional dan RKPD DIY Tahun 2017 .....	IV-7
4.4.	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta .....	IV-10
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
	Inspektorat Daerah.....	V-2
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	V-7
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	V-21
	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan.....	V-42
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	V-47
	Dinas Kebudayaan.....	V-55
	Dinas Pendidikan.....	V-59
	Dinas Kesehatan.....	V-66
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian .....	V-97
	Dinas Lingkungan Hidup .....	V-104
	Dinas Pariwisata .....	V-110
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak .....	V-118
	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan .....	V-122
	Dinas Sosial .....	V-130
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	V-135
	Satuan Polisi Pamong Praja.....	V-144
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	V-151
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	V-156
	Dinas Pertanian dan Pangan.....	V-170
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	V-175
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	V-179
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	V-184
	Dinas Perhubungan .....	V-191
	Dinas Kebakaran.....	V-199
	Dinas Pemuda dan Olah Raga.....	V-202
	Bagian Tata Pemerintahan.....	V-205
	Bagian Hukum.....	V-211
	Bagian Administrasi & Pengendalian Pembangunan .....	V-215
	Bagian Perekonomian, Pengembangan, Pendapatan Asli Daerah & Kerjasama Setda Kota Yogyakarta .....	V-218
	Bagian Layanan Pengadaan .....	V-223
	Bagian Umum .....	V-227
	Bagian Protokol .....	V-230
	Bagian Organisasi .....	V-233
	Sekretariat DPRD .....	V-239
	Kecamatan Tegalsrejo .....	V-244
	Kecamatan Jetis .....	V-256

Kecamatan Gondokusuman ..... V-263

Kecamatan Danurejan ..... V-272

Kecamatan Gedongtengen ..... V-283

Kecamatan Pakualaman ..... V-293

Kecamatan Ngampilan ..... V-303

Kecamatan Wirobrajan ..... V-312

Kecamatan Mantrijeron ..... V-321

Kecamatan Kraton..... V-328

Kecamatan Gondomanan ..... V-343

Kecamatan Mergangsan..... V-351

Kecamatan Umbulharjo ..... V-358

Kecamatan Kotagede..... V-373

Kesatuan Bangsa ..... V-379

BPBD..... V-382

RSUD..... V-385

**BAB VI    PENUTUP ..... VI-1**

**PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**BAB 1  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2017 diarahkan pada tema: : ***“Meningkatnya Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang sejahtera, mandiri, nyaman dan berbudaya”***.

1. **Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**  
Dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul dan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
2. **Berbudaya** dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan kearifan budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif
3. **Mandiri** dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.
4. **Nyaman** dimaknai sebagai kondisi di mana kualitas hidup masyarakat meningkat dengan kemampuan mengakses infrastruktur, makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja, dan ruang/taman hijau.
5. **Sejahtera** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator :
  - Pertumbuhan ekonomi,
  - Pengangguran,
  - Penduduk miskin,
  - Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan
  - Indeks Pengembangan Gender (IPG).

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
- 13) Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/09859 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017, dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017**

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

#### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- 2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2017;
- 3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun *'image'* Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Letak Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dai Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis, kota ini terletak antara 110°24'1"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 615 Rukun Warga (RW) dan 2.529 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63 Ha atau sebesar 1,94% luas Kota Yogyakarta. Berikut luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1  
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	Gedongkiwo	0,90	18	86
		Suryodiningratan	0,85	17	70
		Mantrijeron	0,86	20	75
			2,61	55	231
2.	Kraton	Patehan	0,40	10	44
		Panembahan	0,66	18	78
		Kadipaten	0,34	15	53
			1,40	43	175

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah RW	Jumlah RT
3.	Mergangsan	Brontokusuman	0,93	23	84
		Keparakan	0,53	13	58
		Wirogunan	0,85	24	76
			<b>2,31</b>	<b>60</b>	<b>218</b>
4.	Umbulharjo	Giwangan	1,26	13	42
		Sorosutan	1,68	17	67
		Pandean	1,38	13	51
		Warungboto	0,83	9	38
		Tahunan	0,78	11	48
		Muja-muju	1,53	12	55
		Semaki	0,66	10	34
			<b>8,12</b>	<b>85</b>	<b>335</b>
5.	Kotagede	Prenggan	0,99	13	57
		Purbayan	0,83	14	58
		Rejowinangun	1,25	13	49
			<b>3,07</b>	<b>40</b>	<b>164</b>
6.	Gondokusuman	Baciro	1,06	21	87
		Demangan	0,74	12	44
		Klitren	0,68	16	63
		Kotabaru	0,71	4	20
		Terban	0,80	12	58
			<b>3,99</b>	<b>65</b>	<b>272</b>
7.	Danurejan	Suryatmajan	0,28	15	45
		Tegalpanggung	0,35	16	66
		Bausasran	0,47	12	49
			<b>1,10</b>	<b>43</b>	<b>160</b>
8.	Pakualaman	Purwokinanti	0,33	10	47
		Gunungketur	0,30	9	36
			<b>0,63</b>	<b>19</b>	<b>83</b>
9.	Gondomanan	Prawirodirjan	0,67	18	61
		Ngupasan	0,45	13	49
			<b>1,12</b>	<b>31</b>	<b>110</b>
10.	Ngampilan	Notoprajan	0,37	8	50
		Ngampilan	0,45	13	70
			<b>0,82</b>	<b>21</b>	<b>120</b>
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan	0,44	10	51
		Wirobrajan	0,67	12	58
		Pakuncen	0,65	12	56
			<b>1,76</b>	<b>34</b>	<b>165</b>
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,46	22	87
		Sosromenduran	0,50	14	54
			<b>0,96</b>	<b>36</b>	<b>141</b>
13.	Jetis	Bumijo	0,58	13	56
		Gowongan	0,46	13	52
		Cokrodiningratan	0,66	11	59
			<b>1,70</b>	<b>37</b>	<b>167</b>
14.	Tegalrejo	Tegalrejo	0,82	12	46
		Bener	0,57	7	25
		Kricak	0,82	13	61

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah RW	Jumlah RT
		Karangwaru	0,70	14	56
			<b>2,91</b>	<b>46</b>	<b>188</b>
	Jumlah	<b>45</b>	<b>32,50</b>	<b>615</b>	<b>2.529</b>

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2014)

Secara administratif, KotaYogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa bagian Selatan.

### B. Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berikut ini merupakan kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2  
Kelas Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta (Ha)

No	Kecamatan	Luas Kemiringan Lahan (Ha)			
		0-2%	2-15%	15-40%	>40
1	Mantrijeron	244,43	12,18	4,38	0
2	Kraton	140,00	0	0	0
3	Mergangsan	105,05	25,94	0	0
4	Umbulharjo	764,54	45,04	1,66	0,73
5	Kotagede	277,80	23,26	2,52	3,94
6	Gondokusuman	328,58	67,76	2,66	0
7	Danurejan	75,86	27,64	5,94	0,56
8	Pakualaman	63,00	0	0	0
9	Gondomanan	105,92	6,08	0	0
10	Ngampilan	50,92	31,08	0	0
11	Wirobrajan	147,44	21,26	6,06	1,33
12	Gedongtengen	84,44	8,32	2,82	0,42
13	Jetis	148,32	20,74	0,48	0,46

No	Kecamatan	Luas Kemiringan Lahan (Ha)			
		0-2%	2-15%	15-40%	>40
14	Tegalrejo	254,66	24,02	8,82	3,50
Jumlah		2.890,38	313,32	35,34	10,94
Persentase (%)		88,92	9,63	1,07	0,33

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta sebagian besar memiliki kemiringan lahan 0-2% dengan persentase mencapai 88,92% dari luas wilayah. Sementara 9,63% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,07 berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,33% berada pada kemiringan di atas 40%. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam berada di bantaran sungai.

Tabel 2.3  
Kelas Ketinggian di Kota Yogyakarta (Ha)

No	Kecamatan	Luas Ketinggian (Ha)			Jumlah
		<100m	100-199m	>200m	
1	Mantrijeron	261	0	0	261
2	Kraton	140	0	0	140
3	Mergangsan	202	29	0	231
4	Umbulharjo	607	206	0	813
5	Kotagede	302	5	0	307
6	Gondokusuman	0	399	0	399
7	Danurejan	0	110	0	110
8	Pakualaman	0	63	0	63
9	Gondomanan	42	70	0	112
10	Ngampilan	31	51	0	82
11	Wirobrajan	72	103	0	175
12	Gedongtengen	0	96	0	96
13	Jetis	0	170	0	170
14	Tegalrejo	0	291	0	292
Jumlah		1.657	1.593	0	3.250

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2015)

Kondisi ketinggian wilayah di Kota Yogyakarta berada pada ketinggian kurang dari 200 mdpl. Kondisi ketinggiannya dapat dibagi menjadi dua kelas ketinggian, yaitu 1.657 Ha wilayah berada pada ketinggian <100 mdpl dan 1.593 Ha berada pada ketinggian 100-199 m dpl. Ketinggian <100 mdpl berada di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Ngampilan, Wirobrajan dan Gondomanan. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian 100-199 mdpl berada di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Jetis, Gedongtengen, dan Tegalrejo.

C. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi di Kota Yogyakarta dilihat dari suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan hari hujan. Pada tahun 2013, suhu udara di Kota Yogyakarta berada pada kisaran 18,4-34,2°C, sedangkan kelembaban udara mencapai 44-98%. Sementara kondisi tekanan udara mencapai 1.012,9-1.017,2 Mbs. Untuk kecepatan angin berada pada kisaran 2-9 Knot. Curah hujan tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Januari yang mencapai 384 Mm dan terendah 0 Mm pada bulan Juli hingga September. Begitu pula dengan kondisi hari hujan, tertinggi ada di bulan Januari yang mencapai 16 hari hujan.

Tabel 2.4  
Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2014

No	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (Mbs)	Curah Hujan (Mm)	Hari Hujan
1	Januari	23,1-30,5	54-100	996.5	254	16
2	Februari	23,1-31,3	56-100	995.6	311	13
3	Maret	23,5-32,1	75-98	996.0	200	14
4	April	23,6-31,6	60-98	996.6	184	12
5	Mei	23,5-32,6	52-98	996.5	62	8
6	Juni	23,0-32,1	50-98	996.2	18	6
7	Juli	22,1-30,2	59-98	998.2	33	0
8	Agustus	21,1-31,2	42-87	998.9	0	0
9	September	21,7-31,3	43-87	999.7	0	0
10	Oktober	23,5-32,7	37-93	998.8	0	4
11	November	23,8-31,8	50-100	997.3	304	8
12	Desember	23,6-30,2	60-100	996.2	289	9

Sumber : Kota Yogyakarta dalam angka 2015

D. Kondisi Geologi

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi mempunyai jenis tanah regosol atau vulkanis muda. Formasi Geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen old andesit. Sebagian besar tanahnya adalah regosol. Terdapat tiga sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota.

E. Kondisi Hidrologi

Kota Yogyakarta dialiri oleh 3 sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Daerah Alirang Sungai (DAS) yang

ada di Kota Yogyakarta adalah DAS Opak Oyo. DAS Opak Oyo terdiri dari 3 Sub DAS antara lain Sub DAS Opak, Sub DAS Oyo I, dan Sub DAS Winongo.

F. Penggunaan Lahan

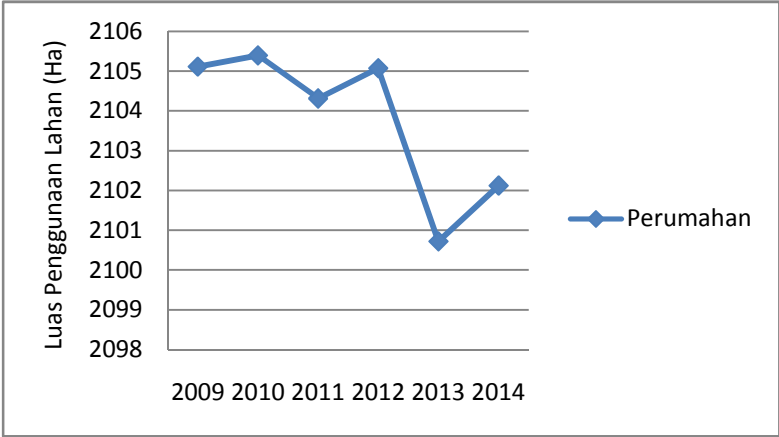
Penggunaan lahan dominan di Kota Yogyakarta pada tahun 2009-2014 adalah lahan perumahan. Namun jika dilihat dari grafiknya, luas lahan perumahan menunjukkan kecenderungan menurun. Luas lahan perumahan dari 2104,36 Ha pada tahun 2009, cenderung menurun tapi naik lagi menjadi 2102,12 Ha tahun 2014. Guna lahan pertanian mengalami penurunan, dari 124,17 Ha di tahun 2009 menjadi 105,6 Ha di tahun 2014.

Tabel 2.5  
Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta  
Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2009-2014

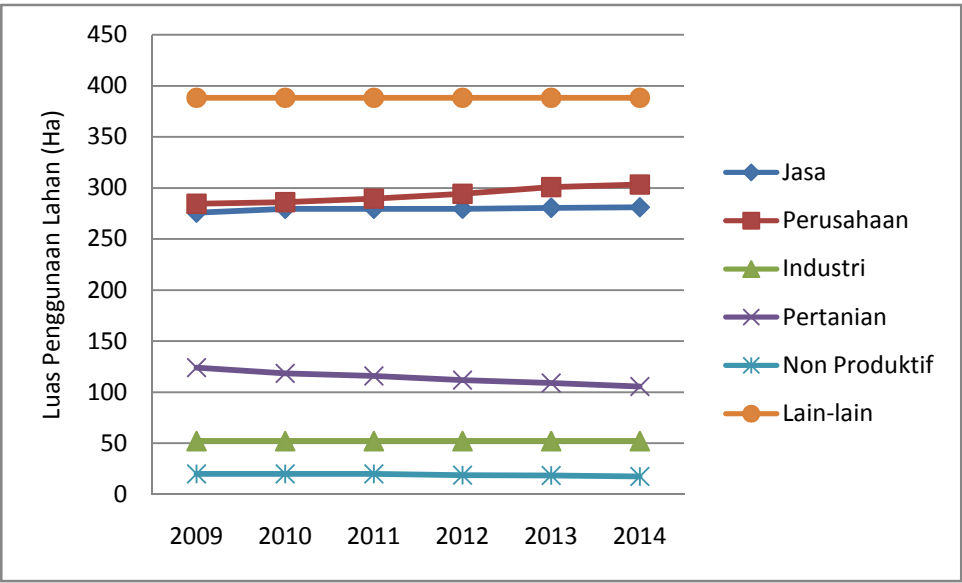
No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Ha)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Perumahan	2105,11	2105,39	2104,31	2105,07	2100,72	2102,12
2.	Jasa	275,71	279,37	279,64	279,59	280,57	281,06
3.	Perusahaan	284,49	286,14	289,58	294,19	300,73	303,25
4.	Industri	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23
5.	Pertanian	124,17	118,59	115,96	111,81	109,15	105,60
6.	Non Produktif	20,11	20,11	20,11	18,94	18,43	17,59
7.	Lain-lain	388,12	388,16	388,16	388,16	388,16	388,16
Jumlah		3250	3250	3250	3250	3250	3250

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2010-2015)

Sementara untuk penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalah sektor jasa seperti kegiatan perdagangan. Peningkatan dari luas guna lahan 275,71 Ha pada tahun 2009, menjadi 281,06 Ha pada tahun 2014. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa. Berikut grafik perkembangan guna lahan di Kota Yogyakarta tahun 2009-2014.



Gambar 2.1  
Grafik Luas Penggunaan Lahan Perumahan  
Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014  
Sumber: Hasil Olahan, 2016



**Gambar 2.2**  
**Grafik Luas Penggunaan Lahan berdasarkan Status Peruntukan Lahan**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

**G. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 antara lain:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
  - a. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi :
    - 1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan.
    - 2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.
  - b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi :
    - 1) Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan Sistem Transportasi
  - a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi :
    - 1) Jaringan arteri primer  
Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yang terdiri atas Jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan.
    - 2) Jaringan jalan arteri sekunder
      - a) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas :

- i. Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo.
    - ii. Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
  - b) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yang terdiri atas :
    - i. Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
- 3) Jembatan
 

Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.
- 3. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya
  - a. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :
    - 1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
    - 2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :
    - 1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
    - 2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
    - 3) Jaringan pelayanan *feeder*, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - c. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), meliputi :
    - 1) Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - d. Jaringan persampahan, meliputi :
    - 1) Penambahan lahan TPA Piyungan, yang berlokasi di Kabupaten Bantul.
    - 2) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - e. Air limbah, meliputi :
    - 1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
    - 2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

- 3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
- f. Air Minum, melalui :
- 1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - 2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - 3) Pembelian truk tangki air minum.

## H. Wilayah Rawan Bencana

Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mempunyai kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi alam seperti geografis, geologis, dan iklim di Kota Yogyakarta yang dapat menjadi ancaman bencana. Beberapa ancaman bencana tersebut antara lain:

### a. Gempa Bumi (Gempa Tektonik)

Di bawah bumi Kota Yogyakarta dan sekitarnya terdapat gerakan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga mengakibatkan gempa bumi. Seperti pada tanggal 27 Mei 2006 Kota Yogyakarta diguncang gempa dengan kekuatan 5,8-6,2 SR (BMG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) yang disebabkan adanya gerakan sesar aktif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut sebagai Sesar Kali Opak. Pusat gempa diperkirakan dipinggir pantai selatan Yogyakarta atau bagian selatan Kabupaten Bantul dengan kedalaman 17 km -33 km di bawah permukaan tanah. Gempa tersebut dirasakan tidak hanya di wilayah Provinsi DIV tetapi juga beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan. Akibat gempa tersebut, beberapa wilayah khususnya di Kota Yogyakarta bagian Selatan yaitu Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantriweron, dan Gondokusuman mengalami kerusakan yang cukup parah baik kerusakan bangunan maupun infrastruktur lainnya.

### b. Letusan Gunung Merapi (Gempa Vulkanik)

Kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman menjadi faktor kerentanan penyebab bencana yang diklasifikasikan menjadi bencana ikutan. Karena dampak gempa letusan gunung tersebut bisa dirasakan dan menimbulkan korban di Kota Yogyakarta. Gunung Merapi merupakan gunung api aktif, bahkan teraktif di dunia karena periodisitas letusannya relatif pendek (3-7 tahun). Dalam kegiatannya, Gunung Merapi menunjukkan terjadinya guguran kubah lava yang terjadi setiap hari. Jumlah dan letusannya bertambah sesuai tingkat kegiatannya. Volume guguran

kubah lava biasa disebut dengan “wedhus gembel” atau awan panas. Pengalaman letusan 6 periode waktu yaitu tahun 1994, 1997, 1998, 2001, 2006, dan 2010 telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia.

Bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung (awan panas). Sedangkan bahaya sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan (lahar, kerusakan lahan pertanian/rumah). Tingkat bahaya dari suatu gunung api sangat tergantung dari kerapatan dari suatu letusan dan kepadatan penduduk yang bermukim di sekitar gunung api tersebut. Sehingga ancaman letusan Gunung Merapi menjadi konsekuensi masyarakat Kota Yogyakarta untuk tetap waspada akan bahaya Merapi.

c. Banjir

Banjir terjadi karena faktor alam maupun ulah tangan manusia. Faktor alam yang menjadi penyebab contohnya curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air sehingga luncuran air sangat deras, selain itu kurangnya daya serap tanah disebabkan banyaknya penebangan pohon. Sedangkan faktor ulah manusia contohnya banyak masyarakat yang masih buang sampah sembarangan di saluran air maupun sungai, selain itu juga bisa disebabkan kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya, bangunan-bangunan yang tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang.

Sementara itu, penyebab banjir di Kota Yogyakarta pada umumnya karena buruknya saluran drainase di beberapa lokasi. Menurut data survei Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ada 32 titik/lokasi genangan air terjadi di beberapa jalan kota dan daerah permukiman. Analisisnya mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo serta Sungai Belik yang mengalir di tengah kota, hal tersebut menjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, setiap terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu cukup lama, bisa dipastikan permukiman di bantaran sungai dilanda banjir. Contohnya yang terjadi pada 22 April 2015, telah terjadi banjir mencapai tinggi 1,5 meter di Kampung Bintaran Kidul dan Bintaran Lor yang menyebabkan sedikitnya 200 keluarga mengungsi akibat dari luapan dari Sungai Code yang disebabkan hujan deras dengan waktu yang cukup lama.

Selain banjir karena hujan deras, sejak Gunung Merapi meletus tahun 2010, Sungai Code sebagai sungai yang berhulu di Sungai Boyong sudah beberapa kali dialiri lahar dingin jika terjadi hujan deras di puncak merapi.

Banjir lahar dingin juga kerap membanjiri permukiman dibantaran sungai jika hujan di puncak Merapi terjadi cukup deras dalam waktu yang lama.

d. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kota Yogyakarta terjadi pada titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasa berada pada dinding sungai. Mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo. Ketiga sungai tersebut ditumbuhi kegiatan-kegiatan perumahan, sehingga dibutuhkan kewaspadaan masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi potensi bahaya tanah longsor. Terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di Sungai Belik dan Sungai Gajah Wong pada tanggal 13 Desember 2006 dikarenakan oleh kondisi tanah yang labil, kelereng yang curam, beban peruntukan lahan dan hujan lebat.

e. Kebakaran

Bencana kebakaran terjadi karena faktor alam berupa cuaca yang kering dan ulah manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Bencana kebakaran di Kota Yogyakarta terjadi umumnya di lokasi-lokasi permukiman yang padat penduduk. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 49 kejadian, sedangkan di tahun 2014 tercatat ada 55 kejadian. Penyebab kebakaran lebih banyak dikarenakan kelalaian manusia, sedangkan penyebab lainnya dikarenakan faktor teknis/listrik. Titik rawan kebakaran terjadi pada bangunan-bangunan perumahan warga dan bangunan industri, karena pada lokasi-lokasi tersebut mobilitas aktivitas manusia lebih tinggi dan tingkat kelalaiannya juga lebih tinggi.

f. Angin Puting Beliung

Angin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan, sehingga terbentuk angin disertai putaran yang kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Pada hari Minggu, 18 Februari 2007 telah terjadi angin puting beliung dengan kategori kecepatan angin antara Strong Gale dengan kecepatan 74-85 km/jam dan Storm dengan kecepatan 87-100 km/jam yang melanda Kecamatan Gondokusuman, Danurejan, Umbulharjo dan Pakualaman dengan radius bencana sekitar 1 km mengalami kerusakan yang cukup parah. Bencana tersebut telah mengakibatkan 1.182 orang mengalami luka ringan dan menjalani rawat jalan, sedangkan sebanyak 51 orang harus dibawa ke rumah sakit dengan rincian 44 orang menjalani rawat jalan dan 7 orang harus rawat inap. Selain itu, angin puting beliung juga merusak 1.255 rumah penduduk.

g. **Epidemi, Wabah Penyakit, dan Kejadian Luar Biasa**

Epidemi, wabah penyakit dan kejadian luar biasa merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar, epidemi, wabah penyakit maupun kejadian luar biasa dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita dan korban jiwa. Beberapa penyebaran penyakit dengan status kejadian luar biasa yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta dan sampai sekarang masih terus diwaspadai antara lain demam berdarah, campak, diare dan keracunan makanan.

**2.1.1.2. Aspek Demografi**

**A. Struktur Penduduk**

**1. Perkembangan Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti kualitas pelayanan publik dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 mencapai 413.936 jiwa yang terdiri dari 202.296 laki-laki dan 211.640 perempuan. Tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah penduduk 0,02% dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 406.660 jiwa. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2009 sampai 2014, jumlah penduduk tertinggi ada pada tahun 2010 yang mencapai 457.568 jiwa, sedangkan yang terendah ada di tahun 2013. Berikut ini data perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2009-2014.

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
1.	2009	227.079	228.867	455.946	0,03
2.	2010	227.766	229.902	457.568	0,00
3.	2011	217.378	222.765	440.143	-0,04
4.	2012	210.468	217.123	427.591	-0,03
5.	2013	198.892	207.768	406.660	-0,05
6.	2014	202.296	211.640	413.936	0,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

2. **Kepadatan**

Kepadatan penduduk dihitung untuk mengetahui rata-rata jumlah penduduk dalam 1 km. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2009-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009, kepadatan penduduk mencapai 14.029 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian mengalami peningkatan hingga 14.079 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2010. Namun kembali mengalami penurunan hingga 12.513 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 12.736 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.7**  
**Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014**

No	Tahun	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	2009	32,5	455.946	14.029
2.	2010	32,5	457.568	14.079
3.	2011	32,5	440.143	13.543
4.	2012	32,5	427.591	13.157
5.	2013	32,5	406.660	12.513
6.	2014	32,5	413.936	12.736

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015*

3. **Distribusi (kepadatan penduduk per kecamatan)**

Distribusi penduduk di Kota Yogyakarta tersebar ke dalam 14 kecamatan. Pada tahun 2014, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Ngampilan dengan kepadatan mencapai 22.977 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk di Kecamatan Ngampilan telah mengalami banyak penurunan, kepadatan penduduk tahun 2009 mencapai 26.343 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Umbulharjo dengan kepadatan penduduk hanya 8.329 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan ini sudah mengalami fluktuasi, pada tahun 2009 kepadatan penduduk mencapai 3.457 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut data kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Yogyakarta tahun 2009-2014.

Tabel 2.8  
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tegalrejo	2,91	14.017	14.133	13.800	13.222	12.481	12.703
2	Jetis	1,70	18.755	18.641	17.809	16.810	16.318	16.435
3	Gondokusuman	3,99	13.169	13.179	11.922	11.638	10.607	10.775
4	Danurejan	1,10	21.922	22.115	21.488	21.202	19.191	19.580
5	Gedongtengen	0,96	24.146	24.147	23.001	22.394	21.644	21.935
6	Ngampilan	0,82	26.343	26.210	24.771	23.268	22.706	22.977
7	Wirobrajan	1,76	17.337	17.289	16.605	15.995	15.468	15.773
8	Mantrijeron	2,61	14.673	14.698	14.402	14.431	13.392	13.647
9	Kraton	1,40	17.576	17.716	17.243	16.599	15.824	16.073
10	Gondomanan	1,12	15.285	15.229	15.036	14.472	13.563	13.758
11	Pakualaman	0,63	19.556	19.171	18.667	17.919	17.113	17.219
12	Mergangsan	2,31	16.061	15.965	14.660	14.244	13.639	13.859
13	Umbulharjo	8,12	8.457	8.576	8.532	8.381	8.121	8.329
14	Kotagede	3,07	10.815	11.082	10.884	10.650	10.447	10.689
Kota Yogyakarta		32,5	13.360	14.029	14.082	13.543	13.157	12.513

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-besa. Berikut komposisi penduduk menurut usia tahun 2014.

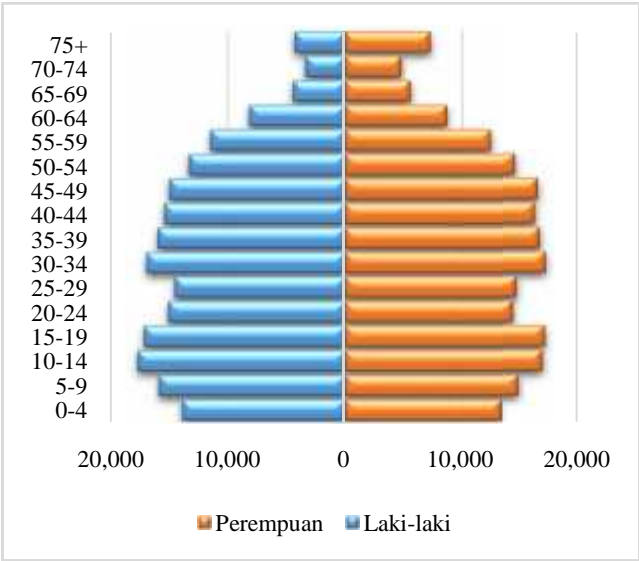
Tabel 2.9  
Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	13.872	13.337	27.209
2.	5-9	15.841	14.965	30.806
3.	10-14	17.660	16.899	34.559
4.	15-19	17.108	17.092	34.200
5.	20-24	15.045	14.516	29.561
6.	25-29	14.501	14.812	29.313
7.	30-34	16.894	17.159	34.053

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
8.	35-39	15.958	16.695	32.653
9.	40-44	15.390	16.265	31.655
10.	45-49	14.968	16.509	31.477
11.	50-54	13.309	14.672	27.981
12.	55-59	11.462	12.405	23.867
13.	60-64	8.165	8.693	16.858
14.	65-69	4.453	5.574	10.027
15.	70-74	3.374	4.786	8.160
16.	75+	4.296	7.261	11.557

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

Berdasarkan data yang ada, penduduk dengan kelompok usia 10-14 tahun dan 15-19 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi di Kota Yogyakarta. Jumlah menurut kelompok usia 10-14 tahun mencapai 34.559 jiwa dan usia 15-19 tahun mencapai 34.200 jiwa. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah 41,94%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.



**Gambar 2.3**  
**Grafik Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014**  
 Sumber: Hasil Analisis, 2014

B. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Yogyakarta, mengalami kenaikan maupun penurunan, baik di migrasi masuk maupun migrasi keluar. Pada tahun 2014, terdapat 9.293 jiwa yang masuk ke Kota Yogyakarta, dan 8.798 jiwa meninggalkan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.10  
Migrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2014

No	Jenis Mutasi	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Migrasi Masuk	9.341	10.591	5.318	5.165	9.293
2.	Migrasi Keluar	10.258	9.231	8.003	8.814	8.798

Sumber:  
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015  
2) \* Basis Data BAPPEDA Kota Yogyakarta 2009 dan 2012

C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang silakukan perusahaan/usaha.lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah.

Tabel 2.11  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Pekerjaan	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Agriculture (Pertanian)	Jiwa	698	696	1.062	756	471	1.314
2	Manufacture (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, air dan Bangunan/ Kontruksi)	Jiwa	10.153	10.153	55.881	30.897	31.753	40.462
3	Service (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan)	Jiwa	174.804	174.804	154.450	169.987	162.512	174.212
Jumlah		Jiwa	185.655	185.653	211.393	201.640	194.736	216.168

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2007-2015

Berdasarkan data di atas, lapangan pekerjaan bidang perdagangan, jasa dan keuangan mendominasi jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2009 hingga 2014. Pada tahun 2008, jumlah penduduk yang bekerja pada

bidang pelayanan ada 185.655 jiwa, jumlah ini menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 216.168 jiwa pada tahun 2014. Begitu pula pada sektor pertanian, juga mengalami kenaikan, dari 698 jiwa pada tahun 2009 menjadi 1.314 jiwa pada tahun 2014.

**D. Penduduk Menurut Agama**

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan data yang ada, terdapat 7 (tujuh) agama yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diantaranya Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan. Pada tahun 2014, mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama islam, yaitu sebesar 82,51% penduduk, kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sebesar 10,49% dan pemeluk Kristen sebesar 6,52%. Berikut data jumlah penduduk menurut agama di Kota Yogyakarta Tahun 2014.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2014**

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Islam	168.020	173.528	341.548	82,512
2.	Kristen	12.782	14.213	26.995	6,522
3.	Katholik	20.513	22.911	43.424	10,491
4.	Hindu	299	266	565	0,136
5.	Budha	656	706	1.362	0,329
6.	Khonghucu	16	10	26	0,006
7.	Kepercayaan	10	6	16	0,004
Jumlah		202.296	211.640	413.936	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015*

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pertumbuhan PDRB

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik di masa mendatang.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah sebesar 21.312.143,5 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,30% atau meningkat sebesar 1,07 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2010-2014, PDRB Kota Yogyakarta secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,30%. Namun, pertumbuhan PDRB di tahun 2014 tidak sebesar pertumbuhan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan yang positif ini dapat menjadi sebuah tanda baik bagi perekonomian Kota Yogyakarta.

Tabel 2.13  
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010  
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.167,9	35.476,3	35.709,1	36.100,1	35.733,8
B	Pertambangan dan Penggalian	790,9	831,2	837,1	839,0	850,0
C	Industri Pengolahan	2.545.388,3	2.708.581,4	2.630.976,5	2.813.952,6	2.943.834,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38.593,2	40.841,2	45.056,6	47.599,0	49.150,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.157,8	29.241,9	30.166,8	30.712,0	31.963,4
F	Konstruksi	1.392.993,6	1.458.032,3	1.526.571,8	1.600.097,5	1.674.189,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.215.273,8	1.247.376,9	1.326.260,7	1.407.238,6	1.468.894,0
H	Transportasi dan Pergudangan	768.351,3	771.849,8	785.335,1	815.841,3	838.086,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.921.791,3	2.036.971,2	2.183.269,6	2.320.365,5	2.450.064,8
J	Informasi dan Komunikasi	2.212.871,2	2.393.738,0	2.654.507,8	2.779.291,4	2.900.953,3

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2010	2011	2012	2013*	2014**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	940.635,8	1.034.826,8	1.077.853,6	1.196.258,9	1.275.249,9
L	Real Estate	1.586.689,1	1.659.929,6	1.782.655,3	1.848.546,3	1.973.548,8
M,N	Jasa Perusahaan	205.918,4	218.718,3	238.288,9	245.485,7	259.521,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.539.693,0	1.612.448,2	1.729.732,9	1.813.729,6	1.921.203,7
P	Jasa Pendidikan	1.658.807,9	1.785.435,5	1.889.249,1	1.960.166,2	2.088.605,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	628.473,6	667.109,6	721.038,9	766.206,6	818.611,5
S,T,U	Jasa Lainnya	481.556,9	504.681,6	531.565,1	557.127,4	581.682,5
<b>PDRB Kota Yogyakarta ADHK</b>		17.202.154,0	18.206.089,8	19.189.074,9	20.239.557,7	21.312.143,5
<b>PDRB Provinsi DIY ADHK</b>		64.678.087,8	68.049.824,2	71.702.449,2	75.637.007,5	79.557.248,0

Keterangan:  
 \*) sementara  
 \*\*) sangat sementara  
 Sumber:  
 1. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015)*  
 2. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015 (BPS DIY, 2015)*

Berdasarkan nilai PDRB ADHK tahun 2010, sektor industri pengolahan; informasi dan komunikasi; serta penyediaan akomodadasi dan makan minum merupakan sektor-sektor dengan nilai PDRB yang relatif dominan dibandingkan dengan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakarta untuk rentang waktu tahun 2010-2014. Nilai PDRB yang dihasilkan dari sektor Industri Pengolahan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 2,95 triliun rupiah atau sebesar 13,81% dari total PDRB yang ada. Meskipun begitu, nilai PDRB dari sektor ini mengalami pergeseran negatif terbesar dari tahun 2010-2014. Sektor komunikasi menyumbang PDRB sebesar 2,90 triliun rupiah atau sebesar 13,61%. Sedangkan sektor Penyediaan Akomodadasi dan Makan Minum menghasilkan PDRB sebesar 2,45 triliun rupiah atau 11,5% dari total PDRB. Kedua sektor tersebut menunjukkan pergeseran yang positif dari tahun 2010-2014. Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pergeseran positif yang paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB tersebut, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 didominasi oleh sektor-sektor tersier. Sementara untuk sektor primer memiliki nilai kontribusi yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 36,58 milyar atau 0,17% dari total PDRB pada tahun 2014. Sektor primer ini terus memberikan kontribusi menurun dari tahun 2010-2014. Hal ini menjadi wajar apabila dikaitkan dengan karakterinstik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 2.14**  
**Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

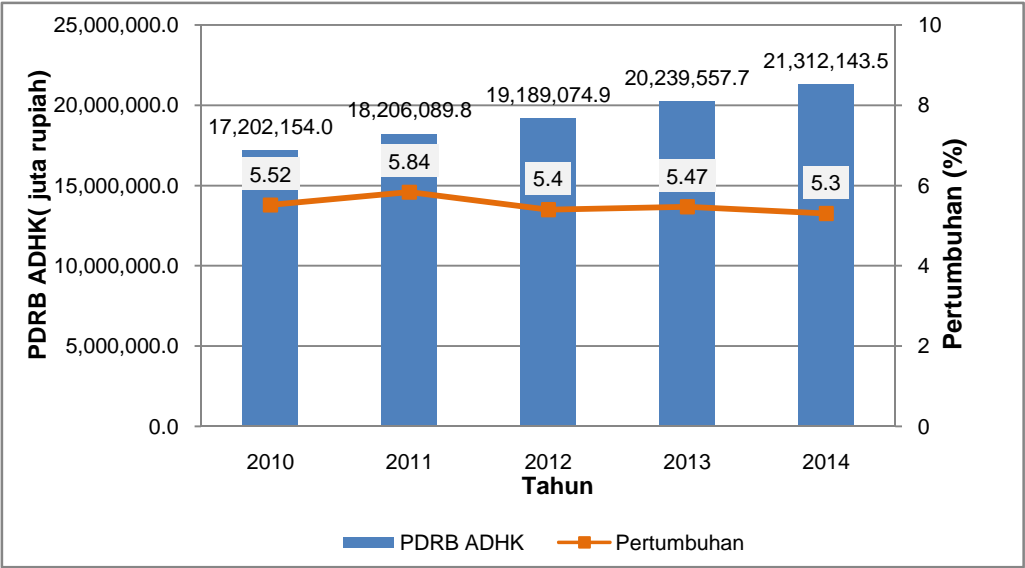
No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)				Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%)	Pertumbuhan PDRB selama 5 tahun (%)
		2011	2012	2013*	2014**		
A	Pertanian, Kehutanan danPerikanan	0,88	0,66	1,09	-1,01	0,40	0,40
B	Pertambangan dan Penggalian	5,10	0,71	0,23	1,31	1,84	1,82
C	Industri Pengolahan	6,41	-2,87	6,95	4,62	3,78	3,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	10,32	5,64	3,26	6,26	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	3,16	1,81	4,07	2,33	2,32
F	Konstruksi	4,67	4,70	4,82	4,63	4,70	4,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,64	6,32	6,11	4,38	4,86	4,85
H	Transportasi dan Pergudangan	0,46	1,75	3,88	2,73	2,20	2,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,99	7,18	6,28	5,59	6,26	6,26
J	Informasi dan Komunikasi	8,17	10,89	4,70	4,38	7,04	7,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,01	4,16	10,99	6,60	7,94	7,91
L	Real Estate	4,62	7,39	3,70	6,76	5,62	5,61
M,N	Jasa Perusahaan	6,22	8,95	3,02	5,72	5,98	5,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,73	7,27	4,86	5,93	5,70	5,69
P	Jasa Pendiidkan	7,63	5,81	3,75	6,55	5,94	5,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,15	8,08	6,26	6,84	6,83	6,83
S,T,U	Jasa Lainnya	4,80	5,33	4,81	4,41	4,84	4,84
Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta		5,84	5,40	5,47	5,30	5,50	5,50
Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY		5,21	5,37	5,49	5,18	5,21	5,31

Keterangan:  
 \*) sementara  
 \*\*) sangat sementara

- Sumber:
1. ProdukDomestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015, diolah)
  2. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015 (BPS DIY, 2015, diolah)

Sementara itu, berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan adalah satu-satunya sektor yang memiliki pertumbuhan negatif di tahun 2014. Sejak tahun 2010-2014, pertumbuhan sektor ini cenderung lambat yang pada akhirnya mengalami penurunan nilai PDRB pada tahun 2014. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya konversi

lahan pertanian/kehutanan /perikanan menjadi lahan terbangun untuk kegiatan ekonomi lain sehingga luas lahan dan produktivitas sektor pertanian/kehutanan/perikanan tersebut mengalami penurunan.



**Gambar 2.4**  
**Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 Berdasarkan PDRB ADHK 2010**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Meskipun ditinjau dari kontribusinya, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2010 hingga 2014, namun pertumbuhannya cenderung dinamis, bahkan pada tahun 2012, pertumbuhan sektor industri pengolahan bernilai negatif atau mengalami penurunan dari tahun 2011. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang rata-rata pertumbuhannya mendapai 7,94 setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2014 menyumbang sekitar 26,79% dari PDRB Provinsi DIY, sedangkan 73,21% sisanya disumbang oleh empat kabupaten lainnya di DIY. Pertumbuhan rata-rata nilai PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 adalah sebesar sebesar 5,50%. Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta tersebut lebih pesat bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi DIY, yaitu sebesar 5,21 setiap tahunnya.

**2. Laju Inflasi Kota Yogyakarta**

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh

penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Pada periode tahun 2011-2014, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,19% dengan tren fluktuatif dan kecenderungan meningkat. Inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalan dengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2011.

**Tabel 2.15**  
**Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2010-2015**

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Bahan Makanan	%	1,82	8,10	12,31	7,70	4,95	28,42
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	7,07	6,90	8,15	2,95	5,18	-7,48
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	3,01	2,99	5,18	8,92	4,26	9,07
4	Sandang	%	9,40	3,56	0,00	3,61	6,22	-9,81
5	Kesehatan	%	5,64	1,93	3,08	5,49	4,65	-4,71
6	Pendidikan, Rekreasidan Olahraga	%	1,73	1,43	3,17	2,37	1,13	-10,10
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	2,40	1,30	10,45	9,36	1,53	10,64
<b>Inflasi Kota Yogyakarta</b>		<b>%</b>	<b>3,88</b>	<b>4,31</b>	<b>7,32</b>	<b>6,59</b>	<b>3,91</b>	<b>0,19</b>
<b>Inflasi Nasional</b>		<b>%</b>	<b>3,79</b>	<b>4,30</b>	<b>8,38</b>	<b>8,36</b>	<b>4,89</b>	<b>6,58</b>
<b>Inflasi Jawa Tengah</b>		<b>%</b>	<b>2,68</b>	<b>4,24</b>	<b>7,99</b>	<b>8,22</b>	<b>4,02</b>	<b>10,67</b>

Sumber : Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2011, 2014, dan November 2015 (Bank Indonesia 2013, 2014, 2015)

Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2011-2015, maka didapatkan kesimpulan bahwa rerata kelompok pengeluaran bahan makanan mengalami pertumbuhan rata-rata inflasi tertinggi, yaitu sebesar 28,42%/tahun. Meskipun demikian, penyumbang nilai inflasi tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda. Kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang nilai inflasi terbesar pada tahun 2012 dan 2013. Kelompok pengeluaran sandang adalah penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 dan 2015. Sedangkan pada tahun 2014, penyumbang nilai

inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB per kapita Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2010-2014 menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,21%/tahun. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kota Yogyakarta adalah sebesar 44,17 juta rupiah dan meningkat menjadi 60,57 juta rupiah pada tahun 2014.

Tabel 2.16  
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Kota Yogyakarta Tahun2010-2014

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2010	2011	2012	2013	2014	
A	Pertanian, Kehutanan danPerikanan	0,0903	0,096	0,1008	0,1076	0,1088	4,77
B	Pertambangan dan Penggalian	0,002	0,0022	0,0022	0,0023	0,0025	5,74
C	Industri Pengolahan	6,5363	7,2773	7,1065	7,8542	8,5944	7,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0991	0,0932	0,0916	0,0867	0,0892	-2,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0749	0,0776	0,0804	0,0859	0,0967	6,59
F	Konstruksi	3,5771	3,9161	4,2365	4,613	4,9222	8,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,1207	3,3515	3,6849	4,0285	4,3617	8,73
H	Transportasi dan Pergudangan	1,9731	2,0168	2,0755	2,2309	2,4812	5,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,935	5,573	6,1551	7,0553	7,7936	12,10
J	Informasi dan Komunikasi	5,6825	6,0959	6,5029	6,6017	6,562	3,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,4155	2,8158	3,1101	3,5916	3,9744	13,26
L	Real Estate	4,0745	4,3883	4,8535	5,1597	5,6537	8,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,5288	0,5841	0,6165	0,6123	0,6637	5,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,9538	4,2973	4,8146	5,366	5,9089	10,57
P	Jasa Pendiidkan	4,2597	4,6937	4,8761	5,0129	5,5227	6,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,6139	1,8124	1,9503	2,0645	2,2173	8,26

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2010	2011	2012	2013	2014	
S,T,U	Jasa Lainnya	1,2366	1,3076	1,3919	1,4967	1,6144	6,89
<b>PDRB per Kapita Kota Yogyakarta ADHK</b>		<b>44,174</b>	<b>48,399</b>	<b>51,650</b>	<b>55,970</b>	<b>60,567</b>	<b>8,21</b>
<b>PDRB per Kapita Provinsi DIY ADHK</b>		<b>18,653</b>	<b>20,333</b>	<b>21,745</b>	<b>23,624</b>	<b>25,693</b>	<b>8,33</b>

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut lapangan Usaha 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015)

Apabila dibandingkan dengan DIY, besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta jauh lebih besar. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta mencapai 2 kali lipat lebih dari PDRB per kapita DIY yang hanya sebesar 25,70 juta rupiah. Meskipun demikian, pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi DIY sedikit lebih besar dibandingkan Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 8,33%/tahun. Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Provinsi DIY disebabkan karena karakteristik wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya juga jauh lebih beragam dan kompleks. Sedangkan PDRB per kapita Provinsi DIY dibentuk oleh kelima kabupaten yang pertumbuhan ekonomi keempat kabupatennya tidak semuanya lebih baik dari Kota Yogyakarta.

#### 4. Indeks Gini

Dari sudut pandang ekonomi, ketimpangan perekonomian penduduk dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetil:

1. Indeks Gini < 3 = Ketimpangan rendah
2. 3=< Indeks Gini <=5 = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini >5 = Ketimpangan tinggi

Pada tahun 2007, Gini Rasio Kota Yogyakarta adalah sebesar 0,29 lalu meningkat menjadi 0,437 pada tahun 2014. Namun yang perlu menjadi catatan adalah perhitungan gini rasio pada tahun 2007 hingga 2010 sedikit berbeda dengan tahun-tahun setelahnya sehingga sulit untuk dijadikan dasar perbandingan. Oleh karena itu, analisis tren perkembangan dilakukan mulai

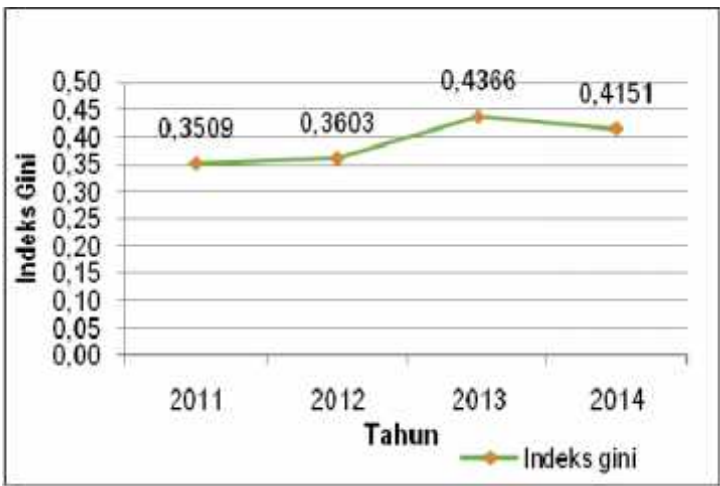
tahun 2011. Perkembangan Indeks Gini pada rentang tahun 2011-2013 perkembangan negatif dengan terus bertambahnya nilai gini rasio. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan gap/kesenjangan yang meluas dalam perekonomian penduduk di Kota Yogyakarta yang harus diperhatikan.

**Tabel 2.17**  
**Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013**

No	Indikator	2007*	2008*	2009*	2010*	2011	2012	2013	2014
1	Gini Rasio	0,290	0,280	0,277	0,2717	0,3509	0,3603	0,4366	0.4151
2	Kriteria Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : *Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2011, 2012 dan 2013, BPS Kota Yogyakarta, 2015*  
Keterangan: (\*) *perhitungan data menggunakan klasifikasi data dasar yang berbeda, (BPS Kota Yogyakarta)*

Secara umum, indeks gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2011-2014 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,37%/tahun. Semakin meningkatnya indeks gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa semakin terjadi ketimpangan pendapatan penduduk, dimana peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah. Meskipun demikian, kategori ketimpangan pendapatan Kota Yogyakarta masih tergolong dalam kategori moderat.



**Gambar 2.5**  
**Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

5. **Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Selain Indeks Gini, terdapat indikator lain yang digunakan untuk melihat gambaran ketimpangan pendapatan penduduk, indikator tersebut adalah pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Dalam versi Bank Dunia, pendapatan penduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok

40% berpendapatan terendah, 40% berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1. Ketimpangan rendah → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan
- 2. Ketimpangan moderat → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12-17% jumlah pendapatan
- 3. Ketimpangan tinggi → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan.

Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai apabila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menikmati lebih dari sama dengan 17% dari total pendapatan yang ada.

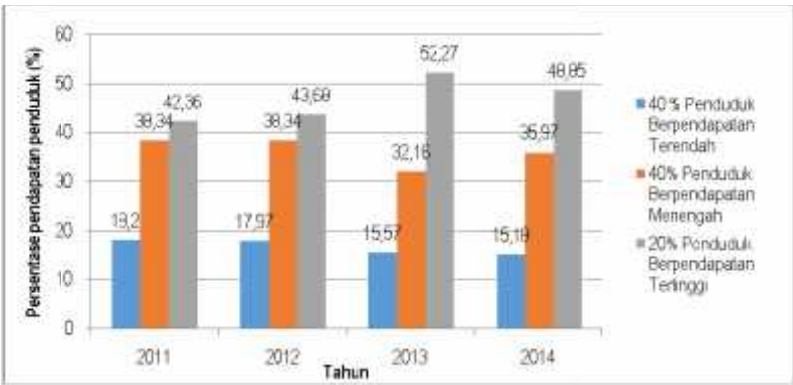
**Tabel 2.18**  
**Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

No	Kelompok Penduduk	Persentase Pendapatan (%)				Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		2011	2012	2013	2014	
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	18,2	17,97	15,57	15,18	-5,71
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	38,34	38,34	32,16	35,97	-1,42
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	42,36	43,68	52,27	48,85	5,41
Kriteria Ketimpangan		Rendah	Rendah	Moderat	Moderat	

Sumber : Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013, dan 2014  
(BPS Kota Yogyakarta, 2013, 2014, 2015 diolah)

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memiliki persentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata adalah -5,71%/tahun. Pada tahun 2011 dan 2012, persentase pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah ada pada kategori ketimpangan rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan mereka masih wajar dan belum menunjukkan ketimpangan dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun, pada tahun 2013 persentase tersebut menurun menjadi 15,57%. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada tahun 2014 menjadi 15,18%. Pada kedua

tahun tersebut persentase pendapatan penduduk dengan penghasilan 40% terbawah termasuk dalam kategori ketimpangan moderat.



**Gambar 2.6**  
**Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2011-2014**

*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan antara penduduk dengan pendapatan 40% terbawah dengan penduduk yang berpendapatan 20% teratas tidak sebanding, dimana pertumbuhan penduduk dengan penghasilan 20% teratas lebih cepat. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, hal ini patut menjadi perhatian karena besarnya perbedaan pendapatan oleh kelompok-kelompok penduduk yang ada mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang semakin besar.

**6. Indeks Ketimpangan Williamson**

Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada data PDRB per kapita masing-masing daerah dan jumlah penduduknya. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a.  $IW < 0,4$  artinya tingkat ketimpangan rendah.
- b.  $0,4 < IW < 0,5$  artinya tingkat ketimpangan moderat.
- c.  $IW > 0,5$  artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 itu artinya semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Tabel 2.19 PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014				
Kecamatan	Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (juta rupiah)			
	2011	2012	2013	2014
Mantrijeron	8905,90	9217,40	9590,70	10055,20
Kraton	8530,10	8973,40	9407,00	10053,40
Mergangsan	9448,20	9985,40	10448,10	11089,90
Umbulharjo	16649,40	17096,20	17751,40	18111,30
Kotagede	8067,40	8212,80	8443,20	8501,30
Gondokusuman	22173,10	23468,80	24518,80	25946,20
Danurejan	29248,60	32028,70	34358,50	36559,80
Pakualaman	7733,00	8116,30	8509,10	9089,80
Gondomanan	38717,80	40621,30	42747,40	44766,20
Ngampilan	7718,20	8011,60	8392,10	8778,60
Wirobrajan	13261,20	13930,00	14545,20	15338,60
Gedongtengen	13409,30	14468,60	15401,10	16077,70
Jetis	18977,60	20304,00	21444,80	23065,00
Tegalrejo	8765,90	8986,10	9305,10	9782,10
<b>Rata-Rata PDRB per Kapita Kota yogyakarta</b>	<b>14892,40</b>	<b>15610,90</b>	<b>16335,80</b>	<b>17099,94</b>

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan kota YogyakartaTahun 2010-2014  
(BPS Kota Yogyakarta, 2015)

Tabel 2.20  
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2011-2014

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)			
		2011	2012	2013	2014
1	Mantrijeron	31.421	31.695	32.383	31.901
2	Kraton	17.557	17.561	17.874	17.217
3	Mergangsan	29.437	29.448	29.965	29.537
4	Umbulharjo	77.127	78.831	81.073	83.031
5	Kotagede	31.308	32.052	32.986	33.811
6	Gondokusuman	45.517	45.526	46.335	45.697
7	Danurejan	18.433	18.433	18.764	18.454
8	Pakualaman	9.362	9.366	9.533	9.164
9	Gondomanan	13.093	13.097	13.327	13.171
10	Ngampilan	16.401	16.402	16.696	16.429
11	Wirobrajan	24.962	24.969	25.411	25.039
12	Gedongtengen	17.270	17.273	17.583	17.549

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)			
		2011	2012	2013	2014
13	Jetis	23.570	23.570	23.992	23.331
14	Tegalrejo	35.096	35.789	36.757	36.136
	<b>Jumlah</b>	<b>390.554</b>	<b>394.012</b>	<b>402.679</b>	<b>400,467</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012 dan 2014  
(BPS Kota Yogyakarta, 2013, 2015)

Sama halnya dengan pemerataan pendapatan versi bank dunia, ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks williamson juga semakin meningkat dari tahun 2011-2014. Pertumbuhan rata-rata indeks williamson selama rentang waktu 2011-2014 adalah sebesar 0,861. Meskipun pertumbuhan tersebut masih tergolong kecil, namun menyebabkan pergeseran ketimpangan pembangunan ekonomi di Kota Yogyakarta. Indeks williamson Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah sebesar 0,495, dimana pada tahun tersebut ketimpangan Kota Yogyakarta masih berada pada kategori moderat. Namun, pada tahun 2012-2014 terjadi peningkatan nilai indeks williamson sehingga ketimpangan Kota Yogyakarta mulai bergeser pada kategori tinggi.

**Tabel 2.21**  
**Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

Indikator	Indeks Williamson (%)				Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
	2011	2012	2013	2014	
Indeks Williamson	0,495	0,506	0,513	0,517	0,861
Kategori Ketimpangan	Moderat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang maju secara ekonomi, namun ternyata masih terdapat daerah-daerah yang relatif tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi sehingga ketimpangan antar daerah tidak semakin melebar.

### 7. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong

ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

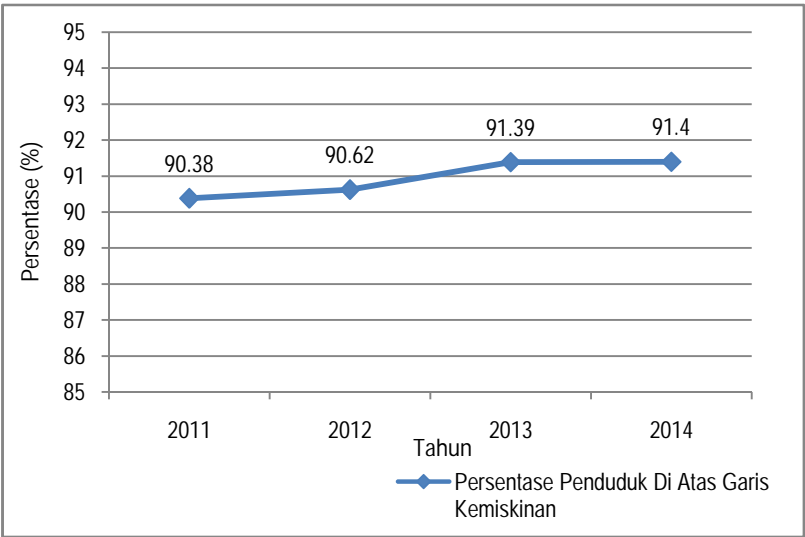
Selama rentang tahun 2011-2014, perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin setiap tahun serta peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Pada tahun 2011, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 38 ribu jiwa atau sebesar 9,62% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2014, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tersebut mengalami penurunan menjadi 8,60% atau setara 34 ribu jiwa.

**Tabel 2.22**  
**Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014
<b>Kota Yogyakarta</b>					
Garis Kemiskinan	Rupiah	314.311	333.232	353.602	-
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	38	37	34	34
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	9,62	9,38	8,61	8,60
<b>Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>	<b>90,38</b>	<b>90,62</b>	<b>91,39</b>	<b>91,40</b>
<b>Provinsi DIY</b>					
Garis Kemiskinan	Rupiah	257.909	270.110	303.843	321.056
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	564	566	542	533
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	16,14	15,88	15,03	14,55
<b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>	<b>83,86</b>	<b>84,12</b>	<b>84,97</b>	<b>85,45</b>

Sumber :  
1.Diy dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015)  
2.Bappeda Kota Yogyakarta, 2016

Dibandingkan dengan Provinsi DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil meksipun keduanya menunjukkan pertumbuhan yang negatif dari tahun 2011-2014. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin Provinsi DIY mencapai 16,14% sementara pada tahun 2014 adalah sebesar 14,55%. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta sudah banyak berhasil, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang kehendaki.



**Gambar 2.7**  
**Grafik Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2011-2014**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

**8. Angka Kriminalitas yang Tertangani**

Kriminalitas sebagai variabel yang penting untuk diperhatikan. Di satu sisi kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat juga menjadi visualisasi tidak sejahteranya masyarakat. Jadi ada hubungan *reciprocal* antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Angka tersebut harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Berikut adalah angka kriminalitas Kota Yogyakarta pada tahun 2010 hingga 2015.

**Tabel 2.23**  
**Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	995	764	457	2.078	1.956	2.002
Jumlah Penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Kasus	21,74	17,36	10,69	51,1	47,25	48,89

*Sumber : Poltabes kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016*

Data di atas merupakan jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta yang dicatat oleh Polresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Angka yang tertera menunjukkan tindak kriminalitas yang fluktuatif sejak tahun 2010 hingga 2015, pernah menurun drastis pada tahun 2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara

itu menurun lagi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkatkembali pada angka 2002 kasus. Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan cara perhitungan, perhitungan angka kriminalitas di tahun 2010 hingga 2012 berbeda dengan cara perhitungan di tahun 2013,2014, dan 2015. Kendati demikian dilihat dari angka mutlak jumlah kriminalitas pada tiga tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah penduduk terlihat sangat tinggi, artinya perlu diwaspadai secara terus menerus. Angka ini perlu ditekan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin besar nilai angka melek huruf suatu kabupaten/kota maka, semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Berikut adalah tabel Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

Tabel 2.24  
Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

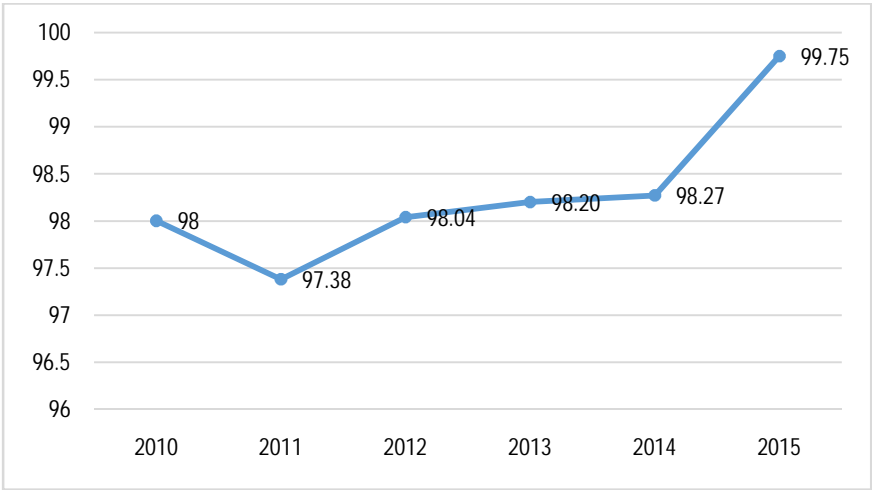
No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka Melek Huruf	Persen	98	97,38	98,04	98,2	98,27	99,75	0,35

Sumber :

- 1) 2010-2012 : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013
- 2) 2013-2015 : LAKIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2013-2015
- 3) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel di atas, pertumbuhan rerata angka melek huruf dari tahun 2010-2015 adalah sebesar 0,35%. Persentase angka melek huruf di Kota Yogyakarta sudah berada dalam kategori baik karena dalam kurun waktu 2010-2015 grafik persentase cenderung mengalami peningkatan, walaupun ada penurunan persentase pada tahun 2011 yang lalu. Sebagaimana yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya, bahwa Angka Melek Huruf menggambarkan kemampuan warga dalam membaca dan menulis, sehingga

dari data yang didapat pada tahun 2015 hampir seluruh warga kota Yogyakarta mampu membaca dan menulis. Persentase angka melek huruf yang meningkat tersebut diiringi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik.



**Gambar 2.8**  
**Grafik Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

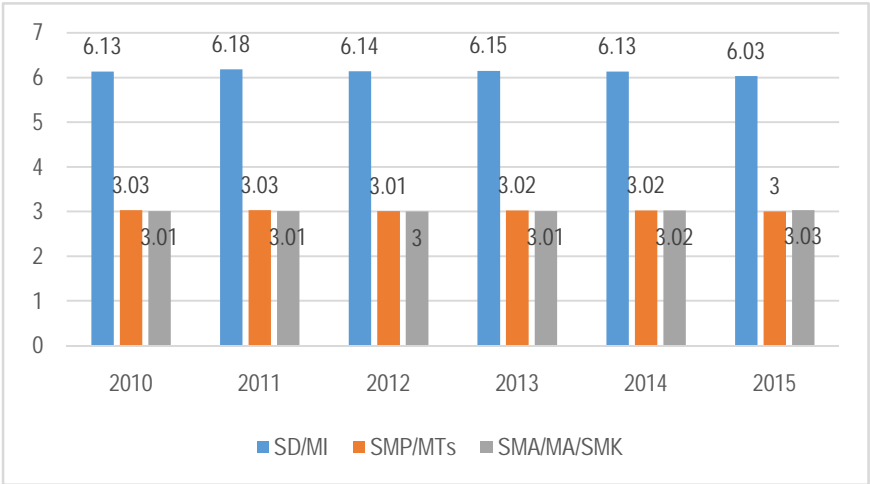
Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut sudah cukup baik. Berikut ini merupakan tabel angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

**Tabel 2.25**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	tahun	6,13	6,18	6,14	6,15	6,13	6,03	-0,325
2.	SMP/MTs	tahun	3,03	3,03	3,01	3,02	3,02	3,00	-0,198
3.	SMA/MA/SMK	tahun	3,01	3,01	3	3,01	3,02	3,03	0,133

Sumber :  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2014  
2) Hasil Olahan 2016

Apabila melihat tabel di atas, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI yang ditempuh selama 6 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan angka 6,03 pada tahun 2015, menurun sekitar 0,1 tahun dibanding tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sudah menunjukkan angka ideal pada tahun 2015. Selanjutnya untuk jenjang SMA/MA/SMK yang normalnya ditempuh selama 3 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 menunjukkan angka 3,03 tahun, terjadi peningkatan sebanyak 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dilihat secara keseluruhan, angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta berada dalam kategori yang baik karena mendekati angka ideal yang biasa dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK tersebut.



**Gambar 2.9**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2015*

**3. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik merupakan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang

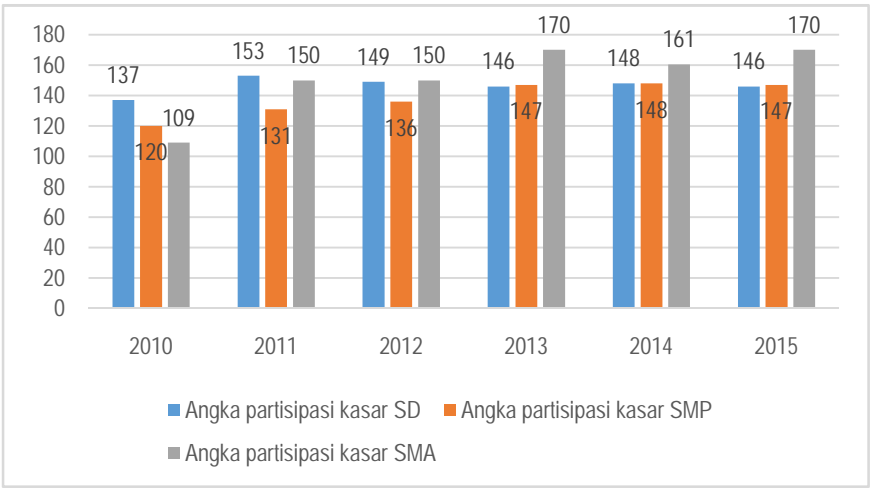
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah tabel APK di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

**Tabel 2.26**  
**Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	persen	137	153	149	146	148	146	1,414
2.	SMP/MTs	persen	120	131	136	147	148	147	4,215
3.	SMA/SMK/MA	persen	109	150	150	170	161	170	10,256

Sumber :  
1) Profil Pendidikan 2012-2015  
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel berikut, bahwa nilai persentase APK dari masing masing jenjang pendidikan cenderung naik dari tahun ke tahun. Hanya saja, pada tahun 2014-2015 terdapat penurunan angka partisipasi kasar SD/MI dan SMP/MTs, selain itu terdapat juga peningkatan APK SMA/SMK/MA. APK SD/MI pada tahun 2010 adalah sebesar 137% dan kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 146% pada tahun 2015. APK SMP/MTs mengalami peningkatan pula, dari 120% dari tahun 2010 menjadi 147% pada tahun 2015. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pun mengalami hal yang serupa dimana, pada tahun 2010 APK SMA/SMK/MA adalah sebesar 109% dan meningkat menjadi 170% pada tahun 2015.



**Gambar 2.10**  
**Grafik Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Apabila diperhatikan, APK seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan angka di atas 100% dari tahun ke tahun. Nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya siswa dari daerah luar kota/daerah yang bersekolah

di wilayah Kota Yogyakarta karena kualitas yang dianggap lebih baik daripada di daerah-daerah sekitarnya. Ditambah lagi, disebabkan karena terdapatnya penduduk di luar batasan usia sekolah pada suatu jenjang, yang justru bersekolah pada jenjang yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan karena siswa terlalu dini masuk jenjang sekolah tertentu, atau pun disebabkan karena tidak berhasil melanjutkan ke kelas selanjutnya.

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yang mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan berbeda dengan angka rata-rata lama sekolah, jika angka rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatu kabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut, dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan angka ini, apabila kondisi yang terjadi sangat buruk. Angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini terbagi menjadi tujuh kategori.

Tabel 2.27  
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1	Tidak/Belum Tamat SD	(%)	13,96	11,3	9,92	9,55	-0,12
2	SD/MI/Sederajat	(%)	13,4	14,26	12,26	14	0,02
3	SLTP/MTs/Sederajat	(%)	15,03	16	16,81	16,89	0,04
4	SLTA/Sederajat	(%)	38,51	38,86	41,47	40,75	0,02
5	DI/II	(%)	1	1,06	0,88	0,84	-0,05
6	AKADEMI/DIII	(%)	4,89	5,02	4,91	4,19	-0,05
7	PT/D-IV/S1/S2/S3	(%)	13,21	13,5	13,75	13,78	0,01

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka (2011-2015), dengan Hasil Olahan, 2016

Terlihat dari Tabel tersebut bahwa terdapat penurunan persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD, hal tersebut merupakan kondisi positif dimana dapat terlihat bahwa semakin sedikitnya warga kota Yogyakarta yang tidak menamatkan SD. Kondisi positif juga terlihat pada jenjang jenjang pendidikan lain, seperti SD/MI/Sederajat, SLTP/MTS/Sederajat, dan

SLTA/Sederajat yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Sedangkan kondisi kurang baik ditunjukkan pada jenjang pendidikan DI/DII dan Akademi/DIII yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang negatif dan penurunan persentase dari Tahun 2010-2013. Hal tersebut diduga disebabkan kurangnya minat warga kota Yogyakarta untuk menempuh pendidikan jenjang Diploma.

Sebaliknya, minat untuk menempuh pendidikan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3 justru menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif dan peningkatan persentase dari tahun 2010-2013. Hal ini diduga akibat adanya pergeseran minat warga Kota Yogyakarta untuk menempuh jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3 dibanding jenjang Diploma (DI/DII dan Akademi/DIII).

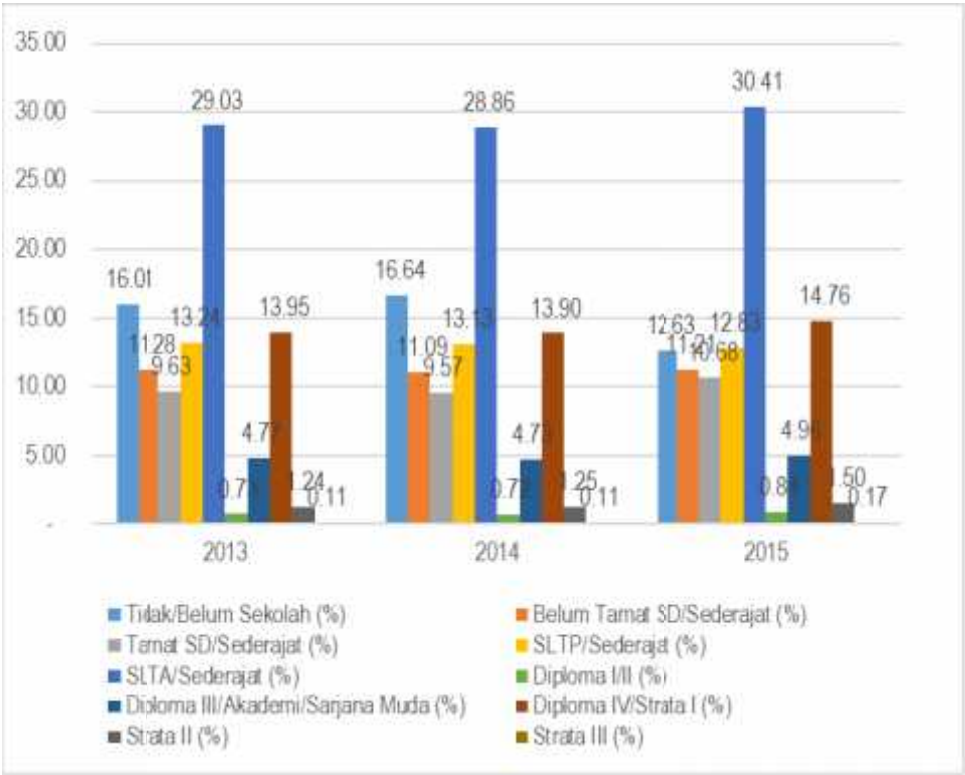
**Tabel 2.28**  
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015**

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Tidak/Belum Sekolah	(%)	16,01	16,64	12,63	-10,10
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	(%)	11,28	11,09	11,21	-0,28
3.	Tamat SD/Sederajat	(%)	9,63	9,57	10,68	5,50
4.	SLTP/Sederajat	(%)	13,24	13,13	12,83	-1,55
5.	SLTA/Sederajat	(%)	29,03	28,86	30,41	2,39
6.	Diploma I/II	(%)	0,73	0,72	0,84	7,68
7.	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	(%)	4,77	4,73	4,96	1,96
8.	Diploma IV/Strata I	(%)	13,95	13,90	14,76	2,91
9.	Strata II	(%)	1,24	1,25	1,50	10,45
10.	Strata III	(%)	0,11	0,11	0,17	24,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016 dengan Hasil Olahan, 2016

Berbeda dengan pendataan dari BPS, data Angka Pendidikan yang Ditamatkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih terklasifikasi ke tiap-tiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pada kategori SD/Sederajat dan SLTA/Sederajat. Walaupun pada kategori SMP/Sederajat terdapat sedikit penurunan pada tahun 2014 dan 2015, namun meningkatnya persentase pada kategori SD/Sederajat, dan SLTA/Sederajat menandakan kondisi baik dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan dasar 12 sudah semakin meningkat. Hal tersebut juga didorong dengan maraknya lowongan-lowongan pekerjaan yang umumnya mensyaratkan pelamar harus menamatkan jenjang pendidikan SLTA/Sederajat, sehingga terjadi peningkatan pada angka pendidikan yang ditamatkan pada level SLTA/Sederajat.

Untuk kategori pendidikan tinggi, yaitu pendidikan pasca SLTA/Sederajat, seperti Diploma I/II, Diploma III/Akademi/Sarjana Muda, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III cenderung mengalami peningkatan. Pada jenjang Diploma I/II mengalami peningkatan sebesar 0,12%, sedangkan pada jenjang iploma III/Akademi/Sarjana Muda terdapat peningkatan sebesar 0,23%, peningkatan juga terlihat pada jenjang Diploma IV/Strata I, Strata II, serta Strata III. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya kemudahan-kemudahan memperoleh beasiswa, serta didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi yang meningkat.



**Gambar 2.11**  
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**5. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%.

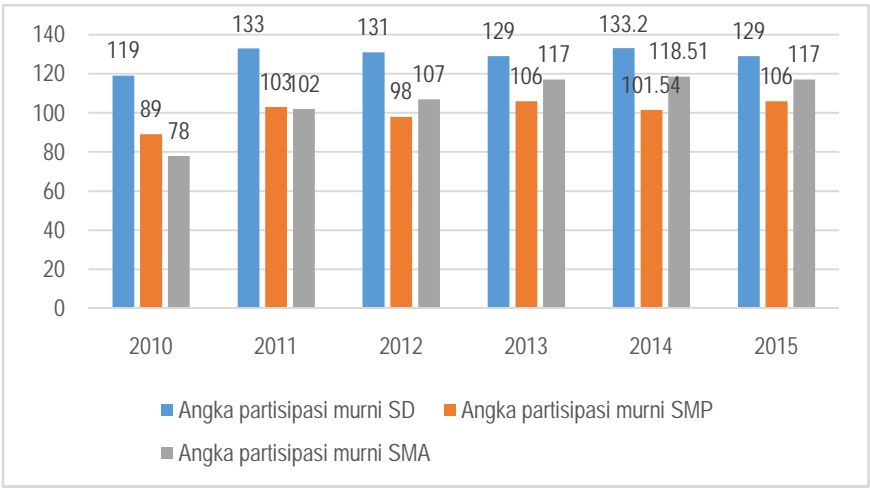
Berikut adalah tabel angka partisipasi murni di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015:

**Tabel 2.29**  
**Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	persen	119	133	131	129	133,2	129	1,77
2.	SMP/MTs	persen	89	103	98	106	101,54	106	3,85
3.	SMA/MA/SMK	persen	78	102	107	117	118,51	117	9,00

Sumber :  
1) Profil Pendidikan 2012-2015  
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa terdapat penurunan APM pada jenjang SD/MI dari tahun 2014-2015, penurunan tersebut sebesar 4%,. Sedangkan APM pada SMP/MTS mengalami peningkatan persentasi sebesar kurang lebih 5%. Dan pengurangan sebesar 1,51% terjadi pada APM jenjang SMA/MA/SMK. Nilai-nilai APM tersebut kesemuanya berada di atas angka 100%. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat yang lebih besar dari penduduk usia sekolah setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut juga dirasa lebih tepat sasaran karena menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.



**Gambar 2.12**  
**Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Kematian perinatal menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian *neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian *post neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

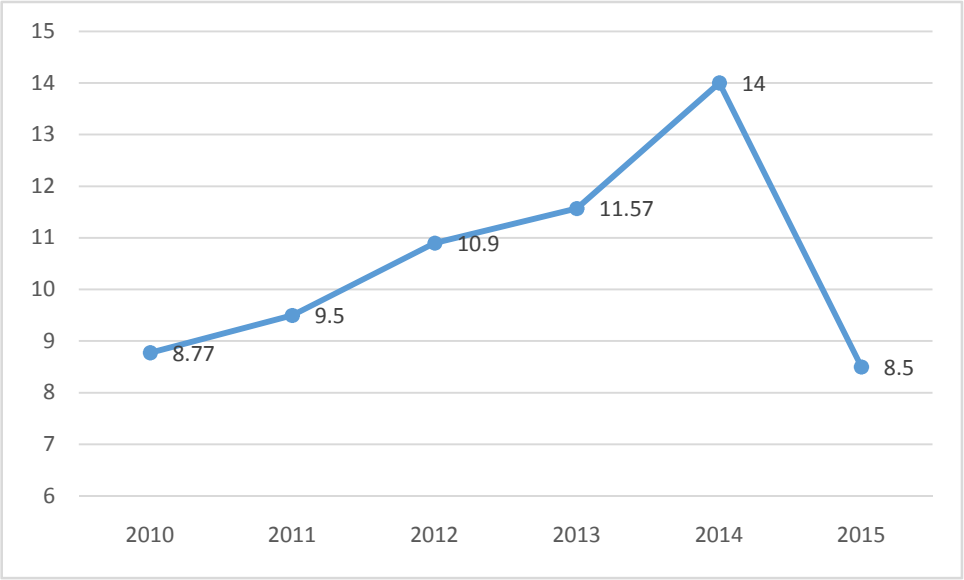
Tabel 2.30  
Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup		8,77	9,5	10,9	11,57	14	8,5	2,18

Sumber :

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*
- 2) *Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dan kemudian menurun pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 1,89% dengan peningkatan dari 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 14 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 dan kemudian kembali menjadi 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi.



**Gambar 2.13**  
**Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2015*

Meningkatnya angka kematian bayi di Kota Yogyakarta disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya masalah sosial maupun ekonomi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan atau kepedulian ibu tentang kehamilan, kesehatan serta gizi yang dibutuhkan oleh bayi selama dalam kandungan. Hal tersebut berdampak pada kesadaran akan pemeriksaan kehamilan pun rendah. Selain itu juga adanya masalah sejak remaja dan kehamilan terkait persepsi diri tentang bentuk tubuh yang ideal sehingga menyebabkan anemia pada kelompok rawan tersebut yang bisa mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan.

Faktor dari pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang memadai seperti sarana darurat untuk bayi juga masih kurang. Berdasarkan pemaparan dari pihak Dinas kesehatan, seringkali bayi meninggal karena 3T (terlambat deteksi, terlambat rujukan, dan terlambat penanganan). Sebab lain kematian bayi adalah adanya keracunan kehamilan, namun masalah ini sulit untuk diprediksi karena terjadi pada detik-detik menjelang persalinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Yogyakarta membangun NICU di Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khusus bayi di Yogyakarta.

Apabila dibandingkan dengan target, AKB di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah dibawah angka tersebut. akan tetapi pemerintah menginginkan jika angka kematian bayi ini bisa mencapai 0%. Pada kenyataannya, program yang ada di tahun-tahun sebelumnya sudah mengarah untuk mengurangi angka ini, namun fakta yang ada menunjukkan angka yang justru semakin meningkat. Menurut pihak Dinas Kesehatan, angka yang

meningkat ini sebenarnya terjadi karena kurang baiknya sistem administrasi yang ada, yaitu terkait pendataan dan asal-usul bayi tersebut, apakah sesuai domisili atau KTP. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk menyamakan dan melengkapi data-data administrasi bayi meninggal tersebut agar bisa jelas dibedakan asal usulnya sehingga pemerintah juga dapat melakukan evaluasi terhadap program yang ada secara efisien dan tidak menimbulkan bias.

2. Angka Kematian Balita

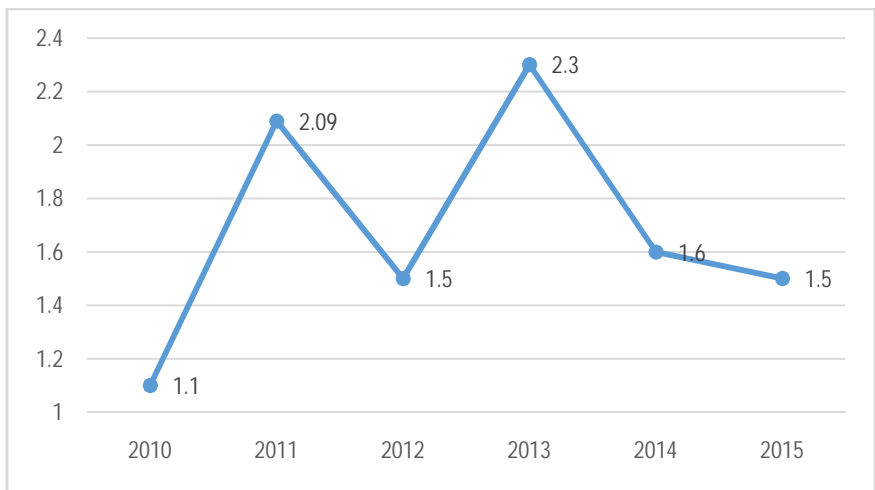
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematian Balita menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.31  
Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup		1,1	2,09	1,5	2,3	1,6	1,5	15,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, angka kematian balita di Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan kecenderungan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2010, AKABA sebesar 1,1 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, lalu meningkat menjadi 2,09 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011, dan turun di tahun 2012 menjadi 1,5 kematian balita, kemudian naik menjadi 2,3 kematian balita tahun 2013, dan mengalami penurunan menjadi 1,6 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup di tahun 2014, hingga akhirnya mengalami penurunan kembali menjadi 1,5 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Angka kematian balita yang mengalami penurunan pada dua tahun terakhir menunjukkan kondisi yang baik di Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program yang berhasil dalam mengendalikan angka kematian balita.



**Gambar 2.14**  
**Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Angka kematian balita yang cenderung mengalami kenaikan ini disebabkan beberapa faktor diantaranya masih adanya ibu yang kurang memperhatikan kualitas gizi dari makanan yang dikonsumsi anak, kebersihan lingkungan sekitar dan kebiasaan hidup sehat, selain karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian balita dapat dilakukan melalui sosialisasi arti pentingnya hidup sehat bagi ibu pada saat kegiatan posyandu balita. Selain itu, banyak kematian balita yang disebabkan karena kasus penyakit infeksi. Balita yang kurang atau tidak mendapatkan gizi yang baik akan mudah terserang penyakit khususnya penyakit infeksi. Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit.

**3. Angka Kematian Ibu Melahirkan**

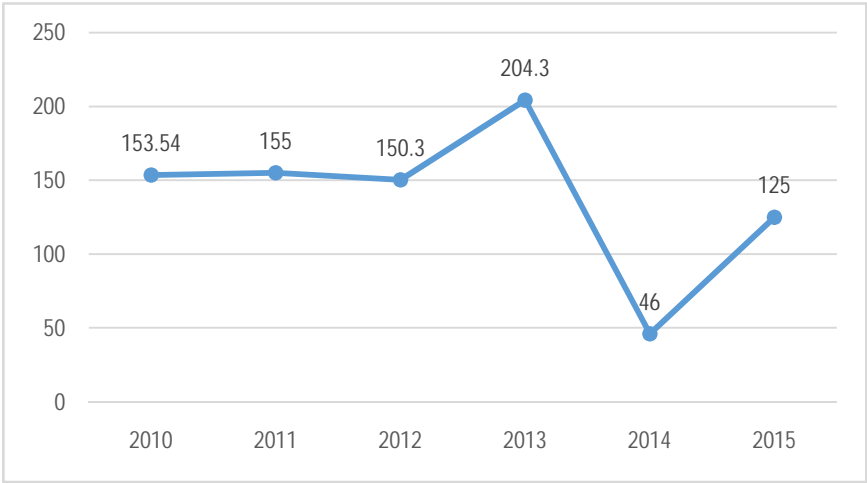
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.32  
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		153,54	155	150,3	204,3	46	125	25,62

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)

Pada tabel di atas terlihat bahwa AKI cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun dengan AKI tertinggi adalah pada tahun 2013 dan tahun dengan AKI terendah adalah tahun 2014. AKI cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010-2011, kemudian menurun pada tahun 2011-2012, dan meningkat mencapai 204,3 pada tahun 2013. Penurunan yang drastis berada pada kurun waktu 2013-2014, dan kemudian meningkat kembali pada kurun waktu 2014-2015.



Gambar 2.15  
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Angka kematian ibu yang cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ibu hamil tidak pernah ANC rutin di Puskesmas, pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan pada saat menjelang melahirkan saja sehingga meningkatkan resiko bagi ibu dan bayi, selain itu adanya penyakit menular juga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, serta Program Perencanaan Pertolongan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal

sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya. Pada tahun 2014 jumlah kematian ibu melahirkan menurun cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya manual rujukan untuk periksa kehamilan maupun melahirkan, selain itu juga terdapat dukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan serta kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kenaikan AKI pada tahun 2015, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian. Selain itu, ditemukan pula penyebab kematian Ibu pada tahun 2015, yaitu terdapatnya penyakit TBC Milier, TBC HIV, pendarahan, dan sepsis. Penyakit yang menyebabkan kematian ibu tersebut dominan dialami oleh ibu yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta.

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta.

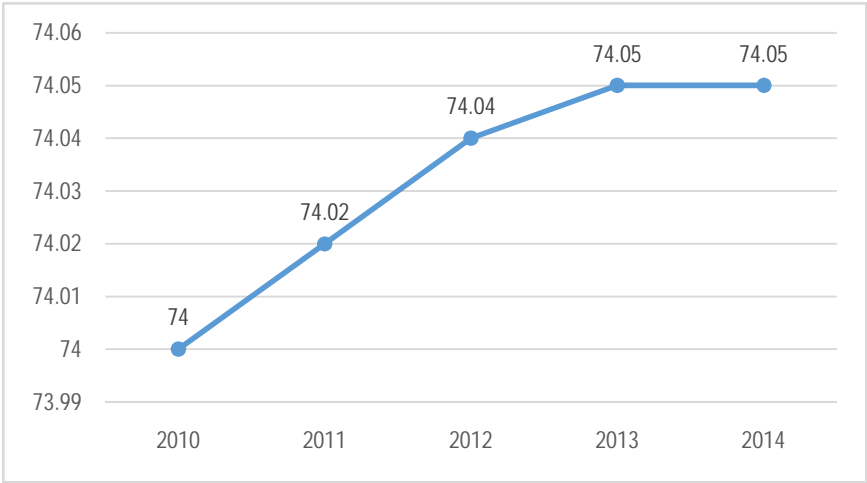
Tabel 2.33  
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka usia harapan hidup	tahun	74	74,02	74,04	74,05	74,05		0,221

Sumber :  
1) Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2014 (BPS Kota Yogyakarta)  
2) Hasil Olahan, 2016

Pada tahun 2015, dihitung angka usia harapan hidup pada tahun 2014. Angka usia harapan hidup penduduk Yogyakarta pada tahun 2014 masih cenderung sama dibanding tahun sebelumnya yaitu 74,05. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Yogyakarta cenderung masih baik. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh

berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda (jaminan kesehatan khusus pemegang KTP Yogyakarta), jamkesmas (jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dimana keanggotaannya ditentukan melalui TNP2K), dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena fasilitas kesehatan yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dan tingkat okupansi ruang inap di berbagai rumah sakit yang meningkat tajam (BPS, 2015)



**Gambar 2.16**  
**Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itulah untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal-hal seperti jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar belakang pendidikan masyarakat. Perlu menjadi perhatian bahwa dengan peningkatan usia harapan hidup, berarti harus meningkat pula pelayanan dan penjaminan hidup yang layak untuk lansia, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan untuk para lansia maupun tempat tinggal yang layak, serta pelayanan dan fasilitas umum lainnya yang memungkinkan para lansia masih untuk tetap dapat beraktivitas dengan baik. Dengan demikian dapat tercipta kota yang ramah lansia.

**5. Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur (BB/U) dan jumlah balita yang ditimbang. Jadi belum mencakup seluruh balita yang ada di Kota

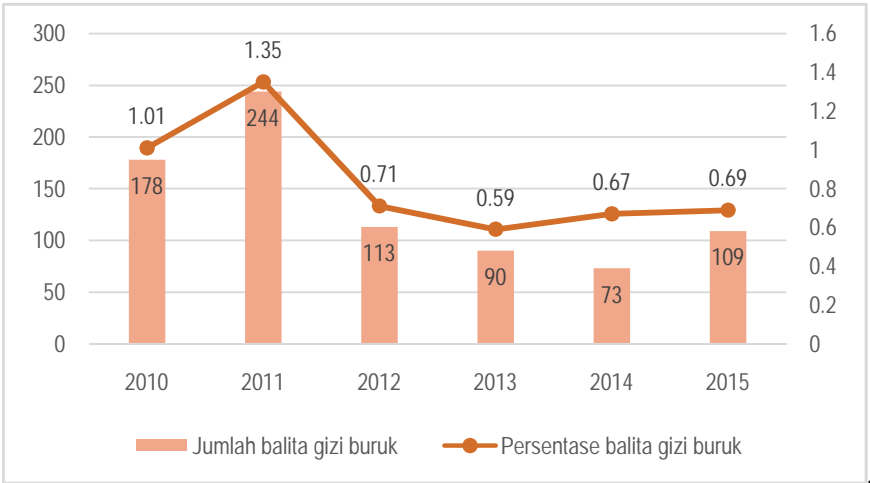
Yogyakarta, hanya berupa survei terhadap sebagian balita (yang ditimbang). Perhitungan ini untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data prevalensi balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.34  
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur	Anak	178	244	113	90	73	109	-1,308
2.	Jumlah Balita yang ditimbang	Anak	17.676	18.069	15.967	15.270	10.845	15.832	0,646
3.	Prevalensi balita gizi buruk	persen	1,01	1,35	0,71	0,59	0,67	0,69	-2,866

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2012-2015(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2015)

Berdasarkan data di atas, prevalensi balita gizi buruk cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2010-2011 terdapat peningkatan angka prevalensi balita gizi buruk, kemudian angka tersebut menurun dari tahun 2011-2013 hingga menyentuh angka 0,59. Setelah itu terdapat peningkatan prevalensi balita gizi buruk menjadi 0,67 di tahun 2014 dan 0,69 di tahun 2015.



Gambar 2.17  
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan analisis dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Yogyakarta tahun 2015, terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang yang disebabkan adanya kesulitan pemantauan status gizi karena beberapa orang tua/keluarga tidak membawa anaknya ke posyandu/puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak dapat terpantau oleh kader pendamping maupun oleh tenaga kesehatan. Selain itu, angka prevalensi balita gizi buruk juga dipengaruhi oleh tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga terdapatnya pendatang yang memiliki balita gizi buruk pun menambah hitungan pada indikator ini.

6. Penyakit

Data tentang penyakit penting diketahui untuk melihat derajat kesehatan di masyarakat tersebut. Informasi mengenai penyakit juga berguna untuk melihat pola penyakit, kejadian luar biasa, atau gaya hidup masyarakat setempat. Berikut merupakan data penyakit yang bersumber dari RSUD Kota Yogyakarta.

Tabel 2.35  
Data 10 Besar Diagnosa Penyakit Penyebab Kematian  
di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

No	2014	Jumlah	2013	Jumlah
1	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	65	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	31
2	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	25	Congestive heart failure	14
3	Congestive heart failure	19	Chronic ischaemic heart disease, unspecified	11
4	Chronic renal failure, unspecified	19	Chirrosis of Liver	7
5	Non-insulin-dependent diabetes mellitus With renal complication	19	Leptospirosis, unspecified	6
6	Septicaemia, unspecified	18	Septicaemia, unspecified	6
7	Chronic ischaemic heart disease, unspecified	16	Tuberculosis of Lung	5
8	Unspecified diabetes mellitus without complications	13	Non-insulin-dependent diabetes mellitus With renal complication	5
9	Cerebral infarction	11	Acute myocardial infarction, unspecified	5
10	Tuberculosis of lung	10	Heart disease, unspecified	4

Berdasarkan data penyakit penyebab kematian di atas, dapat kita lihat bahwa sebagian besar penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular atau sering dikenal dengan sebutan penyakit degenerative. Penyakit-penyakit tersebut erat hubungannya dengan pola

makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Pada dua tahun terakhir pun stroke tetap menajdi yang teratas sebagai penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta. Sedangkan jika melihat data 10 besar penyakit rawat jalan di RSUD penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan stroke juga selalu menempati posisi 5 besar sejak tahun 2012 hingga 2014. Selain data di atas, berikut data penyakit yang juga perlu menjadi perhatian karena kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.36**  
**Jumlah Kasus baru HIV/AIDS**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014**

Indikator	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HIV	Orang	39	62	59	13	43	34	81	96
AIDS	Orang	11	5	78	10	12	47	30	29
HIV/AIDS	Orang	50	67	137	23	55	81	111	125

Kasus HIV/AIDS tidak bisa dibiarkan begitu saja, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi melihat trend yang semakin naik dari tahun-ke tahun. Namun perlu diperhatikan juga, peningkatan penemuan jumlah penderita karena didukung sistem pencatatan dan pelaporan semakin akurat. Kemampuan petugas, jumlah saran pelayanan dan kelengkapan alat untuk mendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan semakin baik. Usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini bisa dibilang cukup baik, seperti membuat program *One stop service* (Pelayanan satu atap untuk penanggulangan HIV-AIDS), dan Layanan Komperehesif Berkelanjutan untuk IMS dan HIV-AIDS. Untuk melaksanakan tersebut Pemerintah menetapkan 2 puskesmas di Kota Yogyakarta sebagai tempat rujukan untuk penanggulangan masalah HIV/AIDS ini yaitu di Umbulharjo dan Gedongtengen.

Kasus lain yang juga harus mulai diperhatikan adalah masalah gangguan jiwa dan emosi. Berdasarkan data dari RISKESDAS (riset kesehatan dasar) 2013, prevalensi gangguan jiwa berat menurut provinsi di Indonesia tahun 2013, Provinsi DIY menempati peringkat teratas yaitu 2,7%. Sedangkan untuk prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur ≥ 15 tahun berdasarkan *self reporting questionnaire-20* menurut provinsi tahun 2013, DIY menempati peringkat 4 di Indonesia. Meskipun data tersebut merupakan angka dalam satu provinsi, namun harus tetap menjadi perhatian di tingkat kota.

C. Ketenagakerjaan

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

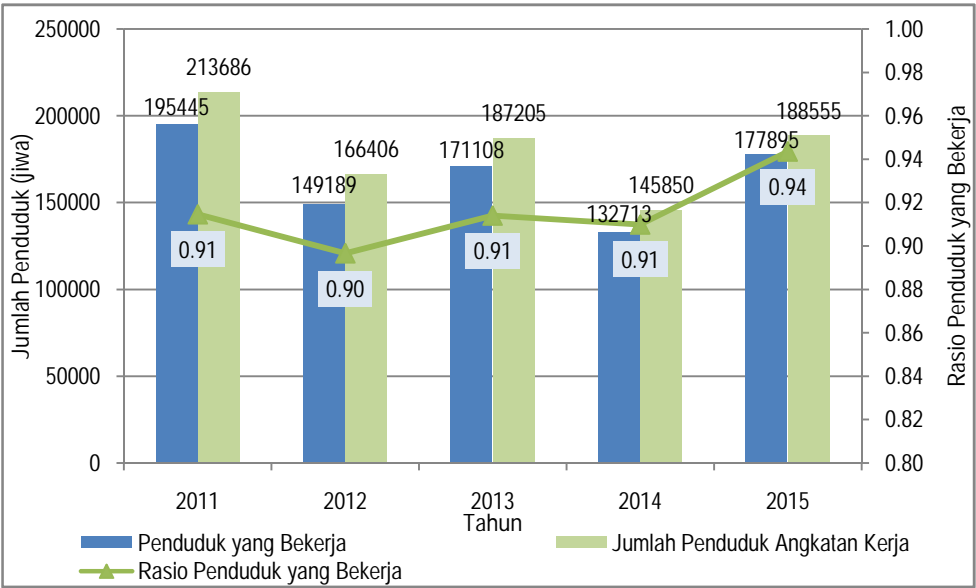
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,94 di tahun 2015.

Tabel 2.37  
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

N o	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	195.445	149.189	171.108	132.713	177.895	-2,32
2	Angkatan Kerja	Jiwa	213.686	166.406	187.205	145.850	188.555	-3,08
3	Rasio penduduk yang Bekerja		0,91	0,90	0,91	0,91	0,94	0,77

Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013 dan 2014, diolah

Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio yang ada menunjukkan tren positif yang ditandai dengan semakin besarnya nilai rasio, meskipun pertumbuhan tersebut berjalan dengan lambat. Pada tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,94. Itu artinya 94% atau sebesar 145.850 jiwa dari total angkatan kerja yang ada telah memperoleh kesempatan untuk bekerja sementara untuk 6% yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur.



Gambar 2.18  
Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta  
Tahun 2011-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

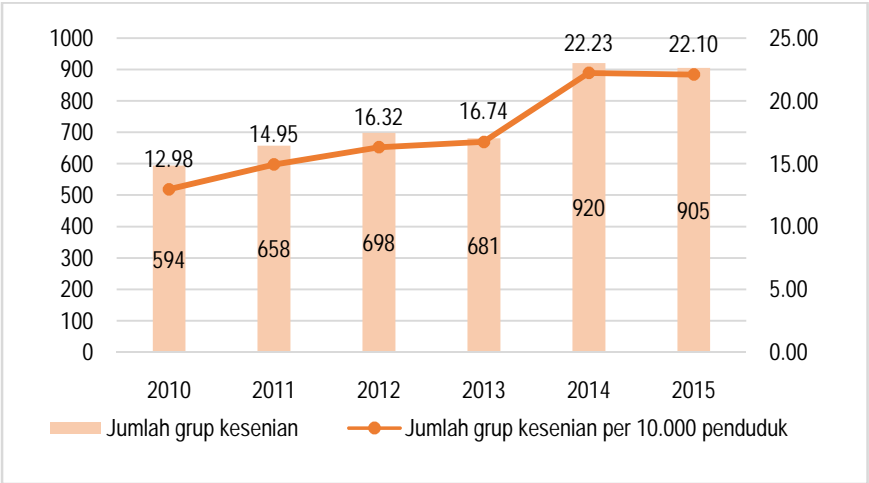
Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah grup kesenian di suatu daerah. Jumlah grup kesenian menunjukkan jumlah grup kesenian dibandingkan dengan 10.000 penduduk. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.38  
Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah grup kesenian	Unit	594	658	698	681	920	905	4,806
2.	Jumlah penduduk/ 10.000	Jiwa	45,77	44,01	42,76	40,67	41,39	40,95	-2,447
3.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Unit	12,98	14,95	16,32	16,75	22,23	22,10	8,988

Sumber :  
1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2011,  
2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2016  
3) Hasil Olahan, 2016

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Meningkatnya jumlah grup kesenian merupakan dampak positif dari ikon Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya. Kota Yogyakarta mempunyai banyak warisan budaya yang sangat kental, oleh karena itu terdapat banyak seniman di kota ini dengan bakat seni yang beragam. Namun, terjadi penurunan jumlah grup kesenian pada tahun 2015, dari yang berjumlah 22,23 menjadi 22,10.



**Gambar 2.19**  
**Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**2. Jumlah Gedung Kesenian**

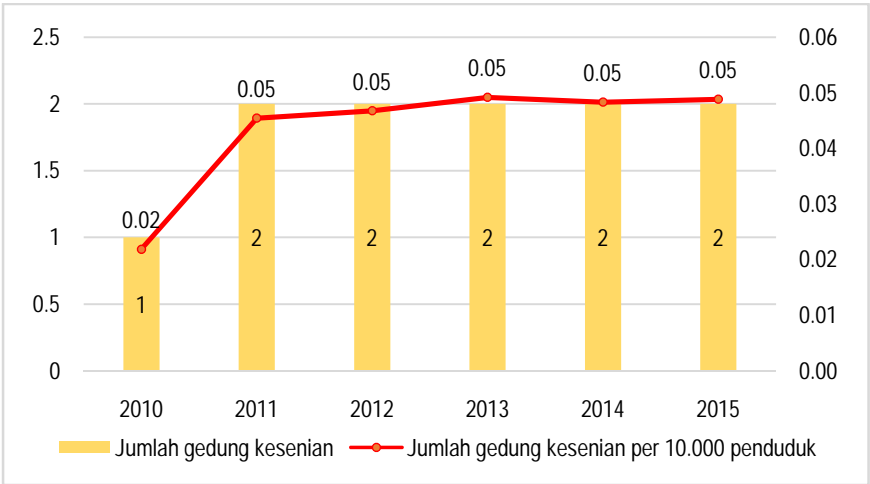
Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Berikut merupakan data jumlah kesenian di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.39**  
**Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	2	2	2	2	2	25,00
2.	Jumlah penduduk/ 10.000	Jiwa	45,77	44,01	42,76	40,67	41,39	40,95	-2,17
3.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Unit	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	23,08

*Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2016*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah gedung kesenian di Yogyakarta selama tahun 2010-2015 tidak terdapat peningkatan jumlah gedung kesenian, hanya terdapat 2 unit, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Namun perlu diperhatikan bahwa, penyelenggaraan pertunjukan kesenian tidak harus selalu diadakan di gedung kesenian, melainkan ruang terbuka publik lainnya dapat menjadi wadah untuk berekspresi bagi para seniman. Ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat peningkatan jumlah gedung kesenian. Kedua gedung kesenian tersebut dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Gedung kesenian di Kota Yogyakarta seringkali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Gedung kesenian juga merupakan tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan biaya yang besar



**Gambar 2.20**  
**Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**B. Pemuda dan Olahraga**

**1. Jumlah Klub Olahraga**

Jumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolok ukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidang olahraga. Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut ini merupakan jumlah klub olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.40  
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah klub olah raga	Unit	77	125	79	79	20	57	27,17
2.	Jumlah penduduk/ 10.000	Jiwa	45,77	44,01	42,76	40,67	41,39	40,95	-2,17
3.	Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk	Unit	1,68	2,84	1,85	1,94	0,48	1,39	30,39

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2016

Pada tabel diatas terlihat bahwa, jumlah klub olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 terdapat 77 klub olahraga dan meningkat menjadi 125 klub pada tahun 2011. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2012-2013 menjadi 79 klub dan kembali turun menjadi 20 klub pada tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi 57 klub. Penambahan ini terjadi akibat adanya pendataan ulang dan pedefinisian ulang klub olahraga, sehingga kini terdapat perbedaan jumlah yang signifikan.



Gambar 2.21  
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Jumlah Gedung Olahraga

Gedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga di suatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut merupakan data jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.41  
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah gedung olah raga	Unit	16	16	16	16	16	16	0,000
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	45,77	44,01	42,76	40,67	41,39	40,95	-2,17
3.	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk	Unit	0,35	0,36	0,37	0,39	0,39	0,39	2,28

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2016

Pada data yang tertera di atas terlihat jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 mempunyai jumlah yang tetap yaitu 16 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, maka mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015, yaitu dari 0,35 unit per 10.000 penduduk menjadi 0,39 unit per 10.000 penduduk. Jumlah gedung olahraga yang tidak berkurang ini menunjukkan adanya pemanfaatan sarana olahraga secara baik, sehingga tidak adanya perubahan fungsi/pemanfaatan bangunan. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa jumlah gedung olahraga tersebut tidak serta merta menggambarkan stagnannya kegiatan olahraga yang dilakukan warga kota, karena warga kota Yogyakarta pun kerap kali memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana berolahraga.



Gambar 2.22  
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

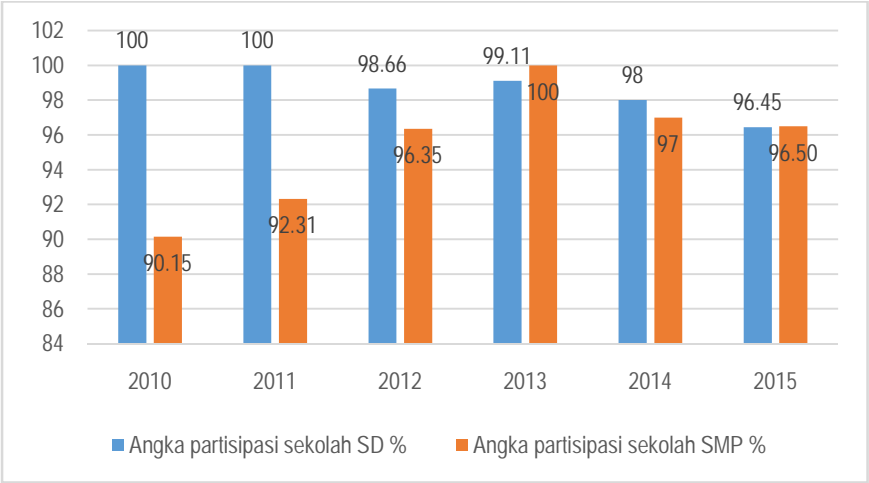
Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS SD/MI di Kota Yogyakarta dihitung berdasarkan jumlah siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlah penduduk kota usia 7-12 tahun. Begitu juga dengan APS SMP/MTs disesuaikan dengan perhitungan usia SMP/MTs (13-15 tahun). Berikut merupakan tabel angka partisipasi sekolah di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.42  
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	persen	100	100	98,66	99,11	98	96,45	-0.7
2.	SMP/MTs	persen	90,15	92,31	96,35	100	97	96,50	1,4

Sumber :  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010-2011 APS SD/MI persentasenya tetap yaitu 100%, namun tahun 2012 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2013. APS SD/MI juga kembali mengalami penurunan pada tahun tahun berikutnya. Pada tahun 2014, APS SD/MI berada pada angka 98% dan menurun lagi menjadi 96,45% pada tahun 2015.



Gambar 2.23  
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Dilihat dari data di atas, APS SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2015 cenderung mengalami fluktuasi pula. Kecenderungan persentase APS meningkat ditemukan pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Pada tahun 2010 APS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 90,15%. Angka persentase tersebut terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2013. Namun kemudian, ditemukan kecenderungan persentase yang menurun pada tahun 2013-2015. APS SMP/MTs pada tahun 2013 yang sebesar 100% mengalami penurunan hingga 96,50% pada tahun 2015.

Apabila diamati, APS SD/MI maupun SMP/MTs berada di bawah angka 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak semua penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs bersekolah di sekolah wilayah Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena adanya persaingan yang cukup kuat antara siswa dari dalam kota dan dari luar kota untuk mendapatkan kursi di instansi pendidikan di wilayah kota. Selain itu, kondisi tersebut bisa juga disebabkan adanya preferensi siswa, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah pinggir kota, yang cenderung memilih untuk bersekolah di dekat tempat tinggalnya, yangmana sekolah tersebut masuk ke dalam wilayah luar Kota Yogyakarta.

**b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs**

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut ini merupakan data rasio ketersediaan sekolah terhaap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.43**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

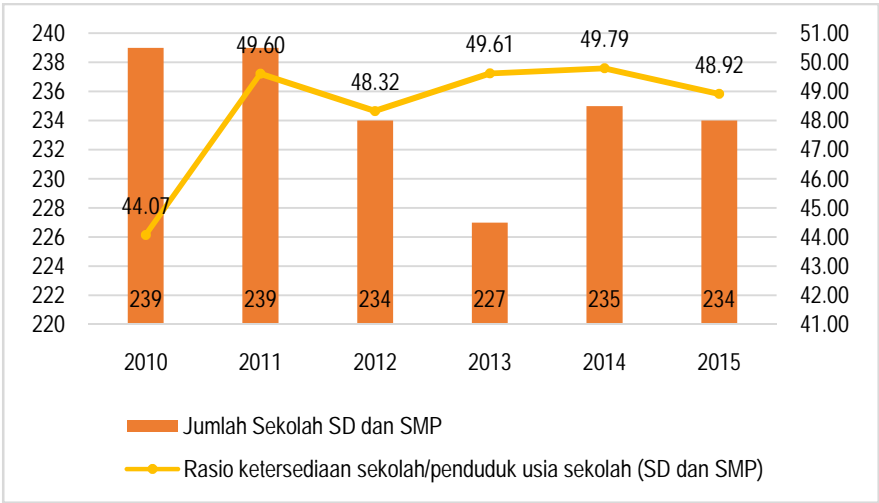
No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	239	239	234	227	235	234	1,26
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Orang	54.229	48.185	48.424	45.756	47.197	47.838	-2,81

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
3.	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs		44	50	48	50	50	49	7,14

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2015),  
2) LPPD 2010-2014  
3) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2010 tersedia 44 SD/MI dan SMP/MTs dalam setiap 10.000 penduduk, namun terjadi peningkatan menjadi 50 sekolah pada tahun 2011 disebabkan karena menurunnya jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun dengan jumlah sekolah yang tetap yaitu 239 unit. Pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 48 sekolah pendidikan dasar setiap 10.000 penduduk oleh karena menurunnya jumlah sekolah menjadi 234 unit.

Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah kembali naik menjadi 50 sekolah namun dengan kondisi jumlah sekolah yang berkurang dan menurunnya jumlah penduduk usia sekolah. Pada tahun 2014, rasio ketersediaan sekolah kembali naik dengan jumlah sekolah meningkat menjadi 235 unit sedangkan rasio ketersediaan sekolah masih tetap 50 unit sekolah dalam setiap 10.000 penduduk dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2015, terdapat penurunan rasio ketersediaan sekolah karena terdapatnya peningkatan pada penduduk usia sekolah dan berkurangnya jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs.



**Gambar 2.24**  
**Grafik Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Pada tahun 2014, rasio ketersediaan sekolah kembali naik dengan jumlah sekolah meningkat menjadi 235 unit sedangkan rasio ketersediaan sekolah masih tetap 50 unit sekolah dalam setiap 10.000 penduduk dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah sekolah disebabkan adanya beberapa pembangunan sekolah baru khususnya swasta yang menawarkan fasilitas yang cenderung lebih baik dan lebih berkualitas.

**c. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs**

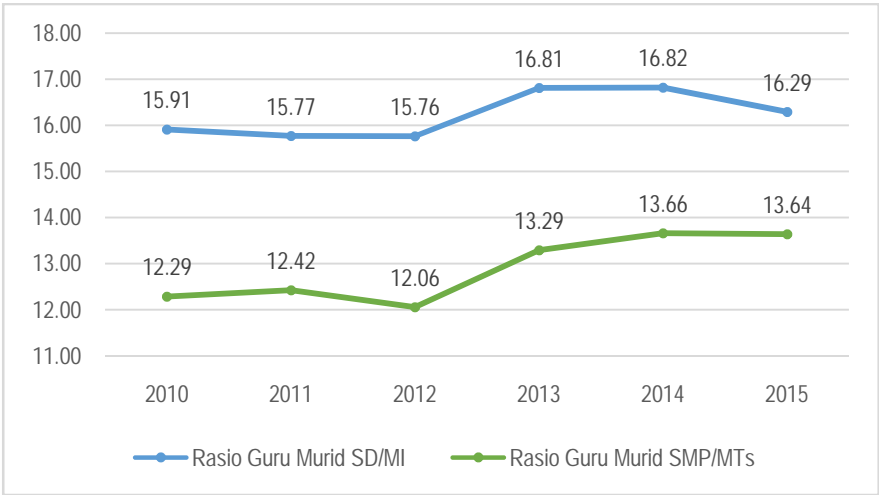
Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.44**  
**Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI		15,91	15,77	15,76	16,81	16,82	16,29	0,53
2.	SMP/MTs		12,29	12,42	12,06	13,29	13,66	13,64	2,20

Sumber:  
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)  
Flyer Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016  
Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2014 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010, rasio guru/murid SD/MI sebesar 15,91, yang berarti bahwa 1 orang guru mengajar 15 sampai 16 murid. Angka rasio ini kemudian mengalami perkembangan yang naik turun hingga mencapai angka 16,29 pada tahun 2015, yang berarti 1 orang guru mengajar 16 sampai 17 murid. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya jumlah guru. Padahal, semakin menurunnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh terhadap semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya, pada akhirnya diharapkan kualitas murid akan semakin lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.



**Gambar 2.25**  
**Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Rasio guru/murid SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010, rasio guru murid SMP/MTs sebesar 12,29, yang artinya 1 orang guru mengajar 12 hingga 13 siswa. Angka rasio ini kemudian di tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2015 mencapai 13,64, yang artinya 1 orang guru mengajar 13 hingga 14 siswa. Guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas, namun mereka merupakan guru mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam 1 kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda.

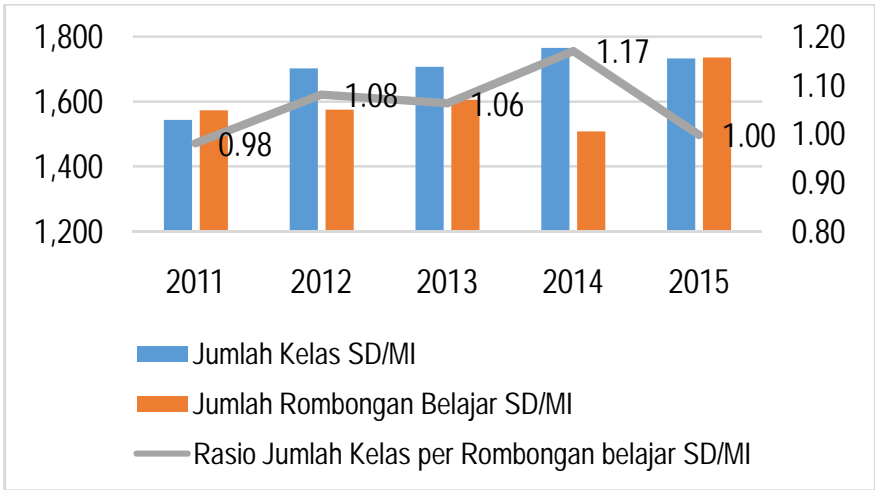
**d. Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTs**

Indikator rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta.

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kelas SD/ MI	unit	1.622	1.543	1.702	1.707	1.765	1.733	3,05
2.	Jumlah rombongan belajar SD/MI	kelompok		1.573	1.575	1.606	1.508	1.736	2,78
3.	Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI	orang		0,98	1,08	1,06	1,17	1,00	0,98

Sumber:  
 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)  
 2) Flyer Dinas Pendddikan 2016  
 3) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan, namun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2015. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan peningkatan jumlah kelas. Pada tahun 2011, rasio jumlah kelas per kelompok belajar hanya sebesar 0,98, ini berarti masih ada beberapa kelompok belajar yang tidak mempunyai kelas/kekurangan kelas. Namun, pada tahun 2012-2015 rasio jumlah kelas per rombongan belajar sudah mengalami peningkatan menjadi lebih dari 1 atau pas pada angka 1, yang artinya seluruh rombongan belajar sudah mempunyai kelas masing-masing / kebutuhan kelas sudah tercukupi.



Gambar 2.26  
 Grafik Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta  
 Tahun 2011-2015  
 Sumber: Hasil Olahan, 2016

Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs dihitung berdasarkan jumlah kelas SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah

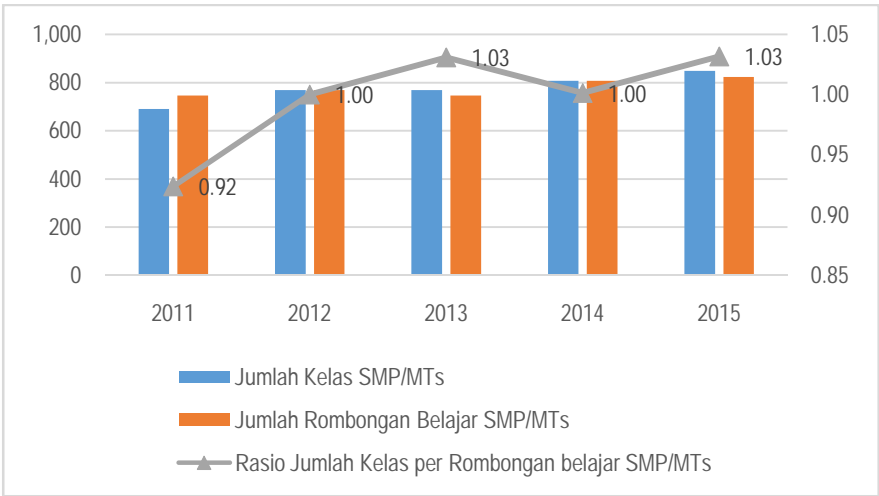
rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta. Idealnya, dalam satu kelas SMP/MTs terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.46  
Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah kelas SMP/MTs	unit	703	690	769	769	808	849	5,40
2.	Jumlah rombongan belajar SMP/MTs	kelompok		747	769	746	807	823	2,53
3.	Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs	orang		0,92	1,00	1,03	1,00	1,03	2,88

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)  
2) Flyer Dinas Pendidikan 2016  
3) SIPD Numerik 2014  
4) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan meningkatnya jumlah kelas SMP/MTs. Pada tahun 2011, rasio jumlah kelas per rombongan belajar sebesar 0,92, itu berarti masih ada kekurangan beberapa kelas. Namun, pada tahun 2012-2015 rasio jumlah kelas per rombongan belajar mengalami peningkatan hingga 1-1,03, itu berarti kekurangan kebutuhan kelas sudah tercukupi.



Gambar 2.27  
Grafik Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta  
Tahun 2011-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

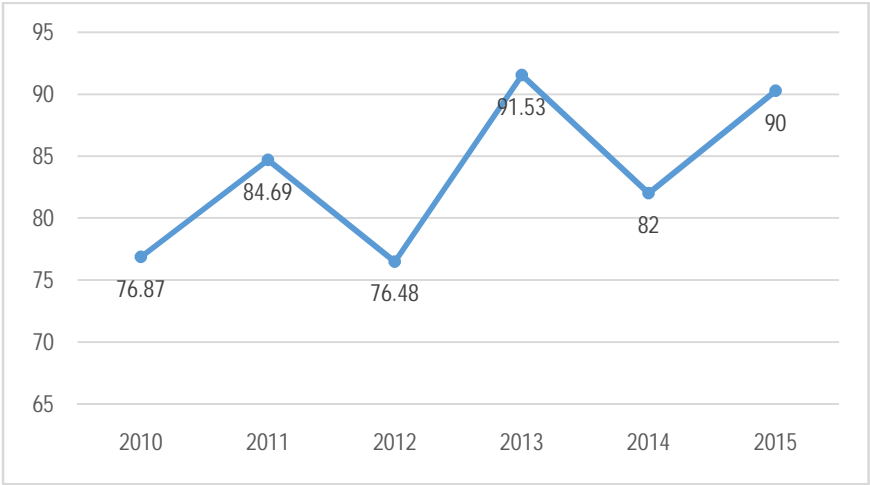
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA dihitung berdasarkan jumlah siswa SMA/SMK/MA yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlah penduduk kota usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.47  
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	APS SMA	Persen	76,87	84,69	76,48	91,53	82	90,26	4,0

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2015)  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah jenjang SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami kecenderungan naik turun. Pada tahun 2010, APS SMA/SMK/MA hanya sebesar 76,87%, kemudian naik turun hingga mencapai angka 90,26% pada tahun 2015. APS SMA/SMK/MA yang cukup fluktuatif disebabkan oleh karena banyaknya penduduk kota yang bersekolah SMA tidak bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan adanya persaingan dengan calon pelajar dari daerah lain untuk memperebutkan bangku sekolah di Kota Yogyakarta. Diharapkan kelak, penduduk kota yang bersekolah dapat bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta saja sehingga APS dapat mencapai 100%.



Gambar 2.28  
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

**b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA**

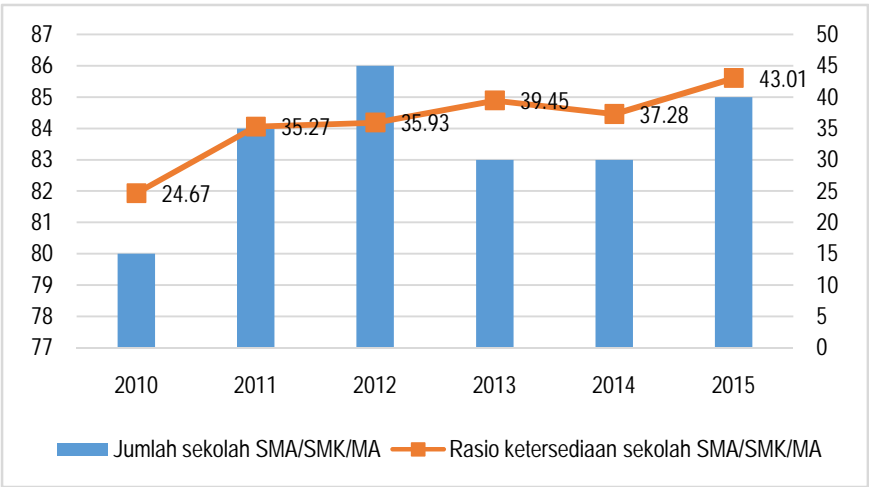
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.48**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA	Unit	80	84	86	83	83	85	1,26
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Orang	32.431	23.819	23.938	21.040	22.263	19.765	-8,71
3.	Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA		24,67	35,27	35,93	39,45	37,28	43,01	12,90

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014),  
2) LPPD 2010-2014  
3) Hasil Olahan, 2015  
4) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami kecenderungan cukup fluktuatif. Pada tahun 2010, rasio ketersediaan sekolah hanya 24 hingga 25 sekolah dalam 10.000 penduduk disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada saat itu, sedangkan jumlah sekolah mencapai 80 unit. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan penurunan rasio ketersediaan sekolah hingga mencapai 43 sekolah dalam 10.000 penduduk pada tahun 2015.



**Gambar 2.29**  
**Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Jumlah sekolah mengalami penurunan pada tahun 2012-2013, dari 86 sekolah menjadi 83 sekolah. Penurunan jumlah sekolah merupakan dampak dari program pemerintah mengenai sekolah gratis (khususnya negeri). Sekolah gratis memberikan dampak pada sekolah sulit berkembang, dana yang digunakan untuk program belajar mengajar dan perlengkapan fasilitas lainnya hanya dari pemerintah, sekolah tidak dapat memungut biaya yang tinggi pada orang tua/wali siswa, akibatnya beberapa orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke swasta yang dianggap mempunyai kualitas fasilitas pendidikan yang lebih baik walaupun dengan konsekuensi membayar biaya sekolah yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa sekolah tutup karena kekurangan siswa, jadi siswa yang ada digabungkan ke sekolah lain. Oleh karena itu, jumlah sekolah semakin berkurang dan gedung sekolah dialih fungsikan untuk sarana lainnya.

**c. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA**

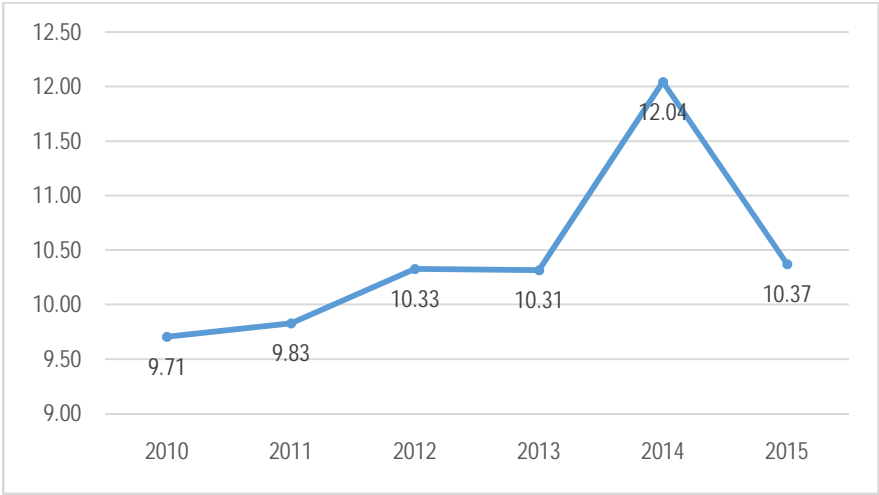
Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut ini merupakan rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.49  
Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru SMA/SMK/MA	Orang	3.639	3.624	3.473	3.251	2.968	3445	-0,72
2.	Jumlah murid SMA/SMK/MA	Orang	35.318	35.622	35.863	33.534	35.734	35.734	0,32
3.	Rasio guru murid SMA/SMK/MA		9,71	9,83	10,33	10,31	12,04	10,37	1,82

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)  
2) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang menunjukkan angka positif. Pada tahun 2010, rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA sebesar 9,71, yang artinya 1 orang guru mengajar lebih dari 9 siswa. Kemudian mengalami peningkatan hingga besaran rasio bernilai 10,37 yang artinya 1 orang guru mengajar lebih dari 10 siswa. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah guru yang dibutuhkan untuk mengajar siswa SMA/SMK/MA memang cukup banyak karena guru berperan sebagai guru mata pelajaran, bukan guru kelas seperti jenjang pendidikan SD/MI.



Gambar 2.30  
Grafik Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2015

d. Rombongan Belajar SMA/SMK/MA

Indikator rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Perhitungan rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA dihitung berdasarkan jumlah kelas dibagi jumlah rombongan belajar. Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu

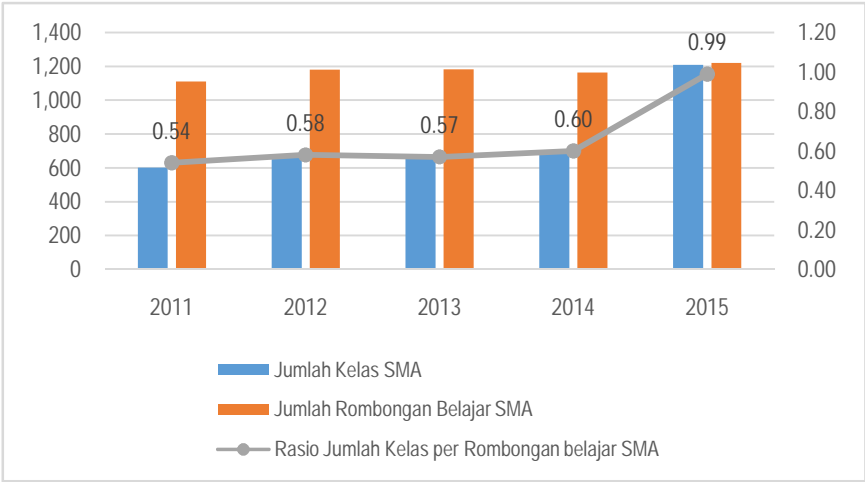
rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.50  
Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kelas SMA/SMK/MA	unit	587	601	682	677	698	1.208	22,23
2.	Jumlah rombongan belajar SMA/SMK/MA	kelompok		1.110	1.180	1.183	1.163	1.221	2,46
3.	Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA	orang		0,54	0,58	0,57	0,60	0,99	18,96

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)  
2) Flyer Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016  
3) SIPD Numerik 2014  
4) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan, namun seluruhnya belum mencapai angka ideal (satu). Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi meningkatnya jumlah kelas SMA/SMA/MA. Pada tahun 2011 hingga 2015, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA dalam kisaran 0,54 hingga 0,99, ini berarti ketersediaan kelas sudah cukup untuk menampung rombongan belajar karena rasionya yang berada pada angka 0,99 (mendekati 1).



Gambar 2.31  
Grafik Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2015

3. Fasilitas Pendidikan

a. Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik

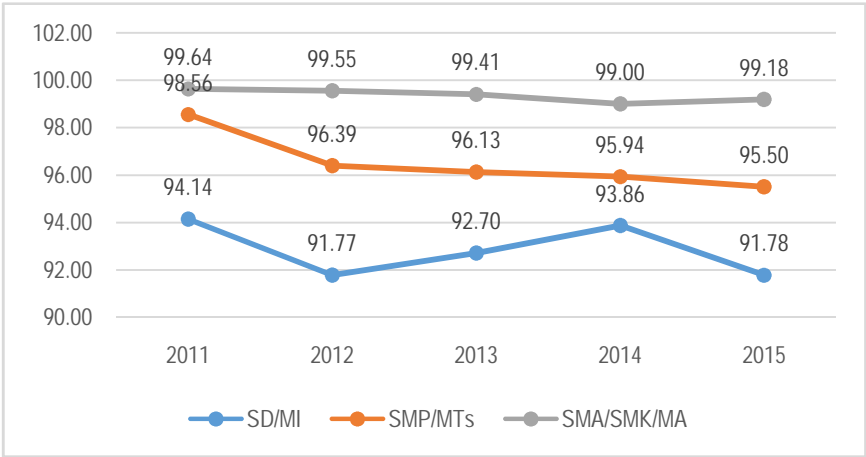
Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan. Data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik. Data tersebut didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, berikut adalah Data Kelas dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015.

Tabel 2.51  
Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Jumlah Kelas Kondisi Baik								
1	SD/MI	(unit)	1.573	1.573	1.575	1.606	1.508	-1,34
2	SMP/MTs	(unit)	752	747	769	803	807	2,40
3	SMA/SMK/MA	(unit)	1.104	1.112	1.180	1.185	1.091	-0,22
Jumlah Seluruh Kelas								
1	SD/MI	(unit)	1.671	1.714	1.699	1.711	1.643	-0,52
2	SMP/MTs	(unit)	763	775	800	837	845	3,46
3	SMA/SMK/MA	(unit)	1.108	1.117	1.187	1.197	1.100	-0,06
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik								
1	SD/MI	(%)	94,14	91,77	92,70	93,86	91,78	-0,82
2	SMP/MTs	(%)	98,56	96,39	96,13	95,94	95,50	-1,04
3	SMA/SMK/MA	(%)	99,64	99,55	99,41	99,00	99,18	-0,15

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016, Hasil Olahan, 2016

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruang kelas pada semua jenjang pendidikan sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang semuanya menunjukkan angka di atas 90%. Hasil dari indikator ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkan hingga mencapai angka 100% agar para pelajar di Kota Yogyakarta dapat terfasilitasi dengan baik khususnya dalam kegiatan belajar mengajar.



**Gambar 2.32**  
**Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

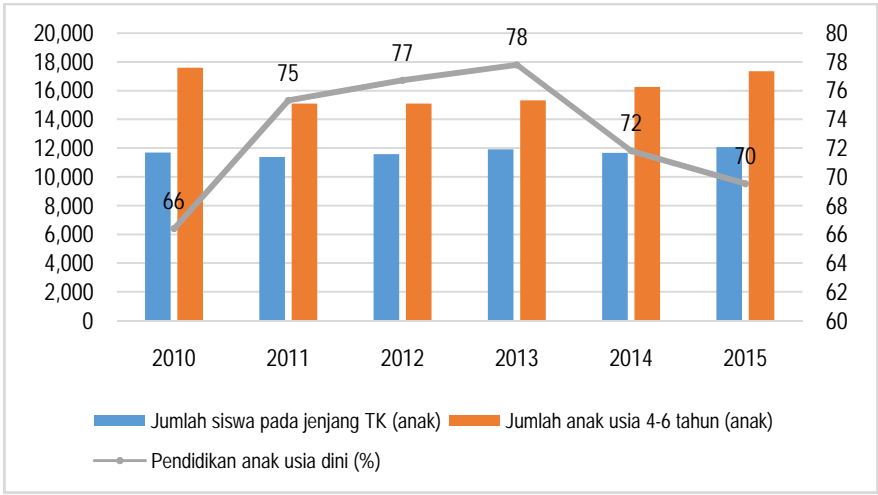
**4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUD di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015. Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 cenderung mengalami peningkatan kecuali di tahun 2015. Tahun 2010, rasio PAUD sebesar 66% dan meningkat hingga mencapai 78% pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2014 terjadi penurunan hingga menjadi 72%, dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 70%.

**Tabel 2.52**  
**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK	anak	11.684	11.374	11.584	11.918	11.675	12.069	1,21
2.	Jumlah anak usia 4-6 tahun	anak	17.596	15.101	15.101	15.321	16.257	17.358	2,87
3.	Pendidikan anak usia dini	persen	66	75	77	78	72	70	-1,52

- Sumber:*
- 1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2014)
  - 2. LPPD Kota Yogyakarta 2010-2015
  - 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016
  - 4. Hasil Olahan, 2015



Gambar 2.33  
Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

5. Angka Putus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.

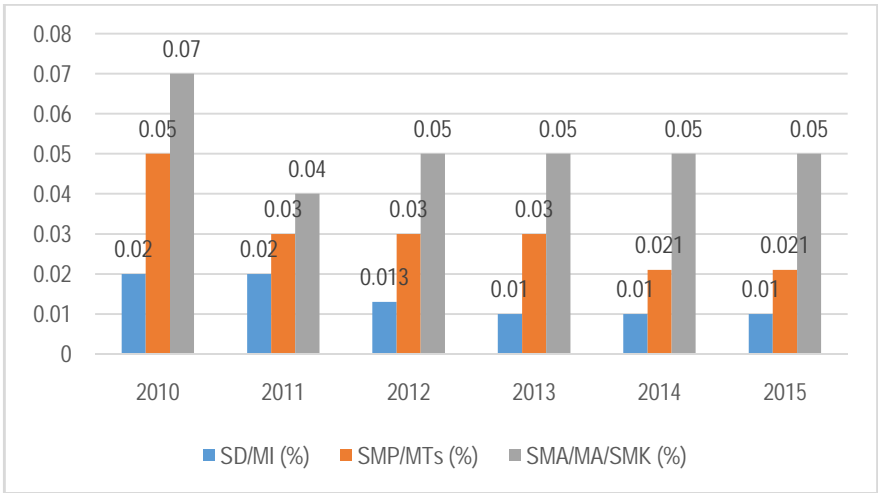
Tabel 2.53  
Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2014	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	persen	0,02	0,02	0,013	0,01	0,01	0,01	-11,62
2.	SMP/MTs	persen	0,05	0,03	0,03	0,03	0,021	0,021	-14,00
3.	SMA/MA/SMK	persen	0,07	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	-3,57

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2014)  
2) Flyer Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016  
3) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,02% dan terus mengalami penurunan hingga 0,01% pada tahun 2015. Begitu pula dengan kondisi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs, dari 0,05% pada tahun 2010 turun menjadi 0,02% pada tahun 2015. Angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA juga cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, angka putus

sekolah SMA/SMK/MA mencapai 0,07% dan menurun pada tahun selanjutnya hingga mencapai 0,05% pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata pada tiap jenjang pun menunjukkan angka negatif, yang mengisyaratkan adanya rata-rata penurunan angka putus sekolah. Hal tersebut mengisyaratkan kondisi yang baik di tiap jenjang pendidikan di Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.34**  
**Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Sebagaimana yang terlihat dalam kolom pertumbuhan rata-rata pertahun, pertumbuhan rata-rata Angka Putus sekolah menunjukkan bilangan negatif yang menggambarkan kondisi yang baik. Hal tersebut menjadi sebuah prestasi bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah melakukan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah. Adanya, program wajib belajar 12 tahun dianggap berkontribusi dalam menurunnya angka putus sekolah. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu di masa yang akan datang diharapkan upaya yang terus menerus dari Dinas Pendidikan untuk mendorong masyarakat untuk semakin tertarik bersekolah ke jenjang yang semakin tinggi sehingga mampu untuk menekan angka putus sekolah hingga 0%. Pada tahun berikutnya, angka putus sekolah tidak lagi dinyatakan dalam persentase, melainkan dalam jumlah siswa. Sehingga diharapkan jumlah siswa yang putus sekolah dapat diketahui secara lebih riil.

6. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Tabel 2.54  
Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	persen	100	100	100	100	100	100	0,00
2.	SMP/MTs	persen	91,13	99,65	99,6	98,68	99,99	99,83	0,04
3.	SMA/MA/SMK	persen	95,66	99,27	99,74	99,53	99,98	99,88	0,12

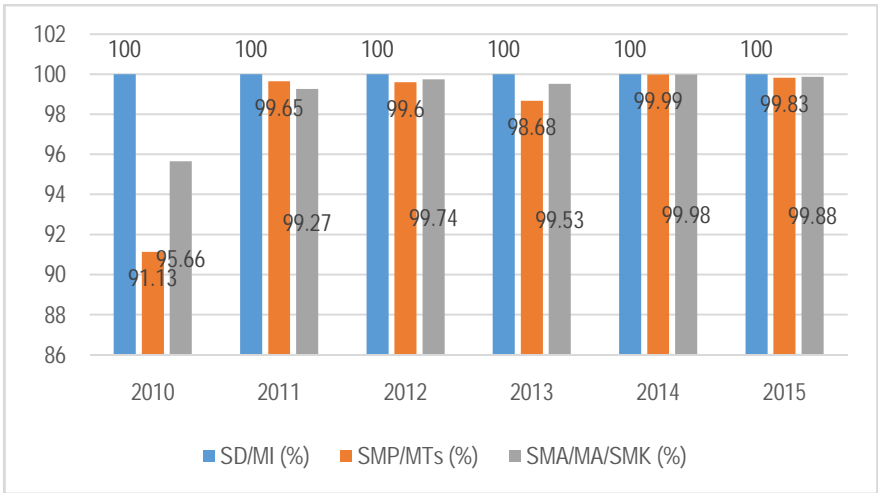
Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)
- 2) Flyer Dinas Pendidikan 2016
- 3) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalami kenaikan walalupun sedikit, kenaikan dapat terlihat dari nilai pertumbuhan rata rata pertahun yang bernilai positif. Angka kelulusan jenjang SD/MI selama 5 tahun ter akhir telah mencapai 100%. Selanjutnya untuk angka kelulusan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun sayangnya ada sedikit penurunan yang terdapat di tahun 2015. Pada tahun 2010, angka kelulusan SMP/MTs sebesar 91,13% dan terus meningkat hingga mencapai 99,99% pada tahun 2014, dan kemudian menurun menjadi 99,83% pada tahun 2015. Angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan pada tahun 2010-2014, dan sedikit penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2010, angka kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 95,66% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 99,98% pada tahun 2014, dan menurun menjadi 99,88% pada tahun 2015.

Kondisi angka kelulusan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami sedikit penurunan, namun apabila dilihat secara keseluruhan terdapat pertumbuhan rata-rata pertahun yang positif. Kecenderungan tersebut mengindikasikan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru, murid,

orang tua dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan telah mampu meningkatkan angka kelulusan.



Gambar 2.35  
Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

b. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Tabel 2.55  
Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

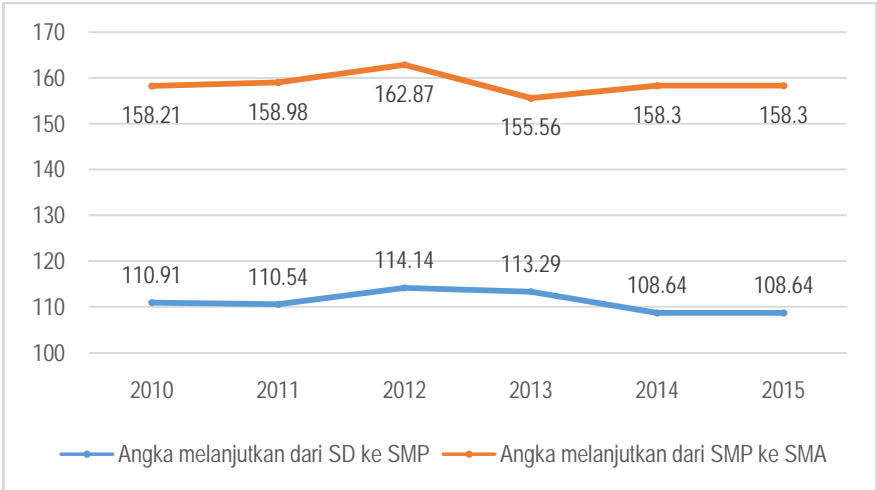
No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	110,91	110,54	114,14	113,29	108,64	108,64	-0,32
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	persen	158,21	158,98	162,87	155,56	158,3	158,3	-0,06

Sumber:  
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2015)  
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 bersifat fluktuatif dengan

kecenderungan menurun. Pada tahun 2010, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 110,91% dan meningkat menjadi 114,14% pada tahun 2012, sementara tahun 2103 menurun menjadi 113,29% dan tahun 2014 menjadi 108,64%. Pada tahun 2015, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs juga masih berada pada angka yang sama yaitu 108,64%.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga bersifat fluktuatif dengan kecenderungan sedikit menurun. Pada tahun 2010, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 158,21%, meningkat menjadi 162,87% pada tahun 2012 dan kembali turun menjadi 158,3% tahun 2014. Pada tahun 2015 pun angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA masih berada pada angka yang sama yaitu 158,3%. Angka melanjutkan sekolah yang cukup tinggi dan melebihi dari 100% ini disebabkan banyaknya pelajar dari luar kota yang melanjutkan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta. Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan jenjang SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta masih dianggap lebih baik jika dibandingkan daerah di sekitarnya.



**Gambar 2.36**  
**Grafik Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

**c. Guru yang` Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan

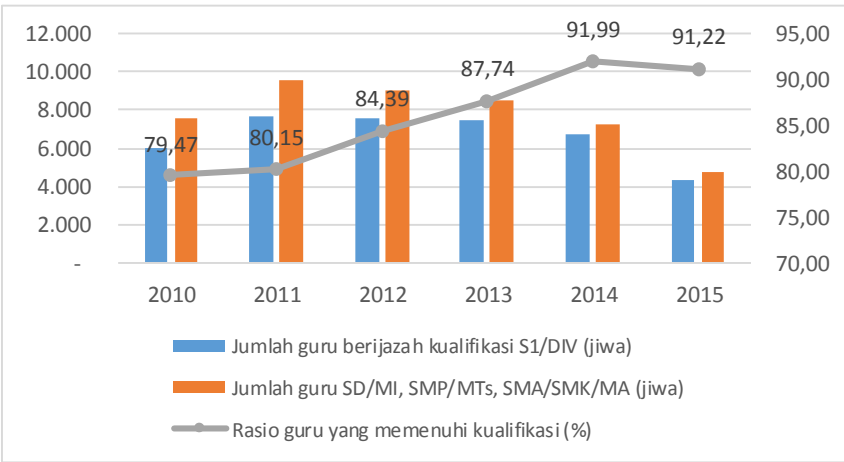
pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

**Tabel 2.56**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru berijazah S1/D-IV	persen	6.011	7.665	7.620	7.463	6.726	6.224	-4,0
2.	Jumlah seluruh guru SD/MI, dan SMP/MTs	persen	7.564	9.563	9.030	8.506	7.312	7.578	-4,4
3.	Persentase guru berijazah S1/D-IV	persen	79,47	80,15	84,39	87,74	91,99	82,13	0,7

Sumber :  
1) LPPD Kota Yogyakarta 2010-2015  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, persentasi guru berijazah S1/D-IV di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2010, persentase guru berijazah S1/D-IV hanya 79,47%, kemudian meningkat pada tahun 2011 hingga tahun 2014 mencapai 91,99%. Kenaikan ini disebabkan semakin banyaknya lulusan S1/D-IV yang menjadi guru, selain itu juga sudah menjadi syarat wajib bahwa untuk menjadi guru harus minimal lulusan S1/D-IV. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang menawarkan beasiswa bagi para guru. Guru yang belum S1/D-IV semakin berkurang juga karena banyak yang telah menjalani pensiun di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2015, terdapat penurunan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta menjadi 91,22%



**Gambar 2.37**  
**Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Pada tahun 2017 kelak, kewenangan pengelolaan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA akan berada di bawah pemerintah pusat. Sehingga, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya akan mengelola pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs saja. Terkait hal tersebut, persentasi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang nantinya akan di proyeksikan pada Bab IX, hanyalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs saja (tanpa mengikutsertakan jumlah dan persentase guru pada jenjang SMA/SMK/MA).

**B. Kesehatan**

**1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai.

Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi 4 macam, yaitu posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk

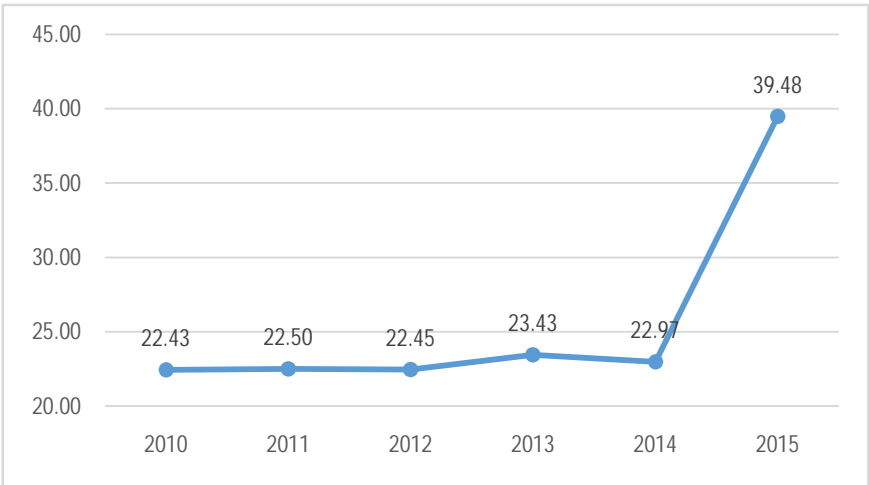
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

**Tabel 2.57**  
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Posyandu	Unit	622	622	622	625	625	625	0,10
2.	Jumlah Balita	Anak	27.733	27.649	27.701	26.671	27.209	15.832	-0,36
3.	Rasio posyandu per satuan balita		22,43	22,5	22,45	23,43	22,97	39,48	0,5

Sumber :  
1) *Profil Kesehatan Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*  
2) *Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2010, rasio posyandu per satuan balita sebesar 22,43, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 22 posyandu atau 23 posyandu. Angka tersebut masih meningkat hingga 23,43 pada tahun 2013, kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pada layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 45 kelurahan, namun angka tersebut kembali turun menjadi 22,97 pada tahun 2014. Penurunan dipengaruhi dengan berkurangnya jumlah posyandu, sedangkan jumlah balita mengalami peningkatan. Angka rasio posyandu per satuan balita kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015 menjadi 39,48 posyandu per 1000 balita. Peningkatan ini terjadi karena jumlah balita yang berkurang walaupun jumlah posyandu tetap sama.



**Gambar 2.38**  
**Grafik Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

**2. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk**

Puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

**Tabel 2.58**  
**Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

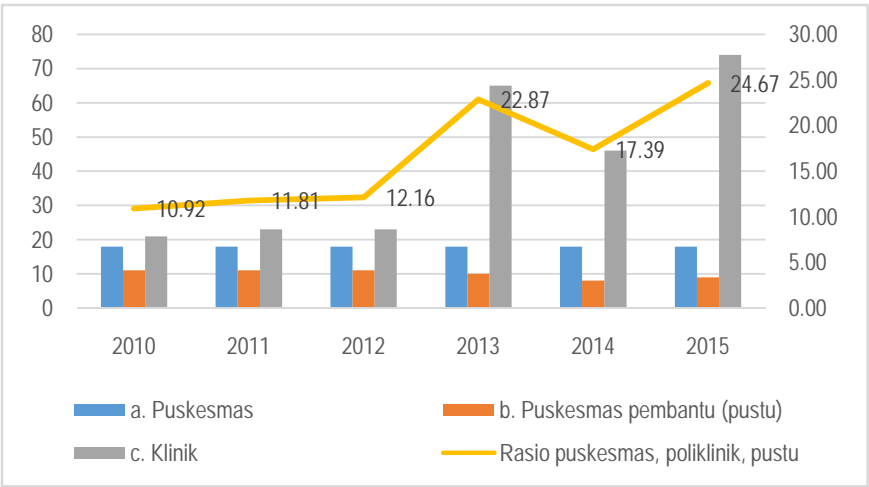
No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Puskesmas	Unit	18	18	18	18	18	18	0,00
	Puskesmas Pembantu	Unit	11	11	11	10	8	9	-3,32
	Klinik	Unit	21	23	23	65	46	74	44,75
	Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik	Unit	50	52	52	93	72	101	19,83

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,17
3.	Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk		10,92	11,81	12,16	22,87	17,39	24,67	23,40

Sumber :  
 1) *Profil Kesehatan Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 201)*  
 2) *Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami kenaikan rasio, sedangkan pada tahun 2014 menurun dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2015. Pada tahun 2010, rasio puskesmas/klinik/pustu sebesar 10,92 yang artinya 11 puskesmas/klinik/pustu melayani 100.000 penduduk. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 23 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2014, rasio menurun menjadi 17 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Kemudian meningkat kembali menjadi 24 puskesmas/klinik/pustu melayani 100.000 penduduk pada tahun 2015

Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu pada tahun 2015 disebabkan oleh meningkatnya jumlah puskesmas/klinik/pustu. Peningkatan tersebut khususnya terjadi pada jumlah klinik yang pada tahun 2014 berjumlah 46 dan kemudian meningkat menjadi 74 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status rumah sakit, sehingga rumah sakit-rumah sakit ada yang berganti status menjadi klinik, dan kemudian berefek pada peningkatan jumlah klinik di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.39  
Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

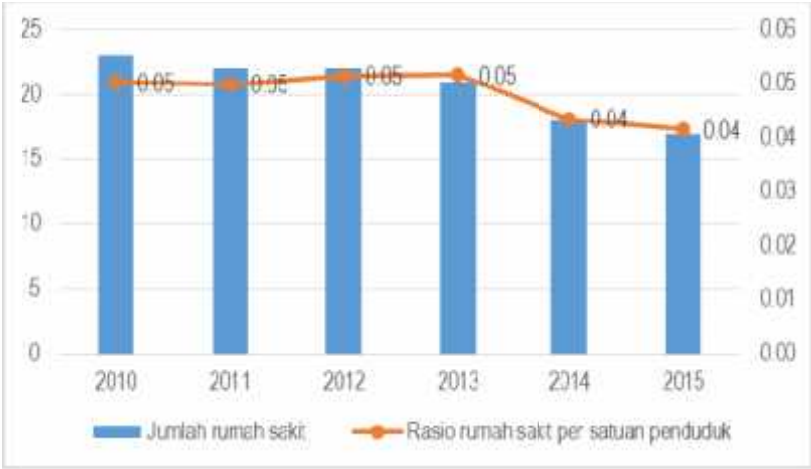
Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

Tabel 2.59  
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Rumah Sakit	unit	23	22	22	21	18	17	-5,75
2.	Jumlah penduduk	jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,17
3.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk		0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	-3,51

Sumber :  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016  
3) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, rasio rumah sakit sebesar 0,06. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,06 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 6 rumah sakit. Cakupan rumah sakit terus menurun hingga tahun 2015 mencapai 0,04 rumah sakit per 1.000 penduduk. Pertumbuhan rata-rata rasio rumah sakit per satuan penduduk selama tahun 2010-2015 mengalami perlambatan sebesar - 3,51%. Menurunnya cakupan rumah sakit dipengaruhi oleh menurunnya jumlah rumah sakit dari 23 rumah sakit di tahun 2010, menjadi 17 rumah sakit di tahun 2014. Penurunan jumlah rumah sakit kemungkinan dipengaruhi oleh adanya perubahan status beberapa rumah sakit menjadi klinik. Berikut ini merupakan grafik rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.40**  
**Grafik Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

**4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Indikator ini menggambarkan seberapa banyak jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan rasio praktek dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015

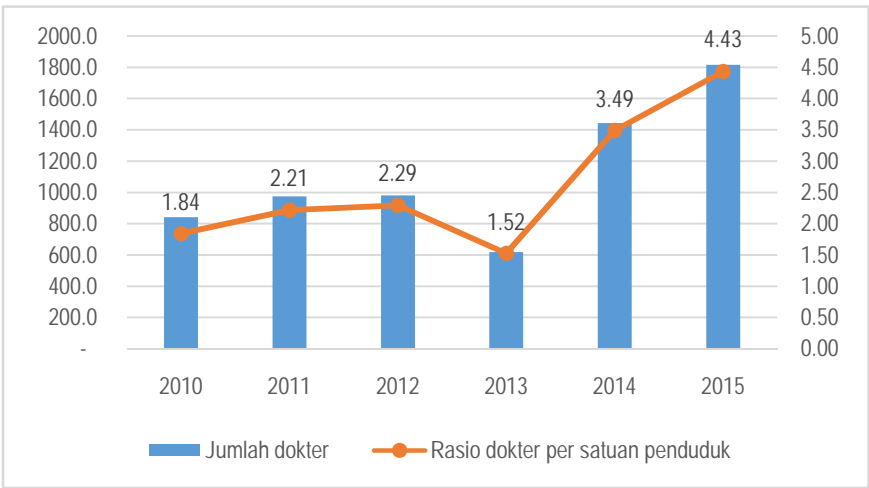
**Tabel 2.60**  
**Rasio Praktik Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Dokter	Orang	841	974	980	619	1.444	1.815	27,71
2.	Jumlah penduduk	Orang	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,17
3.	Rasio dokter per satuan penduduk		1,84	2,13	2,29	1,52	3,49	4,43	29,33

Sumber :  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio praktik dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, rasio praktik dokter sebesar 1,84, yang artinya terdapat 2 dokter praktek di setiap 1.000 penduduk. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2012, namun terjadi penurunan jumlah dokter di tahun 2013 yang menyebabkan turunnya rasio praktik dokter. Selanjutnya terjadi peningkatan jumlah dokter yang cukup signifikan di tahun 2014, yaitu sebesar 1.444 dokter yang menyebabkan kenaikan rasio praktik dokter yaitu 3 hingga 4 dokter per 1.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2015 terdapat peningkatan rasio praktik dokter menjadi 4,43, yang artinya setiap 1.000 penduduk terdapat 3 atau 4 dokter praktik.

**Gambar 2.41**  
**Grafik Rasio Praktek Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**



Sumber: Hasil Olahan, 2016

Namun meningkatnya rasio praktik dokter tersebut perlu dicermati lagi. Dikhawatirkan penyebab peningkatan jumlah praktik dokter secara

signifikan terjadi karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Hal ini kemungkinan disebabkan terjadi pendataan ganda saat perhitungan jumlah SIP, karena tidak ada kriteria pendataan dokter praktik di rumah maupun di pusat layanan kesehatan, baik nama maupun alamatnya. Pada kenyataan di lapangan pun, menurut Dinas Kesehatan, penghitungan di dasarkan pada jumlah Izin Praktik, dan pada saat ini terdapat banyak dokter yang telah habis izin praktiknya. Izin praktik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaharuinya, sehingga apabila pada saat ini dilakukan penghitungan jumlah dokter dengan dasar penghitungan jumlah izin praktik, maka diprediksikan akan menurun jumlahnya.

#### **5. Rasio Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Per Satuan Penduduk**

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 100.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud adalah meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah pemaparannya per masing-masing profesi.

Perawat gigi adalah profesi tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional. Rasio perawat gigi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat gigi dan jumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Rasio perawat gigi dapat dilihat pada tabel 3.1.2.B.5. Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio perawat gigi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2014 cenderung mengalami penurunan, namun rasionya kembali meningkat pada tahun 2015. Pada tahun 2011, terdapat 23 perawat gigi dalam setiap 100.000 penduduk, namun tahun 2012 hingga tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 18 perawat gigi per 100.000 penduduk, dan tahun 2014 sedikit meningkat menjadi 18 perawat gigi per 100.000 penduduk, kemudian peningkatan kembali terjadi pada tahun 2015 menjadi 24 perawat gigi per 100.000 penduduk. Selama tahun 2010-2015 pertumbuhan rata-rata rasio perawat gigi per satuan penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,83%. Pertumbuhan rata-rata pertahun yang bernilai positif tersebut menggambarkan adanya pertambahan jumlah perawat gigi yang signifikan dan mempengaruhi besaran rasio perawat gigi per satuan penduduk.

**Tabel 2.61**  
**Rasio Perawat Gigi Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Perawat gigi	Orang	103	68	67	74	99	2,20
2.	Jumlah Penduduk	orang	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-1,76
3.	Rasio perawat gigi per satuan penduduk		23	16	16	18	24	3,83

Sumber :  
1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*  
2) *Hasil Olahan, 2016*

Perawat, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Sebagaimana cara penghitungan rasio perawat gigi, rasio perawat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat dan jumlah penduduk dalam 100.000 penduduk. Setelah melalui proses penghitungan, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 rasio perawat per satuan penduduk bersifat fluktuatif.

Pada tahun 2011, rasio perawat sebanyak 455 perawat per 100.000 penduduk, kemudian mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 197 perawat per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah perawat kembali naik menjadi 239 perawat per 100.000 penduduk, namun rasionya mengalami penurunan lagi pada tahun 2014 menjadi 147 perawat di setiap 100.000 penduduk, hingga akhirnya rasio tersebut kembali meningkat menjadi 202 perawat per 100.000 penduduk. Pada tabel 2.62 merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan rasio perawat di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015.

**Tabel 2.62**  
**Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Perawat	Orang	2.003	844	970	609	827	-11,09
2.	Jumlah Penduduk	orang	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-1,76
3.	Rasio perawat per satuan penduduk		455	197	239	147	202	-9,21

Sumber :  
1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*  
2) *Hasil Olahan, 2016*

Merujuk pada Ikatan Bidan Indonesia (2006), definisi bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). Seperti perawat dan perawat gigi, rasio bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah bidan dan jumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, rasio bidan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,55%.

Pada tahun 2011, terdapat 71 bidan per 100.000 penduduk, demikian juga tahun 2012 tetap 71 bidan. Namun pada tahun 2013 rasio meningkat menjadi 76 bidan per 100.000 penduduk, akan tetapi pada tahun 2014 rasio kembali turun menjadi 75 bidan per 100.000 penduduk. Rasio bidan per satuan penduduk pun masih tetap pada tahun 2015, yaitu 75 bidan per 100.000 penduduk. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan rasio bidan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.

**Tabel 2.63**  
**Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Bidan	Orang	311	303	309	310	307	-0,31
2.	Jumlah Penduduk	orang	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-1,76
3.	Rasio bidan per satuan penduduk		71	71	76	75	75	1,55

Sumber :  
1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*  
2) *Hasil Olahan, 2016*

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda, dan (3) Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.

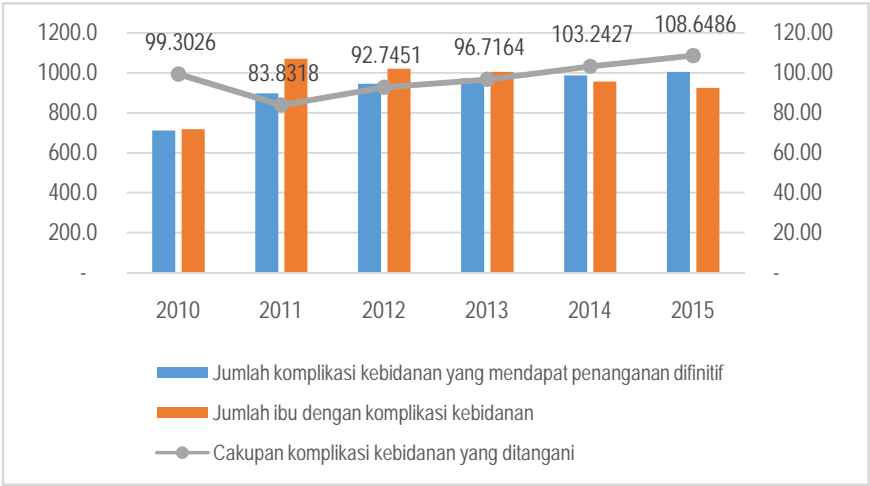
Tabel 2.64  
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Orang	712	897	946	972	987	1.005	7,51
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	717	1.070	1.020	1.005	956	925	6,99
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	99,3	83,8	92,8	96,8	103,2	108,6	2,26

Sumber :  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada data di atas, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan sedikit meningkat. Pada tahun 2010, cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 99,3%, kemudian

terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 83,8%, namun setelah itu mengalami peningkatan hingga mencapai 103,2% pada tahun 2014, dan kemudian mengalami peningkatan hingga 108,6%. Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka besaran cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kota Yogyakarta sudah melebihi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 80%. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar seluruh komplikasi pada ibu hamil dan melahirkan dapat selalu ditangani dengan baik.



**Gambar 2.42**  
**Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

**7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan merupakan perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani nakes dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Berikut ini merupakan data

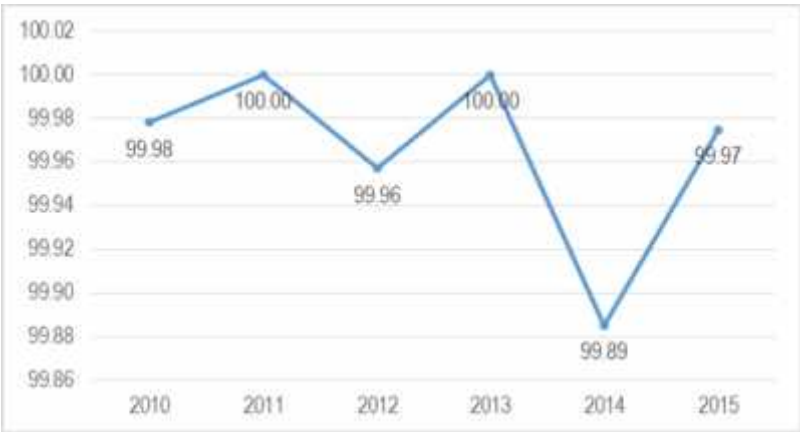
perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.65**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Orang	4.577	4.787	4.658	4416	4353	3981	-2,65
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang	4.578	4.787	4.660	4416	4358	3982	-2,65
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	99,98	100	99,96	100	99,9	99,97	-0,02

Sumber:  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 memiliki kecenderungan berada pada kondisi yang baik, yaitu berada pada kisaran angka 99% hingga 100%. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa selama tahun 2010-2015 pertumbuhan rata-rata cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami sedikit perlambatan yakni sebesar -0,02%. Hal ini menandakan perlunya peningkatan indikator ini hingga mencapai 100% setiap tahun, agar seluruh ibu melahirkan mendapatkan pertolongan yang baik dan sesuai standar hingga nantinya akan memberikan efek positif yaitu berupa menurunnya angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan. Angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir sudah berada di atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%.



**Gambar 2.43**  
**Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

*Universal Child Immunization* (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan di masa mendatang. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.66**  
**Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Kelurahan UCI	Unit	45	45	45	45	45	45	0,00
2.	Jumlah Seluruh Kelurahan	Unit	45	45	45	45	45	45	0,00
3.	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	100	100	100	100	100	100	0,00

*Sumber :*  
1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015* (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) *Hasil Olahan, 2016*

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 telah mencapai 100% sesuai dengan target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas maupun rumah sakit.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

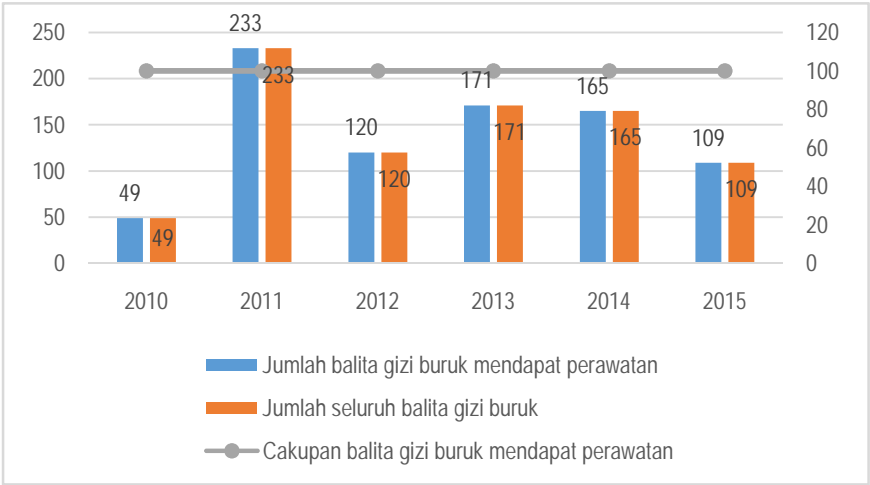
Tabel 2.67  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Anak	49	233	120	171	165	109	66,41
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	49	233	120	171	165	109	66,41
3.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100	100	0,00

Sumber:  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Merujuk pada tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100%). Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sebesar 100%, maka cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta sudah mampu mencapainya. Untuk mencapai angka 100% tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian makanan tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta

Operasional Rumah Pemulihan Gizi serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.



**Gambar 2.44**  
**Grafik Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yang Ditemukan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**

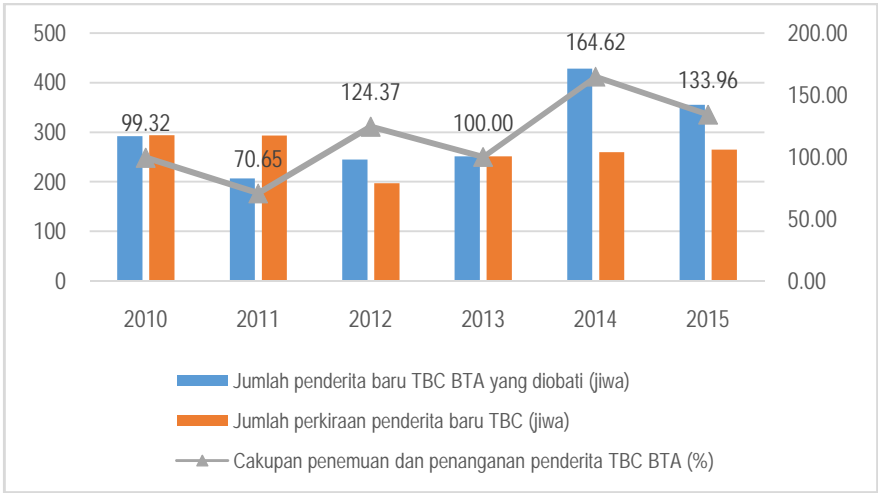
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama 1 tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.68**  
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	Orang	292	207	245	251	428	355	9,03
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA	orang	294	293	197	251	260	265	-0,04
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	99,32	70,65	124,37	100	164,62	133,96	14,71

Sumber:  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel 2.68 cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BT mencapai 99,32%, namun mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi 70,65%. Tahun 2012, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BT kembali meningkat mencapai 124,37%, namun turun lagi di tahun 2013 menjadi 100,00%, selanjutnya meningkat secara signifikan di tahun 2014 menjadi 164,62%, dan menurun kembali menjadi 133,96%.



**Gambar 2.45**  
**Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal yang sebesar 100%, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BT di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2015 sudah mampu melampauinya. Akan tetapi, tetap diperlukan penanganan yang maksimal agar jumlah penderita TBC BT tidak meningkat di masa mendatang. Untuk penanganan sejak dini kasus TBC di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit se-Kota Yogyakarta, dokter praktek dan Kelompok Aisyah. Melalui jaringan tersebut, warga yang ditemukan sakit dengan gejala batuk selama 3 minggu dan tidak sembuh, maka akan didampingi untuk melakukan pemeriksaan BTA-Basil Tahan Asam. Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut.

Walaupun Dinas Kesehatan dan jejaring kerjasamanya sudah berusaha keras untuk menangani penyakit ini, namun penanganan kasus

TBC tetap memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Hal tersebut disebabkan karena penderita harus meminum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus. Faktor kebosanan dan kejenuhan diprediksi akan timbul, untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin meminum obat. Untuk memotivasi penderita, terdapat penghargaan berupa uang bagi penderita dan pendamping minum obat untuk penyakit ini. Para penderita sembuh TBC mendapatkan penghargaan berupa uang sebesar Rp 300.000,- sedangkan para pendamping minum obat-PMO mendapat penghargaan uang Rp 200.000,-.

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

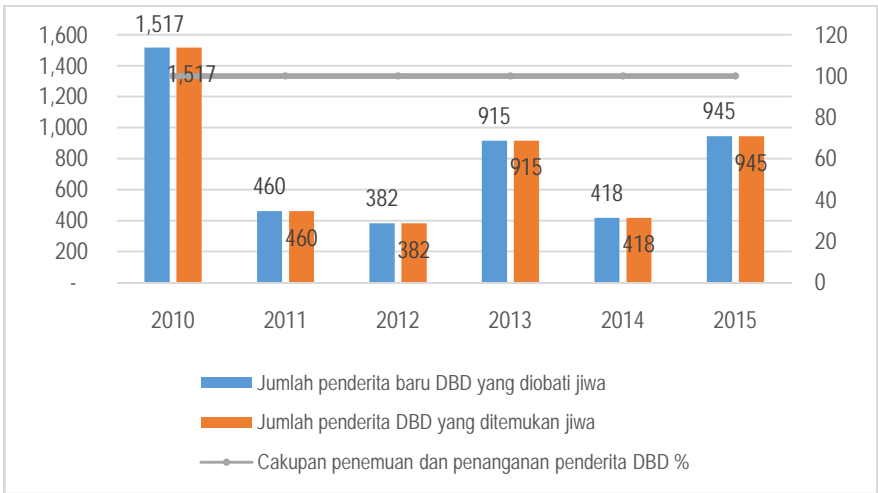
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditandai dengan panas mendadak yang berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji *Torniquet* positif), disertai/tanpa pembesaran hati (*hepatomegali*), *trombositopenia* (trombosit  $\leq 100.000/\mu\text{l}$ ), peningkatan *hematocrit*  $\geq 20\%$ . Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.69  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta  
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobati	Jiwa	1.517	460	382	915	418	945	24,93
2.	Jumlah perkiraan penderita baru DBD	Jiwa	1.517	460	382	915	418	945	24,93
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100	100	0,00

Sumber :  
1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*  
2) *Hasil Olahan, 2016*

Pada tabel di atas terlihat bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 telah mencapai 100%, ini berarti seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi kasus dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010 terdapat 1.517 kasus DBD dan kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 945 kasus DBD.



**Gambar 2.46**  
**Grafik Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2015*

DBD merupakan penyakit serius yang harus diberantas dan dicegah. Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) dan menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes berkembang biak. Diharapkan dengan rutin melakukan kegiatan tersebut dapat menekan jumlah kasus DBD di Kota Yogyakarta.

**12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

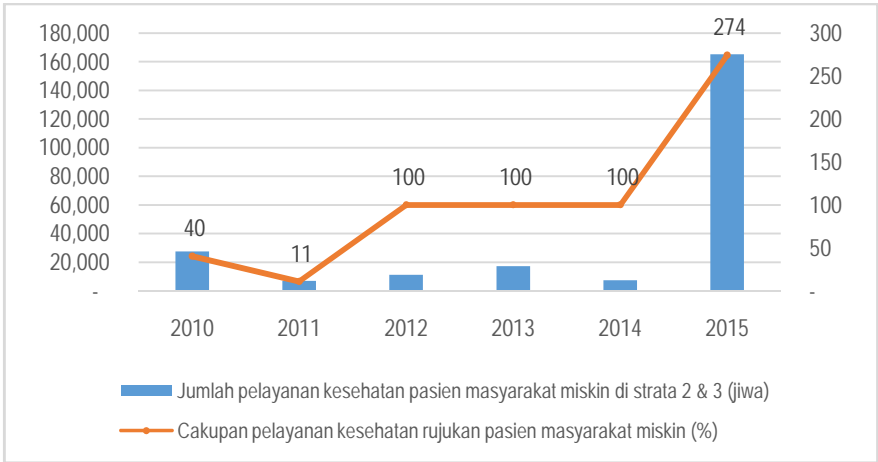
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan perbandingan antara jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3 dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.70**  
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2014	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin distrata 2 dan 3	orang	27.568	7.014	11.090	17.192	7.269	165.181	430,65
2.	Jumlah masyarakat miskin	orang	68.456	65.271	11.090	17.192	7.269	60.230	127,65
3.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	40,27	10,73	100	100	100	274	186,30

Sumber :  
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin hanya mencapai 40,27%, yang artinya 40.888 masyarakat miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan kondisi pada tahun 2011, hanya 10,73% masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, sejak tahun 2012 hingga 2014, sudah terjadi perubahan yang positif, yaitu seluruh masyarakat miskin sudah mendapatkan pelayanan kesehatan (100%), begitu juga dengan kondisi pada tahun 2015 yangmana cakupannya berjumlah sebesar 274%. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%, maka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta sudah mampu tercapai. Namun, diharapkan untuk periode selanjutnya tidak perlu lagi menyertakan indikator ini karena sudah ada fasilitas jaminan kesehatan (seperti BPJS) sehingga tidak ada lagi perbedaan masyarakat miskin dan non miskin.



**Gambar 2.47**  
**Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**13. Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui efektivitas, *continuum of care* dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta.

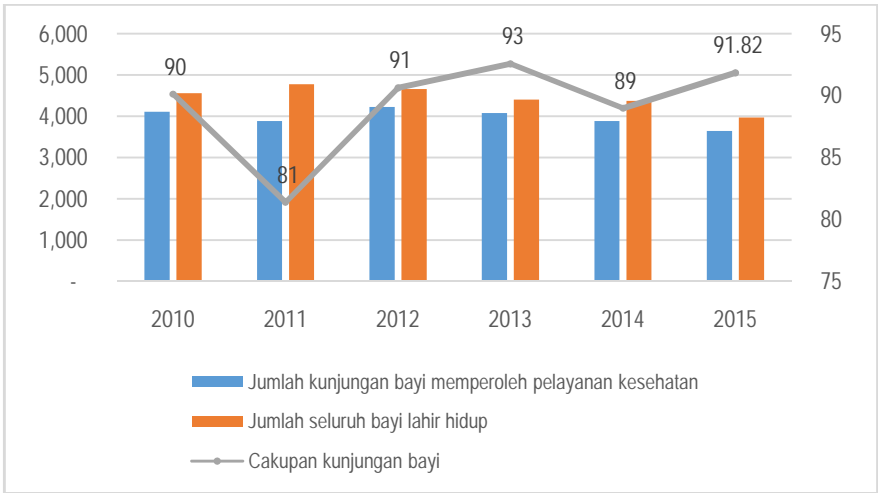
**Tabel 2.71**  
**Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi	4.108	3.885	4.221	4.078	3.887	3.647	-2,21
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Bayi	4.559	4.774	4.658	4.406	4.369	3.972	-2,61
3.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	90,1	81,4	90,6	92,56	88,97	91,82	0,63

*Sumber :*  
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 bersifat flukuatif dengan kecenderungan sedikit peningkatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan

rata-rata pertahun yang bernilai positif. Pada tahun 2010, cakupan kunjungan bayi mencapai 90,1%, kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai 91,82% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%, maka ketidaktercapaian SPM hanya terjadi pada tahun 2010, dan 2014 saja, sedangkan 2010, 2012, 2013, dan 2015 sudah mampu mencapai SPM.



**Gambar 2.48**  
**Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

14. Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.72**  
**Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Puskesmas	Unit	18	18	18	18	18	18	0,00
2.	Jumlah Seluruh Kecamatan	Unit	14	14	14	14	14	14	0,00
3.	Cakupan puskesmas	Persen	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	0,00

Sumber :  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan perkembangan yang tetap dengan cakupan puskesmas mencapai 128,57%. Artinya seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas. Terdapat pula kecamatan-kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas. Tersedianya puskesmas di setiap kecamatan memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan terdekat bagi masyarakat.

15. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitung berdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kota. Berikut ini merupakan cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta.

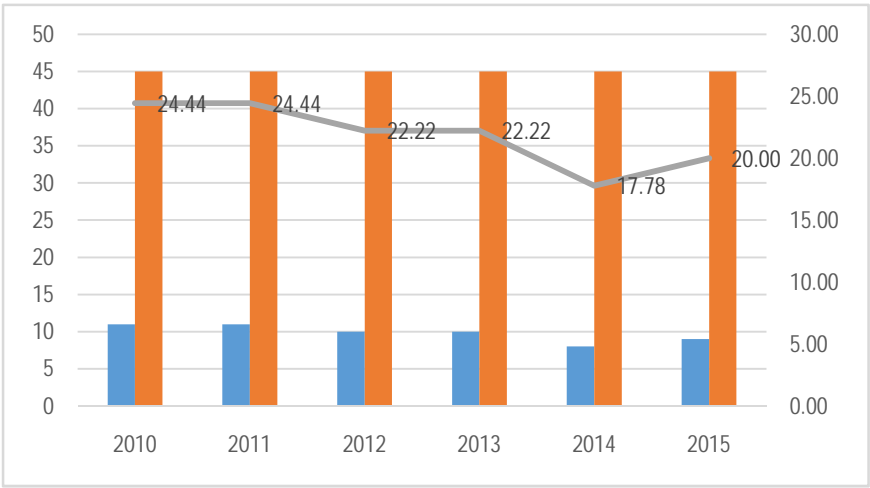
Tabel 2.73  
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2014	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah puskesmas pembantu	Unit	11	11	10	10	8	9	-3,31
2.	Jumlah Kelurahan	Unit	45	45	45	45	45	45	0,00
3.	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	24,44	24,44	22,22	22,22	17,78	20,00	-3,31

Sumber :  
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2010-2011 tersedia 11 puskesmas pembantu, kemudian turun menjadi 10 pustu di tahun 2012-2013, dan di tahun 2015 hanya tersisa 9 pustu. Berkurangnya jumlah puskesmas pembantu dikarenakan penutupan beberapa pustu yang dianggap kurang mampu memberikan pelayanan optimal kepada

masyarakat. Beberapa pustu juga dialih fungsikan menjadi klinik rawat inap maupun rumah sehat lansia.



**Gambar 2.49**  
**Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**16. Jaminan Kesehatan**

Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah saat ini adalah BPJS. BPJS ini masih sangat baru sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang menyertainya. Kendala yang terjadi ini cukup serius mengingat berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien. Menurut keterangan dari Bagian ADP RSUD Kota Yogyakarta beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS di RSUD Kota Yogyakarta adalah:

- 1) Verifikator merambah diagnosis dokter.  
Sebagai contoh pasien di diagnosis Bronchopneumonia, namun hasil Rontgen Foto mengatakan Bronchitis, maka pihak rumah sakit diminta mengganti diagnosis menjadi Bronchitis. Seharunya jika secara klinis bronchopneumonia, rumah sakit bertahan dengan diagnosis bronchopneumonia. Namun kenyataannya kalau menurut pihak BPJS, apabila diagnosis Bronchopneumonia hasil rontgen fotonya harus menunjukkan Seperti Pneumonia (sesuai hasil dari DPM).
- 2) Permenkes tentang Kegawatdaruratan perlu ditinjau ulang karena belum semua kondisi gawat darurat terakomodir, seperti contoh Vulnus lacerasi di extrememitas.
- 3) Belum ada Juknis verifikasi klaim untuk verifikator BPJS, sehingga tidak ada dasar dalam memverifikasi (menolak klaim).

- 4) Belum ada SDM (Petugas BPJS) di Poliklinik Sore, sehingga apabila petugas tidak ada (tidak standby), maka tidak terverifikasi karena kewenangan SEP pada Petugas BPJS.
- 5) Ada beberapa kasus rawat inap yang dipaksakan untuk kasus rawat jalan tanpa mau tahu kondisi umum pasien.
- 6) Permasalahan Obat Farmasi
  - a. Ada penyakit kronis yang belum masuk kedalam kategori 10 besar penyakit kronis versi BPJS, seperti: Gastritis.
  - b. Obat-obat dari diagnosis penyerta atau komplikasi dari DM (Diabetes Melitus) tidak bisa diklaim, Seperti: Ca Carbonat, Calos, Anemolat, dll.

C. **Pekerjaan Umum**

Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dimana mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atau ditiadakan karena tidak tepat apabila digunakan untuk mengukur kinerja kewilayahan di Kota Yogyakarta, juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

1. **Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Dalam SPM kondisi jalan sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang.

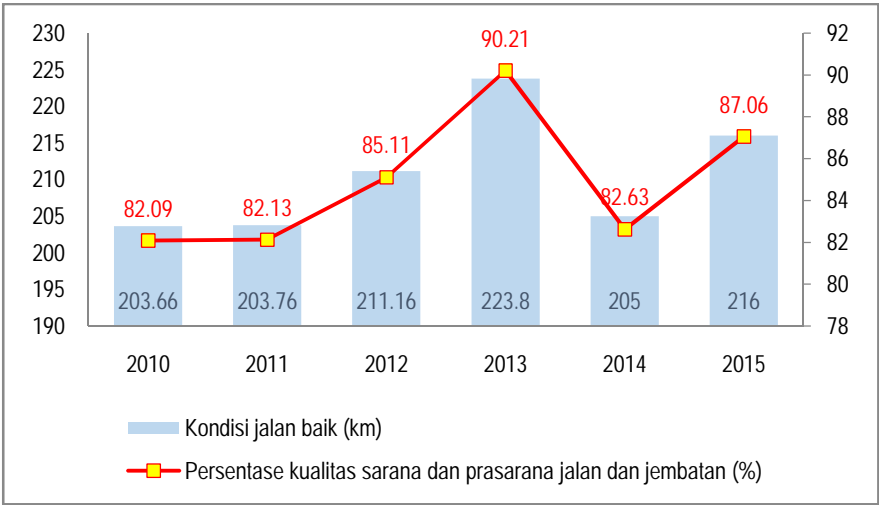
**Tabel 2.74**  
**Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- rata (% / Tahun)
1.	Kondisi jalan baik	Km	203,66	203,76	211,16	223,80	205,00	216	1,18

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- rata (% / Tahun)
2.	Panjang jalan penghubung pusat kota	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	-
3.	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	%	82,09	82,13	85,11	90,21	82,63	87,06	1,17

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2015 semakin menunjukkan kecenderungan yang positif. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 kondisi jalan baik di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,18% per tahun, sedangkan di tahun yang sama, panjang jalan penghubung pusat kota di Kota Yogyakarta tidak mengalami pertumbuhan (stagnan). Sehingga dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terjadi peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai 1,17%. Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) menjadi 100%, persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) menjadi 100%, persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan dari 80% menjadi 81% di wilayah Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.50**  
**Grafik Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan**  
**di Kota Yogyakarta 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Meskipun dari tahun 2010 hingga tahun 2013 kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan khususnya pada kondisi jalan yang baik mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun 2014 kondisi jalan yang baik sempat mengalami penurunan. Di tahun 2015 kondisi jalan yang baik kembali meningkat menjadi 216 km atau 87,06% dari keseluruhan jalan yang ada di Kota Yogyakarta.

**2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pemeluk Agama**

Indikator rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama per 1000 penduduk. Berdasarkan tabel jumlah tempat ibadah diatas terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak dan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah masjid yang jumlahnya hingga tahun 2013 sebanyak 958 unit Masjid, sedangkan jumlah Gereja baik Gereja Kristen dan Katolik memiliki jumlah dengan kecenderungan tetap dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, begitu pula dengan jumlah Pura dan Vihara.

**Tabel 2.75**  
**Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

No.	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Tempat Ibadah		919	940	961	1.015	1.033	2,97
	a. Masjid	Unit	865	888	906	958	979	3,14
	b. Gereja Kristen	Unit	41	39	41	41	41	-
	c. Gereja Katolik	Unit	7	7	7	7	7	-
	d. Pura	Unit	1	1	1	1	1	-
	e. Vihara	Unit	5	5	6	7	5	-
2.	Jumlah Pemeluk Agama	Jiwa						-
	a. Islam	Jiwa	374.123	379.154	351.873	335.389	344.995	-2,01
	b. Kristen	Jiwa	31.267	31.095	31.193	26.478	26.995	-3,61
	c. Katolik	Jiwa	49.644	53.748	46.195	43.196	40.638	-4,88
	d. Hindu	Jiwa	791	799	803	552	565	-8,07
	e. Budha	Jiwa	1.833	1.951	2.155	1.366	1.362	-7,16

- Sumber:
- SIPD Numerik Tahun 2014-2015
  - Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2014-2015

Jumlah tempat ibadah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami peningkatan. Jumlah tempat ibadah berupa masjid mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,14%, sedangkan untuk tempat ibadah lain seperti gereja (katolik dan Kristen), pura, dan vihara tidak mengalami penambahan jumlah tempat ibadah. Meskipun demikian, jumlah pemeluk agama dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Untuk mengetahui rasio ketersediaan tempat ibadah dilakukan perbandingan antara jumlah fasilitas tempat ibadah dengan jumlah pemeluk masing-masing agama dikalikan 1.000.

**Tabel 2.76**  
**Rasio Tempat Ibadah per Satuan Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Rasio Tempat ibadah per 1.000 penduduk	unit per 1000 pemeluk agama						
	a. Masjid	unit per 1000 pemeluk agama	2,312	2,342	2,575	2,856	2,838	4,18
	b. Gereja Kristen	unit per 1000 pemeluk agama	1,311	1,254	1,314	1,548	1,519	2,99
	c. Gereja Katolik	unit per 1000 pemeluk agama	0,141	0,130	0,152	0,162	0,172	4,05
	d. Pura	unit per 1000 pemeluk agama	1,264	1,252	1,245	1,812	1,770	6,97
	e. Vihara	unit per 1000 pemeluk agama	2,728	2,563	2,784	5,857	3,671	6,12

Sumber : SIPD Numerik Tahun 2014- 2015 dengan Hasil Olahan

Secara umum, perkembangan jumlah tempat ibadah per 1.000 pemeluk agama di Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami pertumbuhan. Sesuai dengan jumlah pemeluk masing-masing agama, jumlah masjid per 1.000 pemeluk agama paling banyak dibandingkan tempat ibadah lainnya. Sebaliknya jumlah Pura paling sedikit dibandingkan dengan tempat ibadah yang lain.

**3. Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola Pemerintah Kota**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Terdapat empat TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu TPU Sasanalaya dengan luasan sebesar 12,65 hektar yang terletak di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan; TPU Sarilaya memiliki luas sebesar 6,497 hektar yang terletak di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; TPU Pracimalaya dengan luasan sebesar 12,213 hektar yang terletak di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan; serta TPU Utaralaya yang terletak di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo dan

memiliki luasan 16,764 hektar, dan kesemuanya merupakan tanah milik negara. Keempat TPU tersebut dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki daya tampung sebanyak 12.579 unit dengan rincian 4611 unit untuk TPU Sasanalaya, 1779 unit untuk TPU Sarilaya, 3632 unit untuk TPU Pracimalaya, dan 3421 unit untuk TPU Utaralaya. Melihat daya tampung TPU yang tetap ini menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umum di masa mendatang yang semakin meningkat.

**Tabel 2.77**  
**Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Unit	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487
3.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

*Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan*

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikan dengan bilangan 1000. Dari tahun 2010 hingga tahun 2014, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk relatif tidak meningkat. Hal ini mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang cenderung menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2015, ditambah dengan luas dan daya tampung tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta yang cenderung stagnan (tidak bertambah).

**4. Rasio Permukiman Layak Huni**

Menurut Permen PU No.01/PRT/M/2014 permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas

pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Data yang digunakan untuk perhitungan indikator ini berasal dari dokumen SIPD Numerik Tahun 2015 dan sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.78**  
**Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	2.888,04	2.893,39	2.898,12	2.902,61	2.906,88	2.723,11	-1,17
2.	Luas Wilayah Permukiman	Ha	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988	-
3.	Rasio permukiman layak huni		0,967	0,968	0,970	0,971	0,973	0,911	-1,17

Sumber :  
1. SIPD Numerik Tahun 2015 dengan Hasil Olahan  
2. Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Yogyakarta dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun rasio permukiman layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -1,17%. Menurunnya jumlah luas permukiman layak huni ini terjadi akibat adanya penurunan kualitas permukiman yang mengakibatkan luas permukiman tidak layak huni (kumuh) di tahun 2015 yang justru mengalami peningkatan.

**5. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk**

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota.

Tabel 2.79

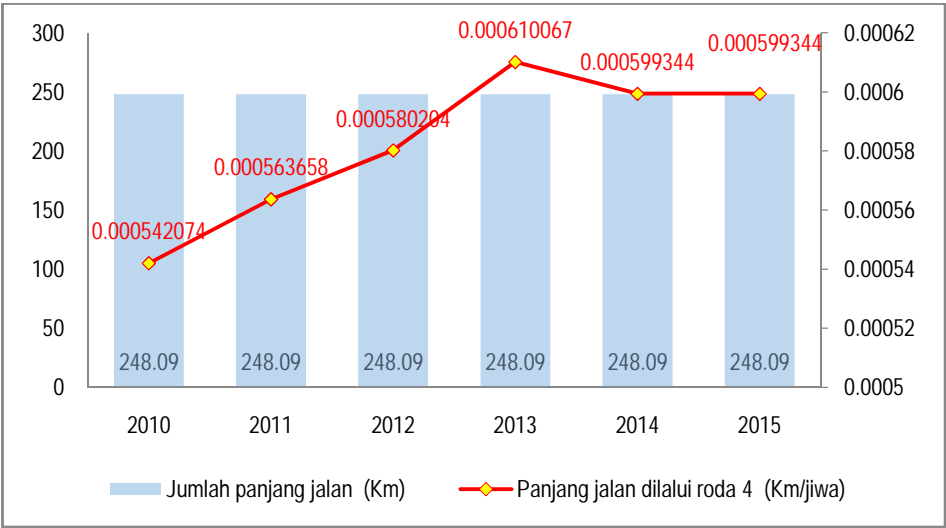
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Panjang Jalan *)	km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	-
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,20
3.	Rasio panjang jalan per satuan penduduk	km/ jiwa	0,00054	0,00056	0,00058	0,00061	0,00060	0,00059934	2,11

Sumber :

- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2016 dengan Hasil Olahan
  - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
  - Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
- Keterangan : \*) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas Jalan

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana nilai tersebut menjadikan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,11% per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat ini diduga dipengaruhi oleh semakin menurunnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalan yang tidak bertambah dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Meskipun relatif tidak mengalami peningkatan, namun semakin meningkatnya nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk ini dapat diantisipasi dengan meningkatkan kuantitas penggunaan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagian kota semakin padat (belum dapat dicapai dengan mudah).



Gambar 2.51

Grafik Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

6. **Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota (Aksesibilitas)**

Formula yang digunakan untuk menghitung jalan pengubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk adalah dengan membagi jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda empat dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dan dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tidak ada pendataan mengenai formula pembagi untuk perhitungan indikator ini. Indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat) ini digunakan untuk menghitung aksesibilitas wilayah, namun pada dasarnya kondisi Kota Yogyakarta tidak terdapat wilayah yang terisolir, sehingga dapat dikatakan bahwa kesemua jalan di Kota Yogyakarta dapat diakses dan atau dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

**Tabel 2.80**  
**Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota Yogyakarta (Aksesibilitas) Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total panjang jalan eksisting	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09
2.	Total rencana panjang jalan	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09
3.	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Dalam indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, untuk menghitung aksesibilitas (persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota) menggunakan formula jumlah panjang jalan eksisting dibagi dengan total rencana panjang jalan dikalikan dengan bilangan 100. Panjang

jalan eksisting dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 adalah sepanjang 248,09 km (panjang jalan bernomor ruas jalan), sedangkan total rencana panjang jalan yang ditetapkan di Kota Yogyakarta adalah sepanjang 248,09 km, sehingga dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2015 nilai indikator aksesibilitas di Kota Yogyakarta adalah 100%.

7. Panjang dan Kondisi Trotoar

Permendagri 54/2010 menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air adalah dengan membagi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, perhitungan mengenai panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sulit dilakukan pendataannya, hal ini dikarenakan dalam satu ruas jalan belum tentu terdapat drainase dan atau trotoar, atau hanya terdapat drainase dan atau trotoar di salah satu sisinya saja (ruas jalan kanan atau kiri saja), sehingga indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air diganti dengan panjang dan kondisi trotoar (umum) di wilayah Kota Yogyakarta, selain trotoar yang sudah ada tegel difabel di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.81  
Jumlah Panjang Jalan yang Dilengkapi Trotoar dan Kondisi  
di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No.	Indikator	Satuan	2013	%	2014	%	2015	%
1.	Jumlah panjang trotoar	M	183.120		183.657		185.831	
2.	Trotoar yang sudah ada tegel difabel	M	15.344	8,38	18.763,5	10,22	20.937,4	11,27
3.	Trotoar yang belum ada tegel difabel	M	172.350,4	94,12	164.893,5	89,78	163.471	87,97
4.	Kondisi trotoar	M						
	a. Baik	M	114.825	62,70	115.362	62,81	118.868	63,96
	b. Sedang	M	54.137	29,56	54.137	29,48	53.173	28,1
	c. Rusak	M	14.158	7,73	14.158	7,71	13.790	7,42

Sumber : Rekap Data Trotoar, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Panjang trotoar, baik yang sudah bertegel difabel dan yang belum bertegel difabel di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 hingga tahun 2015

mengalami peningkatan dari yang semula di tahun 2013 hanya sepanjang 183.120 meter menjadi 185.831 meter di tahun 2015. Di tahun 2015 sepanjang 20.937,4 meter (11,27%) trotoar sudah memiliki fasilitas tegel difabel. Ditinjau dari kondisinya di tahun yang sama sebesar 63,96% atau sepanjang 118.868 meter trotoar dalam kondisi yang baik. Meskipun belum begitu signifikan, namun dari tahun ke tahun perbaikan kondisi trotoar terus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari panjang trotoar yang berada pada kondisi baik dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang terus meningkat.

8. Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai

Formula yang dipergunakan untuk menghitung sempadan sungai yang dipakai bangunan rumah liar adalah panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungai kota dikali dengan bilangan 100. Namun data untuk indikator tersebut tidak dapat ditemukan karena belum pernah dilakukan pendataan, sehingga indikator ini diganti dengan data mengenai luasan areal permukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.82  
Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas areal permukiman di bantaran sungai	Ha	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	-

Sumber : SIPD Numerik Tahun 2015

Luas areal permukiman di bantaran sungai wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan luasan yang sama dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Yogyakarta sendiri yang secara administratif belum memiliki Perwal mengenai panjang sempadan sungai, sehingga selama ini sempadan sungai yang ditentukan oleh Kota Yogyakarta masih mengikuti sempadan sungai yang ditetapkan oleh provinsi (15 meter dari sungai). Namun apabila ditarik garis dari sungai, sempadan sungai di Kota Yogyakarta tidak ada yang berjarak 15 meter (bangunan di pinggir sungai tersebut melanggar aturan sempadan sungai, baik di Code, Winongo, dan Gajahwong).

Selanjutnya, sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta, berada dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Selain itu, sempadan sungai sesuai PP No. 38 tahun 2011 tentang sungai kewenangan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak, sehingga data untuk sempadan sungai yang dipakai bangunan liar tidak dapat diperoleh. Selain itu pula, di Kota Yogyakarta cukup banyak bangunan yang terletak di sepanjang sungai. Namun tanah di sepanjang sungai tersebut sebagian besar merupakan tanah Magersari (tanah milik Keraton Yogyakarta). Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya memiliki sertifikat hak milik dan hak pakai, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bangunan liar.

9. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU No.01/PRT/M/2014 tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

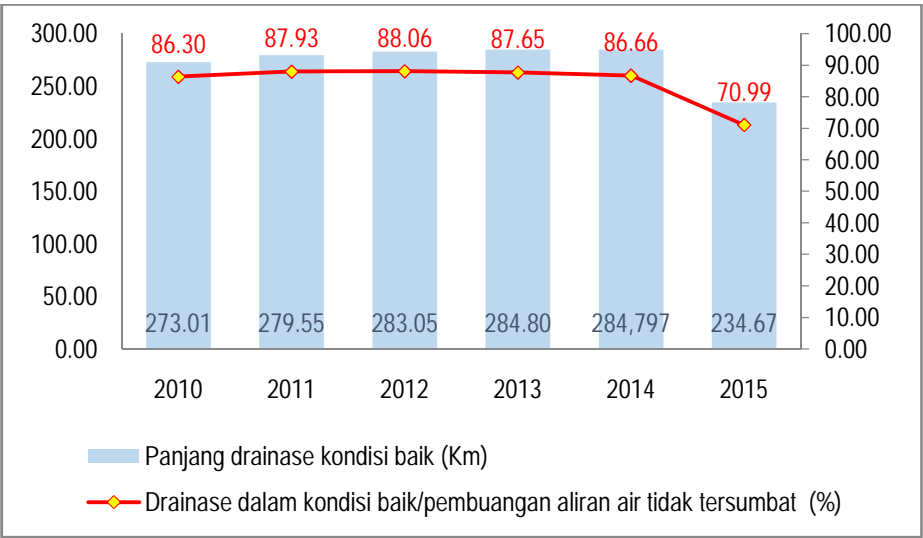
Tabel 2.83  
Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang Drainase Kondisi Baik	Km	273,01	279,55	283,05	284,80	284,797	234,67	(2,98)
2.	Panjang Seluruh Drainase	Km	316,35	317,92	321,42	324,92	328,63	330,57	0,88
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	86,30	87,93	88,06	87,65	86,66	70,99	(3,93)

Sumber :  
1. SIPD Numerik Tahun 2014 dengan Hasil Olahan  
2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Panjang drainase kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014, yakni sebesar 273,01 km (tahun 2010) meningkat menjadi 284,797 km (tahun 2014), namun kondisi ini menurun di tahun 2015 menjadi

234,67 km. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan rata-rata panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta mengalami penurunan (-3,93% per tahun). Kondisi ini tidak dialami pada 4 tahun sebelumnya yang cenderung mengalami peningkatan. Selain faktor internal, faktor alam juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi drainase yang ada misal curah hujan yang tinggi pada bulan tertentu.



**Gambar 2.52**  
**Grafik Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2015*

Nilai persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta yang berfluktuasi menjadi salah satu “PR” untuk pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya, dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta pada khususnya, untuk lebih memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta (dalam hal ini untuk perbaikan drainase) sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

**10. Persentase Kualitas Talud/Bronjong dan Saluran Pengairan**

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor didapatkan dari hasil perhitungan formula jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikalikan dengan bilangan 100. Data untuk indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kota Yogyakarta tidak dapat ditemukan, hal ini dikarenakan tidak ada pembangunan turap di wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah hanya melakukan kegiatan pembangunan talud, sehingga indikator ini disesuaikan dengan kondisi di Kota Yogyakarta menjadi persentase kualitas talud/bronjong dan saluran

pengairan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik dengan total panjang talud atau bronjong dan saluran air.

**Tabel 2.84**  
**Persentase Kualitas Talud atau Bronjong dan Saluran Pengairan Tahun 2012-2015**

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik	Km	109,98	110,76	108,86	250
2.	Total panjang talud atau bronjong dan saluran air	Km	152,26	152,26	152,26	348
3.	Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	%	72,23	72,74	71,50	72%

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik di Kota Yogyakarta memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni sepanjang 109,98 km (atau sebesar 72,23%) pada tahun 2012 menurun menjadi 108,86 km (atau sebesar 72%) pada tahun 2015. Meskipun demikian, kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baik di Kota Yogyakarta sudah relatif mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baik di tahun 2014. Penurunan jumlah panjang talud dalam kondisi baik ini menjadi “PR” khususnya bagi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk berupaya meningkatkan perbaikan talud yang rusak.

**D. Penataan Ruang**

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, di antaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1 Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta di masing-masing indikator sebagai berikut:

**1. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah**

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, diantaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalami

penyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1 Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

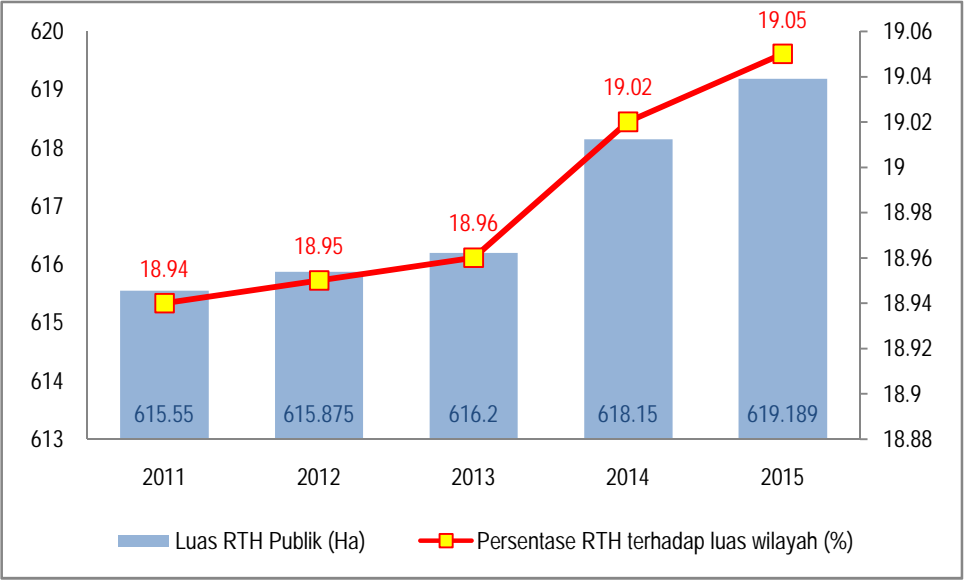
Perbandingan dilakukan dengan melihat persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah di Kota Yogyakarta. Melalui perhitungan tersebut terlihat pertumbuhan persentase RTH yang cenderung positif. Dari data diketahui bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015. Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai yang ditunjukkan oleh persentase RTH publik terhadap luas wilayah, yakni sebesar 18,94% di tahun 2011 yang meningkat menjadi 19,05% di tahun 2015.

**Tabel 2.85**  
**Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas RTH publik	Ha	615,55	615,875	616,2	618,15	619,189	0,15
2.	Luas wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	-
3.	Persentase RTH terhadap luas wilayah	%	18,94	18,95	18,96	19,02	19,05	0,14

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015

Dibalik peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015, terdapat permasalahan dalam upaya peningkatan luasan ruang terbuka hijau untuk masa mendatang, yakni adanya kendala mengenai keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Hal tersebut mengingat luasan wilayah Kota Yogyakarta yang stagnan namun dihadapkan dengan berbagai perubahan pembangunan yang membutuhkan ruang kosong sebagai lahannya.



Gambar 2.53  
Grafik Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.86  
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

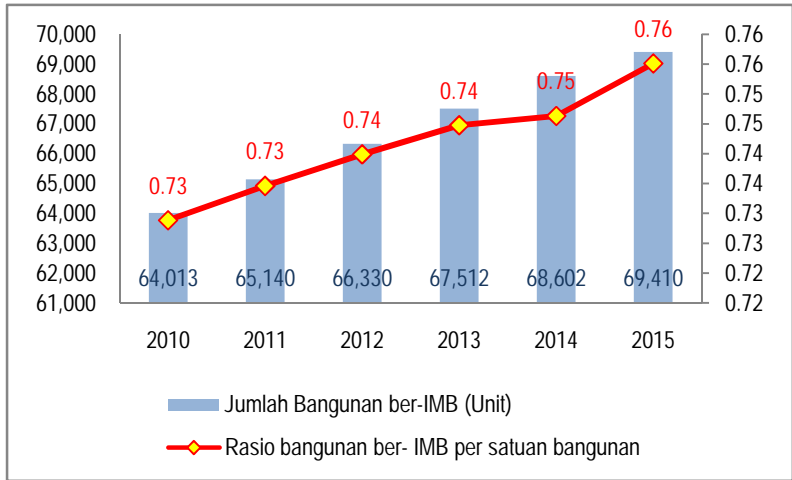
No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014*)	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Bangunan ber- IMB	Unit	64.013	65.140	66.330	67.512	68.602	69.410	1,63
2.	Jumlah Bangunan	Unit	87.830	88.676	89.649	90.649	91.921	91.921**)	0,91
3.	Rasio Bangunan		0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,81

Sumber:

- 1) Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 (Data Tahun 2010-2013)
- 2) LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 (Data Tahun 2014)
- 3) Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2016 (masih menggunakan data tahun 2014)

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan, yakni sebanyak 64.013 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi 69.410 unit

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,63% per tahun. Kondisi yang meningkat juga terjadi pada jumlah bangunan di Kota Yogyakarta dengan peningkatan bangunan rata-rata sebesar 0,91% per tahun.



**Gambar 2.54**  
**Grafik Rasio IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Kedua indikator pembentuk tersebut memiliki perbandingan terbalik dengan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014, yakni sebesar 0,77 pada tahun 2009 menurun menjadi 0,75 pada tahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,73% per tahun.

**3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya**

Formula yang digunakan dalam perhitungan ruang publik yang berubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yang tersedia. Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat pada tahun 2010 terdapat perubahan lahan seluas 27.400 m2 terdapat di Giwangan, yakni perubahan Dinas Pertanian Balai Benih menjadi Sport Training Center. Kemudian di tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta juga mencatat perubahan Terminal Lama (Terminal Giwangan menjadi Pasar Seni (XT Square), dengan perubahan lahan seluas 18.398 m2. Selain itu perubahan peruntukan juga terjadi pada tahun 2013, yakni perubahan Tempat Hiburan Rakyat (THR) atau yang biasa dikenal dengan Purawisata yang terletak di jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari, yang berubah menjadi bangunan hotel dengan luas 24.690 m2. Sedangkan di tahun 2012, 2014 dan 2015 tidak tercatat perubahan apapun pada ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta.

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	m <sup>2</sup>	27.400	18.398	0	24.690	0	0

Sumber : *Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2016*

E. Perumahan

Terdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni. Sama halnya dengan urusan sebelumnya, pada urusan perumahan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010 yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

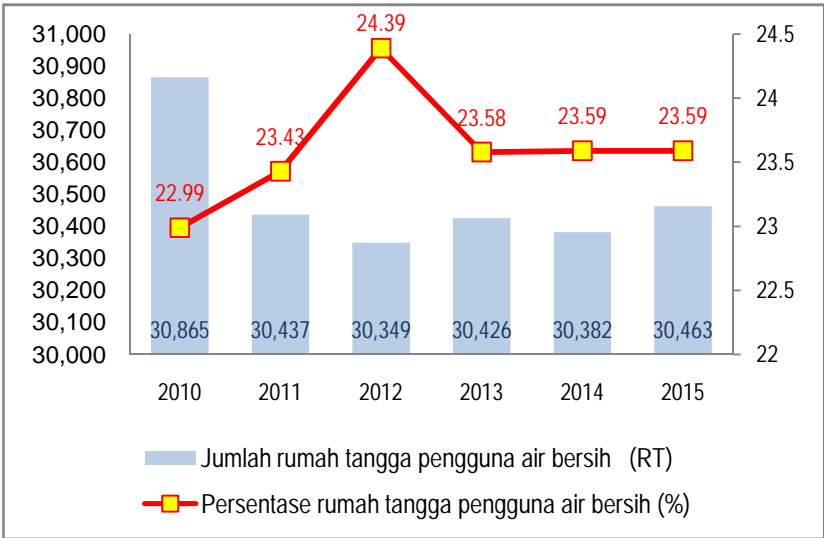
1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah tangga pengguna air bersih adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Data untuk faktor pembilang (jumlah rumah tangga pengguna air bersih) menggunakan data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk penyebutnya (jumlah seluruh rumah tangga) menggunakan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perbedaan kedua sumber data mengakibatkan persentase rumah tangga pengguna air memiliki nilai yang fluktuatif.

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumb Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Unit	30.865	30.437	30.349	30.426	30.382	30.463	(0,26)
2.	Jumlah seluruh rumah tangga	Unit	92.965,00	94.092,00	87.707,00	94.092,00	92.965,00	92.965,00	-
3.	Persentase rumah pengguna air bersih	%	33,20	32,35	34,60	32,34	32,68	32,77	(0,26)

Sumber :  
1. Kinerja PDAM Tirtamarta, Tahun 2010-2015, dengan Hasil Olahan  
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Olahan

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber PDAM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni 30.865 rumah tangga di tahun 2010 menurun menjadi 30.463 rumah tangga di tahun 2015. Menurunnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih ini juga diikutsertai dengan penurunan jumlah rumah tangga dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Sehingga dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terjadi peningkatan persentase rumah tangga pengguna air bersih dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,52%. Minimnya jumlah pengguna air bersih dengan sumber PDAM, belum dapat mewakili jumlah rumah tangga pengguna air bersih, karena terdapat sumber-sumber air bersih lainnya yang mungkin juga digunakan oleh masyarakat seperti sumber air tanah, sumur, ataupun sumber lainnya. Namun penggunaan air bersih yang berasal dari sumber non-perpipaan juga dapat menimbulkan bermacam-macam masalah khususnya terkait dengan kualitas baku mutu air yang tidak bisa terjamin. Hal ini juga menjadi salah satu kendala PDAM dalam meningkatkan jumlah persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.55**  
**Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Selanjutnya, Kota Yogyakarta juga memiliki data mengenai fasilitas air bersih/ water purifier (non perpipaan) yang bersumber dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Data tersebut memiliki nilai yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, yakni sebanyak 216 unit di tahun 2010 meningkat menjadi 303 unit di tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7% per tahun.

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Fasilitas air bersih/ water purifier (non perpipaan)	Unit	216	216	257	266	266	303	-7,0

Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2016 dengan Hasil Olahan

Keterbatasan data membuat data yang disajikan belum dapat mewakili keterwakilan kondisi rumah tangga pengguna air bersih secara umum di Kota Yogyakarta. Namun dari peningkatan fasilitas air bersih/ water purifier non perpipaan yang ada dari tahun ke tahun, terjadi perkembangan yang positif. Sehingga dapat diindikasikan, bahwa akses rumah tangga di Kota Yogyakarta terhadap air bersih semakin meningkat dari tahun, meskipun jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber air perpipaan (PDAM) cenderung masih kecil persentasenya dari tahun ke tahun.

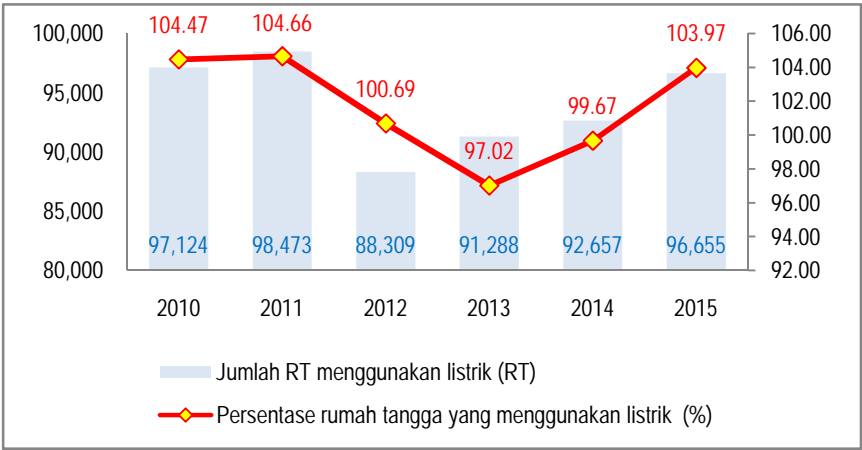
2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator persentase rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dirasa kurang cocok apabila digunakan untuk perhitungan di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga penyebut dari formula ini yang semula adalah jumlah rumah tangga diganti menjadi jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya satu rumah yang ditinggali oleh beberapa rumah tangga.

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	RT	97.124	98.473	88.309	91.288	92.657	96.655	-0,096
2.	Jumlah Seluruh Rumah	Unit	92.965	94.092	87.707	94.092	92.965	92.965	-
3.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	104,47	104,66	100,69	97,02	99,67	103,969	-0,096

Sumber :  
1). Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan  
2). Badan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, pertumbuhan rata-rata jumlah rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar -0,096% per tahun. Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif, yakni 97.124 rumah tangga di tahun 2010 menurun menjadi 96.655 rumah tangga di tahun 2015.



**Gambar 2.56**  
**Grafik Persentase Rumah Tagga yang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

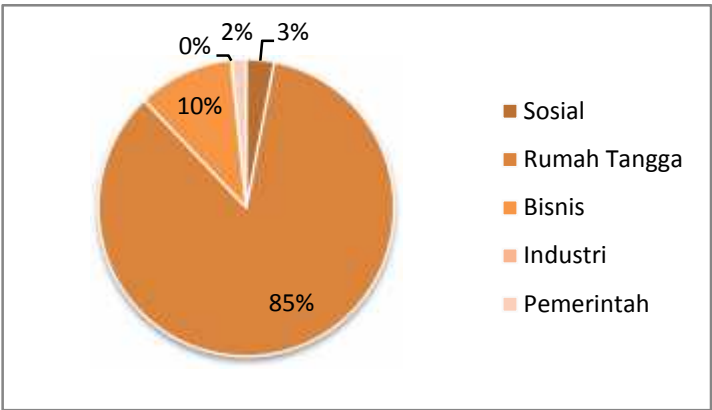
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di tahun 2015 memiliki nilai lebih dari 100%. Hal ini mungkin terjadi karena satu rumah tangga dapat memiliki lebih dari satu pengguna listrik. Penurunan besaran persentase rumah yang menggunakan listrik diduga karena adanya penyambungan listrik secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi karena selain merugikan, menyambung secara ilegal juga membahayakan, dengan dampak yang besar, seperti terjadinya konsleting bahkan kebakaran. Selain itu masih adanya kendala dalam pendataan jumlah rumah juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka rumah tangga yang menggunakan listrik.

**Tabel 2.91**  
**Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta**  
**Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016**

Jenis Pelanggan	2015			2016*)		
	Pelanggan	%	Daya (MVA)	Pelanggan	%	Daya (MVA)
Sosial	3.329	3,03	42,58	3.488	3,05	47,64
Rumah Tangga	93.478	85,18	112,43	97.129	84,84	117,84
Bisnis	11.123	10,14	92,01	11.996	10,48	123,23
Industri	112	0,1	14,25	116	0,1	14,61
Pemerintah	1.705	1,55	19,56	1.761	1,54	20,95
Total	109.747	100	280,84	114.490	100	324,27

*\*)Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta per 29 Februari 2016*  
*Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan*

Jenis pelanggan listrik di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 109.747 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 280,84 MVA. Jenis pelanggan listrik terbanyak adalah pelanggan rumah tangga, yakni sebesar 85,18% dengan daya sebesar 112,43 MVA, sedangkan pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah pelanggan untuk industri yakni sebesar 0,10% dengan daya sebesar 14,25 MVA. Sedangkan di tahun 2016 terhitung per tanggal 29 Februari 2016, jumlah pelanggan listrik mencapai 114.490 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 324,27 MVA. Meskipun cenderung menurun dari tahun sebelumnya, jenis pelanggan listrik terbanyak masih dari pelanggan rumah tangga yakni sebesar 84,84% dengan daya sebesar 117,84 MVA cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah untuk industri yakni dengan jumlah 116 industri atau 0,1% dengan daya sebesar 14,61 MVA.



**Gambar 2.57**  
**Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**3. Penyediaan Sanitasi**

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Dari definisi tersebut, didapatkan keterangan bahwa penyediaan sanitasi terbagi menjadi lima indikator, yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentase pengangkutan sampah, persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir (TPA), dan persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Kota Yogyakarta tidak memiliki TPA sehingga untuk

indikator persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir tidak digunakan.

**a. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai**

Indikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai di lingkup wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua indikator, yakni indikator cakupan sistem air limbah setempat yang memadai dan indikator cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Indikator persentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai didapatkan dari perbandingan antara jumlah kumulatif tangki septik yang baik (kondisinya / terlayani pengolahan limbah) dengan jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki masyarakat.

**Tabel 2.92**  
**Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai Tahun 2013-2015**

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015
1.	Jumlah kumulatif tangka septik yang baik (terlayani pengolahan limbah)	%	30	40	50
2.	Jumlah kumulatif tangki yang dimiliki masyarakat	%	100	100	100
3.	Persentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai	%	30	40	50

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

**b. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/ Kawasan/Kota**

Indikator cakupan air limbah skala komunitas/kawasan/kota didapatkan dari perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah penduduk kota. Indikator ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diakibatkan oleh pencemaran lingkungan akibat pengelolaan air limbah yang tidak benar.

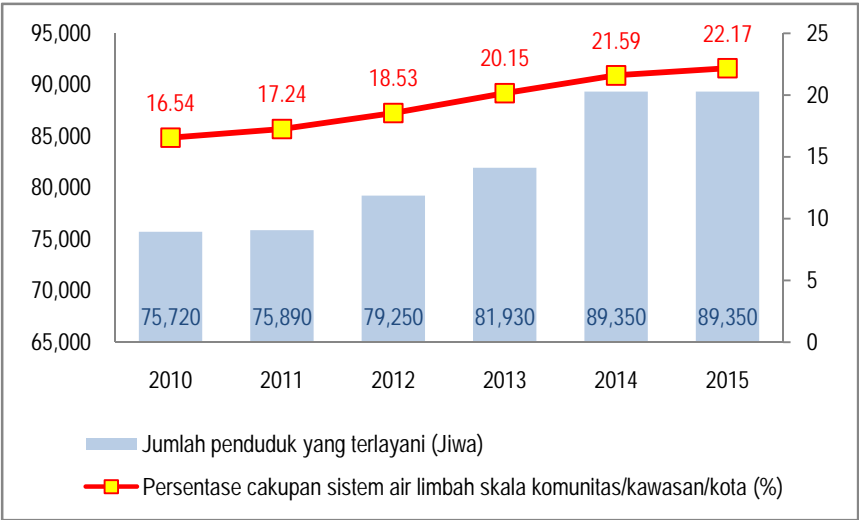
**Tabel 2.93**  
**Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah penduduk yang terlayani	Jiwa	75.720	75.890	79.250	81.930	89.350	89.350	3,37
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	403.110	-2,51
3.	Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	%	16,54	17,24	18,53	20,15	21,59	22,2	6,03

Sumber :

- 1). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
- 2). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
- 3). Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani pada kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 berbanding lurus dengan nilai persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota di lingkup wilayah Kota Yogyakarta yang juga memiliki besaran dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu yang sama (tahun 2010 hingga tahun 2015), yakni 16,54% pada tahun 2010 meningkat menjadi 22,2% di tahun 2015 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,03% per tahun.



**Gambar 2.58**  
**Grafik Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**c. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan**

Indikator selanjutnya adalah persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun, yang didapatkan dari perbandingan antara total luasan daerah bebas genangan dengan total luas daerah rawan genangan.

**Tabel 2.94**  
**Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, Selama 6 Jam) lebih dari 2 Kali Setahun Tahun 2013-2015**

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Total luasan daerah bebas genangan	Ha	10,2752	8,2348	7,1258	-16,72
2.	Total luasan daerah rawan genangan	Ha	10,2972	10,2972	10,2972	-
3.	Persentase Tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	99,79	79,97	69,20	-16,73

*Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015*

Kurun waktu 2013 hingga tahun 2015 tercatat seluas 10,2972 hektar kawasan di Kota Yogyakarta masih menjadi daerah rawan genangan. Di tahun 2013, sebesar 99,79% luas daerah rawan genangan sudah terbebas dari genangan. Kondisi yang cenderung menurun justru terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015, secara berturut-turut terjadi penurunan persentase luas wilayah tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun yakni 79,97% menjadi 69,2%. Penurunan ini kemungkinan dapat terjadi akibat kondisi kualitas drainase yang ada, namun selain itu kondisi curah hujan pada tahun tersebut yang cenderung sulit untuk diprediksi juga membuat penanganan genangan menjadi terhambat.

Selanjutnya, indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan yang mulai tahun 2015 berganti menjadi indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah. Indikator ini dijelaskan secara mendetail dalam urusan lingkungan hidup poin 6. Sama halnya dengan persentase pengurangan sampah di perkotaan, indikator persentase pengangkutan sampah juga mengalami pergantian nama indikator menjadi persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), dimana indikator ini dirinci secara mendetail pada urusan lingkungan hidup poin 1.

4. **Lingkungan Permukiman Kumuh**

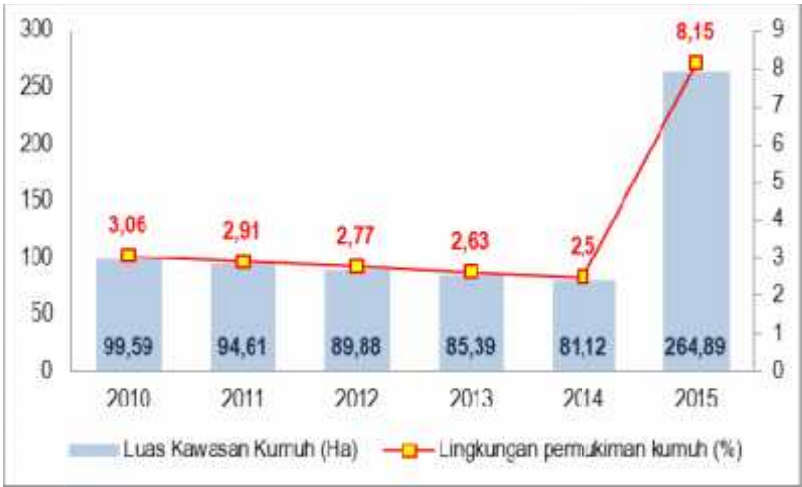
Indikator lingkungan permukiman kumuh memiliki kesamaan formula dengan indikator lingkungan permukiman pada urusan pekerjaan umum. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah dengan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100.

**Tabel 2.95**  
**Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas Kawasan Kumuh	Ha	99,59	94,61	89,88	85,39	81,12	264,89	21,61
2.	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	-
3.	Lingkungan permukiman kumuh	%	3,06	2,91	2,77	2,63	2,50	8,15	21,64

Sumber :  
1. SIPD Numerik Tahun 2014 dengan Hasil Olahan  
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami penurunan, yakni sebesar 99,59 hektar pada tahun 2010 menurun menjadi 81,12 hektar pada tahun 2014. Luasan kawasan kumuh ini justru mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2015 menjadi 264,89 hektar atau 8,15% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan SK Walikota No. 393 Tahun 2014, sebagian besar permukiman tersebut umumnya terdapat di sepanjang bantaran Kali Winongo, Kali Code dan Kali Gadjah Wong. Peningkatan luas kawasan kumuh ini kemungkinan terjadi karena adanya pembaharuan data dengan kriteria penghitungan yang lebih detil, mengingat luasan permukiman tertata dari tahun ke tahun diketahui justru mengalami kenaikan meskipun dengan luas wilayah permukiman yang cenderung stagnan.



**Gambar 2.59**  
**Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk semakin mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah tidak layak huni (BSPS RTLH) di beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta.

**5. Persentase Rumah Layak Huni**

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah layak huni adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh rumah dikalikan dengan bilangan 100. Persentase yang ditunjukkan oleh indikator persentase rumah layak huni di Kota

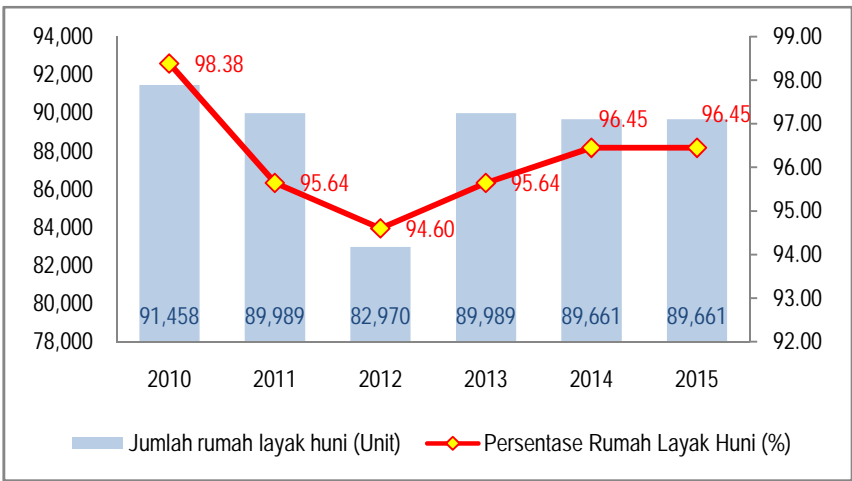
Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Tabel 2.96  
Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014**)	2015**)	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah rumah layak huni	Unit	91.458	89.989	82.970	89.989	89.661	89.661	-0,396
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit	92.965	94.092	87.707	94.092	92.965	92.965	-
3.	Persentase rumah layak huni	%	98,38	95,64	94,60	95,64	96,45	96,45	-0,396

Sumber :  
1. LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, dengan Hasil Olahan  
2. SIPD Numerik Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 91.458 unit jumlahnya fluktuatif dengan kecenderungan menurun hingga tahun 2015 jumlahnya menjadi 89.661 unit. Disamping itu, pada tahun 2011 dan tahun 2013 jumlah rumah layak huni yang tercatat pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjumlah sama, yakni sebanyak 89.989 unit. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan persentase rumah layak huni yang juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yakni sebesar 98,38% pada tahun 2010 dan menurun menjadi 96,5% pada tahun 2015, dan memiliki nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -0,396% per tahun.



Gambar 2.60  
Grafik Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Indikator persentase rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota

Yogyakarta. Indikator yang sesuai justru adalah rumah tidak layak huni. Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2004 adalah keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yang mudah rusak tertiuap angin; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan.

Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah (a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c) sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d) tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; (e) penghuninya malas dan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, maupun Gajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel kereta api, kolong-kolong jembatan, atau terminal.

Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni di Kota Yogyakarta. Kriteria yang dimaksudkan mengenai kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakarta diantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan gedheg, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4 maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan apabila bobot nilai berjumlah sama dengan atau lebih dari lima maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.

**Tabel 2.97**  
**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013**)	2014***)	2015***)
1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	731	667	667	3.304	3.303	3.304

Sumber :

1. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013 (Data Tahun 2010-2012)
2. Rekapitulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Bappeda Kota Yogyakarta, 2015 (Data Tahun 2013)
3. SIPD Numerik Tahun 2015(Data Tahun 2014-2015)

Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Mantriijeron, Mergangsari, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong Tengen, Jetis, dan Tegalrejo, dengan luasan sebesar 278,70 hektar. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Namun di tahun 2015 luasan kawasan tidak layak huni ini sudah relatif mengalami penurunan, sehingga di tahun 2015 tercatat luas kawasan tidak layak huni sebesar 264,89 hektar meskipun demikian tidak terlihat adanya penurunan jumlah rumah tidak layak huni di tahun yang sama. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan sumber pendataan yang berbeda. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri masih terus melakukan kajian terkait jumlah dan luas kawasan permukiman tidak layak huni untuk menentukan strategi yang harus dilakukan selanjutnya.

**F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk di dalamnya adalah pemerataan ekonomi memerlukan langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Otonomi daerah telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan urusan wajib. Manifestasi penyelenggaraan urusan wajib ini divisualisasikan dengan eksisnya SKPD yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan urusan wajib tersebut.

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Untuk mendukung trantibum dan penegakan Perda diperlukan dukungan Satpol PP yang memadai, agar mampu menjangkau seluruh fungsi dan tugas di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu jumlah polisi pamong praja (Pol PP) perlu dipastikan, sehingga diketahui rasionalitas antara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Pol PP dengan jumlah beban kerja.

Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Pol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Pol PP pada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat dari rasio Pol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikan kepastian tentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan trantibum dan penegakan Perda, dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

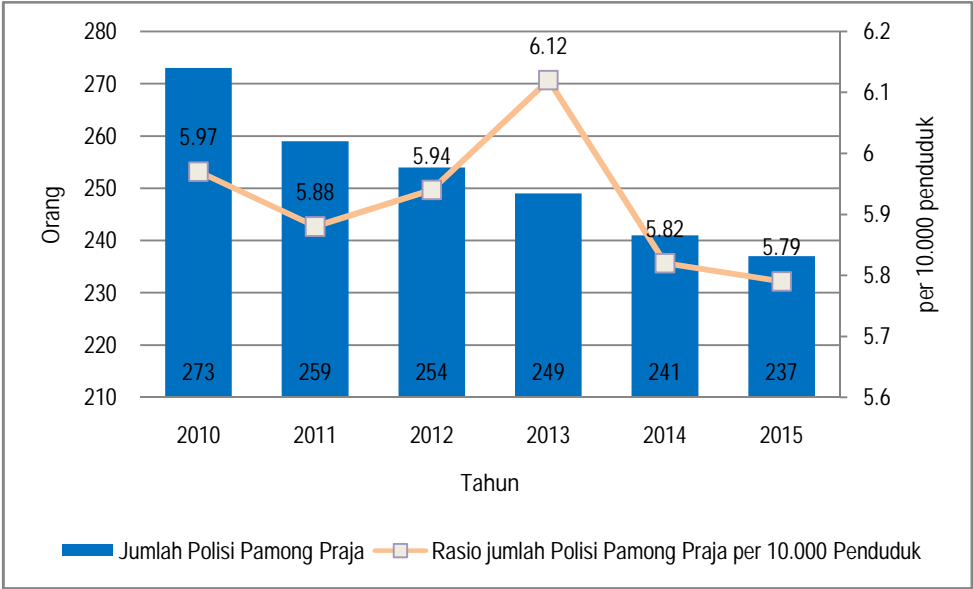
Tabel 2.98  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	273	259	254	249	241	237	-2,79
Jumlah Penduduk per 1000 penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,20
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk		5,97	5,88	5,94	6,12	5,82	5,79	-0,62

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2012, 2015, 2016,jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2016

Jumlah SDM Satpol PP yang secara berangsur-angsur mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga 2015. Linearitas penurunan jumlah

penduduk dengan jumlah personil Pol PP ini menyebabkan rasio antara Pol PP per 10.000 juga mengalami stagnasi, yang berada di kisaran 6 orang. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah Pol PP setiap tahunnya mengalami penurunan. Tren penurunan jumlah Pol PP ini dikarenakan belum adanya rekrutmen polisi pamong praja, sementara banyak Pol PP yang sudah pensiun. Meskipun demikian, rasio jumlah Pol PP mengalami fluktuasi. Fluktuasi rasio jumlah Pol PP ini dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah penduduk yang jika dihitung rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,20 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya, tren menurunnya jumlah Pol PP dan fluktuasi rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk dapat dijelaskan melalui grafik di bawah ini.



**Gambar 2.61**  
**Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Makna grafik tersebut adalah pada tahun 2010-2015 setiap 10.000 penduduk Kota Yogyakarta dilayani oleh kurang lebih 6 orang Pol PP. Kendati telah mengalami penurunan jumlah penduduk, akan tetapi perbandingan Pol PP tidak mengalami peningkatan sebab terjadinya pensiun dan kebijakan rotasi pegawai mempengaruhi akumulasi jumlah Pol PP, sementara kebijakan moratorium pegawai masih berlaku. Dengan demikian rekrutmen belum dilakukan untuk menambah pasukan Pol PP. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi dalam penanganan trantibum dan penegakan Perda dengan dukungan SDM yang terbatas, adalah memaksimalkan program dan kegiatan yang bersifat preventif, dengan memasukkan pembiasaan perilaku budaya tertib, sopan santun,

tatakrama dan tatasusila. Sosialisasi budaya tertib di jalan, di tempat umum perlu diagendakan, agar mencegah pelanggaran trantibum dan Perda.

2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas). Kota Yogyakarta merupakan wilayah *urban* yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengedalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusakan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk diharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah Sumber Daya Aparatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini merupakan tabel informasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2007 hingga 2014.

Tabel 2.99  
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

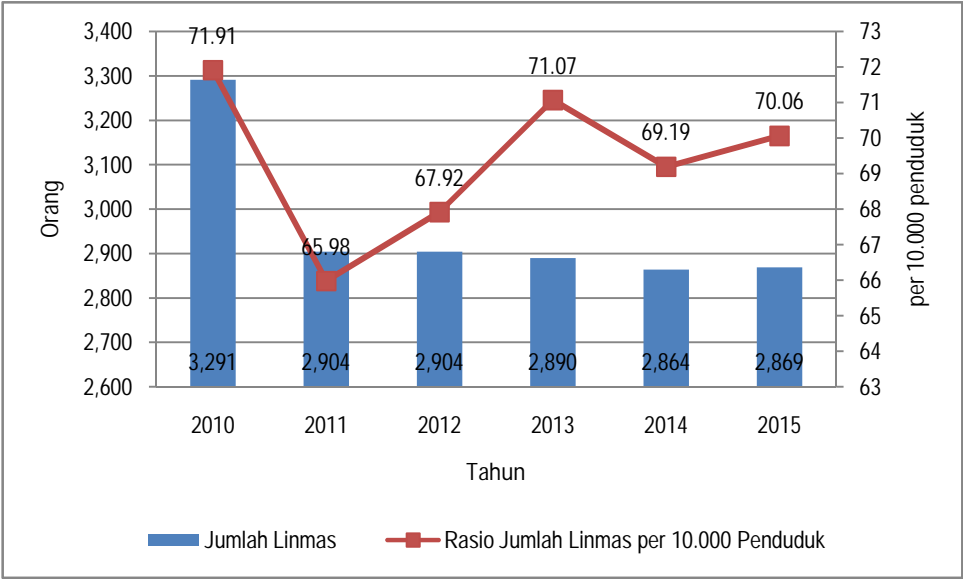
Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- rata (%/Tahun)
Jumlah Linmas	Orang	3.291	2.904	2.904	2.890	2.864	2.869	-2,71
Jumlah Penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,20
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk		71,91	65,98	67,92	71,07	69,19	70,06	-0,54

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2015, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petugas Linmas secara akumulatif sangat besar hingga mencapai angka ribuan, karena pelayanan Linmas menjangkau hingga di Kelurahan. Kendati demikian, jumlah petugas Linmas berangsur-angsur mengalami penurunan. Penurunan

jumlah personil Linmas sesuai data merupakan penurunan yang bersifat signifikan hingga menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 2,71. Hal ini secara umum dikarenakan faktor usia yaitu pensiun dan belum ada regenerasi.

Terjadinya tren penurunan jumlah petugas Linmas ini tidak diikuti dengan penurunan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk justru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Dengan terjadinya penurunan jumlah penduduk, maka rasio personil Linmas per 10.000 menjadi meningkat. Grafik di bawah ini menggambarkan penurunan jumlah personil Linmas dari tahun 2010 hingga 2015 dan fluktuasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk:



**Gambar 2.62**  
**Grafik Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2015*

Rasio petugas Linmas yang dikonsentrasikan untuk menjalankan tugas dalam trantibmas mencapai perbandingan yang lebih baik dalam 10.000 penduduk jika dibandingkan dengan personil Pol PP. Hal ini disebabkan wilayah kerja Linmas menjangkau tingkat Kelurahan/ padukuhan, sedangkan Pol PP dengan substansi trantibum dan penegakan Perda hanya menjangkau tempat-tempat umum/fasilitas umum. Dari data di atas pada saat perumbuhan penduduk negatif di tahun 2013 walaupun dengan jumlah petugas Linmas yang tetap menurun, namun dapat mencapai perbandingan yang lebih rasional. Namun pada tahun 2014 rasio petugas Linmas pada 10.000 penduduk cenderung menurun kembali yaitu berkisar 69 per 10.000 penduduk.

3. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

Pos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalah kelembagaan sosial terbawah yang lahir dari rembug warga sebagai inisiatif untuk menciptakan keamanan lingkungan secara *bottom up*. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan di kota Yogyakarta. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta.

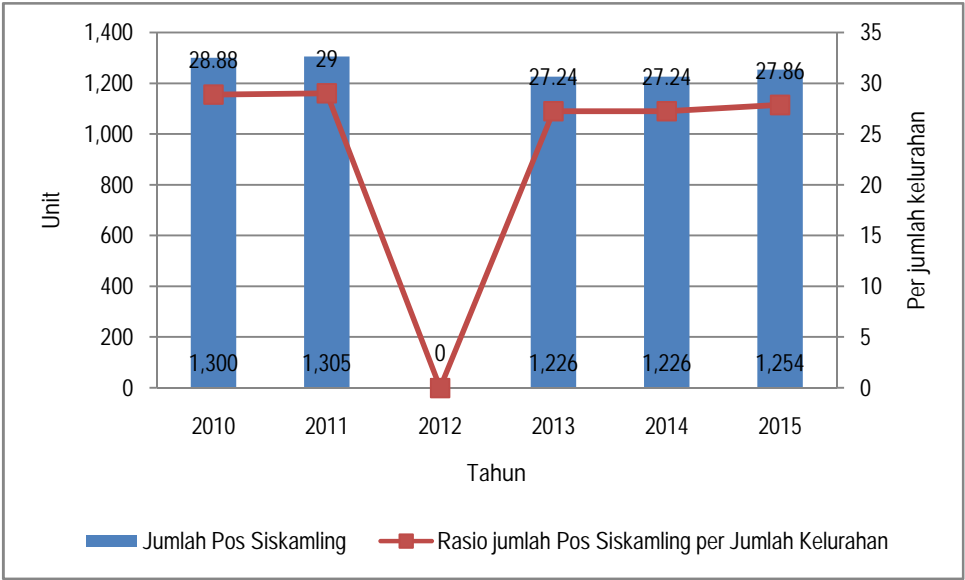
Tabel 2.100  
Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pos Siskamling	Unit	1.300	1.305	N/A	1.226	1.226	1.254
Jumlah Kelurahan	Kelurahan	45	45	45	45	45	45
Rasio jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan		28,88	29	-	27,24	27,24	27,86

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah Pos Siskamling di kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Peningkatan jumlah Pos Siskamling sempat mengalami peningkatan di tahun 2011, tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 28 unit. Sementara itu sejak tahun 2010 hingga 2015 jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta cenderung tetap. Menurut Dinas Ketertiban, penurunan jumlah Siskamling ini terjadi karena adanya pengalihan status tanah. Penurunan jumlah Pos Siskamling mencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibat sistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yang telah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yang memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluarga kecil/inti (*nucleus family*), banyaknya pendatang yang kurang memiliki ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tata kehidupan bermasyarakat, dll. Meningkatnya jumlah pos siskamling pada tahun 215 sebanyak 28 unit semoga menjadi cikal bakal meningkatnya kembali semangat gotong royong warga yang semakin lama kian terkikis. Sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menjalankan

konsep kekeluargaan dan kekerabatan dalam tata kehidupan bermasyarakat.



**Gambar 2.63**  
**Grafik Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Dinas Ketertiban, 2016 diolah*

Pos Siskamling pada tahun 2010 berjumlah 28, meningkat menjadi 29 pada tahun 2011, namun mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi 27 buah Pos Siskamling dan meningkat 1 poin menjadi 28 pada tahun 2015. Penurunan ini mencerminkan penurunan swadaya masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan keamanan lingkungan. Sementara itu kondisi vandalism semakin marak. Untuk itulah perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan Siskamling. Pembinaan terhadap kelompok Siskamling perlu dilakukan. Monitoring dan evaluasi pihak pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Pemkot terhadap kelompok Siskamling perlu diadakan secara periodik.

**4. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah**

Sistem informasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta pertama kali dilaunching pada tahun 2002. Sistem informasi pelayanan perizinan merupakan pelayanan strategis dalam menumbuh-kembangkan investasi daerah. Geliat perekonomian diharapkan dapat semakin dinamis dengan difasilitas sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif. Pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu pembuka tumbuhnya investasi sehingga banyak tersedia peluang kerja, meningkatnya *income* per kapita dan pendapatan asli daerah. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan

menjadi sangat penting. Berikut ini merupakan tabel informasi adanya sistem pelayanan perizinan dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

**Tabel 2.101**  
**Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2013,2015,2016*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2010 hingga 2015 tersedia sistem informasi pelayanan perizinan. Hasil identifikasi jenis-jenis sistem informasi pelayanan perizinan perlu dilakukan sehingga secara jelas. Sistem informasi pelayanan perizinan yang dimiliki Dinas Perizinan hingga tahun 2015 meliputi:

- a. SIM Perizinan meliputi pendaftaran, routing slip, dan cetak SK,
- b. SIM dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan),
- c. SIM IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dan
- d. SIM Pengawasan Pengaduan.

Pemanfaatan SIM pelayanan perizinan perlu dioptimalkan agar mendukung pertumbuhan investasi, peningkatan ketertiban secara luas ke dalam banyak aspek, diimbangi dengan peningkatan perilaku positif masyarakat yang taat pada regulasi dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Di samping itu peningkatan aksesibilitas SIM pelayanan perizinan perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan.

**5. Persentase Peningkatan Penegakan Perda**

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu tugas yang melekat pada Dinas Ketertiban. Penegakan Perda menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

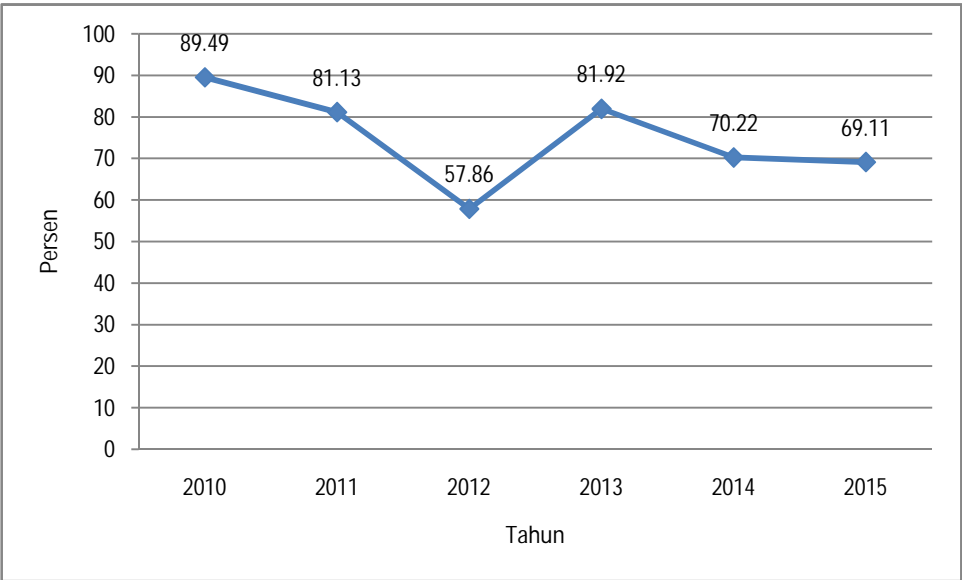
Tabel 2.102

Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	1.056	886	842	965	941	960	-1,89
Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	1.180	1.092	1.455	1.178	1.340	1389	3,32
Penegakan PERDA	Persen	89,49	81,13	57,86	81,92	70,22	69,11	-5,04

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016

Pada tahun 2010 terlihat bahwa jumlah pelanggaran mencapai angka 1.180 dan 89,49 persen mampu diselesaikan. Namun pada tahun-tahun berikutnya angka penyelesaian Perda mengalami fluktuasi. Sementara itu jika dilihat pada pertumbuhan rata-ratanya, jumlah penyelesaian penegakan Perda dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami penurunan sebesar 1,89 persen per tahun, sementara tingkat pelanggaran Perda mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen per tahun. Pada tahun 2015 terjadi penurunan persentase pelanggaran perda. Meskipun secara nyata jumlah penyelesaian penegakan perga meningkat menjadi 960 kasus namun hal tersebut juga diimbangi dengan umlah pelanggaran perda yang meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan pelanggaran Perda belum diimbangi dengan peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda. Jika dianalisis, terdapat dua hal yang mempengaruhi menurunnya tingkat penyelesaian pelanggaran Perda. Pertama, banyaknya oknum pelanggar Perda yang tidak mau menghadiri persidangan. Kedua, terjadinya tren penurunan jumlah polisi pamong praja sebagai satuan petugas yang bertugas untuk menegakan pelanggaran Perda.



Gambar 2.64

Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Tampak pada grafik bahwa penegakan Perda di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal. Persentase penegakan perda mengalami fluktuasi sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Penurunan persentase yang tajam pada tahun 2012 dan naik kembali pada tahun 2013 dan 2014 serta menurun kembali pada tahun 2015. Banyaknya pelanggar Perda yang tidak hadir memenuhi panggilan persidangan perlu ditindaklanjuti dengan diikuti sanksi yang tegas. Dengan demikian, masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memenuhi ketentuan yang diatur oleh setiap Perda. Perlu adanya target tentang upaya menekan pelanggaran Perda, dan dengan tindakan yang lebih preventif dalam mensosialisasikan Perda secara intensif. Hal ini akan mampu mengantisipasi pelanggaran Perda di lapangan, dan menjadi salah satu solusi mengingat jumlah Pol PP yang terbatas, sehingga tentunya akan mengalami kesulitan jika permasalahan penegakan Perda terlalu berat di tindakan kuratif.

6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Satpol PP merupakan sebuah institusi yang berperan penting dalam penegakan Perda dan trantibum. Untuk memenuhi fungsi dan tugas pokok maka Pol PP perlu melakukan kegiatan patroli secara rutin. Pengamanan kondisi tempat-tempat umum dan memonitor pelaksanaan Perda dapat dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di lapangan. Indikator ini dihitung dari banyaknya kelompok patroli dikalikan tiga kali patroli dalam sehari.

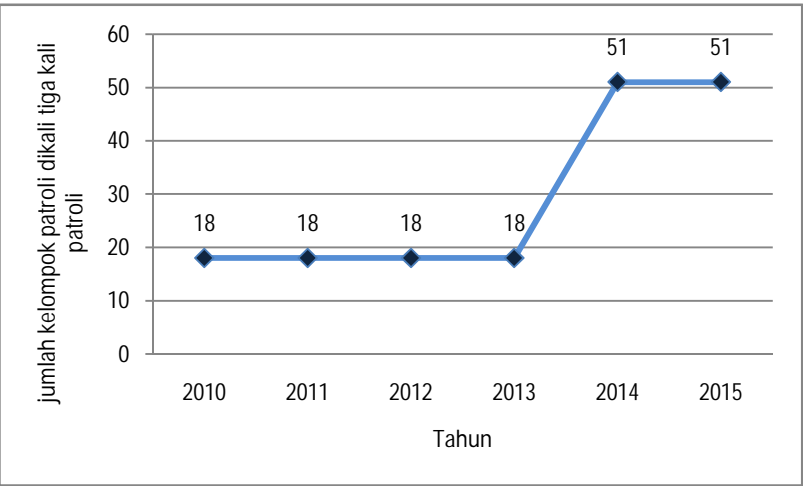
Tabel 2.103  
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- rata (%/Tahun)
Jumlah patroli petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam		18	18	18	18	51	51	23,16

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016

Jika angka dalam tabel di atas diperoleh dari jumlah kelompok patroli dikali tiga kali patroli, maka data di atas menunjukkan bahwa dalam rentang 2010 hingga 2013 hanya terdapat 6 kelompok patroli di Kota Yogyakarta, sementara di tahun 2015 meningkat menjadi 17 kelompok. Bertambahnya jumlah kelompok ini disebabkan oleh adanya kebijakan penempatan kelompok patroli Satpol PP di setiap kecamatan mulai tahun

2014, setiap satu kelompok patroli terdiri dari tiga hingga lima orang petugas. Sehingga, jumlah pelaksanaan patroli yang menjadi tugas Pol PP dari tahun 2010-2013 adalah sama yaitu 18 kali dalam 24 jam, namun pada tahun 2014 dan 2015 meningkat tajam menjadi 51 kali. Jika dibandingkan dengan jumlah Pol PP yang semakin menurun, namun jumlah patroli yang dilakukan mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat yaitu dari hanya 18 kali per 24 jam menjadi 51 kali per 24 jam, maka ini merupakan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan rata-rata jumlah patroli adalah 23,16 persen per tahun.



**Gambar 2.65**  
**Grafik Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Kebutuhan patroli semakin meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2014. Hal ini sangat logis jika dikaitkan dengan terjadinya banyak pelanggaran Perda sebagaimana data penegakan perda yang dipaparkan di bagian lain. Perubahan sosial yang menurunkan semangat kebersamaan dan gotong-royong, proses monetisasi yang berjalan terus akibat tuntutan hidup semakin tinggi, maka semakin menjadi pemicu pelanggaran terhadap Perda. Untuk itulah proses preventif perlu lebih digalakkan dengan melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah lokal di Kelurahan dan koordinasi dengan SKPD terkait. Mengingat personil Pol PP yang terbatas maka perlu ditingkatkan kemampuan Satpol PP dalam upaya mencapai koordinasi, sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. Arus koordinasi dengan Linmas dan tokoh masyarakat serta kelompok Siskamling hendaknya lebih intensif.

7. **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota**

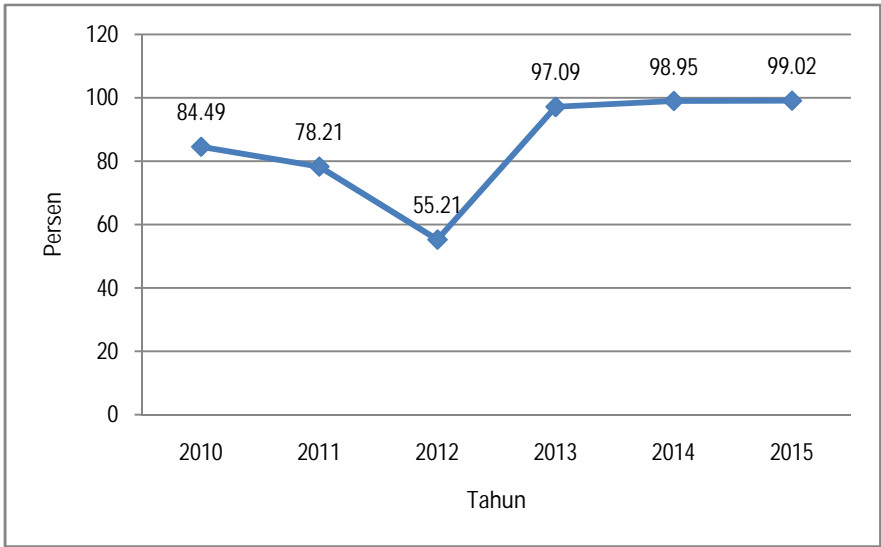
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran K3 yang terjadi dengan jumlah penyelesaiannya. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 84,49 persen di dua tahun selanjutnya persentase penyelesaian K3 mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2013 dan 2014 persentase penyelesaian K3 kembali mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2014 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 98,95 persen. Data pada tahun 2007 hingga 2009 kosong karena dinas Ketertiban memang belum melakukan pendataan pada tahun tersebut. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.104**  
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	N/A	N/A	N/A	7.113	7.252	8.568	9,75
Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	N/A	N/A	N/A	7.326	7.329	8.652	8,67
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persentase	84,49	78,21	55,21	97,09	98,95	99,02	3,22

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013,2015,2016

Peran serta masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan penegakan K3 perlu digalang secara intensif. Agar dalam masyarakat tumbuh kesadaran untuk saling peduli dan saling menjaga merupakan langkah startegis untuk menciptakan trantibum dan trantibmas. Kelembagaan sosial di tingkat padukuhan dan kelurahan sebaiknya dioptimalkan peran sertanya dalam menjaga penegakan K3.



**Gambar 2.66**  
**Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Dilihat dari data di atas tampak pencapaian penyelesaian K3 sudah sangat baik. Namun penyelesaian K3 ini memiliki beban kuratif yang sangat tinggi. Agar terjadi trantibum dan trantibmas yang efektif maka langkah preventif dengan meningkatkan peran serta pemerintah lokal, kelembagaan sosial di masyarakat serta pemuka masyarakat maupun perorangan perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi masalah K3 dan menekan pelanggaran K3 ini perlu diprogramkan ke depan peningkatan kesadaran generasi muda dan masyarakat luas untuk menghidupkan budaya Siskamling dan kesadaran hukum (kadarkum).

Pengukuran terhadap ketertiban yang didasarkan pada penyelesaian K3 tentunya bukan merupakan indikator yang tuntas. Kinerja yang didasarkan pada output saja dapat mengantarkan pada bias pemaknaan. Jika pelanggaran K3 tidak terjadi tentunya tidak ada masalah yang perlu diselesaikan, sehingga kinerja yang dicapai berdasarkan indikator ini buruk. Sementara itu jika tidak ada pelanggaran K3 secara riil justru merupakan sebuah prestasi dalam fasilitasi ketertiban dan keamanan. Untuk itu perlu diarahkan pada indikator outcome dengan menempatkan penilaian terhadap turunnya pelanggaran K3 sampai ke nilai “nol” adalah sebagai capaian kinerja tertinggi.

Sejak tahun 2015, upaya preventif yang dilakukan Dinas Ketertiban dalam menegakkan K3 salah satunya adalah dengan memunculkan Gerakan Panca Tertib untuk Jogja Istimewa. Dalam gerakan ini seluruh lapisan masyarakat ikut menangani kasus ketertiban. Munculnya Gerakan Panca Tertib ini menjadi penting mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Ketertiban, apalagi berdasarkan Analisis Jabatan dan

Beban Kerja, pemenuhan kebutuhan SDM di Dinas Ketertiban baru mencapai 64 persen. Untuk menyisiati kondisi tersebut, masyarakat perlu digerakkan dan disadarkan untuk bersama-sama menegakkan K3. Gerakan Panca Tertib meliputi Tertib Sosial, Tertib Lingkungan, Tertib Daerah Pinggir Jalan, Tertib Bangunan dan Tertib Usaha.

8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota

Linmas merupakan petugas yang sangat dekat dengan masyarakat. Keberadaan Linmas hingga di instansi terbawah yaitu pedukuhan/ kampung. Hal ini disebabkan Linmas memiliki tugas pokok dalam perlindungan masyarakat, sehingga perlu dilihat perbandingan rasional dalam pelayanan terhadap jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah petugas Linmas dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Linmas dari tahun 2007 hingga 2014 mengalami penurunan. Sempat naik pada tahun 2009, namun kemudian mengalami penurunan hingga 2014. Penurunan jumlah personel ini terjadi karena sudah banyak petugas Linmas yang memasuki masa pensiun, sementara itu hingga tahun 2014 belum ada rekrutmen petugas Linmas.

Tabel 2.105  
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Petugas Linmas	Orang	3.291	2.904	2.904	2.890	2.864	2.869	-2,71
Jumlah Penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,20
Persentase Jumlah Linmas	Persen	0,72	0,66	0,68	0,71	0,69	0,70	-0,54

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2015, 2016

Kebijakan moratorium telah menekan jumlah Linmas dari tahun ke tahun karena banyak personil yang menjalani masa pensiun. Pada tahun 2014 penurunan jumlah petugas terus berlangsung sehingga setiap 10.000 penduduk secara rerata dilayani oleh 69 orang petugas. Secara internal Kota Yogyakarta memiliki gerakan panca tertib yang dapat mewadahi kiprah dan partisipasi masyarakat dalam melakukan perlindungan masyarakat. di samping itu secara eksternal DIY memiliki program “jaga warga” atau Civil of Police berdasarkan peraturan daerah yang dapat bersinergi dengan gerakan panca tertib.

9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Untuk itulah pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota Yogyakarta mencapai 100 persen. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Luas wilayah kota Yogyakarta adalah 32,5 km2 dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran.

Tabel 2.106  
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km <sup>2</sup>	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km <sup>2</sup>	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta 2012,2015,2016

Semua wilayah Kota Yogyakarta memiliki potensi bencana kebakaran. Dari data tersebut di atas mulai tahun 2010 hingga 2015 luas WMK 32,5 km2 seluruhnya merupakan wilayah potensi bencana kebakaran. Untuk itulah baik wilayah permukiman, pertokoan, pasar, pusat pelayanan publik, tempat-tempat umum maupun jaringan jalan memiliki potensi bahaya kebakaran. Jalan raya yang dilalui oleh kendaraan bermotor yang sangat ramai juga tidak terhindar dari potensi terjadinya bencana kebakaran. Untuk itu yang perlu ditingkatkan adalah perilaku disiplin dan kesadaran untuk saling menjaga agar dapat menghilangkan potensi bencana kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta.

10. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap pemerintah terhadap terjadinya bahaya kebakaran. Untuk melihat daya tanggap pemerintah ini maka perlu dihitung *response time rate* (RTR) dalam pelayanan manajemen kebakaran. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa persentase waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran mencapai 100

persen. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus kebakaran di Kota Yogyakarta mendapatkan respon tindakan pemadam kebakaran kurang dari 15 menit setelah pelaporan.

**Tabel 2.107**  
**Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<15 jam setelah pengaduan)	Kejadian	46	45	50	51	55	49	1,27
Jumlah Kejadian Kebakaran	Kejadian	46	45	50	51	55	49	1,27
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	100	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Dari data diketahui bahwa mulai tahun 2012 hingga 2014 bencana kebakaran mengalami peningkatan. Namun dari seluruh aduan tentang bencana kebakaran yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2014 dapat tertangani 100 persen. Sementara itu, tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 berada pada angka 12 menit. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya meningkat menjadi 11 menit. Ini merupakan perkembangan yang baik, sebab sifat bencana kebakaran sifatnya mudah menjalar dan tidak mudah teratasi. Dengan penurunan angka satu menit tanggap manajemen bencana kebakaran memiliki dampak yang besar dalam penanganan bencana kebakaran.

**Tabel 2.108**  
**Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	12	11	11	11	11	11	-1,73

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta 2012, 2015,2016

Seiring dengan kepadatan perkampungan dan jalan raya di kota Yogyakarta waktu tanggap bencana 11 menit merupakan respons yang bagus. Dengan pertambahan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, Kota Yogyakarta masih dapat meningkatkan pelayanan terhadap bahaya kebakaran. Namun demikian tidak mudah untuk mempertahankan angka 11 menit waktu tanggap bencana kebakaran pada masa mendatang. Untuk itulah teknik-teknik paling efektif selalu perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Permasalahan kemungkinan perlunya waktu tanggap bencana yang lebih panjang dapat dikelola dalam bentuk: upaya untuk memecah/membagi titik pelayanan, dengan menempatkan armada/mobil pelayanan di beberapa titik, sehingga pelayanan menjadi lebih sempit. Demikian pula mobil pelayanan pemadam kebakaran dapat ditempatkan di beberapa titik layanan, dan dengan dilengkapi dengan mobil yang berukuran lebih kecil sehingga dapat menerobos jalan yang padat. Namun demikian tentunya memecah titik pelayanan ini punya konsekuensi terhadap jumlah petugas pendukung yang perlu dikonsentrasikan di beberapa titik pelayanan tersebut.

**11. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik**

Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di Kota Yogyakarta. Data di bawah ini diperoleh dari survei terhadap 150 responden di tiap kelurahan. Survei tersebut dilakukan dua kali dalam setahun yaitu semester pertama dan semester kedua. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas kantor kelurahan di Kota Yogyakarta dalam kondisi baik.

**Tabel 2.109**  
**Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Sangat Baik			7	4	8	10	NA
Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Baik		45	38	40	36	33	15
Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Kurang Baik		0	0	1	1	2	NA
Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa		45	45	45	45	45	45
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	100	84,44	88,89	80	73,33	33,33

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Berawal dari tahun 2007 hingga 2009 indikator perhitungan masih menggunakan baik buruknya saran fisik pemerintahan. Data yang didapatkan adalah 45 kelurahan berstatus baik. Menyadari biasanya data jika menggunakan indikator sarana fisik, indikator diubah dengan menggunakan survei pelayanan publik. Dari data di atas diketahui bahwa pada setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kantor kelurahan yang mengalami peningkatan kondisi fisik sangat baik, hanya di tahun 2012 yang mengalami penurunan dari enam kantor menjadi empat kantor. Pada tahun 2013-2014 jumlah kantor kelurahan yang meningkat kondisi fisik menjadi sangat baik sebanyak delapan dan berikutnya menjadi 10 buah. Ini merupakan perkembangan yang sangat baik. Namun jika dibandingkan dengan jumlah kantor kelurahan yang memiliki status baik sangat dominan yaitu mencapai 33 pada tahun 2014. Sedangkan kantor kelurahan yang kurang baik hanya dua buah saja. Hal ini menandai bahwa penyelenggaraan pelayanan pada tingkat kelurahan dilihat dari aspek kondisi bangunan kelurahan termasuk katagori baik. Meskipun demikian tidak boleh mengabaikan ketika jumlah kantor kelurahan hanya satu saja yang kurang baik. Mengingat kondisi bangunan yang kurang baik tidak layak untuk keamanan dan keselamatan dalam pelayanan, maka perlu segera ditindaklanjuti untuk direnovasi.

Pengukuran cakupan tersebut menggunakan IKM diambilkan unsur kenyamanan lingkungan dari tahun 2010-2014. Tahun 2015, terjadi perubahan unsur yang semula 14 unsur menjadi 9 unsur dan bisa ditambah muatan lokal. Dari 9 unsur tersebut, dimana tidak ada unsur kenyamanan lingkungan. Berdasarkan kebijakan karena di Kelurahan tidak ada biaya/tarif maka untuk khusus kelurahan, unsur biaya / tarif diganti dengan kenyamanan lingkungan. Namun dikarenakan adanya ketidaksesuaian koordinasi dan informasi yang didapat oleh pelaksana teknis pengukuran SKM, maka dari 45 kelurahan, hanya 15 kelurahan yang mengganti unsur biaya /tarif menjadi kenyamanan lingkungan. Dari 15 kelurahan, unsur kenyamanan lingkungan rata-rata : 3,148 dengan kategori B (Baik).

## **12. Sistem Informasi Manajemen Pemda**

Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 2002. SIM ini pertama kali digunakan oleh Dinas Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memudahkan administrasi. Pembuatan SIM ini sendiri merupakan tugas yang melekat pada Sekretariat Daerah bagian Teknologi, Informasi, dan Telematika

(TIT). Hingga tahun 2014 TIT minimal membuat lima SIM dalam tiap tahunnya. Berikut ini merupakan tabel informasi tentang adanya SIM Pemda Kota Yogyakarta.

Tabel 2.110 Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015							
No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	51	51	54	57	63	69

Sumber: Bagian TIT Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2016

Sistem Teknologi Informasi diperlukan oleh semua SKPD sehingga membutuhkan dukungan kompetensi yang memadai untuk semua pegawai dan pejabat. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai, sehingga beban TI dipustkan ke bidang TI. Jika setiap pejabat/pegawai memiliki komitmen untuk pengembangan skill dalam penggunaan TI sebagai pendukung kinerja, maka akan dapat lebih efektif. Dengan demikian TI bukan permasalahan yang berada pada level kelembagaan, namun hanya diturunkan sebagai permasalahan aparatur terkait dengan kompetensi teknis.

Sistem informasi seringkali hanya dibatasi dengan pemaknaan SIM. Namun sesungguhnya pada kepentingan yang lebih luas diperlukan sistem inovasi yang mencakup teknologi yang lebih luas seperti teknologi pangan, teknologi pengolahan, tekonologi pemasaran dll. Untuk kepentingan ini maka diperlukan suatu wadah sistem teknologi inovasi.

13. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Survei tentang indeks kepuasan masyarakat di kota Yogyakarta sudah lama diselenggarakan. Di tahun 2012 mulai terjadi penertiban pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat untuk seluruh instansi perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu jumlah instansi perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang telah menyelenggarakan IKM dari taun 2012 hingga 2015 berturut-turut dengan jumlah layanan mencapai 259, 326 dan 135 ( data per tanggal 29 Januari 2015 dari total 326 layanan), dan 216( data per tanggal 27 Januari 2016 dari total 326 layanan).

Tabel 2.111 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015							
No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Survei kepuasan masyarakat merupakan data autentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Data primer dari survei IKM ini secara umum bersifat inspiratif dalam peningkatakn kualitas pelayanan. Untuk itu, tindak lanjut pengolahan data hasil survei IKM perlu dilakukan secara lebih serius untuk mengkritisi kualitas pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Untuk itulah identifikasi terhadap jenis survei IKM dalam bentuk layanan tertentu sebaiknya secara lengkap dapat direkap setiap tahun. Sisi peningkatan kualitas pelayanan perlu diprogramkan untuk setiap jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan, sehingga ada peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya mencakup semua jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran IKM dilakukan secara spesifik berdasarkan kekhusuan pelayanan yang diberikan, sasaran yang dilayani. Beberapa jenis pelayanan yang diberikan misalnya kesehatan, pendidikan, catatan sipil, perizinan dll. Untuk itu potret IKM hendaknya dapat mencakup seluruh jenis pelayanan tersebut, sehingga penilaian masyarakat terhadap pelayanan termonitor secara menyeluruh.

G. Sosial

1. Sarana Sosial

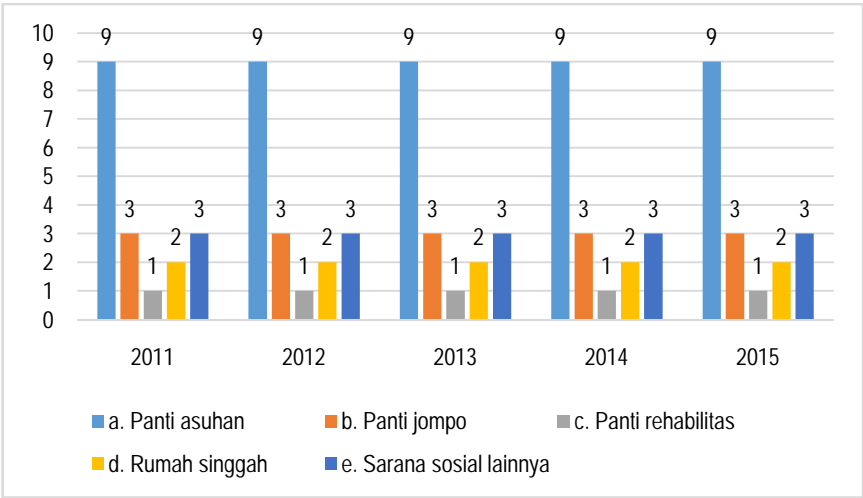
Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.112  
Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Panti Asuhan	Unit	9	9	9	9	9	0,00
2.	Panti Jompo	Unit	3	3	3	3	3	0,00
3.	Panti Rehabilitas	Unit	1	1	1	1	1	0,00
4.	Rumah Singgah	Unit	2	2	2	2	2	0,00
5.	Sarana Sosial lainnya	Unit	3	3	3	3	3	0,00
6.	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	18	18	18	18	18	0,00

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 jumlah sarana sosial di Kota Yogyakarta memiliki jumlah yang tetap, yaitu 18 sarana sosial. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Kota Yogyakarta terdiri dari panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitas, rumah singgah dan sarana sosial lainnya untuk anak cacat netra, cacat ganda dan tuna grahita. Sarana sosial terbanyak adalah panti asuhan. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.



**Gambar 2.67**  
**Grafik Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**2. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

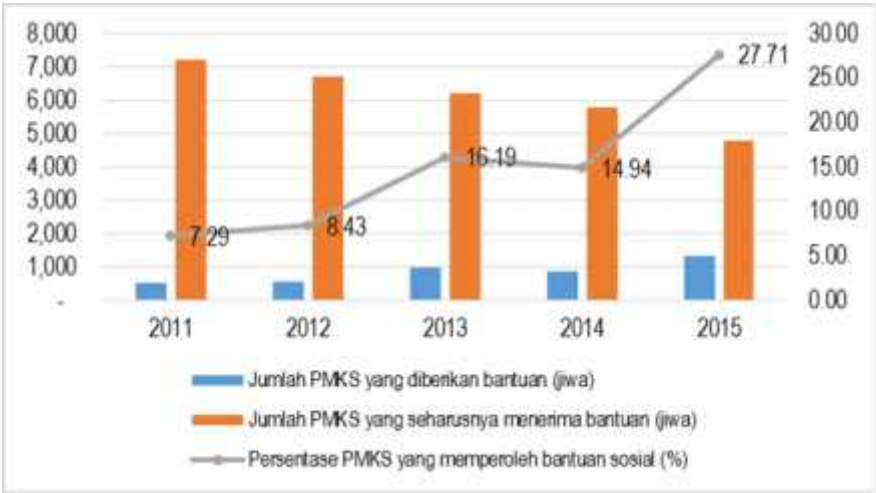
Tabel 2.113  
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Kelompok	526	568	1.007	865	1.334	31,35
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Kelompok	7.215	6.737	6.220	5.791	4.815	-9,51
3.	PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	7,29	8,43	16,19	14,94	27,71	46,35

Sumber :

- 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 2016
- 2) LPPD Kota Yogyakarta 2010-2015
- 3) Hasil Olahan, 2016

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 7,29%, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 menjadi 27,71%. Selain itu, jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan mengalami penurunan dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2011, jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan berjumlah 7.215, sedangkan pada tahun 2015 terdapat penurunan jumlah hingga mencapai angka 4.815. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.



Gambar 2.68  
Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta  
Tahun 2007-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2015

3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun

2011-2014 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, sementara pada tahun 2015 mengalami peningkatan presentase, hal ini disebabkan karena karena jumlah PMKS yang tertangani mengalami peningkatan dan PMKS yang ada juga mengalami penurunan. Namun, biarpun begitu, jumlah PMKS di Kota Yogyakarta masih tergolong cukup banyak. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

**Tabel 2.114**  
**Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	PMKS yang tertangani	jiwa	774	1697	1944	1279	1950	38,03
2.	PMKS yang ada	jiwa	7.661	7.352	6.220	6.293	5.271	-8,62
3.	Penanganan PMKS	%	10	23	31	20	37	52,73

Sumber :  
1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

**4. Anak Terlantar yang Dibina**

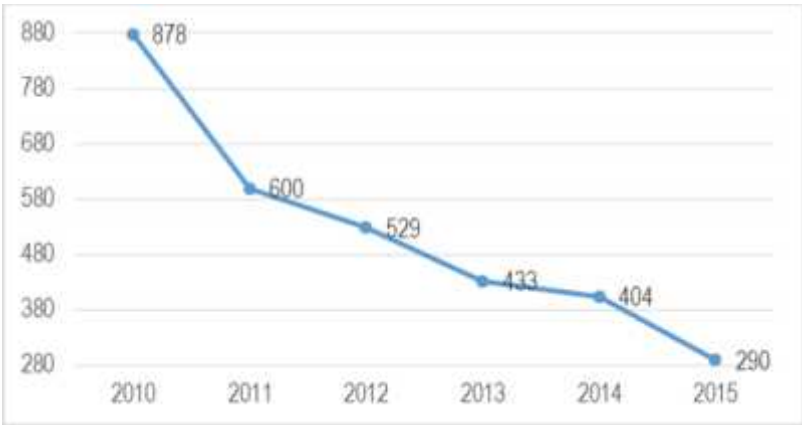
Sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

**Tabel 2.115**  
**Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Anak terlantar yang dibina	jiwa	878	600	529	433	404	290	-19,31

Sumber :  
1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 878 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 290 jiwa pada tahun 2015.



Gambar 2.69  
Grafik Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

H. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, karena di dalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2007. Dengan adanya dokumen RPJP ini maka pada rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 terdapat arahan perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan oleh Perda yang relevan.

Tabel 2.116  
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2013,2015,2016

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normative. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

Visi Kota Yogyakarta yang dirumuskan dalam RPJPD 2005-2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan.” Dengan visi tersebut maka Kota Yogyakarta dapat mengembangkan misi yang relevan. Terkait dengan detail misi maka dalam RPJPD Kota Yogyakarta terdapat sepuluh misi yaitu:

- a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan;
- b. Mempertahankan kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
- c. Mewujudkan daya saing kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
- d. Mewujudkan kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
- e. Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
- f. Mewujudkan kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean governance* (pemerintah yang bersih, berkeadilan dan berlandaskan hukum);
- g. Mewujudkan kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
- h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan
- i. Mewujudkan kota Yogyakarta yang sehat.

Dari sepuluh misi ini dapat menjadi arahan program pembangunan dan kegiatan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentunya dalam rentang waktu tahun 2005-2015 ini telah banyak capaian hasil pembangunan, khususnya pada tahun 2010-2015 beberapa pencapaian sesuai dengan arahan visi dan misi ini. Pada tahun 2015 indikator di atas tidak akan berubah sebab acuan yang digunakan relatif makro dan berlaku dari 2005-2025.

## **2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Bertolak dari RPJPD selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007. Sedangkan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016. Sehingga dalam kurun waktu 2010

hingga 2014 terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

**Tabel 2.117**  
**Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda**

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2013,2015, 2016*

Berdasarkan Perda-Perda penetapan RPJMD ini selanjutnya dilakukan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yang menjadi dasar selanjutnya adalah RKPD. Jaminan keberlanjutan program akan sangat terdukung oleh adanya dokumen RPJMD. Konsistensi arah pembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal.

**3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA**

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2010 hingga 2014 telah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2011 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2013 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014
- f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015

Tabel 2.118 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA							
No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

#### 4. Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk “*up date*” sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.119 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD							
Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	77	97	122	108	109	109
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	76	76	109	109	109	109
<b>Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>101,32</b>	<b>127,63</b>	<b>111,9</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015,2016

Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequence antar RKPD. Oleh karena itu dengan hanya melihat jumlah program yang ada di dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD belum dapat secara substansial dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, karena bentuk program di RKPD lebih operasional, maka tentunya jumlahnya bisa lebih banyak, mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan merencanakan RKPD untuk tahun depan sudah lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.

Jumlah program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD belum memiliki perbedaan yang signifikan. Jarak perbedaan jumlah program dalam RPJMD sangat dekat dengan jumlah program dalam RKPD. Melihat fakta dan data tersebut dapat disimpulkan beberapa asumsi yaitu; pertama kecakapan dalam mendetailkan program dari RPJMD ke dalam RKPD perlu ditingkatkan; kedua kemungkinan rumusan program dalam RPJMD sudah sangat operasional sehingga tidak dapat diturunkan ke dalam nama program yang lebih spesifik, sehingga nama program di RPJMD sama dengan nama program di RKPD.

**2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**A. Ketenagakerjaan**

**1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

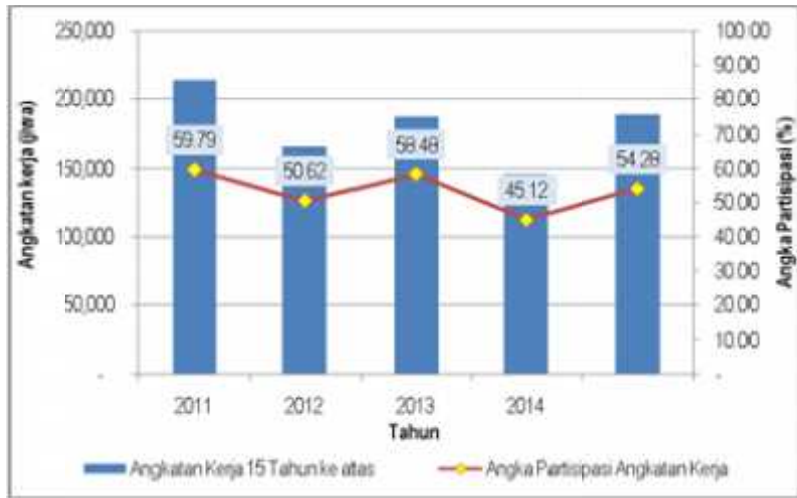
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai Angka Partisipasi Angkatan Kerja.

Tabel 2.120  
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	jiwa	213.686	166.406	187.205	145.850	188.555	-3,08
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jiwa	357.399	328.737	320.121	323.255	347.403	-0,71
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	59,78	50,62	58,48	45,12	54,28	-2,39

Sumber : Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun, 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2016): dengan Hasil Olahan, 2016.

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring adanya dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2011-2015, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,39%/tahun. Pada tahun 2011, angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar 59,78%, sedangkan pada tahun 2015, angka ini menurun hingga menjadi 54,28%. Semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.70  
Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

2. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Dalam indikator Permendagri No.54 Tahun 2010, angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada. Selama tahun 2011-2015, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -4,30%/tahun. Pada tahun 2011, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja mencapai 37 kasus, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, jumlah sengketa mencapai 60 dan 56 kasus. Meskipun demikian, pada tahun 2014 dan 2015 jumlah sengketa kembali menurun menjadi 35 dan 36 kasus.

Tabel 2.121  
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	kasus	37	60	56	35	36	-0,68
2	Jumlah Perusahaan	unit	1.211	1.256	1.300	1.341	1.405	3,78
3	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		30,55	47,77	43,08	26,10	25,62	-4,30

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2014, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.

Penurunan angka sengketa merupakan sebuah pertanda baik khususnya untuk dinamika perekonomian di Kota Yogyakarta. Turunnya angka sengketa mengindikasikan bahwa komunikasi dan kebijakan yang diterapkan di dalam perusahaan mampu mengakomodasi kepentingan antara pengusaha dan juga pekerja. Selain itu, rendahnya angka sengketa juga mencerminkan bahwa kegiatan industri yang ada cukup kondusif dan mampu menjadi nilai plus bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Yogyakarta.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari

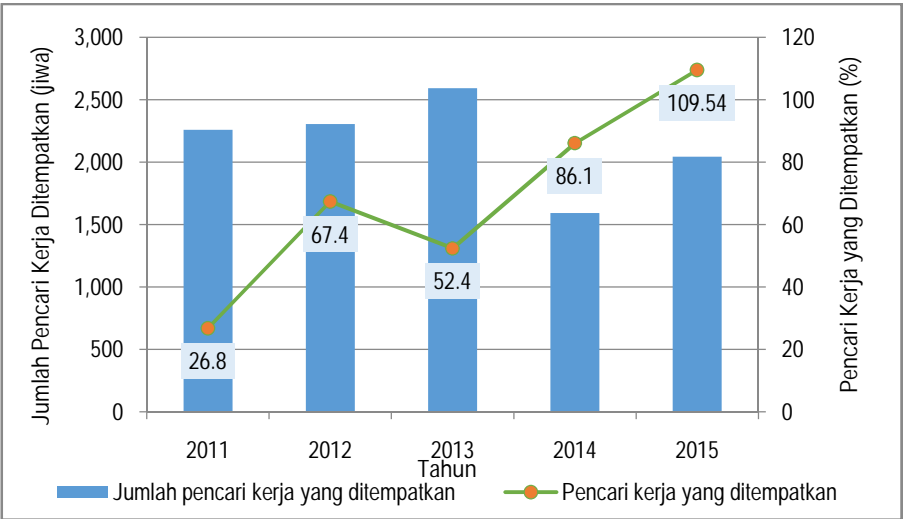
kerja yang mendaftar. Dari tahun 2011 hingga tahun 2015, persentase pencari kerja yang ditempatkan selalu menunjukkan kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 42,2%/tahun. Namun, apabila dilihat dari besaran jumlah pencari kerja yang mendaftar dan juga pencari kerja yang ditempatkan, pada tahun 2015 keduanya mengalami penurunan jumlah dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2011, jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah sebanyak 8.437, sedangkan untuk jumlah pencari kerja yang ditempatkan hanya sebesar 26,8% atau sebesar 2.259 jiwa. Jumlah dan persentase tersebut mengalami penurunan di tahun 2015. Pada tahun tersebut, jumlah pencari kerja yang mendaftar sebesar 1.866 dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah lebih besar dibanding yang mendaftar, yaitu sebesar 2.044 atau 109,54%.

**Tabel 2.122**  
**Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	jiwa	2.259	2.306	2.593	1.592	2.044	-2,47
2	Pencari kerja yang mendaftar	jiwa	8.437	3.422	4.950	1.849	1.866	-31,42
3	<b>Pencari kerja yang ditempatkan</b>	%	<b>26,8</b>	<b>67,4</b>	<b>52,4</b>	<b>86,1</b>	<b>109,54</b>	<b>42,22</b>

*Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2014, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.*

Ketidaksesuaian antara jumlah pendaftar kerja dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dimana pencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah akibat dari penduduk yang mencari kerja tidak seluruhnya mencari kartu kuning. Sedangkan tenaga kerja yang mendaftar tersebut didata dari penduduk yang mencari kartu kuning. Oleh karenanya, jumlah pencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar, padahal lazimnya jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah lebih besar atau sama dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan



Gambar 2.71  
Grafik Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

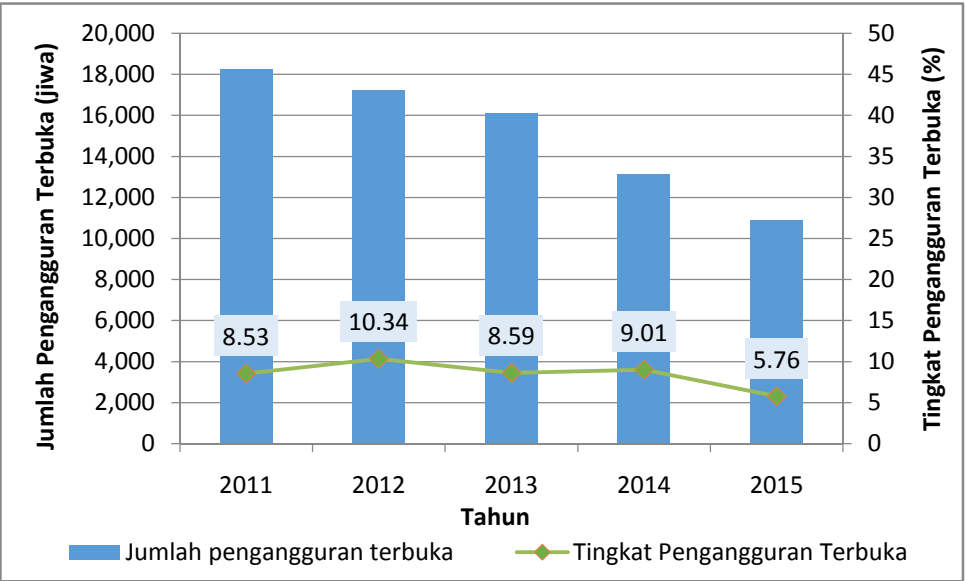
Tabel 2.123  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah pengangguran terbuka	jiwa	18.241	17.217	16.097	13.137	10.879	-12,12
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	jiwa	213.686	166.406	187.205	145.850	188.555	-3,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,53	10,34	8,59	9,01	5,77	-9,33

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2014): dengan Hasil Olahan, 2016.

Selama tahun 2011-2015, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -9,33%. Pada tahun 2011, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 8,53% dan menurun menjadi 5,77% pada tahun 2015. Apabila

dilihat dari jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerja yang ada pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang



lebih baik.

**Gambar 2.72**  
**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**5. Keselamatan dan Perlindungan**

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerja tersebut merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja.

Selama tahun 2011-2015, persentase keselamatan dan perlindungan yang diterapkan oleh perusahaan mengalami pertumbuhan positif yaitu 6,35%/tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang juga diiringi oleh bertambahnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3. Pada tahun 2011, tercatat ada 898 unit perusahaan yang menerapkan K3 atau sekitar 74,15% dari total perusahaan sebanyak 1.211 unit. Sedangkan pada tahun 2015, dari total perusahaan sebanyak 1.405 unit, sebanyak 1.333 unit perusahaan sudah menerapkan K3 atau setara dengan 94,88% dari total perusahaan.

Tabel 2.124  
Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	unit	898	1.016	1.000	1.197	1.333	10,38
2	Jumlah perusahaan	unit	1.211	1.256	1.300	1.341	1.405	3,78
3	Keselamatan dan Perlindungan	%	74,15	80,89	84,62	89,26	94,88	6,35

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

Secara umum, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total perusahaan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang pada tahun 2011 belum menerapkan K3 kemudian pada tahun-tahun selanjutnya sudah mulai menerapkan K3. Pemberian pemahaman mengenai pentingnya penerapan K3 bagi perusahaan, pekerja, dan lingkungan oleh dinas terkait kepada perusahaan turut membantu meningkatkan persentase perusahaan yang menerapkan K3 sehingga akan tercipta perlindungan kerja.

6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Secara umum, penyelesaian buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2014 dapat seluruhnya terselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, pada tahun 2015, terdapat satu dari dua kasus yang belum terselesaikan. Kasus tersebut terkait dengan THR yang tidak diberikan pengusaha kepada buruh.

Tabel 2.125  
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah penyelesaian perselisihan	kasus	2	2	2	1	1	
2	Jumlah kejadian perselisihan	kasus	2	2	2	1	2	
3	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	%	100	100	100	100	50	-15,91

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015: dengan Hasil Olahan.

B. Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan di dapat dari BKD, dan jumlah seluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari BKD serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut ini merupakan data presentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Tabel 2.126  
Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta  
Tahun 2010-2015

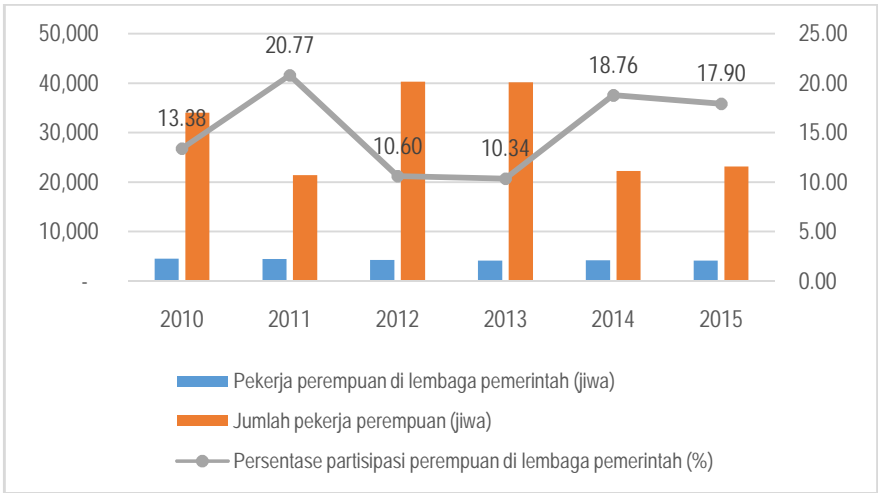
No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	jiwa	4.547	4.452	4.267	4.152	4.178	4.145	-1,82
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	33.994	21.430	40.267	40.152	22.275	23.162	2,02
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	13,38	20,77	10,60	10,34	18,76	17,90	16,14

Sumber :  
1) Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016  
2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016  
3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, 2015  
4) LPPD Kota Yogyakarta 2010-2014  
5) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 bersifat fluktuatif. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan mengalami penurunan dari 4.547 jiwa di tahun 2010, menjadi 4.145 jiwa di tahun 2015. Namun, persentasenya meningkat dari 13,38% tahun 2010, menjadi 17,90% di tahun 2015, karena jumlah seluruh pekerja perempuan yang juga mengalami penurunan sebesar kurang lebih sepuluh ribu jiwa.

Menurut Badan Kepegawaian Daerah, dari dua periode penerimaan CPNS terakhir, didominasi oleh CPNS perempuan yang diterima. Namun

apabila dibandingkan dengan jumlah persentase pekerja perempuan seluruhnya di Kota Yogyakarta, persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah. Melihat kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, dikabarkan akan ada penerimaan CPNS dari bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga diprediksikan pula akan ada lebih banyak pekerja perempuan di lembaga pemerintah.



**Gambar 2.73**  
**Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Pada indikator ini dihitung persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan pada indikator ini merupakan data yang berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan data jumlah seluruh pekerja perempuan di Kota Yogyakarta merupakan data yang didapat dari penjumlahan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta. Berikut adalah tabel persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.

**Tabel 2.127**  
**Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

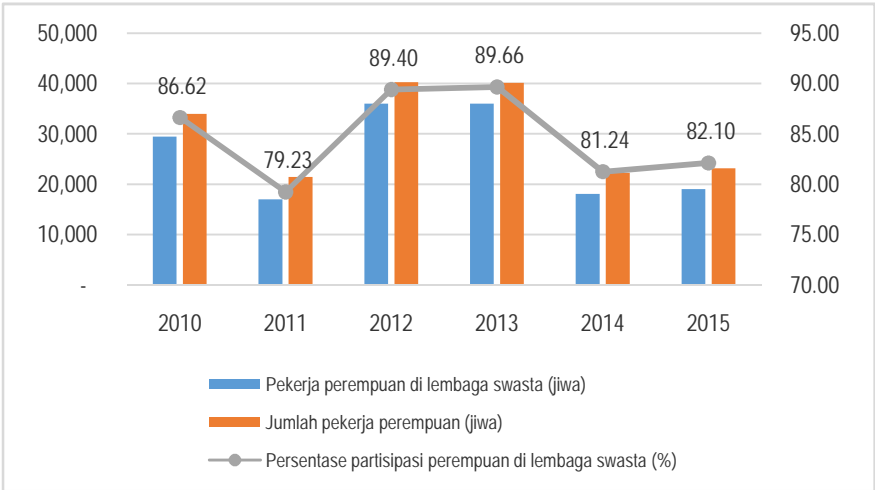
No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	jiwa	29.447	16.978	36.000	36.000	18.097	19.017	5,01
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	33.994	21.430	40.267	40.152	22.275	23.162	2,02

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	86,62	79,23	89,40	89,66	81,24	82,10	-0,75

Sumber :

- 1) Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
- 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
- 3) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan dari 29.447 jiwa di tahun 2010, menjadi 19.017 jiwa di tahun 2015. Begitu pula dengan persentasenya yang mengalami penurunan, dari 86,62% di tahun 2010, menjadi 82,10% di tahun 2015. Meskipun pada kurun waktu enam tahun terakhir persentase pekerja perempuan mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan data tahun 2014, jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan, begitu juga dengan persentasenya. Hal tersebut mengindikasikan makin terbuka luasnya kesempatan bekerja bagi perempuan di ranah lembaga swasta dibandingkan tahun 2014. Hal tersebut juga dapat dianggap sebagai kondisi yang baik dimana perempuan sudah mendapat kesetaraan dalam bidang ekonomi.



**Gambar 2.74**  
**Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
 Sumber : Hasil Olahan, 2016

### 3. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah

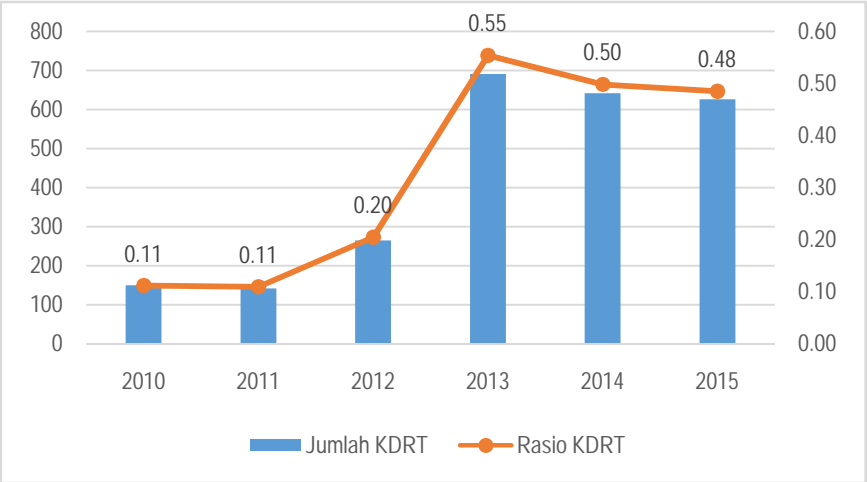
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015,

Tabel 2.128  
Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah KDRT	jiwa	150	142	265	691	642	626	46,49
2.	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jiwa	134.234	129.853	129.439	124.744	128.843	129.092	-0,75
3.	Rasio KDRT	Persen	0,11	0,11	0,20	0,55	0,50	0,48	28,58

Sumber : Seksi Perlindungan Kelompok Rentan (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016))

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 kondisi yang tidak membaik, yaitu rasio KDRT meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, ditemukan 150 kasus KDRT. Jumlah kasus ini semakin meningkat hingga mencapai 626 kasus di tahun 2015. Rendahnya kasus KDRT di tahun 2010-2012 bukan berarti memang hanya terjadi sedikit kasus KDRT, namun disebabkan karena masyarakat belum berani melaporkan adanya tindakan KDRT atau ketidaktahuan harus melaporkan kemana. Meningkatnya kasus KDRT pada tahun 2013, terdapat peningkatan yang cukup besar, hal ini menandakan makin sadarnya korban KDRT untuk melaporkan kasus KDRT. Pada kurun waktu 2013-2015 terjadi penurunan rasio KDRT hal tersebut mengindikasikan adanya kondisi yang sedikit demi sedikit membaik dengan berkurangnya kasus KDRT.



**Gambar 2.75**  
**Grafik Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.

**4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

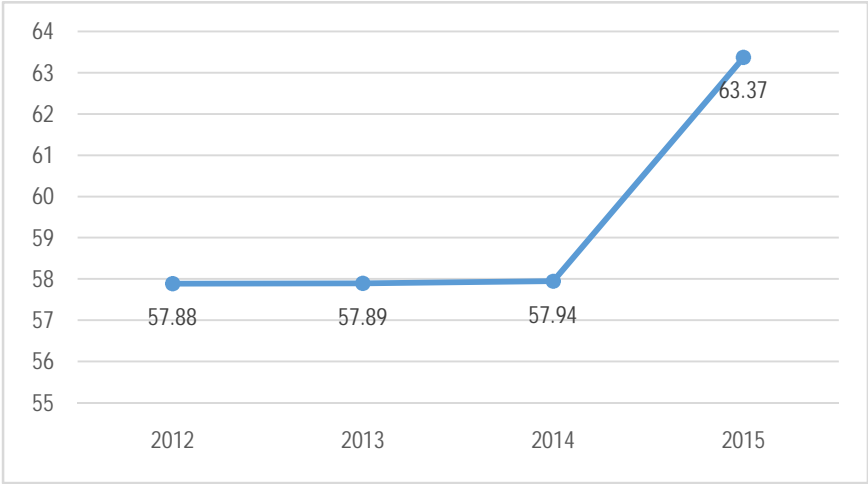
Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

**Tabel 2.129**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	58,89		57,88	57,89	57,94	63,37	3,16

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016*

Berdasarkan data di atas, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 57,88%. Kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 63,37% pada tahun 2015. Artinya, terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Sumber penghasilan keluarga tidak hanya dari suami, namun istri juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain bisa menambah penghasilan keluarga, beberapa perempuan bekerja untuk mengaktualisasikan diri, mengisi kegiatan sehari-hari atau bersosialisasi, serta untuk menambah wawasan pengetahuan.



**Gambar 2.76**  
**Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan**

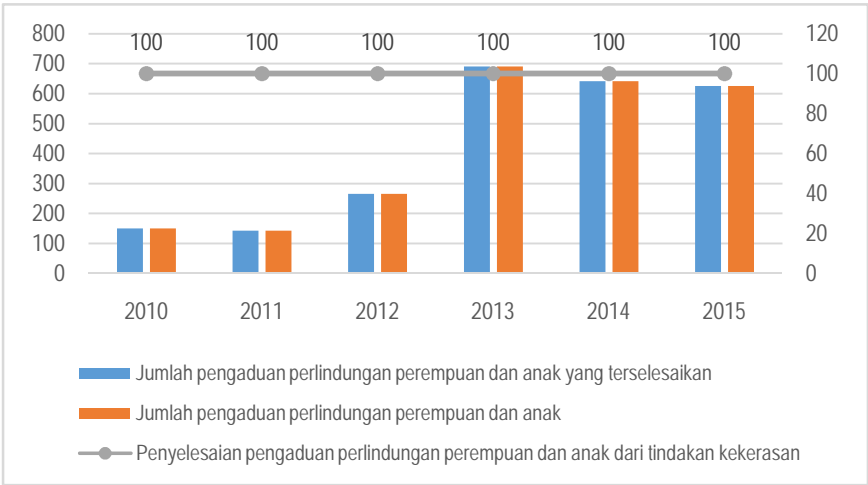
Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Berikut ini merupakan data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

**Tabel 2.130**  
**Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Pengaduan Terselesaikan	Kasus	150	142	265	691	642	626	46,5
2.	Jumlah Pengaduan	Kasus	150	142	265	691	642	626	46,5
3.	Penyelesaian pengaduan	persen	100	100	100	100	100	100	0,00

Sumber :  
1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 telah terselesaikan semuanya (100%). Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang dilaporkan semakin banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya.



**Gambar 2.77**  
**Grafik Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

**6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan

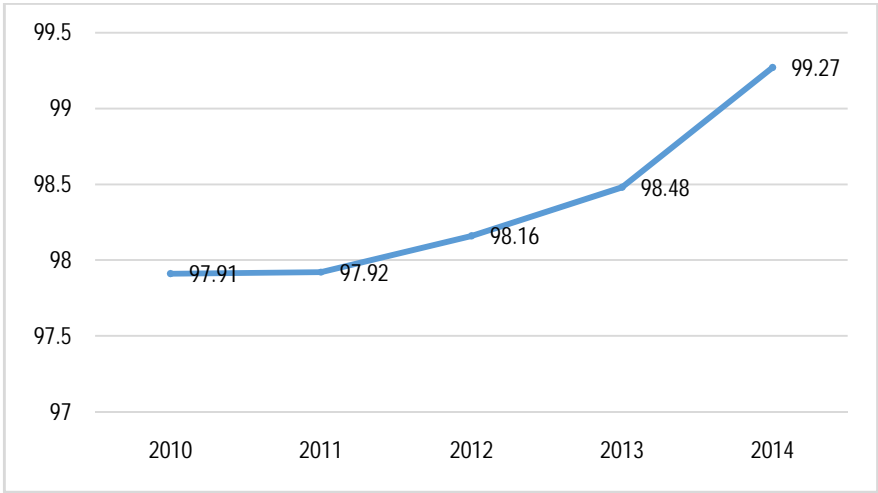
ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut ini merupakan data IPG di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

Tabel 2.131  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Indeks Pembangunan Gender		97,91	97,92	98,16	98,48	99,27		0,34

Sumber :  
1) Badan Pusat Statistik, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2016), IPG baru dihitung sampai tahun 2014, sedangkan setelah itu belum dilakukan perhitungan. IPG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPG di Kota Yogyakarta mencapai 82,72 dan mengalami peningkatan menjadi 83,78 pada tahun 2014. Jika dibandingkan IPG nasional tahun 2012 yang hanya mencapai 68,52, Kota Yogyakarta sudah mampu melampaui IPG nasional. Hal ini mengindikasikan persamaan dan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta sudah semakin tinggi. Berikut ini merupakan grafik peningkatan IPG di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.78  
Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

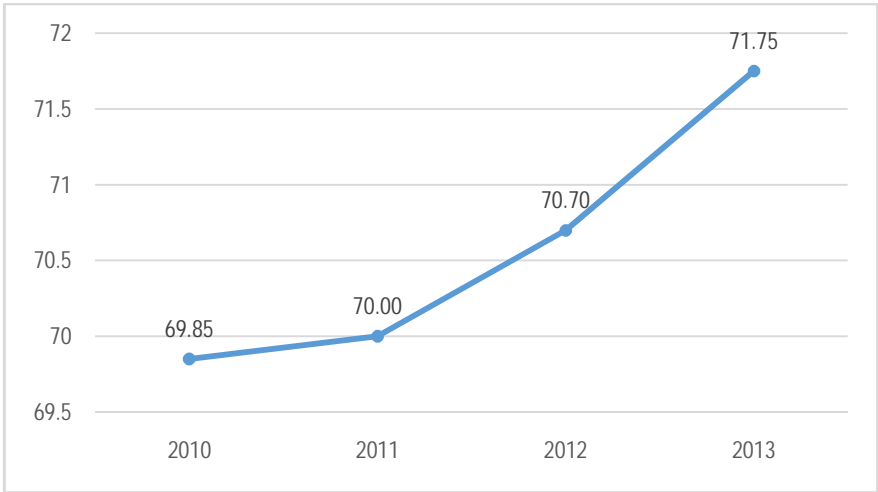
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut ini merupakan data IDG Kota Yogyakarta tahun 2010-2012.

Tabel 2.132  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender		69,85	70,00	70,70	71,75			0,90

Sumber :  
1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2015  
2) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, IDG baru dihitung sampai tahun 2013, sedangkan setelah itu belum dilakukan perhitungan. IDG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan, dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang bernilai 0,9%. Pada tahun 2010, IDG Kota Yogyakarta mencapai 69,85 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 71,75 pada tahun 2013. IDG Kota Yogyakarta sudah melebihi capaian IDG nasional yang mencapai 70,5 pada tahun 2013 (BPS dalam BAPPENAS, 2014). Artinya, persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan di Kota Yogyakarta semakin tinggi.



**Gambar 2.79**  
**Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2015*

**C. Ketahanan Pangan**

**1. Regulasi Ketahanan Pangan**

Selama tahun 2010, Kota Yogyakarta telah memiliki regulasi ketahanan pangan. Regulasi ini berupa peraturan walikota yang terdiri dari Perwal No.64 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan dan Perwal No.51 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan daerah tersebut masih diberlakukan sampai pada tahun 2015.

**Tabel 2.133**  
**Regulasi Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Regluasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016*

**2. Ketersediaan Pangan Utama**

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan rata-rata ketersediaan pangan utama mencapai 19,81%/tahun sedangkan untuk pertumbuhan rata-rata jumlah ketersediaan pangannya sendiri sebesar 17,66%/tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah yang paling besar di antara tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan ketersediaan pangan pada tahun 2014. Pada tahun 2015, ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta mencapai 142,24 kg/jiwa, sedangkan pada tahun 2014, ketersediaan pangan utama adalah sebesar 57,72 kg/jiwa.

Ketersediaan pangan yang ada di Kota Yogyakarta berasal dari daerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayah Kota Yogyakarta. Di samping hal tersebut, perhitungan ketersediaan pangan di kota Yogyakarta didapat dari akumulasi cadangan pangan ketika bencana terjadi. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

**Tabel 2.134**  
**Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama	kg	30.603.000	22.603.000	25.882.000	23.892.000	58.656.000	17,66
2	Jumlah Penduduk	jiwa	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-1,79
3	Ketersediaan Pangan Utama	kg/ jiwa	69,53	52,86	63,65	57,72	143,24	19,81

Sumber :  
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.  
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

**D. Pertanahan**

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

**1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah**

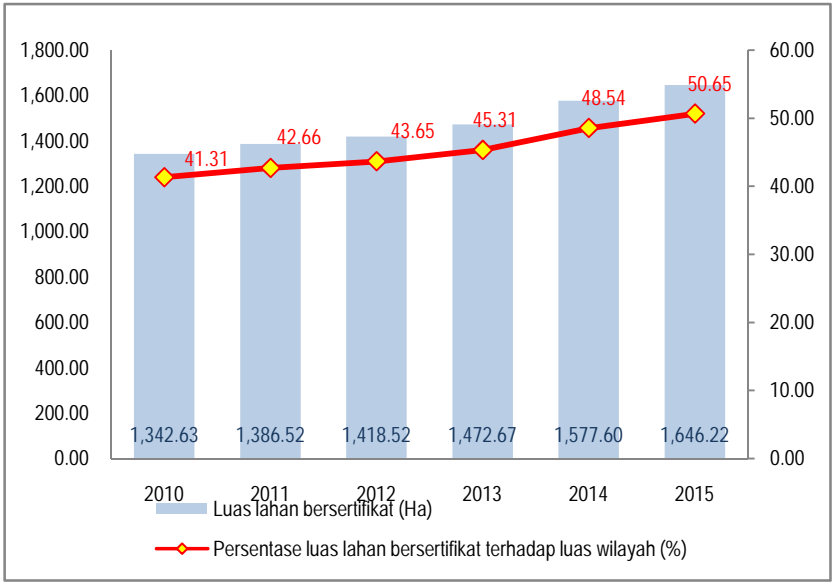
Sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah penduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formula tersebut dirasa meragukan dengan bilangan pembanding adalah jumlah penduduk, sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah.

**Tabel 2.135**  
**Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas lahan bersertifikat	Ha	1.342,63	1.386,52	1.418,46	1.472,67	1.577,60	1.646,22	4,16
2.	Luas Wilayah	Ha	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250	-
3.	Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah	%	41,31	42,66	43,64	45,31	48,54	50,65	4,16

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Tercatat seluas 1.342,63 hektar lahan bersertifikat di tahun 2010 kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 1.645,22 lahan bersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,16%. Peningkatan juga terlihat dari persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, yakni 41,31% pada tahun 2010 meningkat menjadi 50,65% pada tahun 2015 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,16% per tahun.



**Gambar 2.80**

**Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Sumber : Hasil Olahan, 2016

**2. Penyelesaian Kasus Tanah**

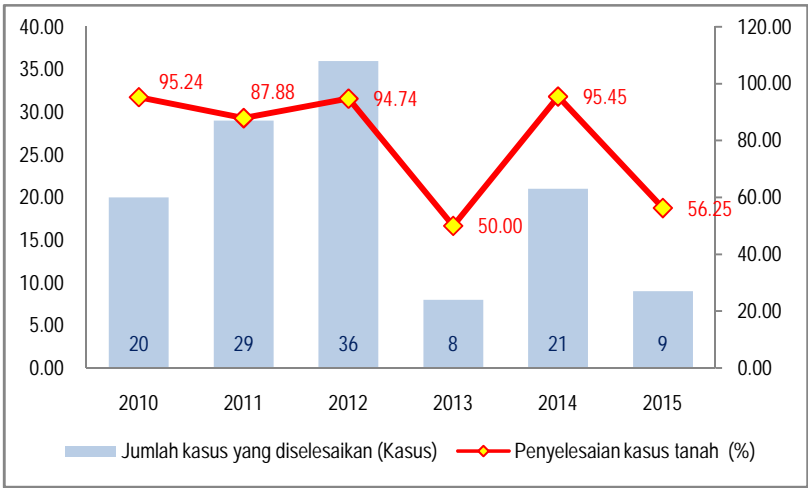
Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah adalah dengan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.136  
Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	20	29	36	8	21	9	(14,76)
2.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	21	33	38	16	22	16	(5,29)
3.	Penyelesaian kasus sengketa tanah	%	95,24	87,88	94,74	50,00	95,45	56,25	(10,00)

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Secara umum, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -10% per tahun. Dalam kurun waktu yang sama (tahun 2010 hingga tahun 2015), tidak ada kasus yang dapat terselesaikan seluruhnya (100%), bahkan pada tahun 2013 hanya 50% kasus tanah negara saja yang dapat terselesaikan. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2015 yang hanya berhasil menyelesaikan 9 kasus sengketa tanah dari 16 kasus yang terdaftar. Meskipun demikian, jumlah kasus dari tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki jumlah yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -5,29%. Hal tersebut dapat mengindikasikan semakin berkurangnya permasalahan dibidang pertanahan yang sekaligus mengindikasikan adanya peningkatan administrasi pertanahan di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.81  
Grafik Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.137  
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah izin lokasi	Unit	1	0	1	1	0	1
2.	Permohonan izin lokasi	Unit	1	0	1	1	0	1
3.	Penyelesaian izin lokasi	%	100	0	100	100	0	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat jumlah izin lokasi di tahun 2010 merupakan izin lokasi untuk pembangunan perumahan seluas 13.977 m2 terletak di Jl. Babaran, Kelurahan Pendeyan, Kecamatan Umbulharjo; izin lokasi pada tahun 2012 merupakan izin lokasi untuk pembangunan kondominium/hotel seluas 12.227 m2 terletak di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; sedangkan pada tahun 2013 merupakan izin lokasi untuk pembangunan hotel (semula Purawisata) seluas 24.690 m2 terletak di Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Sedangkan di tahun 2015 permohonan izin lokasi dilakukan sebatas untuk mengganti kepemilikan tanah gudang susu milik Perusahaan SGM.

E. Lingkungan Hidup

Dalam Lampiran 1 Permendagri disebutkan bahwa terdapat delapan indikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan.

Dari kedelapan indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, yaitu misalnya indikator persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang menggantikan indikator persentase penanganan sampah, indikator persentase volume sampah

yang dikelola secara 3R yang menggantikan data tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, juga indikator persentase kegiatan pengawasan limbah usaha yang menggantikan indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Adapun selain adanya beberapa indikator yang tidak dapat diisikan, juga terdapat penggantian indikator yang dikarenakan belum adanya pendataan.

1. **Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**

Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, untuk menghitung indikator persentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta digunakan perbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA dengan perkiraan timbulan sampah dikalikan dengan bilangan 100, serta dengan penggantian judul indikator menjadi persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

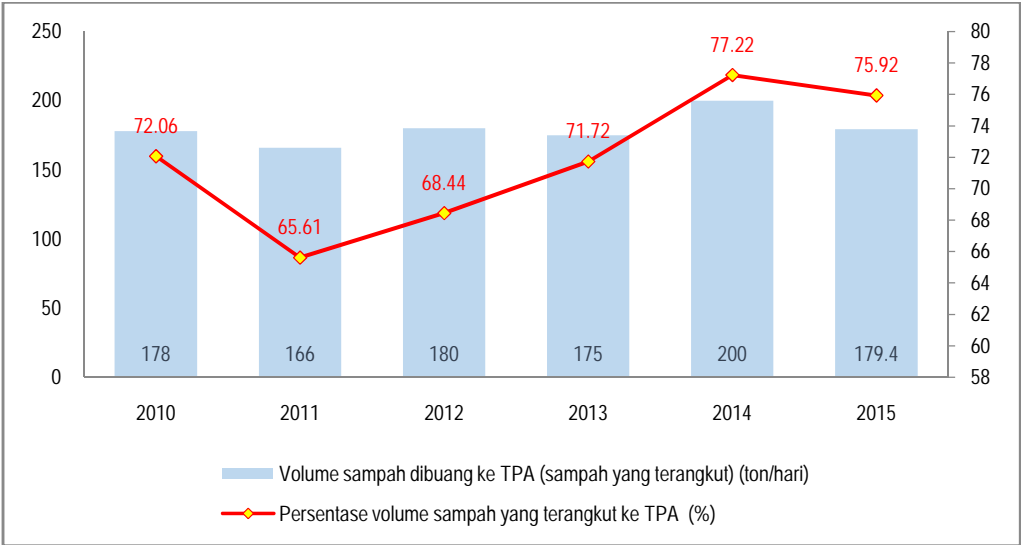
**Tabel 2.138**  
**Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**  
**Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)	ton/hari	178	166	180	175	200	179,4	0,16
2.	Perkiraan timbulan sampah	ton/hari	247	253	263	244	259	236,3	(0,88)
3.	Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA	%	72,06	65,61	68,44	71,72	77,22	75,92	1,05

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Jumlah timbulan sampah dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni 247 ton/hari pada tahun 2010 meningkat menjadi 259 ton/hari pada tahun 2014. Namun jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA kembali menurun di tahun 2015 dengan jumlah volume sebesar 179,4 ton/hari. Dengan demikian pertumbuhan rata-rata volume sampah yang

terangkut ke TPA dari tahun 2010 sampai 2015 adalah sebesar 0,16% per tahun. Penurunan jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA ini juga selaras dengan penurunan jumlah perkiraan timbulan sampah di tahun 2015. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk siang di Kota Yogyakarta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari penduduk malam hari. Selain itu sebagai kota pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta juga diduga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya jumlah timbulan sampah.



**Gambar 2.82**  
**Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**  
**Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat hubungannya dengan penanganan sampah di perkotaan. BLH telah melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah, sekarang ini telah dikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat), serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu TPS juga akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

setiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menangani persampahannya secara lebih baik.

2. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum

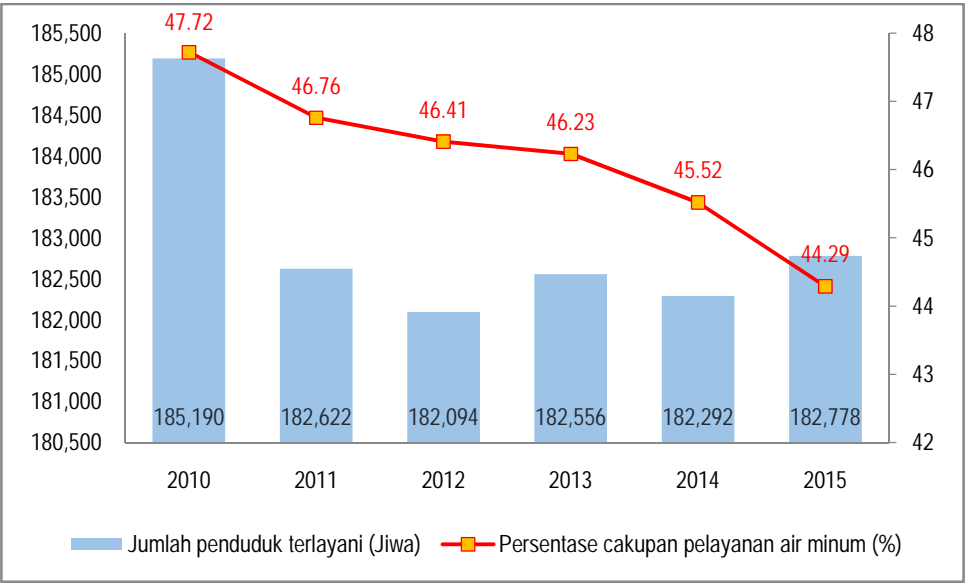
Indikator persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Yogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk terlayani di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar - 0,26% per tahun.

Tabel 2.139  
Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah penduduk terlayani	Jiwa	185.190	182.622	182.094	182.556	182.292	182.778	(0,26)
2.	Jumlah penduduk wilayah pelayanan	Jiwa	388.088	390.553	392.330	394.879	400.467	412.704	1,24
3.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	47,72	46,76	46,41	46,23	45,52	44,29	(1,48)

Sumber : Kinerja PDAM, PDAM Tirtamarta, Tahun 2012-2015 dengan Hasil Olahan

Menurunnya jumlah penduduk terlayani berbanding lurus dengan persentase cakupan pelayanan air minum yang juga memiliki nilai dengan kecenderungan menurun hingga -1,48% per tahun dalam kurun waktu yang sama (tahun 2010 hingga tahun 2015). Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh banyaknya sumur komunal yang dibangun oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir, selain itu juga banyaknya penduduk yang lebih banyak memilih untuk menggunakan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



**Gambar 2.83**  
**Grafik Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**3. Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu**

Pencemaran status mutu air didapatkan dari perbandingan antara jumlah kawasan permukiman atau industri dengan sumber mata air yang dipantau mutu airnya dibagi dengan jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air dikalikan dengan bilangan 100. Data pembentuk indikator ini sendiri belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, baik oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah maupun Badan Lingkungan Hidup. Indikator pencemaran status mutu air ini digantikan dengan indikator persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu.

**Tabel 2.140**  
**Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Parameter yang memenuhi baku mutu		71	72	74	75	72
2.	Jumlah sampel parameter		100	100	100	135	135
3.	Persentase peningkatan kualitas air sungai sesuai baku mutu	%	71	72	74	55,5	55,33

*Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2015*

Indikator persentase kualitas air sungai diukur dengan cara pemeriksaan laboratorium terhadap tiga parameter yakni BOD, COD, dan DO, masing-masing pada lima titik lokasi pengambilan sampel pada tiga sungai di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong. Di tahun 2015, diketahui bahwa terdapat 72 sampel parameter yang hasil pengukurannya berada pada ambang batas baku mutu dari 135 jumlah sampel parameter kunci penentu, atau sebesar 55,33%. Terjadi

penurunan persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu, yang berarti terjadi peningkatan beban pencemaran air sungai, hal tersebut disebabkan karena masih banyak limbah padat rumah tangga maupun limbah cair industri yang dibuang ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.

4. Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya

Formula yang digunakan untuk menghitung cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah dengan perbandingan antara jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air dikalikan dengan bilangan 100. Indikator cakupan penghijauan wilayah longsor dan sumber mata air ini seharusnya diaplikasikan untuk kabupaten, tidak relevan apabila digunakan untuk lingkup Kota Yogyakarta, sehingga indikator ini tidak dapat dihitung.

Tidak didapatkan data dan informasi mengenai indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Data yang bersumber dari Badan Lingkungan Hidup ini hanya sebatas jumlah taman yang dibangun di bantaran sungai, beserta dengan perkiraan luas taman tersebut. Taman-taman tersebut dibangun di tepian sungai, selain untuk menambah ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh penduduk Kota Yogyakarta sebagai sarana rekreasi, juga untuk melindungi daerah tepian sungai dari pembangunan yang tidak diharapkan, seperti permukiman liar. Tidak ada daerah rawan longsor maupun daerah tepian sungai yang rawan longsor di Kota Yogyakarta. Beberapa sungai yang ada mempunyai potensi membawa banjir lahar dingin bila musim penghujan tiba.

Tabel 2.141  
Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah taman di bantaran sungai	Unit	6	10	11	12	12	12
2.	Perkiraan luas taman Pinggir Sungai	m <sup>2</sup>	300	500	550	640	640	640

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016

Hingga tahun 2015, terdapat 12 taman di bantaran sungai yang dibangun melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan perkiraan luasan taman sebesar 640 m2. Keterbatasan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak adanya perkembangan

jumlah ataupun luas taman khususnya di bantaran sungai di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus melakukan perbaikan, dari segi penghijauan dengan berbagai usaha salah satunya dengan meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi-lokasi lainnya.

Selain diketahui jumlah data taman yang dibangun di bantaran sungai, menurut Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa terdapat lima unit taman yang dibuat bekerjasama dengan FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri), yakni di Kricak (berupa jembatan dan ruang terbuka hijau); Pringgokusuman (berupa ruang terbuka hijau); Serangan, Notoprajan (berupa ruang terbuka hijau, pergola, flying fox, dan taman kuliner); Badran (berupa ruang terbuka hijau, kolam renang, gazebo), serta Dukuh (Gedongkiwo) yang berupa ruang terbuka hijau. Selain itu juga didapatkan data mengenai jumlah mata air yang terdapat di Kota Yogyakarta, antara lain tujuh buah mata air yang terdapat di Sungai Winongo (yang telah dikelola 3 buah mata air); 22 mata air di Sungai Gajah Wong (yang telah dikelola 4 buah mata air); dan beberapa mata air di Sungai Code.

5. Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha

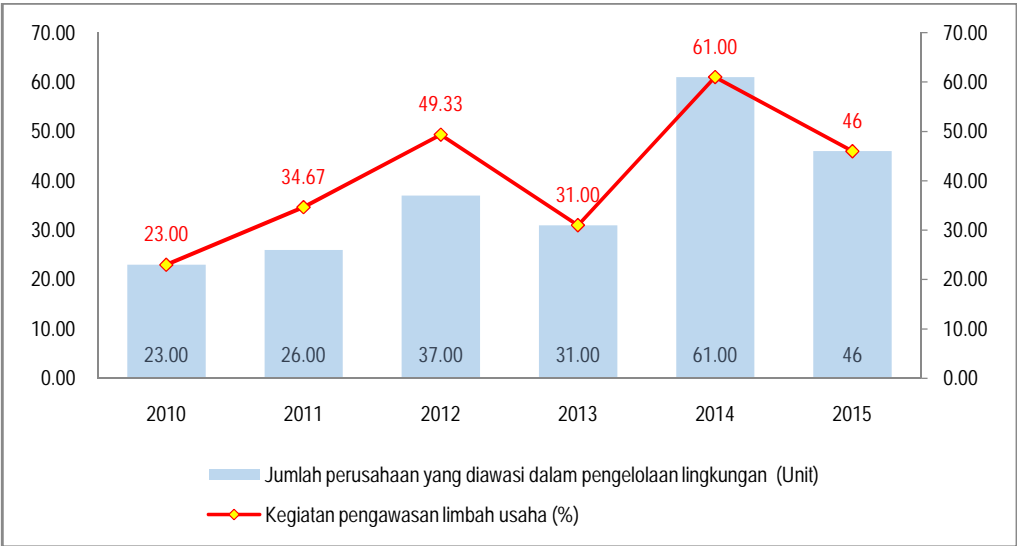
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dihitung dengan formula jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal dikalikan dengan bilangan 100. Sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup, indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal di Kota Yogyakarta ini diganti menjadi Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha.

Tabel 2.142  
Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (realisasi)	Unit	23	26	37	31	61	46	14,87
2.	Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (target)	Unit	100	75	75	100	100	100	-
3.	Kegiatan pengawasan limbah usaha	%	23,00	34,67	49,33	31,00	61,00	46	14,87

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2015, dengan Hasil Pengolahan

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kegiatan pengawasan limbah usaha adalah dengan perbandingan antara realisasi jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan dengan target jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan dikalikan dengan bilangan 100. Persentase kegiatan pengawasan limbah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni 23% pada tahun 2010 meningkat menjadi 46% pada tahun 2015. Meskipun demikian nilai ini cenderung menurun apabila melihat dari jumlah perusahaan yang diawasi di tahun sebelumnya (tahun 2014) dengan target yang sama.



**Gambar 2.84**  
**Grafik Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Pertumbuhan rata-rata yang ditunjukkan oleh indikator kegiatan pengawasan limbah usaha pada tahun 2010 hingga tahun 2015 adalah sebesar 14,87% per tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan untuk mengelola limbah dalam usaha menjaga (mengelola) lingkungan terus meningkat, atau dengan kata lain menunjukkan tingkat kesadaran pengelola perusahaan akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan sudah semakin baik.

**6. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R**

Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju pada sistem zero waste. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume

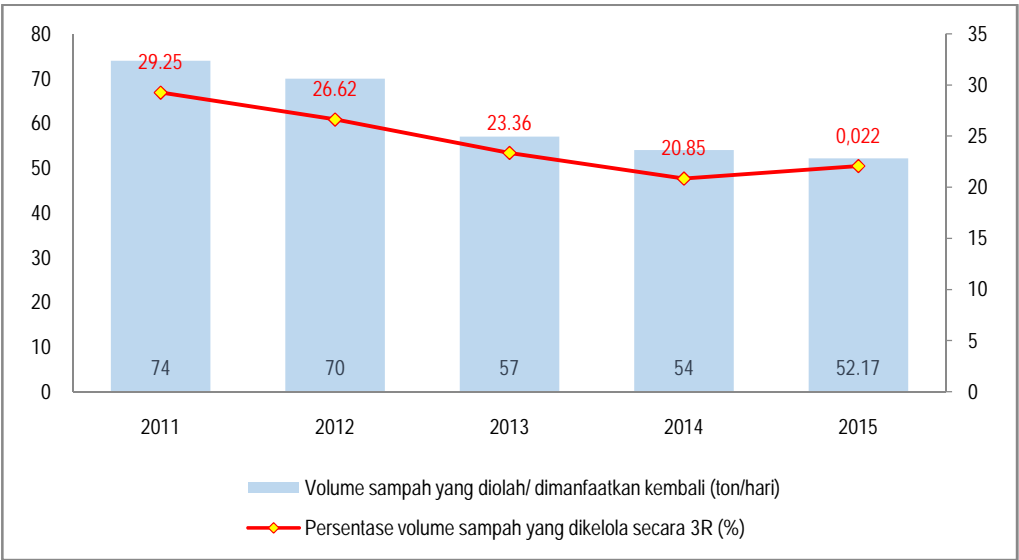
sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

**Tabel 2.143**  
**Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Volume sampah yang diolah/ dimanfaatkan kembali	ton/hari	74	70	57	54	52,17	(8,37)
2.	Volume timbulan sampah	ton/hari	253	263	244	259	236,3	(1,69)
3.	Persentase volume sampah yang dikelola secara 3R	%	29,25	26,62	23,36	20,85	22,078	(6,79)

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali didapatkan dari pengurangan volume timbulan sampah dengan volume sampah yang dibuang ke TPA serta volume sampah yang tidak terbuang dan tidak termanfaatkan kembali, sehingga mendapatkan hasil dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015, yakni 74 ton/hari turun menjadi 52,17 ton/hari, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -8,37% per tahun. Hal tersebut berbanding lurus dengan persentase persentase fasilitas volume sampah yang dikelola secara 3R di perkotaan dimana nilai yang ditunjukkan juga memiliki kecenderungan menurun, yakni 28,25% tahun 2011 menjadi 22,078% tahun 2015.



**Gambar 2.85**  
**Grafik Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Secara umum, jumlah TPS sendiri semakin berkurang karena kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Di Kota Yogyakarta terdapat pula kelompok bank sampah yang dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 memiliki pertumbuhan rata-rata yang terbilang sangat tinggi, yakni sebesar 127,95%.

**Tabel 2.144**  
**Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah kelompok bank sampah	Kelompok	15	61	136	315	405	127,95

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Di tahun 2011 terdapat 15 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta, dimana semakin tahun antusiasme penduduk semakin meningkat yang berimbas pada peningkatan kelompok bank sampah yang sangat tinggi. Bahkan pada tahun 2015 terdapat 405 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu TPS akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman tersebut. Selain itu pengelolaan sampah secara kelompok (bank sampah) juga mulai dimanfaatkan sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bank sampah dan masyarakat di wilayah itu sendiri.

**7. Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan hukum lingkungan dihitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah kota dengan jumlah kasus lingkungan yang ada dikalikan dengan bilangan 100. Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, jumlah kasus lingkungan yang ada semuanya dapat diselesaikan, dengan kata lain penegakan hukum lingkungan di Kota Yogyakarta dapat seluruhnya terselesaikan (100%). Jumlah kasus lingkungan yang terjadi di Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun, yakni sebanyak 16 kasus pada tahun 2010 menurun menjadi empat kasus pada tahun 2015.

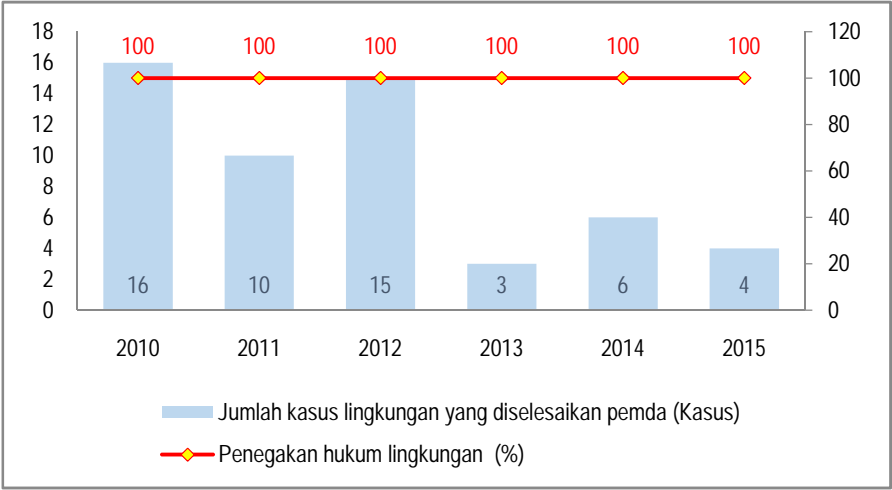
Tabel 2.145

Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	Kasus	16	10	15	3	6	4	(24,21)
2.	Jumlah kasus lingkungan yang ada	Kasus	16	10	15	3	6	4	(24,21)
3.	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan, agar masyarakat lebih peduli akan lingkungan di sekitarnya, dan segera melakukan laporan atau pengaduan apabila terjadi pencemaran lingkungan di wilayahnya. Disamping itu juga senantiasa dilakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait dugaan pencemaran, agar penanganan pencemaran dapat diselesaikan secepat mungkin.



Gambar 2.86

Grafik Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2015

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

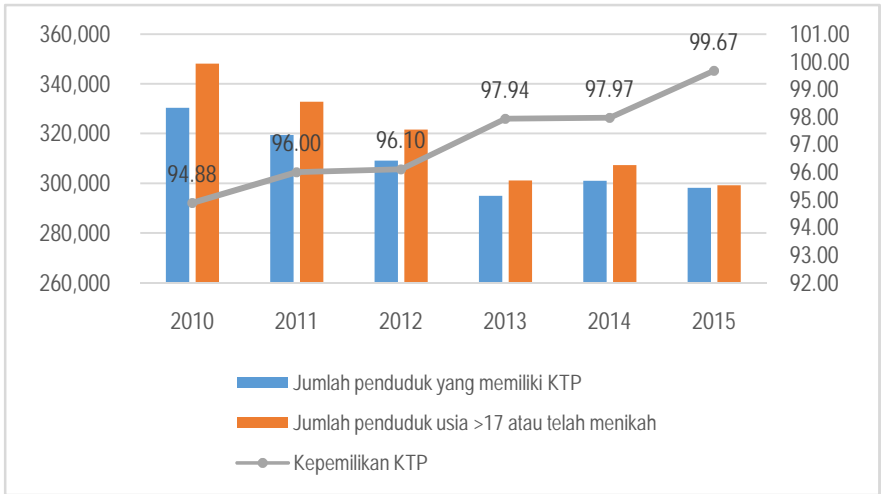
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.146  
Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Per- tumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Penduduk ber-KTP	Jiwa	330.364	319.444	309.060	294.863	301.035	298.204	-2,00
2.	Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/ sudah menikah)	Jiwa	348.190	332.756	321.595	301.078	307.279	299.191	-2,95
3.	Kepemilikan KTP	Persen	94,88	96,00	96,10	97,85	98,00	99,67	0,99

Sumber :  
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada data di atas, kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, persentase kepemilikan KTP hanya 94,88%, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 99,67% pada tahun 2015. Penyebab meningkatnya jumlah kepemilikan KTP disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang tertib wajib KTP, serta adanya kemudahan sistem dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk pelayanan wajib KTP, seperti jemput bola dan mobile E-KTP.



**Gambar 2.87**  
**Grafik Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**2. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk**

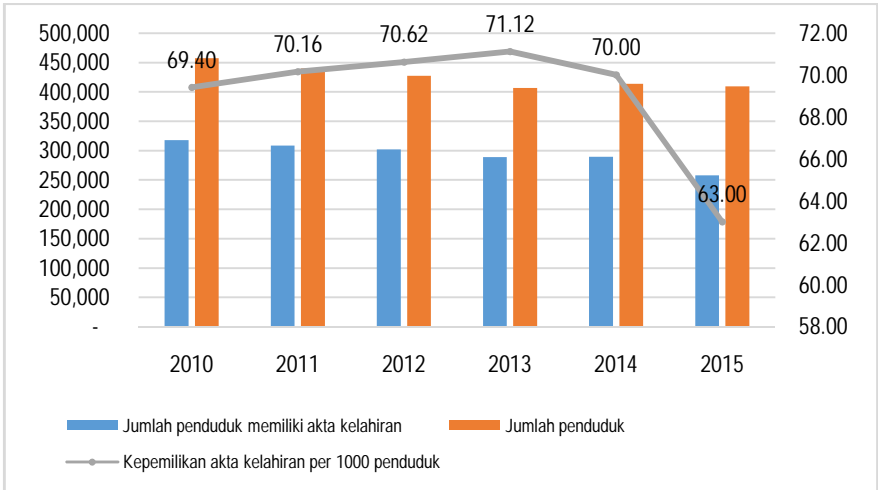
Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Berikut merupakan data kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.147**  
**Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran	Jiwa	317.640	308.800	301.959	289.216	289775	257.977	-4,00
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,17
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	Persen	69,40	70,16	70,62	71,12	70,00	63,00	-1,82

*Sumber :*  
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015  
2) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan data di atas, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung menunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2010, kepemilikan akte kelahiran sebesar 69.40%, kemudian mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 63,00% pada tahun 2015.



**Gambar 2.88**  
**Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

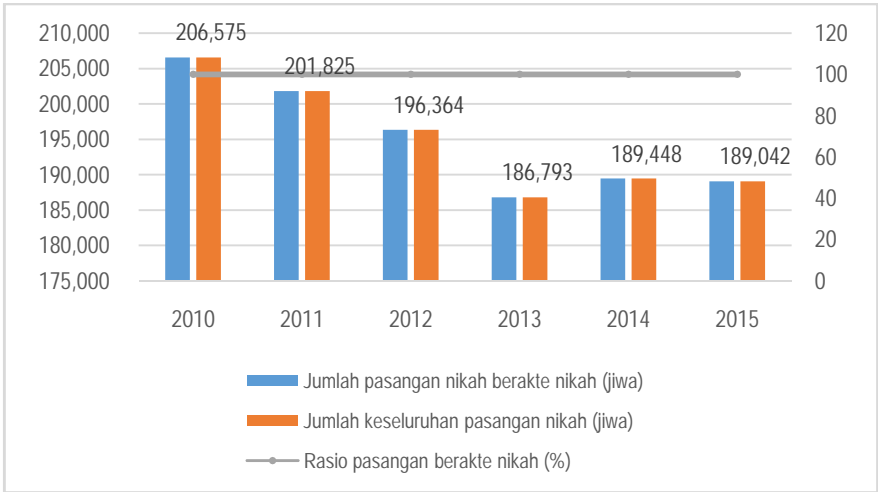
3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui bahwa seluruh pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakte nikah.

**Tabel 2.148**  
**Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Jiwa	206.575	201.825	196.364	186.793	189.448	189.042	-1,73
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Jiwa	206.575	201.825	196.364	186.793	189.448	189.042	-1,73
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	100	100	100	100	100	100	0,00

Sumber :  
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2015



**Gambar 2.89**  
**Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota**

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Yogyakarta memiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah tersedia. Database kependudukan di Kota Yogyakarta dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kota Yogyakarta dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

**Tabel 2.149**  
**Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016*

**5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**

Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2009.

**Tabel 2.150**  
**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

**G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**

**1. Jumlah LPMK**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Mengingat lembaga ini merupakan inisatif masyarakat, maka bersifat mengakar secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun *tanggung renteng*, tidak jauh berbeda dengan LSM. Untuk itulah maka lembaga ini juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Perbedaan dengan LSM adalah lembaga ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerak pembangunan secara struktural dengan organisasi kelurahan. Dengan demikian LPM menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan.

Indikator jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. Tetapi data yang diperoleh hanya menunjukkan jumlah LPMK di Kota Yogyakarta. LPMK pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

Tabel 2.151

Jumlah LPMK di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah LPMK	kelompok	45	45	45	45	45	45

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015, 2016

Berdasarkan data di atas, seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta memiliki LPMK. Salah satu fungsi LPMK adalah mengelola dana hibah yang diberikan oleh Pemda seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk memajukan kelurahan. LPMK hendaknya menjadi mitra yang efektif dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat menjadi kontributor yang efektif. Untuk itulah pemerintah yang mampu memfungsikan LPMK ini akan mencapai tujuan pembangunan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Koordinasi yang intensif perlu dilakukan di tingkat kelurahan, agar optimalisasi peran LPMK menjadi lebih nyata kiprahnya dalam pembangunan.

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK atau yang biasa dikenal sebaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mamu berperan dalam masyarakat berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejehtaraan keluarga, PKK memiliki 10 program pokok PKK. Dalam geraknya PKK berorientasi kepada 10 program pokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitas dan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga dalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program-program Kota Yogyakarta hingga menyentuh ke masyarakat terbawah.

Data kelompok binaan PKK yang tersedia adalah data jumlah kelompok Dasawisma yang notabene merupakan kelompok binaan PKK. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah PKK di Kota Yogyakarta

cukup banyak meskipun terjadi penurunan rata-rata sebesar 0,16 persen per tahun. Sementara untuk data kelompok binaan PKK juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,47 persen per tahun. Sehingga hal ini mempengaruhi jumla rata-rata kelompok binaan yang juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,35 persen per tahun. Penurunan jumlah tiap tahunnya menunjukkan ada beberapa dasawisma ataupun PKK yang bergabung menyesuaikan dengan RT maupun RW di lingkungannya.

**Tabel 2.152**  
**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)	Kelompok	7.189	7.212	5.228	5.228	5.146	5.146	-6,47
2.	Jumlah PKK	Kelompok	3.229	3.229	3.147	3.147	3.143	3204	-0,16
3.	Rata-rata binaan PKK		2,23	2,23	1,66	1,66	1,64	1,61	-6,35

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015, 2016

Jumlah organisasi PKK didasarkan pada keberadaan kampung, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kampung dan kelurahan. Di bawah organisasi PKK ada organisasi kecil yang disebut dasa wisma. Dasa wisma yaitu kelompok yang terdiri atas sepuluh wisma (Kepala Keluarga), dengan mengambil peran ibu sebagai anggota dasa wisma. Dasa Wisma bertanggung jawab kepada PKK terbawah, sedangkan PKK tersebut dibina secara terstruktur terkait dengan integral kepada PKK di atasnya.

**3. Jumlah LSM**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. LSM biasanya melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

Dilihat dari bentuknya, lembaga ini merupakan inisatif dan bentukan dari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng. Untuk itulah maka lembaga ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang. Di bawah

ini merupakan tabel informasi jumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2015.

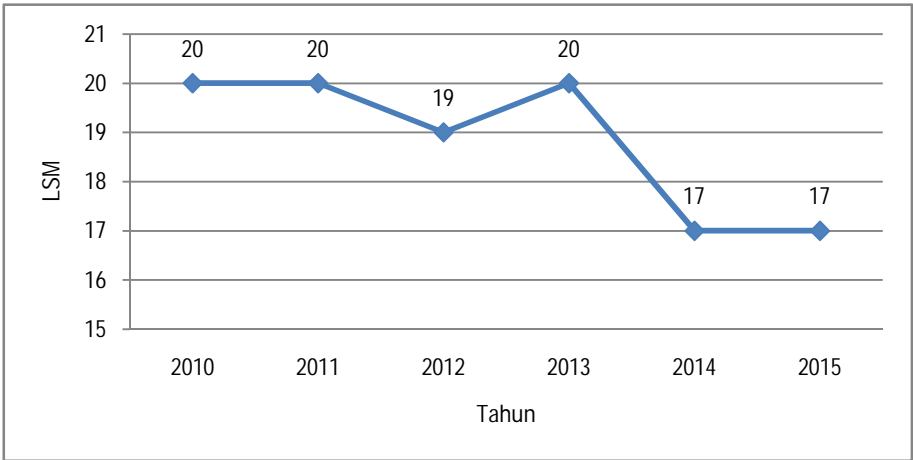
**Tabel 2.153**  
**Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah LSM yang Aktif	unit	20	20	19	20	17	17	-3,20

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 mengalami penurunan sebesar 3,98 persen per tahun. Penurunan terjadi di tahun 2012 dan tahun 2014. Meskipun angka persentase penurunan relatif kecil akan tetapi perlu diperhatikan karena kontribusi dalam pembangunan sekecil apapun itu bermakna. Untuk itulah setiap penurunan LSM dalam masyarakat tetap diperhatikan sebagai sebuah fenomena penting yang segera perlu ditindaklanjuti.

Belum diketahui alasan penurunan jumlah LSM ini, kemungkinan penurunan jumlah ini dikarenakan LSM bersangkutan belum melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar ke Pemkot Yogyakarta. Bentuk tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemkot adalah dengan bersikap pro aktif untuk mendata LSM secara periodik dengan mengirimkan formulir atau menyediakan pelayanan SIM secara on line. Dengan hanya bersikap menunggu adalah kurang bijak. LSM yang merupakan kelembagaan yang melekat dengan masyarakat harus dipelihara. Upaya tindak lanjut lainnya yaitu memonitor aktivitas LSM dan mendata kegiatan serta prestasi yang dicapai.



**Gambar 2.90**  
**Grafik Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Sumber: Hasil Olahan, 2016

LSM sebagai organisasi yang memiliki kekuatan di akar rumput, merupakan wadah efektif untuk menggerakkan masyarakat. Jika Pemkot memberikan perhatian yang lebih baik tentunya mobilisasi energi pembangunan, seperti sumberdaya manusia, bantuan moril dan materiil akan menjadi sangat besar. Dengan memperkuat LSM ini maka akan semakin banyak kampung dan kelurahan yang lebih mandiri dalam banyak aspek.

4. LPMK Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPMK untuk mendapatkan LPMK berprestasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk meningkatkan gerak keaktifan lembaga-lembaga tersebut. LPMK berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta untuk LPMK yang memiliki prestasi baik. KPMP memiliki sepuluh kriteria dalam menentukan LPMK berprestasi, di antaranya:

- a. Ketaatan antara realisasi dengan proposal kegiatan,
- b. Ketaatan volume pekerjaan dengan proposal,
- c. Besarnya swadaya masyarakat,
- d. Perencanaan sesuai Musrenbang,
- e. Ketepatan waktu realisasi pelaksanaan,
- f. Fokus pelaksanaan,
- g. Realisasi pelaksanaan,
- h. Ketertiban administrasi,
- i. Persentase pemegang KMS, dan
- j. Persentase ketaatan membayar pajak PBB.

Tabel 2.154  
Jumlah LPM Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah LPMK Berprestasi	kelompok	6	6	6	NA	6	6
2.	Jumlah LPMK	kelompok	45	45	45	45	45	45
3.	Persentase LPM Berprestasi	persen	13	13	13	NA	13	13

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015 terdapat enam LPMK yang berprestasi. Pemberian apresiasi LPMK berprestasi ini diharapkan dapat memacu semangat dan motivasi seluruh LPMK di Kota Yogyakarta untuk semakin unggul dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Namun, LPMK berprestasi ini tidak setiap tahun diselenggarakan sehingga terdapat kekosongan data di tahun 2013. Perlu dijaga rutinitas pemilihan LPMK berprestasi sehingga setiap tahun diadakan. Antara pengorbanan alokasi anggaran Pemkot untuk pemilihan LPMK berprestasi adalah tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat merangsang seluruh LPMK untuk bergerak, melakukan inovasi-inovasi di tingkat lokal. Setidaknya LPMK berhasil mempertahankan keaktifan peran serta dalam pembangunan, menjaga stabilitas kondisi di tingkat lokal itu sudah merupakan kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah. Apalagi dengan seleksi LPMK berprestasi akan mampu mendongkrak semangat peningkatan kualitas kegiatan yang dilakukan secara rutin maupun periodik.

## **5. PKK Aktif**

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.155  
Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta	kelompok	1	1	1	1	1	1	0
2.	Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta	kelompok	14	14	14	14	14	14	0
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta	kelompok	45	45	45	45	45	45	0
4.	Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta	kelompok	626	626	625	625	627	615	-0,35
5.	Jumlah kel. PKK RT	kelompok	2.588	2.588	2.507	2.507	2501	2529	-0,46
6.	Jumlah kel. Dasawisma	kelompok	7.189	7.212	5.228	5.228	5146	5146	-6,47

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015, 2016

Pada tabel tersebut di atas tampak bahwa organisasi PKK secara terstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitu dasawisma, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKK Kota Yogyakarta. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

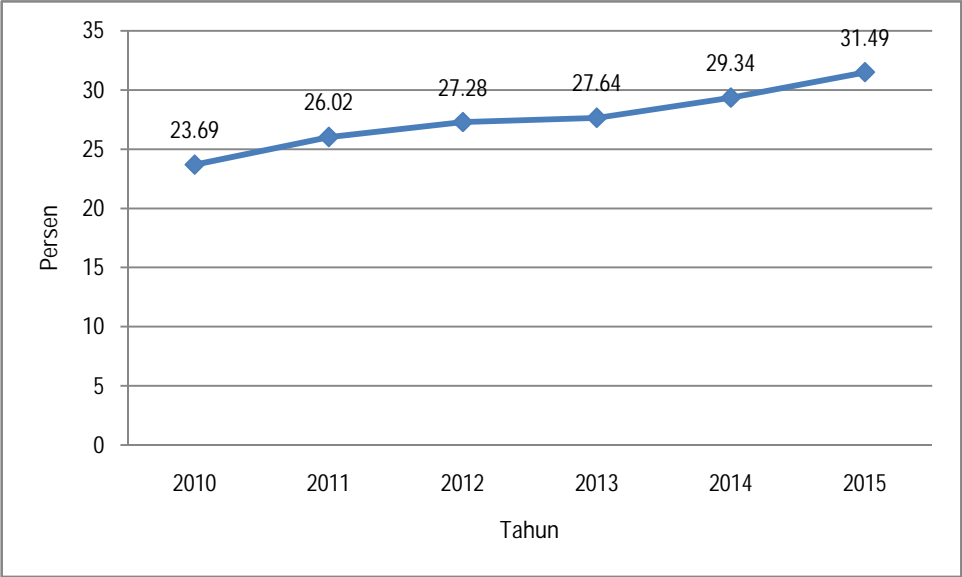
Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, bahwa kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

**Tabel 2.156**  
**Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**  
**di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Swadaya Masyarakat	rupiah	908.491.429	997.989.829	1.046.371.829	1.060.000.694	1.125.343.579	1.207.896.050	5,86
2.	Total Program	rupiah	3.835.000.000	3.835.000.000	3.835.000.000	3.835.000.000	3.835.000.000	3.835.000.000	0,00
3.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program	persen	23,69	26,02	27,28	27,64	29,34	31,49	5,86

*Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016*

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan dihitung dengan membandingkan jumlah swadaya masyarakat terhadap total stimulan yang diberikan kepada 45 LPMK di Kota Yogyakarta yang kemudian dikali 100 persen. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 total swadaya masyarakat mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5,86 persen per tahun. Dana tersebut merupakan dana swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun oleh LPMK di 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta. Sementara total stimulan LPMK di 45 Kelurahan merupakan dana hibah yang diberikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dana penunjang program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Pertumbuhan jumlah swadaya masyarakat dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 lebih jelasnya dapat digambarkan melalui grafik berikut.



**Gambar 2.91**  
**Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Grafik di atas menunjukkan bahwa sumbangan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan mengalami tren meningkat. Jika dirata-rata, pertumbuhan rata rata swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan mencapai 5,86 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut bukan merupakan sumbangan yang kecil. Mengingat mobilisasi dana, tenaga, pikiran yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk kekuatan bottom up maka perlu mendapatkan apresiasi. Jika pemerintah tanggap terhadap segala bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, maka semangat untuk mandiri akan semakin besar. Untuk itulah diperlukan perhatian dan kemampuan untuk memonitor, membina serta memberikan

perhatian terhadap kelembagaan sosial menjadi sangat penting dan menjadi pintu strategis untuk meningkatkan inspirasi pembangunan di kalangan bawah.

7. **Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mencapai 100 persen. Angka tersebut dihasilkan dari perbandingan jumlah program pemberdayaan masyarakat dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk program yang bersangkutan pada tahun berkenaan. Berikut adalah data pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta tahun 2010 hingga 2015:

**Tabel 2.157**  
**Pemeliharaan Pasca Program Pemdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat		2	2	2	2	2	2
2.	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		2	2	2	2	2	2
3.	Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016

Program yang ada sesuai dengan program yang ada di KPMP dan kecamatan. Program pertama adalah program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat yang diampu oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang sifatnya berupa hibah dengan monitoring dan evaluasi tahunan. Sedangkan program kedua adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi tahunan juga dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan.

Bentuk efektivitas penggunaan dana pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat memang sebaiknya diikuti dengan program pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketika

dana diberikan harus disertai dengan proses pendampingan yang memberikan perhatian dan sikap proaktif dengan rencana-rencana pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan jangan hanya dinilai dari keterserapan dana, namun hendaknya diikuti dengan monitoring dan konsultasi. Para penerima dana hibah dikumppulkan secara berkala dan diminta untuk memberikan laporan pencapaian hasil, mengkonsultasi kesulitan dan hambatan. Dengan demikian pemakaian anggaran pemberdayaan dapat tepat sasaran.

**H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

**1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dan keluarga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ketiga. Berikut merupakan data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.158**  
**Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Anak (Penduduk usia di bawah 17 tahun)	Anak	127.304	120.699	118.531	11.1797	112.901	110.296	-2,80
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	134.234	129.853	129.439	124.744	128.843	129.092	-0,75
3.	Rata-rata jumlah anak per jiwa dalam keluarga	Anak	1,05	1,08	1,09	1,12	1,14	1,17	2,11

Sumber :  
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Dalam hal ini, digunakan data jumlah penduduk dengan usia di bawah 17 tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, disebabkan tidak tersedianya data penduduk di bawah 18 tahun. Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu

keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil perhitungan data di atas, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2015 cenderung menunjukkan peningkatan, tapi masih dalam jumlah anak yang sama, yaitu satu anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi (tidak melebihi) target program keluarga berencana dengan jumlah anak tidak lebih dari dua orang.

2. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Berikut ini merupakan data cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta.

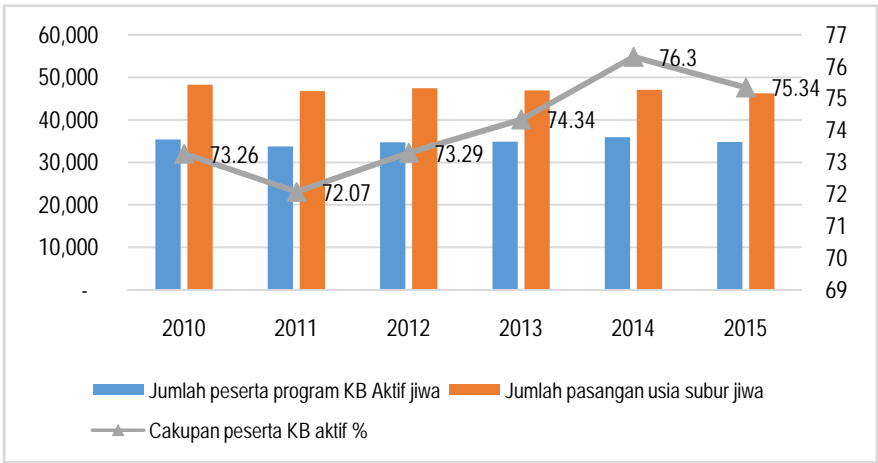
Tabel 2.159  
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	35.380	33.697	34.737	34.873	35.901	34.818	0,42
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jiwa	48.293	46.755	47.399	46.908	47.050	46.213	-0,64
3	Cakupan peserta KB aktif	Persen	73,26	72,07	73,29	74,34	76,3	75,34	1,03

Sumber :  
1) Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, besaran cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung menunjukkan peningkatan, namu sayangnya persentase tersebut kembali turun di tahun 2015 walalupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2010, cakupan peserta KB aktif mencapai 73,26%. Kemudian mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya sehingga mencapai 75,34% pada tahun 2015. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana. Di masa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah penduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.



**Gambar 2.92**  
**Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

**3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**

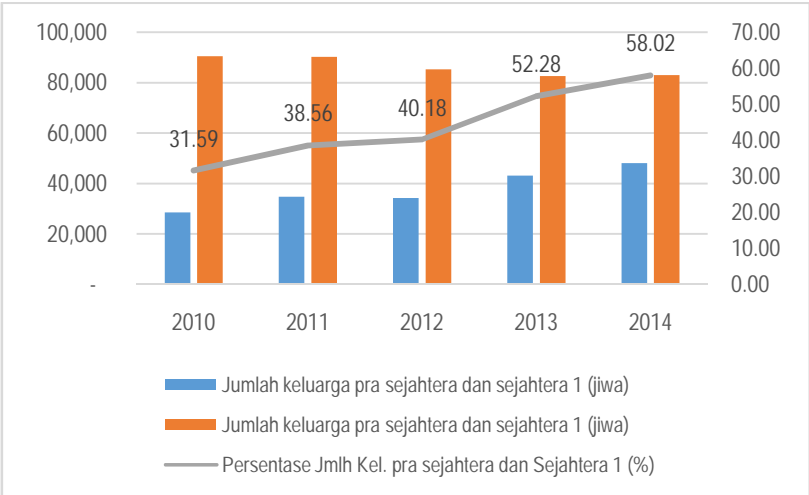
Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pengertian Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh kebutuhan dasar minimal yaitu dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.

Indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I berdasarkan informasi dari Kantor KB Kota Yogyakarta tidak digunakan untuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsi keluarga menurut BKKBN, diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Berikut ini merupakan data keluarfa pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta.

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Keluarga	28.596	34.770	34.284	43.159	48.121		13,90
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	90.533	90.167	85.335	82.559	82.933		-2,17
3.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	31,59	38,56	40,18	52,28	58,02		16,41

Sumber :  
 1) Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2016  
 2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, terdapat 31,59% keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Jumlah itu terus meningkat hingga mencapai 58,02% pada tahun 2014, atau terdapat 48.121 keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.



**Gambar 2.93**  
**Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
 Sumber : Hasil Olahan, 2016

I. Perhubungan

Sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010, terdapat sembilan indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlah arus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah terminal bis, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakaan angkutan umum,

serta pemasangan rambu-rambu. Dalam urusan perhubungan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, misalnya adalah indikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota yang menggantikan indikator jumlah arus penumpang umum.

**1. Angkutan Umum yang Melewati Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota**

Indikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota merupakan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada dan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota dengan jumlah angkutan umum yang seharusnya ada dan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota.

**Tabel 2.161**  
**Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014**

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014
1.	Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	Unit	9640	9797	9650
2.	Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	Unit	9640	9797	9650
3.	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	%	100	100	100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Angkutan umum yang melintasi Kota Yogyakarta diantaranya adalah Bis jalur 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Namun kini hanya tersisa beberapa jalur yang aktif beroperasi di antaranya adalah bis jalur 2 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Menteri Supeno – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan Sisingamangaraja – Ring Road Selatan – Jalan Parangtritis – Jalan Brigjend Katamso – Jalan Suryotomo – Abu Bakar Ali – Jalan Suroto – Jalan Cik Di Tiro – Lingkar UGM – dan kembali ke rute yang sama); bis jalur 4 (dengan

rute Terminal Giwangan – Ring Road Selatan – Ngangkruk – Gedong Kuning – Jalan Kusumanegara – Jalan Suryotomo – Jalan Suroto – Lingkar UGM – Jalan C. Simanjuntak – Jalan Jendral Sudirman – Jalan P. Mangkubumi – Jalan Malioboro – Jalan P. Senopati – Jalan Kusumanegara – Gedong Kuning – Ring Road Selatan – Terminal Giwangan); bis jalur 7 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Gambiran – Jalan veteran – Gedong Kuning – Janti – Jalan Adisucipto – Jalan Affandi – Ring Road Utara – Lingkar UGM); bis jalur 12 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Pandean – Jalan Glagah Sari – Jalan Kusumanegara – Sultan Agung – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Cokroaminoto – Jalan Tentara Pelajar – Borobudur Plaza – Jalan Wolter Monginsidi – Lingkar UGM – Jalan Wolter Monginsidi – Borobudur Plaza – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Cokroaminoto – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Sultan Agung – Jalan Suryopranoto – Jalan Mangunsarkoro – Jalan Kusumanegara – Jalan Glagah Sari – Jalan Veteran – Jalan Pramuka – Terminal Giwangan); serta bis jalur 15 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Sisingamangaraja – Jalan Menukan – Jalan Mangkuyudan – Gading – Pojok Beteng Timur – Jalan Brigjend Katamso – Jalan Ibu Ruswo – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Wates – Pasar Gamping – Sidoarum – Jalan Godean – Pingit – Jalan Wolter Monginsidi – Jetis – Lingkar UGM).

Di samping bis perkotaan, terdapat pula bis Trans Jogja yang melintasi Kota Yogyakarta, di antaranya adalah Trayek 1A (dengan rute Terminal Prambanan – Bandara Adisucipto – Stasiun Tugu – Malioboro – JEC); Trayek 1B (dengan rute Terminal Prambanan – Bandara Adisucipto – JEC – Kantor Pos Besar – Pingit – UGM); Trayek 2A (dengan rute Terminal Jombor – Malioboro – Basen – Kridosono – UGM – Terminal Condong Catur); Trayek 2B (dengan rute Terminal Jombor – Terminal Condong Catur – UGM – Kridosono – Basen – Kantor Pos Besar – Wirobrajan – Pingit); Trayek 3A (dengan rute Terminal Giwangan – Kotagede – Bandara Adisucipto – Ring Road Utara – MM UGM – Pingit – Malioboro – Jukteng Kulon); Trayek 3B (dengan rute Terminal Giwangan – Jukteng Kulon – Pingit – MM UGM – Ring Road Utara – Bandara Adisucipto – Kotagede); Trayek 4A (dengan rute Terminal Giwangan – Taman Siswa – Pakualaman – Lempuyangan – Kridosono); serta Trayek 4B (dengan rute Terminal Giwangan – XT Square – SGM – Balaikota – UIN – Kridosono – Balai Yasa – UIN).

## **2. Rasio Izin Trayek**

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase izin trayek adalah jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Lampiran 1 Permendagri 54/2010 menjelaskan bahwa izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Trayek diartikan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Indikator persentase ijin trayek untuk lingkup Kota Yogyakarta, tidak dapat diisikan datanya. Hal ini dikarenakan kewenangan ijin trayek dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi izin trayek yang melewati wilayah Kota Yogyakarta saja. Disamping itu, angkutan darat lainnya, seperti travel dan taksi juga merupakan kewenangan provinsi.

Angkutan kota yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta hanya “Si Thole” yang merupakan angkutan wisata. “Si Thole” mulai dioperasikan pada bulan November tahun 2014. Angkutan wisata ini memiliki tiga rute utama, yakni (1) dari Taman Parkir Ngabean menuju Keraton Yogyakarta, dimana rute ini melewati Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Keraton Yogyakarta, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (2) dari Taman Parkir Ngabean menuju Tamansari, dimana rute ini melintasi jalan Rotowijayan, Ngasem, Sompilan, Tamansari, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (3) dari Taman Parkir Ngabean menuju Taman Pintar, dimana rute ini melintasi Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Brigjen Katamso, Taman Parkir Senopati, Titik Nol Kilometer, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean.

## **3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan

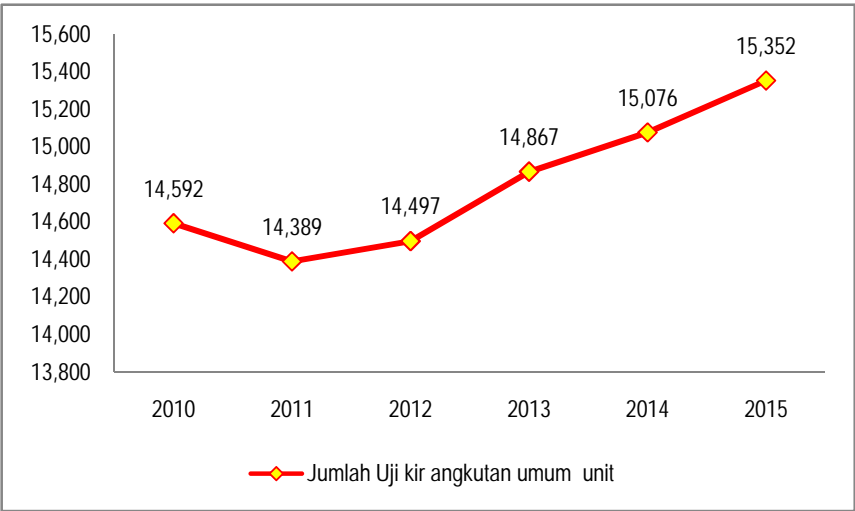
kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

**Tabel 2.162**  
**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Uji KIR angkutan Umum	Unit	14.592	14.389	14.497	14.867	15.076	15.352	1,02

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni sebanyak 14.592 unit angkutan umum pada tahun 2010 meningkat menjadi 15.352 unit angkutan umum pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,02 per tahun.



**Gambar 2.94**  
**Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014**  
Sumber : Hasil Olahan, 2015

Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang fluktuatif diduga karena dalam satu tahun, uji KIR diadakan sebanyak dua kali, dan tidak setiap kendaraan melakukan uji KIR sebanyak dua kali. Selain itu juga pengujian KIR tidak terikat batasan administratif, sehingga angkutan maupun kendaraan yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dapat

melakukan pengujian KIR di Kota Yogyakarta atau dikenal dengan istilah “numpang uji”.

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

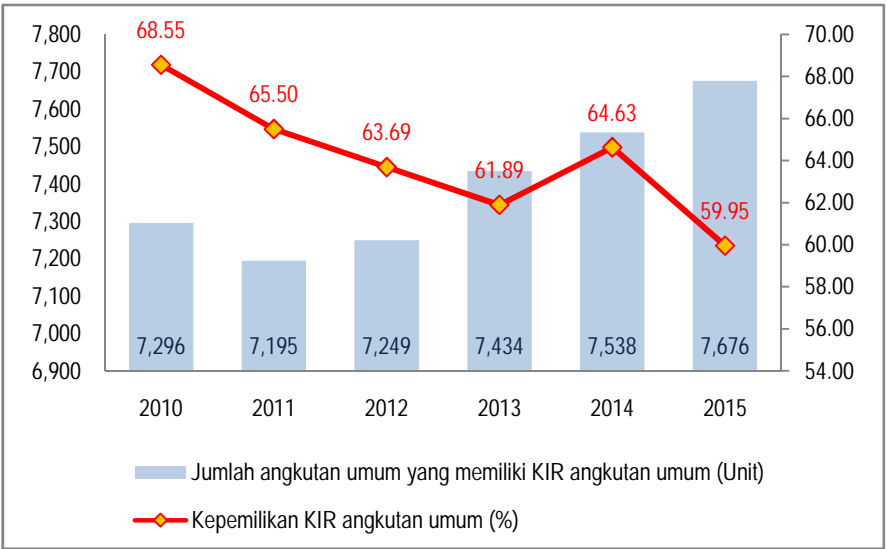
Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomilisi di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.163  
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit	7.296	7.195	7.249	7.434	7.538	7.676	1,02
2.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	10.643	10.985	11.382	12.011	11.663	12.803	3,76
3.	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	68,55	65,49	63,68	61,89	64,63	59,95	(2,65)

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2016

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikator kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar -2,65% per tahun.



**Gambar 2.95**  
**Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti uji KIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan ada angkutan umum yang mengikuti uji KIR diluar wilayah Kota Yogyakarta. Faktor pembanding pada indikator kepemilikan KIR angkutan umum, yakni jumlah angkutan umum pada tahun n juga mengakibatkan rendahnya capaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap indikator ini. Menurut data yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di tahun 2015 jumlah populasi kendaraan wajib uji di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 9.442 kendaraan, jumlah ini cukup jauh tentunya apabila dibandingkan dengan jumlah data angkutan umum pada tahun n yang dijadikan pembanding dalam indikator ini.

**5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)**

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Yogyakarta adalah 45 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaran Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 5 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 15-20 menit, pengetokan plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit untuk masing-masing kendaraan.

[illegible]

## 6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

**Tabel 2.165**  
**Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | 11-210

No.	Macam Pelayanan	Rincian Tarif Retribusi	Jumlah Tarif Retribusi
4.	Registrasi kendaraan bermotor: a. Baru dan mutasi masuk b. Mutasi keluar c. Modifikasi/ perubahan bentuk atau tipe		Rp 25.000,- Rp 50.000,- Rp 25.000,-
5.	Numpang uji keluar/ masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya		Sebesar biaya uji berkala
6.	Penggantian tanda lulus uji : a. Buku uji rusak b. Buku uji hilang c. Plat, kawat, dan segel rusak d. Plat, kawat, dan segel hilang e. Tanda samping rusak		Rp 20.000,- Rp 50.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,-
7.	Pengecatan identitas/ lokasi		Rp 10.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009

### 7. Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api

Terminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis di Kota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kecamatan Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan.

**Tabel 2.166**  
**Jumlah Terminal Bis, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Halte Permanen Transjogja	Unit	34	34	34	34	34	34
3.	Jumlah Halte <i>Portable</i> Bis Transjogja	Unit	-	-	-	23	23	30
4.	Jumlah Stasiun Kereta Api	Unit	2	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, dimana terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Disamping itu juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bis Transjogja. bis Transjogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk halte permanen yang berada di wilayah Pemerintah

Kota Yogyakarta (milik Pemkot) terdapat 34 halte Transjogja (masih sama jumlahnya sejak penandatanganan MoU Transjogja tanggal 16 Agustus 2007 hingga saat ini), dimana yang membangun halte tersebut adalah pihak swasta dengan cara kerja sama dengan Pemkot Yogyakarta. Sedangkan sisanya, yakni halte milik Propinsi DIY (berada di Sleman dan Bantul, serta beberapa yang terdapat di Kota Yogyakarta). Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjamkaikan ke propinsi, sehingga semua halte sekarang dioperasikan semuanya oleh propinsi. Selain terdapat halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte portable untuk bis Transjogja, yakni sebanyak 23 unit dan tidak ada penambahan halte portable pada tahun 2014 kemudian bertambah lagi di tahun 2015 menjadi 30 halte portable.

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan berada dibawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Danurejan. Stasiun Lempuyangan melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas ekonomi.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bis bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta. Bisa diamati tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (sold out) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

#### **8. Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan**

Indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator kriteria transportasi berkelanjutan, dimana indikator ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah penumpang angkutan umum dengan jumlah kendaraan. Jumlah angkutan

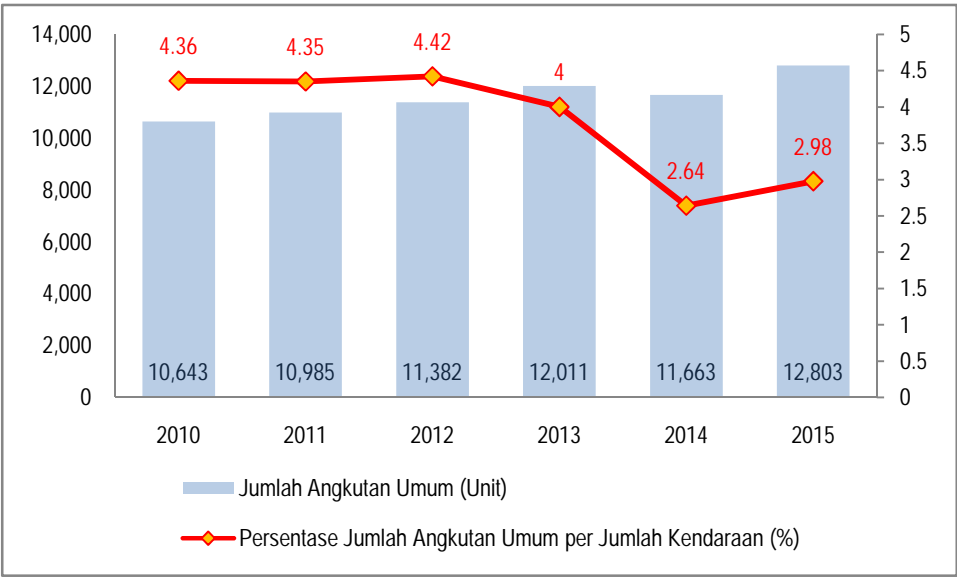
umum dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilai dengan kecenderungan meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,76% per tahun, hal tersebut diikuti juga dengan peningkatan jumlah kendaraan yang lebih besar dari peningkatan jumlah angkutan umum. Pada tahun 2010, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta sebanyak 243.849 unit yang meningkat hingga mencapai 430.177 unit kendaraan pada tahun 2015, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,02% per tahun.

**Tabel 2.167**  
**Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Angkutan Umum	Unit	10.643	10.985	11.382	12.011	11.663	12.803	3,76
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	243.849	252.726	257.233	300.444	441.708	430.177	12,02
3.	Persentase Angkutan Umum terhadap jumlah kendaraan	%	4,36	4,35	4,42	4,00	2,64	2,98	(-7,35)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Nilai yang ditunjukkan oleh indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, yakni sebesar 4,36% di tahun 2010 turun menjadi 2,98% di tahun 2015, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -7,35% per tahun. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, jumlah angkutan umum dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 justru cenderung bertambah. Namun adanya jumlah pertumbuhan rata-rata yang masih cenderung menurun juga mengindikasikan bahwa penduduk banyak yang beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.



**Gambar 2.96**  
**Grafik Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2015*

**9. Pemasangan Rambu-rambu**

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

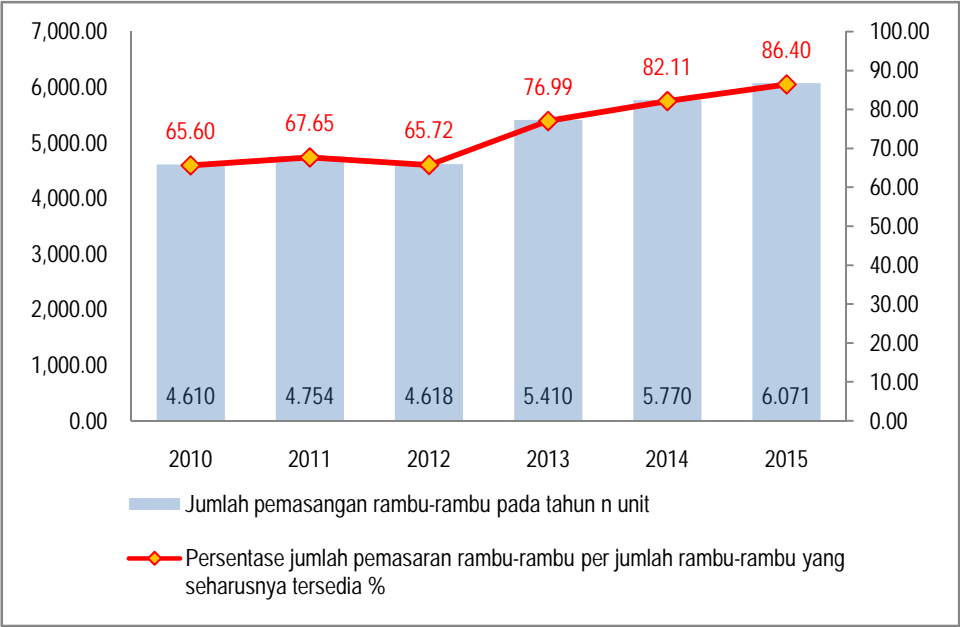
**Tabel 2.168**  
**Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Unit	4.610	4.754	4.618	5.410	5.770	6.071	5,66
2.	Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia	Unit	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027	-
3.	Pemasangan Rambu-rambu	%	65,60	67,65	65,72	76,99	82,11	86,4	5,66

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil Olahan*

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikator pemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni sebesar 65,60% pada tahun 2010 meningkat menjadi 86,4% pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,66% per tahun. Menurut informasi yang didapatkan dari Dinas Perhubungan, jumlah rambu-rambu pada tahun 2012 mengalami penurunan dikarenakan banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang hilang

dan ada beberapa rambu-rambu pula yang diturunkan. Selain itu, adanya manajemen lalu lintas baru seperti di Kleringan diduga menjadi salah satu penyebab menurunnya pemasangan rambu-rambu pula. Namun dari tahun 2013 hingga tahun 2015 peningkatan jumlah pemasangan rambu-rambu sudah semakin meningkat kembali.



Gambar 2.97  
Grafik Pemasangan Rambu-rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.

10. Kinerja Lalu Lintas

Analisis kinerja lalu lintas dilakukan dengan membandingkan antara volume dan kapasitas jaringan jalan yang ada (V/C ratio) dan kecepatan perjalanan dibandingkan dengan standar pada MKJI. Berdasarkan hasil survei didapatkan nilai volume lalu lintas berdasarkan masing-masing jenis kendaraan dan kecepatan perjalanan pada masing-masing ruas. Masing-masing jenis kendaraan tersebut dikonversi untuk mendapatkan volume lalu lintas dalam satuan mobil penumpang (smp). Secara teoretis nilai derajat kejenuhan tersebut (V/C) maksimal sebesar 1. Nilai derajat kejenuhan semakin mendekati angka 1, menunjukkan kondisi

lalu lintas yang macet. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, nilai derajat kejenuhan lalulintas di jalan perkotaan lebih besar atau sama dengan 0,8 menunjukkan adanya kemacetan lalulintas.

Jaringan jalan di Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan dalam MKJI 1997 merupakan bagian dari jaringan jalan perkotaan. Segmen jalan perkotaan/semi perkotaan memiliki ciri-ciri: mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hamper seluruhnya, minimal pada satu sisi jalan tersebut, apakah itu pengembangan pita atau bukan.

**Tabel 2.169**  
**Nilai Rata-Rata Perbandingan Volume Lalu Lintas dengan Kapasitas Jalan Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2013**

Kelas jalan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arteri Sekunder	0,44	0,48	0,49	0,53	0,56	0,58
Kolektor sekunder	0,60	0,65	0,67	0,72	0,76	0,81
Lokal sekunder	0,57	0,60	0,64	0,67	0,71	0,77

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

Kinerja lalu lintas kota Yogyakarta sejak tahun 2008 hingga 2013 menunjukkan penurunan terlihat dari nilai rata-rata perbandingan volume lalulintas dengan kapasitas jalan yang semakin meningkat. Semakin besar nilai V/C rasio suatu ruas jalan semakin buruk kondisi lalu lintasnya yang ditunjukkan dengan munculnya kemacetan lalulintas maupun penurunan kecepatan kendaraan.

11. Kecepatan Lalu Lintas Rata-rata

Kinerja lalu lintas dapat ditunjukkan pula dengan nilai kecepatan rata-rata yang diukur per ruas jalan. Nilai kecepatan lalulintas rata-rata pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kecepatan lalu lintas.

**Tabel 2.170**  
**Kecepatan lalulintas rata-rata (km/jam) Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014**

Klas jalan	2013	2014
Arteri Sekunder	31,54	34,11
Kolektor sekunder	34,55	30,30
Lokal sekunder	36,10	27,99

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

12. Fatalitas Kecelakaan Lalulintas

Indikator ini didasarkan pada nilai perbandingan antara jumlah korban meninggal akibat kecelakaan dengan jumlah kecelakaan. Dari tabel berikut, terlihat ada kecenderungan fatalitas kecelakaan yang meningkat meski jumlah kejadian kecelakaannya berkurang. Fatalitas sendiri mencerminkan tingkat kekerasan kejadian kecelakaan. Dengan demikian kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta dalm kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2013 belum menunjukkan kinerja keselamatan lalulintas yang membaik.

Tabel 2.171  
Fatalitas kecelakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

No.	Indikator	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan	Orang	19	6	23	10	31	16	32
2.	Jumlah kecelakaan	Kejadian	728	497	551	680	831	678	526
3.	Tingkat fatalitas		0,0261	0,0121	0,0417	0,0147	0,0373	0,0236	0,0608

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2014, Badan Pusat Statistik

J. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, urusan komunikasi dan informatika memiliki lima indikator, yakni jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, serta website milik pemerintah daerah. Berdasarkan kesepakatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, indikator jaringan komunikasi tidak relevan apabila diterapkan untuk wilayah Kota Yogyakarta, sehingga indikator ini ditiadakan.

1. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Sedangkan warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet

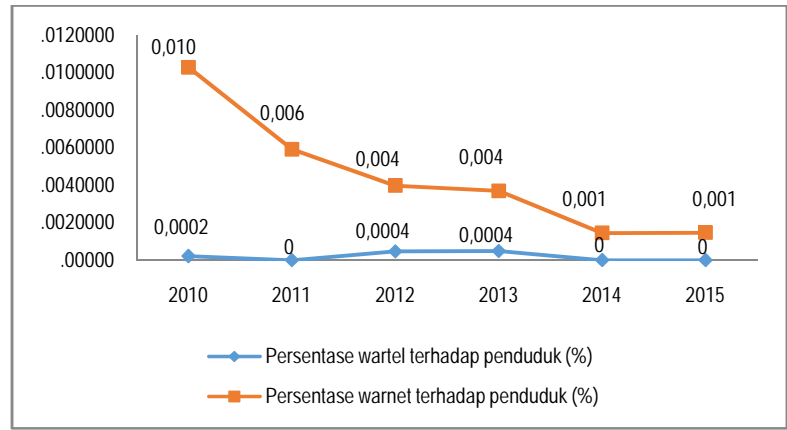
kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Tabel 2.172  
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Wartel	Unit	1	0	2	2	0	0	(100,00)
2.	Jumlah Warnet	Unit	47	26	17	15	6	6	(33,74)
3.	Jumlah penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	(2,20)
4.	Persentase wartel terhadap penduduk	Unit Per 1.000 penduduk	0,0002	0,0000	0,0005	0,0005	0,0000	0,0000	(100,00)
5.	Persentase warnet terhadap penduduk	Unit Per 1.000 penduduk	0,0103	0,0059	0,0040	0,0037	0,0014	0,0015	(32,25)

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Jumlah wartel dan warnet yang bersumber dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tersebut merupakan data wartel dan warnet yang berizin, dimana keduanya memiliki jumlah yang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015. Jumlah wartel dan warnet di Kota Yogyakarta sebenarnya masih cukup banyak (diatas jumlah yang tertulis didalam data), namun tidak memiliki izin resmi (tidak melapor ke Dinas Perizinan).



Gambar 2.98  
Grafik Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Perkembangan jaman yang semakin canggih membuat masyarakat dapat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi via internet. Apalagi predikat Kota Yogyakarta sebagai kota

pelajar sangat mendukung pertumbuhan warnet-warnet tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya mengakses internet di kota-kota besar lainnya. Namun, keberadaan warnet semakin terancam dengan adanya fasilitas *hotspot* di berbagai sudut Kota Yogyakarta yang menawarkan akses internet gratis. Fasilitas *hotspot* ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari pusat pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, cafe/restoran, hingga rumah-rumah pondokan mahasiswa (kos).

Perlu dilakukan pergeseran dalam memotret media komunikasi seiring dengan kemajuan jaman. Mungkin stasiun pemancar HP, jumlah kepemilikan HP, pelanggan hotspot yang berupa masyarakat umum dan kelompok, jejaring sosial akan lebih dapat mengekspresikan kondisi yang faktual tentang penggunaan media telekomunikasi secara efektif. Untuk sosialisasi baik terkait dengan nilai-nilai, program maupun kegiatan saat ini lebih efektif dengan media tersebut. Artinya selain media yang sudah ada, juga mengidentifikasi sarana komunikasi dan informasi lain sesuai dengan kemajuan jaman.

2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Indikator jumlah surat kabar nasional dan lokal seperti yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah jenis surat kabar nasional dan lokal yang masuk ke daerah. Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tertulis dalam tabel merupakan surat kabar yang menjadi langganan dari Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yakni sebanyak 16 surat kabar. Ke-16 surat kabar yang menjadi langganan Bidang Humas antara lain Koran Tempo, Majalah Kabare, Harian Kedaulatan Rakyat dan Minggu Pagi, Harian Kompas, Harian Bernas, Harian Jawa Pos, Harian Republika, Harian Seputar Indonesia, Harian Jogja, Tempo edisi khusus, Tempo edisi biasa, Harian Merapi, Harian Kedaulatan Rakyat untuk 45 kelurahan, Harian Tribun Jogja, Majalah Mingguan Djoko Lodhang, serta Minggu Pagi. Surat kabar Suara Karya tidak lagi masuk ke Kota Yogyakarta karena mayoritas beritanya yang hanya memuat berita lokal Kota Bandung dan bersifat tidak rutin (tidak datang setiap hari).

Tabel 2.173  
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Buah	16	16	17	17	17	16

Sumber : Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan surat kabar lokal dan nasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaan tupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upaya meningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dll diperlukan surat kabar lokal dan nasional. Namun indikator pengukuran kinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langganan surat kabar lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator outcome, maka perlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengan tupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan data maupun pertimbangan dan solusi.

3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Indikator jumlah penyiaran radio dan televisi lokal adalah jumlah penyiaran radio dan televisi yang masuk ke daerah. Menurut informasi yang diperoleh dari Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2010 hingga tahun 2015 bekerjasama dengan empat televisi lokal, yakni TVRI, Jogja TV, RBTv, dan Adi TV. Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan delapan radio dari beberapa radio yang sering digunakan kurang lebih 13 stasiun radio, diantaranya adalah RRI, MBS, Sonora, Geronimo, PTDI Kota Perak, Q-Radio, Arma Sebelas, EMC, Retjo Buntung, Global FM, dan Star FM.

Tabel 2.174  
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penyiaran radio	Channel	11	11	11	10	10	13
2.	TV lokal	Channel	3	3	3	3	3	4

Sumber : Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan radio/TV lokal dan nasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaan tupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upaya meningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dll diperlukan radio/TV lokal dan nasional. Namun indikator pengukuran kinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langganan radio/TV lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator outcome, maka perlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengan tupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan data maupun pertimbangan dan solusi.

#### 4. Website Milik Pemerintah Daerah

Kota Yogyakarta memiliki *website* yang rutin diisi oleh Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yakni *jogjakota.go.id*. *Website* tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Selain itu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (*running text*).

Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengampu subdomain *kliping.jogjakota.go.id*. *Website* tersebut mengunggah (*upload*) berita-berita mengenai kabar dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dimuat pada surat kabar yang beredar di Yogyakarta. *Websitekliping.jogjakota.go.id* juga diperbarui (*update*) setiap hari.

Dalam *websitejogjakota.go.id* terdapat 12 sub domain yang merupakan website dinas dan beberapa lembaga terkait, seperti Layanan Pengadaan Secara Online (LPSE), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Baznas Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, Kliping Berita, KPU Kota Yogyakarta, Konsultasi Belajar Siswa Dinas Pendidikan, Bidang Kerjasama Kota Yogyakarta, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, Dinas Pendidikan, serta Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Secara konten atau isi dari sub domain tersebut secara umum cukup lengkap, misalnya *website* dari Bagian Hukum Setda. Konten dari *website* ini mencakup produk hukum baik dari pusat, provinsi, dan juga pemerintah kota sendiri. Produk hukum tersebut diantaranya terdiri dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (tahun 1951 hingga tahun 2015), Peraturan Walikota (tahun 1969, tahun 2005 hingga tahun 2015), Peraturan DPRD (tahun 2010 dan tahun 2014), serta memuat tentang Keputusan Walikota (tahun 2006, tahun 2013 hingga tahun 2014).

*Website* Dinas Pendidikan memiliki konten yang cukup lengkap, diantaranya mengenai kalender pendidikan, informasi mengenai ujian nasional, jaminan pendidikan daerah, produk hukum, serta informasi pendidikan lainnya. Selain itu juga terdapat *website* konsultasi siswa dimana *website* ini dirasa cukup membantu siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang dirasa sulit. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa dijawab dengan relatif cepat. Hingga tanggal 20 April 2015 (tanggal diaksesnya *website* konsultasi siswa), sudah terdapat 10.480 pertanyaan masuk, dan 10.158 pertanyaan yang terselesaikan (terjawab).

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki konten yang dapat dikatakan lebih lengkap dari konten *website* sub domain lainnya. Konten *website* Dinas Perizinan diantaranya berisi jenis perizinan dan jenis

permohonan yang memuat mengenai syarat pengajuan, dasar hukum, hingga formulir pengajuan. Disamping itu, Dinas Perizinan memiliki online services atau pelayanan perizinan online yang dapat digunakan untuk membuat perizinan khususnya penelitian, KKN, PKL, SIUP, dan TDP yang diakses melalui <http://perizinan.jogjakota.go.id/online>. Pada web Dinas Perizinan juga memuat tentang produk hukum mengenai penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta.

5. Pameran/Expo

Indikator pameran/expo sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 merupakan jumlah yang menunjukkan banyaknya kegiatan pameran/expo yang dilaksanakan per tahun. Banyaknya pameran/expo yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana pameran dan atau expo tersebut tidak menjelaskan secara terinci jenis pameran/expo yang dilaksanakan pada tahun terkait.

Terdapat banyak jenis pameran baik yang diselenggarakan ataupun diikuti Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Namun dari data yang tersedia baru tercatat jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti oleh dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta. Di tahun 2015 sendiri jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti oleh Disperindagkoptan Kota Yogyakarta berjumlah 13 pameran. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya berbagai kegiatan pameran baik yang ada di dalam Kota Yogyakarta maupun di luar kota. Disperindagkoptan melibatkan Usaha Kecil Menengah dalam berbagai pameran/expo yang diadakan setiap tahunnya.

Tabel 2.175  
Jumlah Pameran/Expo Perdagangan yang Dilaksanakan per Tahun oleh  
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015
1.	Jumlah pameran/ expo	Kali/tahun	13	11	13

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Untuk mengantarkan pada pengukuran *outcome* maka pameran hendaknya tidak hanya menilai jumlah pameran yang dilakukan per tahun, namun sasaran yang dicapai oleh setiap pameran. Dengan demikian efektivitas kinerja dilihat dari aspek obyek yang disasar menjadi lebih konkrit.

K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

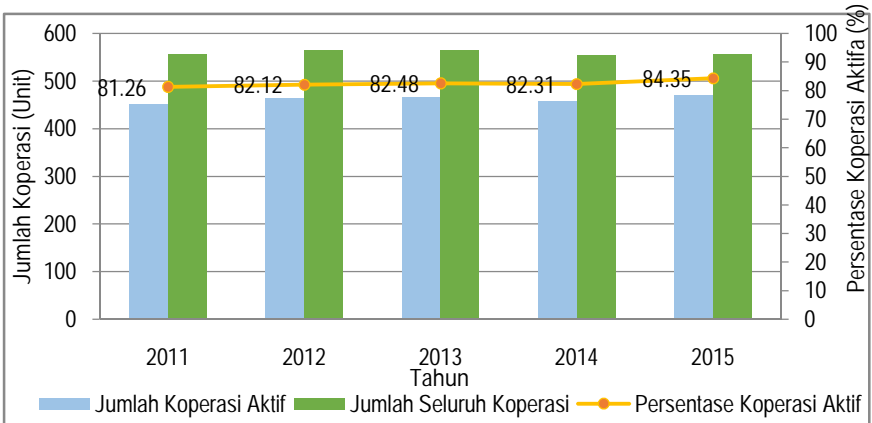
Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu beratahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan perkerjaan.

Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta cenderung statis dengan pertambahan jumlah yang fluktuatif namun tidak signifikan. Pada tahun 2011, jumlah koperasi yang ada adalah sebanyak 554 unit. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan di tahun 2015, yaitu sebesar 556 unit. Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta paling banyak terdapat pada tahun 2012 dan 2013, yaitu mencapai 565 unit dan kemudian kembali turun di tahun 2014 dan 2015. Sedangkan persentase koperasi aktif menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2011-2015. Pada tahun 2011, persentase koperasi aktif di Kota Yogyakarta sebesar 81,26% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 84,35%. Peningkatan persentase koperasi aktif ini menunjukkan semakin

Tabel 2.176  
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2015

Variabel	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi Aktif	unit	451	464	466	456	469
Jumlah Seluruh Koperasi	unit	555	565	565	554	556
Persentase Koperasi Aktif	%	81,26	82,12	82,48	82,31	84,35

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.



Gambar 2.99  
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan data tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di Kota Yogyakarta, meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dari perkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umum mengalami peningkatan selama tahun 2011-2015. Keberadaan BPR/LKM ini ikut mempengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya. Jumlah LKM ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah UMKM. Meskipun demikian, peningkatan jumlah hanya terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam yang pada tahun 2011 berjumlah 23 unit dan pada tahun 2015 mencapai 46 unit. Sedangkan jumlah BUKP dari tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang stagnan, yaitu 14 unit setiap tahunnya. Bahkan, jumlah UED-SP mengalami penurunan dari 31 unit di tahun 2011 menjadi 20 unit di tahun 2015. Perkembangan positif LKM ini diharapkan akan mampu mendorong perkembangan usaha kecil yang ada di Kota Yogyakarta sehingga tercipta perekonomian masyarakat yang merata.

Tabel 2.177  
Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2011 – 2015

No	Variabel	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	unit	31	27	27	27	20	-10,38
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	unit	14	14	14	14	14	0
3.	Koperasi Simpan Pinjam	unit	23	28	32	44	46	18,92
Jumlah		unit	68	69	73	85	80	4,15

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Terlihat pada tabel bahwa jumlah usaha kecil dan mikro sangat mendominasi dibandingkan dengan usaha menengah. Persentase jumlah usaha mikro dan kecil sejak tahun 2013 sampai 2015 berkisar pada angka 99%. Meskipun demikian, pertumbuhan usaha mikro dan kecil menunjukkan nilai negatif bila dibandingkan dengan usaha menengah. Selama tahun 2013-2015, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,32%/tahun. Perkembangan positif jumlah UMKM di Kota Yogyakarta merupakan sebuah sinyal yang baik bagi kegiatan perekonomian penduduk khususnya untuk kalangan menengah kebawah.

Tabel 2.178  
Banyaknya Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	n.a	n.a	15539	16260	16575	3,28
Jumlah seluruh UKM	unit	n.a	n.a	15597	16323	16638	3,29
Usaha Mikro dan Kecil	%	n.a	n.a	99,63	99,61	99,62	-0,01

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Penanaman modal merupakan salah satu sumber strategis bagi pembiayaan suatu wilayah dalam kegiatan pembangunan. Melalui dinamika penanaman modal berskala nasional baik berupa Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), diharapkan potensi-potensi perekonomian wilayah yang dimiliki akan

dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

**Tabel 2.179**  
**Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2011-2015**

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Investor PMDN	Unit	2	5	5	3	24	86,12
2	Investor PMA	Unit	5	7	11	13	25	49,53
Total		Unit	7	12	16	16	49	62,66

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan,2016.

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel merupakan perusahaan investor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama rentang tahun 2011-2015 terjadi peningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2011 hanya terdapat 7 unit perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di Kota Yogyakarta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan. Pertumbuhan rata-rata jumlah investor di Kota Yogyakarta adalah sebesar 62,66%. Dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasi kegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.100**  
**Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Sejalan dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terus meningkat setiap tahunnya, nilai investasi yang ditanamkan di Kota Yogyakarta juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pertumbuhan rata-rata nilai investasi di Kota Yogyakarta mencapai 321,63%/tahun. Pada tahun 2011, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar 250.500 US \$, sedangkan pada tahun 2015, nilai investasi yang ditambahkan adalah sebesar 79.162.100 US \$. Nilai investasi tersebut disumbangkan oleh 25 perusahaan PMA dan 24 perusahaan PMDN.

Ditinjau dari kontribusinya, nilai investasi perusahaan PMDN pada tahun 2011 jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi perusahaan PMA. Pada tahun 2011, nilai investasi perusahaan PMDN adalah sebesar 500 US\$, sedangkan nilai investasi perusahaan PMA adalah sebesar 250.000 US\$. Meskipun demikian, secara umum jumlah nilai investasi perusahaan PMDN pada tahun 2011-2015 lebih besar dibandingkan dengan perusahaan PMA. Perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN cenderung dinamis dari tahun ke tahun. Nilai investasi perusahaan PMDN pada tahun 2012 sempat mencapai 37.109.300 US\$, namun pada tahun 2015 nilai investasi dari perusahaan dengan izin baru di tahun tersebut hanya sebesar 13.563.200 US\$, padahal jumlah perusahaan PMDN baru pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, meskipun perkembangan nilai investasi perusahaan PMA bernilai positif dengan pertumbuhan mencapai 302,48%/tahun, namun pertumbuhan nilai investasi tersebut masih jauh bila dibandingkan dengan PMDN yang sebesar 1.183,36%.

Tabel 2.180  
Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun )
1	PMDN	US \$	500	37.109.300	5.843.700	34.534.500	13.563.200	1183,36
2	PMA	US \$	250.000	1.970.600	12.884.400	3.061.900	65.598.900	302,48
Total		US \$	250.500	39.079.900	18.728.100	37.596.400	79.162.100	321,63

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016, dengan Hasil Olahan,2016.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Rata-rata pertumbuhan daya serap tenaga kerja PMA adalah sebesar -38,14%/tahun, sementara untuk PMDN adalah sebesar -70,44%.

Berdasarkan tabel, penambahan tenaga kerja pada perusahaan PMA terkecil terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 39 orang dengan jumlah perusahaan baru sebesar 11 perusahaan. Pada tahun tersebut, rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA adalah yang paling rendah selama rentang tahun 2012-2015, yaitu sebesar 3,55. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2011, yaitu sekitar 217 tenaga kerja mampu terserap pada satu perusahaan. Penyerapan tenaga kerja perusahaan PMA tersebut terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2015 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai -38,14%.

Tabel 2.181  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Variabel	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Penanam Modal Asing (PMA)								
1	Tenaga Kerja	Jiwa	1.087	314	39	160	796	-7,49
2	Perusahaan	Unit	5	7	11	13	25	49,53
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		217,40	44,86	3,55	12,31	31,84	-38,14
Penanam Modal Dalam Negri (PMDN)								
1	Tenaga Kerja	Jiwa	131	113	379	1.354	12	-44,99
2	Perusahaan	Unit	2	5	5	3	24	86,12
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		65,50	22,60	75,80	451,33	0,50	-70,44

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

Rasio daya serap tenaga kerja di perusahaan PMDN pada rentang tahun 2011-2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan

pertumbuhan rata-rata sebesar -70,44%. Peningkatan jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN pada tahun 2014 adalah yang tertinggi selama rentang tahun 2011-2015, yaitu sebesar 1.354 orang. Padahal, penambahan perusahaan PMDN pada tahun tersebut cukup kecil, yaitu sebesar 3 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang berlawanan pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMDN yang berizin pada tahun tersebut adalah sebesar 0,5 dengan penambahan tenaga kerja sebesar 12 orang. Padahal, ditinjau dari penambahan jumlah perusahaan PMDN adalah yang terbesar selama tahun 2011-2015, yaitu sebesar 24 perusahaan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa rasio penyerapan tenaga kerja tidak bergantung pada besar atau kecilnya penambahan perusahaan investor, namun lebih kepada kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja.

#### 4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Secara umum, nilai realisasi PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai realisasi PMA tertinggi adalah pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 62.537.000 US\$. Sedangkan penurunan terbesar ditunjukkan pada tahun 2013-2014. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah perusahaan investor PMA.

Berbeda halnya dengan nilai realisasi pada PMA, nilai realisasi pada PMDN secara umum menunjukkan pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi pada PMDN terjadi pada tahun 2011-2012, yaitu sebesar 37.108.800 US\$. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012-2013, yaitu sebesar 31.265.600 US\$. Penurunan nilai realisasi PMDN ini tidak sebanding dengan penambahan jumlah perusahaan PMDN.

**Tabel 2.182**  
**Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Variabel	Satuan	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
<b>Penanam Modal Asing (PMA)</b>						
1	Perubahan Nilai Realisasi PMA	US\$	1.720.600	10.913.800	-9.822.500	62.537.000
2	Pertumbuhan	%	688	554	-76	2.042
<b>Penanam Modal Dalam Negri (PMDN)</b>						
1	Perubahan Nilai Realisasi PMDN	US\$	37.108.800	-31.265.600	28.690.800	-20.971.300
2	Pertumbuhan	%	7.421.760	-84	491	-61

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2015:  
dengan Hasil Olahan, 2016.

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Tabel 2.183  
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	97	138	157	162	162	64	-0,25

Sumber :  
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemuda di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 hanya berjumlah 97 organisasi dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 162 organisasi pada tahun 2014 dan menurun menjadi 64 pada tahun 2015. Pada tahun 2015 pendataan organisasi pemuda yang dilakukan adalah dengan mendata organisasi pemuda yang aktif, sehingga antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2015 terdapat perbedaan yang signifikan.

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Berdasarkan informasi jumlah organisasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa organisasi olahraga yang dimaksud merupakan cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan kota. Jumlah organisasi olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung menunjukkan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2012, dari 36 organisasi pada tahun 2011 menjadi 34 organisasi. Kemudian jumlah organisasi mengalami peningkatan menjadi 48 organisasi. Berikut merupakan data jumlah organisasi olahraga.

Tabel 2.184  
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	36	36	34	34	34	48	0,09

Sumber :

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016
- 2) Hasil Olahan, 2016

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke 2014, namun terdapat penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2010, jumlah kegiatan pemuda sebanyak 23 kegiatan dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 43 kegiatan pada tahun 2014. Kemudian terjadi peningkatan kembali hingga berjumlah 64 kegiatan pada tahun 2015. Berikut merupakan data perkembangan jumlah kepemudaan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.185  
Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	23	26	26	37	43	64	24,08

Sumber :

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016
- 2) Hasil Olahan, 2016

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, dijelaskan bahwa data yang tersedia hanya tahun 2013, 2014, dan 2015. Dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan jumlah organisasi olahraga, dari 221 organisasi pada tahun 2013, meningkat menjadi 227 pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 162 kegiatan olahraga. Beberapa kegiatan olahraga yang ada di Kota Yogyakarta antara lain, kejuaraan kota, senam kesbang, Popnas, Popda, Tri Lomba Juang, Porkar, dan Lomba Senam. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan olahraga di kota Yogyakarta

Tabel 2.186 Jumlah Kegiatan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015						
No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kegiatan olahraga	organisasi	221	227	162	-12,95

Sumber :  
 1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016  
 2) Hasil Olahan, 2016

### 5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Gelanggang remaja merupakan suatu bangunan yang digunakan para remaja untuk memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Bangunan tersebut bertukuan untuk menjadi pemusatan aktivitas remaja dalam menampung dan menyalurkan minat serta bakat para remaja dengan memanfaatkan fasilitas dalam bangunan tersebut baik untuk kegiatan rutin maupun insidentil. Dengan tersedianya bangunan tersebut diharapkan dapat mendorong pembentukan pribadi remaja yang mandiri dan berprestasi, terutama di kegiatan olahraga dan seni budaya. Kota Yogyakarta pada tahun ini melakukan pendataan jumlah gelanggang remaja yang dimiliki. Berikut merupakan jumlah gelanggang remaja yang ada di Kota Yogyakarta tahun 2015.

### 6. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan salah satu sarana pendukung bagi kegiatan warga kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah lapangan olahraga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2015. Jumlah lapangan olahraga tahun 2010 sebanyak 556 unit dan meningkat menjadi 604 unit pada tahun 2015. Peningkatan tersebut juga berpengaruh pada jumlah lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, tersedia 1,21 unit lapangan olahrada per 1.000 penduduk dan mengalami peningkatan menjadi 1,48 unit per 1.000 penduduk pada tahun 2015. Jumlah lapangan olahraga yang dimaksud adalah beragam sesuai dengan enis kegiatan olahraga, bentuk, dan jenis lapangan olahraga, sehingga bukan hanya lapangan olahraga yang berumput. Berikut data lapangan olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.187  
Lapangan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah lapangan olahraga	Unit	556	556	563	560	604	604	1,72
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,17
3.	Lapangan olah raga per 1.000 penduduk	Unit	1,21	1,26	1,32	1,38	1,46	1,48	3,97

Sumber :  
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

N. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya

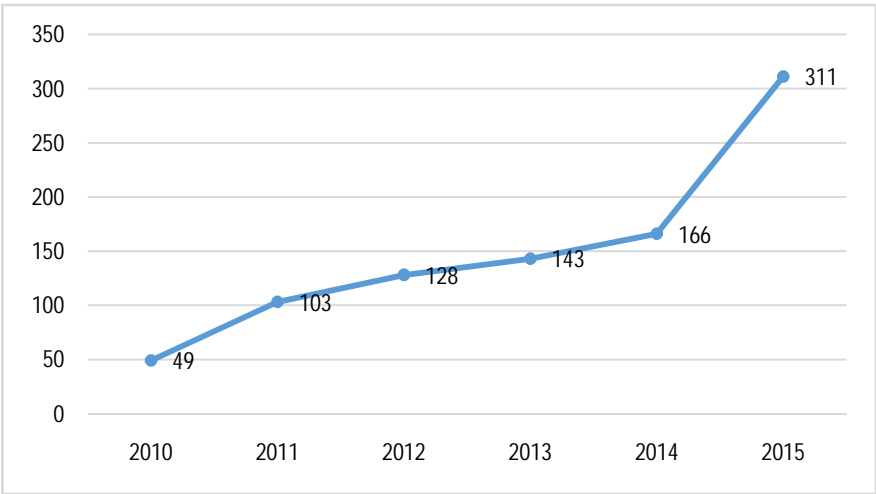
Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukkan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Bahkan hampir setiap bulan ada pertunjukkan kesenian dan budaya baik diselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakan data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.188  
Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2014	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	hari	49	103	128	143	166	311	49,93

Sumber :  
1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

Data menunjukkan bahwa jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, diselenggarakan pertunjukan seni selama 49 hari, dan terus mengalami peningkatan hingga 311 hari di tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin tingginya minat masyarakat terhadap pertunjukan seni dan budaya, karena di Kota Yogyakarta ini tidak jarang mengadakan pertunjukan seni budaya tanpa memungut biaya penonton, jika berbayarpun biayanya masih terjangkau, jadi masyarakat dapat mendapatkan hiburan yang menarik dan menghibur dengan harga yang terjangkau.



Gambar 2.101  
Grafik Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta  
Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2015

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta yang dimaksud adalah gedung kesenian. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Yogyakarta ada 2 unit, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Kedua tempat ini dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta sering kali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Fasilitas ini merupakan wadah untuk para seniman Kota Yogyakarta dalam menunjukkan bakat seninya, sekaligus sebagai tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Tabel 2.189  
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	1	2	2	2	2	2	20,00

Sumber :  
1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016  
2) Hasil Olahan, 2016

3. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Berdasarkan data di bawah ini, persentase

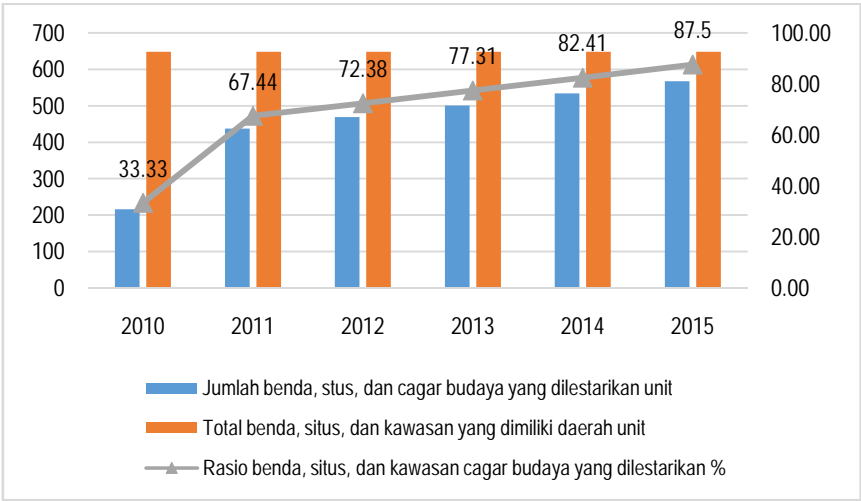
benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.190**  
**Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	216	437	469	501	534	567	25,85
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar BudayaYang dimiliki	Unit	648	648	648	648	648	648	0,00
3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	33,33	67,44	72,38	77,31	82,41	87,5	4,82

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016, Hasil Olahan, 2016

Pada tahun 2010, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya mencapai 33,33% dan terus mengalami kenaikan hingga menjadi 87,5% pada tahun 2015. Kenaikan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa memang Kota Yogyakarta memiliki keragaman benda budaya yang pantas dilestarikan.



**Gambar 2.102**  
**Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
Sumber : Hasil Olahan, 2015

O. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

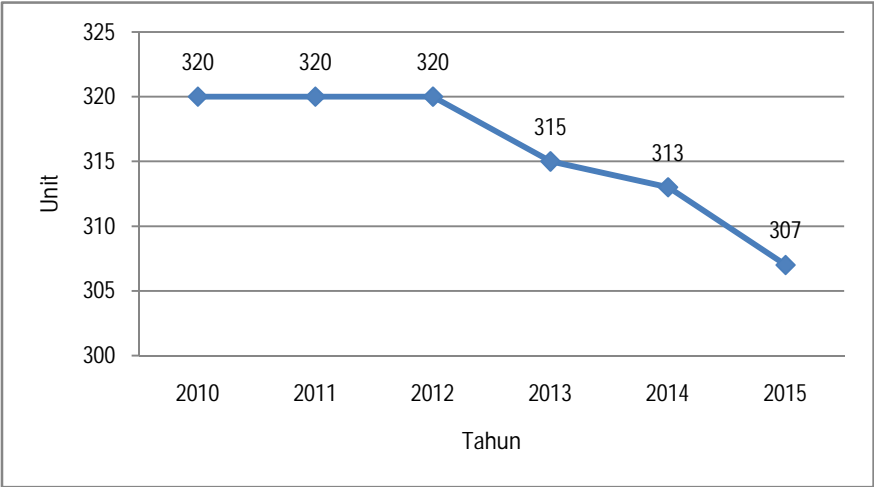
Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlah perpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami penurunan. Penurunan rata-rata jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta mencapai 0,83 persen per tahun. Penurunan ini dikarenakan adanya regrouping dan beberapa sekolah swasta yang tutup. Berikut ini merupakan tabel terperinci tentang jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2015.

Tabel 2.191  
Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)	Unit	1	1	1	1	1	1	0
Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri	Unit	135	135	135	131	130	128	-1,06
Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda (Sekolah Swasta)	Unit	184	184	184	183	182	178	-0,66
Total Jumlah Perpustakaan	Unit	320	320	320	315	313	307	-0,83

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Jumlah perpustakaan yang bersifat minus meskipun hanya kecil tetapi memiliki dampak yaitu berkurangnya fasilitas pelayanan pendidikan. Karena dengan berkurangnya jumlah perpustakaan tentu memiliki imbas terhadap berkurangnya garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.



Gambar 2.103  
Grafik Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

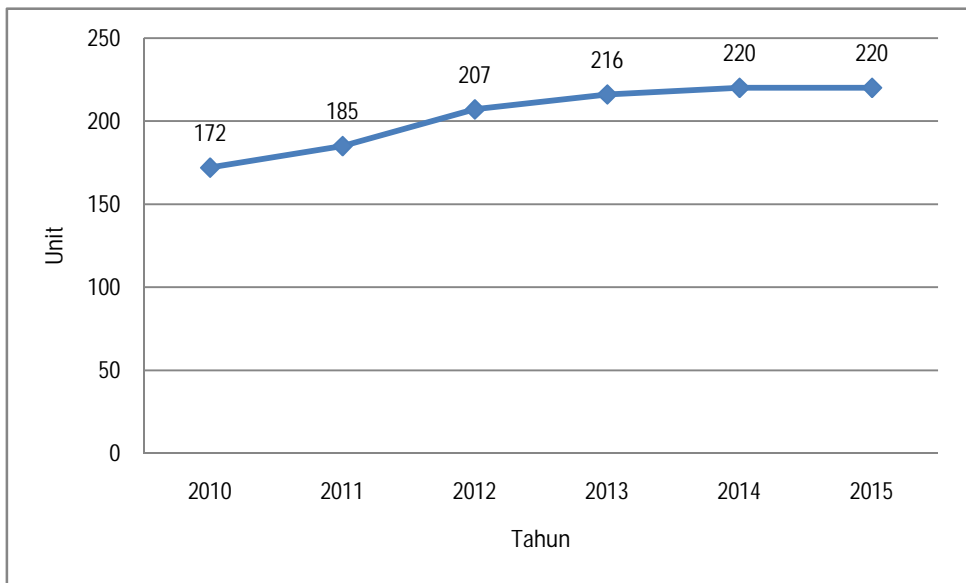
Selain menggambarkan jumlah perpustakaan perlu untuk menampilkan jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kota Yogyakarta karena keberadaan TBM yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan mudah. Jumlah TBM dari tahun 2010 hingga 2014 terus mengalami peningkatan dan stagnan pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2015 seiperoleh informasi bahwa TBM sudah diampu oleh Dinas Pendidikan sehingga data yang tercantum di bawah merupakan data terbaru yang dimiliki oleh dinas pendidikan terkait jumlah TBM.Kecenderungan meningkatnya jumlah TBM ini memang suatu hal yang sangat baik, hal ini berarti minat membaca masyarakat dari tahun ke tahun dapat semakin lama semakin meningkat. Hal ini juga akan menambah wawasan dan informasi masyarakat. Berikut ini merupakan tabel dan grafik bertambahnya jumlah TBM di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.192**  
**Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Perpustakaan (TBM)	unit	172	185	207	216	220	220	5,05

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,  
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016

Pertumbuhan TBM yang mencapai 5,05 persen merupakan pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yang memberikan bukti bahwa masyarakat memiliki motivasi yang besar untuk meningkatkan budaya membaca. Sesuai dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan tentunya budaya membaca harus dikembangkan secara terus menerus.



**Gambar 2.104**  
**Grafik Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Jika keaktifan pelayanan perpustakaan ditingkatkan dengan alokasi buku-buku yang dibutuhkan masyarakat, maka ke depan akan semakin meningkat daya tarik perpustakaan di mata masyarakat. Kesanggupan manajemen perpustakaan yang efeisien dan efektif dengan menggunakan pelayanan on line dan SIM yang selalu ditingkatkan maka akan menambah gairah para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk mengakses pelayanan tersebut.

2. Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk

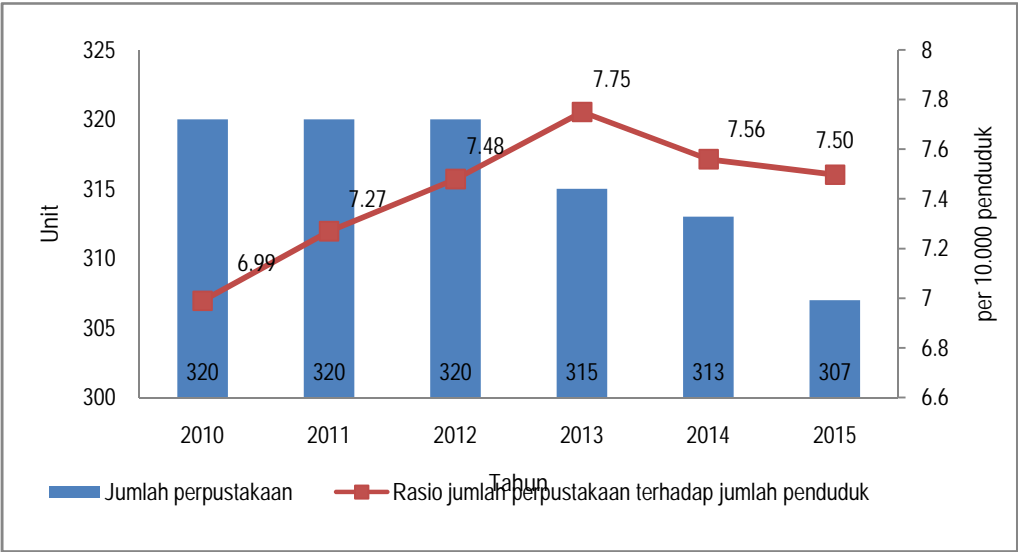
Penting untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Meskipun jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan, rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,41 persen per tahun. Hal ini karena jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,20 persen per tahun.

Tabel 2.193  
Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah perpustakaan	unit	320	320	320	315	313	307	-0,83
Jumlah Penduduk	jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,20
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk		6,99	7,27	7,48	7,75	7,56	7,50	1,41

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Penurunan rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk lebih jelasnya digambarkan melalui grafik di bawah ini. Bahwa penurunan jumlah perpustakaan di tahun 2014 ternyata juga menurunkan rasio perpustakaan per 10.000 penduduk yaitu menjadi 7,50 perpustakaan per 10.000 penduduk.



**Gambar 2.105**  
**Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

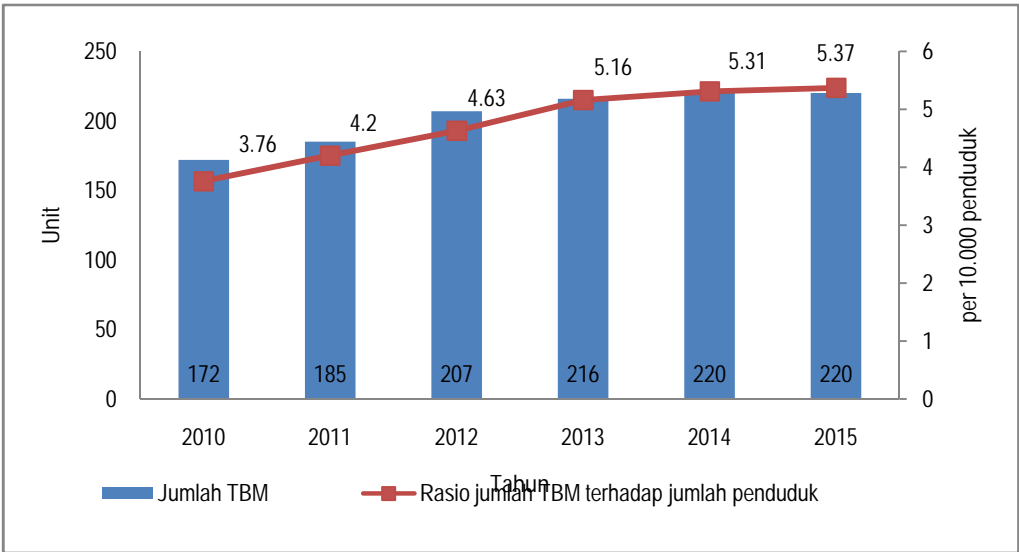
Sementara itu rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,40 persen per tahun. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah TBM setiap tahunnya. Berikut ini merupakan tabel rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk.

**Tabel 2.194**  
**Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah TBM	unit	172	185	207	216	220	220	5,05
Jumlah Penduduk	jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,20
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk		3,76	4,20	4,84	5,31	5,31	5,37	7,40

*Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016*

Kenaikan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk ini merupakan sebuah pencapaian yang positif. Kenaikan ini berarti dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Grafik di bawah ini menggambarkan kenaikan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk:



Gambar 2.106

Grafik Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Dari data di atas tampak bahwa setiap tahun terjadi kenaikan rasio jumlah TBM per 10.000. Jumlah TBM meningkat seiring dengan tren menurunnya jumlah penduduk kota Yogyakarta semakin meningkatkan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk. Pada tahun 2013 rasio TBM per 10.000 penduduk adalah 5,16 sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 5,31 meningkat kembali menjadi 5,37 di tahun 2015.

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

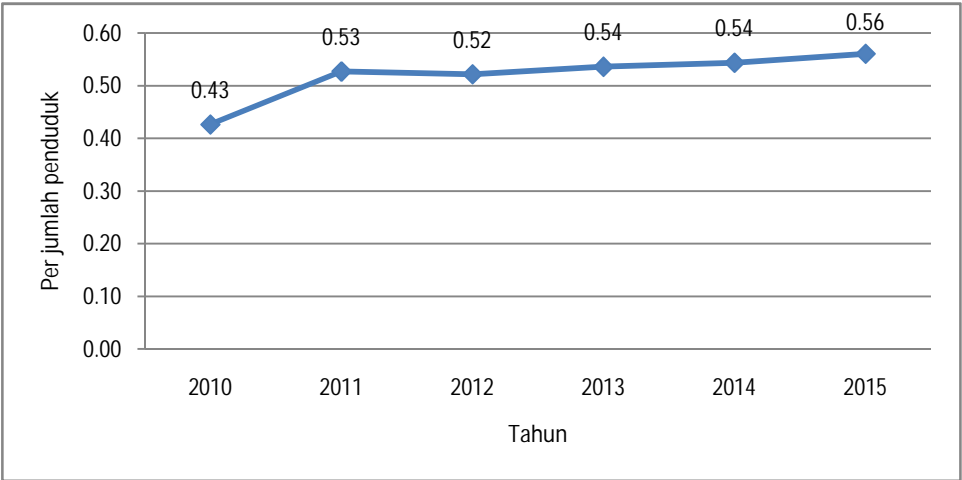
Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahun:

Tabel 2.195  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Jiwa	75.044	115.469	126.205	126.554	143.838	163.111	16,80
Jumlah Penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487	-2,20
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun		0,16	0,26	0,29	0,31	0,35	0,40	20,10

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015, jumlah penduduk berdasarkan data disdukcapil 2015

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, bahkan pada tahun 2010 ke tahun 2011 lonjakan jumlah pengunjung dapat dikatakan paling menonjol dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar. Berikut ini merupakan grafik perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan berdasarkan jumlah kunjungan dan perkembangan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2015.



**Gambar 2.107**  
**Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Dilihat dari grafik tersebut pengunjung perpustakaan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan juga meningkat. Namun kondisi ini perlu ditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik, dengan melengkapi informasi yang selalu up date dan fasilitas yang lebih baik.

**4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

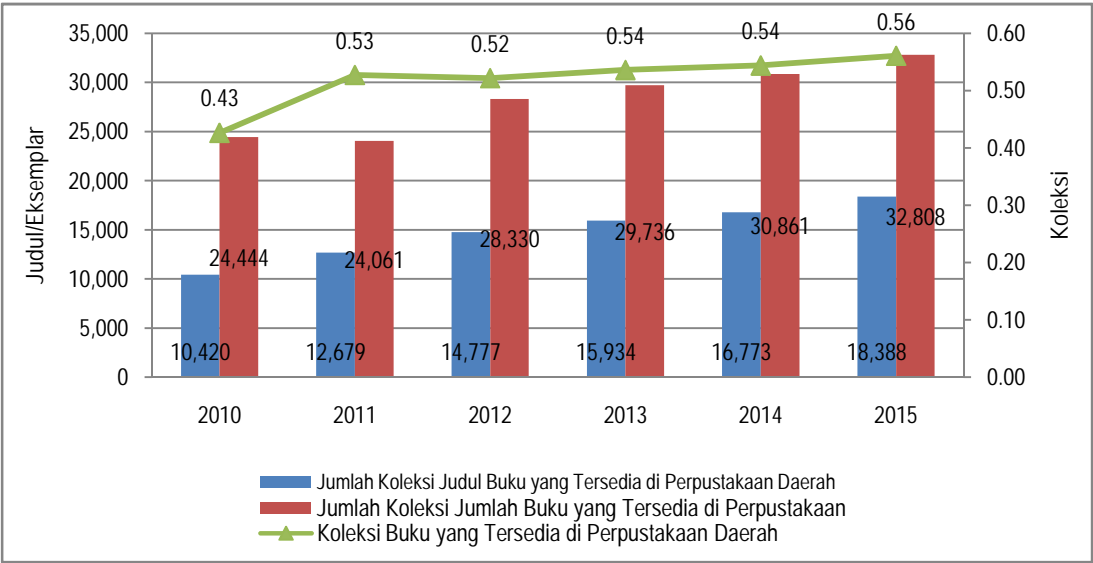
Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Di bawah ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2015.

**Tabel 2.196**  
**Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta**

Tahun 2010-2015								
Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	10.420	12.679	14.777	15.934	16.773	18.388	12,03
Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	24.444	24.061	28.330	29.736	30.861	32.808	6,06
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		0,43	0,53	0,52	0,54	0,54	0,56	5,63

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Kemudian pada kurun waktu enam tahun, antara 2010-2015, jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata jumlah koleksi judul buku mencapai 12,03 persen per tahun. Kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan yaitu mencapai kenaikan rata-rata sebesar 6,06 persen per tahun.



**Gambar 2.108**  
**Grafik Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**  
 Sumber: Hasil Olahan, 2016

Terdapat tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi judul yang berangsur meningkat dari waktu-ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan. Sedangkan penambahan koleksi buku

yaitu menambah jumlah eksemplarnya merupakan pencerminan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

**P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP**

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa secara rutin dua kali dalam setahun. Kegiatan pembinaan tersebut biasanya berupa sarasehan yang membicarakan tentang wawasan kebangsaan dan berbagai informasi terkait pengelolaan lembaga yang baik. Sarasehan tersebut juga seringkali melibatkan personil TNI dari Kodim, Karang Taruna, dan dosen sebagai pemantiknya.

**Tabel 2.197**  
**Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kali	2	2	2	2	2	8

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012, 2015, 2016*

Sejak tahun 2010 hingga 2014, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Yogyakarta berlangsung 2 kali, kemudian pada tahun 2015 meningkat drastis menjadi 8 kali. Penjabarannya adalah 2 kali untuk LSM dan Ormas serta 6 kali untuk OKP. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kantor kesatuan bangsa yang menaruh perhatian lebih besar untuk mengembangkan dan membina LSM, Ormas dan OKP yang ada di Kota Yogyakarta. Pembinaan sebaiknya mencakup substansi pengorganisasian, manajemen, perencanaan program dan model evaluasi. Pembinaan harus mampu menjawab kebutuhan pematangan organisasi dalam memfungsikan diri sebagai wahana kreatif bagi masyarakat. Mungkin bentuk forum komunikasi (Forkom) perlu ditambahkan agar antar organisasi yang tumbuh dalam masyarakat dapat terhubung satu dengan lainnya. Pemanfaatan organisasi yang kuat untuk memberikan saling asah, asih dan asuh kepada organisasi yang baru tumbuh akan sangat membantu pemerintah. Dengan memanfaatkan organisasi yang sudah berkembang untuk memberikan kontribusi kepada organisasi yang lebih lemah, akan menopang kekuatan pemerintah mengingat keterbatasan sumberdaya. Namun visi dan misi tetap tercapai dengan menyambungkan antar organisasi ini.

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan partai politik daerah ini merupakan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa. Di tahun tahun 2010 hingga 2013 kegiatan pembinaan politik daerah dilakukan selama 38 kali. Banyaknya pembinaan yang diselenggarakan ini berkaitan erat dengan jumlah parpol yang ada. Banyak atau sedikitnya parpol biasanya dipengaruhi oleh siklus pemilihan umum, jumlah parpol bisa bertambah maupun berkurang ketika akan mendekati pemilihan umum. Sementara di tahun 2014 kegiatan pembinaan politik hanya diselenggarakan delapan kali, kegiatan tersebut merupakan pemberian dana bantuan kepada delapan parpol. Tentunya pemberian dana bantuan tidak cukup sebagai teknik pembinaan yang mumpuni. Pada tahun 2015 bantuan politik kepada partai politik menurun menjadi 6 sebab 2 parpol Golkar dan PPP sedang memiliki kasus sengketa di pusat. Berikut adalah daftar parpol yang mendapatkan bantuan politik pada tahun 2015:

- 1. Bantuan Kepada PDI Perjuangan
- 2. Bantuan Kepada PAN
- 3. Bantuan Kepada Partai Gerindra
- 4. Bantuan Kepada Partai Demokrat
- 5. Bantuan Kepada PKS
- 6. Bantuan Kepada Partai Nasdem

Mengingat keberadaan parpol seringkali menjadi sumber mobilisasi massa besar-besarnya, maka tentunya pembinaan hendaknya mencakup penumbuhan kepedulian parpol terhadap keharmonisan dan keselarasan lingkungan.

Tabel 2.198  
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kali	38	38	38	38	8	6

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2012, 2015, 2016

Antara kegiatan kepartaian dengan kegiatan pemerintah seringkali tidak berjalan secara linear. Hal ini dapat diatasi dengan menserasikan gerak langkah antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimanapun partai politik merupakan base home setiap anggota DPRD. Namun gerak langkah pembangunan pemerintah kurang didukung oleh partai politik. Komunikasi dengan partai politik tentunya akan dapat berjalan lancar jika komunikasi dengan DPRD berjalan lancar. Dengan demikian pembinaan partai politik bentuknya bukan sekedar memberikan dana bantuan, akan tetapi melakukan komunikasi yang intensif. Kesadaran partai politik hidup

dalam wilayah Kota Yogyakarta yang harus ikut bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban dan ketentraman warga dan sekitarnya perlu ditekankan. Kegiatan politik dan geliat demokrasi yang sering muncul tidak menyimpang dari tatakrama dan sopan santun sebagai penduduk kota Yogyakarta. Pembinaan terhadap sikap santun berpolitik perlu dilakukan, sebab selama ini aktivitas politik terutama ketika apel akbar dan berkampanye sangat jauh dari tatakrama dan adat istiadat. Bahkan kesan arogansi yang berlebihan yang sering muncul. Ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap partai politik perlu menekankan budaya Yogyakarta. Ke depan yang perlu diefektifkan dalam pembinaan parpol adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpolitik dan beraktivitas politik yang damai dan menjaga ketertiban lingkungan.

**Q. Statistik**

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date.

Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2010 hingga 2015 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

**Tabel 2.199**  
**Publikasi Buku Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Buku “Kota Dalam Angka”	eksemplar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku “PDRB Kota”	eksemplar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2012,2014,2015*

Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Yogyakarta telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas.

Semestinya penyebutan jumlah eskemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.

R. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku, tetapi inisiatif untuk mengelola arsip secara baku sangat tergantung dari kesadaran setiap SKPD di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya arsip yang ada di setiap SKPD memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap SKPD. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan oleh semua SKPD yang ada di Kota Yogyakarta dan terus berlangsung hingga tahun 2015.

Tabel 2.200  
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta  
Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	Unit	150	150	150	150	156	156
Jumlah SKPD	Unit	150	150	150	150	156	156
Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012, 2015, 2016

Terkait dengan pengelolaan arsip, pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki 21 pejabat fungsional arsiparis. Pejabat tersebut berada di Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah yang memiliki tugas keliling ke setiap SKPD. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola kearsipan.

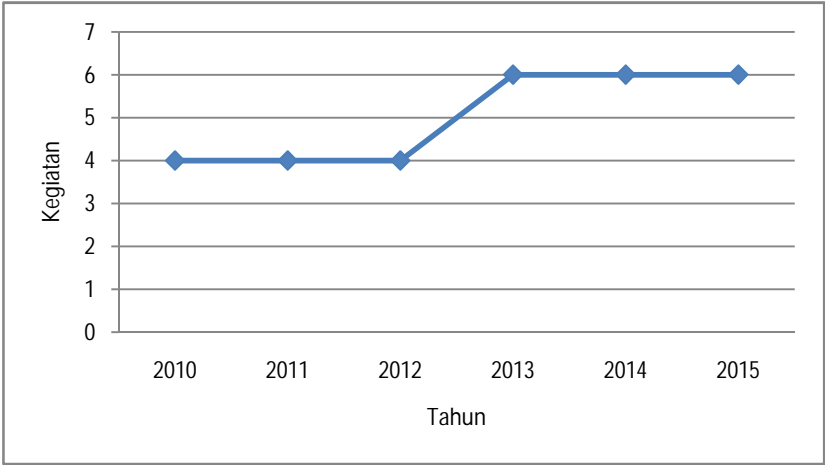
Tabel 2.201  
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta  
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	kali	4	4	4	6	6	6

Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012,2015,2016

Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini di tahun 2010 hingga 2012 dilakukan empat kali dalam setahun, dan diikuti oleh semua SKPD. Empat kegiatan tersebut adalah kegiatan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan untuk penyusutan arsip-arsip dan kegiatan akuisisi.

Kegiatan peningkatan pengelolaan SDM masih terus dilakukan hingga tahun 2013,2014, dan 2015 meningkat menjadi enam kali. Kegiatan tersebut berupa bimbingan teknis petugas arsip, bimbingan teknis pengembangan profesi Arsiparis, FKA (Forum Komunikasi Arsiparis Kota Yogyakarta), FKPK (Forum Komunikasi Petugas Kearsipan), FMK (Forum Masyarakat Kearsipan) DIY dan Pendampingan ke SKPD.



**Gambar 2.109**  
**Grafik Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber: Hasil Olahan, 2016*

Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tingkat daerah, khususnya ke dalam SKPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat.

**2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

**A. Pertanian**

**1. Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**

Analisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal pada suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luasan lahan yang ada. Adapun faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1)genetik tanaman, (2)lingkungan tumbuh, serta (3)manajemen budidaya tanaman. . Apabila dilihat dari besaran produksinya, padi merupakan jenis tanaman utama di Kota Yogyakarta sementara bahan pangan lokal lainnya masih memiliki kontribusi yang sangat kecil. Sedangkan apabila dilihat dari perkembangan

produktivitas tanaman padi selama tahun 2011-2015, diketahui bahwa tren yang terbentuk bersifat negatif meskipun hanya sebesar -0,42.

Tabel 2.202  
Produksi Padi dan Palawija Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Padi	1.304	1.121	1.101	954	764	-12,51
2	Jagung	27	19	-	6	-	
3	Kedelai	-	-	-	-	-	
4	Kacang Tanah	1	1	-	-	-	
5	Kacang Hijau	-	-	-	-	-	
6	Ubi Kayu	-	-	-	-	-	
7	Ubi Jalar	-	-	-	-	-	
8	Cantel	-	-	-	-	-	
9	Lain-lain			-	-	-	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta 2016.

Penurunan produktivitas padi tersebut terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan pada umumnya disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan oleh kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam. Baik hasil panen maupun luasan panen menunjukkan pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya. Meskipun begitu, penurunan hasil panen terjadi lebih cepat dibandingkan penurunan luasan panen sehingga hal tersebut menyebabkan produktivitas padi mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 2.203  
Luas Panen Padi dan Palawija Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Padi	218	169	166	149	130	-12,12
2	Jagung	4	3	-	1	-	
3	Kedelai	-	-	-	-	-	
4	Kacang Tanah	1	1	-	-	-	
5	Kacang Hijau	-	-	-	-	-	

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2011	2012	2013	2014	2015	
6	Ubi Kayu	-	-	-	-	-	
7	Ubi Jalar	-	-	-	-	-	
8	Cantel	-	-	-	-	-	
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta 2015, 2016.

Hasil panen padi pada tahun 2011 adalah sebesar 1.304 ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 764 ton pada tahun 2015 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -12,51%/tahun. Sedangkan luas panen pada tahun 2011 adalah sebesar 218 Ha yang pada tahun 2015 menurun menjadi 130 Ha. Pertumbuhan luas lahan panen tersebut adalah sebesar -12,12%/tahun. Meskipun hal ini wajar terjadi di perkotaan, akan tetapi penurunan ini tetap harus dikelola dan dikendalikan agar Kota Yogyakarta memiliki ketahanan dalam penyediaan pangan untuk penduduknya dan tidak terlalu bergantung pada wilayah lainnya.

## 2. Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah dapat dilihat berdasarkan kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB total. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB mengalami penurunan dari tahun 2010-2014 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -4,86%/tahun. Meskipun pertumbuhan nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,38%/tahun, namun hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta yang tumbuh lebih pesat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,50%/tahun. Oleh karenanya hal tersebut menyebabkan penurunan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap total PDRB Kota Yogyakarta.

Sektor pertanian di Kota Yogyakarta merupakan sektor minoritas dan perkembangannya kalah cepat dengan sektor-sektor basis di daerah perkotaan. Pada tahun 2010, sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,2% dari total seluruh PDRB. Persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,16%. Meskipun demikian, peningkatan PDRB sektor pertanian ini masih menunjukkan hal baik dan dapat dikatakan bahwa sektor ini masih mampu bertahan di tengah kompetisi perkembangan sektor lainnya.

Tabel 2.204  
Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata- rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rupiah	17.202.154,00	18.206.089,80	19.189.074,90	20.239.557,70	21.312.143,50	5,50
2	Nilai PDRB sektor Pertanian	Juta Rupiah	34.553,90	34.850,60	35.066,90	35.453,10	35.075,50	0,38
3	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	%	0,20	0,19	0,18	0,18	0,16	-4,86

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, (BPS Kota Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

3. Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dalam PDRB

Sektor pertanian/perkebunan memiliki beberapa sub sektor dengan kontribusi berbeda-beda. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan masih kalah besar bila dibandingkan dengan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. Sejalan dengan produktivitas padi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan juga mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -0,31%/tahun. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian/perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,37%/tahun. Hal tersebut menyebabkan penurunan kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan yang ditandai dengan pertumbuhan sebesar -0,68%/tahun. Pada tahun 2010, kontribusi sub sektor ini adalah sebesar 9,14% sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi 8,89%.

Tabel 2.205  
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB ADHK Pertanian/Perkebunan

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rupiah	34.553,90	34.850,60	35.066,90	35.453,10	35.075,50	0,37
2	Nilai PDRB sub sektor Pertanian tanaman pangan	Juta Rupiah	3.157,90	3.139,60	3.163,10	3.165,90	3.119,40	-0,31
3	Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB sektor pertanian / perkebunan	%	9,14	9,01	9,02	8,93	8,89	-0,68

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, (BPS Kota Yogyakarta, 2015) : dengan Hasil Olahan, 2016. Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

4. **Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) dalam PDRB**

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor dengan kontribusi terendah kedua setelah sub sektor kehutanan. Nilai PDRB sektor ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,62%/tahun dari tahun 2010-2014. Begitu pula dengan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian /perkebunan yang juga meningkat sebesar 0,24%/tahun. Pada tahun 2010, kontribusi sub sektor perkebunan adalah sebesar 0,012% dari sektor pertanian/perkebunan dan pada tahun 2014 kontribusinya tetap, yaitu sebesar 0,012%.

**Tabel 2.206**  
**Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rupiah	34.553,90	34.850,60	35.066,90	35.453,10	35.075,50	0,37
2	Nilai PDRB sub sektor perkebunan	Juta Rupiah	4,00	4,00	4,00	4,10	4,10	0,62
3	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian/perkebunan	%	0,012	0,011	0,011	0,012	0,012	0,24

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

5. **Cakupan bina kelompok tani**

Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Yogyakarta. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

**Tabel 2.207**  
**Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Variabel	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda	kelompok	57	53	6	0	19	-24,12
2	Total Kelompok Petani/ Cakupan Bina Kelompok Tani	kelompok	151	165	175	175	206	8,07

*Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta 2015, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.*

Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 8,07%/tahun pada rentang tahun 2011-2015. Namun, apabila dilihat dari segi kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda, jumlahnya justru semakin berkurang dan bahkan mencapai angka 0 pada tahun 2014. Ketiadaan kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun ini dikarenakan adanya peralihan pemerintahan (periode pergantian presiden) sehingga pada saat itu terjadi banyak perubahan sistem pada instansi-instansi pemerintah sehingga beberapa pelaksanaan program ditunda, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial. Meskipun demikian, jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemda kembali meningkat di tahun 2015 menjadi 19 kelompok.

**B. Energi dan Sumber Daya Mineral**

**1. Pertumbuhan Sektor penggalian dalam PDRB**

Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor basis di Kota Yogyakarta. Dari tahun 2010-2014, nilai PDRB sektor penggalian di Kota Yogyakarta hanya berada pada kisaran 790-850 juta rupiah. Rendahnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Yogyakarta disebabkan oleh sumber bahan galian berupa pasir yang hanya berasal dari endapan aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi, Kabupaten Magelang.

Apabila dilihat dari segi perkembangannya, nilai PDRB sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan rata-ratanya mencapai 1,81%/tahun. Nilai sektor pertambangan ini terus meningkat setelah adanya letusan gunung api merapi pada tahun 2010. Pada tahun 2010 dan 2011, kontribusi sektor ini adalah tertinggi selama jangka waktu 2010-2014, yaitu sebesar 0,046, namun kontribusi tersebut

terus menurun selama tahun 2012-2014. Kontribusi sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2010-2014 sebesar -3,50%/tahun. Kontribusi sektor pertambangan yang terus menurun ini disebabkan karena pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta lebih besar dibanding laju pertumbuhan dari sektor pertambangan.

**Tabel 2.208**  
**Kontribusi Sektor Penggalan dan Pertambangan terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rupiah	17.202.154,00	18.206.089,80	19.189.074,90	20.239.557,70	21.312.143,50	5,50
2	Nilai PDRB ADHK sektor pertambangan dan penggalan	Juta Rupiah	790,90	831,20	837,10	839,00	850,00	1,81
3	Kontribusi sektor penggalan dan perdagangan terhadap PDRB	%	0,0046	0,0046	0,0044	0,0041	0,0040	-3,50

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.

**Keterangan:** (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

C. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

**Tabel 2.209**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- Rata (%/tahun)
1	Kunjungan Wisman	Kunjungan	221.054	283.727	179.387	273.448	393.082	15,48
2	Kunjungan Wisnu	Kunjungan	2.670.649	2.611.453	2.536.093	2.733.805	2857599	1,71
	<b>Jumlah</b>	<b>Kunjungan</b>	<b>2.891.703</b>	<b>2.895.180</b>	<b>2.715.480</b>	<b>3.007.253</b>	<b>3.250.681</b>	<b>2,97</b>
	<b>Target Daerah</b>	<b>Kunjungan</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.812.160</b>	<b>3,40</b>
	<b>Tingkat Realisasi Kunjungan</b>	<b>%</b>	<b>115,67</b>	<b>111,35</b>	<b>100,42</b>	<b>106,93</b>	<b>111,15</b>	<b>-0,99</b>

*Sumber :Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta 2015, 2016 :dengan Hasil Olahan, 2016.*

Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Angka jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta diperoleh melalui perhitungan 100% kunjungan Kraton + 50% kunjungan Taman pintar + 50% kunjungan Kebun Binatang Gembira Loka + 30% kunjungan Museum + 90% jumlah tamu yang menginap di hotel.

Apabila dilihat dari perkembangan realisasi kunjungan wisata, diketahui bahwa selama tahun 2011-2015 kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta telah berhasil melampaui target kunjungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2011, kunjungan wisatawan mencapai 2.891.703 kunjungan dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.250.681 juta kunjungan. Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta tersebut tentunya tidak terlepas dari promosi wisata dan branding yang telah banyak dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta.

**2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**

Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Perhitungannya didekati dengan menjumlahkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2010-2014, nilai PDRB akomodasi dan makan minum terus menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 6,26%/tahun. Dari segi kontribusinya, sektor ini juga mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2010-2014. Pertumbuhan rata-ratanya mencapai 0,72%/tahun. Pada tahun 2010, kontribusinya sebesar 11,17% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,50%.

**Tabel 2.210**  
**Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuh an rata- rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rupiah	17.202.154,00	18.206.089,80	19.189.074,90	20.239.557,70	21.312.143,50	5,50
2	Nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Juta Rupiah	1.921.791,3	2.036.971,2	2.183.269,6	2.320.365,5	2.450.064,8	6,26
3	<b>Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB</b>	%	11,17	11,18	11,38	11,46	11,50	<b>0,72</b>

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015); dengan Hasil Olahan, 2016.

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

**D. Perdagangan**

**1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB**

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Yogyakarta. Sektor perdagangan dalam PDRB Kota Yogyakarta 2014 terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdagangan besar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Dilihat dari segi pertumbuhannya, nilai PDRB sektor perdagangan terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 4,85%/tahun. Dari dua sub sektor pembentuknya, sub sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang nilai PDRB terbesar dari PDRB sektor perdagangan, nilainya mencapai yaitu mencapai 5,21% dari PDRB Kota Yogyakarta tahun 2014.

**Tabel 2.211**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rupiah	17.202.154,00	18.206.089,80	19.189.074,90	20.239.557,70	21.312.143,50	5,50
2	Nilai PDRB sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran; raparasi mobil dan sepeda motor)	Juta Rupiah	1.215.273,80	1.247.376,90	1.326.260,70	1.407.238,60	1.468.894,00	4,85
3	<b>Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</b>	%	7,06	6,85	6,91	6,95	6,89	<b>-0,62</b>

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, (BPS Kota Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan.

**Keterangan:** (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan pertumbuhan nilai PDRB nya, perkembangan kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Yogyakarta justru menunjukkan penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi sektor perdagangan adalah sebesar 7,06% sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 6,89%. Penurunan kontribusi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan ternyata belum mampu mengimbangi perumbuhan PDRB Kota Yogyakarta secara keseluruhan dan relatif lebih lambat dari sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor informasi dan komunikasi. Pertumbuhan kontribusi sektor ini mencapai -0,62%

## 2. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Hingga 2015, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, Pertumbuhan rata-ratanya mencapai - 51,69%/tahun. Nilai ekspor bersih perdagangan Kota Yogyakarta adalah sebesar 114 juta US\$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai ekspor kota lebih besar daripada nilai impornya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan Kota Yogyakarta sudah mencapai pasar internasional. Namun, meksipun demikian, ekspor bersih perdagangan Kota Yogyakarta terus menurun hingga mencapai 6,2 juta US\$ di tahun 2015.

**Tabel 2.212**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuh an Rata- Rata (%/tahun)
1	Nilai Ekspor	US \$	117.685.291	119.048.049	17.217.091	16.626.476	13.057.831,64	-42,28
2	Nilai Impor	US \$	3.363.749	13.061.918	37.269.427	228.241	6.832.100	19,38
<b>Ekspor Bersih Perdagangan</b>		<b>US \$</b>	<b>114.321.543</b>	<b>105.986.131</b>	<b>-20.052.336</b>	<b>16.398.235</b>	<b>6.225.731</b>	<b>-51,69</b>

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangan kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskan untuk membantu UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perak dan pemanfaatan limbah yang dijadikan produk kerajinan. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing.

**3. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal**

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satu pelaku usaha informal di Kota Yogyakarta adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah PKL di Kota Yogyakarta terus menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 19,12%/tahun. Pada tahun 2011 tercatat jumlah PKL sebanyak 3.511 unit dan jumlah tersebut meningkat menjadi 7.070 unit di tahun 2015.

**Tabel 2.213**  
**Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Eksisting PKL	Unit	3.511	3.907	6.406	6.776	7070	19,12
2	PKL Berizin	Unit	2.351	1.858	2.242	2.371	5495	23,65
3	Persentase PKL Berizin	%	66,96	47,56	35,00	34,99	77,72	3,80

Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016.

Seluruh PKL di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 belum sepenuhnya memiliki izin dari pemerintah daerah. Oleh karenanya, kedepannya perlu diadakan pendataan sekaligus pembinaan PKL agar seluruh PKL yang ada di Kota Yogyakarta mendapat legalitas dalam berjualan dan mengurangi resiko perselisihan dengan pemerintah. Meskipun demikian, jumlah PKL yang sudah berizin menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 23,65%/tahun. Pertumbuhan PKL berizin tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah PKL eksisting di Kota Yogyakarta sehingga persentase PKL yang berizin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut, persentase PKL berizin mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Pertumbuhannya mencapai 3,80%/tahun.

E. Perindustrian

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menyumbang PDRB terbesar dalam PDRB Kota Yogyakarta. Nilai PDRB sektor industri pengolahan ini mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga 2014 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,70%/tahun. Pada tahun 2010, nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 2,5 triliun rupiah dan meningkat menjadi 2,9 triliun rupiah di tahun 2014.

Meskipun PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif, namun kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan dari tahun 2010-2014. Pertumbuhan rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan adalah sebesar -1,71%/tahun. Kontribusi yang terus menurun tersebut terjadi akibat dari pertumbuhan sektor lainnya yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri dalam konteks PDRB Kota Yogyakarta. Berdasarkan data PDRB ADHK Kota Yogyakarta tahun 2010-2014, kontribusi terbesar dalam PDRB sektor industri disumbang dari sub sektor industri makanan dan minuman yang pada tahun 2014 mencapai 13,81%.

Tabel 2.214  
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rupiah	17.202.154,00	18.206.089,80	19.189.074,90	20.239.557,70	21.312.143,50	5,50
2	Nilai PDRB sektor industri	Juta Rupiah	2.545.388,30	2.708.581,40	2.630.976,50	2.813.952,60	2.943.834,40	3,70

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	14,80	14,88	13,71	13,90	13,81	-1,71

Sumber . PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014  
 (BPS Kota Yogyakarta, 2015); dengan Hasil Olahan, 2016.  
 Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

## 2. Pertumbuhan industri

Industri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumah tangga, kecil, sedang dan besar. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah unit industri terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 8,37%/tahun. Pada tahun 2011, jumlah unit industri di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 4.574 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 6.222 unit pada tahun 2015. Pertumbuhan unit industri paling besar adalah pada tahun 2013, dimana pertumbuhan unit industri adalah sebesar 16,94% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.215**  
**Pertumbuhan Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Unit usaha industri	Unit	4.574	4.888	5.716	5.929	6.222	8,37
Pertumbuhan	%	0,11	6,86	16,94	3,73	4,94	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan

Berdasarkan data PDRB ADHK tahun 2010-2014, diketahui bahwa sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi serta sub sektor industri makanan dan minuman memiliki pertumbuhan yang paling pesat dibandingkan dengan sub sektor industri yang lain dalam rentang waktu 2010-2014. Adanya karakteristik masyarakat maupun morfologi wilayah yang mengarah pada daerah perkotaan maka menjadikan wajar apabila industri di Kota Yogyakarta terus mengalami pertumbuhan.

## 3. Cakupan bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, diketahui bahwa keseluruhan pengrajin di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 tergabung dalam kelompok/paguyuban. Pada tahun 2012, terdapat 33 kelompok pengrajin

dan pada tahun 2015 jumlah tersebut meningkat menjadi 42 kelompok. Semua kelompok ini mendapatkan bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk modal alat maupun pembinaan. Sedangkan perkembangan jumlah kelompok pengrajin sendiri mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata kelompok pengrajin ini adalah sebesar 8,37%. Peningkatan jumlah kelompok perngrajin tersebut terjadi seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang industri. Pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok tersebut. Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, diketahui bahwa keseluruhan pengrajin di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 tergabung dalam kelompok/paguyuban. Pada tahun 2012, terdapat 33 kelompok pengrajin dan pada tahun 2015 jumlah tersebut meningkat menjadi 42 kelompok. Semua kelompok ini mendapatkan bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk modal alat maupun pembinaan. Sedangkan perkembangan jumlah kelompok pengrajin sendiri mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata kelompok pengrajin ini adalah sebesar 8,37%. Peningkatan jumlah kelompok perngrajin tersebut terjadi seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang industri. Pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok tersebut.

**Tabel 2.216**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	kelompok	NA	33	39	40	42	8,37
2	Total Kelompok Pengrajin	kelompok	NA	33	39	40	42	8,37

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016

F. Perikanan

1. Produksi Perikanan Darat

Berdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatan perikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yang dibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal. Apabila dilihat dari perkembangannya selama tahun 2011-2015, diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011, tingkat realisasi hanya sebesar 19,20% sedangkan pada tahun 2015 telah meningkat menjadi 71,05%. Pertumbuhannya mencapai 38,70%/tahun. Secara umum, produksi ikan tertinggi ada pada tahun 2013, yaitu sebesar 132.351 kg. Pada tahun itu pula, target daerah mencapai angka tertinggi, yaitu mencapai 90.000 kg.

Tabel 2.217  
Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Ikan	Kg	15.743	72.662	132.351	63.000	46.183	30,87
2	Target Daerah	Kg	82.000	88.000	90.000	65.000	65.000	-5,64
Tingkat Realisasi		%	19,20	82,67	147,06	96,92	71,05	38,70

Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakarta merupakan ikan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan dari daerah lain.

Konsumsi ikan di Kota Yogyakarta berada pada kisaran angka 30-32,15 ton setiap tahunnya. Tingkat realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2014 terus menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,09%/tahun. Secara umum, realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 telah mencapai 100% dari target yang dikehendaki.

Pada tahun 2011, tingkat realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 101,69% dan pada tahun 2015 mencapai 102,06%.

Tabel 2.218  
Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Ton	30	32,12	32,14	32,15	32,15	1,74
2	Target Daerah	Ton	29,50	30,00	30,50	30,50	31,50	1,65
Tingkat Realisasi		%	101,69	107,07	105,38	105,41	102,06	0,09

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016

3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Perikanan Budidaya

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di Kota Yogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikan menjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaan terhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran.

Ditinjau dari perkembangannya dari tahun 2012 hingga 2015, jumlah kelompok pengusaha budidaya atau cakupan bina kelompok pengusaha perikanan budidaya di Kota Yogyakarta memiliki pertumbuhan negatif sebesar -2,27%/tahun. Pada tahun 2012, jumlah kelompok budidaya perikanan adalah sebesar 63 kelompok dan pada tahun 2015 menurun menjadi 58 kelompok. Pada tahun 2012, dari total kelompok pengusaha perikanan budidaya sebanyak 63 kelompok, baru 5 kelompok yang mendapatkan bantuan/binaan dari pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah kelompok perikanan yang mendapat bantuan menurun menjadi 1 kelompok.

Tabel 2.219  
Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Variabel	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan yang mendapat bantuan pemda	Kelompok	NA	5	8	5	1	-41,52
2	Total kelompok pengusaha budidaya perikanan	Kelompok	NA	63	51	38	58	-2,72

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

G. Ketransmigrasian

1. Jumlah Transmigran Swakarsa

Trasmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan asset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari Kota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat dari kekhawatiran maysarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan transmigrasi secara swakarsa. Meskipun demikian, jumlah transmigrasi umum dii tahun 2015 mengalami kenaikan setelah sebelumnya pada tahun 2011-2014 jumlah transmigran mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah individu yang mengikuti transmigrasi umum adalah sebanyak 89 jiwa dan 25 KK. Pada tahun 2015, jumlah individu dan KK tersebut menurun menjadi 39 individu dan 12 KK.

Tabel 2.220  
Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Transmigrasi Swakarsa						
	Kepala Keluarga	KK	0	0	0	0	0
	Individu	Jiwa	0	0	0	0	0
2	Transmigrasi Umum						
	Kepala Keluarga	KK	25	19	15	5	12
	Individu	Jiwa	89	64	46	15	39
3	Jumlah Total Transmigrasi						
	Kepala Keluarga	KK	25	19	15	5	12
	Individu	Jiwa	89	64	46	15	39

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran Konsumsi per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Selama rentang waktu tahun 2010-2014, pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,84% (berdasarkan PDRB ADHB). Pada tahun 2010, pengeluaran per kapita penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan PDRB ADHB adalah sebesar 12,02 juta rupiah per tahun. Sementara pada tahun 2014, pengeluaran per kapita ini meningkat menjadi 17,50 juta rupiah per tahun. Secara umum, jumlah pengeluaran makanan memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Meskipun demikian, nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan tidak lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Tabel 2.221  
Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Pengeluaran makanan	Juta Rupiah	1.893.068	2.068.112	2.321.213	2.618.139	2.926.749	11,51
Pengeluaran non makanan	Juta Rupiah	2.779.653	3.023.208	3.306.250	3.654.621	4.082.705	10,09
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah	4.672.721	5.091.320	5.627.463	6.272.760	7.009.454	10,67
Jumlah Penduduk	Jiwa	388.627	390.554	394.012	402.679	400.467	0,75
Pengeluaran per kapita per tahun	Rupiah	12,02	13,04	14,28	15,58	17,50	9,84
Pengeluaran per kapita per bulan	Rupiah	1,00	1,09	1,19	1,30	1,46	9,84

Sumber: PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015); dengan Hasil Olahan, 2016. Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

Secara umum perkembangan pengeluaran perkapita penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor kemampuan daya beli dan juga inflasi. Daya beli masyarakat yang selalu meningkat dan kebutuhan semakin kompleks menjadikan pengeluaran per kapita semakin naik tiap tahunnya. Namun, selain dari sisi kemampuan penduduk sebagai pembeli, kenaikan pengeluaran juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan inflasi daerah. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, idealnya laju inflasi lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan konsumsi penduduk.

2. **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

Selama rentang tahun 2010 hingga 2014, diketahui bahwa pola konsumsi rumah tangga per kapita untuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanan, meskipun masih seimbang dengan perbandingan 60%:40%. Lebih tingginya konsumsi non pangan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh tipologi masyarakat yang merupakan penduduk perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau dari pertumbuhannya, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga seluruhnya mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,53%/tahun. Pertumbuhan negatif tersebut diakibatkan dari laju pertumbuhan konsumsi pangan yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan konsumsmi non pangan.

**Tabel 2.222**  
**Pengeluaran Konsumsi Non pangan Perkapita Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Pengeluaran non makanan	Juta Rupiah	2.779.653	3.023.208	3.306.250	3.654.621	4.082.705	10,09
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah	4.672.721	5.091.320	5.627.463	6.272.760	7.009.454	10,67
<b>Persentase Pengeluaran Non Pangan</b>	<b>%</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>-0,53</b>

*Sumber:* PDRB Menurut Penggunaan ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, (BPS Kota Yogyakarta, 2015); dengan Hasil Olahan, 2016.

*Keterangan:* (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

3. Produktivitas Total Kota

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam 3 sektor besar yaitu agriculture, manufacture, dan services. Sektor agriculture terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor manufacture terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor service terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi,; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah manufacture, meskipun jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektor services. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor services merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor manufacture. Meskipun demikian, produktivitas sektor service ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,03%/tahun.

Tabel 2.223  
Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Nilai PDRB ADHK							
Lapangan Usaha	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Agriculture	juta rupiah	35.167,9	35.476,3	35.709,1	36.100,1	35.733,8	0,40
Manufacture	juta rupiah	4.006.923,80	4.237.528,00	4.233.608,80	4.493.200,10	4.699.987,50	4,07
Service	juta rupiah	13.160.062,30	13.933.085,50	14.919.757,00	15.710.257,50	16.576.422,20	5,94
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja							
Lapangan Usaha	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Agriculture	jiwa	696	1.062	756	471	1.314	17,22
Manufacture	jiwa	10.153	55.881	30.897	31.753	40.642	41,45
Service	jiwa	174.804	154.450	169.987	162.512	174.212	-0,08

Total Produktivitas							
Lapangan Usaha	Satuan	2010	2011	2012	2013*	2014**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Agriculture	juta rupiah/jiwa	50,53	33,41	47,23	76,65	27,19	-14,35
Manufacture	juta rupiah/jiwa	394,65	75,83	137,02	141,50	115,64	-26,43
Service	juta rupiah/jiwa	75,28	90,21	87,77	96,67	95,15	6,03

*Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014, (BPS Kota Yogyakarta, 2015); dengan Hasil Olahan, 2016.*  
*Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara*

### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Dalam fokus fasilitas wilayah/infrastruktur terdiri atas lima urusan, yakni urusan perhubungan; penataan ruang; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; lingkungan hidup; serta komunikasi dan informatika. Sama halnya dengan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur pada aspek pelayanan wajib, terdapat beberapa indikator yang memiliki kesamaan juga adanya beberapa indikator dalam urusan yang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan indikator yang berkaitan lebih cocok apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten, bukan wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta, sehingga indikator tersebut ditiadakan.

#### A. Perhubungan

Aspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakni indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yang sama di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak memiliki terminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni Terminal Giwangan.

##### 1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah dengan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah

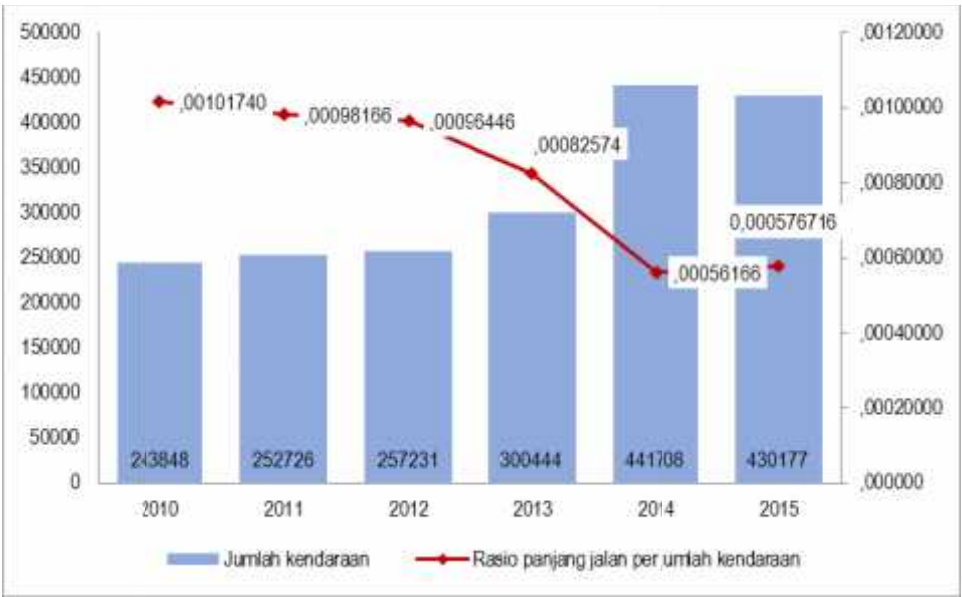
kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.224  
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta  
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang Jalan	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	-
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	243.849	252.726	257.233	300.444	441.708	430.177	12,022
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	km/unit	0,00102	0,00098	0,00096	0,00083	0,00056	0,0005767	(10,778)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Panjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruas jalan yang dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki panjang yang sama, yakni sepanjang 248,09 km. Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta terbilang cukup tinggi setiap tahunnya yang dibuktikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12% per tahun, yakni 143.849 unit kendaraan pada tahun 2010 meningkat menjadi 430.177 unit kendaraan. Meskipun demikian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebenarnya terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor sebesar 2,6% atau sejumlah 11.531 unit kendaraan.



Gambar 2.110  
Grafik Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Jumlah panjang jalan yang cenderung tetap dan jumlah kendaraan yang terus meningkat menyebabkan nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 memiliki kecenderungan menurun namun kembali meningkat di tahun 2015. Hal ini disebabkan jumlah kendaran yang bertambah setiap tahunnya cukup besar dan tidak sebanding dengan pertambahan panjang jalan yang ada. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

2. **Rasio Jumlah Angkutan Umum yang Melewati Kota Yogyakarta Per 1000 Penduduk**

Rasio jumlah angkutan darat per penumpang angkutan darat adalah angka yang memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio jumlah angkutan darat adalah jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat pada tahun tersebut.

**Tabel 2.225**  
**Rasio Jumlah Angkutan Darat per Penumpang Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan darat	Unit	10.643	10.985	11.737	12.011	11.663	12.803	3,765
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa	2.658.359	2.471.342	2.324.913	2.488.859	2.364.416	2.121.076	-4,415
3.	Rasio jumlah angkutan darat dengan penumpang angkutan darat	Unit/Jiwa	0,0040	0,0044	0,0050	0,0048	0,0049	0,0060	8,447

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Mulai tahun 2010 hingga tahun 2015, jumlah penumpang angkutan darat cenderung mengalami penurunan jumlah, meskipun demikian jumlah unit angkutan darat di Kota Yogyakarta tidak serta merta mengalami penurunan yang sama, namun cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Di

tahun 2015 jumlah kendaraan cenderung meningkat dari yang semula di tahun 2010 hanya berjumlah 10.643 unit menjadi 12.803 unit di tahun 2015. Kenaikan jumlah ini memperbesar rasio jumlah angkutan darat dengan penumpang angkutan yang semula di tahun 2010 menunjukkan rasio 0,004 menjadi 0,006 di tahun 2015.

3. Jumlah Penumpang dan Barang yang Melalui Terminal dan Stasiun

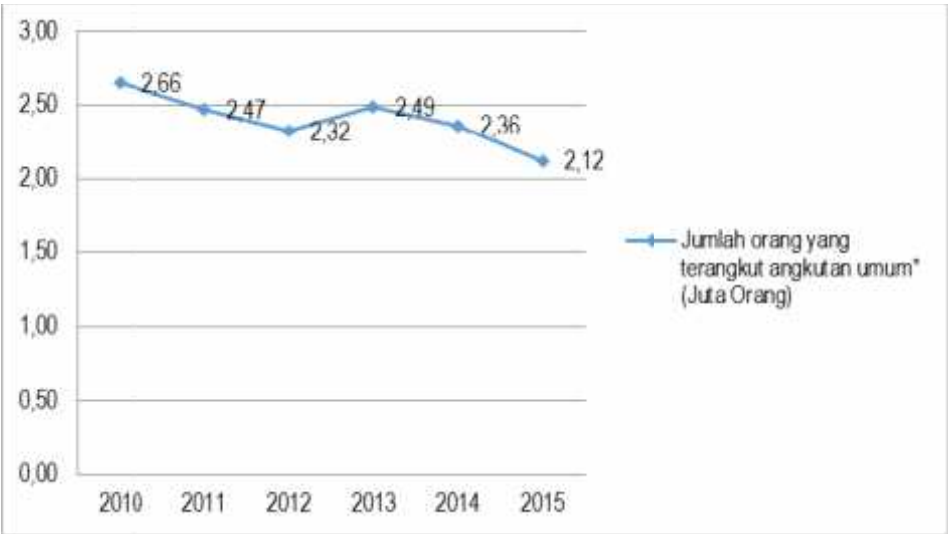
Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (cargo). Jumlah penumpang bis melalui terminal di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -4,42% per tahun, yakni 2.658.359 orang pada tahun 2010 menurun menjadi 2.121.076 orang pada tahun 2015.

Tabel 2.226  
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta  
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah orang yang melalui terminal per tahun	Jiwa	2.658.359	2.471.342	2.324.913	2.488.859	2.364.416	2.121.076	-4,42

Sumber :  
1. SIPD Numerik Tahun 2014, dengan Hasil Olahan (Data Tahun 2010-2014)  
2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan (Data Tahun 2015)

Data mengenai indikator jumlah arus penumpang angkutan umum diperoleh dari jasa ruang tunggu terminal (Terminal Giwangan), bukan dari penjualan karcis sehingga tidak diketahui apakah penumpang tersebut menggunakan jasa bis antar kota atau dalam kota, sehingga diduga masih banyak penumpang angkutan umum (bis khususnya) yang tidak terhitung. Dengan kata lain, jumlah arus penumpang angkutan umum masih lebih tinggi lagi apabila dibandingkan dengan data yang terdata oleh Dinas Perhubungan tersebut, karena penumpang bis yang tidak turun ke ruang tunggu (tetap berada di dalam bis) tidak dihitung.



**Gambar 2.111**  
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun 2010 hingga tahun 2013 memiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan menurun, yakni 3.319.151 penumpang pada tahun 2010 menurun menjadi 2.740.104 penumpang pada tahun 2014. Jumlah penumpang kelas eksekutif memiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan meningkat pada tahun yang sama (tahun 2010 hingga tahun 2014) yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,14% per tahun, sedangkan dua kelas lainnya yakni kelas bisnis dan ekonomi memiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan menurun yakni secara berurutan memiliki pertumbuhan rata-rata -6,76% dan -7,36% per tahun. Sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang kereta dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -4,68% per tahun.

**Tabel 2.227**  
**Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelasnya Tahun 2010-2014**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah penumpang kelas eksekutif	Orang	708.470	676.838	697.261	775.144	801.674	3,14
2.	Jumlah penumpang kelas bisnis	Orang	781.112	718.224	612.806	590.776	590.661	-6,75
3.	Jumlah penumpang kelas ekonomi	Orang	1.829.569	1.656.352	1.338.660	1.263.593	1.347.769	-7,36
4.	Total penumpang melalui stasiun	Orang	3.319.151	3.051.414	2.648.727	2.629.513	2.740.104	-4,68

*Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2015, Badan Pusat Statistik*

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta juga mengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlah bahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada tahun 2010 hingga tahun 2014, yakni sebanyak 326.233 ton pada tahun 2010 menurun menjadi 208.969 ton pada tahun 2014. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun, yakni sebanyak 2.234 ton pada tahun 2010 meningkat menjadi 13.040 ton pada tahun 2014 (pertumbuhan rata-rata 55,43% per tahun).

**Tabel 2.228**  
**Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Bahan bakar minyak	Ton	326.233	159.242	166.154	214.456	195.929	-11,97
2.	Barang hantaran potongan	Ton	2.234	7.206	11.170	12.465	13.040	55,43
3.	Total angkutan barang melalui terminal	Ton	328.467	166.448	177.324	226.921	208.969	-10,69

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2015, Badan Pusat Statistik

**B. Penataan Ruang**

Dalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 ini terdapat enam indikator, yakni ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Seperti halnya dengan urusan yang lain, terdapat indikator yang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Yogyakarta, seperti indikator luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan, sehingga indikator wilayah perkotaan pada urusan penataan ruang ini ditiadakan. Indikator tersebut lebih relevan apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten. Selain itu juga terdapat beberapa indikator yang menggunakan data isian yang lain, yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

**1. Persentase Luas Wilayah Produktif**

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah produktif adalah peerbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sebagai

wilayah perkotaan, wilayah produktif di Kota Yogyakarta didekati dengan penjumlahan luasan jenis penggunaan lahan perumahan, jasa, perusahaan, industri, dan pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

**Tabel 2.229**  
**Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah luas wilayah produktif	Ha	2.841,72	2.841,72	2.842,89	2.843,40	2.827,5	-0,10
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	-
3.	Persentase luas wilayah produktif	%	87,44	87,44	87,47	87,49	87	-0,10

Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2011-2015, dengan Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembanding dalam indikator luas wilayah produktif merupakan data yang bersumber dari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Jumlah luas wilayah produktif di Kota Yogyakarta berbanding lurus dengan persentase luas wilayah produktif yang dihasilkan, yakni memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,02% per tahun namun mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi seluas 2.827,5 ha, sehingga memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -0,1% per tahun. Secara karakteristik wilayah, indikator yang lebih tepat digunakan untuk wilayah Kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan indikator persentase penggunaan lahan hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penggunaan lahan.

**Tabel 2.230**  
**Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

Peruntukan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
Perumahan	%	64,78	64,75	64,77	64,64	64,68	-0,04
Jasa	%	8,60	8,60	8,60	8,63	8,65	0,15
Perusahaan	%	8,80	8,91	9,05	9,25	9,33	1,47
Industri	%	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	-
Pertanian	%	3,65	3,57	3,44	3,36	3,25	-2,86
Non Produktif	%	0,62	0,62	0,58	0,57	0,54	-3,39
Lain-lain	%	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	-
Jumlah	%	100	100	100	100	100	-

Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2011-2014, dengan Hasil Olahan

Tabel di atas mengindikasikan bahwa peruntukan perumahan memiliki luasan yang menurun dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013, meskipun demikian di tahun 2014 luas peruntukkan permukiman justru mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan menjadi 64,68%. Sehingga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan rata-rata untuk luasan perutukkan perumahan sebesar -0,04% per tahun. Luasan yang menurun juga ditunjukkan oleh pertanian dan non produktif, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,86% (peruntukan pertanian) dan -3,39% (peruntukan non produktif). Terdapat dua peruntukan lahan yang meningkat dalam kurun waktu yang sama (tahun 2010 hingga tahun 2014), yakni jasa (dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,15% per tahun), dan peruntukan perusahaan (dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,47% per tahun), sedangkan peruntukan lainnya memiliki luasan yang sama dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 yakni peruntukan industri dan peruntukan lainnya.

2. Persentase Luas Wilayah Industri

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah industri adalah peerbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sama halnya dengan indikator luas wilayah produktif, perhitungan jumlah luas wilayah industri juga menggunakan sumber data dari publikasi Badan Pusat Statistik.

**Tabel 2.231**  
**Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2014**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah luas wilayah industri	Ha	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.	Persentase luas wilayah industri	%	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2011-2015, dengan Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembanding dalam indikator luas wilayah industri juga bersumber dari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Baik jumlah luas wilayah industri maupun persentase luas wilayah industri menunjukkan nilai yang sama dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014, dengan nilai persentase luas wilayah industri sebesar 1,61%.

Luas wilayah industri di Kota Yogyakarta relatif kecil karena sektor industri memang bukanlah sektor utama dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Wilayah industri di Kota Yogyakarta lebih banyak berupa sentra-sentra industri skala rumah tangga dan bukan industri skala besar dengan pabrik yang modern. Menurut informasi yang diperoleh, seharusnya tidak ada lagi wilayah industri di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan wilayah industri telah dipindahkan ke daerah pinggiran kota, misalnya ke wilayah Piyungan.

3. Persentase Luas Wilayah Genangan

Indikator luas wilayah banjir sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah dengan membandingkan antara jumlah wilayah banjir dengan jumlah luas wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Tidak didapatkan data mengenai data luas wilayah banjir, sehingga data mengenai luas wilayah banjir diganti dengan data luasan daerah rawan genangan.

Tabel 2.232  
Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Yogyakarta  
Tahun 2013-2015

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015
1.	Luasan daerah rawan genangan	Ha	10,297	10,297	10,297
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	3.250	3.250	3.250
3.	Persentase luas wilayah genangan	%	0,32	0,32	0,32

Sumber :  
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tahun 2013-2014  
2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tahun 2016 (Data tahun 2015)

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembanding dalam indikator luas wilayah industri juga bersumber dari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013 dan 2015 jumlah luas daerah rawan genangan di Kota Yogyakarta tetap yakni seluas 10,297 hektar. Sedangkan luas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2013 hingga tahun 2015 juga stagnan yakni seluas 3.249,99 hektar. Sehingga persentase luas wilayah genangan yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun 2013 hingga tahun 2015 adalah sebesar 0,32%.

Tabel 2.233  
Jumlah Titik Genangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah genangan	Titik	60	57	51	45	35	31

Sumber :  
1. SIPD Numerik Tahun 2014 (Data Tahun 2010-2013)  
2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2016 (Data Tahun 2014-2015)

Jumlah titik genangan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun, yakni 60 titik pada tahun 2010 menurun menjadi 31 titik pada tahun 2015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada usaha yang cepat dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk memperbaiki sistem pembuangan air hujan agar genangan-genangan yang terjadi setelah hujan dapat diminimalisir. Adapaun rata-rata lama genangan terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah 1 jam dengan total luas genangan sebesar 7,68 hektar.

C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pertumbuhan rata-rata jumlah bank umum dan BPR secara umum pada rentang tahun 2010-2014 adalah sebesar -5,5%. Pertumbuhan yang negatif ini disebabkan berkurangnya KCP Bank Umum yang cukup drastis pada tahun 2011-2012, dari 160 unit di tahun 2011 menjadi 87 unit di tahun 2012. Sedangkan secara keseluruhan pada tahun 2013-2014, BPR mengalami pertumbuhan lebih besar dibandingkan dengan bank umum, terutama pada KC BPR. Pertumbuhan BPR yang lebih tinggi ini salah satunya diakibatkan oleh bunga pinjaman yang disediakan oleh BPR lebih kecil dibandingkan dengan bank umum sehingga banyak masyarakat yang menggunakan BPR dibandingkan bank umum untuk memperoleh pinjaman.

Tabel 2.234  
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2011-2015

Variabel	Satuan	Per Desember 2011	Per Desember 2012	Per Desember 2013	Per Desember 2014	Per November 2015	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
KC Bank Umum	unit	39	42	44	45	46	4,21
KCP Bank Umum	unit	160	87	88	87	87	-14,13
KK Bank Umum	unit	37	40	41	43	43	3,83
KP BPR	unit	9	9	9	9	10	2,67
KC BPR	unit	1	4	6	7	7	62,66
KK BPR	unit	10	12	12	12	12	4,66
Jumlah	unit	256	194	200	203	205	-5,5

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2011-2014 dan November 2015 (Bank Indonesia:2011-2015); dengan Hasil Olahan, 2016

2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berdasarkan fungsinya, terdapat empat kategori perusahaan asuransi di Kota Yogyakarta yang meliputi asuransi jiwa, kredit, kerugian dan lainnya. Data jumlah perusahaan asuransi pada tabel 4.2.3.B.1 merupakan jumlah perusahaan yang mendapatkan izin berdiri pada tahun 2011-2014 dan bukan merupakan data akumulasi jumlah perusahaan asuransi di Kota Yogyakarta. Pada rentang tahun tersebut, jumlah perusahaan asuransi terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 22,3%/tahun dengan jumlah asuransi paling banyak yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung kerugian finansial akibat meninggalnya seseorang atau terlalu lamanya hidup seseorang.

Tabel 2.235  
Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Jenis Perusahaan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Asuransi Jiwa	unit	9	11	13	13	14	11,68
Asuransi Kredit	unit	0	0	0	1	1	
Asuransi Kerugian	unit	3	6	8	8	8	27,79
Asuransi Lainnya	unit	2	5	5	6	9	45,65
Jumlah	unit	14	22	26	28	32	22,96

Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

3. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Dari tahun 2011-2015, keberadaan beberapa jenis restoran, baik restoran, kafe, maupun jasa boga menunjukkan pertumbuhan positif. Secara keseluruhan, jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 5,65%/tahun. Perkembangan jasa boga adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan perkembangan jenis restoran lainnya.

Tabel 2.236  
Jumlah Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Jenis Restoran	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Restoran	unit	275	271	280	313	328	4,50
Kafe	unit	15	2	20	16	20	7,46
Jasa Boga	unit	84	86	92	103	118	8,87
Jumlah	unit	374	359	392	432	466	5,65

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2016

4. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terkenal dengan wisata budayanya banyak menarik wisatawan dari luar daerah Kota Yogyakarta sehingga keberadaan penginapan/hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Oleh karenanya, pertumbuhan hotel/penginapan di kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif seiring semakin berkembangnya pariwisata Kota Yogyakarta.

Terdapat dua jenis hotel yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu hotel berbintang dan hotel non bintang/Melati. Selama rentang tahun 2011-2015, jumlah hotel Mlati jauh lebih banyak dibandingkan dengan hotel berbintang. Pada tahun 2015, jumlah hotel Melati di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 367 unit sedangkan hotel bintang adalah sebanyak 41 unit. Akan tetapi, apabila dilihat dari pertumbuhan rata-ratanya, diketahui bahwa pertumbuhan hotel bintang (10,00 %/tahun) relatif lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata hotel Mlati yang hanya sebesar 5,88 %/tahun.

Tabel 2.237  
Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Hotel Bintang	Unit	28	31	38	38	41	10,00
	Hotel Bintang 5	Unit	3	3	3	3	4	7,46
	Hotel Bintang 4	Unit	4	4	5	5	6	10,67
	Hotel Bintang 3	Unit	7	9	10	10	9	6,48
	Hotel Bintang 2	Unit	2	3	11	11	11	53,14
	Hotel Bintang 1	Unit	12	12	9	9	11	-2,15
2	Hotel Non Bintang/ Melati	Unit	292	314	330	353	367	5,88
Jumlah		Unit	320	345	368	391	408	6,26

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2015: dengan Hasil Olahan, 2015.

D. Komunikasi dan Informatika

Urusan terakhir pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam aspek daya saing daerah ini memiliki tiga indikator, yakni indikator rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, serta indikator persentase penduduk yang menggunakan *handphone*/telepon. Sama halnya dengan indikator-indikator sebelumnya, terdapat indikator yang tidak relevan apabila digunakan untuk lingkup perkotaan seperti Kota Yogyakarta, yakni indikator mengenai persentase penduduk yang menggunakan *handphone*/telepon, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator tersebut ditiadakan. Sedangkan indikator rumah tangga yang menggunakan listrik sudah dibahas dalam urusan perumahan pada fokus layanan urusan wajib.

1. Persentase Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

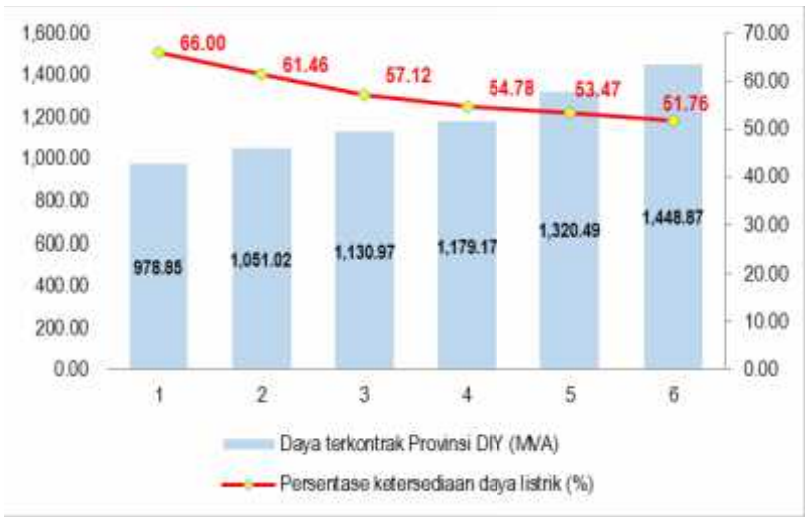
Tabel 2.238  
Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Daya listrik terpasang	MVA	646,00	646,00	646,00	646,00	706,00	750,00	3,03
2.	Daya terkontrak Provinsi DIY	MVA	978,85	1.051,02	1.130,97	1.179,17	1.320,49	1.448,87	8,16
3.	Persentase ketersediaan daya listrik	%	66,00	61,46	57,12	54,78	53,47	51,76	(4,74)

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Daya listrik terpasang di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013 memiliki daya 646 MVA kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 706 MVA dan kembali naik di tahun 2015 sebesar 750 MVA, sehingga setiap tahun rata-rata pertumbuhan daya listrik terpasang di Kota Yogyakarta mencapai 3,03%. Kondisi ini dihadapkan dengan jumlah kebutuhan listrik dalam kurun waktu yang sama selalu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,16% per tahun, yakni 987,85 MVA pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.448,87MVA pada tahun 2015. Kenaikan besaran daya

listrik terpasang dan juga disertai dengan pertumbuhan rata-rata kebutuhan listrik yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan rasio ketersediaan daya listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, yakni sebesar 66% pada tahun 2010 menurun menjadi 51,76% atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar - 4,74 per tahun.



**Gambar 2.112**  
**Grafik Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kota berkewajiban untuk mengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

**2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Pertumbuhan suatu daerah sangat tergantung dari kemampuan investasi. Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan. Pemerintah hendaknya memiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Kota Yogyakarta yang sudah sangat padat tentunya tidak memungkinkan lagi untuk memiliki kawasan industri. Namun demikian Kota Yogyakarta perlu meningkatkan investasi daerah dengan melalui pelayanan jasa. Sesuai dengan visi dan misi yang

dicanangkan melalui RPJPD 2005-2025 tentunya sudah memberikan arahan untuk memperbesar investasi di bidang pelayanan jasa.

**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Dukungan *goodwill* dan *political will* untuk meningkatkan investasi di bidang pelayanan jasa tidak terlepas dari *image* pelayanan SKPD. Pada implementasi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diusahakan oleh daerah. Terkait dengan upaya meningkatkan iklim investasi lebih dekat dengan urusan yang bersifat konkuren atau pilihan. Keunggulan daerah khususnya dalam komoditas yang dapat mendongkrak investasi perlu dimunculkan. Jasa merupakan bagian komoditas unggulan yang dapat ditingkatkan di Kota Yogyakarta. Jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa lainnya merupakan pintu masuk investasi yang dapat ditingkatkan. Setidaknya menyambungkan antara kekayaan budaya, pariwisata, pendidikan, tata kehidupan yang tertib, aman dan damai sebagai prakondisi dalam peningkatan investasi merupakan modal dasar yang penting.

**1. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk**

Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali dari kekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu ditumbuhkembangkan. Berikut adalah tabel mengenai angka kriminalitas di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.239

Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	995	764	457	2.078	1.956	2002
Jumlah Penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	409.487
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Kasus	21,74	17,36	10,69	51,1	47,25	48,89

Sumber : Polresta Kota Yogyakarta 2015

Data angka kriminalitas di tahun 2013 dan 2014 dalam tabel di atas merupakan jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta yang dicatat oleh Polresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Dilihat dari data di atas terjadi fluktuasi tindak kriminalitas sejak tahun 2010 hingga 2015, pernah menurun drastis pada tahun 2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara itu

menurun lagi pada tahun 2014. Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan cara perhitungan, perhitungan angka kriminalitas di tahun 2010 hingga 2012 berbeda dengan cara perhitungan di tahun 2013, 2014 dan 2015. Angka kejahatan yang relatif tinggi akan dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Tentunya angka tersebut harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Kota Yogyakarta yang aman akan menimbulkan daya tarik investasi.

2. Jumlah Demo

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Di satu sisi unjuk rasa merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik, namun di sisi lain demonstrasi menjadi sebuah aktivitas yang menimbulkan gangguan baik kecil maupun besar terhadap rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politis oleh kepentingan kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah demonstrasi di Kota Yogyakarta tahun 2010 hingga 2015 mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

Tabel 2.240  
Jumlah Demo di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Demo dalam 1 Tahun	Kasus	218	197	158	122	108	135

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta 2015, \*=SIPD Numerik 2014

Jumlah demonstrasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, akan tetapi cenderung menurun. Jika dilihat secara sepihak untuk memanfaatkan stabilitas sosial ekonomi akan dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi. Namun jika dilihat dari dinamika masyarakat dalam berpolitik hal ini dapat pula diartikan penurunan responsivitas terhadap perkembangan kekinian. Hal ini sangat dimungkinkan ketika masyarakat lebih fokus kepada kepentingan sendiri dibandingkan dengan upaya untuk memperjuangkan rakyat. Terlepas dari masalah tersebut turunnya angka demonstrasi ini juga dapat dibaca dari perspektif positif bahwa kemungkinan kebijakan pemerintah sudah diterima masyarakat luas.

3. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan sebuah instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Jenis perizinan yang dianalisis dalam indikator ini diantaranya:

- 1. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
- 2. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
- 3. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
- 4. IUI : Izin Usaha Industri
- 5. TDI : Tanda Daftar Industri
- 6. HO : Izin Gangguan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, lama proses mengurus perizinan dalam rentang waktu 2010 hingga 2015 tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan lama proses perizinan terjadi untuk jenis izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang prosesnya dipangkas dari yang semula empat hari menjadi tiga hari masa kerja. Perubahan juga terjadi untuk jenis IUI/TDI, ditahun 2010 memerlukan delapan hari untuk mengurus izin IUI/TDP, di tahun 2011 dan 2012 berubah menjadi enam hari, dan di tahun 2013 dan setelahnya berubah menjadi tujuh hari. Untuk izin mendirikan bangunan yang semula 42 hari pada tahun 2010 hingga 2015 diperbaiki hanya menjadi 10 hari mulai pada tahun 2010.

Tabel 2.241  
Lama Proses Perizinan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian						
	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IMB							
Bangunan sederhana	Hari	10	10	10	10	10	10
Bangunan tidak pakai hitungan konstruksi	Hari	14	14	14	14	14	14
Bangunan pakai hitungan konstruksi	Hari	17	17	17	17	17	17
Gangguan kecil dan sedang (non tim)	Hari	8	8	8	8	8	8
Gangguan besar	Hari	11	11	11	11	11	11
HO							
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Hari	3	3	3	3	3	3
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	Hari	4	3	3	3	3	3

Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian						
	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IUI (Izin Usaha Industri)/TDI (Tanda Daftar Industri)	Hari	8	6	6	7	7	7

Sumber :Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2015

Secara umum lama izin untuk pengurusan sebuah usaha masih relatif panjang. Belum ada perubahan yang berarti sejak Kota Yogyakarta menyandang prestasi sebagai percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang efisien. Evaluasi perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan perizinan. Terkait dengan jumlah perizinan yang dilakukan dalam satu pintu juga perlu dicermati agar dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga iklim investasi dapat tetap meningkat terus.

#### 4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. Pajak yang mengalami perubahan pengelolaan ini antara lain adalah PBB dan pajak BPHTB. Pada tahun 2015, pajak yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, BPHTB dan PBB. Sedangkan retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 meliputi pelayanan kesehatan; persampahan; penggantian biaya cetak KTP dan Akta capil; pemakaman, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah; tempat parkir khusus; rumah potong hewan;

pengelolaan air limbah; penjualan produksi usaha daerah; IMBB, ijin gangguan; perijinan usaha bidang pariwisata; dan retribusi terminal.

**Tabel 2.242**  
**Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

Variabel	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pajak Daerah	jenis	10	11	11	10	10	0,00
Retribusi Daerah	jenis	15	15	15	16	16	1,63
Jumlah	jenis	25	26	26	26	26	0,99

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

Ditinjau dari besaran nilai realisasi pajak dan retribusi yang diterima oleh Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2011-2015, penerimaan yang ada terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,15%/tahun. Pada tahun 2011, nilai pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 154,8 milyar rupiah dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 344,8 milyar rupiah. Apabila dilihat dari perkembangan masing-masing pajak maupun retribusi, perkembangan yang relatif lebih besar dialami oleh pajak daerah dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 26,09%/tahun dibandingkan dengan penerimaan retribusi yang hanya meningkat sebesar 4,06%/tahun. Sejak tahun 2011-2015, pajak daerah banyak dihasilkan oleh pajak hotel. Sedangkan retribusi tertinggi dihasilkan oleh retribusi pelayanan pasar.

**Tabel 2.243**  
**Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Pajak Daerah	Juta Rupiah	120.457,5	207.703,5	227.748,9	253.461,9	304.434,5	26,09
2	Retribusi Daerah	Juta Rupiah	34.408,4	38.770,6	40.338,7	56.095,9	40.349,2	4,06
	Jumlah	Juta Rupiah	154.866,0	246.474,1	268.087,6	309.557,8	344.783,70	22,15

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

**5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha**

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu goodwill dan political will pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya

insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 jumlah Perda di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi.

**Tabel 2.244**  
**Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Buah	23	27	34	23	24	28

Sumber :Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta 2015

Ada empat buah perda yang mendukung iklim usaha yang merupakan perda baru (tambahan dari tahun 2014). Keempat perda tersebut adalah ditetapkan

1. Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015- 2035.  
Ditetapkan tanggal 2 Februari 2015,  
Diundangkan tanggal 2 Februari 2015
2. Penyelenggaraan Reklame  
Ditetapkan tanggal 18 Mei 2015,  
Diundangkan tanggal 18 Mei 2015
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025  
Ditetapkan tanggal19 Mei 2015,  
Diundangkan tanggal 19 Mei 2015
4. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah  
Ditetapkan tanggal 22 Oktober 2015,  
Diundangkan tanggal 22 Oktober 2015

Fluktuasi jumlah perda yang mengatur tentang lalu lintas barang dan jasa dapat memberikan kejelasan tentang investasi yang penting dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Jaminan batasan waktu, kejelasan tentang hak dan kewajiban dalam pengusahaan bidang usaha tertentu adalah sangat penting. Dengan demikian perekonomian bisa tumbuh dengan didukung oleh kebijakan yang positif.

#### **2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **A. Ketenagakerjaan**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan tokoh utama yang berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

##### **1. Rasio Lulusan S1/S2/S3**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta. Pemaparan data dapat dilihat pada Tabel yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2015 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013, rasio lulusan ini hanya mencapai 1.530 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2015 rasionya bertambah menjadi 1.643 per 10.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan perubahan yang positif, apabila melihat dari pertumbuhan rata-rata per tahunnya yang sejumlah 3,69% pertahun.

Tabel 2.245  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3	Jiwa	62.218	63.196	67.268	4,01
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	406.660	413.936	409.487	0,36
3	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3		1.530	1.527	1.643	3,69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2011-2015; dengan Hasil Olahan, 2016

Tabel di bawah memaparkan data yang bersumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tabel tersebut dapat dilihat data rasio lulusan S1/S2/S3 yang didapat dari perhitungan jumlah kartu pencari kerja (AK-1) atau yang biasa disebut kartu kuning yang dikeluarkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 yang mengajukan permohonan penerbitan kartu AK-1 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2015 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2010, rasio lulusan ini hanya mencapai 86 sampai 87 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2015 rasionya bertambah menjadi 135 hingga 136 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.246  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jiwa	3.970	6.337	1.797	3.274	5.599	35,30
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	457.668	440.143	427.591	406.660	413.936	-2,45
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3		86,74	143,98	42,03	80,51	135,26	38,69

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2015,: dengan Hasil Olahan, 2016

2. Rasio Ketergantungan

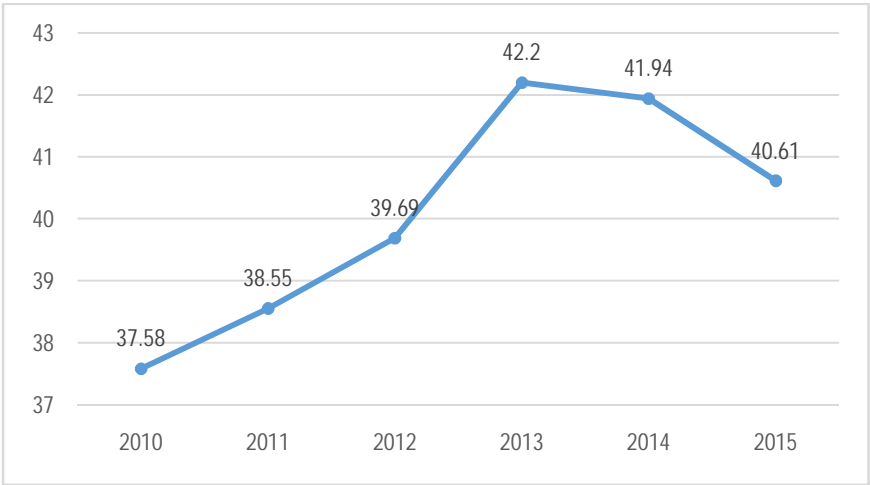
Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah 41,94%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif)mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2010 hingga

2014, rasio ketergantungan ini terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,8%/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Yogyakarta semakin besar setiap tahunnya.

Tabel 2.247  
Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	125.010	122.470	121.490	120.627	122.318	118.261	-1,09
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	332.657	317.673	306.101	285.827	291.648	291.226	-2,58
3	Rasio Ketergantungan		37,58	38,55	39,69	42,20	41,94	40,61	1,62

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta 2016: dengan Hasil Olahan.



Gambar 2.113  
Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015  
Sumber : Hasil Olahan. 2016

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. Terdapat empat komponen yang dapat mencerminkan IPM yakni: angka harapan hidup yang menjadi wakil bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Selama tahun 2010-2014 perkembangan IPM Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari 82,72 tahun 2010 menjadi 83,78 tahun 2014. Angka

IPM Kota Yogyakarta selama tahun 2010 hingga tahun 2014 selalu berada di atas angka IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun angka rata-rata IPM nasional. IPM yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa capaian hasil pembangunan di Kota Yogyakarta yang dicerminkan dari tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak maka capaian hasil pembangunan manusia di Kota Yogyakarta cukup baik. Pada tahun 2010 IPM Kota Yogyakarta jauh di atas IPM nasional sebesar 75,37. Demikian pula tahun 2014 IPM mencapai 83,78, sementara IPM IPM Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 76,81. IPM Kota Yogyakarta berada pada kategori tinggi/atas ( $IPM \geq 80$ ).

Meskipun IPM Kota Yogyakarta selalu berada di atas IPM Provinsi D.I. Yogyakarta dan nasional, namun laju pertumbuhan rata-rata per tahun lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata IPM nasional maupun Kota Yogyakarta. Lambatnya kenaikan IPM Kota Yogyakarta dimungkinkan karena berbagai fasilitas sosial ekonomi yang sudah sulit untuk dikembangkan secara cepat karena kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sementara angka usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli cenderung meningkat.

**Tabel 2.248**  
**IPM Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan 2010-2014 (%/tahun)
Kota Yogyakarta	82,72	82,98	83,29	83,61	83,78	0,265
Provinsi D.I. Yogyakarta	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81	0,36

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2015

Kebijakan pembangunan sosial, karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentu keberhasilan capaian pembangunan manusia.

## **2.2. Permasalahan Pembangunan**

### **2.2.1. Bidang Sosial**

#### **A. Kependudukan dan Catatan Sipil**

##### **1. Belum semua penduduk memiliki akte kelahiran**

Data menunjukkan bahwa kepemilikan akte kelahiran warga Kota Yogyakarta yang tercatat memiliki adalah 93,17%. Masih adanya sekitar 6,83% warga Kota Yogyakarta yang belum memiliki dimungkinkan terjadi karena kelompok usia di atas 50 tahun mungkin belum memiliki akte kelahiran namun masih berupa surat kenal lahir. Sedangkan untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sudah melakukan upaya seperti “jemput bola” sehingga penduduk menjadi sadar mengenai arti penting kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini dikarenakan, akte kelahiran dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan serta untuk mendapatkan pelayanan sosial ekonomi lainnya, seperti untuk pendaftaran sekolah.

##### **2. Fluktuatifnya angka mutasi kependudukan**

Kajian kependudukan memposisikan angka kelahiran dan kematian sebagai komponen internal dalam perhitungan data dasar kependudukan. Data menunjukkan bahwa angka mutasi kelahiran dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sementara itu, angka mutasi kematian menunjukkan angka yang relatif konstan dengan jumlah kematian di kisaran angka 2.000an. Kondisi ini menggambarkan bahwa angka kelahiran yang semakin bertambah dipengaruhi oleh jumlah pasangan usia subur, ataupun boleh jadi indikasi adanya kasus pernikahan dini yang semakin bertambah.

Dalam kajian kependudukan perkotaan, satu aspek yang seringkali digunakan sebagai parameter pembangunan perkotaan adalah angka migrasi penduduk di sebuah Kota. Bagi Kota Yogyakarta, angka migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar sampai dengan tahun 2011. Namun, kondisi berkebalikan dapat dilihat di tahun 2010, 2012, dan 2013 yang mana angka migrasi keluar ternyata menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan angka migrasi masuk. Kondisi demikian disebabkan karena penduduk lebih memilih untuk berpindah domisili dan menetap di kabupaten-kabupaten sekitar Kota Yogyakarta.

Secara umum, wilayah perkotaan menghadapi permasalahan di bidang daya dukung dan daya tampung wilayah. Apabila dilihat dari rerata angka kepadatannya, terdapat beberapa kecamatan yang besaran

kepadatan penduduknya melampaui angka kepadatan Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan Jetis, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, dan Mergangsan. Sementara itu, terdapat tiga kecamatan yang angka kepadatan penduduknya lebih kecil dari angka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan Gondokusuman, Umbulharjo, dan Kotagede. Hal yang menarik adalah adanya satu pola penurunan angka kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini diduga karena adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk mulai tahun 2011, 2012, dan 2013 yang disebabkan adanya kebijakan e-KTP dengan pencatatan domisili tunggal kepada para warga negara. Selain itu, ditengarai bahwa penambahan kawasan terbangun (*built-up areas*) nampaknya menyebabkan warga untuk berpindah tempat tinggal. Oleh karena itu, ditengarai bahwa saat ini penduduk lebih memilih untuk bertempat tinggal di luar wilayah administrasi Kota Yogyakarta namun secara relatif masih dapat menjangkau fasilitas-fasilitas kota yang ditawarkan oleh Kota Yogyakarta.

Sementara itu, angka migrasi masuk ternyata lebih besar dibandingkan angka migrasi keluar di tahun 2014. Kondisi ini nampaknya disebabkan oleh faktor daya tarik kota yang menawarkan berbagai fasilitas kota, seperti fasilitas pendidikan, ekonomi, ataupun hunian/permukiman.

## B. Kesehatan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya dari aspek kesehatan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat tersebut, antara lain angka kematian ibu, bayi, balita, prevalensi gizi buruk, dan usia harapan hidup.

**Angka Kematian Bayi (AKB)** memiliki kecenderungan yang selalu **meningkat** dari tahun ke tahun sejak 2007 hingga 2014 yaitu dari 3,02 menjadi 14,19. Adanya kematian bayi menunjukkan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat terutama pada golongan rawan yaitu remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi. Berdasarkan hasil FGD dengan pihak Dinas Kesehatan, kasus kematian bayi ini disebabkan oleh banyak faktor, beberapa di antaranya adalah kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan persepsi yang muncul pada remaja putri dan ibu hamil yaitu tentang bentuk tubuh yang ideal, serta masih rendahnya kesadaran untuk pemeriksaan kehamilan sesuai standar (K4 standar). Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya

asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab risiko kematian bayi waktu lahir. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Sedangkan persepsi yang salah tentang bentuk tubuh yang ideal dapat menyebabkan seseorang membatasi asupan makannya, hal ini dapat menyebabkan anemia pada kelompok tersebut dan sangat beresiko pada janin ketika terjadi kehamilan.

Keracunan kehamilan juga menjadi salah satu sebab kematian bayi selain kematian ibu, namun faktor ini sulit untuk diprediksi karena muncul pada detik-detik menjelang persalinan. Penyebab kematian bayi juga dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan risiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Berdasarkan data dari RSUD Kota Yogyakarta, *mild and moderat birth asphyxia* menjadi diagnosis rawat inap tertinggi sejak 3 tahun belakangan ini (2012-2014).

Selain itu juga diakui bahwa masih kurangnya fasilitas *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di sarana kesehatan rujukan. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan terlambatnya penanganan komplikasi neonatal atau bayi baru lahir. Diungkapkan juga oleh pihak Dinas Kesehatan bahwa kematian bayi biasanya disebabkan karena 3T (terlambat mengenali dan mengambil keputusan, terlambat rujukan, dan terlambat penanganan di fasilitas rujukan). Pemerintah Kota Yogyakarta berencana akan membangun NICU di Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khusus bayi di Kota Yogyakarta. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini juga sedang membangun RS Pratama setara tipe D untuk mempermudah pelayanan standar rujukan, sekaligus untuk peserta BPJS.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2014 sebesar 45,8 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan masih adanya kasus kematian pada ibu melahirkan. Angka Kematian Ibu di tahun 2014 ini sudah sangat baik jika dibandingkan tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 204,3. Pada dasarnya penurunan AKI Kota Yogyakarta jika dibandingkan dengan target MDG's 2015 telah berhasil tercapai. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk menekan angka kematian ibu tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan, hal ini tidak selalu dapat diartikan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan di sektor kesehatan tidak mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab peningkatan angka kematian bayi dan masih terdapatnya kematian ibu melahirkan tersebut yakni individu yang meninggal dan tercatat di Kota Yogyakarta tersebut dimungkinkan penduduk Kota Yogyakarta, namun domisili di luar kota Yogyakarta.

Ada kemungkinan ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan tersebut mendapatkan penanganan dan pelayanan di fasilitas kesehatan di luar Kota Yogyakarta.

Banyak program kesehatan yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, namun berdasarkan data **masih terdapat kasus gizi buruk** dan kematian pada balita. Kedua indikator ini saling berkaitan. Peran gizi di masa pertumbuhan sangatlah penting. Anak yang tidak mendapat asupan gizi yang tepat dan cukup akan menjadikan dirinya rentan terhadap penyakit. Meskipun berdasarkan data, prevalensi gizi buruk di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan, angka tersebut dihitung dari jumlah balita yang ditimbang, sehingga masih dimungkinkan ada balita yang belum tercatat, sebaliknya mungkin penderita gizi buruk tersebut bukan penduduk Kota Yogyakarta. Pihak Dinas Kesehatan berharap, tidak hanya mencapai target namun sebisa mungkin kasus gizi buruk bisa ditekan hingga 0%. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain kualitas kehamilan yang buruk, kehamilan risiko tinggi dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi juga terjadi pada keluarga tergolong mampu. Hal ini dimungkinkan karena pola makan kurang tepat yang disebabkan salah satunya karena pola asuh telah beralih ke orang lain, sehingga orang tua kurang memperhatikan. Gizi buruk pada balita juga dapat disebabkan adanya penyakit penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi saat ini juga mengalami penurunan, karena adanya isu berkaitan agama dan kekhawatiran terkena efek samping dari vaksin, sehingga anak lebih rentan terkena penyakit dan berat badan rendah, bahkan kematian. Berdasarkan hasil FGD dengan pihak Dinas Kesehatan, kematian balita ini banyak disebabkan karena Demam Berdarah Dengue (DBD).

Jumlah penemuan kasus DBD secara umum meningkat dari 384 kasus di tahun 2012 menjadi 915 kasus pada tahun 2013 namun kembali menurun di tahun 2014 menjadi 418 kasus. Begitu pula dengan kasus tuberkulosis (TB) yang meningkat dari 245 kasus di tahun 2012 menjadi 428 kasus di tahun 2014. Kasus leptospirosis akhir-akhir ini juga mengalami peningkatan dari 8 kasus di tahun 2012 menjadi 26 kasus di tahun 2013, sedangkan tahun 2014 belum ada data resmi. Peningkatan kasus DBD dan leptospirosis disebabkan multifaktorial, misal dari faktor geografis, iklim, lingkungan sanitasi hingga individual. Kasus TB semakin meningkat dikarenakan adanya kemampuan petugas kesehatan dan surveilans yang cepat tanggap dengan pelaporan dan pencatatan yang semakin baik. Oleh karena itu, penanganan kasus penyakit menular perlu kerjasama lintas sektoral dengan berbagai dinas terkait, dan tidak saja perbaikan sarana prasarana fisik tetapi peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan.

**Penyakit tidak menular** masih menjadi salah satu problem yang harus dipikirkan juga. Data menyebutkan bahwa penyebab kematian terbesar di RSUD Kota Yogyakarta adalah penyakit-penyakit tidak menular (penyakit degeneratif) seperti stroke, penyakit jantung, sirosis hati, diabetes, dan gagal ginjal. Jumlah diagnosa rawat jalan pun didominasi oleh jenis penyakit-penyakit tersebut sejak tahun 2013. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemerintah untuk memperhatikan atau untuk meningkatkan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dan sehat (*healthy life style*). Penanaman *healty life style* harus dilakukan sejak dini, kontinyu dan diberikan fasilitas dan program yang mendukung, sehingga masyarakat bisa mencegah timbulnya penyakit degeneratif, yang akhir-akhir ini tidak saja mengenai usia lansia saja, tetapi sudah bergeser ke usia dewasa bahkan usia remaja.

Selain penyakit degeneratif tersebut, **penyakit gangguan jiwa berat dan gangguan mental emosional** ternyata menjadi permasalahan di DIY. DI. Yogyakarta menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai daerah yang memiliki penyandang gangguan jiwa berat (skizofrenia). Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2013, DI. Yogyakarta memiliki sekitar 16.000 orang yang hidup dengan skizofrenia dengan prevalensi skizofrenia 4,6 per 1000 penduduk (<http://www.ugm.ac.id/id/berita/10265kurangi.angka.gangguan.jiwa.di.diy.ugm.rintis.kader.keswa>). Jumlah kasus yang tinggi ini perlu mendapat perhatian di tingkat pemerintah kota. Peningkatan kasus gangguan jiwa ini terlihat pada jumlah kunjungan gangguan jiwa di rumah sakit dan puskesmas yang meningkat dari tahun ke tahun di Kota Yogyakarta. Tahun 2011 terdapat 5.770 kunjungan, tahun 2012 sebanyak 6.667 kunjungan, dan 9.656 kunjungan pada tahun 2013. Meskipun begitu, peningkatan jumlah kasus ini juga tidak lepas dari keberhasilan kader kesehatan jiwa (keswa) dalam mendeteksi dini gangguan jiwa di masyarakat. Hal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta mewujudkan Kampung Ramah Jiwa, di mana kampung tersebut memberikan penanaman pengetahuan deteksi dini gangguan jiwa serta manajemen penanganan jiwa di masyarakat. Selain itu, perlu usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kota Yogyakarta, dengan salah satunya menambah jumlah ruang publik agar masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga masyarakat tidak hanya sehat secara fisik namun juga secara psikis atau rohani terpenuhi kebutuhannya.

Permasalahan yang juga perlu diperhatikan adalah **peningkatan kasus HIV/AIDS** dari tahun ke tahun. Tahun 2010 penderita HIV/AIDS adalah sejumlah 23 orang, menjadi 55 di tahun 2011, dan semakin meningkat terus hingga 125 di tahun 2014. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena kerja tim yang lebih baik sehingga penemuan kasus bisa lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di seluruh Indonesia menurut Profil Kesehatan Indonesia 2013, berdasarkan peta endemik HIV, Pulau Jawa, Bali, dan Papua adalah 3 pulau yang memiliki jumlah

kasus terbesar yaitu >440 kasus bila dibandingkan pulau yang lainnya. Oleh karena itu, perlu penanganan agar kasus HIV/AIDS ini bisa ditekan, sehingga tidak memunculkan kasus baru.

Berdasarkan data dari RSUD, 10 besar diagnosis penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2014 didominasi oleh penyakit tidak menular yaitu stroke, DM tipe 2, penyakit jantung, dan ginjal. Begitu pula di tahun sebelumnya (2013) diagnosa terbanyak sebagai penyebab kematian adalah sama dengan tahun 2014. Penyakit tidak menular atau dikenal dengan istilah penyakit degeneratif memang sering menjadi satu permasalahan di daerah perkotaan atau daerah maju, akibat dari tingginya polusi udara, buruknya kualitas makan, dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa penyakit menular yang masuk 7 besar yaitu leptospirosis, septicaemia, dan TBC paru.

### **C. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Berdasarkan data, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini tidak digunakan untuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsi keluarga menurut BKKBN, di antaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, sehingga seharusnya persentase indikator ini diharapkan semakin menurun yang artinya status keluarga menjadi sejahtera, namun pada kenyataannya persentase semakin meningkat dari tahun 2009 hingga 2014. Perlu adanya upaya untuk mengaktifkan fungsi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama lintas sektoral yang baik diperlukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada.

Kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap informasi menjadi salah satu faktor penyebab cepatnya kematangan anak-anak usia remaja, dan pada usia tersebut seringkali belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kesehatan reproduksi. Kekhawatiran yang muncul dari permasalahan ini adalah kecenderungan terjadinya pernikahan usia dini tanpa dibarengi dengan kesiapan ilmu dan kesiapan mental para pelakunya. Kekhawatiran lain adalah mengenai kehamilan yang tidak diinginkan akibat ketidaksiapan dalam berumah tangga ataupun kesalahan pergaulan hingga mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adanya materi kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah belum ada sinkronisasi yang baik antara dinas-dinas terkait mengenai materi Kesehatan Reproduksi (kespro) pada anak sekolah sehingga program PIKR (Pusat Info dan Kesling Remaja) yang

dicanangkan oleh Kantor KB sulit untuk masuk ke lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* (FGD), masih ada materi kespro yang isinya cukup vulgar karena berkiblat pada materi kespro negara barat. Oleh karena itu, perlu kerja sama yang baik antara instansi-instansi terkait tersebut untuk mengkaji ulang materi kespro, dan diharapkan tercipta materi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan *local wisdom* di Kota Yogyakarta, serta sesuai tingkat usia dan jenjang pendidikan.

Permasalahan yang patut menjadi perhatian adalah peningkatan jumlah penduduk. Pada dasarnya peningkatan jumlah penduduk di DIY tidaklah mengkhawatirkan karena masih lebih rendah dari angka nasional, namun, jangan sampai hal tersebut membuat terlena. *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka kelahiran total untuk DIY menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2012 adalah 2,1, sedangkan nasional menunjukkan angka 2,6. Hal yang perlu diperhatikan adalah angka TFR DIY tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari website resmi BKKBN ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)) pada tahun 1994 hingga 2002 TFR DIY secaraurut adalah 1,79; 1,85; 1,9; kemudian turun menjadi 1,82 di tahun 2007. Namun di tahun 2012 justru naik tajam hingga 2,1, meskipun masih di bawah nasional.

#### **D. Pendidikan**

##### **1. Belum semua masyarakat Kota Yogyakarta bebas buta aksara**

Hal ini terlihat dari angka bebas buta aksara-nya mencapai 98,27% di tahun 2014 padahal di tahun 2009 sudah mencapai 99,81%. Kondisi yang menggambarkan penurunan rerata penduduk yang belum melek huruf memerlukan perhatian. Guna mengatasi hal ini, maka diperlukan upaya-upaya koordinasi dengan para pemangku wilayah sehingga Kota Yogyakarta bebas buta aksara.

##### **2. Tingginya minat untuk bersekolah di Kota Yogyakarta**

Secara kuantitatif, besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Yogyakarta menunjukkan angka di atas 100% yang mana angka demikian menunjukkan bahwa semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu apabila dilihat dari indikator APK. Sementara itu, APM yang menunjukkan tingginya minat warga untuk melanjutkan pendidikan juga menunjukkan angka yang sangat menggembirakan dimana angkanya lebih besar dari 100% dan rerata pertumbuhannya juga menunjukkan besaran angka yang positif. Namun, mendasarkan kepada laporan dari LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2014 menyoroti permasalahan akses dan pemerataan pendidikan menunjukkan adanya permasalahan seperti masih cukup tingginya angka

putus sekolah, angka partisipasi sekolah belum mencapai 100%, angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA belum maksimal, adanya disparitas input nilai masuk sekolah negeri dan swasta masih tinggi, dan jumlah siswa kota yang sekolah di luar kota masih cukup tinggi.

### 3. **Penurunan angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan dasar**

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2007-2014 cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka partisipasi sekolah kemungkinan terjadi karena beberapa anak di daerah perbatasan kota memilih sekolah yang tidak jauh dari rumahnya, sementara sekolah yang dipilih secara administratif termasuk dalam daerah/kabupaten lain. Beberapa sekolah di daerah perbatasan Kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung memiliki kualitas yang cukup baik.

### 4. **Kecenderungan penurunan angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan menengah pertama**

Dilihat dari data di atas, APS SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 mengalami penurunan, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 APS mengalami peningkatan hingga 100%, namun tahun 2014 kembali mengalami penurunan. APS SMP/MTs di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan disebabkan tingginya tingkat persaingan nilai (khususnya sekolah negeri) di Kota Yogyakarta, jadi banyak siswa dengan nilai tanggung yang memilih sekolah negeri di luar Kota Yogyakarta. Selain itu, daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta masih kurang.

Secara umum, permasalahan bidang pendidikan Kota Yogyakarta dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu 1) akses, 2) mutu, 3) tata kelola, 4) pemerataan, dan 5) citra. Dari sisi akses, masih dijumpai bahwa **belum semua penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan, utamanya pendidikan formal**. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah yang belum mencapai 100% dan masih adanya anak putus sekolah formal. Guna mengatasi hal ini maka Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memaksimalkan peranan dari pendidikan non formal seperti *homeschooling* dan sejenisnya. Contoh yang dapat diberikan dalam rangka mengemban amanah “tidak ada siswa yang tidak sekolah” adalah inovasi penggunaan bus sekolah yang disulap menyerupai ruang kelas sehingga siswa menjadi betah dalam menuntut ilmu. Sementara itu, berkaitan dengan daya tampung sekolah ditengarai bahwa masih terdapat kekurangan dari jumlah ideal jumlah bangku sekolah yang harapannya

dapat menampung seluruh calon siswa usia sekolah ditambah dengan calon siswa dari luar Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, sedang diupayakan penambahan jumlah kelas sehingga mampu menampung minat calon siswa untuk bersekolah di Kota Yogyakarta.

Permasalahan yang kedua berkaitan dengan mutu. Dari sisi parameter mutu seperti kualitas siswa, sarana dan prasarana, dan infrastruktur maka tidak diragukan lagi bahwa kualitas pendidikan Kota Yogyakarta merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Namun, guna lebih mengoptimalkan dan menjaga mutu pendidikan Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari mutu para pengajarnya. Data menunjukkan bahwa **belum 100% guru-guru di Kota Yogyakarta memiliki ijazah S1 atau DIV**. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan kenaikan jumlah guru-guru yang meningkat kualifikasi pendidikannya akan semakin mendukung penciptaan dan penjagaan mutu pendidikan di Kota Yogyakarta. Selain itu, ditengarai bahwa masih adanya ketimpangan antara mutu sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta serta pertimbangan biaya sekolah menyebabkan tidak semua siswa memilih untuk bersekolah di sekolah-sekolah swasta di Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan siswa-siswa yang berdomisili di Kota Yogyakarta justru memilih untuk bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang berada di perbatasan/ pinggiran Kota Yogyakarta.

Dari sisi tata kelola, diharapkan pengelolaan terhadap tujuan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta tercapai maka diperlukan penambahan bidang di SKPD Dinas Pendidikan yang secara spesifik mengelola bidang pendidikan inklusif sehingga tujuan di RPJM 2012-2017 dapat tercapai dan dilanjutkan di periode RPJM berikutnya.

Berikutnya dari sisi pemerataan, yang mengamanatkan bahwa pendidikan adalah untuk semua memerlukan perhatian yang serius terhadap para (calon) siswa berkebutuhan khusus atau yang sering disebut dengan pendidikan inklusif.

Yang terakhir, dari sisi citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan memerlukan perhatian yang serius sehingga Kota Yogyakarta memiliki sebuah penciri yang khas. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran dari orangtua siswa ketika akan menyekolahkan putra-putrinya ke Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyediaan berbagai sarana prasarana pendukung, menjaga mutu pendidikan serta didukung dengan lingkungan yang kondusif untuk belajar mengajar. Salah satu indikator yang menunjukkan prestasi Kota

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diberikan kepada Kota Yogyakarta bahkan di tahun 2015 ini, Kota Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan Kota Cerdas Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan karena berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta dalam hal penggunaan TIK untuk penerimaan peserta didik baru dan bimbingan belajar *on-line*.

## **E. Sosial**

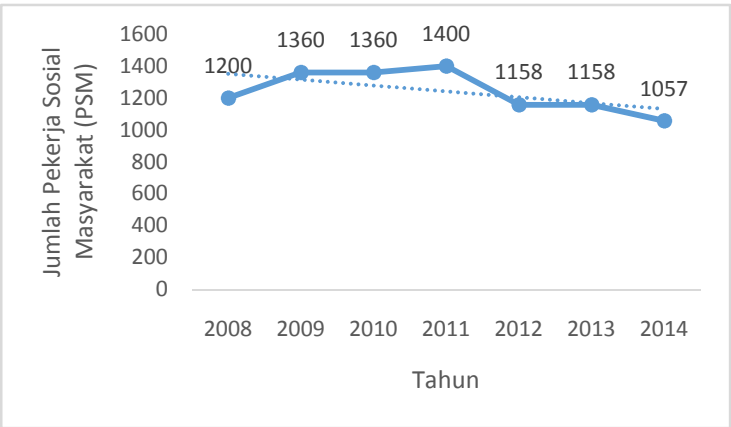
Keberadaan masalah sosial di Kota Yogyakarta merupakan kenyataan bersama yang terus meningkat dan berkembang sebagai dampak dari perkembangan sebuah kota. Kota Yogyakarta sebagai kota urban tidak lepas dari permasalahan meningkatnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, warga terlantar, penderita psikotik dan permasalahan sosial lainnya. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dan permasalahan yang diperkirakan terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan ulasan indikator kinerja mengenai urusan sosial, masih terdapat beberapa permasalahan di Kota Yogyakarta yaitu:

### **1. Masih kurangnya pelayanan kesejahteraan sosial**

Kurangnya pelayanan kesejahteraan sosial tercermin dari:

#### **a. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**

Salah satu bentuk pelayanan sosial adalah peran dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai tenaga yang secara sukarela memberikan perhatian di bidang sosial. Istilah PSM sendiri menurut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah PSM di Kota Yogyakarta menurun dari 1.360 PSM tahun 2010 menjadi 1.057 PSM pada tahun 2014.



**Gambar 2.114**  
**Perkembangan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**  
*Sumber: Profil Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi  
Kota Yogyakarta 2010-2014*

Data yang ada menunjukkan penurunan jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2014. Menurunnya jumlah PSM ini karena masih rendahnya kepedulian masyarakat Kota Yogyakarta untuk meluang waktu dan tenaga bahkan biaya dalam kegiatan sosial. Sementara itu, PSM tidak mendapat gaji/honor dalam melaksanakan kegiatannya. PMS dilibatkan untuk membantu aparaturnya pemerintah dalam membantu warga kurang mampu untuk mendapat bantuan sosial maupun kegiatan sosial lainnya seperti pendataan keluarga miskin dan sebagainya. Bimbingan sosial dasar dan bimbingan sosial lanjutan sudah dilakukan terhadap PSM di Kota Yogyakarta, namun masih terbatas sekali. Berdasarkan informasi saat FGD, setiap tahun hanya ada 2 (dua) kali pembinaan terhadap PMS. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012, pasal 2, disebutkan bahwa PSM diadakan dengan maksud memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial. Terbatasnya jumlah PMS di Kota Yogyakarta juga akan mempengaruhi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), diantaranya adalah pendampingan untuk memperoleh bantuan kesejahteraan sosial.

**b. Ketersediaan sarana sosial**

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh pemerintah kota. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada tahun 2014 sebanyak 1.981 orang. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk

lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga didata sebagai lansia terlantar. Keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo bukan menjadi kendala dalam mengatasi masalah PMKS di Kota Yogyakarta jika warga masyarakat memiliki kepedulian terhadap lansia terlantar di sekitarnya.

Adapun syarat penghuni panti jompo seperti Panti Wreda Budi Dharma selain menampung lansia terlantar, juga lansia gelandangan (tuna wisma) yang tidak memiliki keluarga untuk merawatnya. Terdapat 3 (tiga) panti jompo di Kota Yogyakarta, yaitu 1 (satu) milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan 2 (dua) lainnya milik swasta (yayasan).

Sementara itu, di Kota Yogyakarta belum banyak terdapat sarana publik yang dapat dengan mudah diakses oleh kaum difabel. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal 58, menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah alat, wadah, sarana maupun media yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Wahana ini berupa jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial, seperti kelompok arisan maupun kelompok usaha bersama. Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 54,55%. Apabila dibandingkan dengan target SPM Kementerian Sosial untuk indikator tersebut, maka angka 54,55% masih berada di bawah SPM (60%).

## **2. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal**

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar cenderung menurun pada kurun waktu 3 tahun terakhir dari 51,82 tahun 2012 menjadi 39,57 tahun 2014. Bantuan kepada PMKS di Kota Yogyakarta berasal dari pemerintah melalui APBN dan APBD Tingkat I. Bantuan yang

diberikan tersebut berdasarkan hasil pendataan warga miskin yang termasuk rumahnya belum layak pakai maupun pendapatannya hanya Rp 300.000,00 per bulan. Bantuan diberikan berdasarkan pengajuan proposal permintaan bantuan dari hasil pendataan dari PSM, namun kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya keaktifan dari PSM untuk mengajukan proposal bantuan. Kendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban dari bantuan sosial yang diterima, juga membuat masyarakat enggan untuk mengajukan proposal. Selain bantuan sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah memberikan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat tidak bergantung lagi dengan pemberian bantuan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu, perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 6.246 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia, pelayanan keterlantaran dan pembinaan dan pengawasan rusunawa milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 1.681 orang PMKS (26,91%) memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apabila dibandingkan dengan target SPM Kementerian Sosial untuk indikator tersebut, maka angka 26,91% masih jauh berada di bawah SPM (80%).

Sementara itu, berdasarkan data capaian target persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 dan 2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2014 dari target 33% hanya terealisasi 19,19%, demikian pula tahun sebelumnya hanya terealisasi 14,98%. Apabila dibandingkan dengan target SPM Kementerian Sosial untuk indikator tersebut, maka capaian tersebut masih jauh berada di bawah SPM (40%).

Kendala dan hambatan dalam mencapai target tersebut diantaranya:  
(1) Terbatasnya jumlah petugas pelayanan, perlindungan dan rehabilitas

sosial; (2) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan petugas pelaksana dalam pelaksanaan program; serta (3) Pendampingan belum optimal karena seluruh pendamping belum mendapatkan informasi yang cukup, bekal pengetahuan dan kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Dibutuhkan usaha dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD terkait untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada seluruh PMKS di Kota Yogyakarta.

## **F. Kebudayaan**

Permasalahan terkait dengan urusan kebudayaan di Kota Yogyakarta meliputi:

### **1. Memudarnya nilai-nilai budaya dan norma sosial di masyarakat**

Kota Yogyakarta sebagai pusat budaya seharusnya mencerminkan nilai-nilai budaya dalam setiap kehidupannya. Kondisi Kota Yogyakarta yang padat juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya solidaritas sosial. Sikap individual masyarakat menunjukkan semakin menurunnya kepedulian sosial. Degradasi nilai-nilai moral, sosial dan budaya terus terjadi di masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari semakin memudarnya budaya Jawa yang memiliki nilai adiluhung terutama di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari semakin rendahnya penguasaan dan berkurangnya penggunaan Bahasa Jawa oleh generasi muda terutama untuk komunikasi formal serta menurunnya tata krama dalam kehidupan bermasyarakat.

Memudarnya nilai-nilai religius dan norma sosial serta semakin berkembangnya penyakit masyarakat akibat dari semakin derasnya arus informasi dan hiburan berkarakter budaya asing. Selain menimbulkan dampak positif, juga dampak negatif dimana budaya asing yang masuk tidak sejalan dengan nilai budaya daerah dan nilai religius.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di Kota Yogyakarta, seni budaya yang berkembang di masyarakat memang bersumber dari kraton, seperti seni tari dan gamelan. Meskipun demikian, masyarakat daerah lain yang tinggal di Yogyakarta diberi kebebasan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Tidak sulit untuk menyaksikan seni budaya dari daerah lain dalam pentas yang diadakan di Yogyakarta. Namun, minat masyarakat, terutama masyarakat pendatang

dan generasi muda terhadap pertunjukan seni dan budaya daerah sendiri masih kurang. Permasalahan lain adalah belum ada data pengunjung berdasarkan asal tempat tinggalnya, sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap kegiatan seni dan budaya.

## **2. Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan**

Kegiatan penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta cukup banyak dan beragam, namun kegiatan ini belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari tempat penyelenggaraan seni dan budaya, tidak seluruhnya merupakan milik Pemerintah Kota Yogyakarta, namun sebagian besar adalah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tempat yang biasa digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya seperti Plaza Ngasem, Taman Budaya Yogyakarta (TBY), XT Square, Plaza Serangan Umum, Pendopo Tamansiswa, Pagelaran Keraton, Alun-Alun Utara, Ndalem Sewondanan Pakualaman, Lapangan Karang Kotagede, Taman Pintar, Halaman KR Mangkubumi, Bentara Budaya, dan Museum Sonobudoyo.

Sementara itu, tempat penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki dan berada di wilayah Kota Yogyakarta hanya XT Square. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas kesenian masyarakat sudah semestinya diiringi dengan perkembangan kualitas sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan seni dan budaya.

## **3. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan**

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren khususnya bidang penataan ruang dan kebudayaan masuk ke dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian, pembinaan sejarah, penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah, serta pengelolaan museum. Bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta sebagian besar merupakan bangunan publik, ruang usaha, tempat tinggal, dan perkantoran. Permasalahan saat ini adalah banyak bangunan warisan budaya atau cagar budaya sangat luas dan berada di lokasi strategis sehingga nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar cukup tinggi.

Yogyakarta sebagai kota bersejarah dibangun hampir sejak 250 tahun yang lalu, sejak kasultanan berdiri sebagai akibat perjanjian Giyanti 1755 yang memisahkan Mataram menjadi Kasunan Surakarta dari Kasultanan Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Kota Yogyakarta menjadi kota budaya dan kota pendidikan dengan pelajar/mahasiswa yang datang dari seluruh Nusantara. Yogyakarta memiliki situs sejarah Kasultanan dan Pakualaman, lingkungan kampung, arsitektur rumah kediaman, monumen dari benda sejarah yang lain.

Bangunan warisan budaya yang ada di Kota Yogyakarta merupakan aset atau harta yang tidak ternilai yang tidak dapat kita temukan lagi di masa kini dan mendatang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian cagar budaya. Namun demikian, masih saja terjadi hal-hal yang menyebabkan kerusakan dan musnahnya cagar budaya. Seiring dengan perkembangan kota menjadi kota yang modern, terjadi banyak pembongkaran benda-benda bersejarah menjadi bangunan modern. Hal ini apabila dibiarkan akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian benda cagar budaya, bahkan dikhawatirkan dalam jangka panjang sedikit demi sedikit benda-benda cagar budaya akan musnah. Penyebab kerusakan cagar budaya di Kota Yogyakarta disebabkan karena faktor alamiah dan faktor manusia. Kerusakan faktor alamiah dikarenakan faktor iklim dan perubahan unsur kimia sehingga mengalami pelapukan serta guncangan karena gempa yang mengakibatkan keretakan bahkan patah atau roboh. Sementara itu, kerusakan karena faktor manusia disebabkan karena goresan benda tajam, coretan, pemugaran dan penjualan tanpa izin pemerintah, serta pembongkaran cagar budaya menjadi bangunan baru.

Permasalahan perlindungan cagar budaya di Kota Yogyakarta adalah masih ada benda/bangunan yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya serta padatnya permukiman penduduk di dalam kawasan cagar budaya seperti di Tamansari dan Kotagede. Sementara itu terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Yogyakarta masih lemah. Belum semua cagar budaya di Kota Yogyakarta ada penetapan hukumnya. Peraturan di tingkat daerah yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2010 belum ada, dan munculnya UU Nomor 23 Tahun 2014 perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Yogyakarta mengingat sub urusan kebudayaan, cagar budaya, dan permuseuman menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan sumberdaya kebudayaan menghadapi beberapa permasalahan, antara lain adalah: (1) terbatasnya sumberdaya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas; (2) belum

optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (3) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan; (4) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan; (5) terbatasnya kemampuan pendanaan; serta (6) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

## **G. Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

### **1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi**

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, warga sudah berani untuk melapor.

Kesadaran kaum perempuan di Kota Yogyakarta untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah kejadian dilaporkan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2014, kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan mencapai 550 kasus. Sementara itu, kekerasan yang menimpa kaum laki-laki mencapai 50 kasus. Data kekerasan di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan bukan dari sisi jumlah, tapi dari sisi pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya dilakukan kepada orang dewasa ke anak-anak, tetapi sekarang terjadi pada anak dengan korban anak. Kekerasan dengan pelaku anak-anak, dimungkinkan karena faktor pendidikan dan penggunaan teknologi informasi seperti dari *game*, tontonan dan media sosial yang tidak didampingi. Dari kasus kekerasan tersebut tidak semuanya diselesaikan secara hukum, dan biasanya korban kekerasan hanya minta untuk dimediasi. Melalui UPT Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, korban dapat melaporkan dan biaya perkara ke pengadilan bagi korban kekerasan akan ditanggung dari pemerintah

kota melalui dana APBD termasuk biaya penanganan khusus seperti di rumah sakit. Kegiatan penanganan di rumah sakit, biaya perkara di pengadilan, sampai dengan pendampingan sudah ada peraturan walikota yang mengatur pembiayaan tersebut, yaitu Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2012.

Rasio kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta meningkat dari 0,11 tahun 2010 menjadi 0,50 tahun 2014. Meningkatnya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.

Sementara itu penyebab utama kekerasan terhadap anak ialah pola asuh yang tidak tepat oleh orang tua. Selain itu permasalahan dalam perlindungan anak tersebut muncul, antara lain, karena belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak yang ditunjukkan dengan: (1) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (2) masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Rekso Dyah Utami", dibentuk sebagai wujud kepedulian untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 14 (ayat 1) huruf a dan pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. P2TP2A berfungsi memfasilitasi pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pendampingan terhadap korban. Biaya penyelenggaraan P2TP2A "Rekso Dyah Utami" bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **2. Masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan**

Data kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih cukup rendah. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta menurun dari 58,89 tahun 2010 menjadi 57,94 tahun 2014. Sementara itu, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga menurun dari 5,08% pada tahun 2010, menjadi 4,57% tahun 2014. Jika dilihat dari kuota di legislatif, untuk kuota perempuan masih sedikit. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan seluruh pekerja perempuan. Rendahnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan disebabkan karena kesempatan di lembaga pemerintah tidak menggunakan kuota jenis kelamin, sehingga perempuan harus mengikuti persaingan bebas dengan laki-laki. Hal ini menjadi pertanda bahwa kapasitas perempuan untuk bersaing dengan laki-laki masih kurang memadai. Selain itu banyak perempuan yang lebih memilih untuk bekerja di sektor informal maupun sektor formal lain di luar lembaga pemerintah.

Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal. Permasalahan tersebut muncul karena belum efektifnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, antara lain terlihat dari: (1) belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta masih berada di bawah nilai IPM. Pada tahun 2009 nilai IPG

Kota Yogyakarta sebesar 77,10, sedangkan IPM sebesar 79,29. Sementara itu pada tahun 2012, nilai IPG sebesar 78,71 dan IPM sebesar 80,24.

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Selain indikator IPG, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2) Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan 3) sumbangan pendapatan.

Sementara itu, kemajuan yang dicapai di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain, adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Ditetapkannya undang-undang tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

## **H. Kepemudaan dan Olah Raga**

### **1. Terjadinya degradasi moral generasi muda**

Narkoba masih menjadi ancaman dan permasalahan Kota Yogyakarta sebagai pusat kota dan wisata yang biasanya dipilih menjadi tempat transaksi narkoba. Dalam perkembangannya, masalah narkoba akan selalu menjadi ancaman bagi generasi muda. Data sampai bulan Desember 2014

menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS atau ODHA (orang dengan HIV/AIDS) di Kota Yogyakarta didominasi oleh masyarakat di bawah usia 30 tahun yaitu sebanyak 802 orang. Dari jumlah tersebut 544 orang terkait dengan kasus HIV dan 248 orang adalah kasus AIDS yang sebagian besar dialami oleh penduduk laki-laki yaitu sebanyak 64,72% ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 13 Mei 2015). Sementara itu, jumlah pecandu narkoba di Kota Yogyakarta sebanyak 5.655 orang dari sekitar 89 ribu pencandu narkoba di DIY ([www.kabarkota.com](http://www.kabarkota.com), 19 Januari 2015).

Salah satu inisiatif untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan masyarakat adalah dengan Program Pemberdayaan Kampung Bebas Narkoba (PKBN) yang telah dijalankan pada tahun 2014. Sementara itu, pada tahun 2015, untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan anak muda khususnya pelajar dan mahasiswa, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Yogyakarta kembali meluncurkan program lain yaitu program Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba (PSBN) dengan melantik calon anggota kader anti narkoba di kalangan pelajar. Program ini merupakan kompetisi di mana sekolah-sekolah berusaha menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Beberapa sekolah yang telah menjalankan program PSBN adalah SMAN 4 Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Anti Napza (FORANZA), SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang tergabung dalam Satgas Pelajar Anti Narkotika dan Seks Bebas (SPECTRA), SMA Budya Wacana dengan Satgas Pelajar Anti Narkoba yang diberi nama *Drug Police*.

Menurut data dari BNN Kota Yogyakarta, sampai dengan bulan Agustus 2015, terdapat 18 (delapan belas) sekolah yang memiliki satgas antinarkoba, terdiri dari 13 di tingkat SMA/SMK, dan sisanya di tingkat SMP. Sebagai kota pendidikan, Kota Yogyakarta cukup rentan dalam peredaran narkoba karena berbagai etnis, suku bangsa dan budaya terdapat di dalamnya.

## **2. Masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung olahraga**

Berdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 2,84 pada tahun 2011 menjadi 0,48 pada tahun 2014. Sementara itu jumlah organisasi olahraga juga menurun dari 36 organisasi tahun 2010 menjadi 34 organisasi tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan olahraga di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat Kota Yogyakarta.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga, antara lain: (1) terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; (2) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (3) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; serta (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

2.2.2. Bidang Ekonomi

A. Distribusi pendapatan yang tidak merata

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik. Selama kurun waktu 2010-2013, PDRB per kapita Kota Yogyakarta meningkat dari Rp 14.167.677 di tahun 2010 menjadi Rp 16.139.158 di tahun 2013. Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita DIY. Walaupun begitu, peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Besaran rasio Gini, besaran bagian pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan terendah, dan besaran indeks Williamson menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk dan antar kecamatan. Selama kurun waktu 2010-2013, rasio Gini meningkat dari 0,2717 menjadi 0,4366 dan indeks Williamson meningkat dari 0,483 menjadi 0,51. Sementara itu, bagian pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan terendah mengalami penurunan dari 18,95% di tahun 2010 menjadi 15,57% di tahun 2013.

Tabel2.249  
PDRB Per Kapita dan Pemerataan Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

Indikator	2010	2011	2012	2013
PDRB perkapita (Rp)	14.167.677	14.893.159	15.612.923	16.139.158
Pemerataan Pendapatan Antar Penduduk:				
a. Bagian PDRB yang diterima 40% Penduduk Berpendapatan Terendah (%)	18,95	18,2	17,97	15,57
b. Rasio Gini	0,2717	0,3509	0,3603	0,4366
Pemerataan Pendapatan Antar Kecamatan:				
Indeks Williamson	0,483	0,495	0,506	0,51

Sumber:  
1. PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013, BPS Kota Yogyakarta  
2. Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahu 2012 dan 2013, BPS Kota Yogyakarta  
3. Hasil Olahan 2015

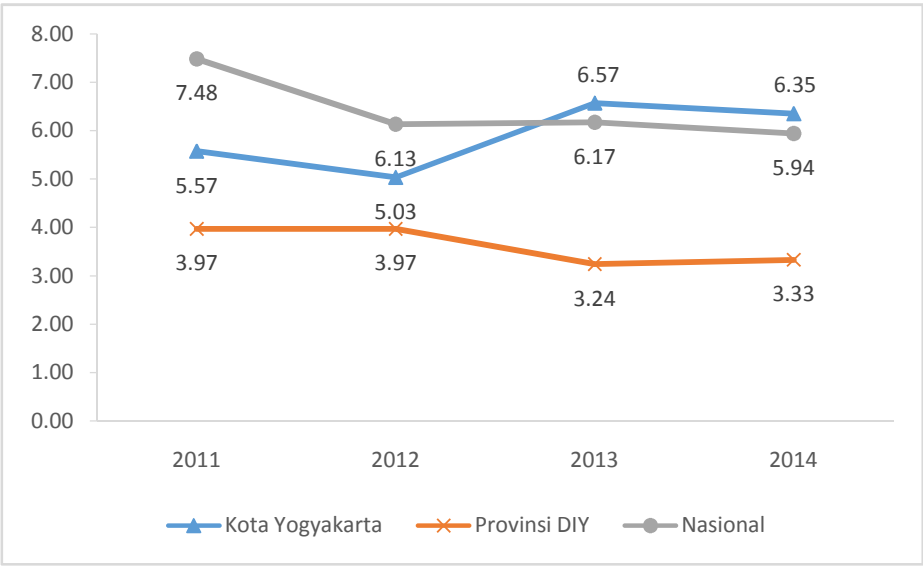
Pendapatan yang dihasilkan oleh Kota Yogyakarta ternyata lebih dirasakan oleh kelompok penduduk berpendapatan sedang dan tinggi. Pada umumnya, kelompok ini merupakan kalangan pekerja profesional dan pengusaha. Kelompok ini diuntungkan dengan adanya perkembangan di sektor modern, seperti jasa, keuangan, komunikasi, dan pengangkutan yang berkembang di Kota Yogyakarta. Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri, bangunan, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya terbatas dan juga membutuhkan keahlian dan keterampilan yang tinggi sehingga tidak semua orang mampu mengaksesnya.

Penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah tidak meratanya distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Sementara itu, terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah, serta kebijakan pemerintah yang kurang *pro-poor* menyebabkan pendapatan relatif dan pendapatan riil usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil cenderung menurun. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang diarahkan kepada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan melalui program pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan bantuan yang disertai dengan pendampingan sehingga mereka dapat mandiri.

## **B. Tingkat pengangguran yang tinggi**

Perkembangan angka pengangguran ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Fluktuasi TPT di Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2014 berkisar di antara 5-6%. Pada tahun 2011 adalah sebesar 5,57%, lalu tahun berikutnya turun menjadi 5,03%, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 6,57% dan turun menjadi 6,35% di tahun 2014. Angka TPT untuk Kota Yogyakarta lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka TPT DIY yang cenderung menurun dan berada di angka sekitar 3%. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kesempatan kerja di Kota Yogyakarta.

Bila melihat data BPS, maka penganggur di Kota Yogyakarta sebagian besar merupakan penganggur dengan tingkat pendidikan lulusan SLTA ke atas. Pada tahun 2013, persentase penganggur dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas mencapai 84,6%. Artinya pencari kerja di Kota Yogyakarta sebagian besar merupakan calon tenaga kerja yang terdidik dan berpendidikan relatif tinggi. Selain itu, sebagai kota, Kota Yogyakarta cenderung menarik minat bagi warga daerah sekitarnya untuk mencari pekerjaan namun lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas sehingga persaingan antar pencari kerja cukup tinggi.

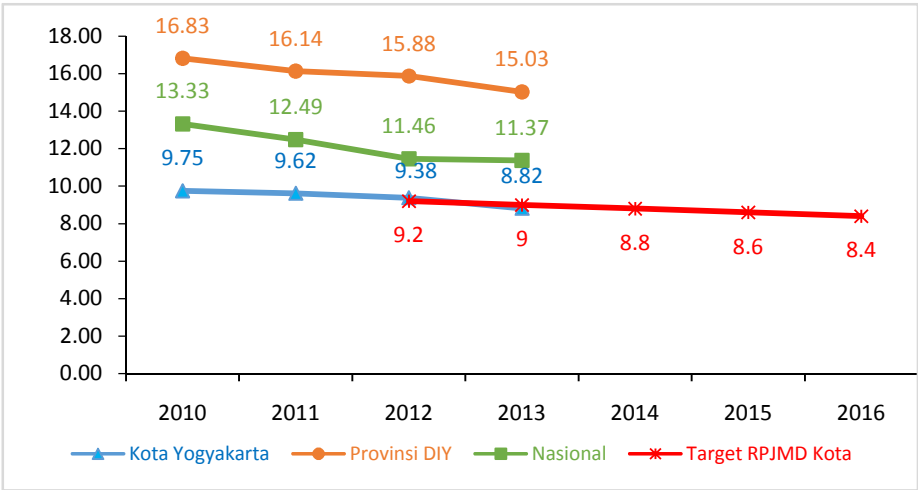


**Gambar 2.115**  
**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, dan Nasional Tahun 2011-2014**

Sumber: DIY dalam Angka 2011-2014, BPS; Keadaan Angkatan Kerja DIY Agustus 2014, BPS; Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2014, BPS

**C. Kemiskinan**

Pada pendekatan makro, kemiskinan Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif rendah dan cenderung menurun. Selama kurun 2010-2013, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta menurun dari 9,75% menjadi 8,82% dan juga lebih rendah daripada tingkat kemiskinan DIY dan nasional. Pencapaian tahun 2012 dan 2013 telah melebihi target RPJMD Kota Yogyakarta. Artinya realisasi tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan yang menjadi target RPJMD.



**Gambar 2.116**  
**Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2010-2013, Target RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016**

Pada pendekatan mikro, masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta terlihat lebih jelas. Dengan kriteria 17 parameter miskin (Keputusan Walikota Yogyakarta no 244/KEP/2012), maka di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 terdapat 18.881

keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin ini menurun dari tahun sebelumnya namun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013-2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 (13,11%). Secara spasial, proporsi keluarga miskin di atas rata-rata Kota Yogyakarta (14,65%), sebagian besar terletak di daerah aliran sungai, yaitu Kecamatan Tegalrejo (17,33%), Kecamatan Jetis (18,26%), Kecamatan Danurejan (21,21%), Kecamatan Gedongtengen (16,24%), Kecamatan Wirobrajan (17,12%), Kecamatan Gondomanan (14,69%), Kecamatan Pakualaman (15,11%), dan Kecamatan Mergangsan (21,08%), kecuali Kecamatan Kraton (17,97%) yang bukan termasuk daerah aliran sungai.

**Tabel 2.250**  
**Jumlah dan Proporsi Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin				Proporsi Keluarga Miskin (%)			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Tegalrejo	1.754	2.029	2.021	1.984	14,71	17,34	18,16	17,33
2	Jetis	1.264	1.816	1.825	1.613	14,00	20,70	21,81	18,26
3	Gondokusuman	1.511	2.000	1.920	1.793	10,92	14,47	15,04	13,59
4	Danurejan	1.035	1.459	1.521	1.422	15,20	21,02	23,51	21,21
5	Gedongtengen	1.180	1.352	1.320	1.086	17,82	20,32	20,30	16,24
6	Ngampilan	817	839	772	611	14,02	14,74	13,72	10,65
7	Wirobrajan	1.299	1.572	1.473	1.475	15,11	18,51	17,75	17,12
8	Mantrijeron	1.328	1.693	1.584	1.580	11,77	14,58	14,42	13,77
9	Kraton	1.019	1.251	1.301	1.284	14,05	17,52	20,03	17,97
10	Gondomanan	771	887	708	705	15,97	18,51	15,23	14,69
11	Pakualaman	559	654	642	523	15,68	18,60	18,85	15,11
12	Mergangsan	1.612	2.137	2.022	2.104	16,07	21,34	20,94	21,08
13	Umbulharjo	1.875	2.150	1.989	1.461	9,16	10,49	9,95	7,04
14	Kotagede	994	1.460	1.383	1.240	10,15	14,91	14,27	12,39
	Kota Yogyakarta	17.018	21.299	20.481	18.881	13,11	16,45	16,51	14,65

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta 2015, diolah

Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkat pendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikap mental) keluarga miskin. Kemiskinan di perkotaan erat kaitannya dengan terbatasnya peluang kerja yang produktif. Kota menjadi magnet bagi pendatang untuk harapan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Penduduk maupun pendatang sama-sama bersaing untuk memanfaatkan kehidupan kota. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki program-program bantuan untuk masyarakat miskin terutama bagi mereka yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, antara

lain di bidang pendidikan dan kesehatan, selain program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat tentunya. Namun, adakalanya bantuan yang diperoleh oleh warga miskin malah membuahkan ketergantungan. Warga miskin cenderung menjadi malas berusaha karena sudah merasakan kenyamanan akibat mendapat bantuan. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaan untuk mengubah sikap warga miskin agar mampu berkarya dan memperoleh penghasilan.

#### **D. Penyediaan pangan bergantung dengan daerah luar**

Pengembangan pertanian di Kota Yogyakarta terbatas pada ketersediaan lahan. Lahan kosong lebih menarik untuk dijadikan sebagai tempat usaha ataupun perumahan. Selain itu, tidak banyak warga yang tertarik untuk melakukan kegiatan pertanian terutama untuk pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu, jika ada kegiatan pertanian, kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Potensi pertanian Kota Yogyakarta adalah pada kegiatan berbasis hobi, seperti tanaman hias, tanaman hortikultura, serta budidaya ikan hias dan burung. Kegiatan ini tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga cocok untuk daerah perkotaan.

Penyediaan pangan yang tergantung pada daerah lain membutuhkan jaminan terhadap ketersediaan serta kelancaran pasokan dan distribusi barang. Selain itu juga jaminan terhadap kestabilan harga. Kendala dalam penyediaan pangan adalah cuaca/musim sehingga kemampuan untuk memprediksi kebutuhan masyarakat merupakan hal yang penting. ketersediaan pangan juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat terkait dengan kecukupan gizi dan keamanan pangan. Peredaran bahan pangan yang mengandung za-zat berbahaya perlu diwaspadai dan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengawasi produsen-produsen bahan pangan supaya bahan pangan yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Pangan yang sehat dan bergizi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### **E. Pariwisata berbasis budaya belum berkembang dan kesadaran pelaku wisata relatif kurang**

Kota Yogyakarta memiliki visi pariwisata berbasis budaya. Artinya kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal tersebut secara tersirat menempatkan Kraton Yogyakarta sebagai pusat budaya Kota Yogyakarta. Nilai-nilai Kraton diadopsi dan dikembangkan di masyarakat. Selama ini, cerminan pariwisata berbasis budaya masih terbatas pada event kesenian, festival, dan pelestarian kesenian tradisi yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta, selain penggunaan pakaian adat dan penyajian tarian daerah pada penyelenggaraan acara-acara di Kota Yogyakarta. Namun sesungguhnya kebudayaan dibangun dengan membangun moral, perilaku, dan akhlak dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata budaya tidak hanya penyelenggaraan festival semata namun juga menumbuhkan nilai-nilai budaya di masyarakat sehingga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta sendiri cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 2.460.097 wisatawan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.007.253 wisatawan yang mengunjungi Kota Yogyakarta. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak melulu bertujuan untuk melihat keindahan obyek wisata, namun juga karena adanya penyelenggaraan konferensi dan rapat (*MICE*) di Kota Yogyakarta. Namun, lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta masih relatif rendah dan cenderung menurun. Jika jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat dan dapat memenuhi target daerah yang ditetapkan maka tidak demikian dengan lama tinggal wisatawan. Lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta masih berkisar 2 hari, artinya pada umumnya wisatawan hanya menghabiskan waktu akhir pekan di Kota Yogyakarta. Lama tinggal wisatawan secara tidak langsung berpengaruh pada perputaran uang dan pergerakan kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan menambah lama tinggal wisatawan.

Kunjungan wisata ke suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain ketersediaan obyek wisata yang menarik serta kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi hal yang penting karena berkorelasi dengan kepuasan berwisata. Wisatawan yang merasa puas berpeluang untuk kembali dan merekomendasikannya ke orang lain. Citra positif pariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun. Wisatawan mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota dengan penduduk yang ramah dan suka menolong. Namun di sisi lain, masih ada pelaku wisata yang berperilaku kurang baik terhadap wisatawan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Beberapa faktor yang berimplikasi terhadap ketidaknyamanan wisatawan, antara lain faktor lingkungan, faktor pelaku kegiatan ekonomi, dan faktor akses menuju obyek wisata. Faktor lingkungan mencerminkan kondisi lingkungan yang kurang terawat, kurang bersih, dan kurang teratur. Faktor pelaku kegiatan ekonomi memperlihatkan bagaimana pelaku kegiatan ekonomi berinteraksi dengan wisatawan, misalnya pemaksaan kehendak tujuan wisata, penawaran harga yang tidak wajar, dan ketidaksesuaian harga barang dengan kualitas. Faktor akses menuju obyek wisata menggambarkan gangguan dalam perjalanan, antara lain kemacetan.

#### **F. Pengawasan perizinan investasi**

Kegiatan investasi sangat terkait dengan prosedur perizinan mendirikan usaha yang berlaku di daerah. Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang terbaik dalam kemudahan pendirian usaha (*Doing Business di Indonesia 2012, World Bank*). Indikator pengukurannya adalah jumlah prosedur, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap prosedur, biaya yang dibutuhkan, serta persyaratan modal disetor minimum. Oleh karena itu, kemudahan mendirikan usaha di Kota Yogyakarta ini sebaiknya diikuti dengan peningkatan investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal sehinggaberdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data, jumlah PMA dan PMDN yang masuk ke Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah 13 PMA dan 3 PMDN. Data penanaman Modal (PMA/PMDN) Kota Yogyakarta tersebut masih menggunakan data yang bersumber dari Gerai P2T (Perizinan) di DIY. Data tersebut merupakan inputan dari SPIPISE yang link dengan BKPM RI. Secara nasional, data realisasi penanaman modal mengacu pada hasil SPIPISE tersebut, meskipun tidak dapat mencerminkan nilai investasi sesungguhnya karena ada perusahaan yang tidak mendaftarkan izin prinsipnya ke BKPM tetapi langsung mengurus izin daerah seperti izin HO, IMD, IUP, dan TDP. Berdasarkan Perka Nomor 5 Tahun 2013, kategori perusahaan yang termasuk PMDN adalah yang memiliki total investasi minimal 500 juta rupiah, sedangkan PMA 10 Milyar rupiah (bentuk badan usaha PT). Pada umumnya, perusahaan yang mengurus izin prinsip (izin penanaman modal) ke BKPM adalah yang membutuhkan fasilitas untuk ekspor dan impor atau menggunakan tenaga kerja asing sehingga perusahaan yang dalam operasinya tidak membutuhkannya cenderung langsung mengurus izin-izin di daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta belum menyelenggarakan perizinan penanaman modal sehubungan dengan belum terbentuknya kelembagaan yang mampu penanaman modal sehingga pengawasan terhadap kegiatan investasi juga belum dapat dilakukan.

#### **G. Kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relatif rendah dibandingkan dengan pelaku perdagangan besar**

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, prasarana perdagangan juga bertumbuh terutama pusat perbelanjaan dan pasar modern. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah, lengkap, dan selalu tersedia. Sampai dengan tahun 2013, sarana perdagangan di Kota Yogyakarta terdiri dari 31 pasar tradisional, 319 toko, 412 kios, 613 warung. Sementara itu, sampai dengan tahun

2014 terdapat 92 toko modern berdasarkan izin HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.251**  
**Jumah Sarana Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013**

No	Jenis Sarana Perdagangan	2011	2012	2013
1	Jumlah Pasar	32	32	31
2	Jumlah Pedagang Pasar	15.600	14.659	15.822
3	Toko	2.947	607	319
4	Kios	3.031	412	412
5	Warung	3.715	319	613
6	Toko modern:			
	Akumulasi hingga Tahun 2014			92

Sumber:  
a. Data berbasis 9 Fungsi Perencanaan Pembangunan 2012-2013, Bappeda Kota Yogyakarta  
b. Data Sektoral 2014, Bappeda Kota Yogyakarta  
c. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta 2015

Keberadaan pasar modern ini dianggap menguntungkan konsumen serta mampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini, di Kota Yogyakarta, pendirian pasar modern sudah diatur melalui Peraturan Walikota. Perwal ini mengatur baik jumlah pasar/toko modern maupun jarak antar pasar modern dan jarak dengan pasar tradisional. Pembatasan jumlah dan jarak ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat antar pedagang.

Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modern membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakah pemodal ini merupakan warga Kota Yogyakarta atau berasal dari luar. Selain itu, pekerja berasal dari mana karena sebenarnya diharapkan adanya pasar/toko modern ini mampu menyerap tenaga kerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaan pasar tradisional juga diharapkan mampu menyerap pengusaha dan tenaga kerja lokal sebagai penggerak perekonomian kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung tumbuhnya pasar tradisional maupun pasar/toko modern agar keduanya bertumbuh bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan inovasi pelayanan yang diberikan oleh pedagang pasar tradisional maupun toko-toko berskala kecil agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

**H. Perkembangan ekonomi kreatif yang belum optimal**

Peluang dan pangsa pasar yang dijanjikan oleh ekonomi kreatif masih terbuka lebar. Fokus dari ekonomi kreatif, yang mencakup industri kreatif, adalah

penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Terdapat 14 subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1) periklanan; 2) arsitektur; 3) pasar barang seni; 4) kerajinan; 5) desain; 6) fesyen; 7) video, film dan fotografi; 8) permainan interaktif; 9) musik; 10) seni pertunjukan; 11) penerbitan dan percetakan; 12) layanan komputer dan piranti lunak; 13) televisi dan radio; 14) riset dan pengembangan.

Pendekatan industri saat ini telah bergerak ke arah industri berorientasi konsumen sehingga muncul era produksi non-massal dengan faktor kandungan emosional dan selera. Industri kreatif yang sarat kandungan emosional dapat mendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan. Pasar konsumsi produk dan jasa industri kreatif relatif besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Data dari PBB tahun 2003, menunjukkan 50% dari belanja konsumen di negara G7 adalah belanja untuk produk-produk hasil industri kreatif. Sementara itu, penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi pasar yang besar pula. Pada tahun 2010, ekonomi kreatif di Indonesia menciptakan nilai tambah sebesar 4,68 triliun rupiah atau 7,29% dari PDB nasional (Renstra Kemenparekraf 2012-2014). Ekonomi kreatif juga menyerap 8,6 juta tenaga kerja atau 7,9% dari total nasional.

Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor wisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling berenergi jika dikelola dengan baik. Dalam komponen pariwisata, ekonomi kreatif dapat masuk melalui penciptaan produk-produk inovatif khas daerah, atau melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal (Suparwoko, 2010). Keterkaitan antara sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kualitas kepariwisataan dimana ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa kreatif sebagai suvenir dan sebagai hiburan
- 2) Penciptaan daya tarik wisata dimana kuliner, seni pertunjukan, musik, fesyen yang unik dapat dikembangkan sebagai wisata.
- 3) Promosi dimana produk dan jasa kreatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi wisata, sedangkan daya tarik wisata dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya kreatif yang unik.

Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif bertumpu pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam menghasilkan produk dan jasa pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Namun di sisi lain, kendala dalam produksi selalu ada, terutama dalam hal modal karena industri kreatif dipandang sebagai industri yang beresiko tinggi karena banyaknya hasil produk kreatif yang bersifat *intangible*.

### 2.2.3. Bidang Fisik

Secara umum, rata-rata capaian bidang fisik RPJMD Kota Yogyakarta dengan aspek-aspek yang diwadahnya bernilai 100%, mendekati atau berada di atasnya (di atas 100%). Namun demikian, tidak semua nilai ini sesuai indikator ideal sesuai standar SPM pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, sehingga untuk beberapa indikator yang standarnya tidak sesuai dengan kondisi kota, yang nilainya tidak lengkap per tahun, dan lain sebagainya, digunakan standar lain. Data-data tersebut di antaranya diambil dari Lakip Kota Yogyakarta. Di samping capaian 100%, ada beberapa indikator yang bernilai fluktuatif, seperti air bersih, air limbah dan persampahan. Dari analisis yang dilakukan, didapat masalah-masalah dan isu-isu strategis dalam bidang fisik sebagai berikut.

#### A. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

##### 1. Belum tersedianya kelembagaan formal yang menangani tata ruang

Dalam SOTK Pemerintah Kota Yogyakarta, belum ada lembaga khusus untuk menangani urusan tata ruang, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh pihak Bappeda. Selain itu, pembagian skala kewenangan dengan Dinas PU atau Kimpraswil, misalnya tentang instansi apa yang akan menangani RTRW, RDTR, dan lain sebagainya belum secara tegas ditentukan.

##### 2. Rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai

Hal ini terlihat dari peruntukan sebagian kawasan sempadan sungai sebagai kawasan permukiman. Secara umum, luas kawasan permukiman di bantaran sungai mencapai 114,5 Ha (data dari Bappeda, 2015).

##### 3. Tidak/kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Tidak adanya data mengenai sub indikator pengendalian pemanfaatan ruang (seperti data pelanggaran bangunan/lahan, data bangunan melanggar yang kemudian didenda, dan lain sebagainya) menyebabkan pembahasan hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada data mengenai bangunan ber-IMB. Sampai dengan tahun 2014, rasio bangunan ber-IMB terhadap jumlah bangunan di Kota Yogyakarta hanya mencapai 0,73 dan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,59% dibandingkan tahun 2010. Hal ini mengindikasikan permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada.

**4. Adanya kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat**

Data dari pihak BPN menunjukkan bahwa telah ada ijin perubahan lahan di mana sebagian lahan Taman Hiburan Rakyat (THR) dialihfungsikan menjadi hotel seluas 24.690 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Kondisi ini dan luasan yang cukup besar mengindikasikan adanya kecenderungan perubahan ruang privat yang mengambil alih fungsi ruang publik di Kota Yogyakarta.

**5. Kecenderungan pencemaran air sungai**

Persentase jumlah parameter yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel parameter hanya mencapai 55,5% tahun 2014, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 71%. Hal ini mengindikasikan bahwa air sungai yang ada di Kota Yogyakarta cenderung semakin tercemar.

**6. Kecenderungan pencemaran air tanah**

Hasil analisis laboratorium sampel air sumur di 9 lokasi dan 1 mata air di Tirta Wening Gambiran menunjukkan bahwa air tanah Kota Yogyakarta sudah tercemari bakteri coli tinja. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air tanah di Kota Yogyakarta semakin mengkuatirkan ke depannya.

**B. Permukiman, Sarana dan Prasarana Perkotaan**

**1. Penggunaan fasilitas penyediaan air bersih masih didominasi oleh fasilitas non perpipaan**

PDAM Tirta Marta sebagai penyedia air bersih hanya mampu melayani 45,52% dari jumlah penduduk dan sisanya berupa Air Bersih Terlindungi/ABT (dalam bentuk fasilitas non perpipaan tersebut). Fasilitas non perpipaan ini menimbulkan kondisi yang rentan terhadap degradasi lingkungan karena debit air yang dibutuhkan dan debit air yang tersedia tidak bisa terukur secara pasti jumlahnya, selain adanya kondisi/peluang perebutan sumber air tanah (dalam), misalnya oleh masyarakat secara komunal dan bangunan tinggi.

**2. Kualitas fasilitas drainase cenderung masih rendah**

Persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2014 hanya sebesar 86,66%. Selain itu, masih terdapat kawasan yang rawan genangan di mana persentase kawasan bebas genangan tahun 2014 hanya 20,027%. Sebagai tambahan, persentase air limbah yang memadai tahun 2013 berjumlah

40%, yang kemudian menurun di mana persentase air limbah yang memadai tahun 2014 berjumlah 21,59%.

**3. Kualitas pengolahan dan pengangkutan sampah/persampahan yang ada cenderung kurang memadai**

Ada keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah (persentase volume sampah yang terangkut ke TPA hanya 7,22% di tahun 2014) dan keterbatasan fasilitas pengolahan sampah secara 3R (persentase volume sampah yang diolah secara 3R tahun 2014 hanya sebesar 20,85%). Di sisi lain, ada kemungkinan persentase sampah yang terangkut dan sedikitnya volume sampah yang diolah secara 3R mengindikasikan keberhasilan masyarakat untuk berperan serta dalam pemilahan sampah, namun demikian data terukur/pastinya tidak diketahui.

**C. Transportasi**

Permasalahan transportasi Kota Yogyakarta saat ini tidak dapat dilepaskan dari permasalahan transportasi perkotaan yang berkembang di kota-kota besar dunia maupun di Indonesia. Peningkatan kemacetan lalu lintas, penurunan keselamatan lalu lintas dan polusi telah menjadi gambaran umum kondisi transportasi di beberapa kota besar di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Kurangnya infrastruktur, pengelolaan sistem transportasi yang buruk serta lemahnya kebijakan pengembangan transportasi yang berkelanjutan merupakan penyebab utama permasalahan tersebut. Ke depan, Yogyakarta akan berkembang menjadi kota besar, bahkan sebagai kota metropolitan, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di kota-kota besar lainnya harus menjadi perhatian agar tidak terjadi di Kota Yogyakarta. Disamping itu identifikasi permasalahan transportasi yang terjadi di Kota Yogyakarta saat ini akan menjadi pijakan bagi penyelesaian masalah dan pengembangan sistem transportasi kedepan.

**1. Keterbatasan prasarana transportasi**

Prasarana transportasi di Kota Yogyakarta terlihat masih kurang mencukupi kebutuhan yang ada. Data yang tersedia hanya menjelaskan ketersediaan fasilitas penunjang jalan berupa rambu dan trotoar. Secara fisik ketersediaan trotoar di Yogyakarta pada tahun 2014 sudah mencapai 81,34%, artinya panjang jalan yang sudah dilengkapi trotoar telah mencapai 81,34%. Meskipun demikian, masih banyak trotoar yang tidak dapat digunakan dengan baik dan benar. Konstruksi trotoar yang rusak dapat membahayakan pengguna. Sejumlah pejalan kaki seringkali tidak tertampung semua di trotoar, lebar trotoar yang ada dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan, sehingga pejalan kaki terpaksa memanfaatkan badan

jalan untuk berjalan kaki dan pada akhirnya akan mengganggu arus lalu lintas.

Keterbatasan prasarana transportasi juga ditunjukkan dengan keterbatasan fasilitas parkir, khususnya gedung dan plataran parkir. Tidak tersedia data pendukung terkait ketersediaan dan kinerja fasilitas parkir di Yogyakarta. Fasilitas parkir merupakan elemen pendukung pergerakan lalu lintas perkotaan yang sangat vital. Setiap kendaraan yang bergerak akan membutuhkan ruang atau fasilitas untuk menyimpan/meletakkan kendaraan pada saat berhenti. Waktu yang digunakan kendaraan untuk berhenti setelah melakukan perjalanan di perkotaan, lebih panjang dibandingkan waktu untuk bergerak. Situasi ini menuntut tersedianya fasilitas/ruang parkir yang besar. Parkir yang ideal bila kendaraan dapat berhenti di gedung parkir atau pelataran parkir. Pada kenyataan, kedua jenis fasilitas parkir tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas di wilayah perkotaan Indonesia. Sebagian besar kendaraan masih parkir di badan jalan. Kondisi ini berdampak besar pada pengurangan lebar efektif jalan yang sangat besar, menurunkan kapasitas jalan, menimbulkan kesemrawutan dan meningkatkan jumlah kecelakaan.

Panjang jaringan jalan yang ada relatif tidak bertambah secara signifikan, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah yang mengakibatkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun dari 0,00084 pada tahun 2007 menjadi 0,00056 pada tahun 2014. Selain menimbulkan kemacetan, kondisi tersebut sangat berpotensi terhadap penurunan keselamatan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari kinerja lalu lintas yang direpresentasikan dengan nilai V/C rasio yang makin membesar (dari 0,44 menjadi 0,81). Semakin besar nilai V/C rasio semakin buruk kinerja lalu lintas yang ditunjukkan dengan penurunan kecepatan atau peningkatan kemacetan jalan. Kondisi ini seringkali diikuti dengan penurunan keselamatan lalu lintas ditunjukkan dengan naiknya fatalitas kecelakaan dari 0,0261 menjadi 0,0608.

## **2. Layanan transportasi belum optimal**

Aspek layanan transportasi di Kota Yogyakarta juga belum menunjukkan kinerja yang bagus, khususnya untuk layanan angkutan umum darat. Terjadi penurunan persentase penggunaan angkutan umum (dari 4,36% menjadi 2,64%), rasio jumlah angkutan umum per 1000 penduduk dari 24,09 menjadi 23,31 dan persen kendaraan umum yang lolos uji KIR dari 78,55% menjadi 64,63%. Situasi ini berkaitan erat dengan indikator lainnya seperti kinerja lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan

kualitas udara. Semakin berkurangnya peran angkutan umum pada satu sisi, memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan di jaringan jalan semakin padat, penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Kepadatan lalu lintas semakin tinggi, kinerja pergerakan lalu lintas terjadi degradasi. Kemacetan lalu lintas berkembang dimana-mana. Keselamatan lalu lintas juga semakin menurun dengan penggunaan kendaraan pribadi yang makin luas dan tidak diikuti dengan perilaku berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas cenderung berkembang semakin tinggi. Dari aspek lingkungan, tidak berkembangnya angkutan umum dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh semakin banyak polutan yang dihasilkan oleh jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat.

Layanan transportasi kereta api perkotaan di Yogyakarta belum dikembangkan. Namun layanan kereta api antar kota telah berkembang, hanya saja masih terlihat adanya penurunan jumlah penumpang dan barang. Khusus untuk transportasi udara memperlihatkan kinerja yang baik, yaitu terjadi peningkatan volume penumpang dan barang yang melalui bandara Adisucipto. Peningkatan ini akan mendorong kebutuhan layanan transportasi darat baik yang bersifat pribadi maupun umum di wilayah perkotaan Yogyakarta.

Penurunan penggunaan angkutan umum perkotaan di Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kemudahan dalam mendapatkan/memiliki sepeda motor dan mobil pribadi serta belum optimalnya kinerja layanan bis perkotaan.

### **3. Degradasi lingkungan (kemacetan, kecelakaan lalu lintas)**

Berbagai permasalahan transportasi di Kota Yogyakarta telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah terjadinya kemacetan lalu lintas (yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai V/C rasio dari 0,44-0,81) di beberapa ruas jalan pada jam-jam sibuk maupun kesemrawutan lalu lintas pada akhir pekan atau masa liburan. Disamping itu, kualitas lingkungan yang diukur berdasarkan parameter kualitas udara Kota Yogyakarta mengalami penurunan, meski sebagian besar masih di bawah ambang batas. Kecenderungan penurunan kualitas udara diperparah pula dengan peningkatan kemacetan lalu lintas yang memberikan tambahan kontribusi terhadap jumlah polutan udara.

Degradasi lingkungan kota Yogyakarta tidak hanya mengancam tingkat kesehatan masyarakat namun dikhawatirkan akan berpengaruh

terhadap daya tarik pariwisata Yogyakarta. Ciri khas Kota Yogyakarta yang ‘berhati nyaman’, lalu lintasnya pelan tapi lancar, kondisi udara yang bersih, penggunaan kendaraan tidak bermotor masih banyak bisa jadi akan tinggal menjadi kenangan. Degradasi lingkungan tersebut juga bisa ditunjukkan oleh penurunan keselamatan lalu lintas. Jalan-jalan yang semrawut dipenuhi berbagai jenis kendaraan pribadi serta penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir mengakibatkan kenyamanan berlalu lintas berkurang dan kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat. Kondisi lalu lintas Kota Yogyakarta yang merupakan lalu lintas tercampur (*mix traffic*) antara kendaraan lambat dan kendaraan cepat semakin memperberat permasalahan keselamatan lalu lintas.

#### **4. Transportasi Wisata**

Sebagai kota wisata, Yogyakarta termasuk tujuan wisata yang terkenal di dalam dan luar negeri. Keunikan budaya, masyarakat serta lingkungan Kota Yogyakarta belum didukung sepenuhnya oleh penyediaan layanan transportasi wisata. Belum ada layanan khusus bagi wisatawan berupa jalur-jalur wisata, kendaraan wisata maupun fasilitas yang memudahkan wisatawan menikmati obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta. Permasalahan ini diantisipasi oleh wisatawan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan sewa (*charter*). Situasi ini selain menyulitkan wisatawan juga memberi tambahan beban lalu lintas perkotaan yang cukup besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan layanan transportasi wisata untuk mendukung peran Kota Yogyakarta sebagai kota wisata.

#### **2.2.4. Bidang Pemerintahan**

##### **A. Tata Pemerintahan**

Tata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untuk menghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, dengan sebuah sistem yang terstruktur. Pemahasan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi yang didasarkan pada upaya penelusuran data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan secara akumatif maka diketahui permasalahan tersebut antara lain:

**1. Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, dan hubungan antar SKPD dan unit kerja menghadapi kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi baik pada level perencanaan, implementasi, penyerapan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan maupun evaluasi**

Bertolak dari hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan ini bersumber pada perubahan regulasi yang berlangsung di pusat khususnya mengenai pemerintahan daerah. Jika ditelusur secara historis dari UU No. 32 Tahun 2004, menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan dewasa ini telah ada revisi yaitu UU No 9 Tahun 2015. Perubahan-perubahan ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga mengharuskan untuk melakukan adaptasi secara cepat. Di dalam sistem perencanaan peraturan yang disusun oleh Kemendagri dan Bappenas seringkali mengandung perbedaan, sehingga menyulitkan daerah untuk mengacu dan mengakomodasi peraturan tersebut ke dalam perencanaan daerah. Bahkan dalam beberapa peraturan perundangan yang mengatur hingga tingkat operasional masih dijumpai perbedaan-perbedaan prinsip. Tidak adanya sinkronisasi peraturan perundangan yang memudahkan daerah untuk melakukan konsolidasi baik dalam perencanaan, implementasi, penganggaran, pengawasan dan evaluasi. Kondisi semacam ini menjadikan isu yang mendasar serta secara luas dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dalam regulasi pemerintahan daerah juga sangat mengganggu dalam proses koordinasi antar unit kerja maupun SKPD, sehingga beberapa permasalahan muncul terkait dengan kesulitan untuk mengkonsolidasi baik di level perencanaan, perumusan indikator, pembagian urusan maupun pengawasan internal, serta penyerapan SILPA. Hingga saat ini belum ada ketentuan/peraturan yang jelas dan sah yang mengatur pengelolaan SILPA. Artinya, langkah administratif dalam rencana kerja pada tahun anggaran selanjutnya dalam penyerapan kembali SILPA bukan merupakan kebijakan yang tuntas<sup>1</sup>.

Pada level pengawasan belum tersedia pemetaan urusan pengawasan internal yang jelas dan terkonsolidasi. Keterlibatan inspektorat sebagai pengawas internal belum optimal dalam implementasinya<sup>2</sup>. Meskipun jika dilihat dari data indikator persentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kota Yogyakarta tahun 2015 dengan target 3% sudah terealisasi 2,99%, dan pada indikator penyelesaian tindak lanjut hasil

---

<sup>1</sup> Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.

<sup>2</sup> Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.

pemeriksaan yang memiliki target 88%, realisasinya sebesar 95,09% (Lakip Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2014). Kemudian dalam rekaman data prestasi pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2010 hingga tahun 2014.

## **2. Agenda road map reformasi birokrasi yang belum selesai dari segi implementasi**

Dokumen *road map* reformasi birokrasi merangkum agenda 8 bidang yang cukup ideal dan mendapatkan penghargaan terbaik di tingkat nasional. *Road map* reformasi yang mencakup delapan bidang tersebut berisi rencana pola perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 nilai *road map* reformasi birokrasi kota Yogyakarta adalah 77,86%<sup>3</sup> sehingga masih perlu dituntaskan. Angka tersebut diperoleh dari laporan mandiri *road map* reformasi birokrasi dan dilaporkan secara *online* dan rutin. Roadmap reformasi birokrasi yang disusun oleh Kota Yogyakarta dirasa cukup ideal dan rinci. Belum ada kota lain yang mampu membuat *road map* reformasi birokrasi selengkap dan serinci Kota Yogyakarta. Akan tetapi pada implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan kelembagaan yang perlu diakomodasi, misalkan kelembagaan yang ada di BAPPEDA dengan sistem “ban berjalan” sehingga pekerjaan harus saling menunggu sebab pembagian belum dilakukan berdasar bidang, misal bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya. Permasalahan selanjutnya adalah penajaman fungsi ULP, friksi tupoksi pengawasan, keterbatasan fasilitasi TI, dan keberlanjutan inovasi daerah. Permasalahan tersebut dilihat aspek kelembagaan. Sedangkan tujuh bidang yang lain masih juga belum dapat diselesaikan implementasi perubahan melalui skema *road map* reformasi birokrasi yang sudah direncanakan.

Dari tujuh bidang yang menjadi area perubahan, diantaranya yang masih belum mencapai 100% adalah penataan sistem manajemen SDM yang masih 51,83% dan penguatan pengawasan 66,42%<sup>4</sup>.

## **3. Belum tersedia sistem monitoring evaluasi/forum komunikasi di dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada rekam jejak pemberdayaan yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh**

Belum terkonsolidasi program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif antar SKPD. Pandangan parsial yang melihat pemberdayaan

---

<sup>3</sup>Wawancara kepala bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 5 Agustus 2015.

<sup>4</sup>Laporan Hasil Evaluasi Road map Reformasi Birokrasi, 2015.

masyarakat masih terpisah pisah. Belum ada pendataan yang dilakukan secara terkoordinasi antar SKPD yang ditunjukkan dengan data pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007 hingga 2014 tidak teridentifikasi (Lakip Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2014). Karena sistem komunikasi dan koordinasi antar SKPD belum berjalan, maka belum ada mekanisme dukungan yang terpadu mulai dari perencanaan, penyiapan *action plan*, implementasi, dan monitoring evaluasi. Dengan demikian database tentang rekam jejak pemberdayaan secara utuh menyeluruh tidak dapat terpenuhi.

#### **4. Keberlanjutan inovasi daerah**

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan. Potensi ide inovasi sebenarnya sudah dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Inovasi bukan merupakan hal yang terputus namun harus dilakukan terus menerus. Artinya dalam setiap perencanaan daerah perlu dilakukan inovasi dalam segala lini untuk tujuan peningkatan pelayanan publik.

#### **B. Aparatur Pemerintah Daerah**

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi pemerintah, oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain:

**1. Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar kompetensi**

Pola karir pegawai sedang dalam proses rumusan oleh Badan Kepegawaian Daerah<sup>5</sup>. Pada tahun 2016 direncanakan pola karir ini akan selesai dibentuk. Implementasi pola karir ini diproyeksi belum optimal pasca diselesaikannya pola karir tersebut. Pemasalahan yang diproyeksi muncul adalah implementasi pola karir bagi pegawai yang maksimal. Sebab tujuan pengembangan pegawai tidak serta merta terselesaikan dengan pembentukan pola karir. Namun lebih pada agenda yang akan dilakukan pasca dibentuknya pola karir.

**2. Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi**

Menurut FGD yang dilakukan bersama dengan BKD Kota Yogyakarta, proporsi pegawai negeri sipil di kota Yogyakarta hingga tahun 2014 baru terpenuhi 64%. Pada tahun 2014, usulan formasi yang dibutuhkan adalah 642 formasi tetapi yang disetujui hanya 74 formasi<sup>6</sup>. Kesenjangan kompetensi yang ditetapkan di dalam analisis jabatan (Anjab) dengan realitas penempatan jabatan masih banyak ditemui. Khususnya kebutuhan pemenuhan kompetensi pendidikan yang sesuai jenjangnya, khususnya untuk jabatan struktural belum dapat ditepati secara menyeluruh.

**C. Hukum**

Hukum merupakan bagian penting dalam tata laksana pemerintahan Kota Yogyakarta. Untuk itulah permasalahan yang dihadapi di urusan hukum pernting untuk ditekankan. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain:

**Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan obyek hukum**

Pada implementasinya, pembentukan produk hukum terkendala permasalahan responsivitas antar SKPD belum optimal terhadap kompleksitas permasalahan daerah. Perubahan regulasi dari pusat yang relatif cepat juga mengakibatkan proses adaptasi menjadi sulit mengingat permasalahan di daerah merupakan permasalahan yang lebih kompleks<sup>7</sup>. Kendala lain yang dihadapi adalah, kekurangan *back up* data produk hukum dalam bentuk *soft file*. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya

<sup>5</sup>Hasil FGD Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta 31 Agustus 2015

<sup>6</sup>Data Usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta, 2014 (BKD Kota Yogyakarta)

<sup>7</sup>Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta dalam FGD 21 Agustus 2015.

sosialisasi produk hukum ke masyarakat. Data LAKIP Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta tahun 2014 menunjukkan 92,63% masyarakat dapat mengakses produk hukum. Hal tersebut dikarenakan masih 7,37% produk hukum tidak memiliki arsip dalam bentuk *soft file* untuk diunggah sehingga dapat diakses secara *online* bagi masyarakat.

#### **D. Informasi**

Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaan informasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan informasi.

##### **1. Belum optimalnya fasilitasi TI kepada seluruh SKPD**

Hal ini berhubungan dengan keterbatasan anggaran sehingga kemampuan fasilitasi kepada teknologi informasi untuk SKPD tidak mencukupi. Jumlah kebutuhan untuk mengembangkan teknologi informasi semakin meningkat, namun resources terbatas. Namun jika dilihat dari sisi pengelolaan, pemerintah Kota Yogyakarta cukup baik. Terbukti dengan pencapaian 98,23% dalam indikator pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk *e-government* (LAKIP bagian TIT, Setda Kota Yogyakarta, 2014). Pada sistem informasi kebencanaan belum membentuk jaringan kerjasama yang luas dalam penanganan kebencanaan secara menyeluruh. Terkait sistem informasi manajemen kebencanaan. Berdasarkan FGD bidang Pemerintahan yang dilakukan bulan Juli, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan bahwa BPBD membutuhkan teknologi informasi untuk mengelola arsip dan informasi kebencanaan. Akan tetapi memang tidak semua SKPD diarahkan berbasis teknologi informasi, artinya jika memang dibutuhkan maka SKPD perlu mengajukan ke bagian TIT untuk dibuatkan software kemudian SKPD yang bersangkutan dapat mengoperasikan teknologi informasi secara swakelola ataupun diserahkan ke pihak ketiga.

## 2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Di dalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yang dirasakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah keterbatasan petugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis yang harus mendampingi 7 hingga 8 SKPD (1 arsiparis : 8 SKPD- 0,125). Selain itu hingga saat ini Kantor Arpusda baru mampu mengurus arsip aktif saja. Sebab tidak ada waktu karena adanya tambahan tugas lain. Kendala selanjutnya adalah belum ada sarana (depo inaktif untuk menyimpan arsip inaktif, rak arsip, boks arsip di masing-masing SKPD). Hingga tahun 2015, arsip statis di SKPD belum tertata. Penataan arsip statis dan inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang.

## 3. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit<sup>8</sup>

Audit yang dilakukan untuk SKPD masih terbatas pada keuangan. Hal ini memerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya arsip yang masih tersebar di luar kantor arsip yang perlu diidentifikasi.

## E. Kesatuan Bangsa dan Politik

Di era yang semakin moderen ini komunikasi sosial yang riil semakin terbatas, sedangkan komunikasi jejaring sosial semakin berkembang. Sumber konflik tidak saja berada pada tataran riil dalam kehidupan nyata yang dapat diamati secara visual, akan tetapi dapat diakibatkan oleh konflik sosial di dunia maya, yang justru memiliki dampak yang lebih luas (cenderung tidak terbatas). Untuk itulah meskipun prestasi yang diperoleh Kesbangpol pada tataran baik, namun masih dihadapkan pada permasalahan. Untuk itu diperlukan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Identifikasi permasalahan pembangunan khususnya urusan Kesbangpol ini dirumuskan berdasarkan data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Permasalahan tersebut adalah: **belum optimalnya pengendalian konflik SARA**. Hal ini terkait dengan usaha preventif dalam menghindari konflik SARA dan penanganan saat dan pasca konflik. Dalam melakukan usaha preventif terdapat keterbatasan frekuensi pembinaan dan kunjungan. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP hanya 2 kali tiap tahunnya, sedangkan pembinaan politik daerah 38 kali tiap tahunnya (Lakip Kantor Kesbangpol Kota Yogyakarta, 2014). Kemudian peluang terjadinya konflik di Kota Yogyakarta cukup besar dilihat dari keberagaman SARA di masyarakat. Pemberian konsekuensi dari pelaku konflik

---

<sup>8</sup>Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.

harus dapat memberikan efek jera sehingga tidak terulang. Akan tetapi fokus yang lebih diutamakan adalah pada usaha preventif sebelum terjadinya konflik.

## **F. Ketertiban dan Keamanan**

Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang baik, agar semua dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban ini masih menghadapi beberapa permasalahan. Untuk itu diperlukan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan Keamanan Ketertiban. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan penelusuran data dokumen, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

### **1. Keterbatasan pembentukan rescue linmas**

Jumlah linmas terus mengalami penurunan, pada tahun 2012 berjumlah 2.904 linmas, menurun menjadi 2.890 linmas pada tahun 2013, dan menurun kembali menjadi 2.864 linmas pada tahun 2014 (Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 2015). Hal ini dikarenakan penurunan jumlah petugas linmas karena faktor pensiun dan belum ada regenerasi.

### **2. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial**

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi. Menurut Lakip Dinas Ketertiban tahun 2014 adalah 1455 pelanggaran pada tahun 2012, pada tahun 2013 menurun menjadi 1.178 pelanggaran. Kemudian pada tahun 2014 menjadi 1340 pelanggaran. Melihat angka pelanggaran yang cukup tinggi tersebut, sudah dimulai pelaksanaan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Gerakan panca tertib meliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Gerakan ini didukung Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Hingga saat ini terdapat 3 kampung yang menjadi laboratorium percontohan kampung panca tertib yakni kampung Pandeyan, Kampung Gamelan, dan Kampung Pakualaman<sup>9</sup>. Gerakan kampung panca tertib adalah aktivitas sosial

---

<sup>9</sup> [www.jogjadaily.com](http://www.jogjadaily.com). Kampung Panca Tertib, Bangun Keteraturan Kota Yogyakarta dengan Musyawarah, 3 Juni 2015.

berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan.

### **3. Penurunan kualitas siskamling di Kota Yogyakarta**

Jumlah pos siskamling mengalami penurunan dari 1305 unit pada tahun 2011, menjadi 1.226 unit pada tahun 2013 dan 2014. Terjadinya penurunan jumlah siskamling sebesar 6,05% ini menurut Dinas Ketertiban adalah karena pengalihan status tanah. Penurunan jumlah pos siskamling mencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibat sistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yang telah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yang memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluarga kecil/inti (*nucleus family*), banyaknya pendatang yang kurang memiliki ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tata kehidupan bermasyarakat, dll.

## **G. Pelayanan Bencana**

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperoleh dalam pelayanan kebencanaan masih terbatas pada bencana kebakaran. Untuk itu upaya untuk menjangkau pelayanan kebencanaan yang lebih luas masih menemui beberapa kendala. Pemmasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan analisis data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain:

### **1. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luas**

Hal ini perlu diperharikan sebab semua wilayah termasuk jalan memiliki potensi kebakaran. Luas potensi wilayah kebakaran 32,5 km<sup>2</sup> (Lakip BPBD 2014). Kemudian terkait potensi terjadinya bencana alam, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana perlu dilakukan mengingat potensi kebencanaan lokal yang dimiliki Kota Yogyakarta diantaranya gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi.

## **2. Belum optimalnya peran swasta dan pelaku usaha melalui mekanisme CSR.**

Hingga saat ini mekanisme CSR dari swasta yang dapat dikerjasamakan dengan BPBD belum terlaksana<sup>10</sup>. Ke depannya mekanisme CSR kebencanaan dapat menjadi pilihan dalam penanganan kebencanaan yang lebih optimal.

### **2.3. Isu Strategis**

#### **2.3.1. Penelaahan Kebijakan Nasional**

##### **RPJMN 2015-2019**

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tertulis dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*" Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui tujuh misi pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan, yakni: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

---

<sup>10</sup>Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.

domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintahan nasional, dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta wajib memperhatikan tujuan pembangunan nasional jangka menengah yang tersusun dalam RPJMN 2015-2019. Sembilan agenda prioritas pembangunan tersebut terkait langsung dengan permasalahan yang harus dihadapi Kota Yogyakarta.

Di bidang tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk: (1) Penguatan kapasitas pemerintah, dan (2) Perluasan ruang partisipasi masyarakat; dengan sasaran: (a) Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (c) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (d) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sementara sasaran pembangunan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan adalah: (1) Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 7-8 persen pada akhir 2019, dan (2) Mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan pada akhir tahun 2019 sekitar 0,36, agar pendapatan penduduk 40,0 persen terbawah meningkat, dan beban penduduk miskin berkurang.

Di bidang pendidikan sasaran utama adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekati 100%, angka partisipasi jenjang pendidikan menengah sebesar 91,6%, pendidikan tinggi sebesar 36,7%. Partisipasi anak usia dini (usia 3-6 tahun) yang mengikuti PAUD meningkat menjadi 77,2% dan angka melek aksara menjadi 96,1%. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun. Meskipun angka melek aksara Kota Yogyakarta tahun 2014 (98,27%) sudah melebihi sasaran angka melek aksara tersebut.

Aspek keberlanjutan pendidikan ditandai dengan meningkatnya partisipasi anak-anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus, menurunnya variasi angka partisipasi antardaerah, dan indeks paritas gender yang mendekati angka 1,0 pada semua jenjang pendidikan. Terkait peningkatan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan adalah membaiknya proses pembelajaran di kelas, yang didukung oleh: (a) meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif, (b) meningkatnya kualifikasi akademik seluruh guru minimal S1/D-IV dan meningkatnya kompetensi guru dan *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*, serta menurunnya angka ketidakhadiran guru, (c) meningkatnya kesiapan siswa untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, (d) diterapkannya KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK,

PT, BLK dan kursus non-formal, (e) Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri, (f) Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik, (g) Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga yang baik, (h) Meningkatnya wawasan dan pemahaman peserta didik mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk membangun ketahanan diri sebagai makhluk individu dan sebagai bagian dari lingkungan sekitar, seperti: peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta kesadaran untuk menghargai lingkungan termasuk praktik pemanfaatannya, (i) Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Di bidang penyediaan sarana dan prasarana salah satu arah yang terkait dengan perkotaan adalah memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, dengan sasaran meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Indikator tercapainya pemenuhan kebutuhan layak huni bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh adalah: (a) Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan; (b) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*); dan (c) Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500 Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).

### **2.3.2. Penelaahan Kebijakan Pembangunan Daerah**

#### **A. RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025**

Visi RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025 adalah *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.”* Visi tersebut diwujudkan melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: (1) Mewujudkan pendidikan berkualitas,

berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal; (2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; (3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; (4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Sementara sasaran pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya DIY sebagai **pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara** pada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Terwujudnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah, (b) Tersedianya sumberdaya pendidikan yang handal, (c) Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan, (d) Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY, (e) Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, (f) Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya, (g) Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.
2. Terwujudnya DIY sebagai **pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara** pada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan, (c) DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur, (d) Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif, (e) Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya, (f) Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata, (g) Masuknya DIY dalam *culture itinerary/culture map* tingkat Asia Tenggara.
3. Terwujudnya DIY sebagai **daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara** pada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata, (b) Tersedianya fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal, (c) Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan atau oleh pelaku wisata, (d) Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, (e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW.

4. Terwujudnya lingkungan **masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera** pada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Terselenggarakannya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum, (b) Terciptanya kelembagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap, (c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah, (d) Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai, (e) Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia Tenggara, (f) Terpenuhinya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama, (g) Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak, dan remaja, (h) Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi, (i) Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi.

#### **B. RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029**

Sebagai bagian wilayah administrasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merumuskan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah perlu memperhatikan tata ruang wilayah yang dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 agar perencanaan pembangunan selaras dengan perencanaan tata ruang. Dalam rencana struktur ruang yang *termuat* di RTRW DIY tersebut, rencana pengembangan sistem perkotaan yang diarahkan menjadi Kota Hirarki I yaitu: Kota Yogyakarta dan Kota Besar: Perkotaan Yogyakarta. Sementara rencana sistem pelayanan PKN diarahkan Perkotaan Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan program: (a) Pengembangan pusat pemerintahan di Kota Yogyakarta, (b) Pengembangan jalan arteri nasional, (c) Pembangunan TPA regional, (d) Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan, (e) Pembangunan rumah sakit tipe A, (f) Pengembangan angkutan massal DIY.

Sementara dalam rencana infrastruktur transportasi darat yang terkait langsung dengan Kota Yogyakarta yakni: (a) jaringan jalan arteri primer jalan lingkar Kota Yogyakarta; (b) jaringan jalan kolektor primer yaitu: (i) ruas jalan Yogyakarta, (ii) jalan Yogyakarta-Kaliurang, (iii) Jalan Yogyakarta-Parangtritis; (c) sistem jaringan jalan primer yaitu: (i) terminal penumpang tipe A di Kota Yogyakarta, (ii) terminal barang yakni sub terminal barang sebagai hub, salah satunya, di Kota Yogyakarta; (d) transportasi kereta api dengan mengoptimalkan jalur *double track* dan pembangunan jalur utara selatan yaitu: (i) jaringan jalan kereta api Jakarta-Yogyakarta-Surabaya, (ii) jalur ganda Kutoarjo-Yogyakarta-Surakarta, (iii) jaringan jalan kereta api Metropolitan Yogyakarta-Surakarta, (iv)

jaringan jalan kereta api Parangtritis-Yogyakarta-Borobudur; (e) sistem jaringan jalan kereta api yaitu: (i) stasiun Tugu dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang, dan (ii) Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Rencana prasarana sumber daya air yaitu: (a) embung-embung di Kota Yogyakarta; (b) tandon air dan kolam tampungan; (c) sumur resapan dan biopori; (d) air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman. Rencana prasarana lingkungan yaitu: sistem jaringan drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Dalam rencana pola ruang yang diarahkan sebagai kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam yaitu: (a) Letusan Gunung Api berlokasi di sebagian lereng Gunungapi Merapi hingga lereng kaki gunung seperti Sungai Code dan Opak, mengancam wilayah Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sungai yang berhulu di puncak Merapi, sebagai media aliran lahar; (b) Rawan Gempa Bumi berada di sekitar arah/jalur patahan Opak, di Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah Kota Yogyakarta.

Kawasan *budidaya* yang diarahkan kawasan peruntukan pariwisata salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Sementara rencana pembentukan kawasan sabuk hutan kota ditujukan untuk pengendalian polusi udara akibat pengembangan jalan di sekitar jalan tol lingkaran dalam kota di sekitar Kota Yogyakarta.

Sementara rencana kawasan strategis provinsi pelestarian sosial budaya meliputi: Kraton Yogyakarta, kota lama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

### **C. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017**

Visi yang ingin dicapai pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 yakni *“Daerah Istimewa yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.”* Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut diwujudkan dalam empat misi yaitu: (1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; (2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; (3) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik; (4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Salah satu tujuan misi membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan adalah mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter dengan arah kebijakan meningkatnya angka melek huruf dari 91,49 menjadi 95, meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 9,2 menjadi 12 serta peningkatan daya saing pendidikan. Sementara tujuan untuk mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat dengan arah kebijakan meningkatkan angka harapan

hidup dari 73,27 menjadi 73,55. Meskipun untuk Kota Yogyakarta angka melek huruf dan angka harapan hidup tahun 2014 sudah melebihi angka tersebut, masing-masing mencapai 96,27%, dan 73,50.

Misi kedua, menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dengan arah kebijakan: (a) meningkatkan pendapatan per kapita per tahun dari Rp. 6,8 juta menjadi Rp. 8,5 juta, (b) meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya indeks ketimpangan antar wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481, (c) mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya indeks ketimpangan pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.

Dalam memantapkan misi keempat, prasarana dan sarana daerah dengan tujuan mewujudkan peningkatan pelayanan publik, arah kebijakannya adalah meningkatkan penataan sistem transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di perdesaan.

### **Kebijakan Penataan Transportasi DIY**

Integrasi layanan menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan permasalahan transportasi Perkotaan Yogyakarta. Diperlukan pembangunan dan penyediaan *transfer point* dengan konsep *park and ride* untuk memadukan antara layanan angkutan umum dengan penggunaan konsep *park and ride*. Saat ini hanya ada di Terminal Prambanan dan areal parkir Ngabean. Selama tahun 2012-2017 diharapkan target pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) dan *transfer point* direncanakan di beberapa lokasi potensial antara lain: JEC, Kridosono dan areal di sekitar *ringroad* yang merupakan pintu masuk menuju Perkotaan Yogyakarta.

Selain pembangunan *transfer point*/TOD, kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan adalah: (a) Pemasangan ATCS dengan dukungan bus priority untuk memudahkan pergerakan angkutan umum di persimpangan, dan (b) Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis kawasan, dimana terdapat 7 kawasan di Perkotaan Yogyakarta yang akan ditata, yakni: Malioboro, Godean-Jati Kencana, Terban-Jalan Solo, Kraton, Kranggan, Seturan, dan Kotagede.

Selama tahun 2012-2017 diharapkan terdapat 11 rute baru dan 154 bus untuk melayani pergerakan masyarakat di Perkotaan Yogyakarta. 11 rute dengan

154 armada bus ini akan menggantikan layanan angkutan umum yang ada saat ini, dengan tahapan awal layanan akan dimulai tahun 2015.

### ***Kebijakan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede***

Kotagede merupakan salah satu kawasan cagar budaya di DIY yang berada di dalam dua wilayah administratif, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Menurut SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, Kotagede berada di bawah kewenangan provinsi. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede tidak hanya terkait dengan pelestarian cagar budaya bendawinya, tetapi juga terkait kesenian, penataan infrastruktur, transportasi, pengembangan industri, pariwisata, sehingga harus melibatkan pemangku kepentingan dari lintas sektor.

### **Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Yogyakarta**

#### ***1. Revitalisasi Kawasan Malioboro-Kawasan Stasiun Tugu***

Konsep pengembangan yang akan diterapkan adalah terpadu termasuk desain saling mendukung perkembangan kawasan baik sebagai kawasan budaya maupun kawasan perdagangan dan jasa. Konsep revitalisasi kawasan Malioboro antara lain memberikan akses lebih leluasa kepada pejalan kaki sebagai salah satu upaya dukungan untuk meningkatkan peluang transaksi dan menata infratraktur kawasan (parkir dan akses). Sedangkan revitalisasi kawasan Stasiun Tugu sebagai upaya penciptaan kawasan dengan tata guna lahan bercampur (permukiman, komersial, transportasi) serta diharapkan kegiatan perekonomian kawasan ini bukan pesaing dari kegiatan di Jalan Malioboro.

#### ***2. Pengembangan Trans Jogja***

Konsep awal bus Trans Jogja mengindikasikan bahwa pemerintah DIY berkomitmen terhadap pelayanan yang mengoptimalkan sistem peremajaan angkutan dengan metode *scrapping* 1:2. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan angkutan umum masal, telah dilakukan kajian rute dan penambahan jalur layanan, penyediaan infrastruktur pendukung antara lain *park and ride*, *halte mobile*, *shelter*, integrasi dengan layanan Trans Jogja baik di perkotaan sendiri maupun dengan layanan AKDP.

#### ***3. Pembangunan Kembali Embung Langensari***

Pembangunan kembali Embung Langensari merupakan salah satu strategi penanganan terhadap banjir atau genangan yang terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman. Hal tersebut disebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan dan alur drainase di Kawasan Langensari, Kecamatan Gondokusuman dari embung menjadi permukiman. Upaya tersebut sekaligus sebagai sarana konservasi air tanah di Kota

Yogyakarta. Embung Langensari diarahkan sebagai sarana ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik di Kota Yogyakarta khususnya di Kecamatan Gondokusuman dengan luas 14.000 m<sup>2</sup>. Perencanaan pembangunan kembali Embung Langensari dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah (Bali Besar Wilayah Sungai Serayu Opak), Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Desain Embung Langensari adalah diperuntukkan sebagai kolam atau parkir air sehingga potensi banjir dapat teratasi. Luas areal basah direncanakan 11.180,98 m<sup>2</sup> dengan potensi tampungan 28.064 m<sup>3</sup> dan volume efektif tampungan 8.832 m<sup>3</sup>.

#### D. RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah menjadikan “*Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan*”, yang ditempuh melalui sembilan misi pembangunannya, yakni: (1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan; (2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya, dan Kota Perjuangan; (3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa; (4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan; (5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya; (6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum; (7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai; (8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas; dan (9) Mewujudkan Kota Yogyakarta sehat.

Pembangunan jangka panjang dalam 20 tahun mendatang difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok:

1. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai **Kota Pendidikan berkualitas**, ditunjukkan oleh: (1) Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah; (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal; (3) Tingginya tingkat kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (4) Tercapainya program wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan minimal masyarakat Kota Yogyakarta adalah setara dengan sekolah menengah; (5) Rendahnya tingkat buta aksara; dan (6) Tersedianya fasilitas pendidikan yang modern dan lengkap serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai **Kota Pariwisata, Kota Budaya, dan Kota Perjuangan**, ditunjukkan oleh: (1) Meningkatnya jumlah dan lama tinggal

kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara; (2) Meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional; (3) Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi; (4) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya secara berkesinambungan yang berbasis pada budaya lokal; dan (5) Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

3. Terwujudnya Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa, ditunjukkan oleh: (1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 direncanakan minimal sama atau melebihi target nasional; (2) Tingkat pengangguran 4 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 3 persen; (3) Kualitas SDM yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan (partisipasi, akses, dan kontrol perempuan) dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang rendah di bawah 1 persen; (4) Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi diharapkan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas dengan produktivitas yang tinggi serta sektor jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing tinggi.
4. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan, ditandai oleh: (1) Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat; (2) Rendahnya tingkat pencemaran air, tanah, dan udara; dan (3) Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
5. Terwujudnya Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab, dan Berbudaya, ditandai oleh: (1) Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; (2) Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, serta memperkuat jati diri dan kepribadian; dan (3) Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.

6. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang **Good Governance, Clean Government, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum**, ditunjukkan oleh: (1) Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif, dan perspektif gender; (2) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan gender; (3) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota; (4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari praktek-praktek KKN; (5) Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan; (6) Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompetensi tinggi; dan (7) Terwujudnya tata pemerintahan yang mencerminkan komitmen dan integritas terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
7. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang **Aman, Tertib, Bersatu dan Damai**, yang ditandai oleh: (1) Rendahnya tingkat kriminalitas; (2) Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi; (3) Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tentram, dan damai; (4) Tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban; dan (5) Berkurangnya/menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, baik fisik, seksual maupun psikis.
8. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, yang ditandai oleh: (1) Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar moda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha yang tinggi. Terselenggaranya teknologi komunikasi yang efisien dan modern guna terciptanya Kota Yogyakarta sebagai cyber city terkemuka di Indonesia; (2) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan dan energi; (3) Tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata ke segenap lapisan masyarakat; (4) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan; (5) Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh; dan (6) Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

9. Terwujudnya **Kota Yogyakarta Sehat**, yang ditandai oleh: (1) Meningkatnya gaya hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dari rendahnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya status gizi masyarakat, rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS; (2) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan kesehatan (*universal coverage insurance*) terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kesehatan reproduksi perempuan; (3) Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perumahan serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan rumah tangga; (4) Rendahnya tingkat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza); dan (5) Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap peredaran obat-obatan, kosmetika, alat-alat kesehatan, dan makanan.

Sementara sasaran pembangunan lima tahunan ketiga bidang pendidikan, Kota Yogyakarta diarahkan sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan standar mutu internasional. Pada bidang pariwisata, Kota Yogyakarta diarahkan sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan dukungan manajemen yang profesional, sedangkan pada bidang pelayanan jasa diarahkan sebagai kota pelayanan jasa dengan dukungan infrastruktur global.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2005-2025, penataan ruang dan wilayah diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian, dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangannya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan kota yang bersih, sehat, indah, dan nyaman serta berkelanjutan sesuai dengan tata nilai Yogyakarta Berhati Nyaman; terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; terciptanya kehidupan sosial budaya kota yang menghargai tradisi, perilaku, dan tatanan yang bersumber pada nilai Mangayu Hayuning Bawono, dengan mempertahankan, meningkatkan atau menciptakan ruang-ruang kota yang

mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta; serta meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

#### **E. RTRW Kota Yogyakarta**

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya adalah:

1. Struktur tata ruang, yang dikembangkan berdasarkan keselarasan dengan garis imajiner Tugu – Kraton – Krapyak, sistem grid yang terbentuk dari perpaduan jalan utama dengan sistem sungai yang ada (Gajahwong, Code, dan Winongo) juga pola pengembangan perkotaan di sekitarnya. Arah pengembangan yang radial konsentrik ke pusat kota didekonsentrasikan ke wilayah pinggiran perkotaan, seperti pengembangan sentra komersial dan industri ke arah Timur dan Barat kota.
2. Tata guna lahan, tercapainya komposisi ruang terbangun dan terbuka yang optimal sedemikian hingga keberadaan ruang terbuka yang tersisa masih dapat memberikan manfaat ekologis yang maksimal untuk lingkungan pusat perkotaan dan menjadi paru-paru Kota Yogyakarta.
3. Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan permukiman permukiman, jalan dan transportasi, drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi, serta pengelolaan persampahan. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.
4. Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:

1. Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.

2. Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.
3. Ke arah barat, dengan mempertahankan sebagian lahan pertanian yang ada sebagai ruang terbuka hijau dan penataan lingkungan permukiman, untuk memperjuat karakter perkotaan.

### ***Perwujudan Struktur Ruang***

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
  - a. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi: (1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan, (2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.
  - b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi: Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan Sistem Transportasi dengan perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
  - a. Jaringan arteri primer: Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yakni jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan
  - b. Jaringan jalan arteri sekunder
    - 1) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas: (i) Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo, (ii) Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
    - 2) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yakni jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
  - c. Jembatan  
Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
  - a. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta,

dan (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

- b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Jaringan pelayanan *feeder*, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- c. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- d. Jaringan persampahan, meliputi: (1) Penambahan lahan TPA Piyungan, yang berlokasi di Kabupaten Bantul, dan (2) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- e. Air limbah, meliputi: (1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
- f. Air Minum, melalui: (1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pembelian truk tangki air minum.

### ***Perwujudan Pola Ruang***

- 1. Perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
  - a. Pemantapan fungsi kawasan hutan wisata, yang berlokasi di Kebun Binatang Gembiraloka.
  - b. Pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai, yang berlokasi di Sungai Code, Gajahwong, dan Winongo.
  - c. Pemantapan fungsi kawasan ruang terbuka hijau, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - d. Pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya, yang berlokasi di Kecamatan Kotagede, Kraton, dan Pakualaman.
- 2. Perwujudan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
  - a. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan industri kecil dan menengah, yang berlokasi di Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo.
  - b. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan pariwisata, yang berlokasi di Kecamatan Kraton, Kotagede, dan Pakualaman.

- c. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan dan jasa, yang terdiri dari: (1) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan regional, yang berlokasi di Kecamatan Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo, dan Mantrijeron, (2) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan grosir, yang berlokasi di Kecamatan Gondomanan dan Kotagede, dan (3) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa, yang berlokasi di seputar pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kecamatan (kelurahan).
- d. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman, yang berlokasi di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, terdiri atas :
  - 1) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan perkotaan, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - 2) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian rumah susun, yang berlokasi di Kecamatan Ngampilan, Tegalrejo, Mantrijeron, dan Mergangsan.
- e. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan untuk fasilitas umum dan sosial (rumah sakit, puskesmas, pendidikan, peribadatan, olahraga, taman rekreasi, dan lain-lain) yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- f. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan budidaya lainnya, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

***Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis***

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
  - a. Pengembangan kawasan kerajinan perak, yang berlokasi di Kecamatan Kotagede.
  - b. Pengembangan kawasan batik, yang berlokasi di Kecamatan Mantrijeron.
  - c. Pengembangan kawasan pariwisata budaya, yang berlokasi di Kecamatan Pakualaman, Kraton, dan Kotagede.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan citra kota, meliputi:
  - a. Pengembangan kawasan budaya, yang berlokasi di Kecamatan Kraton, Pakualaman, Kotagede, dan Tegalrejo.
  - b. Pengembangan kawasan pendidikan, yang berlokasi di Kecamatan Gondokusuman.
  - c. Pengembangan kawasan perjuangan dan pariwisata, yang berlokasi di Kecamatan Kraton, Tegalrejo, dan Mergangsan.

#### **F. RPJMD Daerah Sekitar**

Sebagai daerah yang memiliki posisi di tengah wilayah DIY, Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dalam rangka penyelerasan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta perlu memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD.

**Tabel 2.252**  
**Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul**

Kabupaten Sleman	Keterkaitan Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Keterkaitan Kota Yogyakarta
Perlunya <b>integrasi kegiatan</b> mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis	Integrasi kegiatan mitigasi bencana diperlukan mengingat bencana gunungapi tidak hanya menjadi ancaman bencana di Kabupaten Sleman tetapi juga di Kota Yogyakarta	Kemiskinan dan Pengangguran	Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul akan mengakibatkan penduduk miskin tersebut masuk ke Kota Yogyakarta mencari pekerjaan tanpa keahlian dan memungkinkan munculnya permasalahan sosial di Kota Yogyakarta.
Perlunya <b>peningkatan kualitas sarana dan prasarana</b> lalu lintas, terminal dan angkutan jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kendaraan bermotor berkala	Mengingat Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman termasuk dalam area perkotaan Yogyakarta maka kualitas sarana dan prasarana lalu lintas, terminal dan angkutan jalan jika tidak ditingkatkan akan mempengaruhi pelayanan transportasi publik di Kota Yogyakarta	Pendidikan untuk kemajuan dan peningkatan moralitas	Mengingat pendidikan di Kota Yogyakarta masih menjadi tujuan utama para pelajar di wilayah sekitar, maka diperlukan kerjasama antarwilayah yang memungkinkan pendidikan menjadi sarana untuk menciptakan kemajuan dan peningkatan moralitas anak didik.
Masih tingginya <b>tingkat pengangguran</b>	Tingginya pengangguran akan mengakibatkan pencari kerja memanfaatkan peluang dan kesempatan kerja di Kota Yogyakarta	Pelayanan kesehatan	Terbatasnya dan belum optimalnya pelayanan kesehatan akan mengakibatkan penduduk Kabupaten Bantul berupaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kota Yogyakarta.
Belum optimalnya <b>diversifikasi produk pangan lokal</b> , masih banyaknya penggunaan bahan aditif yang berpengaruh pada keamanan pangan, dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun	Mengingat Kota Yogyakarta sangat bergantung pada daerah sekitar dalam hal pangan, maka diversifikasi produk pangan lokal yang belum optimal di Kabupaten Sleman akan berpengaruh pada keamanan pangan Kota Yogyakarta.	Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga	Mengingat ODTW Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta berada di wilayah DIY, maka diperlukan sinergi dan kerjasama antarwilayah yang dapat memadukan dan mengembangkan potensi pariwisata kedua wilayah, demikian juga untuk kegiatan yang terkait pemuda dan olahraga.
Semakin <b>berkurangnya luas hutan rakyat</b> dan masih cukup luasnya lahan kritis	Luasnya lahan kritis akan berpengaruh terhadap menurunnya area cadangan air tanah, mengingat sebagian wilayah Kabupaten Sleman merupakan daerah yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi	Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB)	Mengingat Kota Yogyakarta sangat bergantung pada daerah sekitar dalam hal pangan, maka terjaganya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul akan berpengaruh pada keamanan pangan Kota Yogyakarta.

Kabupaten Sleman	Keterkaitan Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Keterkaitan Kota Yogyakarta
	sumberdaya air bagi daerah yang ada di bawahnya seperti Kota Yogyakarta .		
Pesatnya permohonan <b>alih fungsi lahan</b> oleh masyarakat	Alih fungsi lahan yang pesat akan terkait dengan fungsi sebagai kawasan lindung Kabupaten Sleman terutama semakin terbatasnya air tanah.	Ancaman kerusakan lingkungan, permukiman tak sehat, bencana alam dan penanganan pengungsi	Ancaman kerusakan lingkungan, permukiman tak sehat, bencana alam dan penanganan pengungsi merupakan permasalahan bersama yang harus dihadapi oleh kedua wilayah.
Terjadinya <b>degradasi lingkungan</b> , rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak pemanasan global	Degradasi lingkungan khususnya rendahnya pengelolaan lingkungan hidup dapat ditandai dengan beragam sampah yang masuk di aliran sungai dari hulu yang berada di Kabupaten Sleman kemudian masuk wilayah Kota Yogyakarta akan mengakibatkan permasalahan lingkungan.	Pengelolaan TPST Piyungan menuju <i>zero waste</i>	Menuju pengelolaan TPST Piyungan yang <i>zero waste</i> diperlukan kerjasama antar wilayah, mengingat Kota Yogyakarta memanfaatkan TPST Piyungan sebagai area tempat pembuangan sampah.
<b>Terbatasnya sumberdaya kesehatan</b> , belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	Terbatasnya sumberdaya kesehatan dan belum optimalnya pelayanan kesehatan akan mengakibatkan penduduk Kabupaten Sleman berupaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kota Yogyakarta.		
<b>Belum meratanya pengetahuan masyarakat</b> terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya kepesertaan pasangan usia subur tidak berKB	Permasalahan kesehatan reproduksi dan KB yang tidak tertangani di Kabupaten Sleman akan berupaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kota Yogyakarta seperti halnya permasalahan kesehatan lainnya.		
<b>Belum optimalnya sinergi</b> dan keterlibatan antara masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata, minimnya kreatifitas dan inovasi dalam	Mengingat ODTW Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di wilayah DIY, maka diperlukan sinergi dan kerjasama antarwilayah yang dapat memadukan dan		

Kabupaten Sleman	Keterkaitan Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Keterkaitan Kota Yogyakarta
mengembangkan kompetensi dan daya saing ODTW serta perlunya peningkatan kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata	mengembangkan potensi pariwisata kedua wilayah.		
<b>Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana</b> dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	Aksesibilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal akan mengakibatkan penduduk Kabupaten Sleman masuk ke Kota Yogyakarta untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih memadai.		
Banyaknya <b>masalah sosial di kalangan pemuda</b> , terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga.	Permasalahan sosial di kalangan pemuda dan terbatasnya sarana prasarana pengembangan pemuda dan olah raga akan berpengaruh terhadap pemuda di Kota Yogyakarta dan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia di Kota Yogyakarta.		
Banyaknya <b>pendatang yang masuk</b> ke wilayah Kabupaten Sleman yang tidak tercatat di register kependudukan	Pendatang masuk ke wilayah Kabupaten Sleman yang cukup banyak dimungkinkan karena secara administratif penduduk tercatat di Kota Yogyakarta tetapi tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, akan menjadi permasalahan kependudukan di kedua wilayah dalam pelayanan publik.		
Masih <b>cukup tingginya angka kemiskinan</b> dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman akan mengakibatkan penduduk miskin tersebut masuk ke Kota Yogyakarta untuk mencari pekerjaan tanpa keahlian dan memungkinkan munculnya permasalahan sosial di Kota Yogyakarta.		

#### **G. RTRW Daerah Sekitar**

Seperti halnya penyelarasan dengan rencana pembangunan daerah sekitar, maka diperlukan pula penyelarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah sekitar, mengingat wilayah Kota Yogyakarta berada pada posisi tengah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul memiliki keterkaitan ruang dengan ruang wilayah di sekitarnya. Penelahaan kebijakan berikut merupakan kebijakan yang terkait langsung dengan permasalahan yang harus dihadapi Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.253**  
**Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul**

Kabupaten Sleman	Keterkaitan Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Keterkaitan Kota Yogyakarta
<p><b>Tujuan pemanfaatan ruang:</b>  Mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten Sleman yang mendukung pengembangan wilayah Propinsi DIY, khususnya kawasan pengembangan utama (KPU) Lereng Merapi, yaitu sebagai <b>penyangga sumberdaya air bagi daerah bawahnya</b> dan <b>mendukung pengembangan wilayah perkotaan Yogyakarta.</b></p> <p>Kebijakan pemanfaatan budidaya diarahkan dengan pola lingkaran konsentris (<i>concentric zone</i>), Kota Yogyakarta sebagai pusat orientasi (sejalan ketetapan RTRWP DIY), bagian wilayah yang menempel Kota Yogyakarta difasilitasi perkembangannya sebagai <i>urban area</i> Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang berkepadatan tinggi dengan fungsi utama adalah kegiatan sektor tersier dan sekunder.</p>	<p>Kota Yogyakarta sangat tergantung pada kelestarian kawasan Lereng Merapi sebagai penyangga sumberdaya air, untuk itu sangat diperlukan kerjasama antar wilayah. Ketersediaan sumberdaya air Kota Yogyakarta sangat tergantung pada kelestarian kawasan Lereng Merapi.</p> <p>Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang difungsikan untuk kegiatan sektor tersier dan sekunder merupakan upaya untuk mewadahi perkembangan kegiatan ekonomi di perkotaan Yogyakarta.</p>	<p>Tujuan pemanfaatan ruang:  Mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.</p>	<p>Kerjasama antar wilayah diperlukan untuk pengembangan industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, jasa, perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Kerjasama dalam pengurangan risiko bencana sangat diperlukan mengingat Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul memiliki risiko bencana yang sama khususnya gempabumi dan banjir.</p>
<p><b>Rencana Struktur Ruang:</b>  Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sebagian besar difungsikan sebagai kawasan perkotaan dan sub perkotaan.</p>	<p>Kecamatan di Kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan kecamatan di Kabupaten Sleman perlu bekerjasama dalam pengembangan kawasan perkotaan di</p>	<p><b>Rencana Struktur Ruang:</b>  Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sebagian besar difungsikan sebagai kawasan perkotaan dan sub</p>	<p>Kecamatan di Kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan kecamatan di Kabupaten Bantul perlu bekerjasama dalam pengembangan kawasan perkotaan di perbatasan</p>

Kabupaten Sleman	Keterkaitan Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Keterkaitan Kota Yogyakarta
Depok dan Gamping hierarkhi I dan difungsikan sebagai pusat pemerintahan.	perbatasan sesuai dengan fungsi.	perkotaan.IKB Bantul, IKK Banguntapan, IKK Kasihan dan IKK Sewon ditetapkan hierarkhi I. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN): sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, dan sebagian Kecamatan Banguntapan. Ketiganya masuk sebagai bagian Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).	sesuai dengan fungsi.
<b>Rencana Sistem Prasarana Wilayah:</b> a. Sistem Transportasi Rencana pengembangan sistem jalan arteri primer: - Yogyakarta-Semarang - Yogyakarta-Surabaya - Yogyakarta-Bandung/Jakarta - Ringroad aglomerasi perkotaan Yogyakarta Rencana pengembangan sistem jalan kolektor primer: - Yogyakarta-Wonosari - Yogyakarta-Wates - Yogyakarta-Kaliurang Rencana pengembangan terminal: - Terminal terpadu untuk melayani pergantian sistem angkutan jalan raya, kereta api dan udara di Maguwo. - Terminal penumpang tipe A untuk melayani pergantian sistem	Kerjasama antar wilayah sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana sistem prasarana wilayah berupa (a) sistem transportasi dengan pengembangan sistem jalan arteri primer, sistem jalan kolektor primer, pengembangan terminal; serta (b) prasarana pengairan.	<b>Rencana Sistem Jaringan Transportasi:</b> a. Jaringan jalan arteri primer: - Ringroad - Batas kota-Pelem Gurih (Gamping) - Yogyakarta-Kulon Progo b. Jaringan jalan kolektor primer: - Yogyakarta-Piyungan - Jalan Kolonel Sugiyono-Jalan Brigjen Katamso-Jalan Panembahan-Jalan Senopati - Jalan Kota Yogyakarta-Bakulan - Jalan Yogyakarta-Bibal Jalan Imogiri-Dodogan c. Sistem jaringan kereta api: Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis	Kerjasama antar wilayah sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi yang terpadu dengan wilayah sekitar termasuk Kabupaten Bantul.

Kabupaten Sleman	Keterkaitan Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Keterkaitan Kota Yogyakarta
<p>angkutan antar kota antar provinsi di Jombor Kecamatan Mlati.</p> <p>- Terminal barang dikembangkan di sekitar Stasiun KA Patukan Kecamatan Gamping.</p> <p>b. Prasarana Pengairan</p> <p>Khususnya sistem irigasi yang terkait langsung dengan Kota Yogyakarta dikembangkan sebagai sub sistem irigasi zona tengah Provinsi DIY.</p>			
<p><b>Rencana Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas</b></p> <p>Kawasan Strategis Tumbuh Cepat yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Mlati, Depok, Berbah dan Gamping (wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta).</p>	<p>Kota Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dalam mewujudkan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) dengan Kabupaten Sleman.</p>	<p>Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Perkotaan Yogyakarta (KPY).</p>	<p>Kota Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dalam mewujudkan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) dengan Kabupaten Bantul.</p>

### **2.3.3. Penetapan Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kriteria untuk menentukan isu strategis jangka panjang daerah sekurang-kurangnya: (1) Memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (2) Mendapatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Berikut ini adalah isu strategis pembangunan jangka menengah daerah :

#### **2.3.3.1. Bidang Sosial**

##### **A. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Hasil identifikasi terhadap permasalahan dan FGD di bidang kependudukan menunjukkan bahwa dari sisi potensi adalah dimilikinya struktur penduduk usia produktif dan lansia yang cukup besar di masa mendatang. Sementara itu, dari sisi permasalahan dapat diidentifikasi dengan: 1) belum semua warga Kota Yogyakarta memiliki dokumen kependudukan, utamanya adalah akte kelahiran yang menunjukkan angka kepemilikan di kisaran 90-an %; 2) komponen kependudukan menunjukkan bahwa angka migrasi, utamanya migrasi keluar lebih dominan dalam lima tahun terakhir. Dari sisi peluang kependudukan dan catatan sipil adalah: 1) keberadaan potensi bonus demografi yang secara nasional diperkirakan akan terjadi mulai tahun 2030-an, oleh karena itu diperlukan kesiapan dari sumberdaya-sumberdaya manusia produktif di Kota Yogyakarta dalam mengantisipasi dinamika kependudukan beserta dengan peluang-peluang yang berkaitan dengan isu kependudukan, seperti ketenagakerjaan; 2) keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjelaskan bahwa manfaat dari kepemilikan dokumen kependudukan adalah: i) kekuatan hukum (legalitas) yang mengikat pemilikanya; ii) dapat dimanfaatkan untuk mempermudah peroleh akses pelayanan sosial ekonomi; iii) bagi pemerintah sendiri, dengan tertibnya administrasi kependudukan akan memudahkan pemerintah dalam hal memberikan pelayanan publik melalui kegiatan pencatatan administrasi kependudukan di dalam databasenya.

Namun, kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan dirasakan masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan berbagai usaha untuk mendorong dan memfasilitasi

kepemilikan dokumen kependudukan melalui upaya-upaya “jemput bola.” Dari sisi ancaman yang dapat muncul dari permasalahan kependudukan perkotaan adalah: 1) kemungkinan munculnya kriminalitas yang diakibatkan oleh lemahnya pencatatan administrasi kependudukan; 2) semakin bertambahnya penghuni kawasan kumuh yang berasal dari luar Kota Yogyakarta yang tidak tercatat administrasi kependudukan; 3) tidak diperolehnya fasilitas pelayanan sosial dasar bagi penduduk yang belum memiliki (tidak tercatat) berbagai dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan dalam perolehan akses pelayanan sosial dasar tersebut: pendidikan, kesehatan, bantuan kemiskinan.

Mendasarkan kepada berbagai hal tersebut maka dapat dirumuskan bahwa isu kependudukan dan catatan sipil adalah **“pengendalian kependudukan di Kota Yogyakarta.”** Isu strategis di atas dimunculkan dengan pertimbangan semakin bertambahnya angka kelahiran, dan migrasi masuk dan keluar. Tidak diperkenankannya suatu wilayah administrasi untuk melarang warga negara Indonesia untuk berpindah domisili menjadi tantangan yang tidak terelakkan dikarenakan hal tersebut adalah hak warga negara. Namun, pengendalian kependudukan yang dimungkinkan terjadi adalah pengendalian kependudukan yang berasal dari penduduk yang sudah berdomisili terlebih dahulu di Kota Yogyakarta. Upaya-upaya untuk mensosialisasikan pembangunan keluarga melalui pembatasan usia pernikahan, kehamilan, dan jumlah anak nampaknya diperlukan dalam rangka pengendalian kependudukan.

## **B. Kesehatan**

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh Dinas Kesehatan didukung *stakeholder* lain di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, dan partisipasi aktif masyarakat Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya beberapa penghargaan terkait bidang kesehatan, yaitu Manggala Karya Kencana (2003), Manggala Karya Bakti Husada (2004), Swasti Saba Wiwerda (2005), Ksatria Bakti Husada (2006), Swasti Saba Wistara (2007), Manggala Karya Bakti Husada Arutala (2008), Swasti Saba Wistara (2009), Manggala Karya Bakti Husada ADITYA (2010), Swasti Saba Wistara (2011), Ksatria Bakti Husada Kartika (2011), Swasti Saba Wistara (2013), Ksatria Bakti Husada Arutala (2013), Sertifikat Eliminasi Malaria (2014), Kepatuhan Standar Pelayanan Publik untuk Dinas Kesehatan (2014), Penghargaan AKOPSI (2014) untuk kategori Regulasi Dalam Peningkatan Pencapaian Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Ksatria Bakti Husada Kartika (2014). Indikator keberhasilan program lain dalam bidang kesehatan adalah meningkatnya angka harapan hidup di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun, bahkan angka harapan hidup masyarakat kota Yogyakarta tertinggi di Indonesia. Walaupun demikian, masih

perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil diskusi dalam pertemuan FGD dengan *stakeholder* yang terkait dengan dengan bidang kesehatan dan data yang ada, isu strategis yang cukup penting adalah:

**1. Belum optimalnya sistem pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah target nasional. Jumlah kematian pada balita secara umum mengalami penurunan dalam 5 tahun ini. Begitu pula masih ditemui kematian ibu karena kehamilan, melahirkan dan nifas, walaupun pada tahun 2014 telah menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kasus kematian bayi dan ibu hingga mencapai 0%. Oleh karena itu, perlu terobosan baru untuk mencapai angka 0%, termasuk pembaruan input data untuk memilah penduduk dengan KTP Kota Yogyakarta dan yang bukan KTP Kota Yogyakarta. Hal ini mengingat salah satu faktor yang menjadi penyebab peningkatan angka kematian bayi dan masih terdapatnya kematian ibu melahirkan adalah individu yang meninggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Yogyakarta namun tidak berdomisili di Kota Yogyakarta, sehingga tidak dapat dipantau selama proses kehamilan hingga persalinan.

Kasus gizi buruk secara umum mengalami penurunan, bahkan penanganan kasus gizi buruk telah mencapai 100%. Target Dinas Kesehatan untuk mengeliminasi kasus gizi buruk harus didukung semua pihak, sehingga nantinya tidak ditemukan kasus gizi buruk di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dicapai dengan program pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, seperti aktif mengikuti program posyandu yang salah satunya penimbangan balita secara teratur sehingga bisa dicegah sejak dini, dan memberikan edukasi yang sesuai.

**2. Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular**

Pengendalian penyakit menular terutama kasus DBD, leptospirosis dan tuberkulosis perlu ditingkatkan. Pengembangan strategi pencegahan dan pemberantasan kasus penyakit menular ini perlu kerjasama semua komponen pelayanan bidang kesehatan maupun *stakeholder* lainnya, mengingat faktor geografis, iklim, kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan, permukiman dan lain-lain akan mempengaruhi keberhasilan program. Berbagai strategi perlu dikembangkan, seperti memberdayakan

peran kader kesehatan, eliminasi kasus dengan mengurangi faktor risiko terjadinya penularan penyakit, strategi pendampingan kasus khusus pada kelompok berisiko tinggi melalui pendekatan personal, dan promosi informasi yang efektif dengan memberikan informasi secara optimal sesuai sasaran, selain perlu juga inovasi deteksi dini penegakan diagnosis dengan tes cepat, akurat, murah dan mudah didapat, ketersediaan pengobatan yang tepat dan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan yang tepat. Terutama untuk kasus tuberkulosis perlu diwaspadai meningkatnya kasus TB *Multi Drug Resistant* (TB MDR). Oleh karena itu, manajemen terpadu dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan keuangan dalam pengendalian penyakit menular harus dilakukan secara berkesinambungan.

Peningkatan kasus HIV-AIDS dalam 5 tahun terakhir, dan belum terpenuhinya target RPJMD bagi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS merupakan pekerjaan rumah dan tantangan yang harus dihadapi. Meskipun begitu, peningkatan kasus HIV-AIDS ini juga menunjukkan keberhasilan program penemuan penderita HIV-AIDS, sekaligus keprihatinan karena dapat berdampak buruk pada masa depan individu penderita, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Diharapkan dengan penemuan sedini mungkin kasus HIV-AIDS segera dapat ditangani. Perlu inovasi terobosan baru untuk keberhasilan upaya promotif dan preventif yang tepat sasaran dan kondisi yang ada.

Usia harapan hidup masyarakat Yogyakarta tertinggi di Indonesia. Pada satu sisi hal ini menunjukkan keberhasilan program bidang kesehatan, di sisi lain peningkatan jumlah lansia menyebabkan terjadi pergeseran pola penyakit beberapa tahun terakhir ini, yaitu dari penyakit infeksi menular menjadi penyakit tidak menular (degeneratif). Sepuluh besar penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta didominasi penyakit degeneratif. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan dampak meningkatnya jumlah lansia supaya dapat diantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan baru, sehingga diharapkan dengan keberhasilan suatu program akan diikuti dengan keberhasilan program-program yang lainnya.

### **3. Tingginya jumlah usia remaja (15-24 tahun)**

Upaya peningkatan derajat kesehatan bisa dilakukan melalui penekanan pada upaya promotif dan preventif dengan tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif. Salah satunya adalah memanfaatkan tingginya jumlah usia remaja (15-24 tahun) yang tampak pada piramida penduduk tahun 2013. Kelompok usia ini rentan terkena

gangguan penyakit terutama terkait *life style*, sebaliknya kelompok usia ini merupakan potensi dan salah satu ujung tombak keberhasilan upaya promotif dan preventif, salah satunya tentang kesehatan reproduksi (kespro) yang memang sudah seharusnya dipahami dan dimengerti dengan baik oleh anak usia remaja. Perlu pengkajian ulang materi kespro yang selama ini masih terdapat perbedaan antar Dinas Pendidikan dan Kantor KB, sehingga bisa tercipta materi yang sesuai tingkat usia dan jenjang pendidikan, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya timur. Oleh karena itu, perlu kerjasama lintas sektoral agar permasalahan ini bisa ditangani bersama. Di samping itu, perlu pendekatan dan perhatian khusus dari lintas sektoral untuk dapat membentuk generasi muda yang sehat jasmani dan rohani.

### **C. Keluarga Berencana**

#### **Pengetahuan kesehatan reproduksi yang belum memadai**

Tingginya jumlah remaja usia 15-24 tahun menjadikan dua hal bertentangan. Pertama, tingginya jumlah remaja akan menjadi permasalahan jika tidak dikendalikan kualitasnya dengan baik. Seperti yang dipaparkan pada sub bab permasalahan kesehatan, bahwa tingginya jumlah remaja diikuti dengan cepatnya kemajuan teknologi dan informasi seringkali disikapi kurang bijak oleh para remaja, sehingga akan menyebabkan perilaku menyimpang pada remaja (misalnya narkoba, seks bebas, kehamilan di luar nikah). Di sisi lain, perlu dipertimbangkan bahwa pada usia tersebut remaja seringkali belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang berumah tangga, dan mendidik anak. Kekhawatiran yang muncul adalah meningkatnya pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa kesiapan ilmu dan kesiapan mental pelakunya sehingga berdampak pada buruknya kualitas keluarga yang dibentuk dan kualitas anak-anak yang dilahirkan. Kemungkinan buruk munculnya permasalahan kehamilan yang tidak diinginkan pun bertambah karena ketidaksiapan dalam berumah tangga ataupun kesalahan pergaulan hingga mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Namun, jika tingginya jumlah remaja ini dapat disikapi, dikontrol, dan dibina dengan baik justru akan menjadi potensi unggul sumber daya manusia di masa depan karena tonggak pemerintahan dan kepemimpinan nantinya akan dipegang oleh remaja-remaja ini. Di sini, peran keluarga akan sangat penting dan utama dalam membentuk karakter-karakter remaja ini, mengingat keluarga adalah madrasah pertama dan benteng pertahanan pertama dari pengaruh buruk lingkungan

sekitar. Sehingga perlu diperhatikan pembinaan terhadap keluarga sebagai pendidik utama, serta pembinaan pada remaja itu sendiri sebagai calon orang tua.

#### **D. Pendidikan**

Pembangunan pendidikan di Yogyakarta merupakan satu dari sekian yang terbaik di Indonesia. Hal ini terlihat dari citra Kota Yogyakarta yang lebih dikenal sebagai Kota Pendidikan. Berbagai fasilitas pendidikan dari sisi jumlah yang bervariasi dan mutu pendidikan yang bagus menjadi jaminan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Hal ini diindikasikan dengan tingginya minat dari para penduduk yang berasal dari dalam Kota Yogyakarta, dan luar Kota Yogyakarta untuk menyekolahkan putra atau putrinya di Kota Yogyakarta. Dari sisi potensi, terlihat bahwa dari sisi akses dan mutu merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pembangunan kependidikan Kota Yogyakarta. Dengan mengusung misi bahwa tidak ada siswa yang tidak sekolah maka upaya-upaya pembangunan dari sisi formal, informal, ataupun pendidikan kemasyarakatan selalu dilakukan dalam rangka pencapaian program wajib belajar masyarakat. Sementara itu, aspek mutu yang terlihat dari sisi kualitas pengajar, sistem pembelajaran, dan prestasi merupakan nilai tambah pembangunan pendidikan Kota Yogyakarta.

Namun, kendala atau permasalahan masih dijumpai di bidang pendidikan, yaitu belum semua warga bebas buta aksara, tingginya minat penduduk untuk bersekolah di Kota Yogyakarta, penurunan angka partisipasi sekolah tingkat dasar, berkurangnya jumlah sekolah, perkiraan kekurangan jumlah pengajar. Sementara itu, dari sisi eksternal, kajian terhadap pembangunan kependidikan dapat terlihat dari aspek peluang dan ancaman. Dari sisi peluang, terlihat bahwa kesepakatan MEA akan membawa konsekuensi kepada peningkatan daya saing lulusan dari berbagai macam tingkatan pendidikan, berikutnya adalah kesiapan dari lulusan pendidikan formal dan informal yang bersertifikat sesuai dengan standar KKNi, terakhir adalah dengan akan dimulainya muatan revolusi mental sebagai misi pemerintah untuk perbaikan semangat kebangsaan akan mulai dirintis dari tingkatan PAUD ataupun pendidikan anak-anak. Namun, dari sisi ancaman yang dimungkinkan adalah peralihan kewenangan pendidikan menengah atas yang nantinya akan dikelola oleh provinsi membawa beberapa konsekuensi seperti daya serap dari siswa lulusan SMP Kota Yogyakarta untuk mendapatkan akses SMA di Kota Yogyakarta yang terkenal mutunya. Diharapkan nantinya siswa lulusan SMP tersebut dapat melanjutkan studinya di dalam Kota Yogyakarta dengan antisipasi bahwa peningkatan daya saing untuk berkompetisi dengan lulusan dari luar Kota Yogyakarta dalam rangka mendapatkan kursi di tingkat SMA. Dari analisis kondisi

yang berupa kajian terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis di bidang pendidikan adalah ***“kesiapan pendidikan Kota Yogyakarta yang berbasiskan kekuatan revolusi mental dalam pemenuhan akses pendidikan bagi semua warganya sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas, berbudaya, berbudi pekerti luhur, kompeten, dan berdaya saing.”***

#### **E. Sosial**

Keberadaan masalah sosial di Kota Yogyakarta merupakan kenyataan bersama yang terus meningkat dan berkembang sebagai akibat dari perkembangan sebuah kota. Kota Yogyakarta sebagai kota urban tidak terlepas dari permasalahan semakin banyaknya gelandangan, pengemis, anak jalanan, warga terlantar, penderita psikotik dan permasalahan sosial lainnya. Penanganan bagi warga masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah sosial terus dilakukan oleh berbagai unsur terkait baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat agar tidak menjadi beban kota. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terdiri dari empat hal pokok yaitu: (a) rehabilitasi sosial, (b) jaminan sosial, (c) pemberdayaan sosial, dan (d) perlindungan sosial. UPT Panti Karya Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terus mengembangkan diri sebagai institusi pelayanan masyarakat yang dinamis, responsif dan tanggap. Setiap kegiatan diarahkan pada upaya-upaya yang memanusiakan manusia. Masyarakat yang terkena operasi penertiban atau terlantar tidak sekedar ditampung akan tetapi dibina agar dapat kembali hidup normal.

Isu strategis terkait dengan urusan sosial adalah ***masih rendahnya penanganan terhadap masyarakat kelompok rentan*** (terkait dengan penyediaan infrastruktur, aksesibilitas, dan tenaga pendamping yang kompeten). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, saat ini tercatat ada 25 jenis PMKS. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Kota Yogyakarta dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang merupakan bagian Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 yang bertugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah kota dengan pemangku kepentingan dalam rangka

pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, juga melaksanakan mediasi, *advice* dan advokasi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah kota maupun dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, penyediaan infrastruktur khususnya untuk kaum disabilitas, perlu ada koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kimpraswil.

Sementara itu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mempunyai posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan. Guna menunjang hal tersebut, maka kegiatan PSM perlu diarahkan agar pengetahuan, keterampilan dan hasil kerja mencapai sasaran yang diharapkan.

#### **F. Kebudayaan**

Filosofi yang mendasari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Kebudayaan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Kebudayaan menjadi salah satu dari lima urusan yang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu strategis terkait dengan urusan kebudayaan adalah ***“belum optimalnya pengembangan budaya lokal, termasuk pengelolaan budaya dan pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya.”***

Peran Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui program kampanye penyadaran akan potensi budaya Yogyakarta adalah suatu upaya untuk menyadarkan masyarakat Kota Yogyakarta akan pentingnya melindungi kultur/budaya Kota Yogyakarta. Selain itu kegiatan inventarisasi potensi seni budaya, revitalisasi potensi seni budaya serta program membangun landasan sistemik kebudayaan di Kota Yogyakarta menjadi program Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam menjaga aset budaya. Penetapan sebuah bangunan menjadi bangunan warisan budaya maupun cagar budaya di Kota Yogyakarta, masih terkendala belum adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Cagar Budaya. Penetapan bangunan cagar budaya dan warisan budaya mengacu pada Peraturan Daerah Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian akan diturunkan dalam bentuk peraturan daerah di tingkat Kota Yogyakarta. Selain bangunan cagar budaya dan warisan budaya, di Kota Yogyakarta juga terdapat kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan melalui

keputusan Gubernur DIY, diantaranya Malioboro, Kraton Kasultanan, Kraton Pakualaman, Kotagede dan Kotabaru.

#### **G. Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Isu strategis terkait dengan pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta adalah ***belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, sertakurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak***. Isu strategis dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun kesadaran mulai dari tingkat bawah terutama dari dalam keluarga, lingkungan tingkat RT atau RW tentang pentingnya pemahaman pengarusutamaan gender, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Salah satu target MDG's termasuk diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya perlindungan terhadap anak. Pergeseran paradigma perlindungan anak membawa perubahan mendasar pada pelayanan yang diberikan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Perlindungan dipandang sebagai hak setiap anak tanpa kecuali, sehingga peran keluarga sebagai garda depan sangat penting, dengan memperkuat fungsi pengasuhan dalam keluarga.

Tiga isu strategis pada pembangunan PUG yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, (2) Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu tiga isu strategis di Bidang Perlindungan Anak yang mendapatkan perhatian pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yang Optimal, (2) Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya, dan (3) Peningkatkan Efektivitas Kelembagaan Perlindungan Anak.

UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak dapat dilihat antara lain dari pemenuhan hak identitas anak melalui akta kelahiran, status kesehatan, partisipasi pendidikan, pengasuhan yang baik, serta perwujudan lingkungan ramah anak untuk membangun resiliensi dan stimulasi optimal bagi anak, termasuk dengan memberikan hak anak untuk berpendapat. Kepemilikan akta kelahiran menjamin akses anak terhadap beragam pelayanan dasar, pelayanan sosial, pelayanan hukum, serta mengurangi resiko anak mengalami penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan orang. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan berakibat pada meningkatnya kejadian kekerasan dan eksploitasi seksual serta *trafficking*. Sementara itu pernikahan usia anak di bawah umur masih banyak ditemui.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014, kewajiban dan tanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Peningkatan efektivitas kelembagaan meliputi aspek norma, struktur, dan proses dalam pelayanan perlindungan anak. Saat ini, masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari undang-undang yang ada. Selain itu kapasitas lembaga perlindungan anak dalam pelaksanaan berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang ada juga masih kurang, yang tercermin dari keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia. Belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi dan belum optimalnya pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, harus pula diselesaikan agar pelayanan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik.

## **H. Kepemudaan dan Olah Raga**

Kota Yogyakarta dikenal luas sebagai Kota Pelajar dan telah menjadi salah satu tujuan utama bagi pelajar untuk menuntut ilmu, baik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Keberadaan pemuda saat ini selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti kenakalan remaja, kecanduan terhadap narkoba, serta hilangnya kebudayaan karena globalisasi. Hal ini banyak

diakibatkan oleh kurangnya pendidikan *soft skill* di luar pendidikan formal, sehingga pemuda tumbuh dengan kualitas sifat yang kurang baik. Isu strategis terkait dengan kepemudaan dan olahraga adalah ***masih rendahnya kualitas kepemudaan serta masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga.***

Organisasi kepemudaan merupakan lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Melalui organisasi pemuda ini terbentuk watak, mental, tradisi, dan kemampuan pemuda. UU Nomor 40 Tahun 2009 telah menetapkan pelayanan kepemudaan sebagai strategi dalam membangun para pemuda di Indonesia yang harus dilaksanakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah agar terbentuk para pemuda yang mempunyai karakter dan kapasitas serta mempunyai daya saing. Pelayanan kepemudaan yang merupakan strategi dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia, dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu **penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan**. Tanggung jawab pembangunan kepemudaan tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat dan daerah, namun perlu dukungan dan peran aktif semua pihak baik masyarakat maupun swasta bahkan pemuda itu sendiri.

Terkait dengan kondisi di bidang olahraga, Kota Yogyakarta harus terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi di bidang tersebut. Dalam hal ini tidak hanya mencari kemenangan semata, namun juga berupaya untuk menumbuhkan semangat gemar berolahraga bagi masyarakat. Sementara itu, minat masyarakat terhadap olahraga masih belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga. Saat ini masih banyak sarana olahraga yang kurang terawat dan fungsinya juga belum optimal dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

#### **2.3.3.2. Bidang Ekonomi**

##### **A. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan**

Kemiskinan perkotaan masih menjadi isu yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta. Walaupun secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Yang perlu juga diperhatikan adalah golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi.

Kemiskinan harus dilihat dalam berbagai dimensi, bukan semata dimensi ekonomi saja sehingga penyelesaiannya harus mencakup berbagai bidang. Kecenderungan kemiskinan di Kota Yogyakarta terjadi karena kurangnya kesempatan, keterbatasan kepemilikan aset/barang, serta akses terhadap pelayanan

sosial. Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kepala keluarga dan anggotanya, dan akan menjadi lebih parah ketika kepala keluarga atau anggotanya tidak bekerja. Sementara itu, kepemilikan aset juga terbatas, yang berarti orang miskin akan menempati kawasan-kawasan kurang layak huni dengan fasilitas yang terbatas sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kemiskinan yang tidak kunjung teratasi dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan dan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat kerap dipicu oleh tekanan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan.

#### **B. Relatif tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja**

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran serta perluasan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan menjadi penting untuk menghadapi persaingan di pasar kerja. Di Kota Yogyakarta, sebagian besar penganggur merupakan penganggur dengan pendidikan SLTA ke atas. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang nyaman merupakan magnet bagi pencari kerja dari luar untuk mencari pekerjaan. Selain itu, fenomena banyaknya pencari kerja terdidik ini juga karena ada kecenderungan menunggu pekerjaan yang baik sehingga rela menganggur lebih lama. Oleh karena itu, perluasan lapangan kerja melalui investasi yang masuk perlu dioptimalkan disertai dengan perbaikan informasi antara penyedia kerja dan pencari kerja.

Keterampilan tambahan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri juga perlu didorong untuk memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan usaha baru dalam bentuk UMKM juga perlu difasilitasi karena diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja. UMKM memiliki sifat yang mudah berkembang karena tidak membutuhkan modal besar, menggunakan teknologi yang sederhana, menggunakan input lokal, dan mengandalkan kreativitas pelaku. Hal tersebut menjadikan UMKM lebih tahan terhadap krisis dan bahkan mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar, merupakan ancaman bagi UMKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar.

#### **C. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata**

Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal

tersebut secara tersirat menempatkan Kraton Yogyakarta sebagai pusat budaya Kota Yogyakarta. Nilai-nilai kraton diadopsi dan dikembangkan di masyarakat. Budaya inilah yang menjadi daya tarik utama pariwisata Kota Yogyakarta.

Citra positif pariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun. Namun di sisi lain, masih ada pelaku wisata yang berperilaku kurang baik terhadap wisatawan. Kesadaran akan sikap dan perilaku positif terhadap wisatawan inilah yang perlu dibangun. Sikap sadar wisata perlu dimiliki oleh setiap warga Kota Yogyakarta. Partisipasi masyarakat diperlukan karena manusia tidak mungkin lepas dari keadaan sekelilingnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakat terlibat dan tidak merasa terpinggirkan oleh majunya kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta. Fungsi sosial masyarakat dalam memberikan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan harus berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pariwisata berdaya saing tinggi.

Inovasi-inovasi dalam pariwisata penting untuk dilakukan supaya wisatawan berkunjung kembali. Pembuatan destinasi wisata baru atau pengembangan destinasi yang sudah ada dengan penyajian baru dapat menjadi alternatif. Jika hanya mengandalkan obyek wisata kraton dan Malioboro saja maka wisatawan hanya membutuhkan waktu sehari untuk berkunjung. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan dengan paket wisata atau dengan memperdalam pengenalan obyek wisata supaya wisatawan menghabiskan lebih dari sehari untuk mengunjungi obyek wisata. Selain itu, perlu diperhatikan juga tren wisata yang populer di kalangan wisatawan. Hal ini penting untuk menarik wisatawan baru atau wisatawan mancanegara.

#### **2.3.3.3. Bidang Fisik**

##### **A. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

###### ***Pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimal***

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena belum tersedianya kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidak tersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yang diharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat ini dengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsi lahan. Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk

berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, sarana prasarana perkotaan memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itu pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimal diindikasikan dari rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

## **B. Permukiman, Sarana dan Prasarana Perkotaan**

### **1. Keterbatasan persediaan air bersih akibat pembangunan gedung tinggi (hotel)**

Keterbatasan persediaan air bersih merupakan salah satu akibat pembangunan gedung-gedung tinggi yang membutuhkan air bersih di Kota Yogyakarta belum semuanya menggunakan PDAM dan cenderung menggunakan Air Bersih Terlindungi (ABT). Selama beberapa tahun belakangan ini, jumlah bangunan tinggi yang berdiri di Kota Yogyakarta semakin banyak hingga mencapai puluhan. Tingginya minat investor dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi (misalnya perhotelan) diindikasikan menyebabkan semakin sulitnya untuk memperoleh atau mengakses air bersih yang berada di dalam tanah.

### **2. Kecenderungan perubahan alih fungsi prasarana ruang publik menjadi ruang privat**

Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari prasarana ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi permasalahan sosial di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari alih fungsi pemanfaatan lahan dari Taman Hiburan Rakyat, dengan luas 24.690 m<sup>2</sup> yang selama ini menjadi area rekreasi warga kota, berubah pemanfaatannya menjadi ruang privat komersial yakni hotel. Ini mengakibatkan area rekreasi publik, bertemunya warga kota dari berbagai lapisan sosial semakin berkurang, sementara ruang publik yang dapat menggantikannya belum tersedia.

### **3. Belum Optimalnya Fasilitas Penyediaan Sanitasi**

Fasilitas penyediaan sanitasi yang terdiri atas penyediaan sanitasi terbagi menjadi lima indikator, yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentase pengangkutan sampah, dan persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan

(lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun, masuk dalam target RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya yang dikenal dengan target 100-0-100 (target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak).

Hingga saat ini fasilitas penyediaan sanitasi belum optimal, hal ini dapat dilihat dari persentase cakupan sistem air limbah perkotaan setempat yang memadai relatif masih rendah, persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota yang rendah diduga akan menyebabkan penurunan kualitas air tanah sebagai akibat dari pencemaran limbah permukiman. Selain itu masih terdapat area permukiman dengan kondisi kumuh, terlihat dari luas permukiman kumuh 81,12 Ha, yang sebagian besar berlokasi di pinggir sungai (menempati sempadan sungai), sepanjang rel kereta api dan di bawah jembatan, serta masih terdapat 3.304 unit rumah yang termasuk dalam kategori tidak layak huni. Sementara itu RPJMN 2015-2019 menargetkan area permukiman kumuh menjadi 0% sebagai target nasional di akhir tahun 2019. Hal ini akan menimbulkan permasalahan sosial di masa datang jika tidak diselesaikan mulai saat ini.

Permasalahan persampahan merupakan permasalahan lain terkait dengan fasilitas penyediaan sanitasi yang perlu segera diselesaikan. Penduduk yang semakin bertambah akan menciptakan permasalahan sampah baru jika tidak diantisipasi, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan dan kenyamanan sebuah kota. Hingga saat ini persentase volume sampah yang terangkut ke TPA juga persentase volume sampah yang dikelola secara 3R belum mencapai 100%. Sampah yang tidak terangkut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk ke dalam sungai atau berserakan di suatu tempat timbunan sampah yang berakibat pada pencemaran lingkungan.

### **C. Transportasi**

Permasalahan transportasi yang ada di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pembangunan secara menyeluruh. Isu-isu yang muncul dari permasalahan pembangunan suatu wilayah juga sangat terkait dengan berbagai isu yang berkembang baik pada skala lokal maupun global. Isu-isu mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan khususnya transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation*) telah menjadi isu global yang setiap negara dituntut menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan lokal. Strategi pembangunan berkelanjutan muncul pada arena global di “*UN Conference on the Human Environment*” di Stockholm tahun 1972. Pada

konferensi ini 113 negara menekankan perlunya mulai membersihkan lingkungan secara global dikarenakan permasalahan polusi udara, polusi air, dan kontaminasi kimia tidak mengenal batas.

Melaui *Kyoto Protocol (To The United Nations Framework Convention On Climate Change)*, pada 11 Desember 1997, lebih dari 160 negara sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (*green house gases*) 5,2 % di bawah level pada 1990 sebelum tahun 2012. Hal ini kemudian diikuti dengan bangkitnya agenda-agenda keberlanjutan secara international. Pada Desember 2009 disepakati *Copenhagen Protocol* menggantikan *Kyoto Protocol* yang memiliki target mengurangi emisi dunia setengahnya sampai dengan 2050. Di tingkat Asia 44 kota telah menyepakati *Kyoto Declaration for the Promotion of Environmentally Sustainable Transport (EST) in Cities* (24 April 2007) berupa komitmen untuk mengimplemtasikan “*integrated policies*”, strategi-strategi dan program-program yang merupakan elemen kunci EST.

Masalah keberlanjutan pembangunan merupakan isu yang setiap negara dituntut untuk memberikan fokus pada agenda global ini. Isu tersebut jelas berkaitan dengan masalah transportasi yang juga merupakan elemen pembangunan. Kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi menjadi bagian sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas manusia. Menurut Bank Dunia, tantangan pembangunan transportasi di negara-negara sedang berkembang adalah, pertama, akses dan keterjangkauan wilayah. Masih banyak wilayah yang tidak memiliki akses memadai, sehingga masyarakat kesulitan menjangkau berbagai fasilitas dan layanan umum. Kedua, krisis pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang mengakibatkan biaya transportasi tinggi dan menjadi beban berat masyarakat. Di samping itu, kota menjadi motor perkembangan ekonomi, terutama di negara berkembang, dan populasi urban meningkat dengan cepat. Dipacu oleh peningkatan pendapatan, kepemilikan kendaraan di kota-kota negara berkembang meningkat lebih cepat dari pada proporsi ruang perkotaan yang digunakan menjadi jalan. Kondisi ini mendorong munculnya permasalahan mobilitas perkotaan.

Permasalahan mobilitas perkotaan dari tahun ke tahun semakin kompleks. Urbanisasi yang menjadi akar permasalahan diprediksi akan mengakibatkan lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan Indonesia pada tahun 2025 (Bappenas, 2013). Untuk itu diperlukan strategi pengendalian untuk menjamin kemudahan mobilitas masyarakat perkotaan. Di wilayah perkotaan dengan penduduk di atas 500.000 jiwa, penyediaan angkutan massal merupakan sebuah kewajiban. Peran layanan angkutan massal seperti BRT (*Bus Rapid Transit*)

dan kereta api menjadi kunci utama dalam penyediaan layanan transportasi dan dalam mengatasi berbagai permasalahan mobilitas perkotaan seperti kemacetan, keselamatan lalu lintas dan degradasi lingkungan. Dukungan infrastruktur transportasi yang memadai akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Menurut Bappenas ada lima isu strategis transportasi perkotaan, yaitu: tingginya konsumsi bahan bakar, tingginya emisi gas buang, rendahnya pelayanan angkutan umum, kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki dan kesenjangan sosial. Sementara itu, menurut Menteri Perhubungan, beberapa permasalahan yang masih butuh pemecahan seperti kondisi transportasi perkotaan secara nasional, dimana rata-rata masih terjadi kemacetan yang luar biasa, terutama di kota-kota besar. Pangsa angkutan umum hanya sebesar 12,9% dan pangsa angkutan kereta api hanya 2,3%, sedangkan dominasi kendaraan pribadi masih sangat besar yaitu 62,2%.

Dominasi kendaraan pribadi yang masih sangat besar (62,2%) memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas parkir di perkotaan yang juga kian membesar, sementara ketersediaan ruang (*space*) di perkotaan semakin terbatas dan kian mahal. Oleh karena itu berbagai upaya pengendalian jumlah kendaraan yang ada di wilayah perkotaan, serta penyediaan dan pengelolaan parkir yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan dan kebutuhan parkir yang kian membesar. Jangan sampai, ruang jalan yang sudah terbatas untuk pergerakan kendaraan semakin sempit dan sulit dilalui lalu lintas akibat berkembangnya parkir kendaraan di badan jalan yang tidak tertata.

Mencermati berbagai isu strategis yang berkembang baik secara global maupun lokal serta permasalahan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta, ada empat hal yang menjadi perhatian utama, yaitu: rendahnya peran angkutan umum, keselamatan lalu lintas, degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, isu strategis transportasi Kota Yogyakarta dapat dirumuskan sebagai berikut: ***“Masih rendahnya peran angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam mendukung mobilitas perkotaan yang akan berdampak pada penurunan kinerja lalu lintas, kualitas lingkungan dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.”***

Perkembangan Kota Yogyakarta yang cukup pesat dengan luas wilayah tidak terlampau besar menuntut pengembangan transportasi yang efisien dan efektif. Kunci utama transportasi yang efisien dan efektif tersebut terletak pada peran angkutan umum perkotaan. Semakin baik layanan angkutan umum semakin banyak masyarakat yang meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dan semakin efisien penggunaan ruang jalan maupun konsumsi bahan bakar. Dengan demikian kebutuhan ruang parkir dapat dikurangi, kemacetan lalu lintas dapat ditekan dan

keselamatan lalu lintas akan meningkat. Mobilitas masyarakat akan semakin efektif dan dapat diintegrasikan dalam berbagai upaya pembangunan berkelanjutan.

#### **2.3.3.4. Bidang Pemerintahan**

##### **A. Tata Pemerintahan**

Meskipun terdapat banyak kontradiksi dan kesulitan dalam upaya sinkronisasi antar peraturan perundangan khususnya di level implementasi menjadikan Kota Yogyakarta menghadapi ancaman dalam menghasilkan rencana, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Namun demikian di sisi lain beberapa pencapaian target di dalam urusan tata pemerintahan telah mencapai hasil yang baik. Pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah disajikan pada bagian sebelumnya secara umum hasil pembangunan telah mencapai batasan yang relatif baik. Lebih dari itu beberapa prestasi dan penghargaan telah diraih oleh pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan dokumen perencanaan, pencapaian hasil penilaian Lakip, pelaksanaan pengawasan internal bahkan eksternal, bahkan capaian hasil pemeriksaan keuangan dapat mencapai WTP secara berkelanjutan. Banyak penghargaan yang diterima di dalam urusan tata pemerintahan ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta, yang secara strategis membantu dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pada tingkat provinsi dan nasional diperlukan sinkronisasi antara RPJMD Kota Yogyakarta dengan RPJMD Pemda DIY serta RPJMN. Secara integral diperlukan penyesuaian dengan beberapa dokumen perencanaan sehingga tingkat capaian yang diperoleh di Kota Yogyakarta secara akumulatif merupakan sumbangan yang berarti kepada Pemda DIY serta di level nasional. Keistimewaan DIY sebagai acuan yang melandasi pembangunan di Kota Yogyakarta, dan Nawacita diakomodasi dalam sistem pembangunan Kota Yogyakarta.

Kekuatan kelembagaan Kota Yogyakarta tampak pada prestasi dalam perencanaan road map reformasi birokrasi yang menjadi dokumen terbaik. Perencanaan *road map* reformasi birokrasi yang dijadikan sebagai landasan untuk pelaksanaan reformasi struktur, kultur dan administrasi organisasi dan kelembagaan SKPD, memiliki posisi yang sangat strategis. Setelah dicermati dokumen road map reformasi birokrasi yang sudah disusun dan sudah dilaksanakan menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Namun kesinambungan reformasi birokrasi harus ditingkatkan.

Birokrasi secara umum berhadapan dengan tantangan internasional terkait dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan batas-batas antar negara yang semakin longgar juga harus diperhitungkan dalam

urusan tata pemerintahan ini, di satu sisi sebagai tantangan namun di sisi lain merupakan peluang.

Berdasarkan seluruh pertimbangan baik berupa kekuatan internal/potensi, kelemahan maupun tantangan dan peluang maka isu strategis pada urusan tata pemerintahan ini adalah: ***“Agenda road map reformasi birokrasi yang belum selesai dari segi implementasi.”***

## **B. Aparatur Pemerintah Daerah**

Di satu sisi UU ASN memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang masih dibatasi oleh kebijakan moratorium pegawai, yaitu tidak diperkenankan melakukan pengangkatan pegawai hingga penyerapan anggaran rutin dapat proporsional dibandingkan dengan anggaran pembangunan. Dengan UU ASN yang memperpanjang batasan usia pensiun secara strategis menguntungkan pemerintah Kota sehingga para pegawai/pejabat yang berusia 56 tahun masih dapat diperpanjang dua tahun lagi sehingga sampai usia 58 tahun untuk pensiun. Dengan demikian para pegawai/pejabat yang berusia 56 tahun masih dapat dikaryakan sampai umur 58 tahun. Namun demikian keterbatasan jumlah pegawai masih dirasakan sebagai masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Sedangkan besarnya penyerapan anggaran rutin di Kota Yogyakarta disebabkan oleh besarnya jumlah guru, sedangkan pembebanan alokasi tunjangan sertifikasi guru dimasukkan dalam komponen alokasi dana rutin Kota Yogyakarta, sehingga memperbesar serapan anggaran rutin tersebut. Kondisi ini yang perlu ditinjau ulang dalam kebijakan khususnya moratorium di Kota Yogyakarta.

Hal lain dalam UU ASN telah banyak menuntut peningkatan kualitas manajemen SDM pegawai, baik penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP), pemenuhan kompetensi, profesionalitas, sistem seleksi terbuka, pemenuhan standar kinerja, manajemen karir. Semua ini dapat dilakukan jika telah terkondisi sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada sistem merit secara penuh. Untuk kebutuhan merit sistem diperlukan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kompetensi, evaluasi kompetensi pegawai, pendidikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Dengan demikian kebutuhan pegawai, kebutuhan jabatan dan kompetensi semua dapat dipersiapkan. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang maka isu strategis urusan kepegawaian yang disusun adalah ***“Penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang belum berbasis kompetensi.”***

## **C. Hukum**

Hubungan vertikal antara ketentuan hukum di pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan, dengan demikian tidak terjadi saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu koherensi hukum di tingkat pusat

dengan provinsi dan kabupaten/kota hendaknya dilakukan secara optimal. Untuk mendapatkan tanggapan yang enthusiasm maka diperlukan penyesuaian antara hukum di pusat, provinsi dan daerah. Permasalahan di produk hukum, dan sosialisasinya akan dapat mengiringi, jika produk hukum memiliki koherensi yang kuat. Berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, maka rumusan isu strategisnya adalah ***“Sulitnya mencapai koherensi sistem hukum di tingkat lokal, dengan provinsi dan tingkat nasional, sehingga belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan obyek hukum.”***

#### **D. Informasi**

Fokus utama permasalahan di TIT secara umum adalah di *hardware*, *software* dan SDM. Penyediaan *hardware* dan *software* berkenaan dengan anggaran, dan spesifikasi barang atau alat yang tersedia. Sementara itu seluruh SKPD membutuhkan pelayanan IT ini secara intensif. Dengan tidak tersedianya anggaran yang memadai, maka tidak dapat menyediakan *hardware* dan *software* yang diperlukan SKPD. Di sisi lain permasalahan keterbatasan SDM yang menguasai permasalahan TIT ini. Karena semua komponen TIT tersebut sangat terbatas, maka sulit untuk memberikan pelayanan yang dapat terdesentralisasi kepada SKPD. Beban tenaga TIT di bagian TIT sangat berat, karena terjadi sentralisasi pelayanan IT. Keterbatasan personal pegawai yang menguasai seluk beluk pelayanan IT akan mengalami *overload* (kelebihan beban kerja). Untuk merealisasi pelayanan TIT yang terdesentralisasi, diperlukan *training* dan pengembangan yang intensif terhadap pejabat dan pegawai, agar dapat memotori pelayanan IT yang meluas dan mandiri. Sedangkan petugas TIT menjadi semacam konsulen memberikan pembimbingan kepada pejabat/pegawai di SKPD. Upaya untuk mencari dan mengusahakan sehingga kompetensi TIT ini sampai dapat mencapai kemampuan setiap individu sangat penting.

Sedangkan untuk penyediaan pelayanan perpustakaan dan kearsipan merupakan kebutuhan nyata, seiring dengan semakin besar animo masyarakat maupun SKPD yang membutuhkan bantuan pelayanan ini. Namun demikian dalam beberapa hal masih dijumpai kendala dalam pelayanan kebutuhan perpustakaan dan kearsipan yang responsif terhadap kemajuan teknologi maupun keterbukaan informasi. Isu strategis urusan informasi tersebut: ***“Belum semua SKPD terjangkau dalam pelayanan TI”***, sehingga sistem informasi berkelanjutan belum tercipta.

#### **E. Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Adanya ancaman sifat kependudukan Kota Yogyakarta yang kompleks dan heterogen ini menjadikan kerja Kesbangpol diperlukan semakin besar. Meskipun

budaya Yogyakarta sebagai masyarakat Jawa yang mengutamakan tutur kata yang halus, akan tetapi masyarakat pendatang yang memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda perlu diantisipasi. Sebagai kota pendidikan setiap tahun dibanjiri pendatang untuk keperluan menuntut ilmu. Untuk itu permasalahan SARA perlu diperhatikan secara serius. Banyaknya asrama mahasiswa daerah dapat menjadi salah satu potensi untuk menyulut perbedaan yang ekstrim. Bertolak dari masalah ini maka isu strategisnya adalah ***“Upaya preventif dan pengendalian konflik SARA di Kota Yogyakarta yang belum terkondisi.”***

#### **F. Keamanan dan Ketertiban**

Masalah keamanan dan ketertiban merupakan kerjasama terpadu antar pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban. Namun hal ini belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya untuk menurunkan K3 bahkan mencegahnya. Sementara itu terjadi penurunan prasarana keamanan dan ketertiban khususnya poskamling sebesar 6,05%. Untuk itulah maka isu strategis dapat dirumuskan, ***“Penurunan partisipasi partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum”*** di Kota Yogyakarta.

#### **G. Penyelenggaraan Pelayanan Bencana**

Secara tersurat dapat diketahui bahwa dalam penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi diperlukan peran banyak aktor maupun kelembagaan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pencapaian yang gemilang dalam penanggulangan bencana kebakaran masih tertumpu pada gerak dan dinamika kerja sepihak yaitu armada pemadam kebakaran. Untuk kepentingan lebih luas dalam penanganan kebencanaan secara umum belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional. Perancangan sistem terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk itulah rumusan isu strategisnya adalah ***“Belum tersedianya rancangan sistem yang terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan bencana secara luas.”***

Dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis pemerintah dapat mengakomodasi masuknya *road map* reformasi birokrasi yang ada. Pemerintah kota Yogyakarta sebenarnya telah menyusun *road map* reformasi birokrasi sejak tahun

2011 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2016. *Road map* reformasi birokrasi ini mencakup 8 bidang yakni:<sup>11</sup>

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang undangan
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Penataan Tatalaksana
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- f. Penguatan Akuntabilitas
- g. Penguatan Pengawasan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

*Road map* reformasi yang mencakup delapan bidang tersebut berisi rencana pola perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 nilai *road map* reformasi birokrasi Kota Yogyakarta adalah 76,4 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Angka tersebut diperoleh dari laporan mandiri *road map* reformasi birokrasi dan dilaporkan secara *online* dan rutin. *Road map* reformasi birokrasi yang disusun oleh Kota Yogyakarta dirasa cukup ideal dan rinci. Belum ada kota lain yang mampu membuat *road map* birokrasi selengkap dan serinci kota Yogyakarta.

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam hal pelayanan publik, Kota Yogyakarta telah melakukan perubahan pola pelayanan dari aparatur pemerintah menjadi pelayan publik sejak kepemimpinan walikota yang lalu. Pembuatan SOP di Kota Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 2010. Pembuatan SOP, SPM, IKM, Survei layanan masyarakat sudah dilakukan Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi adalah keberanian untuk lebih melakukan gebrakan dalam melayani masyarakat.

Contoh kecil yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung pelayanan publik yang baik adalah dengan mengganti seragam identitas PNS dengan batik. Seragam PNS hanya digunakan seminggu dua kali. Citra aparatur publik menjadi lebih bersahabat dengan masyarakat dibandingkan ketika aparatur publik menggunakan seragam identitas dengan berbagai atribut yang melekat di dalamnya. Kemudian ketika pengangkatan walikota, *tagline* yang usung adalah “pengangkatan kepala pelayanan” bukan pengangkatan walikota. Hal ini menunjukkan bahwa semangat pelayanan publik tidak hanya digaungkan di tingkat menengah ke bawah tetapi juga sampai pada tingkat pemimpin Kota Yogyakarta.

b. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan yang dilakukan oleh kota Yogyakarta diawali dari perubahan mental. Penginternalisasian budaya SATRIYA diharapkan dapat

---

<sup>11</sup>Wawancara kepala bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 5 Agustus 2015.

mengubah *mindset* dan perilaku para aparatur pemerintahan di lingkungan Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memiliki pakta integritas yang ditambah indikator muatan lokal yang dibuktikan dengan penandatanganan bebas narkoba, dan bebas asusila bagi para aparatur pemerintahan. Pembinaan yang sifatnya pemeliharaan moralitas juga dilakukan.

Mimpi yang hendak dicapai oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah "*hospitality management*" yang diawali dengan perubahan sikap seluruh aparatur pemerintahan. Penerapannya dengan yang paling sederhana adalah dengan senyum dan pelayanan publik dilakukan dengan situasi yang baru dan bersahabat.

Rencana pada tahun 2017 seluruh dinas sudah memiliki standar pelayanan pengaduan.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki aturan yang rigid dalam realisasi pembentukan lembaga baru. Dasar pembentukan sebuah lembaga harus memenuhi syarat berikut:

1. Merupakan urusan yang riil.
2. Harus melalui kajian akademik.
3. Harus jelas ukuran beban kerja untuk menentukan besaran rumah.
4. Benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Kota Yogyakarta tidak membentuk sekretariat Korpri dan Badan Ketahanan Pangan karena dirasa tidak memenuhi kriteria tersebut di atas. Perjalanan kelembagaan pun dievaluasi secara rutin melalui evaluasi tupoksi, evaluasi kelembagaan versi menpan, dan evaluasi kelembagaan versi LAN yang baru dilakukan oleh dua pemerintahan. Akan tetapi keidealan kelembagaan yang direncanakan pemerintah pada akhirnya akan terhambat dengan kepentingan politis yang sedang berjalan.

d. Penguatan Akuntabilitas

Pada tahun 2014 nilai laporan akuntabilitas Kota Yogyakarta sudah B. Sementara peringkat pakta integritas sudah masuk 5 besar kota/kabupaten di Indonesia. Harapan tentang akuntabilitas adalah keinginan adanya akuntabilitas kinerja pegawai melalui penilaian kinerja karena menurut pengakuan bagian organisasi sekretariat daerah Kota Yogyakarta standar kinerja pegawai yang dibuat ASN dirasa belum mampu mengukur kinerja pegawai secara komprehensif. Sebab tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh pegawai tidak hanya yang di dalam anggaran. Sistem *reward and punishment* dari standar kinerja pegawai juga belum ada.

e. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum . saat ini masih banyak produk hukum yang tumpang tindih. Hal ini tidak dapat disimpulka serta merta merupakan kesalahan dari bagian hukum, namun dapat dikarenakan ketidaktegasan pusat dalam membuat produk hukum yang kuat.

f. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dukungan bagian organisasi bagi Badan Kepegawaian Daerah adalah pada tingkat penyiapan regulasi dan pembanahan pegawai melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mengenai implementasi regulasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terkena kebijakan moratorium pegawai. Hal ini dikarenakan dana sertifikasi untuk guru masuk dalam dana alokasi umum APBD Kota Yogyakarta. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta harus melakukan penataan pegawai secara proporsional dalam keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta.

g. Penguatan Pengawasan

Zona integritas sudah dicanangkan pada tahun 2011 untuk mendukung pakta integritas. Pegawai di Kota Yogyakarta harus bebas dari korupsi. Pada tahun 2014 sudah ada 5 wilayah bebas korupsi di Kota Yogyakarta yakni Dinas Perizinan, RSUD Kota Yogyakarta (RS Jogja), Taman Pintar dan 2 kecamatan.

h. Penataan Tata Laksana

Pada bidang tata laksana perlu diperjelas mekanisme pola koordinasi, misalnya mengenai jenis rapat yang wajib dan tidak wajib dilakukan oleh pegawai. Kemudian penyempurnaan pada tata naskah Kota Yogyakarta yang masih kalah dari Sleman pada tahun 2014. Manajemen yang digunakan saat ini adalah manajemen football, yang intinya semua pekerjaan dilakukan bergotong royong dan dilakukan bersama-sama.

Kesimpulan yang dapat diambil di bidang pemerintahan adalah terdapat dua isu strategis utama yakni ***“Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dalam dinamika reformasi birokrasi sehingga terjadi kesenjangan struktur, kultur, prosedur pemerintahan, pengembangan dan pelayanan publik.”*** Kemudian terkait keamanan, ketertiban, hukum, bencana, kesatuan bangsa dan politik, isu strategis yang dapat dirumuskan yakni ***“belum terpenuhinya kepastian, penegakan, jaminan dan perlindungan hukum serta penanganan kebencanaan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.”***

2.4. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2015

2.4.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.254  
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2015

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
		Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	48 SKPD	48 SKPD	100%
		Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu	7 jenis	7 jenis	100%
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan	83	83	100%
		Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%
		Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun	10 Raperda dan 50 Perwal	10 Raperda dan 84 Perwal	
		Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan	12 Produk Hukum	79 Produk Hukum	658%
		Jumlah penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta	4 perkara/sengketa	8 perkara/sengketa	200%
		Menurunnya jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP)	20	75	375 %
		Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	81%	49%	60%
		Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal	100%	100%	100%
		Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah	100%	100%	100%
		Meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah	0,5%	0,47%	94,0%
		Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94%	93%	92,99%	100%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
-	-	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%	84%	83,96%	100%
		Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	tepat waktu	tepat waktu	
		Terwujudnya pengendalian belanja daerah	94%	95%	101%
		Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	94%	94%	100%
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL	Ada	Ada	100%
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERWAL	Ada	Ada	100%
		Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan	100%	100%	100%
		Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan	95%	95%	100%
		Ketersediaan informasi pembangunan	100%	100%	100%
		Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada	100%	100%	100%
		Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	100%	100%	100%
		Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	7%	7,4%	105,22%
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV)	512	1.965	383,79%
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet)	1 kali/hari	1 kali/hari	100%
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1 kali/tahun	8 kali/tahun	800%
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, atau diskusi	1 kali/tahun	16 kali/tahun	1600%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, atau baliho	78 kali	427 kali	547%
		Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola	52 aplikasi	56 aplikasi	108%
		Tertanganinya keluhan telekomunikasi	100%	100%	100%
		Kenaikan bandwith internet	26 mbps	150 mbps	577%
		Kenaikan bandwith intranet	2 mbps	5 mbps	250%
		Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah	100%	100%	100%
		Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1425	1.210	85%
		Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah	811	1.088	134%
		Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)	20%	100%	500%
		Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)	20%	100%	500%
		Terlaksananya pengelolaan arsip statis.	20%	20%	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	100%	100%	100%
		Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.	30%	100%	333%
		Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan	4 lembaga	6 lembaga	150%
		Penyusunan pedoman kearsipan.	4 pedoman	4 pedoman	100%
		Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah	20 perikatan	67 Perikatan	335%
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%
		Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD	100%	84%	84%
	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian	62%	89.53%	62%
		Presentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan	94%	99.26%	106%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	90,8%	73.32%	91%
		Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS	59%	82.24%	139%
		Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	95%		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	76%	91,11%	119,88%
		Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%	274,25%	274,25%
		Cakupan penanganan kegawatdaruratan	75%	133,33%	177,78%
		Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku ( BPS/PPGD/GELS/ALS)	94%	89,22%	95%
		Waktu tunggu di Rawat Jalan	63 menit	90 menit	57,10%
		Waktu tunggu operasi elektif	1,9 hari	1,017 hari	147%
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang	99%	99%	100%
		Waktu tunggu hasil pelayanan	125 menit	50,49 menit	631%
		kejadian kegagalan pelayanan rontgen karena kerusakan foto	1,6%	2%	75,0%
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Keperawatan	99%	99%	100%
		Kejadian pulang paksa	5%	2,30%	154%
		Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3	98%	100%	102%
		Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit	90%	90%	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	77%	100%	130%
		Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	94%	99,98%	106,36%
		Terkendalinya / penurunan angka kelahiran	14,212	Belum dapat ditentukan	Belum dapat ditentukan
		Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB	72,6%	73,8%	101,7%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		cakupan balita ditimbang berat badannya ( MDG's )	85%	85,31%	100,36%
		Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)	8%	7,93%	99,13%
		cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)	100%	67,21%	67,21%
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM)	100%	100,00%	100,00%
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	27%	23,20%	85,93%
		Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM)	95%	99,97%	105,23%
		Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN )	100%	99,97%	99,97%
		Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN Lengkap) (SPM)	89%	82,6%	92,8%
		Cakupan Peserta KB Aktif (SPM)	77%	59,88%	77,77%
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)	95%	90,74%	95,52%
		Cakupan imunisasi anak sekolah dasar (SPM)	99,5%	96,91%	97,40%
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%	100%	100%
		Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)	94%	126,28%	134,34%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	94%	94,10%	100,11%
		Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)	45 kelurahan	45 kelurahan	100%
		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	100%
		Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95%	93%	97,00%	104,30%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 %	76%	100,00%	131,58%
		Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan	36	17	47,22%
		Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	400	448	112%
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	75%	71,10%	94,80%
		Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	70%	75,09%	107,27%
		Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM)	100%	98,1%	98,1%
		persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan	99%	100%	101,0%
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)	100%	100%	100%
	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota	68%	68%	100%
		Cakupan penataan kawasan sungai	3 sungai	3 sungai	100%
		Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	94%	94%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	81%	87%	107%
		Meningkatnya kualitas saluran pengairan	72%	72%	100%
		Meningkatnya kualitas saluran drainase	87,27%	69,01%	79,08%
		Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	17%	22%	130%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	75%	70%	93%
		Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta	500 penggal jalan	500 penggal jalan	100,00%
		Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah	23.800 rumah	19.981 rumah	83,95%
		Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan	5 unit	0 unit	0%
		Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar	20 titik	20 titik	100%
		Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru	75850 WR	75686 WR	99,78%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%	84%	83,99%	100%
		Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)	100%	100%	100%
		Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit	100%	100%	100%
		Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan	5810	6.071	104%
		Prosentase pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%
		Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	80%	100%	125%
		Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	300	93	31%
		Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	1	1	100%
		Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan	10	10	100%
		Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	100%	97%	97%
		Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran	86%	90%	105%
	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan	100%	96%	96%
		Penerbitan Dokumen pencatatan sipil	100%	95%	95%
		SIAK berfungsi dengan baik	100%	90%	90%
	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	AP (Angka Putus Sekolah)	0,02	0,02	100%
		AM (Angka Melanjutkan)	125%	134%	108%
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Segoro Amarto dalam rangka	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	kenaikan omset pertahun	10%	18%	179%
		kenaikan aset pertahun	10%	48%	482%
		meningkatnya omset	5% (158 M)	6%	120%
		meningkatnya nilai Aset	10% (2.260 M)	12%	120%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
penanggulang an kemiskinan		peningkatan konsumsi pangan yg ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dg bahan dasar lokal yg diolah di unit usaha pangan yg menerapkan standar higiene-sanitasi	PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor, kambing/ domba 5980 ekor	PPH : 86,93; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 8053 ekor, kambing/ domba 9880 ekor	
	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	30%	31%	105%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	32,89%		
		Meningkatnya swadaya masyarakat	27,47%	26,37%	96,00%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	28,37%	29,00%	102,22%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	27,73%		
		Meningkatnya swadaya masyarakat	27,89%	28,89%	103,59%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	26,92%	25,20%	93,61%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	29,93%	100%	334%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	29,95%	31,05%	103,67%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	29,93%	100%	334%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	27,93%	33,66%	120,52%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	39,77%	100,00%	251,45%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	29,81%	30,00%	100,64%
		Meningkatnya swadaya masyarakat	36,41%		
		Meningkatnya swadaya masyarakat	27,84%	27,84%	100,00%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	100%	133%
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	100%	133%
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100%	100%	100%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	90%	100%	111%
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	70%	100%	143%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak	24,5%	24,5%	100,0%
		Meningkatnya Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	1680 orang	1049 orang	62%
		Meningkatnya Jumlah TAGANA	347 orang	108 Orang	31%
		Cakupan pembinaan Karang Taruna	45	45	100%
		Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos	176	67 lembaga	67 lembaga
		Cakupan pembinaan Panti Pemerintah	3 panti	3 panti	100%
		Cakupan pembinaan Panti Swasta	15 panti	14 panti	93%
		Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli Napza	63 kelompok	150 kelompok	150 kelompok
		Meningkatnya KUBE-FM	302 kelompok	553 kelompok	183%
		Meningkatnya USEP-KM	60 Kelompok	57 Kelompok	95%
		Meningkatnya penanganan anak jalanan	24%	100%	417%
		Meningkatnya penanganan lansia terlantar	23,52%	41,95%	178%
		Meningkatnya penanganan penyandang cacat	8,20%	8,85%	108%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan	45 Kel		
		Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	750 orang	1875 Orang	250%
		Cakupan pembinaan organisasi pemuda	162 organisasi	94 Organisasi	58%
		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang berprestasi	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	100%
Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Rerata UN SD/SMP	7,80	7,47	96%
		Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0,20%	0,03%	15,00%
		Jumlah guru tersertifikasi	85%	73%	86%
		Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV	94%	91%	97%
		Jumlah Sekolah Terakreditasi	99%	100%	101%
		Rerata UN SMA/SMK	7,75	7,47	0,96
		Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0,20%	0,03%	15,00%
		Jumlah guru tersertifikasi	85%	73%	86%
		Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV	94%	91%	97%
		Jumlah Sekolah Terakreditasi	99%	100%	101%
		Jumlah PAUD terakreditasi	4%	23%	575%
		Kelulusan UNPK warga belajar	90%	97%	108%
		Jumlah LKP terakreditasi	24%	21%	88%
		Jumlah Sarpras terstandar	90%	89%	99%
		Jumlah Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	60%	59%	99%
		Jumlah Sekolah terstandar nasional(SSN)	93%	100%	108%
		Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar	79%	77%	97%
		Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan	naik 10%	naik 41,26 %	413%
		Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital	1:05	1:05	100%
		Jumlah TBM di Kota Yogyakarta	12	0	0%
		Jumlah perpustakaan khusus/instansi	2 unit	2 unit	100%
		Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih	60 orang	60 orang	100%
		Jumlah pedoman perpustakaan	2 jenis	2 jenis	100%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan	7077 pencaker	7494 Pencaker	106%
		Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan	644 perush	630 Perush	98%
		Menurunnya jumlah penganggur	16561 orang	15181 Orang	92%
		Prosentase transmigrasi yang ditempatkan	15 KK	12 KK/39 jiwa	
	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah pasar wisata potensial	6 daerah pasar wisata potensial	200%
		Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder	5 daerah kerjasama, 3 Jejaring kerja dg stakeholder	500%
		Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	1 odtw	1 odtw	1 odtw
		Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%	78%	79,70%	102,2%
		Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya	120 kelompok seni budaya	311 kelompok seni budaya	259,17%
		Cakupan kajian seni	100%	173%	173%
		Cakupan fasilitasi seni	96%	286%	298%
		Cakupan gelar seni	100%	294%	294%
		Cakupan misi kesenian	100%	800%	800%
		Cakupan SDM kesenian	100%	400%	400%
		Cakupan tempat kesenian	100%	600%	600%
		Cakupan organisasi kesenian	100%	294%	294%
		Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat	4 nilai budaya	7 nilai budaya	175%
		Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437BCB/BWB menjadi 600BCB/BWB	90%	95%	105%
		Meningkatnya sarana prasarana pasar	85%	84%	98,82%
		Intensitas penanganan sampah pasar	20'	20'	100%
		Menurunnya pelanggaran perda pasar	40%	40%	100%
		Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar	51	61	119,6%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Optimalisasi lahan pasar	96%	96,00%	100%
		Optimalisasi pengelolaan retribusi	14,6 M	14,9 M	102%
		Peningkatan jumlah pedagang yang dibina	8625	6.070	70,38%
		Peningkatan frekuensi promosi	70	89	127,14%
		Jumlah pelaku UMKM yg difasilitasi (di luar PEW)	1050 orang	2214 orang	211%
		Jumlah pelaku usaha mikro kecil yg difasilitasi	14420 orang	15510 orang	108%
		meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil	174 kali	174 kali	100%
		meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa	340	340	100%
		Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	10%: klas kelompok: utama 19, madya 45, lanjut 111 dan pemula 133	10%;Total 264 kel	
		Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	42638,585 kg & pokdakan 90: klas kelompok utama1, madya 3, lanjut 16 dan pemula 70	42.057 Kg & pokdakan 40: klas kelompok 1; madya 7; pemula 32	
	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	ketepatan waktu penerbitan Izin Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi	100%	100%	100%
			82,21%	93,95%	114,28%
		Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi	100%	100%	100%
		Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	190	190	100%
		Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat	100%		
		Persentase petugas perlindungan masyarakat	100%		
		Tersedianya luasan RTH publik (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	19.71%	19,05%	95,65%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta	14.99%	14,72%	98,20%
		Meningkatnya luasan taman kota	68.805 m2	69.535 m2	101,1%
		Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau	39.737 pohon	21.387 pohon	53,82%
		Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW	180 RW	66 RW	36,67%
		Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik	35 Kel	36 Kel	103%
		Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yogyakarta	9 parameter	7 parameter	122,20%
		Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY Nomor 281/KPTS/1998	90 usaha	100 usaha	111%
		Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan	4 parameter	0 parameter	200%
		Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup	200 usaha	178 usaha	89,00%
		Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPL)	425 usaha	487 usaha	115%
		Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah diditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (Peraturan MENLH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)	70%	100%	143%
		Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan	36 kelurahan	35 kelurahan	97%
		Terlayaninya pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI	20 parameter	18 parameter	90,00%
		Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan	7 menu	7 menu	100%

TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2015
		Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan	285 sekolah	165 sekolah	57,89%
		Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota	15 sekolah	48 sekolah	320,0%
		Terpantaunya kualitas air tanah pada sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik)	300 titik	162 titik	54%
		Terkendalnya penurunan permukaan air tanah	10 cm	10 cm	100%

2.4.2. Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2015

Evaluasi hasil pelaksanaan program pada RKPD dan pencapaian RPJMD sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.255  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2015Kota Yogyakarta

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Organisasi
	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah tata laksana/mechanisme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan	80%	80%	100%	85%	86%	101%	90%	92,31%	103%	95%	98%	103%	100%	
Program Pelayanan Pengadaan Barang/jasa	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dalbang
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	48 SKPD	40 SKPD	83%	48 SKPD	39 SKPD	81%	48 SKPD	39 SKPD	81%	48 SKPD	48 SKPD	100%	48 SKPD	Tapem
	Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan	80	79,86	100%	81	79,91	99%	82%	80,27%	97,89%	83	83	100%	84	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	TR
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	JT
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	GK
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	2	20%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	DN
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	9	90%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	GT
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	NG

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Kecamatan Ngampilan	dengan baik														
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	8	80%	10	14	140%	10	15	150%	10	15	150%	10	KT
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	GM
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	PA
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	10	MG
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	UH

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	KG
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	6	100%	10	11	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	MJ
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	WB
Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun	10 Raperda dan 50 Perwal	19 raperda dan 92 perwal		10 Raperda dan 50 Perwal	12 Raperda dan 84 Perwal		10 Raperda dan 50 Perwal	8 Raperda dan 94 Perwal		10 Raperda dan 50 Perwal	10 Raperda dan 84 Perwal		10 Raperda dan 50 Perwal	Hukum
	Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan	12 Produk Hukum	18 produk hukum	150%	12 Produk Hukum	13 produk hukum	108%	12 Produk Hukum	88 Produk Hukum	733%	12 Produk Hukum	79 Produk Hukum	658%	12 Produk Hukum	
	Jumlah penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta	5 perkara/sengketa	11 perkara/sengketa	220%	4 perkara/sengketa	14 perkara/sengketa	350%	4 perkara/sengketa	8 perkara/sengketa	200%	4 perkara/sengketa	8 perkara/sengketa	200%	4 perkara/sengketa	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Menurunnya Jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP)	26	15	58%	24	12	50%	22	1500%		20	75	375 %	18	Inspektorat
	Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	75%	67%	89%	76%	55%	72%	78%	66%	85%	81%	49%	60%	85%	
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	P3ADK
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah	100%	87,50%	87,50%	100%	83,33%	83,33%	100%	95,83%	95,83%	100%	100%	100%	100%	P3ADK
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah	0,5%	0,42%	84,00%	0,5%	0,47%	94%	0,50%	0,51%	102,00%	0,5%	0,47%	94,0%	0,5%	DPDPK

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94%	90%	90,13%	100,14 %	91%	91,12%	100,13%	92%	92,17%	100,18%	93%	92,99%	100%	94%	DBGAD
Program Peningkatan Barang Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%	81%	81,06%	100,07 %	82%	82,07%	100,09%	83%	83,07%	100,08%	84%	83,96%	100%	85%	DBGAD
Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu	DPDPK
Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya pengendalian belanja daerah	91%	91%	100%	92%	92%	100%	93%	75%	81%	94%	95%	101%	95%	DPDPK

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	91%	91%	100%	92%	92%	100%	93%	72%	77%	94%	94%	100%	95%	DPDPK
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Bappeda
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dalam bentuk PERWAL	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda
Program Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan	80%	80%	100%	85%	85%	100%	90%	90%	100%	95%	95%	100%	100%	Bappeda

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Ketersediaan informasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda
	Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	10%	7,50%	102,70 %	9%	6,68%	102,54%	8%	7,47%	93,38%	7%	7,4%	105,22%	6%	Dalbang

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV)	503	2293	456%	506	1.372	271%	509	1.766	347%	512	1.965	383,79%	515	Humas
	Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet)	1 kali/hari	1 kali/hari	100%	1 kali/hari	1 kali/hari	100%	1 kali/hari	1 kali/hari	100%	1 kali/hari	1 kali/hari	100%	1 kali/hari	
-	Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1 kali/tahun	2 kali	200%	1 kali/tahun	2 kali	200%	1 kali/tahun	10 kali/tahun	1000%	1 kali/tahun	8 kali/tahun	800%	1 kali/tahun	
	Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, atau diskusi	1 kali/tahun	1 kali	100%	1 kali/tahun	8 kali	800%	1 kali/tahun	15 kali/tahun	1500%	1 kali/tahun	16 kali/tahun	1600%	1 kali/tahun	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, atau baliho	75 kali	102	136%	76 kali	334 kali	439%	77 kali	398 kali	517%	78 kali	427 kali	547%	79 kali	
Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang dikelola	46 aplikasi	46	100%	48 aplikasi	48	100%	50 aplikasi	50 aplikasi	100%	52 aplikasi	56 aplikasi	108%	108%	TIT
	Tertanganinya keluhan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kenaikan bandwidth internet	13 mbps	11.5 Mbps	88%	16 mbps	36 Mbps	225%	20 mbps	50 mbps	250%	26 mbps	150 mbps	577%	576,9%	
	Kenaikan bandwidth intranet	1 mbps	1 mbps	100%	1 mbps	1 mbps	100%	1.5 mbps	2 mbps	133%	2 mbps	5 mbps	250%	250,0%	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah	100	100	100%	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Umum

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.290	1.064	82%	1.329	1.734	130%	1.370	1.416	103%	1425	1.210	85%	1482	Protokol
	Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah	757	8548	1129%	765	880	115%	788	718	91%	811	1.088	134%	843	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	100%	500%	20%	Arpusda
	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	100%	500%	20%	
	Terlaksananya pengelolaan arsip statis.	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.	30%	30%	100%	30%	30%	100%	30%	30%	100%	30%	100%	333%	30%	
	Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan	4 lembaga	4 lembaga	100%	4 lembaga	4 lembaga	100%	4 lembaga	4 lembaga	100%	4 lembaga	6 lembaga	150%	4 lembaga	
	Penyusunan pedoman kearsipan.	3 pedoman	4 pedoman	133%	4 pedoman	4 pedoman	100%	4 pedoman	4 pedoman	100%	4 pedoman	4 pedoman	100%	4 pedoman	
Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah	20 Perikatan	54 Perikatan	270%	20 Perikatan	59 Perikatan	295%	20 perikatan	84 perikatan	420%	20 perikatan	67 Perikatan	335%	20 perikatan	P3ADK
	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	100%	97,52%	97,52%	100%	98,82%	98,82%	100%	51,01%	51,01%	100%	100%	100%	100%	
Program Peningkatan Layanan Pada DPRD	Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD	100%	100%	100%	100%	93%	93%	100%	48,06%	48,06%	100%	84%	84%	100%	Sekretariat DPRD
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Presentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian	38%	38%	100%	46%	46%	100%	54%	127,88%	236,81%	62%	89.53%	62%	89.53%	BKD

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional	Presentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan	91%	91%	100%	92%	92%	100%	93%	109,90%	118,17%	94%	99.26%	106%	95%	BKD
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	90,2%	90,20%	100%	90,40%	90,40%	100%	90,60%	123,92%	136,78%	90,8%	73.32%	91%	73.32%	BKD
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tapem
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS	53%	53%	100%	55%	55%	100%	57%	98,87%	173,46%	59%	82.24%	139%	61%	BKD
	Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	75%	75%	100%	85%	85%	100%	90%	89%	99%	95%			100%	Dintib
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	64%	68,70%	107,34 %	68%	81,00%	119,12%	73%	88,51%	121,25%	76%	91,11%	119,88%	80%	Dinkes

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%	162,5%	162,5%	100%	176%	176%	100%	151,70%	151,70%	100%	274,25%	274,25%	100%	
	Cakupan penanganan kegawatdaruratan	60%	100%	167%	65%	100%	154%	70%	97,27%	138,96%	75%	133,33%	177,78%	80%	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku ( BPS/PPGD/GELS/ ALS)	76%	76%	100%	82%	82%	100%	88%	89.22%	#VALUE!	94%	89,22%	95%	100%	RSUD
	Waktu tunggu di Rawat Jalan	81 menit	81 menit	100%	75 menit	75 menit	100%	69 menit	90 menit	130%	63 menit	90 menit	57,10%	57 menit	
	Waktu tunggu operasi elektif	2,5 hari	2,5 hari	100%	2,3 hari	2,3 hari	100%	2,1 hari	1,017 hari	48%	1,9 hari	1,017 hari	147%	1,7 hari	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang	96%	96%	100%	97%	97%	100%	98%	99.5%	#VALUE!	99%	99%	100%	100%	RSUD
	Waktu tunggu hasil pelayanan	145 menit	145 menit	100%	140 menit	140 menit	100%	135 menit	140,57 menit	104%	125 menit	50,49 menit	631%	115 menit	
	kejadian kegagalan pelayanan rontgen karena kerusakan foto	2,2%	2,20%	100%	2,0%	2,0%	100%	1,8%	2%	111,1%	1,6%	2%	75,0%	1,4%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Keperawatan	97%	97%	100%	98%	98%	100%	98%	81.2%	#VALUE!	99%	99%	100%	100%	RSUD
	Kejadian pulang paksa	7%	7%	100%	7%	7%	100%	6%	6.13%	#VALUE!	5%	2,30%	154%	5%	
	Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3	95%	95%	100%	96%	96%	100%	97%	92.16%	#VALUE!	98%	100%	102%	100%	
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit	84%	84%	100%	85%	85%	100%	88%	79.7%	#VALUE!	90%	90%	100%	90%	RSUD
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	62%	62%	100%	67%	67%	100%	72%	100%	139%	77%	100%	130%	85%	
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	91%	90%	99%	92%	92%	100%	93%	91,90%	98,82%	94%	99,98%	106,36%	95%	Dinkes
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Terkendalinya / penurunan angka kelahiran	14,85	14,26	96%	14,64	10,83	74%	14,42	10,75	0,745492	14,212	Belum dapat ditentukan	Belum dapat ditentukan	14	Kantor KB

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB	71,4%	68,87%	96,46%	71,8%	71%	99,4%	72,2%	71,50%	99,03%	72,6%	73,8%	101,7%	73%	
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	cakupan balita ditimbang berat badannya ( MDG's )	74%	74%	100%	78%	74,11%	95,01%	81%	74,90%	92,47%	85%	85,31%	100,36%	85%	Dinkes
	Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)	9%	9%	100%	9%	7,33%	81,44%	8,72%	7,93%	90,94%	8%	7,93%	99,13%	8%	
	cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54,53%	54,53%	100%	67,21%	67,21%	100%	
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	30%	30%	100%	29%	24,10%	83,10%	28%	28,10%	100,36%	27%	23,20%	85,93%	26%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM)	92%	92%	100%	93%	89,27%	95,99%	94%	92,85%	98,78%	95%	99,97%	105,23%	96%	
	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN )	92%	92%	100%	93%	100%	108%	94%	99,89%	106,27%	100%	99,97%	99,97%	96%	
	Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN Lengkap) (SPM)	84%	84%	100%	86%	92,49%	107,55%	87%	94,37%	108,47%	89%	82,6%	92,8%	90%	
	Cakupan Peserta KB Aktif (SPM)	74%	74%	100%	75%	75,69%	100,92%	76%	75,54%	99,39%	77%	59,88%	77,77%	78%	
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)	88%	88%	100%	91%	94%	103%	98,60%	96,93%	98,31%	95%	90,74%	95,52%	95%	Dinkes
	Cakupan imunisasi anak sekolah dasar (SPM)	98%	98%	100%	99%	95,50%	96,46%	99%	97,35%	98,33%	99,5%	96,91%	97,40%	100%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)	94%	94%	100%	94%	88,69%	94,35%	73%	85,00%	116,44%	94%	126,28%	134,34%	94%	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	92%	92%	100%	93%	98%	106%	93%	98,22%	105,61%	94%	94,10%	100,11%	94%	
	Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)	12 kelurahan	12 kelurahan	100%	25 kelurahan	30 kelurahan	120%	33 kelurahan	45 kelurahan	136%	45 kelurahan	45 kelurahan	100%	45 kelurahan	
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	100%	100%	338,17%	338,17%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	100%	100%	158,02%	158,02%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95%	87%	87%	100%	89%	87,46%	98,27%	92%	92,34%	100%	93%	97,00%	104,30%	95%	Dinkes
	Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 %	64%	64%	100%	68%	99,60%	146,47%	74%	100,00%	135,14%	76%	100,00%	131,58%	80%	
	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan	9	9	100%	18	18	100%	27	14	52%	36	17	47,22%	45	
	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	100	100	100%	200	141	71%	300	323	108%	400	448	112%	500	
Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	55%	55%	100%	65%	66,67%	102,57%	70%	71,10%	101,57%	75%	71,10%	94,80%	80%	Dinkes
	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	55%	55%	100%	60%	68,40%	114,00%	65%	77,22%	118,80%	70%	75,09%	107,27%	75%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM)	100%	100%	100%	100%	99,90%	100%	100%	98,50%	98,50%	100%	98,1%	98,1%	100%	
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan	96%	96%	100%	98%	97%	99%	98%	100,00%	102,04%	99%	100%	101,0%	100%	Dinkes
	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota	62%	62%	100%	64%	64%	100%	66%	66%	100%	68%	68%	100%	70%	Kimpraswil
Program Penataan Kawasan Sungai	Cakupan penataan kawasan sungai	3 sungai			3 sungai			3 sungai	3 sungai	100%	3 sungai	3 sungai	100%	3 sungai	Bappeda
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	91%	91%	100%	92%	93%	101%	93%	93%	100%	94%	94%	100%	95%	Kimpraswil

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	78%	78%	100%	79%	79%	100%	80%	83%	104%	81%	87%	107%	82%	Kimpraswil
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Meningkatnya kualitas saluran pengairan	70,50%	71%	100,00 %	71%	71%	100%	71,5%	71,5%	100%	72%	72%	100%	72,5%	Kimpraswil
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Meningkatnya kualitas saluran drainase	87%	87%	100%	87,09%	87,09%	100%	87,18%	20,027%	22,972%	87,27%	69,01%	79,08%	87,36%	Kimpraswil
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	13,50%	13,60%	100,74 %	14,50%	14,50%	100,00%	15,8%	22,19%	140,44%	17%	22%	130%	18%	Kimpraswil
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	64%	64%	100%	68%	68%	100%	71%	71%	100%	75%	70%	93%	78%	Kimpraswil
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta	328 penggal jalan	328 penggal jalan	100%	389 penggal jalan	389 penggal jalan	100%	445 penggal jalan	445 penggal jalan	100%	500 penggal jalan	500 penggal jalan	100,00%	556 penggal jalan	BLH

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah	18700 rumah	12.650 rumah	68%	20400 rumah	20.400 rumah	100%	22.100 rumah	21.720 rumah	98%	23.800 rumah	19.981 rumah	83,95%	25. 500 rumah	
	Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan	5 unit	10 unit	200%	5 unit	12 unit	240%	5 unit	0 unit	0%	5 unit	0 unit	0%	5 unit	
	Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar	50 titik	0 titik	0%	40 titik	30 titik	75%	30 titik	0 titik	0%	20 titik	20 titik	100%	10 titik	
	Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru	75100 WR	75.000 WR	100%	75350 WR	75.350 WR	100%	75.600 WR	75.600 WR	100%	75850 WR	75686 WR	99,78%	76.100 WR	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%	81%	80,96%	99,95%	82%	82%	100%	83%	82,97%	99,96%	84%	83,99%	100%	85%	DBGAD
Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan	4967	5293	107%	5248	5410	103%	5.529	5.770	104%	5810	6.071	104%	6091	Dishub
	Prosentase pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	50%	50%	100%	60%	100%	167%	75%	100%	133%	80%	100%	125%	85%	Dishub
	Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	81	81	100%	150	164	109%	100	88	88%	300	93	31%	300	
	Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan	-	-	-	5	5	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	Dishub
Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	90%	82,20%	91,33%	95%	95%	100%	100%	99,13%	99,13%	100%	97%	97%	100%	
Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran	74%	74%	100%	78%	78%	100%	82%	83,18%	101,44%	86%	90%	105%	90%	Dishub
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan	Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	100%	Dukcapil
Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	Dukcapil

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	Dukcapil
Program Wajar 12 Tahun	AP (Angka Putus Sekolah)	0,03	0,03	100%	0,25	0,029	12%	0,02	0,027	135%	0,02	0,02	100%	0,01	Dindik
	AM (Angka Melanjutkan)	110%	110%	100%	115%	134,4%	116,9%	120%	133,50%	111%	125%	134%	108%	130,55%	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	kenaikan omset pertahun	10%	10%	100%	10%	22,95%	229,50%	10,0%	2,69%	26,90%	10%	18%	179%	10%	Perindagko ptan
	kenaikan aset pertahun	10%	10%	100%	10%	30,24%	302,40%	10%	0,99%	9,90%	10%	48%	482%	10%	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	meningkatnya omset	5% (137 M)	5%(137M )	100%	5% (144 M)	5% (144 M)	100%	5% (151 M)	5% (151 M)	100%	5% (158 M)	6%	120%	5% (165 M)	Perindagko ptan
	meningkatnya nilai Aset	10% (1.170,2 M)	10% (1170M)	100%	10% (1.650 M)	10% (1.650 M)	100%	10% (1,900 M)	10% (1,900 M)	100%	10% (2.260 M)	12%	120%	10% (2.550 M)	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	peningkatan konsumsi pangan yg ASUH dan penganeekaragaman olahan pangan dg bahan dasar lokal yg diolah di unit usaha pangan yg menerapkan standar higiene-sanitasi	PPH 90,9; 60 unit usaha potong; 6205 ekor; kambing /domba 5680 ekor	PPH 90; 60 unit usaha potong sapi 6205 ekor; kambing /domba 5680 ekor		PPH 93,9; 90 unit usaha potong; 6870 ekor; kambing/ domba 5780 ekor	PPH 85.7; 90 unit usaha potong sapi 8992 ekor; kambing/ domba 9392 ekor		PPH : 97,0; 120 unit usaha; pemotongan sapi: 7235 ekor, kambing / domba 5880 ekor	PPH : 80,0; 120 unit usaha; pemotongan sapi: 8667 ekor, kambing/ domba 9573 ekor		PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor, kambing /domba 5980 ekor	PPH : 86,93; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 8053 ekor, kambing/ domba 9880 ekor		PPH : 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi: 7965 ekor, kambing /domba 6080 ekor	Perindagkoptan
Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	27%	94,10%	349%	-	100%	-	29%	29%	100%	30%	31%	105%	31%	KPMP
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Meningkatnya swadaya masyarakat	33%	33%	100%	32,81%	100%	304,79%	32,85%	163,67%	498,23%	32,89%			30,48%	TR
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Meningkatnya swadaya masyarakat	23%	23%	100,00 %	24,67%	24,67%	100,00%	26,07%	23%	88,56%	27,47%	26,37%	96,00%	30,08%	JT

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Meningkatnya swadaya masyarakat	25,37%	25,37%	100,00 %	26%	27%	104%	27,37%	28%	100,47%	28,37%	29,00%	102,22%	29,77%	GK
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Meningkatnya swadaya masyarakat	23%	23,23%	100,00 %	24,73%	95%	384,15%	26,23%	42%	160,12%	27,73%			29,88%	DN
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Meningkatnya swadaya masyarakat	24,59%	24,59%	100,00 %	25,69%	89,41%	348,05%	26,79%	86,53%	322,99%	27,89%	28,89%	103,59%	33,31%	GT
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Meningkatnya swadaya masyarakat	22%	22%	100%	23,72%	23,72%	100,00%	25,32%	25,73%	102%	26,92%	25,20%	93,61%	30,11%	NG
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Meningkatnya swadaya masyarakat	26,93%	97,92	36361%	27,93%	82,61%	296%	28,93%	85,88%	297%	29,93%	100%	334%	32,81%	KT

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Meningkatnya swadaya masyarakat	26,95%	28,05%	104,08 %	27,95%	89,41%	319,91%	28,95%	162%	559,59%	29,95%	31,05%	103,67%	31,10%	GM
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Meningkatnya swadaya masyarakat	23,22%	23,22%	100,00 %	27,93%	82,61%	296%	28,93%	85,88%	297%	29,93%	100%	334%	30,00%	PA
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Meningkatnya swadaya masyarakat	24%	24,33%	101%	25,53%	28,12%	110%	26,73%	30,55%	114,29%	27,93%	33,66%	120,52%	32,71%	MG
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Meningkatnya swadaya masyarakat	40%	100%	252%	39,69%	80%	202%	39,73%	96,96%	244,05%	39,77%	100,00%	251,45%	31,86%	UH
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Meningkatnya swadaya masyarakat	26,81%	26,13%	97%	27,81%	28,50%	102,48%	28,81%	28,81%	100,00%	29,81%	30,00%	100,64%	28,85%	KG

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Meningkatnya swadaya masyarakat	36%	15,68%	43,22%	36,33%	50%	138,73%	36,37%	33,33%	91,64%	36,41%			37,21%	MJ
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Meningkatnya swadaya masyarakat	24,94%	24,94%	100,00 %	25,94%	25,94%	100,00%	26,64%	26,64%	100,00%	27,84%	27,84%	100,00%	32,41%	WB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%	16,86%	16,86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KPMP

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
-	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	19%	19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	55%	100%	182%	62%	100%	161%	70%	100%	143%	75%	100%	133%	80%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	55%	100%	182%	62%	100%	161%	70%	100%	143%	75%	100%	133%	80%	
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	85%	100%	118%	90%	100%	111%	95%	100%	105%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	45%	100%	222%	60%	100%	167%	75%	100%	133%	90%	100%	111%	100%	
	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	25%	100%	400%	40%	100%	250%	55%	100%	182%	70%	100%	143%	85%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	65%	100%	154%	80%	100%	125%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak	23%	22,14%	96,26%	23,50%	23,50%	100,00%	24%	24,03%	100,13%	24,5%	24,5%	100,0%	25%	KPMP
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	1470 Orang	1158 Orang	79%	1540 Orang	1158 Orang	75,19%	1610 orang	1057 orang	65,65%	1680 orang	1049 orang	62%	1750 orang	Dinsos
	Meningkatnya Jumlah TAGANA	263 Orang	93 Orang	35,36%	291 Orang	93 Orang	31,96%	319 orang	56 orang	17,55%	347 orang	108 Orang	31%	375 orang	
	Cakupan pembinaan Karang Taruna	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	45	
	Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos	176	90	51%	176	90	51%	176	90	0,511364	176	67 lembaga	67 lembaga	176	
	Cakupan pembinaan Pantti Pemerintah	3 pantti	3 pantti	100%	3 pantti	3 pantti	100%	3 pantti	3 pantti	100%	3 pantti	3 pantti	100%	3 pantti	
	Cakupan pembinaan Pantti Swasta	15 pantti	14 Pantti	93%	15 pantti	14 Pantti	93%	15 pantti	14 pantti	93%	15 pantti	14 pantti	93%	15 pantti	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli Napza	33 kelompok	33 kelompok	100%	43 kelompok	33 kelompok	77%	53 kelompok	33 kelompok	62%	63 kelompok	150 kelompok	150 kelompok	73 kelompok	
	Meningkatnya KUBE-FM	281 kelompok	312 kelompok	111%	288 kelompok	312 kelompok	108%	295 kelompok	461 klmpok	156%	302 kelompok	553 kelompok	183%	309 kelompok	
	Meningkatnya USEP-KM	57 Kelompok	56 Kelompok	98%	58 Kelompok	56 Kelompok	97%	59 Kelompok	57 Kelompok	97%	60 Kelompok	57 Kelompok	95%	61 Kelompok	
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya penanganan anak jalanan	21%	24%	114%	22%	26%	118%	23%	25%	109%	24%	100%	417%	25%	Dinsos
	Meningkatnya penanganan lansia terlantar	20,52%	20,50%	99,90%	21,52%	22,50%	104,55%	22,52%	22,52%	100,00%	23,52%	41,95%	178%	24,52%	
	Meningkatnya penanganan penyandang cacat	8,20%	8,20%	100%	8,20%	8,20%	100%	8,2%	8,2%	100,0%	8,20%	8,85%	108%	8,2%	
Program Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan	45 Kel			45 Kel			45 Kel	45 Kel	100%	45 Kel			45 Kel	Bappeda
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	725 orang	750 orang	103%	750 orang	750 orang	100%	750 orang	750 orang	100%	750 orang	1875 Orang	250%	750 orang	Kesbang
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	Cakupan pembinaan organisasi pemuda	157 organisasi pemuda	157 organisasi	100%	162 organisasi	162 organisasi	100%	162 organisasi	162 organisasi	100%	162 organisasi	94 Organisasi	58%	162 organisasi	Kesbang

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Fasilitas Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang berprestasi	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	100%	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	100%	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	100%	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	100%	34 organisasi olahraga	Kesbang
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Rerata UN SD/SMP	7,65	7,65	100%	7,7	7,44	97%	7,75	7,57	98%	7,80	7,47	96%	7,85	Dindik
	Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0,08%	0,08%	100%	0,09%	0,09%	100%	0,10%	0,09%	90%	0,20%	0,03%	15,00%	0,30%	
	Jumlah guru tersertifikasi	72%	72%	100%	75%	80,40%	107,20%	80%	85,32%	1,0665	85%	73%	86%	90%	
	Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV	74%	74%	100%	80%	86,19%	107,74%	86%	89,52%	1,04093	94%	91%	97%	100%	
	Jumlah Sekolah Terakreditasi	97%	97%	100%	98%	99,50%	101,79%	98%	99,60%	1,016327	99%	100%	101%	100%	
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	Rerata UN SMA/SMK	7,55	7,55	100%	7,65	7,16	94%	7,7	7,01	100%	7,75	7,47	0,96	7,80	Dindik
	Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0,08%	0,08%	100%	0,09%	0,09%	100%	0,10%	0,16%	1,6	0,20%	0,03%	15,00%	0,30%	
	Jumlah guru tersertifikasi	80%	80%	100%	85%	79,00%	92,94%	90%	87,31%	97%	85%	73%	86%	100%	
	Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV	91%	91%	100%	93%	94,74%	101,87%	95%	95,58%	101%	94%	91%	97%	100%	
	Jumlah Sekolah Terakreditasi	90%	90%	100%	92%	91,25%	99,18%	94%	98,80%	105%	99%	100%	101%	98%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Jumlah PAUD terakreditasi	0,96%	0,90%	93,75%	2%	1,60%	80,00%	3%	4%	133%	4%	23%	575%	5%	Dindik
	Kelulusan UNPK warga belajar	75%	75,00%	100%	80%	92,67%	115,84%	85%	89%	105%	90%	97%	108%	95%	
	Jumlah LKP terakreditasi	6,15%	6,15%	100%	12%	8,60%	71,67%	18%	20%	111%	24%	21%	88%	30%	
Program Pengembangan Pendidikan	Jumlah Sarpras terstandar	74%	74%	100%	80%	80%	100%	85%	85%	100%	90%	89%	99%	95%	Dindik
	Jumlah Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	30%	30%	100%	40%	40%	100%	50%	50%	100%	60%	59%	99%	70%	
	Jumlah Sekolah terstandar nasional(SSN)	90%	90,30%	100,00 %	91%	91%	100%	92%	92%	100%	93%	100%	108%	94%	
Program Pengembangan Taman Pintar	Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar	76%	71,67%	94,30%	77%	75%	97%	78%	76,47%	98,04%	79%	77%	97%	80%	Tapin
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan	naik 10%	94%	tidak bisa teridentifikasi	naik 10%	126.554 pengunjung	tidak bisa tridentifikasi	naik 10%	naik 10%	100%	naik 10%	naik 41,26 %	413%	naik 10%	Arpusda

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital	1:05	1:55	177%	1:05	1:05	100%	1:05	1:05	100%	1:05	1:05	100%	1:05	
	Jumlah TBM di Kota Yogyakarta	12	215	1792%	12	216	1800%	12	12	100%	12	0	0%	12	
	Jumlah perpustakaan khusus/instansi	2 unit	4 unit	200%	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%	2 unit	
	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%	60 orang	
	Jumlah pedoman perpustakaan	2 jenis	4 jenis	200%	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan	5577 Pencaker	5654 Pencaker	101,38 %	6077 pencaker	6544 pencaker	107,68%	6577 pencaker	7538 pencaker	102,71%	7077 pencaker	7494 Pencaker	106%	7577 pencaker	Dinsos
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan	686 Perusaha an	686 Perush	100%	672 Perusahaa n	672 perush	100%	658 perush	644 perush	97,87%	644 perush	630 Perush	98%	630 perush	Dinsos

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Menurunnya jumlah penganggur	17821	17217	96,61%	17401	16097	92,51%	16981 orang	13137 orang	77,36%	16561 orang	15181 Orang	92%	16141 orang	Dinsos
Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	Prosentase transmigrasi yang ditempatkan		19 KK/65 jiwa			15 KK/47 jiwa			5 KK/15 jiwa		15 KK	12 KK/39 jiwa		95	Dinsos
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah pasar wisata potensial	7 daerah pasar wisata potensial	233%	3 daerah pasar wisata potensial	4 daerah pasar wisata potensial	133%	3 daerah pasar wisata potensial	4 daerah pasar wisata potensial	133%	3 daerah pasar wisata potensial	6 daerah pasar wisata potensial	200%	3 daerah pasar wisata potensial	Parbud
	Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasam a, 1 Jejaring kerja dg stakehold er	2 daerah kerjasama , 3 Jejaring kerja dg stakehold er	200%	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakehold er	2 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakehold er	200%	1 daerah kerjasam a, 1 Jejaring kerja dg stakehold er	3 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakehold er	300%	1 daerah kerjasam a, 1 Jejaring kerja dg stakehold er	5 daerah kerjasama, 3 Jejaring kerja dg stakehold er	500%	1 daerah kerjasama , 1 Jejaring kerja dg stakehold er	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	1 odtw	1 odtw	100%	1 odtw	1 odtw	100%	1 odtw	1 odtw	100%	1 odtw	1 odtw	1 odtw	100%	Parbud

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%	72%	72,58%	100,81 %	74%	73,87%	99,82%	76%	76,77%	101,01%	78%	79,70%	102,2%	103%	Parbud
Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya	120 kelompok seni budaya	128 kelompok	107%	120 kelompok seni budaya	143 kelompok	119%	120 kelompok seni budaya	166 kelompok seni budaya	138%	120 kelompok seni budaya	311 kelompok seni budaya	259,17%	120 kelompok seni budaya	Parbud
	Cakupan kajian seni	100%	147%	147%	100%	133%	133%	100%	160%	160%	100%	173%	173%	100%	
	Cakupan fasilitasi seni	86%	333%	387%	90%	333%	370%	93%	333%	358%	96%	286%	298%	100%	
	Cakupan gelar seni	100%	133%	133%	100%	133%	133%	100%	133%	133%	100%	294%	294%	100%	
	Cakupan misi kesenian	100%	100%	100%	100%	300%	300%	100%	600%	600%	100%	800%	800%	100%	
	Cakupan SDM kesenian	100%	300%	300%	100%	300%	300%	100%	300%	300%	100%	400%	400%	100%	
	Cakupan tempat kesenian	50%	200%	400%	50%	600%	1200%	100%	600%	600%	100%	600%	600%	100%	
	Cakupan organisasi kesenian	100%	196%	196%	100%	392%	392%	100%	294%	294%	100%	294%	294%	100%	
	Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat	4 nilai budaya	7 nilai budaya	175%	4 nilai budaya	8 nilai budaya	200%	4 nilai budaya	6 nilai budaya	150%	4 nilai budaya	7 nilai budaya	175%	4 nilai budaya	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437BCB/BWB menjadi 600BCB/BWB	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	89%	105%	90%	95%	105%	100%	
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	Meningkatnya sarana prasarana pasar	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	100%	118%	85%	84%	98,82%	95%	Dinlopas
	Intensitas penanganan sampah pasar	25'	25'	100%	20'	20'	100%	20'	30'	150%	20'	20'	100%	15'	
	Menurunnya pelanggaran perda pasar	50%	50%	100%	45%	45%	100%	40%	39%	98%	40%	40%	100%	30%	
	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar	80	80	100%	64	64	100%	51	32	63%	51	61	119,6%	33	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	Optimalisasi lahan pasar	92%	92%	100%	94%	94%	100%	96%	95,70%	99,69%	96%	96,00%	100%	100%	Dinlopas
	Optimalisasi pengelolaan retribusi	14 M	14M	100%	15 M	15 M	100%	16 M	19 M	119%	14,6 M	14,9 M	102%	18 M	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Pengembangan Pasar	Peningkatan jumlah pedagang yang dibina	5325	912	17%	6975	860	12%	8.625	6.975	81%	8625	6.070	70,38%	11925	Dinlopas
	Peningkatan frekuensi promosi	32	32	100%	50	-	-	70	70	100%	70	89	127,14%	110	
Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM )	Jumlah pelaku UMKM yg difasilitasi (di luar PEW)	760 orang	640 orang	84%	850 orang	1.564 orang	184%	950 orang	950 orang	100%	1050 orang	2214 orang	211%	1200 orang	Perindagko ptan
	Jumlah pelaku usaha mikro kecil yg difasilitasi	11.470 orang	11.427 orang	100%	13720 orang	13.742 orang	100%	13.290 orang	13.290 orang	100%	14420 orang	15510 orang	108%	14920 orang	
Program Peningkatan Perdagangan	meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil	171 kali	171 kali	100%	172 kali	203 kali	118%	173 kali	187	104%	174 kali	174 kali	100%	175 kali	Perindagko ptan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa	340	340	100%	340	340	100%	340	340	100%	340	340	100%	340	Perindagko ptan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	10%: klas kelompok: utama 6, madya 31, lanjut 85 dan pemula 85	10% kel utama 6, madya 31, lanjut 85, pemula 85		10%: klas kelompok: utama 10, madya 34, lanjut 93 dan pemula 135	10%: klas kelompok : utama 10, madya 34, lanjut 93 dan pemula 135		10%: klas kelompok: utama 16, madya 39, lanjut	10%: klas kelompok : utama 16, madya 39, lanjut 101 dan pemula 132		10%: klas kelompok: utama 19, madya 45, lanjut	10%;Tota l 264 kel		10%: klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169 dan	Perindagko ptan

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
		85						101 dan pemula 132			111 dan pemula 133			pemula 117	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	32035 kg & pokdakan 59: klas kelompok utama , madya 2, lanjut 12 dan pemula 45	32035 kg Pokdakan 59; Klas Kelompok: Utama 2, Madya 2, Lanjut 12 dan Pemula 45		35238 kg & pokdakan 70: klas kelompok utama , madya 2, lanjut 13 dan pemula 55	35238 kgpokdakan 35; kelompok utama 1, madya 6, lanjut 0, pemula 28		38762,35 kg & pokdakan 80: klas kelompok utama , madya 3, lanjut 14 dan pemula 63	37.630,8 kg& pokdakan 80: klas kelompok utama , madya 3, lanjut 14 dan pemula 63		42638,585 kg & pokdakan 90: klas kelompok utama1, madya 3, lanjut 16 dan pemula 70	42.057 Kg & pokdakan 40: klas kelompok 1; madya 7; pemula 32		46902,4435 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 2, madya 4, lanjut 18 dan pemula71	Perindagkoptan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	ketepatan waktu penerbitan Izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinzin
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi	79,21%	79%	100,00 %	80,21%	81,91%	102,12%	81,21%	94,25%	116,06%	82,21%	93,95%	114,28%	82,21%	Dintib
	Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dintib

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
Program Peningkatan Ketaatan Hukum	Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	160	160	100%	170	170	100%	180	180	100%	190	190	100%	200	Dintib
Program Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat	-	-	-	34%	34%	100%	100%	50%	50%	100%			88%	Dintib
	Persentase petugas perlindungan masyarakat	-	-	-	100%	114%	114%	100%	113%	113%	100%				
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya luasan RTH publik (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	18,21%	18,02%	98,96%	18,71%	18,96%	101,34%	19,21%	19,02%	99,01%	19,71%	19,05%	95,65%	20,21%	BLH
	Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta	14,69%	14,69%	100%	14,79%	14,71%	99,46%	14,89%	14,72%	99%	14,99%	14,72%	98,20%	15,09%	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Meningkatnya luasan taman kota	63.930 m2	66.940 m2	105%	65.555 m2	33.209 m2	51%	67.180 m2	700 m2	1%	68.805 m2	69.535 m2	101,1%	70430 m2	
	Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau	29.237 pohon	21.387 pohon	33%	32.737 pohon	11.830 pohon	36%	36.237 pohon	1.770 pohon	5%	39.737 pohon	21.387 pohon	53,82%	43237 pohon	
	Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW	45 RW	45 RW	100%	90 RW	90 RW	100%	135 RW	56 RW	41%	180 RW	66 RW	36,67%	225 RW	
Program Fasilitas Pertanahan	Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik	29 Kel	29 Kel	100%	31 Kel	30 Kel	103%	33 Kel	33 Kel	100%	35 Kel	36 Kel	103%	37 Kel	Tapem
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yogyakarta	15 parameter	28 parameter	13%	13 parameter	10 parameter	123%	11 parameter	3 parameter	173%	9 parameter	7 parameter	122,20%	7 parameter	BLH
	Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY Nomor 281/KPTS/1998	60 usaha	51 usaha	85%	70 usaha	110 usaha	157%	80 usaha	32 usaha	40%	90 usaha	100 usaha	111%	100 usaha	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan	7 parameter	8 parameter	85,70%	6 parameter	8 parameter	66,60%	5 parameter	0 parameter	200%	4 parameter	0 parameter	200%	3 parameter	
	Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup	75 usaha	60 usaha	80%	100 usaha	110 usaha	110%	150 usaha	61 usaha	41%	200 usaha	178 usaha	89,00%	250 usaha	
	Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPL)	350 usaha	321 usaha	92%	375 usaha	421 usaha	112%	400 usaha	482 usaha	121%	425 usaha	487 usaha	115%	450 usaha	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (Peraturan MENLH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)	0%	0%	100%	60%	0%	0%	65%	100%	154%	70%	100%	143%	75%	
Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan	9 kelurahan	9 kelurahan	100%	18 kelurahan	18 kelurahan	100%	27 kelurahan	29 kelurahan	107%	36 kelurahan	35 kelurahan	97%	45 kelurahan	BLH
	Terlayannya pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI	10 parameter	11 parameter	110%	14 parameter	11 parameter	79%	17 parameter	14 parameter	82%	20 parameter	18 parameter	90,00%	24 parameter	

PROGRAM	INDIKATOR	2012			2013			2014			2015			TARGET 2016	SKPD PENGAMPU
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
	Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan	4 menu	3 menu	75%	5 menu	3 menu	60%	6 menu	8 menu	133%	7 menu	7 menu	100%	8 menu	
	Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan	101 sekolah	77 sekolah	76%	168 sekolah	123 sekolah	73%	263 sekolah	124 sekolah	47%	285 sekolah	165 sekolah	57,89%	339 sekolah	
	Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota	6 sekolah	6 sekolah	100%	9 sekolah	13 sekolah	144%	12 sekolah	21 sekolah	175%	15 sekolah	48 sekolah	320,0%	18 sekolah	
Program Konservasi Sumber Daya Alam	Terpantaunya kualitas air tanah pada sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik)	240 titik	181 titik	75%	260 titik	470 titik	181%	280 titik	715 titik	255%	300 titik	162 titik	54%	320 titik	BLH
	Terkendalnya penurunan permukaan air tanah	10 cm	10 cm	100%	10 cm	10 cm	100%	10 cm	10 cm	100%	10 cm	10 cm	100%	10 cm	

## **BAB 3**

### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 diharapkan dapat mencapai 7,1 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 4,0 persen dan bertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 8,5 – 9,5 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran angka 5, – 5,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi : (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota pada tahun 2017 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2017 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari indikator pencapaian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan Ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dapat mencapai 5,47 persen. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2010 hingga 2014, namun pertumbuhannya cenderung dinamis, bahkan pada tahun 2012, pertumbuhan sektor industri pengolahan bernilai negatif atau mengalami penurunan dari tahun 2011. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang rata-rata pertumbuhannya mendapai 7,94 setiap tahunnya.



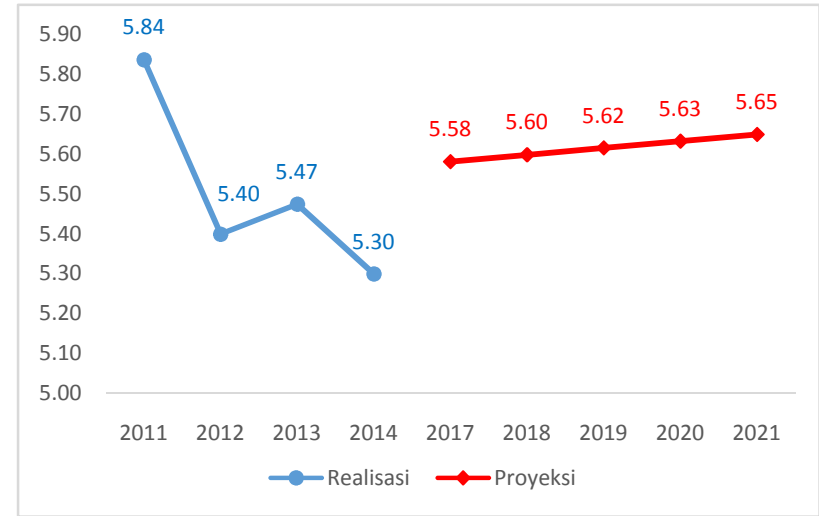
Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014  
Berdasarkan PDRB ADHK 2010  
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2017 perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5,3 - 5,58 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pada kurun waktu 2011-2014, laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung mengalami perlambatan. Sektor-sektor utama Kota Yogyakarta adalah sektor tersier, antara lain perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa.

**Tabel 3.1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 dan**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Realisasi/ Proyeksi	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Realisasi	2011	5,84
	2012	5,40
	2013	5,47
	2014	5,30
Proyeksi	2017	5,58
	2018	5,60
	2019	5,62
	2020	5,63
	2021	5,65

Sumber:  
 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta 2010-2014, BPS Kota Yogyakarta  
 2. Hasil olahan 2016



**Gambar 3.2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 dan**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**  
 Sumber: Hasil Analisis 2015

Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik maka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2007-2021 diperkirakan akan terus meningkat. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa pertumbuhan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan melambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya diperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama di Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, serta sektor pengangkutan.

▪ **Inflasi**

Laju Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 yaitu 3,91% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 6,59%. Penurunan laju inflasi tersebut disumbang oleh turunnya kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar serta kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.

**Tabel 3.2.**  
**Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 –2015**

Tahun	2014	2015
Inflasi Kota Yogyakarta	6,59	3,91
Inflasi Provinsi Jawa Tengah	8,36	4,89
Inflasi Nasional	8,22	4,02

Laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 3,91%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi Jawa Tengah yang sebesar 4,89% dan laju inflasi nasional sebesar 4,02%. Laju inflasi padatahun 2017 diharapkan dapat ditekan pada level 4,0 – 6,13 persen.

▪ **Tenaga Kerja**

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,94 di tahun 2015.

**Tabel 3.3.**  
**Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	195.445	149.189	171.108	132.713	177.895	-2,32
2	Angkatan Kerja	Jiwa	213.686	166.406	187.205	145.850	188.555	-3,08
3	Rasio penduduk yang Bekerja		0,91	0,90	0,91	0,91	0,94	0,77

*Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013 dan 2014, diolah*

Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio yang ada menunjukkan tren positif yang ditandai dengan semakin besarnya nilai rasio, meskipun pertumbuhan tersebut berjalan dengan lambat. Pada tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,94. Itu artinya 94% atau sebesar 145.850 jiwa dari total

angkatan kerja yang ada telah memperoleh kesempatan untuk bekerja sementara untuk 6% yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Angka pengangguran terbuka pada tahun 2017 diestimasikan pada kisaran 6,35–5,3 persen.

**Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**  
*Sumber : Hasil Olahan, 2016*



**3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017**

**A. Ekonomi Makro**

**1. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik. Selama kurun waktu 2010-2014, PDRB per kapita Kota Yogyakarta meningkat dari 48.399 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 60.567 juta rupiah di tahun 2014. Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita DIY. Meskipun demikian, peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Besaran rasio Gini, besaran bagian pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan terendah, dan besaran indeks Williamson menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk dan antar Kecamatan. Selama kurun waktu 2011-2014, rasio Gini meningkat dari 0,3509 menjadi 0,4151 dan indeks Williamson meningkat dari 0,495 menjadi 0,517. Sementara itu, bagian pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan terendah mengalami penurunan dari 18,20% di tahun 2011 menjadi 15,18% di tahun 2014.

**Tabel 3.4**  
**PDRB per Kapita dan Pemerataan Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	PDRB perkapita (Juta Rupiah)	48.399	51.650	55.970	60.567
<b>Pemerataan Pendapatan Antar Penduduk:</b>					
1	Bagian PDRB yang diterima 40 % Penduduk Berpendapatan Terendah (%)	18,20	17,97	15,57	15,18
2	Rasio Gini	0,3509	0,3603	0,4366	0,4151
<b>Pemerataan Pendapatan Antar Kecamatan:</b>					
1	Indeks Williamson	0,495	0,506	0,513	0,517

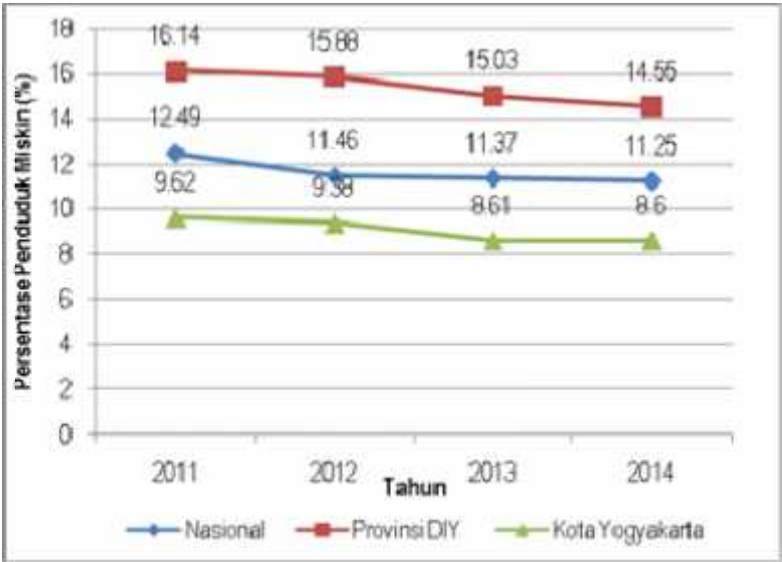
Sumber:  
 1. PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014, BPS Kota Yogyakarta, 2015  
 2. Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahu 2012 dan 2014, BPS Kota Yogyakarta, 2015  
 3. Hasil Olahan 2016

Pendapatan yang dihasilkan oleh Kota Yogyakarta ternyata lebih dirasakan oleh kelompok penduduk berpendapatan sedang dan tinggi. Pada umumnya, kelompok ini merupakan kalangan pekerja profesional dan pengusaha. Kelompok ini diuntungkan dengan adanya perkembangan di sektor modern, seperti jasa, keuangan, komunikasi, dan pengangkutan yang berkembang di Kota Yogyakarta. Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri, bangunan, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya terbatas dan juga membutuhkan keahlian dan keterampilan yang tinggi sehingga tidak semua orang mampu mengaksesnya.

Penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah tidak meratanya distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Sementara itu, terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah, serta kebijakan pemerintah yang kurang *pro-poor* menyebabkan pendapatan relatif dan pendapatan riil usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil cenderung menurun. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang diarahkan kepada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan melalui program pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan bantuan yang disertai dengan pendampingan sehingga mereka dapat mandiri.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan nasional dan provinsi dengan kecenderungan menurun. Selama kurun 2011-2014, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta menurun dari 9,62% menjadi 8,60%. Pada tahun 2011-2014, perentase penduduk miskin di kota Yogyakarta selalu berada di bawah nasional dan provinsi. Secara umum, pencapaian tahun 2012-2014 telah melebihi target RPJMD Kota Yogyakarta. Artinya realisasi tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan yang menjadi target RPJMD.



Gambar 3.4  
Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2010-2013

- Sumber:
- 1. DIY dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015)
  - 2. Bappeda Kota Yogyakarta, 2016
  - 3. Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan pendekatan lokal Kota Yogyakarta, kemiskinan diidentifikasi berdasarkan data penerima Jaminan Perlindungan Sosial (JPS). Kemiskinan di Kota Yogyakarta diidentifikasi menggunakan 17 parameter yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta No 244/KEP/2012. Berdasarkan pendataan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, terdapat 21.299 keluarga miskin pada tahun 2012 dan jumlah tersebut terus menurun menjadi 18.730 keluarga miskin di tahun 2015. Demikian pula dengan persentase keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang terus menurun dari tahun 2012-2015. Pada tahun 2012, persentase keluarga miskin sebesar 16,45% dan pada tahun 2015 menurun menjadi 14,51%. Secara spasial, persentase keluarga miskin di atas rata-rata Kota Yogyakarta (14,51%) meliputi Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Danurejan,

Gedongtengen, Wirobrajan, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, dan Mergangsan.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah dan Persentase Keluarga Penerima Jaminan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015**

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin				Persentase Keluarga Miskin (%)			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	Tegalrejo	2.029	2.021	1.984	1957	17,34	18,16	17,33	16,99
2	Jetis	1.816	1.825	1.613	1606	20,70	21,81	18,26	18,36
3	Gondokusuman	2.000	1.920	1.793	1738	14,47	15,04	13,59	13,24
4	Danurejan	1.459	1.521	1.422	1470	21,02	23,51	21,21	21,93
5	Gedongtengen	1.352	1.320	1.086	970	20,32	20,30	16,24	14,73
6	Ngampilan	839	772	611	628	14,74	13,72	10,65	10,90
7	Wirobrajan	1.572	1.473	1.475	1510	18,51	17,75	17,12	17,37
8	Mantrijeron	1.693	1.584	1.580	1530	14,58	14,42	13,77	13,40
9	Kraton	1.251	1.301	1.284	1247	17,52	20,03	17,97	17,62
10	Gondomanan	887	708	705	710	18,51	15,23	14,69	14,85
11	Pakualaman	654	642	523	507	18,60	18,85	15,11	14,68
12	Mergangsan	2.137	2.022	2.104	2134	21,34	20,94	21,08	21,17
13	Umbulharjo	2.150	1.989	1.461	1719	10,49	9,95	7,04	8,18
14	Kotagede	1.460	1.383	1.240	1004	14,91	14,27	12,39	9,89
	Kota Yogyakarta	21.299	20.481	18.881	18.730	16,45	16,51	14,65	14,51

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2016, diolah

Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkat pendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikap mental) keluarga miskin. Meskipun secara umum, jumlah dan persentase keluarga penerima jaminan sosial mengalami penurunan, namun adanya kemiskinan di Kota Yogyakarta tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaan untuk mengubah sikap warga masyarakat miskin agar mampu berkarya dan memperoleh penghasilan sehingga tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, kecuali pada warga yang tidak berdaya dan tidak mampu melakukan pekerjaan.

**B. Pertanian**

- **Keterbatasan lahan dalam pengembangan usaha**

Pengembangan pertanian di Kota Yogyakarta terbatas pada ketersediaan lahan. Lahan kosong lebih menarik untuk dijadikan sebagai tempat usaha ataupun perumahan. Selain itu, tidak banyak warga yang tertarik untuk melakukan kegiatan pertanian terutama untuk pertanian

tanaman pangan. Oleh karena itu, bilapun terdapat kegiatan pertanian, kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual kembali.

Potensi pertanian Kota Yogyakarta adalah pada tanaman non bahan makanan, seperti tanaman hias dan tanaman hortikultura. Kegiatan ini tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga cocok untuk daerah perkotaan. Untuk kegiatan tanaman pangan, akan dikembangkan usaha pembenihan padi. Sebagian lahan pertanian di Kota Yogyakarta akan dimanfaatkan untuk pembenihan padi guna mendukung kebutuhan benih DIY. Sementara itu, untuk kegiatan perikanan juga terkendala pada keterbatasan lahan dan ketersediaan air. Kegiatan perikanan yang umum dilakukan adalah budidaya lele. Namun, kegiatan tersebut terkendala oleh penyediaan kolam sehingga perkembangannya kurang memuaskan. Budidaya ikan hias juga sudah dikembangkan, namun karena masih dalam skala kecil sehingga perkembangannya juga belum signifikan.

C. Perdagangan

1. Peningkatan Jumlah Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, prasarana perdagangan juga mengalami perkembangan, terutama pusat perbelanjaan dan pasar modern. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah, lengkap, dan selalu tersedia. Dari tahun 2011-2015, secara umum jumlah pasar mengalami penurunan dari 32 unit menjadi 31 unit. Sedangkan keberadaan swalayan/ supermarket/ mall di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari 51 unit di tahun 2012 menjadi 59 unit di tahun 2015.

Tabel 3.6  
Jumah Sarana Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No	Jenis Sarana Perdagangan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pasar	32	32	31	31	31
2.	Swalayan/Supermarket/Mall		51	56	59	59

Sumber: SIPD Numerik Kota Yogyakarta 2011-2015, Bappeda Kota Yogyakarta 2015

Keberadaan pasar modern ini dirasa menguntungkan konsumen serta mampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini, di Kota Yogyakarta, pendirian pasar modern sudah diatur melalui Peraturan Walikota. Perwal ini mengatur baik jumlah pasar/toko modern maupun jarak antar pasar modern dan jarak dengan pasar tradisional.

Pembatasan jumlah dan jarak ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat antar pedagang.

Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modern membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakah pemodal ini merupakan warga Kota Yogyakarta atau berasal dari luar. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan adanya pasar/toko modern ini mampu menyerap tenaga kerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaan pasar tradisional juga diharapkan mampu menyerap pengusaha dan tenaga kerja lokal sebagai penggerak perekonomian kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung tumbuhnya pasar tradisional maupun pasar/toko modern agar keduanya bertumbuh bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Keterbatasan Lahan Pasar Tradisional**

Keterbatasan lahan pasar merupakan salah satu permasalahan di bidang ekonomi karena dengan lahan yang terbatas tentunya pasar tradisional di Kota Yogyakarta akan sulit berkembang dan hal tersebut dapat berdampak pada perekonomian lokal. Pasar tradisional merupakan tempat jual beli dengan harga penawaran yang wajar sesuai dengan kemampuan beli masyarakat lokal. Kenyataan di lapangan, dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa secara umum terdapat penambahan usaha-usaha di area pasar. Dengan keterbatasan lahan yang ada memungkinkan pedagang pasar untuk tidak mendapat tempat usaha di dalam pasar sehingga mereka akan membuka usaha di sekeliling pasar yang tidak tertata serta berdagang pada tempat-tempat yang tidak berizin.

Lahan pasar tradisional di Kota Yogyakarta masih banyak yang merupakan tanah sultan sehingga kepemilikannya tidak dapat dipastikan selamanya. Sedangkan lahan kosong di Kota Yogyakarta dengan luas minimal untuk membangun pasar sudah mulai jarang ditemukan. Dengan adanya hal tersebut maka perlu adanya pengembangan pasar, baik secara vertikal maupun horisontal agar mampu menampung kegiatan jual beli pasar sehingga terwujud ekonomi kerakyatan.

## **3. Keterbatasan Modal Pedagang**

Modal merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan seorang pedagang untuk membuka usahanya. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki modal tentu akan sulit untuk memulai atau melanjutkan usahanya. Kasus yang ada di Kota Yogyakarta, beberapa pedagang ada yang

berhenti dan tidak melanjutkan usahanya dikarenakan kekurangan modal (dana), dimana untuk memulai usahanya mereka menggunakan dana pinjaman dari bank atau lembaga lainnya dan ketika barang dagangannya laku, keuntungan yang didapat hanya bisa menutup pinjaman modal. Dengan adanya hal tersebut maka beberapa pedagang tersebut gulung tikar, namun bagi mereka yang tidak putus asa memutuskan untuk melanjutkan usahanya dan memulai dari awal. Kedepannya, perlu diberikan kredit modal bagi pedagang dengan bunga ringan serta pelatihan dalam memenejemen keuangan.

#### **4. Belum Optimalnya Penataan Lahan Pasar**

Keterbatasan lahan pasar di Kota Yogyakarta secara tidak langsung menyebabkan lahan pasar kurang tertata. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat lokasi-lokasi parkir yang berada di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar pasar. Di samping itu, adanya pedagang-pedagang yang berjualan di luar pasar turut menyebabkan kondisi pasar yang kurang tertata. Penataan ruang dalam pasar juga perlu diatur ulang terkait masih adanya lapak dagang yang penempatannya kurang tepat. Kedepannya, perlu ada optimalisasi pengelompokan pedagang jenis barang tertentu untuk mempermudah pembeli dalam berbelanja. Selain itu, penataan ruang diperlukan terkait dengan penempatan kelompok dagang barang tertentu. Hal tersebut dikarenakan beberapa pasar di Kota Yogyakarta tidak hanya terdiri dari 1 lantai saja sehingga penempatan barang dagangan di lantai atas perlu memperhatikan kondisi barang dan karakteristik konsumen.

#### **5. Pemahaman PKL mengenai regulasi masih kurang**

Pemahaman PKL yang masih kurang mengenai regulasi adalah terkait dengan izin untuk berusaha. Meskipun secara umum pedagang PKL yang berizin mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa PKL di Kota Yogyakarta yang masih belum mengantongi izin berdagang dan berlokasi pada tempat yang tidak semestinya. Bagi mereka yang sudah melakukan izin, beberapa diantaranya tidak mengurus izin berdagang ketika masa berlaku izin sudah habis sehingga hal tersebut menyebabkan SKPD terkait sulit untuk memantau dan memberi pelatihan serta sosialisasi. Beberapa kasus lain mengenai palangggaran izin adalah terkait dengan perluasan area berdagang yang tidak sesuai dengan izin awal. Dengan adanya hal tersebut, kedepannya perlu ada sosialisasi secara tegas

kepada PKL untuk mentaati peraturan yang ada dan melakukan kegiatan perdagangan sesuai izin yang tertera.



**Gambar 3.5**  
**Jumlah PKL dan Persentase PKL Berizin Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**  
*Sumber: Hasil Analisis, 2016*

**6. Menurunnya Nilai Ekspor Perdagangan**

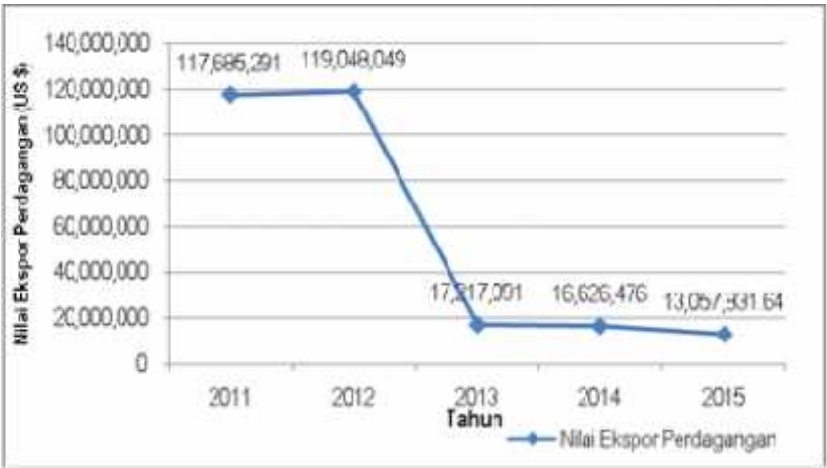
Ekspor perdagangan menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan dapat menembus perdagangan di pasar internasional. Namun, ekspor perdagangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011-2015 cenderung menurun berdasarkan data Disperindagkoptan. Pada tahun 2011, nilai ekspor perdagangan yang tercatat di Kota Yogyakarta mencapai 117,7 juta US\$. Nilai tersebut terus menurun sampai pada angka 13,1 juta US\$ di tahun 2015. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013.

Selama ini, pendataan ekspor tidak dilakukan secara langsung oleh Disperindagkoptan Kota Yogyakarta. Data nilai ekspor yang diperoleh Disperindagkoptan Kota Yogyakarta berasal dari instansi Provinsi DIY karena pelaporan kegiatan ekspor merupakan wewenang di tingkat provinsi. Selain hal tersebut, kegiatan ekspor Kota Yogyakarta banyak yang tidak termonitoring sehingga dari tahun ke tahun nilainya semakin menurun. Pelaku usaha biasanya melakukan pengiriman di pelabuhan sehingga data ekspor justru tersedia di pelabuhan. Selain itu, beberapa eksportir skala kecil lebih memilih untuk menitipkan barang dagangannya lewat cargo sehingga menghemat biaya produksi.

Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangan kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskan untuk membantu UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perak

dan pemanfaatan limbah agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing. Selain hal tersebut, perlu adanya monitoring terhadap kegiatan ekspor di Kota Yogyakarta karena bila dilihat di lapangan, produk UMKM di Kota Yogyakarta sudah banyak yang menembus pasar internasional, namun yang tercatat masih belum seluruhnya.

**Gambar 3.6**  
**Nilai Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**  
*Sumber: Disperindagkoptan, 2016*



**D. Penanaman Modal**

**1. Belum adanya Lembaga yang Menangani Penanaman Modal**

Penanaman modal di Kota Yogyakarta secara umum mengalami peningkatan dari segi jumlah investor dan juga nilai investasi. Dengan adanya hal tersebut perlu adanya lembaga atau instansi yang menangani perihal penanaman modal secara khusus. Namun demikian, di Kota Yogyakarta belum terdapat adanya lembaga atau instansi yang secara khusus menangani penanaman modal karena pelaporan investasi masih dilakukan oleh Setda Bagian P3ADK yang tentunya memiliki banyak tupoksi lain sehingga belum sepenuhnya dapat terkelola dengan baik dan fokus. Bila investasi di Kota Yogyakarta dapat dikelola dengan baik tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian Kota Yogyakarta.

**2. Masih adanya ketidaksepakatan antara keinginan investor dan kebutuhan pemerintah**

Keberadaan investasi pada suatu wilayah tentu akan memberikan dampak yang beragam di wilayah tersebut, ada yang berdampak positif dan ada pula dampak negatifnya. Dengan adanya investasi pada Kota

Yogyakarta tentu akan meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta. Namun, dengan adanya investasi tersebut beberapa ada yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya, misalnya peningkatan harga tanah atau harga jual barang tertentu. Selama ini, beberapa perusahaan atau perseorangan yang hendak menanamkan modalnya di Kota Yogyakarta terkendala oleh kebutuhan pemerintah. Misalnya saja banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidang perhotelan, sedangkan pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sedang membatasi adanya pembangunan hotel baru karena menghindari dampak lingkungan yang disebabkan dari pembangunan hotel tersebut. Dengan adanya ketidaksepakatan tersebut, perlu adanya diskusi dan negoisasi antara pemerintah dan investor agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

## **E. Pariwisata**

### **1. Kurangnya Pemahaman Sapta Pesona oleh Beberapa Pelaku Wisata**

Kota Yogyakarta meemiliki visi pariwisata berbasis budaya. Artinya kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan mendasarkan pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal tersebut secara tersirat menempatkan Kraton Yogyakarta sebagai pusat budaya Kota Yogyakarta. Nilai-nilai Kraton diadopsi dan dikembangkan di masyarakat.

Selama ini, cerminan pariwisata berbasis budaya masih terbatas pada penggunaan pakaian adat dan penyajian tarian daerah pada penyelenggaraan acara-acara di Kota Yogyakarta. Selain itu adanya event kesenian, festival, dan pelestarian kesenian tradisi yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun sesungguhnya kebudayaan dibangun dengan membangun moral, perilaku, dan akhlak dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata budaya tidak hanya penyelenggaraan festival semata namun juga menumbuhkan kesadaran akan pariwisata di masyarakat.

Kunjungan wisata ke suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain ketersediaan obyek wisata yang menarik serta kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi hal yang penting karena berkorelasi dengan kepuasan berwisata. Wisatawan yang merasa puas berpeluang untuk kembali dan merekomendasikannya ke orang lain. Citra positif pariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun.

Wisatawan mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota dengan penduduk yang ramah dan suka menolong. Namun di sisi lain, masih ada pelaku usaha wisata yang berperilaku kurang baik terhadap wisatawan. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha di bidang pariwisata yang rela menggunakan cara curang demi meningkatkan keuntungannya, misalnya pemaksaan kehendak tujuan wisata, penawaran harga yang tidak wajar, serta ketidaksesuaian harga barang dengan kualitas. Di Kota Yogyakarta, pelaku usaha wisata tidak terbatas hanya oleh warga asli Yogyakarta tetapi juga ada pendatang-pendatang bahkan dari luar Jawa. Pendatang ini memiliki karakteristik pribadi yang mungkin berbeda dengan penduduk asli sehingga memiliki pendekatan yang berbeda terhadap wisatawan. Namun, siapapun itu, mereka adalah pelaku wisata yang perlu memberikan nilai-nilai positif terhadap wisatawan. Kesadaran akan sikap dan perilaku positif terhadap wisatawan inilah yang perlu dibangun.

Selain hal tersebut, pemahaman sapta pesona wisata tidak hanya perlu dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata saja, melainkan oleh penduduk Kota Yogyakarta dan wisatawan yang berkunjung. Sikap sadar wisata perlu dimiliki oleh setiap warga Kota Yogyakarta. Partisipasi masyarakat diperlukan karena manusia tidak mungkin lepas dari keadaan sekelilingnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakat terlibat dan tidak merasa terpinggirkan oleh majunya kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta. Fungsi sosial masyarakat dalam memberikan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan harus berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pariwisata berdaya saing tinggi. Sedangkan pemahaman sapta pesona oleh wisatawan perlu dilakukan, terutama terkait dengan kebersihan di area wisata. Kebanyakan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta merupakan wisatawan rombongan dan ketika mereka meninggalkan lokasi wisata cenderung menimbulkan lingkungan kotor karena dipenuhi oleh sampah makanan. Oleh karenanya, pemahaman sapta pesona wisata ini perlu dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam pariwisata Kota Yogyakarta.

## **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata**

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Kota Yogyakarta ditandai dari terbatasnya pos-pos yang melayani informasi pariwisata serta keberadaan kantong parkir yang masih belum terkelola dengan baik. Pos-pos informasi pariwisata sangat membantu wisatawan dalam memahami objek wisata di Kota Yogyakarta serta mendapatkan akomodasi wisata ketika ada di Yogyakarta. Adanya hal tersebut turut

menghindarkan wisatawan dari tindakan merugikan oleh pelaku usaha wisata.

Keberadaan kantong parkir di Kota Yogyakarta sejauh ini masih perlu melalui beberapa penataan ulang. Di awal tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mulai melakukan penataan ruang di kawasan Malioboro dengan merelokasi ruang parkir dari trotoar Jalan Malioboro ke taman parkir Abu Bakar Ali di sebelah utara kawasan malioboro. Sebenarnya, pada tahun 2014 pemerintah Kota Yogyakarta sudah membangun kantong parkir untuk kendaraan besar di daerah Ngabean. Namun, lokasi tersebut dirasa kurang strategis karena sedikit jauh dari kawasan Malioboro dan keraton. Tidak adanya kendaraan yang mengangkut wisatawan menuju lokasi wisata menyebabkan bus pariwisata enggan untuk memarkirkan busnya di Ngabean, mereka justru memilih memarkir kendaraan di depan Bank Indonesia sehingga tampak jurang tertata. Adanya kantong parkir Abu Bakar Ali menjadi alternatif wisatawan untuk memarkirkan kendaraanya karena lokasinya berdekatan dengan kawasan wisata Malioboro. Kedepannya, perlu ada penataan ruang parkir pada kawasan wisata lainnya, misalnya seperti daerah keraton dan sebagainya.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta

dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 32,24 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 45,47 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 22,29 persen.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2013 proporsi Dana Perimbangan mencapai 50,30 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi 45,47 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD pada tahun 2013 adalah sebesar 20,45 persen dan pada tahun 2014 menjadi 22,29 persen. Pergeseran proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2013 sebesar 29,25 persen dan pada tahun 2014 mencapai 32,24 persen.

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 11,47 persen dari 2013-2014. Pertumbuhan yang tertinggi adalah PAD meningkat sebesar 22,87 persen. Sementara itu Dana Perimbangan meningkat sebesar 0,75 persen, Lain-lain Pendapatan Yang Sah justru meningkat sebesar 21,25 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp1.558.183.827.991,- (satu trilyun lima ratus lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp 509.677.116.275,-
- b. Dana Perimbangan Rp 896.721.408.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 151.785.303.716,-

Secara rinci Tabel 3.7 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2017.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2017**

URAIAN	Realisasi			APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana
	2013 (Perubahan)	2014	2015 (Perubahan)	2016	2017
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,309,580,194,014.42</b>	<b>1,459,742,435,083.81</b>	<b>1,434,009,588,218.85</b>	<b>1.631.765.404.767</b>	<b>1.498.218.489.056</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>383,052,140,420.42</b>	<b>470,641,528,444.03</b>	<b>510,548,822,809.51</b>	<b>503.488.602.271</b>	<b>510.300.309.908</b>
Pajak Daerah	227,748,852,911.00	253,461,936,189.00	304,068,622,926.00	314.421.000.000	336.106.500.000
Retribusi Daerah	40,388,698,611.00	56,095,909,175.00	40,057,651,205.00	38.200.198.078	35.093.702.750
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,596,415,894.77	14,087,531,070.13	12,938,168,143.00	14.989.732.029	25.659.452.193
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	102,368,173,003.65	146,996,152,009.90	153,484,380,535.51	135.877.672.164	113.440.654.965
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>658,770,838,596.00</b>	<b>663,712,266,941.00</b>	<b>652,748,113,159.00</b>	<b>967.286.298.780</b>	<b>836.132.875.432</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,337,999,596.00	42,720,014,941.00	28,040,062,159.00	55.713.758.000	55.713.758.000
Dana Alokasi Umum	597,212,209,000.00	618,742,352,000.00	622,365,351,000.00	670.278.830.000	670.278.830.000
Dana Alokasi Khusus	6,220,630,000.00	2,249,900,000.00	2,342,700,000.00	241.293.710.780	110.140.287.432
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>267,757,214,998.00</b>	<b>352,388,639,698.78</b>	<b>270,712,652,250.34</b>	<b>160.990.503.716</b>	<b>151.785.303.716</b>
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	78,307,857,998.00	95,415,455,298.78	109,896,115,250.34	108.860.439.716	108.860.439.716
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	177,684,357,000.00	217,566,892,000.00	150,891,200,000.00	40.424.864.000	40.424.864.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	11,765,000,000.00	12,406,292,400.00	9,925,337,000.00	11.705.200.000	2.500.000.000

*Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta dan data diolah*

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2014 masih pada kisaran 45,47 persen dan PAD menyumbang sebesar 32,24 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2017 masih mengacu kebijakan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.

- 6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
- 7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
- 8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

**A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Pada tahun 2007, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 114,1 milyar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 109,54%. Sementara pada tahun 2014, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 470,64 milyar rupiah atau setara dengan 116,4% dari target yang ditetapkan. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target (lihat tabel 3.8).

**Tabel 3.8**  
**Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

URAIAN		2011		2012		2013		2014	
		Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)
1.	Hasil Pajak Daerah	120.458	118,9	207.703	119,4	227.749	104,9	253.462	97,3
2.	Hasil Retribusi Daerah	34.408	108,5	38.771	110,1	40.339	108,4	56.096	132,2
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.121	100,0	11.497	100,0	12.596	99,9	14.088	111,9
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	63.883	105,3	80.313	128,7	102.368	117,0	146.996	165,8
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>228.871</b>	<b>112,3</b>	<b>338.284</b>	<b>119,5</b>	<b>383.052</b>	<b>108,1</b>	<b>470.642</b>	<b>116,4</b>

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2017, meliputi:

- Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
- Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
- Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

## **B. Dana Perimbangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2016 relatif besar mencapai 45,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam Tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014**

URAIAN		2011		2012		2013		2014	
		Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.722	117,7	59.358	126,5	55.338	91,2	42.720	66,3
	Bagi Hasil Pajak	60.239	117,7	56.908	126,9	52.704	90,4	40.681	65,0
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.483	116,8	2.450	118,7	2.634	110,8	2.039	113,5
2.	Dana Alokasi Umum	436.130	100,0	536.467	100,0	597.212	100,0	618.742	100,0
3.	Dana Alokasi Khusus	1.762	100,0	6.485	100,0	6.221	100,0	2.250	100,0
<b>Dana Perimbangan</b>		<b>500.614</b>	<b>101,9</b>	<b>602.310</b>	<b>102,1</b>	<b>658.771</b>	<b>99,2</b>	<b>663.712</b>	<b>96,8</b>

*Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.*

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- J Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2017 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2015, TA 2014 dan TA 2013 ; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2017.
- J Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHTTA 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2017 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2015, TA 2014 dan TA 2013 ; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2017.
- J Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 . Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2017 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2016.

- J Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2017. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan.
- J Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

### **C. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2014, nilai pendapatan ini mencapai 325,39 milyar rupiah dengan capaian target sebesar 270,2%. Apabila pada tahun 2009 lonjakan capaian target dikarenakan adanya alokasi Dana Tunjangan Pendidikan yang menyebabkan capaian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus menembus angka 1.165%, pada tahun 2014 lonjakan capaian dikarenakan adanya penetapan kebijakan Dana Keistimewaan DIY sehingga realisasi penerimaan sumber pendapatan ini mencapai 899,5%. Akan tetapi selain mendapat pengaruh dari komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, tingginya capaian target pada tahun 2014 juga disebabkan karena rendahnya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2013, target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan adalah sebesar 265,26 milyar rupiah sementara pada tahun 2014 target yang ditetapkan menurun menjadi 120,41 milyar rupiah atau menurun 120,3% dari target tahun sebelumnya.

**Tabel 3.10**  
**Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014**

URAIAN		2011		2012		2013		2014	
		Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)
1.	Pendapatan Hibah	3.345	95,8	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Dana Darurat	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.273	99,9	67.067	100,0	78.308	103,3	95.415	115,3
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	125.374	100,0	139.338	100,0	177.684	100,0	217.567	899,5
5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.205	98,3	10.580	110,9	11.765	100,0	12.406	91,9
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		<b>222.197</b>	<b>99,7</b>	<b>216.985</b>	<b>100,5</b>	<b>267.757</b>	<b>100,9</b>	<b>325.389</b>	<b>270,2</b>

*Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.*

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- ) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2017.
- ) Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2017.
- ) Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2017. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2017 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2017, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2015.
- ) Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- ) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

#### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih pada kisaran 51,69 persen pada tahun 2013 dan 49,51 pada tahun 2014, sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 48,30 persen pada tahun 2013 dan 50,48 pada tahun 2014. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 46,06 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 93,03 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Realisasi belanja pada tahun 2013 hanya mencapai 89,31 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 89,31 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 92,27 persen dan Belanja Langsung mencapai 85,88 persen pada tahun 2013. Adapun pada tahun 2014 Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 110,85 persen dan Belanja Langsung mencapai 81,79 persen.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014**

Uraian	2013 (perubahan)			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>687.376.178.532,00</b>	<b>633.327.757.674,18</b>	<b>92,14</b>	<b>597.086.571.899,00</b>	<b>66.059.134.664,75</b>	<b>11,064</b>
- Pegawai	633.396.801.236,00	590.478.800.556,00	<b>93,22</b>	532.696.928.521,00	615.751.844.198,00	<b>115,59</b>
- Bunga	75.486.098,00	75.486.097,18	<b>100,00</b>	32.402.075,00	32401772,75	<b>99,999</b>
- Subsidi	-	-	-	-	-	-
- Hibah	40.594.228.600,00	34.287.663.050,00	<b>84,46</b>	55.467.086.000,00	40.179.300.498,00	<b>72,438</b>
- Bantuan sosial	6.738.000.000,00	6.045.181.000,00	<b>89,72</b>	3.358.500.000,00	3.060.900.000,00	<b>91,139</b>
- Bantuan Keuangan	2.459.786.038,00	2.421.465.086,00	<b>98,44</b>	2.531.655.303,00	2.490.776.524,00	<b>98,385</b>
- belanja tidak terduga	4.111.876.560,00	19.161.885,00	<b>0,47</b>	3.000.000.000,00	543.911.672,00	<b>18,13</b>
<b>Belanja langsung</b>	<b>690.038.641.862,00</b>	<b>599.584.176.460,00</b>	<b>86,89</b>	<b>825.006.764.481,00</b>	<b>674.551.333.203,00</b>	<b>81,763</b>
- Pegawai	143.492.675.339,00	123.582.680.214,00	<b>86,12</b>	128.926.364.764,00	127.625.790.224,00	<b>98,991</b>
- Barang & jasa	357.243.633.696,00	308.921.754.042,00	<b>86,47</b>	426.259.056.726,00	3.538.472.633.850,00	<b>830,12</b>
- Modal	189.302.332.827,00	167.079.742.204,00	<b>88,26</b>	269.821.342.991,00	193.078.279.594,00	<b>71,558</b>
<b>BELANJA</b>	<b>1.377.414.820.394,00</b>	<b>1.232.911.934.134,18</b>	<b>89,51</b>	<b>1.422.093.336.380,00</b>	<b>1.336.610.467.867,75</b>	<b>93,989</b>

*Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.*

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

## **A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2017;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

## **2. Belanja Bunga**

Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

## **3. Belanja Subsidi**

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

## **4. Belanja Hibah**

Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

## **5. Belanja Bantuan Sosial**

Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

## **6. Belanja Bagi Hasil**

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2016 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

## **7. Belanja Bantuan Keuangan**

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.

#### **8. Belanja Tidak Terduga**

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran. 2017.

#### **B. Kebijakan Belanja Langsung**

Kebijakanbelanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017**

URAIAN	Realisasi			APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana
	2013 (Perub)	2014	2015	2016	2017
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,377,414,820.394</b>	<b>1,336,610,467,867.75</b>	<b>1,539,699,344,285.44</b>	<b>1.888.625.439.858</b>	<b>1.637.928.718.912</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>687,376,178,532</b>	<b>662,059,134,664.75</b>	<b>724,041,324,573.83</b>	<b>854.702.976.493</b>	<b>683.235.563.423</b>
Belanja Pegawai	633,396,801,236	615,751,884,198.00	669,675,278,786,83	789.259.217.750	620.496.515.975
Belanja Bunga	75,486,098	32,401,722.75	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	40,594,228,600	40,179,300,498.00	47,372,262,832.00	57.235.161.325	56.620.985.000
Belanja Bantuan Sosial	6,738,000,000	3,060,900,000.00	4,534,392,000.00	2.147.935.000	1.907.400.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa , Partai Politik	2,459,786,038	2,490,776,524.00	2,434,210,440.00	3.060.662.418	1.210.662.448
Bantuan Keuangan Kepada Parpol	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	4,111,876,560	543,911,672.00	25,180,515.00	3,000,000,000	3,000,000,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>690,038,641,862</b>	<b>674,551,333,203.00</b>	<b>815,658,019,711,61</b>	<b>1.033.922.463.365</b>	<b>954.693.155.489</b>
Belanja Pegawai	143,492,675,339	127,625,790,224.00	143,505,508,220.50	172.283.508.837	-
Belanja Barang dan Jasa	357,243,633,696	353,847,263,385.00	415,757,355,058.11	548.283.190.373	-
Belanja Modal	189,414,820,394	193,078,279,594.00	256,395,156,433.00	313.355.764.155	-

*Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.*

### **3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.13.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017**

URAIAN	Realisasi			APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target Tahun Rencana
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>227,222,574,831.51</b>	<b>311,627,539,666.89</b>	<b>434,785,926,378.05</b>	<b>256.860.035.091</b>	<b>144.710.229.856</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	224,522,308,349.51	303,377,090,556.89	434,397,854,728.05	256.677.851.091	144.710.229.856
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2,220,200.00	386,608,928.00	388,071,650.00	182,184,000	-
Penerimaan Piutang Daerah	2,698,046,282.00	7,863,840,182.00	-	-	-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>513,744,154.86</b>	<b>361,652,154.90</b>	<b>123,754,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000.000-</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	123,754,000,000.00	-	5.000.000.000-
Pembayaran Pokok Utang	513,744,154.86	361,652,154.90	-	-	-
Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>226,708,830,676.65</b>	<b>311,265,887,511.99</b>	<b>311,031,926,378.05</b>	<b>256.860.035.091</b>	<b>139.710.229.856</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>303,377,090,556.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.*

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tah un terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017**

No	URAIAN	Anggaran 2017
		(Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.498.218.489.056</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>510.300.309.908</b>
1.1.1	Pajak Daerah	336.106.500.000
1.1.2	Retribusi Daerah	35.093.702.750
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.659.452.193
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	113.440.654.965
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>836.132.875.432</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.713.758.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	670.278.830.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.140.287.432
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>151.785.303.716</b>
1.3.1	Hibah	-
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	108.860.439.716
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	40.424.864.000
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.500.000.000
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.637.928.718.912</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>683.235.563.423</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	620.496.515.975
2.1.2	Belanja Bunga	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-
2.1.4	Belanja Hibah	56.620.985.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.907.400.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-
2.1.7	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan kepada Parpol	1.210.662.448
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>954.693.155.489</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	
2.2.3	Belanja Modal	

No	URAIAN	Anggaran 2017
		(Rp)
	Surplus/(Defisit)	<b>(139.710.229.856)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>144.710.229.856</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	144.710.229.856
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3.1.6	Penerimaan Piutan Daerah	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>139.710.229.856</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>

Sumber: Data diolah.

## **BAB 4**

### **TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan Daerah**

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2017 yaitu ***“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”***.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2017 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2017 yaitu ***“Aktualisasi Jogja Gumregah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan, Guna Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah ”***

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah: ***“Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya”***.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**  
Dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul dan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
2. **Berbudaya** dimaknai sebagai kondisi di mana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan kearifan budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif
3. **Mandiri** dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.
4. **Nyaman** dimaknai sebagai kondisi di mana kualitas hidup masyarakat meningkat dengan kemampuan mengakses infrastruktur, makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja, dan ruang/taman hijau.
5. **Sejahtera** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator :
  - Pertumbuhan ekonomi,
  - Pengangguran,
  - Penduduk miskin,

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan
- Indeks Pengembangan Gender (IPG).

#### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan pada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2017 disusun dengan berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga Negara.
- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Cita 8 : Melakukan reformasi karekter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2017 berdasarkan pada RKP Tahun 2017 terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

- 1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 2) Pembangunan Sektor Unggulan;
- 3) Pemerataan dan Kewilayahan;
- 4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
- 5) Pembangunan Ekonomi.

Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2017 yaitu:

- 1) Sosial Budaya;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017 yaitu:

- 1) Sosial Budaya;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada matrik berikut:

**Tabel 4.1**  
**Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2017**

No.	NAWACITA	No.	PRIORITAS DAERAH	No.	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	1	Sosial Budaya	1	Sosial Budaya
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	2	Kesehatan	2	Kesehatan
3	Melakukan revolusi karakter bangsa	3	Pendidikan	3	Pendidikan
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	4	Pertumbuhan Ekonomi	4	Pertumbuhan Ekonomi

No.	NAWACITA	No.	PRIORITAS DAERAH	No.	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.				
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.	5	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur	5	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur
		6	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	6	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	7	Kinerja aparatur dan Birokrasi.	7	Kinerja aparatur dan Birokrasi.
8	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.				
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.				

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas dimaknai sebagai berikut:

1. Sosial Budaya
- Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kesehatan
- Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :
1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.
3. Pendidikan
- Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui :
1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;

2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.
4. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

  1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
  2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;
  3. Harapan hidup masyarakat meningkat;
  4. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
  5. Daya saing pendidikan meningkat;
  6. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
  7. Pendapatan masyarakat meningkat;
  8. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
  9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;

- 10. Kemiskinan masyarakat menurun;
- 11. Ketimpangan antar wilayah menurun;
- 12. Kunjungan wisatawan meningkat;
- 13. Lama tinggal wisatawan.

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Matrik Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta**

No	Nawacita	No	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta	No	Sasaran Kota Yogyakarta
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	1	Sosial Budaya	Sosial Budaya	1	Kemiskinan masyarakat menurun
					2	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	2	Kesehatan	Kesehatan	3	Harapan hidup masyarakat meningkat
3	Melakukan revolusi karakter bangsa	3	Pendidikan	Pendidikan	4	Aksesibilitas pendidikan meningkat
					5	Daya saing pendidikan meningkat
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	4	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6	Pendapatan masyarakat meningkat
					7	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.				8	Kunjungan wisatasan meningkat
					9	Lama tinggal wisatawan meningkat
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.	5	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur	10	Ketimpangan antar wilayah menurun
		6	Lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang	Lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang	11	Kualitas lingkungan hidup meningkat

No	Nawacita	No	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta	No	Sasaran Kota Yogyakarta
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	7	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	12	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
8	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.				13	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.					

4.3. **Penyelarasan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta dengan Nasional dan RKPD DIY Tahun 2017**

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2017**

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK	WTP
2	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	11,4 tahun
4	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup masyarakat	74 tahun
5	Daya saing pendidikan meningkat	Persentase sekolah yang melayani pendidikan inklusi	9%
6	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	72%
7	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	8,40%
8	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indeks ketimpangan wilayah	0,517
9	Kunjungan wisatasan meningkat	Jumlah kunjungan wissatawan	3.000.000 orang
10	Lama tinggal wisatawan meningkat	Lama tinggal wisatawan	2 hari
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks lingkungan hidup	62
12	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita pertahun	54,306 juta
13	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks ketimpangan pendapatan	0,4151

Penyelarasan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 dengan sasaran pembangunan DIY tahun 2017 sebagaimana matrik berikut :

**Tabel 4.4**  
**Sinkronisasi Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta dengan Nasional dan DIY Tahun 2017**

No	Sasaran Pembangunan	Mencapai	Sasaran Pembangunan DIY	Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta	Indikator sasaran Kota yogyakarta	Target 2017
<b>A.</b>	<b>Sasaran Makro</b>	<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>				
1	Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan	Penguatan tata kelola pemerintah daerah	Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah meningkat	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK	WTP
		Politik demokrasi				
		Penegakan hokum				
		Pertahanan dan Keamanan				
2	Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat	Tata kelola dan reformasi birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Kependudukan dan Keluarga berencana				
		Pendidikan	Melek huruf masyarakat meningkat			
			Aksesibilitas pendidikan meningkat	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	11,4 tahun
			Daya saing pendidikan meningkat	Daya saing pendidikan meningkat	Persentase sekolah yang melayani pendidikan inklusi	9%
		Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup masyarakat	74 tahun
		Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	8,40%
		Perlindungan anak		Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	72%
		Pembangunan masyarakat				

No	Sasaran Pembangunan	Mencapai	Sasaran Pembangunan DIY	Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta	Indikator sasaran Kota yogyakarta	Target 2017
<b>B</b>	<b>Sasaran Makro</b>	<b>Ekonomi Makro</b>				
1	Sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah	Pemerataan pembangunan antar wilayah	Ketimpangan antar wilayah menurun	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indeks ketimpangan wilayah	0,517
2	Sasaran pembangunan sektor unggulan	Kedaulatan energy				
		Pariwisata dan industri manufaktur	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan	3.000.000 orang
			Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan meningkat	Lama tinggal wisatawan	2 hari
		Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks lingkungan hidup	62
			Kualitas lingkungan hidup meningkat			
			Pemanfaatan ruang terkendali			
		Maritim dan kelautan	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita pertahun	54,306 juta
		Kedaulatan Pangan				
3	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan	Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks ketimpangan pendapatan	0,4151
		Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu				

**4.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang telah disampaikan. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2016**

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
<b>KOMISI A</b>			
1	Pengurusan dokumen akta kelahiran dan kematian agar dipemudah.	Dindukcapil	Untuk mempermudah pengurusan dokumen akta kelahiran dan kematian telah dilaksanakan : 1) jemput bola akta; 2) layanan online secara online; 3) kerjasama dengan RS Jogja Ke depan sedang disiapkan pula mobil keliling adminduk.
2	Perlu peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.	Dindukcapil	Peningkatan pelayanan telah dilaksanakan dengan peningkatan kualitas sarpras pelayanan antara lain dengan tersedianya : 1) Ruang laktasi bagi pengunjung; 2) Ruang bermain anak 3) Fasilitas difabel 4) Telah disusun Standar pelayanan Publik (SPP) bagi masyarakat.
3	Penertiban PKL yang tidak berizin dan mengganggu ruas jalan.	Dinas Ketertiban	Telah diakomodir di dalam Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan, pada kegiatan Penjagaan Kawasan Operasi Gugus Malioboro. Kegiatan tersebut juga sebagai pendukung Gerakan Kampung Panca Tertib yakni Tertib Damija (PKL dan Parkir). Merupakan kegiatan penegakan perda Kota Yogyakarta secara non yustisi, dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 4.142.143.000,-.
4	Penertiban Toko Jejaring yang tidak berizin yang merugikan masyarakat terutama pedagang tradisional.	Dinas Ketertiban	Telah diakomodir di dalam Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan kepada kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Pro Yustisi dan Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu secara non yustisi dengan berkoordinasi dengan instansi dan SKPD terkait penertiban dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 1.803.190.000,-.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
5	Program-program pembinaan generasi muda sehingga pemuda/pemudi terhindar dari masalah-masalah kenakalan (tawuran, minuman, sex bebas, narkoba).	Kantor Kesatuan Bangsa	Dalam program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017 telah mengakomodir kegiatan yang secara khusus menangani masalah anti Napza yaitu Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA ataupun kegiatan yang sifatnya koordinatif antar OKP dan peningkatan SDM kepemudaan. Disamping itu telah juga dimasukkan usulan bantuan hibah kepada beberapa OKP yang diharapkan dapat menjadi mitra Kantor Kesatuan Bangsa dalam meningkatkan kualitas kepemudaan di Kota Yogyakarta yaitu KNPI, Pramuka dan IKPMDI. Sementara usulan untuk bantuan kepada FPN (Forum Pemuda Nusantara) dikarenakan satu dan lain hal tidak dapat diakomodir dalam usulan RAPBD murni tahun 2017.
6	Sosialisasi ataupun penyuluhan-penyuluhan untuk menambah wawasan-wawasan atas kejadian yang baru-baru ini misalnya, mengenai terorisme, gafatar dan bagaimana solusi pencegahannya.	Kantor Kesatuan Bangsa	Dalam Renja tahun 2017 urusan Pemerintahan Umum tidak dimasukkan dalam usulan Kantor Kesatuan Bangsa. Namun demikian setelah mendapatkan surat dari Kemendagri yang menyatakan bahwa pelimpahan pelaksanaan urusan ini ditunda maka kami telah mengirimkan draft Renja ke Bappeda untuk dimasukkan dalam KU PPAS 2017.
7	Legalitas lembaga berbadan hukum yang mendapatkan dana hibah perlu proses sampai kemenkumham dan ada sosialisasi ke warga.	Kantor Kesatuan Bangsa	Dalam Renja tahun 2017 urusan Pemerintahan Umum tidak dimasukkan dalam usulan Kantor Kesatuan Bangsa. Namun demikian setelah mendapatkan surat dari Kemendagri yang menyatakan bahwa pelimpahan pelaksanaan urusan ini ditunda maka kami telah mengirimkan draft Renja ke Bappeda untuk dimasukkan dalam KU PPAS 2017.
8	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk setiap kelurahan.	Bagian Tapem	Sudah mengusulkan 3 lokasi di tahun 2017 yaitu Kelurahan Bausasran, Kelurahan Wirobrajan dan Keluarahn Purwokinanti.
<b>KOMISI B</b>			
1	Menjadikan tempat potensial untuk dijadikan tempat wisata.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Digunakan untuk menggelar kegiatan kepariwisataan dan event-event seni budaya sebagai upaya pengenalan potensi wisata kepada masyarakat
2	Pembentukan dan fasilitas kampung wisata.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembentukan dan fasilitasi kampung wisata dilakukan dengan penyusunan Perwal tentang Kampung Wisata yang diharapkan pada tahun 2017 sudah dapat digunakan, sedangkan fasilitasi kampung wisata dilakukan dengan fasilitasi event yang ada di kampung wisata
3	Pengembangan Pariwisata dengan mengandalkan produk kebudayaan dan kesenian lokal.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata berbasis budaya sehingga potensi seni dan budaya menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan
4	Promosi pariwisata.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Promosi pariwisata sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dilakukan dengan berbagai kegiatan dan inovasi. Disamping kegiatan sudah secara rutin dilaksanakan seperti pameran pariwisata dan travel dialog serta kerjasama pariwisata, ada juga inovasi dan program unggulan dalam rangka penguatan promosi Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata. Inovasi yang dilakukan antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan promosi melalui media-media sosial, promosi media luar negeri dan pasar asia, penjajagan segmen ceruk pasar dalam rangka menggali pasar wisatawan potensial yang belum tergarap dengan baik. Serta

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
			adanya program unggulan seperti Jogja Night Festival dan Jogja Kreatif
5	Minta diusulkan dapat dana hibah untuk koperasi yang sudah berbadan hukum: Koperasi Jasa Syariah BTM.	Disperindagkoptan	Dana pinjaman daerah untuk koperasi diatur dalam perwal. Petunjuk Teknis baru dalam proses
6	Pemerintah Kota Yogyakarta agar menyalurkan hibah bantuan sosial khususnya bidang ekonomi kerakyatan.	Disperindagkoptan	Tidak sesuai dengan ketentuan Hibah/Bansos
7	Pelatihan kewirausahaan.	Disperindagkoptan	Sudah dianggarkan pelatihanpelatihan kewirausahaan
8	Penyaluran hibah modal usaha ekonomi kerakyatan koperasi.	Disperindagkoptan	Tidak sesuai dengan ketentuan Hibah/Bansos
9	Pemberian modal usaha “kelompok tani ternak”	Disperindagkoptan	Tidak sesuai dengan ketentuan Hibah/Bansos
10	Sosialisasi tentang MEA (definisi, tujuan serta dampak ke depan bagi pedagang) supaya masyarakat siap menghadapi MEA tersebut.	Disperindagkoptan	Sudah pernah dilaksanakan tahun 2015
11	Pelatihan (pengingkatan SDM yang berkaitan dengan perhotelan), bagaimana cara meminimalisir “bank plecit”?	Disperindagkoptan	Telah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi ke 14 kecamatan terkait akses perbankan, serta penyuluhan tentang perkoperasian.
12	Bagaimana kalau diadakan pasar tiban, yang bisa dimulai dari masyarakat sekitar untuk mengangkat ekonomi warga sekitar (misal dilakukan pada hari minggu).	Disperindagkoptan	Beberapa wilayah sudah melaksanakan.
13	Tidak terkendalinya kemunculan toko jejaring yang di indikasikan tidak berijin perlu ditindak tegas oleh Pemkot, tapi terkesan Pemkot melakukan pembiaran pelanggaran-pelanggaran itu jelas yang ada akan sangat dirugikan adalah masyarakat terutama pedagang tradisional.	Disperindagkoptan	Akan dilakukan evaluasi perwal 79 tahun 2010 tentang pembatasan minimarket/waralaba.
14	Penyediaan dan pengadaan lahan hijau di setiap kecamatan.	Tapem	Sudah mengusulkan 3 lokasi di tahun 2017 yaitu Kelurahan Bausasran, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Purwokinanti
<b>KOMISI C</b>			
1	Perbaikan talud sungai.	Kimpraswil	Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan Talud.
2	Pembuatan bronjong, batu dan anggaran pengerjaan.	Kimpraswil	Bronjong dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan talud di tahun 2016

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
3	Program antisipasi banjir dengan sistem penahanan air dengan cor beton.	Kimpraswil	Diantisipasi melalui pemasangan bronjong yang setiap tahun dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan talud
4	Realisasi program IPAL komunal.	Kimpraswil	Sudah terealisasi pada kegiatan peningkatan sanitasi tahun 2016
5	Fasilitas tambahan pintu air code.	Kimpraswil	Tiap tahun dianggarkan di kegiatan pemeliharaan saluran pengairan
6	Pelumpuran dan normalisasi SAH, Saluran irigasi.	Kimpraswil	Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan Drainase
7	Perbaikan SAL dan SAH.	Kimpraswil	Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Pemeliharaan SAL
8	Pembuatan jembatan penyebrangan orang di sungai code.	Kimpraswil	Ditahun 2016 ini ada 3 pembuatan jembatan penghubung ( Ngupasan-Purwokinanti, Prawirodirjan – Wirogunan, Keparak-an-Wirogunan)
9	Sosialisasi program SAL, limbar rumah tangga dan lain-lain.	Kimpraswil	Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan SAL
10	Pemasangan dan perbaikan lampu PJU, pemindahan tiang PJU yang mengganggu jalan.	Kimpraswil	Dikerjakan pada kegiatan pemeliharaan PJU ,Panel Jaringan & lampu Hias
11	Program rehab jalan baik aspal maupun konblok.	Kimpraswil	Dikerjakan pada kegiatan pemeliharaan jalan (aspal) ,kalau pengerjaan konblok dilaksanakan wilayah
12	Pembuatan tendon air warga / water purifier, sumur dan MCK.	Kimpraswil	Dikerjakan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan
13	Pemberdayaan ruang atas (ex kali code) sebagai jalan.	Kimpraswil	Diusulkan untuk penataan kawasan sungai melalui Bappeda
14	Pengadaan papan nama gang kampung, gapura penanda kampung.	Kimpraswil	Papan nama gang kampung bukan kewenangan kimpraswil, sedangkan penanda kampung tidak harus berbentuk gapura , tahun 2016 yang akan dibangun di kampung Balirejo dan kampung Tegal lempuyangan + Tegal kemuning , sedangkan untuk produk perencanaan tahun 2016 belum ditetapkan fisiknya
15	Realisasi Program RTLH dan penanganan kawasan kumuh.	Kimpraswil	Dikerjakan pada kegiatan peningkatan kualitas RTLH dan penanganan kawasan kumuh tahun 2016
16	Perluasan tanah makam yang sudah sempit.	Kimpraswil, Tapem, Dinsos	Sdh dirapatkan dengan bappeda & Tapem.Kimpraswil sdh membuat telaah ke walikota untuk kebutuhan makan, dispo walikota ke bappeda & Tapem. Ada penawaran 2 lokasi untuk tanah makam di Desa Pajangan dan Banyak, namun menunggu hasil pencermatan terkait regulasi untuk makam dari Bappeda.
17	Perhatian terhadap penambangan pasir di sungai di kota Yk yang dapat merusak tanggul.	Kimpraswil	Bukan kewenangan kimpraswil

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
18	Usulan penyebrangan jalan di depan taman pintar.	Kimpraswil	Akan dilaksanakan oleh DIY lewat danais , DED nya sudah dibuat tahun 2016 ini
19	Supaya segera dibangun GAPURA dibatas kota, khususnya di jalan Godean.	Kimpraswil	Akan dikaji terlebih dahulu
20	Normalisasi simpang jalan yang sering macet.	Kimpraswil	Akan dikoordinasikan dengan Bagian Tapem perihal pembebasan tanahnya
21	Permohonan pengadaan kendaraan roda 2 untuk operasional di sekolah-sekolah yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi.	BDGAD	Sudah dianggarkan 16 unit kendaraan roda 2 untuk SMP
22	Pemasangan CCTV dibeberapa titik di wilayah demi keamanan bersama.	BDGAD	Yang diperuntukkan untuk wilayah bukan menjadi kewenangan DBGAD, Namun apabila menghendaki bisa melalui anggaran stimulan RW / LPMK
23	Program tamanisasi sepanjang bantaran sungai.	BLH	Belum dianggarkan pada 2017 karena : - saat ini sedang dalam proses inventarisasi dan identifikasi RTHP yang ada di Kota Yogyakarta, termasuk taman-taman pinggiran sungai. - Belum ada lokasi yang secara administrasi maupun teknis memenuhi persyaratan untuk dibangun sebagai taman pinggir sungai
24	Program pengelolaan sampah agar masuk dalam kurikulum lokal.	BLH	Sudah masuk dalam kurikulum pada sekolah-sekolah yang berstatus sebagai sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata.
25	Pelatihan dan fasilitasi bank sampah bagi masyarakat.	BLH	Pelatihan bank sampah sudah di anggarkan di tahun 2017
26	Permohonan gerobak sampah.	BLH	Pengadaan gerobak sampah tidak dianggarkan pada tahun 2017 karena : - Sampai dengan tahun 2016 ini telah tercukupi distribusi gerobak untuk seluruh 614 RW di Kota Yogyakarta. Menindaklanjuti temuan BPK maka saat ini sedang dilaksanakan identifikasi aset pemkot yang berada di wilayah, dalam rangka membenahi administrasi pengelolaan aset sesuai dengan rekomendasi BPK.
27	Pembuatan TPS TPS yang masih kurang.	BLH	Untuk pembangunan TPS baru terkendala pada kesulitan untuk mencari lokasi TPS baru sehingga untuk tahun 2017 hanya menganggarkan rehab dan renov TPS yang sudah ada supaya lebih meningkat kualitasnya .
28	Program penghijauan agar lebih ditingkatkan seperti penanaman pohon pohon di jalan, tabulapot, taman jalan, taman di wilayah.	BLH	Tahun 2017 sudah menganggarkan untuk pemeliharaan taman rutin, pembangunan taman kota, peningkatan kualitas taman kota, pembangunan RTH Publik serta penanaman pohon perindang jalur hijau di sepanjang jalan protokol dan sempadan sungai.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
29	Permohonan ruang terbuka hijau publik ramah anak dan sarana olahraga untuk warga.	BLH	Sudah dianggarkan untuk tahun 2017
30	Permohonan pergola di RW RW dan jalan kampung.	BLH	Sudah dilimpahkan ke wilayah sesuai dengan Perwal Pelimpahan Kewenangan.
31	Permohonan pengecekan kualitas air sumur.	BLH	Pengecekan kualitas air sumur dari masyarakat setiap saat dapat dilayani oleh laboratorium pengujian kualitas lingkungan di BLH.
32	Penataan parkir di bahu jalan dan trotoar jalan.	Dinhub	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Perparkiran ( anggarannya : Rp. 7.976.972.000,-)</li> <li>b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (di program peningkatan pengaturan lalu lintas dan angkutan anggarannya : Rp.8.139.962.523,-)</li> <li>c. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan (di program pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas anggarannya : Rp. 1.666.757.345,-)</li> <li>2. Tidak semua bahu jalan digunakan untuk parkir, adapun parkir di trotoar sedang diupayakan untuk dihilangkan agar bisa dikembalikan pada fungsi semula yaitu sebagai fasilitas pejalan kaki (seperti di Malioboro)</li> </ol> <p>Penataan parkir di bahu jalan (Tepi Jalan Umum/TJU) di wilayah Kota Yogyakarta ada 600 titik parkir dengan 900 jukir, yang terbagi 5 wilayah pemungutan dan 2 kawasan zona parkir untuk membedakan kepadatan lalu lintas dan tarif retribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemasangan rambu larangan parkir pada satu sisi jalan.</li> <li>4. Operasi penegakan peraturan perhubungan terhadap pelanggaran perparkiran.</li> </ol>
33	Penataan parkir bus wisata.	Dinhub	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Perparkiran</li> </ol> <p>Sesuai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan parkir untuk bus pariwisata di ploting di TKP milik pemerintah antara lain TKP Senopati, Ngabean dan Sriwedani serta TKP diluar kewenangan Dinas Perhubungan seperti TKP barat stasiun tugu (Bong Suwung) dan tempat-tempat lain yang memungkinkan.</p>
34	Penataan dan pengaturan becak motor.	Dinhub	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan seksi Angkutan</li> </ol> <p>-Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyikapi keberadaan becak motor dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ</li> <li>b. PP No 55 tahun 2012 tentang Kendaraan</li> <li>c. PP No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan</li> <li>d. Perda DIY No 5 tahun 2016 tentang Moda Kendaraan Tradisional di DIY</li> <li>e. Perwal Kota Yogyakarta No 25 tahun 2010 tentang Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor</li> </ol>

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
			<p>-Didalam peraturan-peraturan tersebut di atas keberadaan becak motor tidak atau belum diakui keberadaanya</p> <p>-Terhadap UU No 22 tahun 2009 dan PP No 55 tahun 2012, becak motor berpotensi untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Izin modifikasi kendaraan bermotor</li> <li>Kewajiban uji tipe</li> <li>Kewajiban uji berkala</li> </ol> <p>Atas berbagai hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum bisa melegalkan dan mengatur lebih lanjut atas keberadaan becak motor di Kota Yogyakarta</p> <p>2. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan</p>
35	Pemasangan cermin cembung di beberapa titik persimpangan jalan.	Dinhub	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Lalu Lintas dan Angkutan seksi Rekayasa Lalu Lintas,</li> <li>Diupayakan ,pengadaan Cermin Tikungan untuk keselamatan lalu lintas di tikungan yg berjarak pandang aman terbatas (50 unit : Rp.200.000.000,-)</li> </ol>
36	Penataan dan rekayasa lalulintas saat musim liburan dan daerah daerah yang padat kendaraan.	Dinhub	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Lalu Lintas dan Angkutan a.seksi Manajemen Lalu Lintas (di kegiatan manajemen lalu lintas anggarannya : Rp.711.140.000,-</li> <li>- Andalalin</li> <li>- Survey updating Kinerja jalan (volume per kapasitas dan kecepatan)</li> <li>b. seksi Rekayasa Lalu Lintas (di kegiatan pengadaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan anggarannya : Rp. 2.392.090.000 (termasuk ATCS 1 unit : Rp. 220.000.000,- )</li> <li>- Optimalisasi waktu siklus pada simpang-simpang yang ber ATCS melalui CC room Dinas Perhubungan</li> </ol>
37	Pembuatan divider pembatas jalan dan rambu lalin.	Dinhub	<ol style="list-style-type: none"> <li>Devider di Kimpraswil</li> <li>Rambu Lalu lintas di Bidang lalu Lintas dan Angkutan seksi Rekayasa Lalu Lintas (di kegiatan pengadaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan anggarannya : Rp. 2.392.090.000 termasuk Rambu lalin 100 unit : Rp.100.000.000)</li> </ol>
38	Program kesiapsiagaan dan antisipasi bahaya kebakaran.	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan pelayanan kebakaran</li> <li>Melaksanakan kegiatan peningkatan pencegahan bencana kebakaran</li> </ul>
39	Program Kampung Tangguh Bencana agar dilanjutkan.	BPBD	Menginisiasi KTB sejumlah 15 lokasi tersebar se Kota Yogyakarta
40	Bantuan peralatan antisipasi bencana khususnya kebakaran dan banjir.	BPBD	Peralatan sifatnya dipinjamkan untuk penanganan apabila ada kejadian diwilayah
41	Alat EWS agar dimaksimalkan, banyak yang rusak.	BPBD	Melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan berkala EWWS yang ada diwilayah

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
42	Permohonan pemasangan hidran kering kampung.	BPBD	Konstruksi hydrant kampung akan diawali dengan penyusunan DED
43	Penataan tata ruang kota harus sesuai perda.	BAPPEDA	Sudah ditindaklanjuti melalui kegiatan evaluasi RTRW
44	Perlunya pengawalan dari Dewan dalam setiap proses musrenbang.	BAPPEDA	Sudah ditindaklanjuti dengan melibatkan dewan dalam Musrenbang Kelurahan, Forum Gabungan SKPD, maupun dalam pendataan kewilayahan sejak tahun 2016
45	Penataan kaawasan Malioboro yang tertata dan terencana.	BAPPEDA	Sudah ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah DIY.
46	Penataan pedagang kaki lima di trotoar dan bahu jalan.	Dintib	Telah diakomodir di dalam Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan, pada Kegiatan Penjagaan Kawasan Operasi Gugus Malioboro. Kegiatan tersebut juga sebagai pendukung Gerakan Kampung Panca Tertib yakni tertib Damija (PKL dan parkir). Merupakan kegiatan penegakan perda Kota Yogyakarta secara non yustisi dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 4.142.143.000,-.
47	Pemutakhiran data KMS, sering terjadi salah sasaran.	Dinsos	<p>KMS banyak yang salah sasaran, ada orang yang mampu mendapat KMS dan ada orang yang tidak mampu tidak mendapat KMS, Survey harus dilaksanakan dengan teliti dan ditambah indikatornya dengan kejujuran serta melibatkan RT dan RW. KMS jangan dikaitkan dan ditumpangi dengan program-program lain yang membuat masyarakat menginginkan mendapat KMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat Bimbingan Teknis kepada petugas pendata akan lebih ditekankan lagi pada peningkatan kualitas petugas pendata, sehingga data tepat sasaran/valid.</li> <li>- Akan dilaksanakan revisi Parameter Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan perlindungan Sosial.</li> <li>- Pada Perwal No 22/2013 Tentang Mekanisme Pendataan Keluarga sasaran Jaminan perlindungan Sosial, RT/RW sudah terlibat dalam kegiatan Pendataan yaitu pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dan pengusulan warga yang tidak mampu untuk didata.</li> <li>2. Pelaksanaan Uji publik I.</li> <li>3. Pelaksanaan Uji publik II.</li> </ol> </li> </ul> <p>KMS adalah identitas bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, sedankan warga yang mendapat KMS adalah sesuai hasil pendataan yang diukur dengan parameter.</p>
<b>KOMISI D</b>			
1	Masih kurangnya pemberian beasiswa pendidikan.	Dinas Pendidikan	Kedepan akan terus kita tingkatkan besaran bantuan pembiayaan pendidikan menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Yogyakarta
2	Distribusi APE untuk PAUD belum merata, insentif pendidik untuk TPA dan PAUD, pelatihan guru PAUD belum maksimal.	Dinas Pendidikan	Pada APBD TA 2017 kami berencana untuk melanjutkan program pelatihan bagi guru PAUD yang meliputi diklat dasar dan diklat lanjut maupun pelatihan lain secara bertahap sehingga pada akhir

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
			2021 semua guru PAUD minimal sudah mendapatkan pelatihan diklat dasar PAUD. Untuk insentif PAUD tetap kita anggarkan di 2017 dengan besaran sesuai sertifikasi pelatihan yang telah didapatkan. Sedangkan untuk insentif pendidik TPA dapat diberikan dengan terlebih dahulu mempersiapkan peraturan dan mekanisme pemberiannya supaya akuntabel dan transparan. Untuk distribusi APE PAUD yang belum merata dikarenakan adanya hambatan dalam peraturan dimana untuk memberikan bantuan hibah barang harus didahului oleh pengajuan proposal dan dibahas pada penyusunan APBD pada tahun anggaran sebelumnya
3	Penggunaan kurikulum yang berlaku secara nasional supaya tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya.	Dinas Pendidikan	Pelaksanaan kurikulum diatur oleh kementerian sehingga kita tidak punya kewenangan kecuali mulok.
4	Perlu adanya pemberian bantuan kepada PKBM.	Dinas Pendidikan	Perlu disusun kebijakan dan peraturan terkait pemberian bantuan kepada PKBM dikarenakan adanya persyaratan dalam permendagri tentang hibah yang penerimanya harus berbadan hukum jelas
5	Penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) belum maksimal karena Guru untuk ABK sangat kurang.	Dinas Pendidikan	Tahun 2017 akan dibentuk UPT pengelola pendidikan inklusi yang didalamnya diprogramkan kegiatan pelatihan bagi guru pendamping khusus dan juga bagi guru kelas/mapel sehingga dapat mendampingi ABK
6	Masih dijumpai ijazah siswa kurang mampu yang ditahan sekolah karena kekuarangan pembayaran. Penanganannya belum maksimal walaupun anggaran sudah tersedia.	Dinas Pendidikan	Untuk sekolah negeri kami upayakan tidak ada ijazah ditahan, sedangkan untuk sekolah swasta kami dalam memberikan bantuan tunggakan biaya sekolah didasarkan pada skor penilaian yang dikeluarkan dinsos, semakin besar skor semakin besar bantuannya.
7	Penuntasan program pendidikan 12 Tahun sampai dengan SMA.	Dinas Pendidikan	Dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan menegah ke pemerintah DIY maka perlu dirumuskan kebijakan dan peraturan terkait pemberian hibah BOSDA dan JPD untuk penduduk kota yang bersekolah di SMA/MA dan SMK.
8	Pemegang KMS yang masuk sekolah swasta apakah ada bantuan dari pemerintah. Bagaimana juga dengan pemegang KMS yang masuk sekolah negeri.		Warga KMS bersekolah dimanapun akan mendapatkan bantuan biaya sekolah dari pemerintah kota dalam bentuk JPD
9	Peraturan tetang batasan umur anak masuk SD 7 (tujuh) tahun untuk ditinjau kembali.	Dinas Pendidikan	Sesuai permendikbud bahwa anak usia 7 tahun wajib diterima, akan tetapi jika di sekolah belum terpenuhi kuotanya maka anak usia di bawah 7 tahun dapat diterima
10	Peningkatan dan persiapan spesialisasi guru PAUD, guru SD, guru SMP baik negeri dan Swasta.	Dinas Pendidikan	Telah kita akomodir dalam berbagai kegiatan pelatihan pada rencana kegiatan tahun anggaran 2017
11	Pengurangan kuota anak didik/siswa luar daerah dan lebih diprioritaskan untuk warga Kota Yogyakarta.	Dinas Pendidikan	Perlu dilakukan pembahasan lebih intensif terkait kebijakan kuota luar kota dan kuota KMS untuk masuk SMP
12	Masyarakat miskin yang tidak mempunyai KMS diberikan bantuan khususnya dibidang pendidikan sehingga warga miskin juga dapat sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.	Dinas Pendidikan	Perlu disusun kebijakan dan peraturan terkait hal tersebut agar tetap akuntabel karena peraturan yang berlaku saat ini dasar pemberian semua jaminan sosial baik berupa kesehatan maupun pendidikan menggunakan parameter KMS.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
13	Biaya daftar ulang sekolah yang masih mahal.	Dinas Pendidikan	Perlu dirumuskan kebijakan dan peraturan yang bias mengakomodir pemberian bantuan tentang daftar ulang
14	Pendampingan dan dukungan terhadap Taman Bacaan Masyarakat dan Jam Belajar Masyarakat sebagai salah satu sarana prasarana belajar bagi masyarakat dan sosialisasinya.	Dinas Pendidikan	Pada tahun 2017 kita tetap melanjutkan program jam belajar masyarakat, selain itu mulai tahun ini dan kedepan di tahun 2017 kita juga akan menyasar revitalisasi taman bacaan masyarakat
15	Pelimpahan pendidikan tingkat SMA-SMK/ sederajat ke provinsi agar tidak mengganggu penjaminan pembiayaan pendidikan warga Kota Yogyakarta sehingga tetap bisa dibiayai sebagaimana biasanya, akan lebih baik apabila semua biaya pendidikan SMA-SMK negeri digratiskan.	Dinas Pendidikan	Perlu dirumuskan kebijakan dan peraturan terkait pemberian hibah BOSDA dan JPD untuk penduduk kota yang bersekolah di SMA/MA dan SMK
16	Terkait banyaknya pelajar yang suka melakukan aksi vandalisme (corat-corek dan merusak fasum), terjebak narkoba, aksi kekerasan seperti perkelahian dan tawuran, mohon untuk dibuatkan kegiatan-kegiatan positif sebagai sarana penyaluran energi, minat-bakat dan segenap potensinya. Dalam hal ini segenap elemen pelajar, osis, kepemudaan, karang taruna harus dilibatkan.	Dinas Pendidikan	Pada tahun 2017 tetap merencanakan berbagai kegiatan guna pembentukan karakter siswa seperti Paskibraka, Gelar Pelajar Jogja, Jelajah Museum, Pameran Pendidikan, Jembatan Persahabatan, Pertukaran Pelajar, Penguatan karakter kebangsaan, Penguatan OSIS, berbagai lomba-lomba olahraga, ketrampilan, sains, dan seni untuk mewadahi kreatifitas siswa
17	Mengoptimalkan teknologi pendidikan/komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan.	Dinas Pendidikan	pada 2017 kita targetkan semua SMP negeri melaksanakan UN CBT
18	Meningkatkan pendidikan berbasis keterampilan ( <i>life skill</i> )	Dinas Pendidikan	pada 2017 kita rencanakan pelatihan bagi siswa di SKB dengan ketrampilan menjahit, computer dan boga
19	Belum meratanya akses untuk memperoleh pendidik yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia yang memberikan bekal untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja.	Dinas Pendidikan	Sudah terintegrasi pada muatan lokal
20	Membuat sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumber daya wilayah melalui sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan pengetahuan.	Dinas Pendidikan	Sudah terintegrasi pada muatan lokal

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
21	Kurikulum diharapkan tidak memberatkan siswa dengan banyaknya tugas, agar siswa lebih nyaman dalam menerima pelajaran dan hasilnya lebih optimal. Apabila menggunakan kurikulum khusus supaya difasilitasi dengan adanya kelas unggulan.	Dinas Pendidikan	akan kita tindaklanjuti dengan pembekalan ke guru-guru
22	Menjadikan TKA dan TPA yang ada di setiap masjid menjadi bagian dari PNF (pendidikan non formal) sehingga memungkinkan ustadnya mendapatkan insentif sebagai pengajar PNF.	Dinas Pendidikan	perlu mempersiapkan peraturan dan mekanisme pemberiannya supaya akuntabel dan transparan.
23	Menjadikan TKA dan TPA yang ada di setiap Masjid menjadi bagian dari PNF (Pendidikan Non Formal) sehingga memungkinkan ustad/ah mendapat insentif sebagai pengajar PNF.	Dinas Pendidikan	perlu mempersiapkan peraturan kebijakan dan mekanisme pemberiannya supaya akuntabel dan transparan.
24	Bantuan pendidikan hanya bagi warga yang mendapatkan KMS menjadi keluhan, padahal kebutuhan dasar masyarakat itu termasuk pendidikan. Pendidikan di sekolah swasta sangat mahal bagi orang yang tidak mampu dan tidak mendapat KMS sangat berat.	Dinas Pendidikan	kami berusaha untuk mewujudkan wajar 12 dengan upaya terus meningkatkan pembiayaan pendidikan bagi warga kota. Diantaranya seperti meningkatkan besaran BOSDA dan pembatasan pungutan, dan bagi warga KMS dibebaskan pungutan. Terkait dengan pembiayaan di sekolah swasta tahun 2017 kita juga berupaya dengan meningkatkan BOSDA swasta yang akan kita berikan dengan harapan akan mengurangi pungutan bagi warga kota yang bersekolah di sekolah swasta.
25	Pelaksanaan PBI BPJS belum maksimal dan pembebanan iuran BPJS yang masih memberatkan warga.	Dinas Kesehatan	Perlu didorong optimalisasi pelaksanaan updating data maskin oleh Dinsos berserta jajarannya sehingga pelaksanaan PBI BPJS tepat sasaran
26	Prosedur penggunaan COB masih menjadi permasalahan bagi warga masuk yang dirawat di UGD tapi harus ke puskesmas dulu untuk meminta rujukan padahal kondisi sudah benar-benar sakit.	Dinas Kesehatan	Kriteria kasus gawat darurat yang bisa dijamin di UGD tanpa surat rujukan adalah sesuai Permenkes nomor 686 tahun 2010
27	Prosedur pembuatan kartu COB dan perpanjangannya.	Dinas Kesehatan	Mulai tahun 2016 sdh tidak ada kepesertaan COB antara jamkesda dengan jamkesos
28	Keberlangsungan Jamkesda dan Jamkesmas karena sangat dibutuhkan warga menjadi pertanyaan masyarakat seiring dengan adanya BPJS.	Dinas Kesehatan	Sosialisasi Jaminan Kesehatan pd thn 2017 anggaran sebesar Rp. 108.142.500 pada kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Masyarakat
29	Prosedur pendaftaran dan penggunaan BPJS Kesehatan terbaru dan jangkauan pelayanan.	Dinas Kesehatan	Lihat leaflet Prosedur pendaftaran peserta BPJS Leaflet didistribusikan melalui puskesmas
30	Perlu peningkatan pelayanan Puskesmas pembantu.	Dinas Kesehatan	Rehab pustu, kelengkapan sarpras

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
31	Perlu pembinaan Posyandu.	Dinas Kesehatan	sudah dianggarkan lomba posyandu tingkat Kota pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
32	Sosialisasi bahaya narkoba dan HIV AIDS (melibatkan polsek, karangtaruna dan PSM).	Dinas Kesehatan	Kegiatan UKM Puskesmas, di sub kegiatan Survei pengetahuan HIV, pembentukan warga peduli HIV ( anggaran Bansos KPA ), sosialisasi HIV di SPOT, SPOT ( pada kegiatan pengendalian penyakit menular )
33	Perlu adanya <i>ambulance</i> yang disediakan di setiap kecamatan sehingga siap untuk diakses warga.	Dinas Kesehatan	Program YES 118 diarahkan untuk menjangkau kasus2 kegawat daruratan medis di wilayah kota Yk dengan akses ke call centre Ambulans tersedia di markas YES 118, markas PMI Kota Yk dan 11 RS jejaring di kota Yk
34	Cakupan biaya yang dijamin bagi peserta BPJS bila sakit lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan jamkesda berbasis KTP.	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan peserta BPJS kesehatan lebih luas dibanding jamkesda dan tidak ada cost sharing
35	Apabila terjadi kasus demam berdarah agar segera dilaksanakan penyemprotan/fogging.	Dinas Kesehatan	Fogging bukan satu satunya cara justru yang paling efektif dengan PSN, Fogging dilakukan ada syaratnya 1. ada kasus lebih dari 2, angka bebas jentik kurang dari 95 %, 3. dampak fogging ; yang mati nyamuk dewasa, menimbulkan resistensi nyamuk, pestisida berbahaya bagi kesehatan
36	Perlu ada jaminan kesehatan dari pemerintah bagi warga masyarakat yang tidak ikut BPJS.	Dinas Kesehatan	Jamkesda tahun 2017 masih ada
37	Program Jamkesus, yaitu program jaminan kesehatan untuk para disabilitas perlu didukung dan dikawal agar program ini bisa tepat sasaran.	Dinas Kesehatan	Updating data peserta jamkesus (difabel) oleh Dinsos agar lebih akurat
38	Jaminan kesehatan daerah ke BPJS bagi warga yang bersedia dirawat di kelas III agar dibiayai APBD Kota Yogyakarta.	Dinas Kesehatan	Diakomodir dalam DPA tahun 2016 & 2017 untuk warga miskin & tidak mampu ( Rp 2.955.132.000 )
39	Kurangnya pengawasan makanan baik dari daging sapi yang dicampur dengan daging babi juga dari sisi bersih atau makan yang diperjualakan khususnya di sekolah-sekolah dasar.	Dinas Kesehatan	Melakukan Inspeksi sanitasi sekolah, sampling makanan jajanan sekolah, Penyuluhan keamanan pangan bagi siswa dan Guru serta kantin.
40	Belum sinkronnya data anatar JKN, JKD, Jamkesos, Jamkesda dan Jamkesmas menjadi kendala tersendiri.	Dinas Kesehatan	Tahap Purifikasi data JKN (Jamkesmas, Jamkesos, Jamkesda) di Dinas Sosial. (Dinkes sebagai data pengguna.
41	Perlu adanya pengadaan keranda jenazah.	Dinsosnakertrans	Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah menganggarkan 20 paket keranda jenazah beserta kelengkapannya dan telah diserahkan kepada 20 Kelurahan yakni Kelurahan Wirogunan, Ngampilan, Patehan, Gedongkiwo, Gowongan, Bumijo, Pringgokusuman, Tegalpanggung, Purwokinanti, Notoprajan, Bausasran, Prenggan, Prawirodirjan, Bener, Cokrodingratan, Kricak, Purbayan, Brontokusuman, Rejowinangun dan Ngupasan.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
			Di Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kembali menganggarkan 25 paket keranda jenazah beserta kelengkapannya yang rencananya dialokasikan kepada 25 Kelurahan (sesuai proposal masuk) yakni Kelurahan Terban, Sorosutan, Patangpuluhan, Pakuncen, Demangan, Karangwaru, Tegalrejo, Giwangan, Gunungketur, Pandeyan, Suryodiningratan, Wirobrajan, Semaki, Baciro, Muja-muju, Keparakan, Kotabaru, Sosromenduran, Klitren, Suryatmajan, Kadipaten, Mantrijeron, Panembahan, Warungboto dan Tahunan sehingga ditahun 2016 semua kelurahan telah mendapatkan 1 paket keranda jenazah berserta kelengkapannya
42	Pendampingan terhadap orang miskin/orang tidak mampu supaya diberi pelatihan agar bisa mandiri.	Dinsosnakertrans	Pelatihan sudah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Dinsosnakertrans, TKPK dan beberapa SKPD yang focus untuk pengentasan kemiskinan
43	Perlu adanya program bagi penyandang difabel yang berusia 50 tahun ke atas yang masih produktif.	Dinsosnakertrans	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas</li> <li>- Pembinaan bagi KUBE Disabilitas</li> </ul>
44	KMS banyak yang salah sasaran, ada orang yang mampu mendapat KMS dan ada orang yang tidak mampu tidak mendapatkan KMS. Survey harus dilaksanakan dengan teliti dan ditambah indikatornya dengan kejujuran serta melibatkan RT dan RW. KMS jangan di kaitkan dan ditumpangi dengan program-program lain yang membuat masyarakat menginginkan mendapatkan KMS.	Dinsosnakertrans	<p>KMS banyak yang salah sasaran, ada orang yang mampu mendapat KMS dan ada orang yang tidak mampu tidak mendapat KMS, Survey harus dilaksanakan dengan teliti dan ditambah indikatornya dengan kejujuran serta melibatkan RT dan RW. KMS jangan dikaitkan dan ditumpangi dengan program-program lain yang membuat masyarakat menginginkan mendapat KMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat Bimbingan Teknis kepada petugas pendata akan lebih ditekankan lagi pada peningkatan kualitas petugas pendata, sehingga data tepat sasaran/valid.</li> <li>- Akan dilaksanakan revisi Parameter Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan perlindungan Sosial.</li> <li>- Pada Perwal No 22/2013 Tentang Mekanisme Pendataan Keluarga sasaran Jaminan perlindungan Sosial , RT/RW sudah terlibat dalam kegiatan Pendataan yaitu pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Evaluasi dan pengusulan warga yang tidak mampu untuk didata.</li> <li>5. Pelaksanaan Uji publik I.</li> <li>6. Pelaksanaan Uji publik II.</li> </ul> </li> <li>- KMS adalah identitas bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, sedankan warga yang mendapat KMS adalah sesuai hasil pendataan yang diukur dengan parameter.</li> </ul>
45	Penyediaan Rumah Lansia, pemenuhan hak-hak lansia, bantuan kursi roda, tandu dan oksigen, asuransi lanjut usia.	Dinsosnakertrans	Sudah tersedia Pelayanan Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma dan bantuan lansia terlantar di luar panti sudah dilaksanakan (ASLUT), sedangkan bantuan kursi roda, tandu dan oksigen sudah tersedia di Rumah Lansia tersebut.
46	Usulan pengadaan makam baru bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta.	Dinsosnakertrans	Pengadaan makam baru bagi warga masyarakat kota Yogyakarta sudah dalam pembahasan dengan Bagian Tapem, Bappeda, Kimpraswil dan Dinsosnakertrans.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
47	Perlu fasilitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.	Dinsosnakertrans	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya fasilitas yang aksesibel bagi semua penyandang disabilitas baik daksa, rungu wicara, maupun netra</li> <li>- Pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas</li> </ul>
48	Keluhan beberapa warga yang memiliki KMS dicabut secara tiba-tiba, padahal banyak warga yang khususnya tidak mampu, sedang membutuhkan KMS untuk syarat pendaftaran sekolah gratis. Bagaimana KMS bisa langsung dicabut tanpa konfirmasi pemegang KMS.	Dinsosnakertrans	Keluhan beberapa warga yang memiliki KMS dicabut secara tiba-tiba, padahal banyak warga yang khususnya tidak mampu sedang membutuhkan KMS untuk syarat pendaftaran sekolah gratis. Bagaimana KMS bisa langsung dicabut tanpa konfirmasi pemegang KMS. Pencabutan KMS ( penentuan warga mendapat KMS atau tidak ), tidak secara tiba-tiba tetapi melalui proses pendataan /verifikasi lapangan, pengolahan data/untuk menghitung skor, uji publik dan penetapan data. Apabila hasil pendataan mendapat skor 31 keatas, akan mendapat KMS, tetapi apabila mendapat skor 30 kebawah tidak mendapat KMS.
49	Pendistribusian Raskin, agar bisa menjangkau warga sesuai sasaran, karena selama ini Raskin hanya bisa diakses oleh pemegang KMS. Padahal banyak warga miskin yang tidak ber KMS yang membutuhkan RASKIN.	Dinsosnakertrans	RASKIN adalah Program Pusat dan penerima Raskin warga Kota Yogyakarta adalah berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dilaksanakan oleh BPS Pusat baik by name by address serta kuota yang diberikan pada Kota Yogyakarta. jika ada yang meninggal, pindah atau penerima sudah dianggap mampu maka penerima raskin dapat diganti melalui proses musyawarah kelurahan (muskel) yang hasilnya kemudian dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Jakarta Pusat untuk update data
50	Keluhan pelatihan yang diadakan Dinsosnakertrans harus menggunakan ijazah SMP maupun SMA. Untuk pelatihan tertentu kenapa harus dibatasi usia.	Dinsosnakertrans	Untuk persyaratan latar belakang pendidikan dan usia harus memenuhi kualifikasi tertentu karena untuk memenuhi standar/persyaratan dunia industry/usaha pada saat penempatan seperti pelatihan security/satpam, perhotelan. Sejalan dengan kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun (minimal SMP)
51	Keluhan mengapa bantuan kematian hanya diberikan kepada warga yang memegang KMS padahal banyak warga miskin yang tidak mempunyai KMS yang seharusnya mendapat bantuan kematian.	Dinsosnakertrans	Bantuan Santunan Kematian hanya diberikan kepada warga yang memegang KMS berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) Kota Yogyakarta yang pada BAB III Pasal 3 ayat 1 berbunyi Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris almarhum/almarhumah yang namanya tercantum dalam KMS
52	Pada tempat pekerjaan tertentu kalau menerima karyawan mengapa harus menyerahkan ijasah asli.	Dinsosnakertrans	Ijazah adalah dokumen resmi yang melekat pada seseorang yang diberikan oleh institusi atas prestasi yang diraih oleh seseorang yang telah lulus melalui uji kompetensi. Penyerahan ijazah asli pada saat penerimaan karyawan bukan merupakan keharusan. Jika diduga bahwa ijazah tersebut diragukan keasliannya maka diperkenankan memperlihatkan ijazah aslinya saja. Meskipun Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengatur penyerahan ijazah asli ketika diterima sebagai karyawan di perusahaan namun penyerahan ijaah asli ke perusahaan sebagai jaminan tidak diperbolehkan sama sekali.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
53	Memberhentikan kontrak kerja sebelum waktunya. Pemutusan kerja/PHK sepihak bagaimana solusinya.	Dinsosnakertrans	Apabila perusahaan ingin memberhentikan pekerja PWKT (karyawan kontrak) sebelum waktunya berakhir atau jika pihak perusahaan mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang disetujui dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar gaji yang belum dibayarkan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (pasal 62 UU No. 13/2003) Hal ini ada pengecualian dimana berakhirnya hubungan kerja bukan karena alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 61 ayat (1), yaitu : 1. Pekerja meninggal dunia 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
54	Masalah pengangguran yang belum teratasi walaupun menurut Pemkot kemiskinan berkurang,	Dinsosnakertrans	Melaksanakan kegiatan bagi penganggur berupa TKMT, TKM, Padat Karya infrastruktur. Melaksanakan job fair, memberikan informasi lowongan kerja.
55	Mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan skill tenaga kerja dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta melalui sistem padat karya dengan cara meningkatkan ketrampilan tenaga kerja terdidik.	Dinsosnakertrans	Penyerapan tenaga kerja sementara dari peserta padat karya sejumlah 48 orang. Memberikan informasi kepada peserta tenaga kerja yang mengikuti padat karya yang berminat mengikuti pelatihan TKM, TKMT, dan pelatihan-pelatihan di Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.
56	Di Kota Yogyakarta banyak didirikan hotel. Namun, sampai saat ini belum dapat menyerap tenaga kerja untuk masyarakat sekitar. Kami hanya sebagai penonton.	Dinsosnakertrans	Menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perhotelan, Satpam dan memberikan informasi lowongan kerja. Perusahaan wajib untuk melaporkan kebutuhan tenaga kerja.
57	Pelatihan pengobatan alternatif, pelatihan potong rambut, pelatihan sablon / cetak, pelatihan satpam, pelatihan sopir, pelatihan boga, pelatihan bahasa jawa dan pranoto Adicoro.	Dinsosnakertrans	Pelatihan sopir, satpam, boga, sablon/cetak, potong rambut sudah dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans. Pelatihan Bahasa Jawa dan Pranoto Coro dilaksanakan Dinas Pariwisata. Pelatihan pengobatan alternative bisa dilaksanakan melalui wilayah/disperindagkoptan. Untuk akupresur dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans Tahun 2016
58	Optimalisasi Job Fair yang difasilitasi Pemkot berkerjasama dengan Perusahaan penyedia tenaga kerja.	Dinsosnakertrans	Perusahaan Peserta Jobfair melaporkan penempatan/ yang diterima kepada Dinsosnakertrans baik melalui email maupun laporan tertulis.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
59	Advokasi ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja termasuk sertifikasi tenaga kerja swasta dan Upah Minimum.	Dinsosnakertrans	Di Kota Yogyakarta sudah terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bisa diakses langsung oleh tenaga kerja maupun perusahaan. Pemerintah Kota melalui Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta selalu melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, penegakan hukum dan mediasi terkait hak-hak pekerja, termasuk Upah Minimum kepada masyarakat pekerja dan pengusaha serta kepada organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
60	MoU ketenagakerjaan dengan Pemerintah Luar Negeri misalnya dengan Jepang.	Dinsosnakertrans	MoU dengan Pemerintah Luar Negeri sudah dilaksanakan sejak lama oleh Pemerintah Indonesia & Pemerintah Jepang, antara Pemerintah DIY & Yayasan Surogawa dalam bentuk Program Magang Jepang.
61	Optimalisasi dan keberlangsungan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.	KPMP	Masuk dalam RKA 2017
62	Pembinaan dan peningkatan pemberdayaan perempuan.	KPMP	Masuk dalam RKA 2017
63	Seleksi/penerimaan manfaat bantuan program yang melibatkan pemangku wilayah.	KPMP	Masih dalam pertimbangan mekanismenya
64	Pembentukan kampung ramah anak.	KPMP	Masuk dalam RKA 2017
65	Fasilitas upacara keagamaan misalnya pada waktu hari keagamaan dan hari-hari besar keagamaan.	KPMP	Fasilitasi makan minum kegiatan
66	Payung hukum untuk pengurus PKK yang dirasakan sangat berat dan sari sisi anggaran sangat minim bahkan sering tumbok.	KPMP	Sedang dikaji tingkatan pengurus PKK yang sesuai
67	Pelatihan-pelatihan dengan melibatkan perempuan untuk peningkatan SDM.	KPMP	Masuk dalam RKA 2017, rintisan usaha, P2WKSS, KSI
68	Pendirian rumah singgah di RW agar dapat menjadi tempat berkumpul anak-anak setelah pulang sekolah sekaligus dapat menjadi tempat belajar bersama anak-anak.	KPMP	Masuk dalam RKA 2017
69	Perlunya pemerintah kota membuat kegiatan dan juga bantuan keuangan untuk menjaga masjid atau merbot.	KPMP	Tidak dapat diakomodasi, bantuan uang untuk lembaga berbadan hukum
70	Program pembinaan untuk keluarga dan ibu-ibu perlu dilakukan oleh pemkot sehingga keluarga sebagai komponen terkecil dari masyarakat mampu menjadi tempat pendidikan bagi anak-anaknya dan juga menjadi keluarga yang mandiri	Kantor KB	Dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kegiatan BKS (Bina Keluarga Sejahtera) yang terdiri dari kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Disamping fasilitasi rutin untuk kegiatan kelompok-kelompok tersebut, pada tahun 2017, diadakan kegiatan pelatihan kader BKB (Bina Keluarga Balita) dan kegiatan peningkatan

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
	dan tanggul.		kapasitas kader BKS (untuk kelompok BKR dan BKL) sebagai lanjutan dari kegiatan tahun 2016,
71	Perlu kiranya dibuat perda tentang ketahanan keluarga sebagai panduan dan dorongan bagi pemkot dan masyarakat dalam mengurus utamakan keluarga.	Kantor KB	Untuk tahun 2017 telah dianggarkan untuk kegiatan penyusunan draft Ketahanan Keluarga
72	Pemberian insentif kaum rois, pemberian hibah DMI, MUI, Bakdo, Lembaga sosial keagamaan, pemberian bantuan anggaran masjid dan tempat ibadah.	KPMP	Hibah uang sesuai Permendagri no 14 th 2016
73	Memerlukan supporting Anggaran atau kegiatan yang ada di Pemerintah Kota baik berupa hibah ataupun kegiatan di SKPD terkait, mengingat di perlukannya kegiatan bersama antar Masjid yang akan meningkatkan fungsi Masjid dalam pembinaan dan penjagaan kerukunan umat.	KPMP	Hibah uang sesuai Permendagri no 14 th 2016
74	Mohon Pemkot memperhatikan nasib para kaum ROIS yang selama ini sangat membantu urusan di masyarakat, dengan memberikan insentif sebagaimana dulu pernah diberlakukan, bila tidak memungkinkan melalui hibah maka bisa diusahakan melalui kegiatan-kegiatan SKPD.	KPMP	Hibah uang sesuai Permendagri no 14 th 2016, dalam kegiatan SKPD difasilitasi makan minum
75	Pemeliharaan balai pertemuan warga di masing-masing RW.	Kecamatan Danurejan	Pemeliharaan balai pertemuan sudah dilaksnakan pada tahun 2013 dan 2014 di atas tanah milik pemerintah,. Sedangkan tahun 2017 tidak ada usulan di musrenbang. Sesuai dengan Perwal No. 8 Tahun 2016, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah, diamanatkan bahwa pemeliharaan balai RW diperbolehkan hanya yang berada di atas tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta. (Lampiran, Perwal nomor 8 tahun 2016, urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang, kewenangan ke 10, keterangan no 1)
		Kecamatan Gedongtengen	Sudah di cover dana stimulan LPMK
		Kecamatan Gondomanan	Sudah dilaksanakan mulai tahun 2013
		Kecamatan Kotagede	Untuk pemeliharaan Balai Rw dari Tahun 2014 s/d 2016 sudah diakomodir Kecamatan, dan untuk Tahun 2017 akan lebih memusatkan pada swadaya dan kebersamaan masyarakat sekitar

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
		Kecamatan Kraton	Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya sepanjang alas hak bukan milik pribadi , jika alas hak milik pribadi kita sarankan dengan dana LPMK ( Blok Grand) -Renovasi Balai RK Kel. Patehan, Anggaran Th 2015 : Rp. 15.000000,- -Pemeliharaan Atap Gedung Eks Balai Langastran Kel. Panembahan . Anggaran Th. 2016 : Rp. 23.520.000,-
		Kecamatan Mergangsan	1. Pemeliharaan Balai RW yang berada di atas tanah Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan menggunakan pagu anggaran pada musrenbang. Seperti untuk tahun anggaran 2016 ini ada satu balai RW atau pertemuan warga di Kelurahan Keparakan sudah dianggarkan pemeliharaannya. Persoalan yang terjadi adalah masih banyak balai pertemuan warga yang status tanahnya bukan tanah Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga Kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeliharaan.
		Kecamatan Tegalrejo	Kami menerima Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat sepanjang ada tambahan anggaran
		Kecamatan Umbulharjo	Untuk Pemeliharaan balai pertemuan warga di masing-masing RW, selama ini sudah dilaksanakan melalui usulan musrenbang yang dibiayai dengan anggaran pembangunan berbasis wilayah dengan syarat balai RW yang berada diatas tanah Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta tahun 2016 tentang Pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Camat.
		Kecamatan Wirobrajan	Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya sepanjang alas hak bukan milik pribadi, sedangkan jika alas hak milik pribadi kita sarankan dengan dana LPMK (Blok Grand)
		Kecamatan Ngampilan	Pemeliharaan sudah dilakukan dengan menggunakan dana pembangunan wilayah dengan berdasarkan pada usulan musrenbang dan khusus yang berada di atas tanah milik pemerintah seperti ketentuan Perwal Nomor 8/2016 tentang Pelimpahan Wilayah
		Kecamatan Gondokusuman	Tidak ada usulan untuk rehab balai RW
		Kecamatan Mantrijeron	Untuk Pemeliharaan Balai pertemuan yang ada ditanah milik pemerintah tahun 2015, 2016 sudah kami lakukan perbaikan dengan anggaran dari Kecamatan ( sesuai perwal pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat)
		Kecamatan Pakualaman	Akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan LPMK & RW terkait status kepemilikan bangunan. Untuk bangunan milik pemda maka bisa dilaksanakan pemeliharaan, tetapi misal milik pribadi maka akan disarankan dipelihara lewat dana LPMK (Blok Grand)

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
		Kecamatan Jetis	Ada tapi melalui LPMK (dana block grand)
76	Penyediaan tempat layanan umum seperti pos ronda dapat untuk kegiatan PAUD atau posyandu pada siang hari sedangkan malam hari dapat dipakai untuk pos ronda termasuk penyediaan air dan listriknya untuk tempat tersebut.	Kecamatan Danurejan	1. Pemeliharaan Pos Ronda di Kecamatan Danurejan sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sesuai usulan musrenbang 2. Kegiatan PAUD dan Posyandu tidak ada permasalahan, karena selama ini kegiatan tersebut sudah berjalan di posnya masing-masing yang berada di RW. Jika menggunakan pos ronda, justru kegiatan tidak bisa berjalan, karena pos ronda hanya sempit tempatnya, yang tidak memungkinkan untuk kegiatan PAUD dan Posyandu.
		Kecamatan Gedongtengen	Sudah di cover dana APBD tingkat SKPD Kecamatan melalui Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen
		Kecamatan Gondomanan	1. Penyediaan listrik, air, belum terfasilitasi dianggarkan karena belum dilimpahkan ke kecamatan (yang dilimpahkan baru pemeliharaan bangunanya) 2. Pemanfaatannya digunakan untuk Pos Ronda dan kegiatan lainya (PAUD, Yandu dan pertemuan)
		Kecamatan Kotagede	Untuk Tahun 2017 di Kecamatan Kotagede, khususnya Kelurahan Pubayan melakukan rehabilitasi Poskamling di Rt 58 Rw 14 dan Rt 45 Rw 10
		Kecamatan Kraton	Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya sepanjang alas hak bukan milik pribadi , jika alas hak milik pribadi kita sarankan dengan dana LPMK ( Blok Grand) Untuk Penyediaan air dan listrik bukan kewenangan kecamatan kita sarankan dengan dana LPMK ( Blok Grand)
		Kecamatan Mergangsan	1. Penyediaan tempat atau lokasi sepanjang tanahnya adalah tanah Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dipenuhi pemeliharaanya. 2. Dalam hal pos ronda kewenangan kecamatan hanya melakukan pemeliharaan non struktur.
		Kecamatan Tegalrejo	Kami menerima Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat sepanjang ada tambahan anggaran
		Kecamatan Umbulharjo	Untuk penyediaan kegiatan PAUD atau Posyandu pada umumnya di laksanakan di Balai RW karena pos ronda dianggap terlalu kecil untuk kegiatan dimaksud, sedangkan tempat lain seperti balai RW lebih representatif dibandingkan dengan pos ronda, disebabkan anak-anak PAUD ataupun posyandu butuh tempat yang relatif nyaman.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
		Kecamatan Wirobrajan	Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya sepanjang alas hak bukan milik pribadi, sedangkan jika alas hak milik pribadi kita sarankan dengan dana LPMK (Blok Grand) Untuk penyediaan air dan listrik bukan kewenangan kecamatan kita sarankan menggunakan dana LPMK (Blok Grand) atau Swadaya Masyarakat.
		Kecamatan Ngampilan	Untuk pos ronda yang luas dan memungkinkan untuk kegiatan PAUD sudah dimanfaatkan namun persoalannya tidak semua pos ronda luas dan memungkinkan untuk kegiatan PAUD maupun Posyandu
		Kecamatan Gondokusuman	Sudah dianggarkan di tahun 2017
		Kecamatan Mantriweron	Pos ronda pada siang hari bisa dimanfaatkan untuk kegiatan PAUD dan Posyandu akan tetapi untuk prasarana air dan listrik kecamatan belum bisa untuk memfasilitasi pembayarannya karena belum adanya dasar yang kuat untuk kami melaksanakan ( dalam perwal pelimpahan tidak ada )
		Kecamatan Pakualaman	Akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan LPMK, PKK & RW. Untuk bangunan milik pemda maka bisa dilaksanakan pemeliharaan, tetapi misal milik pribadi maka akan disarankan dipelihara lewat dana LPMK (Blok Grand) Untuk penyediaan air dan listrik bukan kewenangan kecamatan maka kita sarankan menggunakan dana LPMK ( Blok Grand) atau swadaya masyarakat.
		Kecamatan Jetis	Melalui stimulan RW
77	Peningkatan prestasi olah raga.	Kesbang	Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga telah dimasukkan beberapa usulan hibah dan kegiatan yang berkaitan langsung yaitu melalui Hibah kepada KONI, kegiatan KKO, dan PPAKY.
78	Pengadaan sarana prasarana, peralatan dan fasilitas-fasilitas olahraga karena mengingat pentingnya olah raga harapannya ada fasilitas di tingkat RW.	Kesbang	Kegiatan ini dimungkinkan untuk dipenuhi melalui bantuan hibah kepada FORMY
79	Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas olah raga diwilayah agar tidak rusak dan dapat digunakan lagi.	Kesbang	Kegiatan ini dimungkinkan untuk dipenuhi melalui bantuan hibah kepada FORMY
80	Pemberian bantuan kepada organisasi olahraga dalam rangka peningkatan prestasi.	Kesbang	Dalam usulan tahun 2017 telah dimasukkan usulan bantuan hibah kepada KONI sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang diharapkan dapat mendorong prestasi olahraga.
81	Pemberian bantuan untuk kegiatan rutin dan olahraga bagi generasi muda diwilayah.	Kesbang	Dalam usulan tahun 2017 telah dimasukkan usulan hibah kepada FORMY. Namun dikarenakan satu dan lain hal maka usulan ini tidak bisa diakomodir di RAPBD murni tahun 2017.
82	Pengembangan Kampung Budaya.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Keberadaan Desa Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa Budaya. Di kota Yogyakarta terdapat 20 Rintisan Kelurahan Budaya. Pengembangan

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
			dilakukan dengan melakukan pembinaan penggunaan bahasa Jawa, kampanye Sadar budaya melalui upacara adat, macapat dan sosialisasi seni budaya
83	Penyediaan bantuan seragam bergodo untuk acara suran dan sadranan yang rutin digelar setiap tahunnya.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Untuk pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan kesenian di wilayah mengacu pada peraturan pemberian bansos dan hibah
84	Kelompok seni budaya tingkat kelurahan menemui kesulitan pengembangannya karena minimnya anggaran/stimulant dari SKPD terkait.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan/kelurahan telah ada pelimpahan Walikota kepada camat yang tertuang dalam Perwal No 41 dan 42 Tahun 2014. Adapun SKPD memberikan fasilitasi sesuai dengan rencana kegiatan baik yang menggunakan APBD maupun Dana Keistimewaan
85	Pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan gamelan diwilayah.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Untuk pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan kesenian di wilayah mengacu pada peraturan pemberian bansos dan hibah
86	Pembinaan dan Pelatihan kesenian lokal/tradisional diwilayah.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan/kelurahan telah ada pelimpahan Walikota kepada camat yang tertuang dalam Perwal No 41 dan 42 Tahun 2014. Adapun SKPD memberikan fasilitasi sesuai dengan rencana kegiatan baik yang menggunakan APBD maupun Dana Keistimewaan
87	Pengadaan dan penyediaan bantuan kostum kesenian tradisional.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Untuk pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan kesenian di wilayah mengacu pada peraturan pemberian bansos dan hibah
88	Kegiatan sarasehan budaya.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sarasehan budaya dilakukan dengan DKKY dengan maksud DKKY dapat memberikan arahan langsung ke masyarakat tentang konsep-konsep kebudayaan yang harus dipahami dan dikuatkan masyarakat, mengidentifikasi kekayaan budaya, dan menginventarisir kebutuhan dalam upaya pelestarian budaya
89	Pengembangan gedung perpustakaan.	Arpusda	Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta sudah menindaklanjuti usulan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta tentang pengembangan gedung perpustakaan dalam rangka pengembangan minat baca masyarakat. Tindaklanjut Kantor Arpusda sebagai berikut: a). Melaksanakan survey calon Gedung Perpustakaan satelit yang menjadi asset Pemkot Yogyakarta. b) Merumuskan hasil survey dalam bentuk kajian sederhana pengembangan gedung perpustakaan satelit. c) Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta juga sudah dialokasikan anggaran pembangunan gedung perpustakaan oleh Pemkot Yogyakarta yang berlokasi di Kotabaru yang sudah tidak dapat menampung animo masyarakat Kota Yogyakarta dan akan dibangun pada TA.2017.
90	Perpustakaan yang ada diwilayah belum maksimal, sehingga perlu dukungan pendampingan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.	Arpusda	Perpustakaan wilayah adalah perpustakaan yang berada di luar perpustakaan umum daerah di Kota Yogyakarta. Untuk Taman Bacaan Masyarakat merupakan ketugasan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan perpustakaan sekolah serta perpustakaan kelurahan menjadi ketugasan Kantor

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
			<p>ARPUSDA Kota Yogyakarta</p> <p>Berkaitan dengan Taman Bacaan Masyarakat berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 23 Juni 2014 Nomor 130/457 perihal Taman Bacaan Masyarakat (TBM) telah diputuskan ketugasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai berikut:</p> <p>1).Taman Bacaan Masyarakat sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan merupakan ketugasan dari Dinas Pendidikan. Mulai dari proses perizinan Taman Bacaan Masyarakat, operasional sampai dengan pengajuan dana.</p> <p>2).Khusus yang berkaitan dengan teknis pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (klasifikasi buku) menjadi ketugasan dari SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan perpustakaan.</p> <p>Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mulai dari proses perizinan Taman Bacaan Masyarakat, fasilitasi persyaratan administrasi lembaga untuk menerima bantuan hibah Taman Bacaan Masyarakat, verifikasi di lapangan terkait pengajuan usulan hibah sampai dengan pelaporan penerima bantuan hibah Taman Bacaan Masyarakat dan monitoring perkembangan Taman Bacaan Masyarakat terkait dengan inventarisasi /identifikasi jumlah Taman Bacaan Masyarakat.</p> <p>Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta melalui para pustakawan yang ada akan memberikan pembinaan teknis perpustakaan kepada TBM meliputi teknis layanan, pengolahan bahan pustaka dan pemeliharaan koleksi.</p>
91	Fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan keliling sebagai sarana pengembangan minat baca.	Arpusda	Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta telah memfasilitasi penunjang pendidikan dalam bentuk layanan perpustakaan keliling ke beberapa titik sasaran di Kota Yogyakarta mencakup TK/PAUD, SD dan area publik serta pusat keramaian. Jenis layanan perpustakaan keliling yakni perpustakaan keliling mobil, perpustakaan keliling motor, layanan Puspita (perpustakaan alternatif Kota Yogyakarta) dan layanan Monika (Mobil internet dan perpustakaan).
92	Pendidikan kespro yang berbasis pada budaya bangsa.	Kantor KB	Telah ditindaklanjuti melalui kegiatan penyusunan draft pedoman KIE Kespro wilayah yang disesuaikan dengan budaya bangsa
93	Peningkatan dan penguatan program ketahanan keluarga, bina keluarga sejahtera.	Kantor KB	Telah ditindaklanjuti melalui kegiatan pertemuan kelompok BKS dan kegiatan peningkatan kapasitas kader BKS (pelatihan kader KBK, peningkatan kapasitas kader BKR dan BKL)
94	Untuk mendukung Keistimewaan Yogyakarta agar di gang masuk kampung agar dibangun gapura yang bercirikan mataram untuk mendukung pariwisata budaya.	Kimpraswil	penanda kampung tidak harus berbentuk gapura , tahun 2016 yang akan dibangun di kampung Balirejo dan kampung Tegal lempuyangan + Tegal kemuning , sedangkan untuk produk perencanaan tahun 2016 belum ditetapkan fisiknya. Usulan akan dikaji lebih lanjut.
95	Penyediaan bantuan sarana prasarana dasar bagi warga termasuk di dalamnya penyediaan air sumur bagi warga.	Kimpraswil	Usulan bisa diakomodir hanya untuk sumur umum dan dapat diusulkan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan dengan mengajukan proposal.

No	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017	SKPD	Keterangan Tindak Lanjut
96	Penyediaan adanya internet di kampung.	TIT	Sudah dianggarkan di 2017 untuk 9 lokasi sebesar Rp 144.000.000,-
97	Pembinaan linmas dan pelatihan-pelatihan untuk anggota linmas, penyediaan posko linmas, penyediaan honor linmas yang memadai karena linmas banyak ambil bagian dalam masyarakat.	Dintib	Telah diakomodir di dalam Program Perlindungan Masyarakat pada Kegiatan Pembinaan Petugas Linmas yang meliputi pembekalan linmas, pelatihan kesamaptaaan linmas, pelatihan dasar linmas, dan Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Linmas. Posko linmas baru ada di tingkat kota, honor linmas diberikan berdasarkan surat tugas kegiatan dan besaran honor sesuai SHBJ. Pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp2.087.590.565;
98	Pengembangan dan perluasan Taman Pintar 2.	BAPPEDA	Di tahun 2016 sudah ditindaklanjuti dengan Kajian Pemetaan Kawasan Strategis Jogja Selatan

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2018. Rencana program dan kegiatan tahun 2017 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2017. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2017 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH Kota Yk.	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					746,604,853	746,604,853	Sedang berjalan	Inspektorat Kota Yk.	
1.1	Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. UH Kota Yk.			Materai 6000 yang tersedia,	250 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	319,083,589	319,083,589	Sedang berjalan		
Materai 3000 yang tersedia,							450 buah								
Jasa pengiriman/paket							15 kali								
STNK roda 4 yg terbayar							4 unit								
STNK roda 2 yg terbayar							13 unit								
Jasa kebersihan kantor							12 bulan								
Bahan peralatan kebersihan yg tersedia							5 jenis								
Retribusi							2 jenis								
Jasa perbaikan peralatan kerja							2 jenis								
Alat tulis kantor yang tersedia							61 jenis								
Jasa percetakan							8 jenis								
Jasa Penggandaan							151.868 lembar								
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia							12 jenis								
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia							14 jenis								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target	
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	9 jenis								
							peraturan per uu yang tersedia	5 jenis								
							Bahan bacaan surat kabar yang tersedia	5 jenis								
							Jasa tenaga keamanan	4 orang								
							Jasa perbaikan sarana prasarana kantor	3 jenis								
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. UH Kota Yk.			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi yg tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi;	100%	68,751,264	68,751,264	Sedang berjalan			
						Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	48 dokumen ASN									
						Jasa tenaga bantuan	1 orang									Sedang berjalan
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH Kota Yk.			Makan dan minum yang tersedia		Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	358,770,000	358,770,000	Sedang berjalan			
						Makan Minum untuk koordinasi	54 kali									
						Makan Minum untuk Pegawai	52 orang									
						Makan Minum untuk tamu	20 kali									
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44 laporan									Sedang berjalan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH Kota Yk.	Terwujudnya sarana prasarana Aparatur yang memadai	100%					103,622,000	103,622,000		Inspektorat Kota Yk.		
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor						Jasa pemeliharaan Gedung	2 jenis	Dukungan terhadap	100%	7,000,000	7,000,000	Sedang berjalan			
2.2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional						Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 4 roda 2	4 unit 13 unit	peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		96,622,000	96,622,000	Sedang berjalan			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH Kota Yk.	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					536,888,438	536,888,438		Inspektorat Kota Yk.
3.1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra, Renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	249,247,500	249,247,500	Sedang berjalan	Inspektorat Kota Yk.
							Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP	4 jenis	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD					
							Frekuensi diklat pengawasan yang diikuti	6 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				
3.2	Penyusunan kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan						Perwal .Mekanisme Pengawasan	1 dokumen	Meningkatnya kualitas tata kelola pengawasan intern (APIP)	level 3	287,640,938	287,640,938	Sedang berjalan	Inspektorat Kota Yk.
							Sistem Prosedur Pengawasan	1 dokumen						
							Dokumen PKPT	1 dokumen						
							Dok.Hasil Pemutakhiran data	1 dokumen	Persentase tindak lanjut temuan Pemeriksaan	80%				
							Gelar Pengawasan Daerah	1 kali						
							Dok.SIM HP/Hasil Pengawasan	1 dokumen						
							FGD TL Pengawasan	1 kali, 60 org						
							Monit Tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 laporan						
							Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen						
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH Kota Yk.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	80%					1,037,141,000	1,037,141,000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
4.1	Audit bidang Pemerintahan dan Aparatur						Laporan Hasil Audit	20 dokumen			334,160,000	334,160,000		
4.2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur						Sidak,Rekap LP2P, LHKASN	4 sidak,2 LP2P, LHKASN 2 lap			702,981,000	702,981,000		
							Laporan penguatan penerapan SPIP	2 laporan						
							Lap. Eval.RB dan lap PMPRB online	4 lap ev, 1 lap PMPRB online						
							Lap.pemb zona integritas	1 laporan						
							Lap. Monitoring eval. PPK	2 laporan						
							Lap. pengend gratifikasi	2 laporan						
							Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) , laporan hasil Whistle Blower System	12 laporan 2 laporan						
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Keuangan dan Aset	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH Kota Yk.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Keu dan Aset	80%					602,100,000	602,100,000		
5.1	Audit bidang Pengelolaan keuangan dan aset						Laporan Hasil Audit	20 dokumen	%Tindak lanjut hasil audit	80%	271,160,000	271,160,000		
5.2	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan						Laporan Hasil review LKPD	2 laporan	%Tindak lanjut hasil Reviu	80%	330,940,000	330,940,000		
							Laporan Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	4 dokumen						
							Laporan Review Penyerapan Anggaran	12 dokumen						
							Laporan Hasil Review RPJMD	1 laporan						
							Laporan hasil Review Renstra SKPD	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH Kota Yk.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Keuangan dan Aset	75%					300,330,000	329,520,000		
6.1	Audit Bidang Pembangunan Fisik						Laporan Hasil Audit	20 dokumen	%Tindak lanjut hasil audit	75%	281,160,000	281,160,000		
6.2	Review Pengadaan Barang dan Jasa						Laporan hasil review	4 laporan	%Tindak lanjut hasil Review	75%	19,170,000	48,360,000		
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH Kota Yk.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Ekonomi sosial budaya	80%					529,525,000	529,525,000		
7.1	Audit bidang Sosial ekonomi budaya						Laporan Hasil Audit	20 dokumen	%Tindak lanjut hasil audit	80%	271,160,000	271,160,000		
7.2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja						Laporan evaluasi SAKIP	48 LHE	%Tindak lanjut hasil Review	80%	258,365,000	258,365,000		
							Laporan review capaian kinerja	4 laporan						
							Laporan hasil review laporan kinerja Pemerintah Kota	1 laporan						
TOTAL											3,856,211,291	3,885,401,291		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah :														
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Indikator kinerja		Keluaran kegiatan	Hasil Kegiatan		1/2/3			1/2/3	
					Hasil Program			Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kec UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					8,320,061,860	8,320,061,860		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Kec. UH			Meterai @ 6000 yang tersedia	400 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,677,166,750	7,677,166,750		
							Meterai @ 3000 yang tersedia	450 bh						
							Perangko @ 5100 yang tersedia	1.480 buah						
							Jasa Pengiriman/paket	189 kali						
							Jasa Komunikasi yang tersedia	50 SKPD						
							Jasa Kebutuhan Air yang tersedia	36 SKPD						
							Jasa Kebutuhan listrik yang tersedia	42 SKPD dan 8 unit kerja						
							STNK Roda 4 yang dibayar	16 Unit						
							STNK Roda 2 yang dibayar	33 Unit						
							STNK Roda 3 yang dibayar	1 unit						
							Jasa KIR kend roda 4	6 Unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	86 jenis						
							Jasa percetakan	5 jenis						
							Jasa Penggandaan	574.600 lembar						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis						
							Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	36 jenis						
							Peralatan Rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis						
							Bahan logistik kantor yang tersedia untuk							
							a. Jas hujan	96 buah						
							b. Tas kerja	69 buah						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair	10 jenis						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	230,251,610	230,251,610		
						Dokumen ASN yang terkelola	150 oramg							
						Jasa Tenaga Bantuan	5 orang							
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi						Makan dan minum yang tersedia untuk		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		412,643,500	412,643,500		
						a.koordinasi, b.pegawai c.tamu	288 kali 275 orang 95 orang							
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	42 laporan							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat		Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					525,030,540	525,030,540		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor			Kec. UH			Jasa pemeliharaan gedung kantor	2 jenis pekerjaan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	156,015,000	156,015,000		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional			Kec. UH			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	369,015,540	369,015,540		
							a. Roda 4 (empat)	16 unit						
							b. Roda 3 (tiga)	1 unit						
							c. Roda 2 (dua)	35 unit						
							Genzet	1 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec.UH	Prosentase meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	100%					144,070,000	144,070,000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD						Dokumen Perencanaan dan Penganggaran : Reviu Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja , IKM, SPIP, Profil SKPD	7 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	144,070,000	144,070,000		
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	16 dokumen	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				
							Frekuensi diklat formal yang diikuti	4 kali						
							Dokumen Profil Keuangan Daerah	1 dokumen	Buku profil keuangan daerah	1 dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat		Prosentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%					689,434,353	689,434,353		
4.1	Perencanaan Anggaran			Kec. UH			Jumlah Dokumen tentang Perda APBD TA. 2018 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2018	2 dokumen	Penetapan Raperda APBD tepat waktu.	100%	517,750,403	517,750,403		
							Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2017 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017	2 dokumen						
							Jumlah Dokumen tentang Nota KeuanganPerubahan RAPBD TA. 2017 dan RAPBD TA. 2018	2 dokumen						
							Jumlah Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2017	3 dokumen						
							Jumlah SKPD yang diuji usulan RKPA-SKPD dan RKPA PPKD TA. 2017 dan RKA-SKPD dan RKA PPKD TA. 2018	2 kegiatan						
							Jumlah Dokumen tentang Kode Rekening	1 dokumen						
4.2	Pengendalian Anggaran			Kec. UH			Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD TA. 2017	42 SKPD	DPA-SKPD & DPA-PPKD, DPPA-SKPD & DPPA-PPKD sebagai dasar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasi kegiatan		171,683,950	171,683,950		
							Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-PPKD TA. 2017	42 SKPD	Terfasilitasi pemanfaatan hibah dan bansos melalui SKPD :					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Fasilitas pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD  a. Hibah b. Bantuan Sosial  c. Bantuan keuangan  Anggaran kas.	22 SKPD 2 SKPD  3 SKPD  42 SKPD	a. Hibah  b. Bantuan Sosial c. Bantuan keuangan  Penyediaan anggaran kas sbg acuan pengaturan ketersediaan dana.	22 SKPD  2 SKPD 3 SKPD				
5	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec UH	Prosentase Pengendalian Belanja Daerah sesuai perencanaan yang tepat waktu dan akuntabel	100%					1,224,026,809	1,224,026,809		
5.1	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah			Kec. UH			Jumlah SKPD yang dilayani untuk mendapatkan dana pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah  Proses TPTGR Selesai  Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2015	42 SKPD  Rp 117,923,924  7861 PNS Pemkot Yk + 2 Pejabat Negara	- Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan.  Terselesainya penerimaan Ganti Rugi Daerah  Jumlah Isian Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2015	42 SKPD  Rp 117,923,924  7861 PNS Pemkot Yk + 2 Pejabat Negara	1,024,181,809	1,024,181,809		
							Jumlah proses pengembalian kelebihan Gaji	Rp 300,000,000.00	- Terselaikannya proses pengembalian kelebihan gaji.	Rp 300,000,000.00				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan, 0,54% iuran Pemda kepada BPJS Ketenagakerjaan) :  IWP Taperum BPJS Kesehatan JKK/JKM Jumlah SKPP yang diterbitkan	Rp 35,373,105,982 Rp 696,979,500 Rp 8,238,401,738 Rp 1,751,668,092 350 SKPP	- Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan, 0,54% iuran Pemda kepada BPJS Ketenagakerjaan) :  IWP Taperum BPJS Kesehatan JKK/JKM - Terlaksananya pengendalian anggaran belanja pegawai bagi PNS yang memasuki BUP	Rp 35,373,105,982 Rp 696,979,500 Rp 8,238,401,738 Rp 1,751,668,092 350 SKPP				
							Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan	42 SKPD	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Keuangan dan aset daerah	42 SKPD				
5.2	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer			Kec. UH			Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola	50% dari total pendapatan daerah	Terealisasinya optimalisasi penerimaan dana perimbangan	50% dari total pendapatan daerah	199,845,000	199,845,000		
6	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat		Prosentase Laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	100%					1,395,570,809	1,364,275,809		
6.1	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA. 2016	1 dokumen (125 bk)	Data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen (125 bk)	963,639,809	963,639,809		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2016	1 dokumen (125 bk)						
							Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2017, Semester I	1 dokumen (125 bk)						
							Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2017 Tribulan I, II, III, IV	4 dokumen (240 bk)						
							Pelayanan Implementasi SIPKD berbasis akrual	42 SKPD	Penyusunan , Pelaksanaan dan Pelaporan APBD berbasis sistem informasi keuangan daerah					
							- Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali						
							- Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 kali						
							Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual	42 SKPD, 1 SKPKD						
6.2	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD						- Frekwensi Penempatandana Idle di Bank Pemerintah	20 kali	- Laporan Piutang dan Dana Cadangan dapat disajikan secara akuntabel	2 kali	431,931,000			
							- Frekuensi Evaluasi Investasi Dana Daerah	20 kali	- Pendapatan Bunga Deposito	6,750,000,000				
							- Penyusunan Laporan Realisasi Penyertaan Modal	24 kali	- Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan	1 SKPD dan 22 Unit Kerja				
							- Frekwensi Eevaluasi Kualitas Piutang	4 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Penyusunan Laporan Piutang Daerah  - Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama dengan Pihak ke 3  - Penyusunan Laporan Dana Cadangan  - Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)	4 kali  12 kali  2 kali  1 SKPD dan 22 unit kerja						
7	Program Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec.UH	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	100.0%					2,182,089,621	27,904,796,423		
7.1	Pelayanan Pajak Daerah			Kec. UH			Jumlah Data Objek Pajak PBB yang disinkronisasi dengan BPHTB	1000 objek pajak	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	100%	458,042,571	458,042,571		
						Jumlah Pemantauan hasil pemungutan BPHTB	1000 objek pajak							
						Jumlah OP hasil penilaian individu yang terpelihara	30 objek pajak							
						Jumlah data Wajib pajak, Objek Pajak, dan Peta Geografis PBB yang terpelihara	92.500 WP							
						Jumlah data Wajib pajak daerah yang terpelihara	3500 WP							
						Jumlah wajib pajak yang tersambung secara online	15 WP							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7.2	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah			Kec. UH			-Jumlah SPTPD yang terpantau dan SPTPD yang dikirim	22.000 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah		627,194,450	627,194,450		
							-Jumlah monitoring teguran mengirimkan SPTPD	4000 surat teguran	Tercapainya Penilaian Individu Objek Pajak PBB					
							-Jumlah monitoring hiburan insidentil	36 event						
							-Jumlah peremajaan data	36 WP						
							- Jumlah WP tutup	36 WP						
							- Jumlah WP yang dilakukan silent operation	100 WP						
							Jumlah Wajib Pajak baru	500 WP						
							Jumlah NPWPD yang diterbitkan	500 kartu NPWPD						
							Jumlah Surat Pengukuhan sebagai WP yang telah diterbitkan	500 Surat						
7.3	Penetapan Pajak Daerah			Kec. UH			- Jumlah WP BPHTB yang diteliti	2000 WP	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah		1,096,852,600	1,096,852,600		
							- Jumlah WP Hotel yang diperiksa secara lengkap	176 WP						
							- Jumlah WP Hotel yang diperiksa secara sederhana	24 WP						
							- Jumlah WP Restoran yang diperiksa secara lengkap	140 WP						
							- Jumlah WP Restoran yang diperiksa secara sederhana	60 WP						
							- Jumlah WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap	16 WP						
							- Jumlah WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana	24 WP						
							- Jumlah WP Parkir yang diperiksa secara lengkap	25 WP						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Jumlah WP Parkir yang diperiksa secara sederhana  - Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang tercetak  - Jumlah SPPT PBB P-2 yang tercetak  - Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang terdistribusi  - Jumlah SPPT PBB P-2 yang terdistribusi	28 WP  9.500 Surat Ketetapan  93.000 SPPT PBB P-2  9.500 Surat Ketetapan  93.000 SPPT PBB P-2						
8	Program Pembukuan dan Penagihan pajak daerah	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat		Prosentase realisasi laporan tunggakan dan pembukuan pajak daerah	100.0%					3,937,130,000	21,785,576,802		
8.1	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah			Kec. UH			- Jumlah tunggakan pajak daerah yang tertagih  - Jumlah buku kendali wajib pajak yang dilaporkan - Jumlah Surat Teguran Pajak Daerah yang terkirim ke WP  - Jumlah surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang terjawab - Jumlah SPPT PBB-P2 yang tertagih - Jumlah WP yang mendapat Pembinaan - Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran	500 WP  84 laporan 3000 WP  600 WP 7500 SPPT 750 WP 500 WP	Tercapainya realisasi tunggakan pajak daerah	100%	3,266,664,000	3,266,664,000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB	310 WP						
							- Jumlah WP daerah yang mendapat penghargaan	30 WP						
							- Jumlah WP yang mendapat penyuluhan	3250 WP						
8.2	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah			Kec. UH			Jumlah wajib pajak PBB yang terverifikasi	4500 wajib pajak	Terverifikasinya WP PBB	4500 wajib pajak	670,466,000	670,466,000		
							Jumlah wajib pajak daerah yang terverifikasi	1000 wajib pajak	Terverifikasinya WP Pajak Daerah	1000 wajib pajak				
							Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	24 dokumen	Laporan realisasi penerimaan pajak, tunggakan, telaah restitusi pajak , tunggakan, telaah restitusi pajak daerah	44 dokumen				
							Jumlah telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen						
							Jumlah laporan jaminan bongkar	12 dokumen						
9	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat		Persentase aset yang dapat dioptimalkan						8,924,223,401	8,924,223,401		
9.1	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset			Kec. UH			- Dokumen RKBMD/RKPBMD	1 dok	- Tersedianya data RKBMD/RKPBMD	1 dok	5,490,087,500	5,490,087,500		
							- Dokumen DKBMD/DKPBMD	1 dok	- Tersedianya data DKBMD/DKPBMD	1 dok				
							1. Buku Agenda	880 buah	Terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis	6 macam				
							2. Kalender 2018	10.000 eksemplar	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	2 unit				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
							3. Alat Tulis Kantor	1 paket	a. Dump truck	11 unit						
							4. Barang Cetakan	4 paket	b. Station wagon/minibus	1 unit						
							5. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	1 paket	c. Truck	56 unit						
							6. Gambar Walikota dan Wakil Walikota	1 paket	d. Sepeda motor							
							Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta		Terpenuhinya kebutuhan alat Kantor & RT. Pemkot. Yk	48 SKPD						
							a. Dump truck	2 unit								
							b. Station wagon/minibus	11 unit								
							c. Truck	1 unit								
							d. Sepeda motor	56 unit								
							Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yogyakarta									
							- Perlengkapan Kantor (AC)	1 paket								
9.2	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset			Kec. UH			- Deductible klaim asuransi 2017	1 tahun	Terjaminnya resiko kerugian atas kerugian yang timbul	paket kendaraan dan 3 paket gedung	2,758,640,006	2,758,640,006				
							- Jasa asuransi bangunan gedung Pemkot Yogyakarta	3 macam		3 hunian						
							- Jasa asuransi kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 macam	Tertatanya administrasi status kepemilikan barang daerah Pemerintah Kota Yogyakarta							
							Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah	3 hunian								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Survey pemanfaatan barang daerah	tersebar se kota Yk	- optimalisasi/ pendayagunaan pemanfaatan barang milik daerah	42 SKPD				
							- Daftar Distribusi barang stok /barang lama	10 SKPD	- Tersedianya data optimalisasi pemanfaatan barang daerah	1 dok				
							- Penetapan status penggunaan barang milik daerah	10 SKPD	- Data nilai ekonomis kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 dok				
							- Studi lanjut optimalisasi pemanfaatan barang daerah	1 dok	- Nilai barang daerah	1 dok				
							- Monitoring Perjanjian sewa/pinjam pakai/izin pemanfaatan barang milik daerah	tersebar se kota Yk	Dukungan terhadap kelancaran operasional dan pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah	unit kerja				
							- Payung hukum sewa/pinjam pakai/izin pemanfaatan barang milik daerah	10 dok						
							- Perjanjian/Surat Izin sewa/pinjam pakai/pemanfaatan barang milik daerah	10 dok						
							- Laporan evaluasi pelaksanaan sewa/pinjam pakai/izin pemanfaatan barang milik daerah	30 dok						
							- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta	SKPD se kota Yk						
							- Appraisal barang daerah	1 dok						
							- Jasa biaya pindah	6 SKPD						
							- Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1 Lokasi						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Jasa kebersihan bangunan/gedung Pemkot Yogyakarta	1 lokasi						
9.3	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan			Kec. UH			Jasa penghapusan bangunan gedung	20 bangunan	Efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang daerah	20 bangunan	675,495,895	675,495,895		
							Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	42 SKPD	Penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD berbasis sistem informasi barang daerah	42 SKPD				
							Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 dok		350 orang				
							- Pembinaan Pengelola Barang SKPD	350 orang	- Meningkatkan Pengetahuan Para Pengelola Barang Daerah	1 buku				
							- Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	48 unit kerja	- Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	48 unit kerja				
							Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai	2 kali	Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang daerah	1 dok				
							- Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dok		- Nilai Barang Persediaan Pemkot Yogyakarta				
	TOTAL										27,341,637,393			

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
	Perencanaan Pembangunan													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					706,128,000	691,850,800		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			UH			- Materai 6000 yang tersedia	400 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	208,608,000	229,468,800	sedang	Bappeda
						- Materai 3000 yang tersedia	450 buah							
						- Jasa Pengiriman/ Paket	10 kali							
						- STNK Roda 4 (empat) yang terbayar	3 unit							
						- STNK Roda 2 (dua) yang terbayar	17 unit							
						- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	1 paket							
						- Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
						- Alat Tulis Kantor yang tersedia	20 jenis							
						- Jasa percetakan	1 jenis							
						- Jasa penggandaan	1.500.000							
						- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis							
						- Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis							
						- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis							
						- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali							
						- Jasa pemeliharaan taman	12 bulan							
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UH			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	78,900,000	78,900,000	sedang berjalan	Bappeda
						- Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN							
						- Jasa Tenaga Bantuan	1 orang							
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi			UH			- Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	418,620,000	383,482,000	sedang berjalan	Bappeda
						a. Koordinasi	60 kali							
						b. Pegawai	50 orang							
						- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					262,354,000	288,589,400				
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			UH			- Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	146,450,000	161,095,000	sedang berjalan	Bappeda		
							- Ruang Laktasi/Pojok ASI	1 unit								
							- Ruang Sekretariat TKPK/Ruang Rapat	1 unit								
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						- Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	115,904,000	127,494,400	sedang berjalan	Bappeda		
							a. Roda 4 (empat)	3 unit								
							b. Roda 2 (dua)	17 unit								
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Terwujudnya Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					75,000,000	82,500,000				
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UH			- Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran ( Renstra, Renja, PK, RKA, DPA )	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	75,000,000	82,500,000	sedang berjalan	Bappeda		
							- Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil )	5 dokumen							Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB
							- Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali							Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%
4	Program Bidang Ekonomi	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Persentase capaian kinerja target program sektoral ekonomi	95%					2,437,114,200	2,797,114,200				
4.1	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM			UH			Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	41 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	100%	746,244,700	820,869,170	sedang berjalan	Bappeda		
1	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen														
2	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen														
3	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen														
4	Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1 dokumen														
5	Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							6	Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1	dokumen				
							7	Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1	dokumen				
							8	Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							9	Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							10	Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1	dokumen				
							11	Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1	dokumen				
							12	Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1	dokumen				
							13	Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							14	Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							15	Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							16	Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							17	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							18	Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							19	Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							20	Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							21	Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4	dokumen				
							22	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							23	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							24	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							25	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1	dokumen				
							26	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1	dokumen				
							27	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4	dokumen				
							28	Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1	dokumen				
							29	Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1	dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
4.2	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja			UH			Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	43 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Pariwisata dan Tenaga Kerja	100%	844,624,600	929,087,060	sedang berjalan	Bappeda
							1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							4 Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1 dokumen						
							5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1 dokumen						
							8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							9 Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							11 Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							13 Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							14 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							15 Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							16 Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						17 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						18 Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen							
						22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen							
						26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen							
						27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	1 dokumen							
						28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1 dokumen							
						29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen							
						30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen							
						31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen							
						32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen							
						33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen							
						34 Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya	1 dokumen							
						35 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketenagakerjaan	1 dokumen							
4.3	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah			UH		Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	45 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Ekonomi Daerah	100%	846,244,900	930,869,390	sedang berjalan	Bappeda	
						1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen							
						3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							4	Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1	dokumen				
							5	Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1	dokumen				
							6	Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1	dokumen				
							7	Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1	dokumen				
							8	Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							9	Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							10	Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1	dokumen				
							11	Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1	dokumen				
							12	Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1	dokumen				
							13	Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							14	Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							15	Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							16	Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							17	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							18	Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							19	Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							20	Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							21	Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4	dokumen				
							22	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							23	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							24	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							25	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1	dokumen				
							26	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1	dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen							
							28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1 dokumen							
							29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen							
							30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen							
							31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen							
							32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen							
							33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen							
							34 Analisa Fiskal Daerah	1 dokumen							
							35 Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan	1 dokumen							
							36 Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen							
							37 Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah	1 dokumen							
5	Program Bidang Fisik	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Persentase capaian kinerja target program sektoral fisik	95%					2,591,734,200	8,523,972,410			
5.1	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo			UH			Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	43 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Perhubungan	100%	796,244,300	875,868,730	sedang berjalan	Bappeda	
							1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
							2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen							
							3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen							
							4 Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1 dokumen							
							5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen							
							6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen							
							7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1 dokumen							
							8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen							
							9 Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen							
							10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						11 Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen							
						12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen							
						13 Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						14 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						15 Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						16 Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						17 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						18 Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen							
						22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen							
						26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen							
						27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen							
						28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1 dokumen							
						29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen							
						30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen							
						31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen							
						32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen							
						33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen							
						34 Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan	1 dokumen							
						35 Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan	1 dokumen							
5.2	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Perumahan			UH		Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	44 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	100%	849,245,000	969,245,000	sedang berjalan	Bappeda	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Umum dan Permukiman						1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen 1 dokumen	Pekerjaan Umum dan Permukiman Sub Bidang Pekerjaan Umum & Permukiman					
							3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral 4 Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral 5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral 6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral 7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral 8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral 9 Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral 10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral 11 Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral 12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral 13 Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral 14 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral 15 Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral 16 Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral 17 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral 18 Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral 19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV 22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen 1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen						
							26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen						
							27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen						
							28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1 dokumen						
							29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							34 Laporan Koordinasi Perencanaan Sarpras Permukiman	1 dokumen						
							35 Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar permukiman	1 dokumen						
							36 Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan	1 dokumen						
5.3	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			UH			Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	52 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Sub Bid Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup		946,244,900	1,081,244,900	sedang berjalan	Bappeda
							1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							4 Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1 dokumen						
							5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							7	Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1	dokumen				
							8	Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							9	Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							10	Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1	dokumen				
							11	Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1	dokumen				
							12	Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1	dokumen				
							13	Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							14	Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							15	Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							16	Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							17	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							18	Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							19	Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							20	Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1	dokumen				
							21	Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4	dokumen				
							22	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							23	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							24	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1	dokumen				
							25	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1	dokumen				
							26	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1	dokumen				
							27	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4	dokumen				
							28	Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1	dokumen				
							29	Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							30	Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1	dokumen				
							31	Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1	dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							34 Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dokumen						
							35 Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen						
							36 Iuran Sekber Kartamantul	1 dokumen						
							37 Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Tingkat Kecamatan	1 dokumen						
							38 Laporan Penataan Kawasan Sungai	1 dokumen						
							39 Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi	1 dokumen						
							40 Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup	1 dokumen						
							41 Tindak Lanjut Peninjauan Kembali RTRW	1 dokumen						
							42 Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang	1 dokumen						
							43 Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas)	1 dokumen						
							44 Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan	1 dokumen						
							45 Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Sungai	1 dokumen						
6	Program Bidang Sosial	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase capaian kinerja target program sektoral sosial	95%				2,544,369,900	2,798,806,890			
6.1	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan			UH			Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	43 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bid Pendidikan dan Kebudayaan	100%	748,500,000	823,350,000	sedang berjalan	Bappeda
							1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							4 Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1 dokumen						
							5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1 dokumen						
							8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						9 Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen							
						10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen							
						11 Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen							
						12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen							
						13 Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						14 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						15 Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						16 Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						17 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						18 Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen							
						21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III,dan IV	4 dokumen							
						22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen							
						25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen							
						26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen							
						27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen							
						28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1 dokumen							
						29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							34 Laporan Koordinasi Perencanaan Budaya Keistimewaan	1 dokumen						
							35 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pendidikan	1 dokumen						
6.2	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat			UH			Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	51 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Sub Bid Kesejahteraan Rakyat	100%	1,096,244,900	1,205,869,390	sedang berjalan	Bappeda
							1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							4 Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1 dokumen						
							5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1 dokumen						
							8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							9 Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							11 Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							13 Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							14 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							15 Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							16 Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							17 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							18 Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen						
							22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen						
							26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen						
							27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen						
							28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1 dokumen						
							29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							34 Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	1 dokumen						
							35 Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							36 Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021	1 dokumen						
							37 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Sosial	1 dokumen						
							38 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Kesehatan	1 dokumen						
							39 Dokumen SDG's Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							40 Laporan Kota Sehat	1 dokumen						
							41 Laporan Kota Layak Anak	1 dokumen						
							42 Laporan Kota Inklusi	1 dokumen						
							43 Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen						
6.3	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur			UH			Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	44 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Aparatur Sub Bid Aparatur		699,625,000	769,587,500	sedang berjalan	Bappeda
							1 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							2 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							3 Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							4 Pendampingan Penyusunan Data Musrenbang SKPD Sektoral	1 dokumen						
							5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen						
							7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD Sektoral	1 dokumen						
							8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							9 Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							11 Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							13 Evaluasi Kebijakan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							14 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							15 Evaluasi Hasil RPJPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							16 Evaluasi Kebijakan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							17 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							18 Evaluasi Hasil RPJMD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral	1 dokumen						
							21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen						
							22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen						
							25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen						
							26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen						
							27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen						
							28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD Sektoral	1 dokumen						
							29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD Sektoral	1 dokumen						
							31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan (TP) SKPD Sektoral	1 dokumen						
							33 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi SKPD Sektoral	1 dokumen						
							34 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pemerintahan	1 dokumen						
							35 Laporan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	1 dokumen						
							36 Pengendalian Evaluasi Pemerintahan	1 dokumen						
7	Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase capaian kinerja target program pembangunan	95%					3,800,000,000	4,180,000,000		
7.1	Perencanaan Program Pembangunan Daerah			UH			Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah	25 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah		1,850,000,000	2,035,000,000	sedang berjalan	Bappeda

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							1	Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021	1 dokumen	Tersedianya Raperda Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	100%				
							2	Dokumen RKPD Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2018	100%				
							3	Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017	1 dokumen	Tersedianya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017					
							4	Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2018	100%				
							5	Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017	1 dokumen	Tersedianya dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017					
							6	Dokumen Renja SKPD	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renja SKPD					
							7	Dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	Tersedianya dokumen Renstra SKPD					
							8	Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD 2017 - 2021	1 dokumen	Tersediannya dokumen Indikator Kinerja Utama SKPD					
							10	Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2018	1 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta 2018					
							11	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018	1 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018					
							12	Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya dokumen Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018	100%				
							13	Musrenbang RPJMD	1 kali	Terlaksananya Musrenbang RPJMD					
							14	Dokumen Hasil Forum SKPD	1 dokumen	Terlaksananya Forum SKPD					
							15	Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD	1 dokumen	Terlaksananya Forum Gabungan SKPD					
							16	Perencanaan Usulan Dana APBN	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Usulan Dana APBN					
							17	Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Usulan Dana Keistimewaan					
							18	Perencanaan Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Usulan Dana APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan					
							19	Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)					
							20	Perencanaan Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP)	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Usulan Dana Tugas Perbantuan (TP)					
							23	Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Usulan Dana Dekonsentrasi					
							24	Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021	1 dokumen	Tersedianya dokumen penyusunan pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017-2021					
							25	Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD	1 dokumen	Tersediannya dokumen telaah pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7.2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah			UH			Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah	28 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah	100%	875,000,000	962,500,000		
							1 Evaluasi Kebijakan RPJPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan RPJPD					
							2 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RPJPD					
							3 Evaluasi Hasil RPJPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Hasil RPJPD					
							4 Evaluasi Kebijakan RPJMD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan RPJMD					
							5 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RPJMD					
							6 Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD					
							7 Evaluasi Kebijakan RKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan RKPD					
							8 Evaluasi Pelaksanaan RKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD					
							9 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Hasil RKPD TW I,II,III dan IV					
							10 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen PE Kebijakan Renstra SKPD					
							11 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen PE Pelaksanaan Renstra SKPD					
							12 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen PE Hasil Renstra SKPD					
							13 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen PE Kebijakan Renja SKPD					
							14 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen PE Pelaksanaan Renja SKPD					
							15 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	Tersedianya Dokumen PE Hasil Renja SKPD TW I,II,III dan IV					
							16 Monitoring dan Evaluasi APBN	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Monev APBN					
							17 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Monev Dana Keistimewaan					
							18 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Monev APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan					
							19 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Monev DAK					
							20 Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Perbantuan (TP)	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Monev Dana TP					
							21 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Monev Dana Dekonsentrasi					
							22 Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016	1 kali	Terselenggaranya Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
7.3	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan			UH			Dokumen Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	9 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1,075,000,000	1,182,500,000	1	Bappeda
							1 Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Data Kewilayahan	100%				
							2 Dokumen Data Sektoral	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Data Sektoral	100%				
							3 Analisa Data	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Analisa Data	100%				
							4 Data Series SIPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Data Series SIPD					
							5 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni	1 dokumen	Tersedianya Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan					
							6 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan	1 dokumen	Tersedianya Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan					
							7 Pengembangan Data dan Informasi	2 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah					
8	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada dan Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	100%					2,150,000,000	2,325,000,000		
8.1	Kegiatan Penelitian			UH			1 Kajian Keuangan Daerah	1 dokumen	Terwujudnya dokumen hasil kajian Keuangan Daerah	100%	900,000,000	985,000,000		
							2 Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat	1 dokumen	Tersedianya dokumen masukan kebijakan program pembangunan	100%				
							3 Masterplan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Perkerasan	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Perkerasan					
							4 Masterplan Transportasi Perkotaan	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Rncangan Inter Koneksi Transportasi Pariwisata					
							5 Kajian Smart City Tahap II	1 dokumen	Terwujudnya Kajian Smart City Tahap II					
							6 Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun)	1 dokumen	Terwujudnya Kajian Kelayakan Rumah Susun					
							7 Kajian Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata yang Terintegrasi	1 dokumen	Tersusunnya dokumen Kajian Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata yang Terintegrasi					
							8 Penyusunan dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
8.2	Kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis			UH			1 Dokumen Analisa Kebijakan	6 dokumen	Tersusunnya dokumen analisa kebijakan penanganan isu strategis		500,000,000	580,000,000	sedang berjalan	Bappeda
8.3	Kegiatan Inovasi Daerah			UH			1. Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida)	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida)		750,000,000	760,000,000		
							2 Dokumen Penelitian	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen masukan kebijakan program pembangunan					
							3 Buku Jurnal Jarlit 2017	100 buku	Tersusunnya Buku Jurnal Jarlit					
							4 Buku Inventarisasi Hasil Penelitian	1 dokumen	Tersusunnya Buku Inventarisasi Hasil Penelitian					
							5 Anugerah Penelitian	2 jenis	Penghargaan dan inisiasi untuk pemenang					
TOTAL											14,566,700,300	21,687,833,700		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pertangkat Daerah Tahun 2017**  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat daerah: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2018)	Jenis	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,273,923,612	1,394,598,148		
1.1	Penyediaan Jasa Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			UH			Materai 6000 yang tersedia	156 Imbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	578,210,592	634,242,626	Lanjutan	BKPP
							Materai 3000 yang tersedia	420 lbr						
							Jasa pengiriman/paket	10 kali						
							STNK kendaraan roda 4 yang terbayar	3 unit						
							STNK kendaraan roda 2 yang terbayar	16 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bln						
							Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis						
							Jasa penggandaan	433.666 lbr						
							Jasa percetakan	2 jenis						
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Pembayaran listrik, air, dan telepon	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	714 exlempar						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	24 buku						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	51 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 macam						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
							Pengadaan printer	5 unit						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2018)	Jenis	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Penanggungjawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan daan operasional perkantoran	100%	163,681,020	179,806,122	Lanjutan	BKPP
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola				59 Dokumen ASN							
			Jasa tenaga bantuan				5 orang							
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UH			Makan dan minum yang tersedia untuk:		Dukungan terhadap kelancaran administtrasi, keuangan daan operasional perkantoran	100%	532,032,000	580,549,400	Lanjutan	BKPP
			a. Koordinasi				32 orang							
			b. Pegawai				66 orang							
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan						
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	UH	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					270,738,600	297,812,300		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			UH			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/tempat	3 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	160,857,600	176,943,300	Lanjutan	BKPP
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional			UH			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	109,881,000	120,869,000	Lanjutan	BKPP
			a. Roda 4				3 unit							
			b. Roda 2				16 unit							
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur daan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					89,920,000	98,912,000		
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran.	100%	89,920,000	98,912,000	Lanjutan	BKPP
			Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, SPP, dan Profil).				5 dokumen	Nilai kinerja akuntabilitas kinerja SKPD	85					
			Frekwensi Diklat formal yang diikuti				2 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya apatarur	100%					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2018)	Jenis	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan	UH	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	100%					1,936,606,900	2,130,267,590		
4.1	Rekrutmen Aparatur Sipil Negara			UH			1. Formasi pegawai:	3 dok	Terlaksananya rekrutmen Aparatur Sipil Negara	100%	1,027,617,500	1,130,379,250		
							2. Pengadaan pegawai	150 orang						
							3. Pengadaan Calon praja IPDN	-						
							4. Memproses pengangkatan ASN	150 orang						
							5. Pengambilam sumpah ASN	100 orang						
							6. Penataan pegawai	100 orang						
							7. Pindah masuk/keluar/titipan	40 orang						
4.2	Pengembangan karier ASN			UH			1. Penilaian kompetensi ASN	168 orang	Terlaksananya pengembangan karier Aparatur Sipil Negara	100%	791,564,400	870,720,840	Lanjutan	BKPP
							2. Mengelola <i>Talent pool</i>	50 orang						
							3. Pelaksanaan pola karier	10 SK						
							4. Seleksi JPT Pratama secara terbuka	2 kali						
							5. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat ASN	4 kali						
4.3	Pengelolaan data dan informasi kepegawaian			UH			1. Mengelola <i>website</i> kepegawaian	12 bulan	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kepegawaian.	100%	117,425,000	129,167,500	Lanjutan	BKPP
							2. Pengelolaan data elektronik pegawai	15.000 data						
							3. Pengelolaan map data <i>file</i> manual pegawai	10.631 map						
							4. Pengelolaan isi arsip manual pegawai	1.000 buah						
							5. Penggandaan buku pedoman pengelolaan database pegawai	70 buku						
5.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan	UH	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang akuntabel	100%					1,265,370,000	1,390,300,600		
5.1	Mutasi kepegawaian			UH			1. Crash program kenaikan pangkat	2 kali	Terlaksananya mutasi kepegawaian	100%	404,413,000	444,854,300	Lanjutan	BKPP
							2. Memproses peninjauan masa kerja	3 orang						
							3. Status kepegawaian	3 orang						
							4. Penilaian angka kredit	1024 Pjb. Fgs						
							5. Terbitnya SK jabatan fungsional	50 SK						
							6. Pembinaan pejabat fungsional	120 orang						
							7. Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	800 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2018)	Jenis	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Penanggungjawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.2	Pembinaan dan kesejahteraan ASN			UH			1. Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai 2. Laporan presensi pegawai 3. Administrasi perceraian 4. Tambahan penghasilan pegawai 5. Pembinaan mental spiritual 6. Pengadaan pakaian dinas 7. Uji kesehatan 8. Konseling pegawai 9. Memproses pemberhentian dan pensiun 10. Fasilitasi Koopri	17 SK 51 SKPD 16 orang 12 bulan 10 kali - 10 orang 50 kali 350 orang 4 kali	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	100%	551,006,000	605,225,200	lanjutan	BKPP
5.3	Penatausahaan kepegawaian			UH			1. Surat keterangan cuti 2. Karis/Karsu/Karpeg/ KPE 3. Satyalancana 4. Fasilitasi Bapertarum 5. Fasilitasi kepesertaan TASPEN 6. Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing gaji 7. Penilaian kinerja pegawai 8. Memproses jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan 9. LHKPN dan LHKASN 10. Mengelola pegawai non PNS BLUD 11. Mengelola tenaga bantuan 12. Tanda pengenalan pegawai	150 orang 300 orang 500 orang 150 orang 150 orang 60 orang 1 dokumen 3 orang 100 orang 1 dokumen 1.031 orang 5.500 orang	Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai SOP.	100%	309,951,000	340,221,100	Lanjutan	BKPP
6.	Program peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara	Kinerja aparatur dan birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan	UH	Terlaksana-nya pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.	100%					4,361,727,500	4,539,238,770		
6.1	Analisa kebutuhan Diklat			UH			1. Merencanakan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi 2. Merencanakan peningkatan kualifikasi pendidikan formal	1 dokumen 1 dokumen	Tersedianya data kebutuhan Diklat, ujian dinas, dan standar kompetensi.	100%	348,260,000	278,421,270 77,181,500 27,780,500	Lanjutan	BKPP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2018)	Jenis	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Penanggungjawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							3. Analisaa kebutuhan Diklat	1 dokumen				67,837,000		
							4. Data kepegawaian alumni Diklat	1 dokumen				27,203,000		
							5. Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	40 orang				104,770		
							6. Penyusunan standar kompetensi	1 dokumen				78,314,500		
6.2	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan			UH			1. Pengiriman Diklat teknis/fungsional bagi PNS	53 Org	Terlaksananya penyelenggaraan Diklat struktural dan Diklat teknis.	100%	2,987,172,500	3,131,893,000	Lanjutan	BKPP
						2. Pengiriman Diklatpim II	2 orang							
						3. Pengiriman Diklatpim III	17 orang							
						4. Pengiriman Diklatpim IV	62 orang							
						5. Diklat teknis/fungsional bagi ASN	910 orang							
						6. Fasilitasi praktek kerja lapangan bagi peserta Diklat	24 kali							
						7. Sosialisasi jabatan fungsional	60 orang							
						8. Desiminasi karya tulis ilmiah	120 orang							
6.3	Pengendalian dan pengembangan Diklat			UH			1. Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat	1 dokumen	Terlaksananya pengendalian dan pengembangan Diklat, izin belajar, tugas belajar, dan izin keluar negeri.	100%	1,026,295,000	1,128,924,500	Lanjutan	BKPP
						2. Evaluasi jabatan	1 dokumen							
						3. Monitoring dan evaluasi pegawai	2 kali							
							4. Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar	165 orang				23,776,500		
							5. Pengendalian izin belajar dan tugas belajar PNS	67 orang				22,973,500		
							6. Memberi bantuan biaya tugas belajar bagi PNS	40 oang				898,969,500		
							7. Monitoring dan evaluasi peserta tugas belajar dan izin belajar	67 orang				14,151,500		
							8. Memproses usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an	25 orang				14,641,000		
TOTAL											9,198,286,612	9,851,129,408		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
	URUSAN KEARSIPAN													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,899,470,080.00	1,937,459,481.60	sedang berjalan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor						Materai 3000	900 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,278,861,500.00	1,304,438,730		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
							Materai 6000	600 buah						
							Jumlah surat/berkas yang dikirim	50 berkas						
							Jumlah Telepon	2 buah						
							Jumlah Modem Internet	14 buah						
							Jumlah Handphone	1 buah						
							KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	3 unit						
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	4 unit						
							STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	2 unit						
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 unit						
							Plat Kendaraan roda 2 yang diganti	2 unit						
							Plat Kendaraan roda 3 yang diganti	1 unit						
							Plat Kendaraan roda 4 yang diganti	1 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis						
							Jasa retribusi	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	2 paket						
							jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis						
							Jasa percetakan	23 jenis						
							Jasa penggandaan	150.000 lembar						
Jasa penjilidan	200 bendel													
Laminating	50 lembar													

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu indikatif		Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
						Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis						
						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis						
						Peralatan Kantor	3 jenis						
						Obat-obatan	12 bulan						
						Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
						Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	5 jenis						
						Jumlah buku perpustakaan	20 buah						
						Jasa Keamanan	1 paket						
						bibit tanaman	30 buah						
						Pot tanaman	15 buah						
						media tanam/pupuk tanaman	200 kg						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			GK		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	97,258,580	99,203,752	sedang berjalan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
					Dokumen administrasi pengelolaan barang :laporan penyimpan dan pengurus barang yang tersusun	2 jenis							
					dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	44 dokumen ASN							
					Jasa Tenaga Bantuan	1 orang							
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			GK		Makan dan minum yang tersedia untuk:		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	523,350,000.00	533,817,000	sedang berjalan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
					pegawai	100 orang							
					rapat	121 kali							
					tamu	66 kali							
					pengunjung	990 galon							
					Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 laporan							
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%				388,263,000.00	396,028,260.00	sedang berjalan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Hasil kegiatan		Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan							
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			GK			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1 kantor	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	201,455,000	205,484,100	sedang berjalan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			GK			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	186,808,000.00	190,544,160	sedang berjalan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
							roda 2	8 unit						
							roda 3	3 unit						
							roda 4	5 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	GK	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					40,875,000.00	41,692,500.00	sedang berjalan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD						Dokumen Perencanaan & Penganggaran SKPD: Review Renstra, Renja, RKT,RKA, DPA, Tapkin	6 jenis	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%		15,172,500		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
							Dokumen Kinerja SKPD :LAKIP, Lap Keuangan & Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil	6 jenis	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD	BB				
							Personil yang mengikuti Pelatihan	10 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%		26,520,000		
4	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah	NG	Khasanah arsip statis yang dibuat setiap tahun	2 buah					710,118,000.00	724,320,360.00	sedang berjalan	
4.1	Kegiatan Pengelolaan Arsip						Personil yang menangani arsip Dinamis SKPD	156 orang*	Penanganan Arsip Dinamis SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	156 orang*	342,558,000.00	349,409,160		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
							inventaris arsip	3 buku	inventaris arsip	3 buku				
							Dokumen arsip statis yang tercipta	3 buku	Tersedianya data arsip statis dan dinamis Pemkot untuk dilayankan kepada masyarakat	3 buku				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
						Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip	1 paket	Terlindunginya penyimpanan arsip sesuai dengan jenis dan medianya(Kertas dan non kertas)	1 paket					
						Arsip pemerintah kota yang dinilai dan disusutkan	3 SKPD	Arsip pemerintah kta yang dinilai dan disusutkan	3 SKPD					
4.2	Kegiatan Pengembangan Arsip					Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 Pedoman	Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	2 Pedoman	367,560,000	374,911,200			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
						Petugas Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja yang dibimtek	154 orang	Meningkatnya kemampuan Petugas Kearsipan SKPD/Unit Kerja dalam mengelola arsip	154 orang					
						Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Arsiparis	40 orang	Tersenggaranya kegiatan Pengembangan Profesi Arsiparis dalam rangka profesionalisme	40 orang					
						Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA)	12 kali FKA	Pembinaan kearsipan kepada arsiparis dan petugas kearsipan Pemkot Yogyakarta	12 kali FKA					
						Koordinasi Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY	1 kali	Terciptanya komunikasi arsiparis se-DIY	1 kali					
						Sarana Kendali Kearsipan	1 paket	Tersedianya Sarana Kendali Kearsipan	1 paket					
						SKPD yang terdampingi Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik	154 SKPD/Unit kerja	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Konvensioanal dan Elektronik	154 SKPD/Unit kerja					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
5	Program Perlindungan, Penyelamatan data dan Informasi Arsip	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Tolok ukur Khasanah arsip yang terlindungi dan terselamatkan setiap tahun	Target 2 buah					470,948,644.00	480,367,616.88		
5.1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	2581 M3	Pengendalian Hama Terpadu di Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	2581 M3	175,019,000.00	178,519,380		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
							Bahan restorasi arsip	1 paket	Terlaksananya perbaikan arsip rusak tingkat ringan	1 paket				
							Arsip yang dialihmediakan	200 arsip	Tersedianya daftar arsip dalam bentuk digital dalam rangka layanan arsip	200 arsip				
							Khasanah Arsip yang ditelusuri	1 daftar arsip	Khasanah arsip	1 daftar arsip				
							SKPD yang teridentifikasi arsip vitalnya	3 SKPD/ Unit Kerja	Teridentifikasinya arsip Vital di SKPD	3 SKPD/ Unit Kerja				
							SKPD yang terlindungi arsip vitalnya	3 SKPD/ Unit Kerja	Terlindunginya arsip Vital di SKPD	3 SKPD/ Unit Kerja				
5.2	Kegiatan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional						Pameran Arsip Pemkot Yogyakarta	1 kali	Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta	1 kali	295,929,644	301,848,237		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
							Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan	1400 lbr buletin	Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta melalui media elektronik dan cetak	1400 lbr buletin				
							SKPD yang mengikuti Lomba Kearsipan	154 SKPD/Unit kerja	Terkelolanya arsip SKPD dengan baik	154 SKPD/Unit kerja				
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Pendidikan	Akseibilitas pendidikan meningkat	GK	Meningkatnya angka kunjung Perpustakaan Kota Yogyakarta	2%					1,401,550,062	1,429,581,062.99		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
6.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan			GK			1. kunjungan Mobil keliling	220 kali	1. Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat	220 kali	949,770,062	968,765,463	sedang berjalan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							2. Kunjungan Mobil Internet Keliling	220 kali	2. Intensitas layanan Kunjungan Mobil Internet Keliling	220 kali				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
							3. Pelayanan Perpustakaan	12 bulan	3. Implementasi Pelayanan perpustakaan	12 bulan				
							4. Kunjungan motor perpustakaan keliling	220 kali	4. Intensitas layanan motor perpustakaan keliling	220 kali				
							5. Pedoman pengelolaan perpustakaan yang dibuat	1 pedoman	5. Pedoman perpustakaan sebagai panduan dalam pelayanan di bidang perpustakaan	1 pedoman				
							6. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah	30 orang, 2 angkatan	6. Implementasi pengelolaan Perpustakaan sekolah yang berbasis IT	60 orang				
							7. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan Khusus	30 orang, 2 angkatan	7. Implementasi pengelolaan perpust khusus	60 orang				
							8. Peserta pendampingan perpustakaan sekolah	50 sekolah, 6 bulan	8. Implementasi pembinaan perpustakaan sekolah	50 sekolah, 6 bulan				
							9. Peserta Pendampingan Perpustakaan Khusus/ Instansi	50 sekolah, 6 bulan	9. Implementasi Pendampingan Perpustakaan Khusus/ Instansi	50 sekolah, 6 bulan				
6.2	Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca						1. Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"	60 peserta	1. Masyarakat dan pemustaka meningkat minat bacanya	60 peserta	451,780,000	460,815,600		
							2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	30 kali	2. Pelestarian cerita rakyat melalui media radio	30 kali				
							3. Peserta Sanggar Menulis "Cahaya"	40 peserta, 2 angkatan	3. Anak-anak berani dan gemar menulis	40 peserta; 2 angkatan				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
						4. Diskusi Buku	6 kali,50 peserta	4. Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas	300 peserta				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
						5. Diskusi Komunitas	2 kali, 50 peserta	5. Jalinan antar komunitas dalam menumbuhkan budaya literasi	100 peserta					
						6. Festival Literasi	1 kali, 200 peserta	6. Budaya literasi masyarakat berkembang	1 kali, 200 peserta					
						7. Ramadan di Perpus Kota	1 kali,100 peserta	7. Peran Perpus Kota dalam menyemarakkan bulan Ramadan	1 kali					
						8. Liburan di PerpusKota	1 kali, 3 jenis, 50 peserta	8. Peran Perpus Kota dalam mengisi Liburan sekolah	150 peserta					
						9. Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	12 bulan	9. Distribusi buku sumbangan dari masyarakat untuk yang membutuhkan meningkat	12 bulan					
						10. Penerbitan Majalah Pradipta (Semester)	4 kali	10. Kegiatan Perpus Kota semakin dikenal oleh masyarakat melalui majalah Pradipta	4 terbitan					
						11.Seminar Regional Perpustakaan	1 kali	11. Kajian komprehensif untuk kemajuan perpustakaan Kota Yk	1 kali					
						12. Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.	100 peserta	12. Minat dan Kemampuan membaca siswa SD berkembang	10 pemenang (5 pa, 5 pi)					
						13. Peserta Forkom Perpustakaan Kab/Kota se_DIY	100 orang	13. Jaringan kerjasama antar perpustakaan umum kab/Kota dan DIY	100 peserta				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil program		Keluaran kegiatan		Hasil kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
						14.Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk	50 perpustakaan sekolah	14. Kemampuan berkompetisi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah	6 pemenang					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
						15.Peserta Lomba Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta	50 instansi	15.Kemampuan berkompetisi dalam pengelolaan perpustakaan instansi	12 pemenang					
7	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	Pendidikan	Akseibilitas pendidikan meningkat		Jumlah penambahan koleksi pustaka	100 eks				143,240,000.00	146,104,800.00			
7.1	Kegiatan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno						1. Pemeliharaan naskah kuno	20 naskah	1. Naskah kuno semakin terpelihara	20 naskah	62,060,000	63,301,200		
							2. Pemeliharaan koleksi pustaka	12 bulan	2. Bahan pustaka semakin terpelihara	12 bulan				
							3. Stock Opname Bahan Pustaka	1 kali	3. Koleksi bahan pustaka semakin tertata sesuai kaidah perpustakaan	1 kali				
							4. Penambahan koleksi bahan pustaka	100 eks	4. Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas	100 eks				
7.2	Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan						Pengelolaan Sistem Perpustakaan	12 bulan	Implementasi Pengelolaan Sistem Perpustakaan	12 bulan	81,180,000.00	82,803,600		
							Pengelolaan otomasi dan digital library	12 bulan	Implementasi pengelolaan otomasi dan digital library	12 bulan				
							Penyusunan data perpustakaan	1 kali	Data perpustakaan semakin tertata dan akurat	1 kali				
	TOTAL										5,054,464,786	5,155,554,081.47		3,838,846,628

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	
	URUSAN PILIHAN													
	Urusan Kebudayaan													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					562,800,610	562,800,610		Dinas kebudayaan
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			GK			Materai 6000 an yang tersedia	100 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	304,202,482	304,202,482		
							Materai 3000 an yang tersedia	400 buah						
							Jasa Pengiriman / Paket	-						
							STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit						
							STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 Unit						
							STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	5 Unit						
							tenaga teknis taman	1 orang						
							Retribusi sampah	12 bulan						
							Jasa Kebersihan Kantor	1 paket						
							bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 jenis						
							Alat tulis kantor Yang tersedia	49 jenis						
							Cetak Amplop Dinas	5000						
							Cetak Stopmap Dinas	2000						
							Jasa Penggandaan / FC	134.000						
							Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis						
							Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis						
							Komponen Komputer yang tersedia	22 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 jenis						
							Peralatan Rumah tangga yang tersedia	9 jenis						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
							bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	-						
							Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1 paket						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			GK			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	93,940,128	93,940,128		
						- Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang terkelola	12 dokumen ASN							
						- Jasa Tenaga Bantuan	2 oarang							
1.3	Penyediaan rarap-rapat Koordinasi dan Konsultasi			GK			Makan dan Minum yang tersedia untuk		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	164,658,000	164,658,000		
						a. Koordinasi	100 kali							
						b. Pegawai	242 kali							
						c. makan minum tamu	58 kali							
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								
						a. perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi	19 laporan							
						b, perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi	9 laporan							
						c. Konsultasi ke Jakarta	4 laporan							
						d. Advokasi ke departemen / lembaga	7 laporan							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					129,167,446	129,167,446		Dinas Kebudayaan
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			GK			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	1 unit	Dukungan terhadap peningkattan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	28,547,946	28,547,946		
							- Bahan baku bangunan	3 jenis						
							- Bahan / Bibit Tanaman	2 jenis						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penaggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional			GK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100,619,500	100,619,500		
							- Roda 4	2 unit						
							- Roda 3	1 unit						
							- Roda 2	5 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					78,080,000	78,080,000		Dinas Kebudayaan
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			GK			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA, dll )	6 Dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	100%	78,080,000	78,080,000		
							Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD)	6 Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Sosial Budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta	Jumlah data Warisan dan Nilai Budaya	1 jenis					1,120,207,565	1,120,207,565		Dinas Kebudayaan
					Jumlah Kajian Warisan dan Nilai Budaya	1 dokumen								
4.1	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, pengetahuan dan teknologi						1. Updating Data Kebudayaan	1 kali	Dukungan Terhadap Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	100%	342,748,000	342,748,000		
							2. Penyusunan Kajian Budaya	1 dokumen laporan						
							3. Kemitraan kebudayaan	1 kali						
4.2	Kegiatan Pelestarian Tata Nilai Budaya						1. Workshop	1 kali	Dukungan Terhadap Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya		315,796,965	315,796,965		
							2. Melukis Bersama	10 kali						
							3. Pameran Seni	1 kali						
							4. Peningkatan Kapasitas SDM Pelestari Seni Budaya	1 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	
4.3	Kegiatan Pelestarian Kependakwaan dan Permuseum						1. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB /Bangunan 2. Pemberian penghargaan Pelestari Bangunan Heritage	12 bulan 1 paket	Dukungan Terhadap Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya		461,662,600	461,662,600		
5	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	Sosial Budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta	Jumlah Penulisan Sejarah, Bahasa dan Sastra	1 buku					393,428,000	393,428,000		Dinas Kebudayaan
5.1	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Sejarah						1. Penyusunan Transliterasi dan Cetak Buku	1 paket	Dukungan Terhadap Pelestarian dan Pengembangan Sejarah , Bahasa dan Sastra	100%	201,750,000	201,750,000		
							2. FGD	1 kali						
							3. Lomba Penulisan Peristiwa Sejarah	1 kali						
							4. Seminar	1 kali						
							5. Jelajah Budaya	1 kali						
5.2	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan bahasa dan Sastra						A. Lomba / Festival	2 kali	Dukungan Terhadap Pelestarian dan Pengembangan Sejarah , Bahasa dan Sastra		191,678,000	191,678,000		
							B. Gelar Macapat	14 kali						
							C. Workshop	1 kali						
6	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	Sosial Budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta	Jumlah organisasi seni dan budaya yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Meningkat	10 organisasi					983,593,000	983,593,000		Dinas Kebudayaan
6.1	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film						A. Dialog Budaya	18 kali	Dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas Organisasi Seni dan Budaya	100%	512,308,000	512,308,000		
							B. Workshop Pengembangan Seni dan Film	4 kali						
							C. Aktualisasi Seni Budaya	3 kali						
							D. Pembuatan Feature Seni Budaya	1 paket						
6.2	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi						A. Festival Seni Budaya	2 kali	Dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas Organisasi Seni dan Budaya		471,285,000	471,285,000		
							B. Revitalisasi Budaya	1 kegiatan						
							3. Kampanye Sadar Budaya	7 kali						
JUMLAH TOTAL											3,267,276,621	3,267,276,621		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Pendidikan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg. 1/2/3	SKPD Penangungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
URUSAN WAJIB														
Urusan Pendidikan														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					14,595,904,790	14,650,651,627		Dinas Pendidikan
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Danurejan			Materai 6000 yang tersedia	1600 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional	100%	1,314,126,550	1,353,550,347		
						Materai 3000 yang tersedia	450 buah							
						Jasa Pengiriman/paket	10 kali							
						STNK roda 6 yang terbayar	1 unit							
						STNK roda 4 yang terbayar	6 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	83 unit							
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis							
						Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
						Jasa Keamanan	12 bulan /2 paket							
						Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis							
						Jasa percetakan	8 jenis							
						Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar							
						Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis							
						Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis							
						Bahan Perpustakaan	5 jenis							
						Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis							
						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis							
						Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggan/komunikasi /studio	6 paket							
						Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis							
						Jasa pemeliharaan taman	12 bulan							
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Danurejan			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,771,010,240	12,771,010,240		
						dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	4 jenis							
						Jasa Tenaga Bantuan/PTT	554 orang							
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Danurejan			Makan dan minum yang tersedia untuk	-	Dukungan terhadap kelancaran	100%	510,768,000	526,091,040		
						a. koordinasi,	2800 kali							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg. 1/2/3	SKPD Penangungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							b. pegawai	250 orang	administrasi, keuangan dan operasional perkantoran					
							c. Tamu	1790 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan						
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					1,120,175,500	1,176,184,275		Dinas Pendidikan
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Danurejan			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	6 UPT	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	751,445,500	789,017,775		
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Danurejan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana	100%	368,730,000	387,166,500		
							a. Roda 6(enam),	1 unit						
							a .roda 4 (empat),	6 unit						
							b. roda 2 (dua)	83 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					125,000,000	131,250,000		Dinas Pendidikan
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Danurejan			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	125,000,000	131,250,000		
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
4	Program Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan	Daya saing pendidikan		Rerata Ujian Sekolah Daerah SD	67.00					11,746,718,000	12,334,053,900		Dinas Pendidikan
					Persentase SD akreditasi A	75%								
					Jumlah siswa berprestasi tk Nas	6 medali								

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg. 1/2/3	SKPD Penangungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD						Pendalaman Materi Ujian Sekolah Daerah ( USDA)	3 mapel @ 10 Jpl	Rerata US SD	67	2,168,672,000	2,277,105,600		
							Workshop penyusunan dok Kurikulum 2013	21 dok						
							Pelatihan penulisan soal ujian	30 Guru						
							Pengembangan Literasi sekolah	30 sekolah						
							Test Pendalaman Materi USDA	2 kali						
							Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas 3	1 kali						
							Ujian Sekolah IPS dan PKn	1 mapel						
							Ujian Sekolah Daerah 3 mapel	1 kali						
4.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD						Workshop manajemen sekolah	165 sekolah	Persentase SD akreditasi A	75%	8,523,370,000	8,949,538,500		
							Pendampingan Akreditasi Sekolah	15 sekolah						
							Verifikasi pendirian dan penutupan sekolah	5 sekolah						
							Lomba Sekolah sehat dan kantin sehat	6 kejuaraan						
							Lomba gugus SD	1 kejuaraan						
							Pemetaan Ketercapaian SNP	165 SD						
							Sister School	20 sekolah						
							Pengembangan Budaya Lingkungan Sekolah	4 sekolah						
							Pengadaan Komputer dan Sarpras KBS Online	1 paket						
							Pengadaan Media Pembelajaran	1 paket						
							Pengadaan Mebelair Perpustakaan	30 Ruang						
							Pengadaan Meja Kursi siswa	2000 paket						
							Pengadaan Sarpras ABK	10 paket						
							Rehab Ruang Inklusi	3 Sekolah						
							Pembangunan Green Room ABK	7 sekolah						
							Pengadaan Sarpras Green Room ABK	7 sekolah						
							Perbaikan KM & WC	60 Sekolah						
							Up-grade Mobil Pusat Sumber Inklusi	1 mobil						
4.3	Pengelolaan Kesiswaan SD						Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	6 Juara	Jumlah siswa berprestasi tk Nas	6 medali	1,054,676,000	1,107,409,800		
							FLSSN Sekolah Dasar (SD)	69 Juara						
							Olimpiade Sain Nasional (OSN)	6 Juara						
							Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	6 Juara						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis	SKPD	
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Keg.		Penanggungjawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	1/2/3			
							Gebyar Seni SD	1 kali						
							MTQ SD	24 Juara						
5	Program Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Daya saing pendidikan meningkat		Rerata UN SMP	72.50					15,276,663,150	16,040,496,308		Dinas Pendidikan
				Persentase SMP akreditasi A	85%									
				Jumlah siswa berprestasi tk Nas	6 Medali									
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP						Pendalaman materi UN SMP	4 mapel	Rerata UN SMP	72.50	1,108,920,000	1,164,366,000		
							Tes Pendalaman Materi UN SMP	66 sekolah						
							Bedah SKL UN SMP	4 mapel						
							Workshp penyusunan dok Kurikulum	16 dok						
							Pelatihan penulisan soal ujian	20 guru						
							Kajian Mulok	4 dok						
5.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP						Workshop Manajemen SMP	59 sekolah	Persentase SMP akreditasi A	85%	11,097,255,700	11,652,118,485		
						Diklat Penguatan Manajemen Sekolah	59 sekolah							
						Pendampingan Akreditasi Sekolah	10 Sekolah							
						Pemetaan Ketercapaian SMP	59 sekolah							
						Workshop EDS	59 sekolah							
						Verifikasi Pendirian dan Penutupan Sekolah	5 sekolah							
						Sister School	24 sekolah							
						Pengadaan Sarpras Kids Atletik, Media Pembelajaran dan Meubelair Perpustakaan Sekolah	90 paket							
						Pengadaan Komputer	576 unit							
						Rehab Ruang Penunjang Sekolah	4 paket							
5.3	Pengelolaan Kesiswaan SMP						OSN SMP	5 medali	Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional	6 medali	3,070,487,450	3,224,011,823		
						OOSN SMP	5 medali							
						FLSN	5 medali							
						Jelajah Museum	2 kali							
						Gebyar Seni	1 kali							
						MTQ SMP	5 medali							
						Lomba Karya Tulis SMP	4 medali							
						Pekan Budaya Jawa	4 medali							
						Liga Pelajar Indonesia	2 medali							
						Gelar Pelajar Jogja	10 kali							
						Pendidikan Agama Berbasis Afektif	60 Sekolah							
						Pameran Pendidikan di Sekaten	1 kali							
						Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa							
						POPDA	5 medali							
						Pertukaran Pelajar	40 siswa							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg. 1/2/3	SKPD Penangungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	Program Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal Dan PAUD	Pendidikan	Aksesibilitas pendidikan meningkat		Rerata UNPK	35.00					5,284,989,400	5,549,238,870		Dinas Pendidikan
					Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	20 lembaga								
					Jumlah LKP terakreditasi	10 lembaga								
6.1	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan						Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	3 kali	Rerata UNPK	35,0	2,045,226,500	2,147,487,825		
							Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	3 kali						
							Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	2 kali						
							Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP)	10 MTMP						
							Pengelolaan insentif Tutor Kesetaraan	100 orang						
							Bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga						
							Bimbingan Teknis Pengelola TBM	20 lembaga						
							Bimbingan Teknis Program JBM	45 kelurahan						
							BOSDA SPNF SKB	11 rombel						
6.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						Pembinaan Layanan Lembaga PAUD	4 Jenis Layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	20 lbg	2,716,092,900	2,851,897,545		
							Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi	15 juara						
							Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD	949						
							Pelatihan Pengelola PAUD	80 orang tersertifikasi						
							Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	220 orang tersertifikasi						
							Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS	50 orang tersertifikasi						
							Pengelolaan BOP PAUD	647 lembaga						
							Pendataan PAUD	1 dokumen						
							Gebyar PAUD	1000 peserta						
							Bimbingan uji kompetensi pendidik PAUD	100 orang						
							Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD	50 lembaga						
6.3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan						Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	10 lembaga	Jumlah LKP terakreditasi	10 lbg	523,670,000	549,853,500		
							Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	30 lembaga						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg. 1/2/3	SKPD Penangungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
							Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	7 dokunen						
							Pendidikan Vokasional	60 orang						
							Bimbingan Teknis Uji Kompetensi	20 orang						
								2 cabang						
							Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	lomba						
							Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan	16 cabang lomba						
7	Program Pengembangan Pendidikan	Pendidikan	Aksesibilitas pendidikan meningkat		Persentase guru kualifikasi S2	30%					103,606,447,600	108,786,769,980		Dinas Pendidikan
					Tersalurkannya kesejahteraan Guru Tenaga Kependidikan	2 kali								
					Tersedianya Data dan Informasi Pendidikan	4 dokumen								
					Angka Putus Sekolah	0.004 %								
					Angka Partisipasi Sekolah	95%								
					Jumlah Sekolah Inklusi	45 Sekolah								
7.1	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan						Pengembangan Kompetensi Guru	60 orang	Persentase guru kualifikasi S2	30%	2,818,915,000	2,959,860,750		
							Workshop MGMP/KKG	100 orang						
							Kualifikasi Guru S1 dan S2	110 guru						
							Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi	9 juara						
							Diklat Calon kepala sekolah	60 orang						
							Diklat Calon Pengawas Sekolah	15 orang						
							Diklat Calon Penilik Pendidikan	10 orang						
							Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	350 orang						
							Pelatihan PTK	60 guru						
							Pelatihan Administrasi Sekolah	60 orang						
							Pelatihan Guru UKS	60 orang						
							Diklat Penguatan Kepala Sekolah	50 orang						
							Diklat Asesor PKG	30 orang						
							Diklat Penilai Angka Kredit	30 orang						
							Lomba MTQ Gukar	25 juara						
							Seminar Karya Guru	15 Guru						
							Guru Pembelajar	28 Guru						
7.2	Pengelolaan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						Pengelolaan Insentif PTT Kota dan DIY	500 Guru	Tersalurkannya kesejahteraan Guru Tenaga Kependidikan	2 kali	13,733,155,000	14,419,812,750		
							Pengelolaan Sertifikasi Guru	576 orang						
							Pengelolaan Tunjangan dan penyaluran Profesi Guru dan TAMSIL PNSD	4161 orang						
							Pengelolaan dan Penyaluran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban	394 Orang						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis	SKPD													
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Keg.														
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3		Penanggungjawab												
							Pengelolaan dan penyaluran TPP	3500 Orang																			
7.3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan						KBS Online	26 kali	Tersedianya Data dan Informasi	4 dok	1,289,185,900	1,353,645,195															
							E. Qios	1 Paket																			
							Rangkuman data Pendidikan	1 dok																			
							Pengelolaan DAPODIK	443 SP																			
							Penyusunan Buku Informasi	400 eks																			
							Penyusunan Liflet Dinas Pendidikan	500 eks																			
							Penyusunan kalender Pendidikan	650 eks																			
							Pengelolaan Wabsite Dinas	12 bl																			
							Pendaftaran PPDB	45 sekolah																			
7.4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah						Pengelolaan dana JPD	14.500 siswa	Angka Putus Sekolah	0.004%	37,073,625,700	38,927,306,985		UPT JPD													
							Pengelolaan Beasiswa dan PIP	1500 siswa																			
							Pengelolaan Dana Tunggakan	100 siswa																			
							Pengelolaan PKH	75 siswa																			
7.5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA						Pengelolaan Retrivel	150 siswa	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95%	47,248,584,000	49,611,013,200															
							Pengelolaan APBS	318 sekolah																			
							Pengelolaan BOS	318 sekolah																			
							Pengelolaan BOSDA Negeri	129 sekolah																			
							Pengelolaan BOSDA Swasta	189 sekolah																			
							Pengelolaan Dana Bantuan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	318 sekolah																			
							Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	318 sekolah																			
							7.6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi												Workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	Jumlah sekolah inklusi	45 sek	1,442,982,000	1,515,131,100		UPT IINKLUSI
																				Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen						
Workshop pemenuhan Sarpras pendidikan inklusi	45 sek																										
Pengelolaan insentif GPK	110 GPK																										
Pendataan ABK di SPPI	1 dokumen																										
Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	100 guru																										
Assesmen siswa	150 siswa																										
Diklat vokasi membuat kue	15 orang																										
Diklat vokasi melukis kaca	35 orang																										
Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	35 orang																										
											151,755,898,440	159,343,693,362															

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
URUSAN WAJIB														
Urusan Kesehatan														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					3,912,457,808	4,303,703,589	1	Dinkes
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			Umbulharjo			Materai @ Rp. 6.000	400 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran, keuangan dan operasional perkantoran	100%	703,222,624	773,544,886	1	Dinkes
				Umbulharjo			Materai @ Rp. 3.000	250 lembar						
				Umbulharjo			Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat)	1 dokumen						
				Umbulharjo			Telepon untuk operasional Dinas, UPT Farm dan Alkes; Lab. Kualitas Air Mergangsan dapat dimanfaatkan	12 bulan						
				Umbulharjo			KIR kendaraan operasional Dinas Kesehatan tepat waktu	10 unit roda 4						
				Umbulharjo			Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu	19 unit roda 4						
				Umbulharjo			Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu	27 unit roda 2						
				Umbulharjo			Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu	17 unit roda 2						
				Umbulharjo			Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	5 unit roda 4						
				Umbulharjo			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 paket						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
				Umbulharjo			Retribusi kebersihan untuk Dinas, Lab. PKA, Puskesmas dan Pustu (Sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu	12 bulan						
							Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara	12 bulan						
				Umbulharjo			Alat Tulis Kantor	1 paket						
				Umbulharjo			Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas	3 paket						
				Umbulharjo			Surat-surat dinas tergandakan	992.034 lembar						
				Umbulharjo			Alat listrik dan elektronik Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer	13 kali 1 paket						
							Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	4 paket						
				Umbulharjo			Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan UPT Farmasi dan Alkes	24 eksemplar						
							Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	38 buku						
				Umbulharjo			Taman yang terpelihara	1 paket						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Pengelolaan keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,818,543,184	3,100,397,502	1	Dinkes
							Pengelolaan tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	14 bulan						
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi						Minuman Karyawan Dinas, UPT PJKD, UPT Farmasi, Lab PKA	33.880 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran, keuangan dan operasional perkantoran	100%	390,692,000	429,761,200	1	Dinkes
							Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi	11.804 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab	
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
							Makanan dan minuman untuk tamu  Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancar  Rapat koordinasi & konsultasi keluar Negeri dapat diselenggarakan dengan lancar	435 orang  96 ok  32 ok							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					347,954,400	382,749,840	1	Dinkes	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Umbulharjo			Gedung Dinkes, Lab. PKA, UPT Farmasi & RPG terpelihara	2 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	119,974,400	131,971,840	1	Dinkes	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Umbulharjo			Servis kendaraan bermotor Roda 4 sesuai aturan  Servis kendaraan bermotor Roda 2 sesuai aturan  Penggantian suku cadang roda 4  Penggantian suku cadang roda 2  BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend. (Roda 4, dan roda 2)	57 unit  81 unit  19 unit  28 unit  20.160 liter	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	227,980,000	250,778,000	1	Dinkes	
							BBM/ Gas berupa olie untuk oprs kend.(Roda 4, dan roda 2)	488 liter							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					245,500,000	270,050,000	1	Dinkes
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Umbulharjo			Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	12 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tepat waktu	100%	245,500,000	270,050,000	1	Dinkes
							Dokumen penyusunan Laporan Kinerja SKPD	12 dokumen						
							Dokumen RENSTRA	1 dokumen						
4	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	77					40,735,664,744	44,809,231,218	1	Dinkes
4.1	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I			Danurejan (Tegal panggung)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN I sesuai ketentuan	12 bulan	872,415,000	959,656,500	1	Dinkes
4.2	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II			Danurejan (Bausasran, Suryatmajan)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN-II sesuai ketentuan	12 bulan	608,935,931	669,829,524	1	Dinkes
4.3	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen			Gedongtengen			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GT sesuai ketentuan	12 bulan	1,490,562,534	1,639,618,787	1	Dinkes
4.4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I			Gondokusuman (Klitren, Demangan, Baciro)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-I sesuai ketentuan	12 bulan	1,270,646,090	1,397,710,699	1	Dinkes
4.5	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II			Gondokusuman (Terban, Kotabaru)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II sesuai ketentuan	12 bulan	748,414,298	823,255,728	1	Dinkes

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
4.6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan			Gondomanan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanna kesehatan perorangan Puskesmas GM sesuai ketentuan	12 bulan	965,296,715	1,061,826,387	1	Dinkes
4.7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis			Jetis			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas JT sesuai ketentuan	12 bulan	1,773,950,329	1,951,345,362	1	Dinkes
4.8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I			Kotagede (Prenggan, Purbayan)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-I sesuai ketentuan	12 bulan	1,493,899,796	1,643,289,776	1	Dinkes
4.9	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II			Kotagede (Rejowinagun)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-II sesuai ketentuan	12 bulan	924,910,200	1,017,401,220	1	Dinkes
4.10	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton			Kraton			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KT sesuai ketentuan	12 bulan	1,046,490,300	1,151,139,330	1	Dinkes
4.11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron			Mantrijeron			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MJ sesuai ketentuan	12 bulan	1,798,635,200	1,978,498,720	1	Dinkes
4.12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan			Mergangsan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MG sesuai ketentuan	12 bulan	1,789,459,906	1,968,405,897	1	Dinkes
4.13	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan			Ngampilan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas NG	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas NG sesuai ketentuan	12 bulan	853,658,482	939,024,330	1	Dinkes
4.14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman			Pakualaman			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas PA sesuai ketentuan	12 bulan	705,276,380	775,804,018	1	Dinkes

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
4.15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo			Tegalrejo			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas TR sesuai ketentuan	12 bulan	2,614,000,000	2,875,400,000	1	Dinkes
4.16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I			Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-I sesuai ketentuan	12 bulan	2,322,243,175	2,554,467,493	1	Dinkes
4.17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II			Umbulharjo (Semaki, Tahunan, Muja muju)			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-II sesuai ketentuan	12 bulan	1,283,739,592	1,412,113,551	1	Dinkes
4.18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan			Wirobrajan			Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB	12 bulan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas WB sesuai ketentuan	12 bulan	1,693,287,236	1,862,615,960	1	Dinkes
4.19	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I			Danurejan (Tegal panggung)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-I sesuai ketentuan	1 dokumen	1,107,829,888	1,218,612,877	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Danurejan I	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.20	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II			Danurejan (Bausasran, Suryatmajan)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-II sesuai ketentuan	1 dokumen	559,113,917	615,025,309	1	Dinkes

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Danurejan II	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen			Gedongtengen			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT sesuai ketentuan	1 dokumen	1,112,599,670	1,223,859,637	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gedongtengen	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I			Gondokusuman (Klitren, Demangan, Baciro)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I sesuai ketentuan	1 dokumen	955,141,780	1,050,655,958	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gondokusuman I	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen 1 dokumen						
4.23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II			Gondokusuman (Terban, Kotabaru)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II  laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan  laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga  laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan  laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II sesuai ketentuan  Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gondokusuman II	1 dokumen  1 paket	1,362,114,080	1,498,325,488	1	Dinkes
4.24	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan			Gondomanan			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM sesuai ketentuan	1 dokumen	786,646,579	865,311,237	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan  laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen  1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gondomanan	1 paket				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
4.25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis			Jetis			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT sesuai ketentuan	1 dokumen	1,132,019,423	1,245,221,365	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Jetis	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.26	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I			Kotagede (Prenggan, Purbayan)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I sesuai ketentuan	1 dokumen	476,723,000	524,395,300	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kotagede I	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II			Kotagede (Rejowinangun)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II sesuai ketentuan	1 dokumen	589,079,080	647,986,988	1	Dinkes

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kotagede II	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton			Kraton			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT sesuai ketentuan	1 dokumen	917,483,594	1,009,231,953	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kraton	1 paket				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.29	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron			Mantrijeron			Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketentuan	1 dokumen	999,562,200	1,099,518,420	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mantrijeron	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.30	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan			Mergangsan			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG sesuai ketentuan	1 dokumen	1,467,157,010	1,613,872,711	1	Dinkes

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mergangsan	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.31	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan			Ngampilan			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG sesuai ketentuan	1 dokumen	1,014,326,600	1,115,759,260	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Ngampilan	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.32	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman			Pakualaman			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA sesuai ketentuan	1 dokumen	806,199,239	886,819,163	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Pakualaman	1 paket				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen						
4.33	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo			Tegalrejo			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR  laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan  laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga  laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan  laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR sesuai ketentuan  Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Tegalrejo	1 dokumen  1 paket	603,240,000	663,564,000	1	Dinkes
4.34	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I			Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I  laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan  laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I sesuai ketentuan  Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo I	1 dokumen  1 paket	730,251,080	803,276,188	1	Dinkes

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II			Umbulharjo (Semaki, Tahunan, Muja muju)			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II sesuai ketentuan	1 dokumen	945,485,500	1,040,034,050	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo II	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
4.36	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan			Wirobrajan			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB	1 dokumen	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB sesuai ketentuan	1 dokumen	914,870,940	1,006,358,034	1	Dinkes
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Wirobrajan	1 paket				
							laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen						
							laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen						
5	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	65					36,108,503,450	39,719,353,795	1	Dinkes
5.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"			Mergangsan			Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama"	70%	31,598,679,025	34,758,546,928	1	Dinkes
5.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"			Mergangsan			Tersedianya pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama"	70%	4,509,824,425	4,960,806,868	1	Dinkes
6	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Prosentase mutu pelayanan kesehatan	80%					17,435,976,879	18,260,938,351	1	Dinkes
					Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%								
6.1	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan			14 Kecamatan di Kota Yogyakarta			Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar	800 orang	Semua Tenaga Kesehatan Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar	18 Puskesmas	536,420,896	590,062,986	1	Dinkes
							Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan	1 dokumen	Tersusunnya hasil Penilaian Kinerja Puskesmas	18 Puskesmas				
							Data hasil Penilaian kinerja puskesmas	1 dokumen	Tersusunnya data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	18 Puskesmas				
							Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2 dokumen	Tersusunnya Panduan Pengobatan Puskesmas	1 dokumen				
							Kajian Panduan Pengobatan Puskesmas	1 dokumen	Tersusunnya Penghitungan Jasa Pelayanan Puskesmas	1 dokumen				
							Kajian penghitungan jasa pelayanan puskesmas	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Laporan Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK	1 dokumen						
6.2	Pelayanan Kesehatan Khusus						Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji  Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus  Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani  Buku Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan	18 Puskesmas  1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen	Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan haji  Semua calon jamaah haji dilakukan pemeriksaan kebugaran jasmani  Tersedianya Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan	18 Puskesmas  500 orang  1 dokumen	381,532,900	419,686,190	1	Dinkes
6.3	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan						Dokumen MOU & Perwal Jamkesda  Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat mendapatkan Informasi mekanisme pelayanan Jamkesda  Laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda  Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe	2 dokumen  3.351 orang  1 dokumen  12 kegiatan	Cakupan layanan Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Cakupan wilayah desiminasi informasi mekanisme pelayanan jamkesda  Persentase kasus yang dijamin pembiayaan perawatan kesehatan  Cakupan faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	100%  45 kelurahan  100%  100%	15,682,899,250	17,251,189,175	1	Dinkes
							Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	1 dokumen	Cakupan FKTP milik Pemerintah yang melaksanakan pengelolaan dana kapitasi dan kegiatan anti Fraud sesuai ketentuan yang berlaku	18 Puskesmas				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk	1 dokumen	Cakupan wilayah mendapatkan informasi akreditasi Puskesmas	5 kecamatan				
							Petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi akreditasi Puskesmas	50 orang	Cakupan Puskesmas terakreditasi	100%				
							Laporan hasil monitoring - evaluasi Puskesmas terakreditasi	1 dokumen						
							Laporan hasil pendampingan akreditasi Puskesmas	1 dokumen						
6.4	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119						Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	12 dokumen	PSC 119 YES dapat beroperasi dalam melayani masyarakat	12 bulan	835,123,833	918,636,216		
7	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	99.88%					6,403,299,515	7,043,629,467	1	Dinkes
					Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	100%								
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)	92%								
					Cakupan Bayi yang diberi ASI eksklusif	63%								
					Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100%								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
					Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	22%								
					Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	44%								
					Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85%								
7.1	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat			14 Kecamatan di Kota Yogyakarta			Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan KIA dan Gizi	2 dokumen	Cakupan Balita ditimbang berat badannya (D/S)	85%	2,039,133,365	2,243,046,702	1	Dinkes
							Data Pemantauan Wilayah Setempat KIA, Gizi	24 dokumen	Cakupan Ibu Hamil mendapat Fe 90 tablet	90%				
							Jumlah Kader mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelayanan KIA, Gizi	249 kader	Cakupan Keluarga Sadar Gizi dan garam beryodium	90%				
							Jumlah Petugas mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelayanan KIA, Gizi	355 petugas	Cakupan K1	100%				
							Jumlah Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, RSKIA, RS mendapatkan Pembinaan Pelayanan KIA, Gizi	70 faskes	Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan	95%				
							Data Penjaringan/ Skrining Kesehatan Ibu dan Anak	2 dokumen	Deteksi faktor resiko oleh masyarakat	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Data Balita KEP yang Mendapat perawatan	12 dokumen	Cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita	90%				
							Laporan Hasil Pelaksanaan Lomba Baduta ASI	1 dokumen	Cakupan penanganan komplikasi obstetri dan neonatus	80%				
							Jumlah Posyandu melaksanakan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK	12 posyandu	Cakupan peserta KB aktif	76%				
7.2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan						Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	20 Lokasi ( 18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	Pengunjung Institusi Kesehatan terpapar program kesehatan	20 Lokasi ( 18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	2,933,171,221	3,226,488,343	1	Dinkes
							Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	Peserta Didik terpapar program kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)				
							Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)	Masyarakat terpapar program kesehatan melalui Tempat Ibadah	200 Lokasi (Masjid)				
							Jumlah Tempat-tempat Umum yang melaksanakan Promosi Kesehatan	10 lokasi	Pengunjung terpapar program kesehatan melalui tempat-tempat umum yang terpilih	10 lokasi				
							Jumlah Siaran Radio mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	12 kali siaran	Diterimanya pesan kesehatan dari media massa	12 bulan				
							Jumlah siaran TV mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	6 kali siaran	Tersedianya informasi posyandu balita, lansia, PHBS, UKS, sebagai dasar untuk perencanaan program	1 dokumen				
							Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	4 kegiatan (HTTS, Gebyar PHBS, GHS, Pameran Sekaten)	Jumlah kelurahan siaga mandiri	45 kelurahan				
							Media Cetak Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	4 media	Tersedianya layanan preventif dan promotif pada lansia di rumah sehat lansia	12 bulan				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen	Tersedianyan petugas penyuluh, kader dan <i>peer edocator</i> terlatih untuk bahaya rokok	3 kegiatan				
							Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	1 dokumen						
							Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen						
							Profil PHBS Data layanan lansia di rumah sehat lansia Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	1 dokumen 12 dokumen 3 kegiatan						
7.3	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja						Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2.000 sampel	Tersedianya data Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1,430,994,929	1,574,094,422	1	Dinkes
							Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	50 sekolah	Tersedianya data Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	1 dokumen				
							Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas	1 dokumen	Pedagang pasar dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan	1 kali				
							Data Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	Masyarakat pengguna pokmair mendapat air yang memenuhi syarat	1 dokumen				
							Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM ) dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan	1 dokumen	Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum	100%				
							Petugas sanitarian dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan	3 kali	Permasalahan kesehatan lingkungan sudah mempunyai payung hukum	1 dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Data pengelolaan limbah medis cair	1 dokumen	Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan kota sehat tertinggi	7 tatanan				
							Pengurus pokmair dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan	3 kali	Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat kerja	2 kali				
							Pengelola DAM dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan	3 kali	Persentase PKL pangan, jasa boga, rumah makan dan DAM memenuhi syarat kesehatan	100%				
							Jumlah sasaran penilaian kebersihan Puskesmas	18 Puskesmas						
							Dokumen raperda kesling	1 dokumen						
							Jumlah Puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan indoor	5 Puskesmas						
							Jumlah IPAL Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan	5 Puskesmas						
							Data lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Pengelola tempat kerja menerapkan prinsip kesehatan untuk pekerjanya	2 kali						
							Pengelola pedagang kaki lima pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	100 PKL						
							Pengelola jasadoga dan rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	60 sarana						
							Pengelola depot air minum dalam kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	30 sarana						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			1/2/3	1/2/3
8	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	55%					10,863,338,432	11,949,672,275	1	Dinkes
					Persentase Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berijin	80%								
					Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	95%								
					Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	85%								
8.1	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan			14 Kecamatan di Kota Yogyakarta			Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	180 sarana	Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal	100%	647,075,700	711,783,270	1	Dinkes
							Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3.000 tenaga	Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar mutu	90%				
							Tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya	11 dokumen	Terselesaikannya masalah perizinan tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta	90%				
							Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	11 dokumen	Sarana kesehatan memenuhi standar mutu	100%				
							Pengelola Fasilitas kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan	200 sarana	Terselesaikannya masalah perizinan lintas kabupaten	100%				
							Data permasalahan pelayanan regulasi dan sertifikasi pada jenis layanan fasyankes dan perseorangan	1 dokumen	Adanya juklak izin penyelenggara sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan sesuai peraturan perundangan	1 dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Dokumen Revisi Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan	600 orang	Sarana mengimplementasikan Perda sarana dan tenaga pelayanan kesehatan	85%				
							Pengelola fasyankes dan Tenaga Pelayanan Kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang perda Regulasi dan sertifikasi dan Sertifikasi Sarana Tenaga Kesehatan	90 orang Lintas Program	Sarana dan tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada	85%				
							Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar propinsi	1 dokumen	Sarana dan tenaga farmasi memenuhi standar minimal	100%				
							Sarasehan/Sosialisasi Perda Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemberdayaan serta Perijinan Bidang Kesehatan	27 regulasi	Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemberdayaan serta perizinan bidang kesehatan	450 orang				
							Regulasi tentang sertifikasi perizinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	5 dokumen						
8.2	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)			14 Kecamatan di Kota Yogyakarta			Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi	Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi	5 profesi	388,260,710	427,086,781	1	Dinkes
							Fasilitasi PKL mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan	Kelancaran pelaksanaan PKL mahasiswa institusi kesehatan di lingkunagn Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan				
							Dokumen penghitungan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 dokumen	Diketuainya jumlah kebutuhan SDM dinas kesehatan	100%				
							Inventarisasi dan pemecahan permasalahan SDM Kesehatan	12 bulan	Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan	12 bulan				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggung jawab
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Penilaian kompetensi tenaga kesehatan	6 bulan	Diketahuinya kompetensi tenaga kesehatan	6 bulan				
							Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS	10 orang	Cakupan dokter Puskesmas dengan kemampuan penanganan kasus trauma akut	36%				
							Dokter puskesmas mendapatkan sertifikat ACLS	9 orang	Cakupan dokter puskesmas dengan kemampuan penanganan kegawatan jantung	72%				
							Pembaruan Data SDM tingkat Kota Yogyakarta	2 kali	Update data SDM Kota Yogyakarta	2 kali				
							Dokter gigi puskesmas mendapatkan sertifikat BLS	18 orang	Cakupan Dokter gigi puskesmas dengan kemampuan penanganan kegawatdaruratan gigi	62%				
							Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat Dasar-Dasar AMDAL	1 orang	Penambahan jumlah personil dengan kemampuan dasar AMDAL	1 orang				
							Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat Penyusunan AMDAL	1 orang	Penambahan jumlah personil dengan kemampuan penyusunan AMDAL	1 orang				
							Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat Penilaian AMDAL	1 orang	Penambahan jumlah personil dengan kemampuan penilaian AMDAL	1 orang				
							Tenaga elektromedis mendapatkan sertifikat pelatihan teknis elektromedik	1 orang	Peningkatan kemampuan teknis petugas elektromedik	1 orang				
							Petugas sampling obat dan makmin mendapatkan pelatihan sampling obat, makanan, minuman	4 orang	Peningkatan kemampuan petugas dalam pelaksanaan sampling obat, makanan minuman	4 orang				
							Peserta Seminar/kursus/workshop	1 paket	SDMK mendapat sertifikat seminar/workshop	1 paket				
8.3	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman						Obat untuk pelayanan kesehatan	1 paket	Tersedianya obat dan terpeliharanya sarana penyimpan obat	12 bulan	9,828,002,022	10,810,802,224	1	Dinkes
							Dokumen pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan	15 dokumen	Dokumen pelaporan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan tahun berikutnya	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Data ketersediaan obat	4 dokumen	Tersedianya informasi keadaan dan kebutuhan alat kesehatan, obat dan bahan laboratorium di Dinkes Kota Yogyakarta	12 bulan				
							Data penggunaan obat generik	4 dokumen	Petugas kesehatan dapat menggunakan alat kesehatan, obat dan bahan laboratorium untuk pelayanan kesehatan	12 bulan				
							Data penggunaan obat rasional	4 dokumen	Alat Kesehatan sesuai dengan standart yang dipersyaratkan	12 bulan				
							Data hasil review formularium puskesmas	1 dokumen	Meningkatnya kemampuan tenaga kefarmasian dan analis kesehatan	100%				
							Reagensia dan alat laboratorium	1 paket	Dokumen dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengadaan	100%				
							Alat dan bahan medis pakai habis	1 paket	Penyelenggaraan review fornas berjalan sesuai rencana	100%				
							Alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan	1 paket	Tersedia dokumen revisi Formularium puskesmas	1 dokumen				
							Alat kesehatan terpelihara dan dikalibrasi	3 paket	Dokumen kompendium alkes tingkat Puskesmas sesuai dengan kebutuhan	1 dokumen				
							Ruang penyimpanan obat bebas dari hewan pengerat	19 tempat	Tersedia dokumen kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman	1 dokumen				
							Dokumen hasil seleksi obat dan alkes	2 paket	Diterbitkan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	1.000 sertifikat				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3	
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
							Peningkatan kapasitas tenaga analis laboratorium	1 kali		Hasil pemeriksaan laboratorium jajanan anak sekolah dan ruman makan yang disampling	1 dokumen				
							Peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian	5 kali							
							Data teknis pendukung pengadaan	4 dokumen							
							Review fornasi di tingkat kota Yogyakarta	1 kali							
							Usulan revisi formularium Kota Yogyakarta	1 dokumen							
							Laporan kompendium alkes tingkat Puskesmas Kota Yogyakarta	1 dokumen							
							Data unit layanan kefarmasian di Kota Yogyakarta termutakhir	1 dokumen							
							Data produsen alkes rumah tangga di Kota Yogyakarta	1 dokumen							
							PIRT, guru UKS dan Pedagang asongan mendapat pembinaan keamanan pangan	1.000 orang							
							Jajanan anak sekolah dan rumah makan diperiksa	100 sampel							
9	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Proporsi kasus TB yang berhasil diobati dalam program DOT (succes rate )	83.05%					1,965,759,059	2,162,334,965	1	Dinkes	
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%									
					Prevalensi HIV-AIDS	0.1%									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3				
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
9.1	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%					1,107,050,000	1,217,755,000	1	Dinkes				
					Persentase masyarakat yang melakukan deteksi dini penyakit tidak menular	5%												
					Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%												
					Persentase tersedianya data dan informasi kesehatan yang tepat dan lengkap	73%												
															Data DBD	12 dokumen	Prosentase penurunan kasus DBD	20%
															Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	400 focus	Prosentase peningkatan penemuan kasus TB Paru	20%
															Data survei angka bebas jentik kelurahan	45 data kelurahan	Prosentase peningkatan kesembuhan kasus TB Paru	20%
															Jumlah peralatan fogging focus DBD yang terpelihara	25 unit	Cakupan penanganan ISPA	100%
															Jumlah frekuensi <i>community deal</i> DBD	2 kali	Angka Kesembuhan Diare	100%
															Jumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk <i>crosscheck slide</i> TB	1.500 sampel	Kasus Penyakit Kusta tertangani	100%
						Data TB	12 dokumen	Kasus HIV/ AIDS tertangani	100%									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang	Tersedianya informasi untuk pengambilan langkah selanjutnya untuk program imunisasi	1 dokumen				
							Data tribulanan implementasi P2TB Tingkat Kota	4 dokumen	Praktisi swasta ikut berperan serta dalam pengendalian penyakit menular	1 dokumen				
							Data permasalahan TB-HIV	2 dokumen						
							Jumlah frekuensi jejaring internal petugas TB	4 kali	Tersedianya informasi untuk langkah tindak lanjut pencegahan kematian akibat penyakit menular	1 dokumen				
							Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan <i>on the job training</i>	30 fasyankes	Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, steakholder dll dalam upaya pengendalian penyakit menular	500 orang				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
							Jumlah fasyankes yang mendapatkan <i>on the job training</i> TB MDR	6 fasyankes	Penatalaksanaan penyakit menular di fasyankes dilaksanakan sesuai <i>evidence based</i> terbaru	30 fasyankes				
							Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA)	12 dokumen	Tersosialisasinya hasil pemantauan dan pengendalian masalah zoonosis	14 kecamatan				
						Data diare	12 dokumen							
						Jumlah data pelacakan kasus kusta	10 kasus							
						Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	320 data spesimen							
						Data tribulanan Aplikasi SIHA pada IMS	4 dokumen							
						Data imunisasi	12 dokumen							
						Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	200 sekolah							
						Jumlah frekuensi praktisi swasta	2 kali							
						Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas	6 dokumen							
						Masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular	500 orang							
						Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	172 orang							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			1/2/3	Penanggung jawab	
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur					Target
9.2	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa						Jumlah WUS yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA	900 orang	Prosentase rujukan kasus penyakit kanker ke fasilitas kesehatan yang sudah lengkap	15%	240,353,500	264,388,850	1	Dinkes
							Workshop kolaborasi diabetes Melitus dengan TB	100 orang	Terinformasikannya tentang penyakit tidak menular	100 orang				
							Peningkatan kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (POSBINDU) bagi kader	60 orang	Cakupan pengendalian kasus PTM	45 kelurahan				
							Penguatan Pos Pelayanan Terpadu (POSBINDU) bagi kader	140 orang	Diketuainya permasalahan PTM di Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							Data POSBINDU	12 dokumen	Masyarakat mampu mencegah terjadinya hipertensi bagi masyarakat	150 orang				
							Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th	500 orang	Petugas mendapatkan tambahan ilmu terkait penyakit tidak menular	40 orang				
							Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM	120 orang	Penjaringan pegawai yang menggunakan narkoba	6.000 orang				
							Data Evaluasi kegiatan PTM puskesmas	1 dokumen	Petugas memahami penanganan kesehatan jiwa	36 orang				
							Workshop pengendalian penyakit hipertensi bagi masyarakat	150 orang						
							Up date Knowledge Penyakit Tidak Menular	40 orang						
							Data hasil pemeriksaan urine narkoba PNS Pemkot	1 dokumen						
							Jumlah frekuensi pembinaan dan evaluasi penanganan kesehatan jiwa	6 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
9.3	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan						Laporan Analisis Surveilans Epidemiologi Kesehatan	3 laporan	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	618,355,559	680,191,115	1	Dinkes
							Laporan Pemantauan Kewaspadaan Dini KLB	4 dokumen	Persentase ketepatan, kelengkapan dan verifikasi alert dalam sistem kewaspadaan dini dan respon	90%				
							Laporan Kejadian Potensial KLB dan keracunan makanan	2 dokumen	Persentase ketepatan dan kelengkapan data dan informasi kesehatan	73%				
							Laporan Sistem Informasi Kesehatan	6 dokumen						
							Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan terpelihara	17 aplikasi						
							Server Sistem Informasi Kesehatan terpelihara	17 server						
							Database Sistem Informasi Kesehatan terpelihara	17 database						
	JUMLAH										118.018.454.287	128,901,663,499		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis	SKPD Penanggung
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Keg	Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
	Urusan Wajib													
	Perencanaan Pembangunan													
Urusan Wajib														
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH	Outcome : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,014,412,800	1,064,408,940		Sekretariat
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Kec. UH			1 Materai 3000 yang tersedia	340 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	464,347,100	486,839,955		
							2 Materai 6000 yang tersedia	290 buah						
							3 Frekwensi sewa mesin foto kopi	12 bulan						
							4 STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya	16 Unit						
							5 STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya	4 Unit						
							6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	1 Paket						
							7 Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							8 Frekwensi perbaikan peralatan kerja	46 kali						
							9 Alat Tulis Kantor yang tersedia	109 jenis						
							10 Jasa Penggandaan	70,000 lembar						
							11 Penjilidan	230 buku						
							12 Percetakan	5 jenis						
							13 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis						
							14 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	37 Jenis						
							15 Pengadaan mebelair Bidang TI	1 Paket						
														Diskominfo dan

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							16 Bahan Bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia	3 jenis						
							17 Pemeliharaan taman	1 paket						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		-	Kec. UH			1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	153,750,700	161,438,235	ok	
							2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN						
							3 Jasa Tenaga bantuan	4 orang						
1.3	Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH			1. Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	32 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	396,315,000	416,130,750	ok	
							2. Press Tour	1 kali						
							3. Makan dan Minum Yang Tersedia	115 Kali						
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH	Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					200,350,472	210,367,996		Sekretariat
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung /Bangunan Kantor			Kec. UH			1 Pembuatan front desk	1 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	49,211,472	51,672,046	ok	
							2 Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	1 unit						
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. UH			1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	151,139,000	158,695,950	ok	
							2. Roda 4 (empat ) Roda 2 (dua )	4 Unit 16 Unit						
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH	Outcome : Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					97,590,000	102,469,500		Sekretariat

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. UH			1. Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT, RKA DPA, Tapkin yang tersusun	4 Jenis	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	97,590,000	102,469,500	1	
							2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD	B				
							3 Pendidikan dan Pelatihan formal	16 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				
Urusan Komunikasi dan Informatika														
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH	Outcome :  Persentase aplikasi yang terintegrasi	30%		8%		8%	12,777,290,814	13,416,155,355		Bidang Teknologi dan Informatika
4.1	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika			Kec. UH			1 Terkelolanya website	24 unit	Kelancaran akses data	48 SKPD	799,225,000	839,186,250	1	Seksi Perangkat Lunak
							2 Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi	10 paket						
							3 Terlaksananya peningkatan kemampuan programmer	2 kali						
							4 Terlaksananya pengadaan hardware	1 paket						
							5 Terlaksananya pembangunan/pengembangan/redesain aplikasi	5 paket						
4.2	Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika			Kec. UH			1. monitoring jaringan informasi	12 kali	Kelancaran operasional perangkat hardware	155 lokasi	11,837,065,814	12,428,919,105	1	Seksi Perangkat Keras dan infrastruktur telematika
							2. Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan TI		Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi	211 lokasi				
							3 perawatan dan perbaikan server	12 kali						
							4 perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal	10 unit/bulan						
							5 perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet	45 keluhan/bln						
							6 Pengadaan belanja modal komputer pendukung Aplikasi E Gov	1 paket						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							7    pengadaan CCTV	1 paket						
							8    pengadaan perangkat free hotspot	1 paket						
							9    Jasa   koneksi internet							
							a    .Jasa   koneksi internet layanan E-Gov, 200 Mbps	12 bl						
							b    koneksi internet perpustakaan, 30 Mbps	12 bl						
							c    koneksi internet DPRD, 20 Mbps	12 bl						
							d    koneksi internet pendidikan , 50 Mbps	12 bl						
							e    koneksi internet sub domain, 50 Mbps	12 bl						
							f    koneksi internet non SKPD	12 bl						
							g    koneksi internet Pengelola TI	12 bl						
							10    Jasa   Koneksi Intranet Luar Komplek Balaikota	12 bulan						
							11    Pengadaan licency pengamanan jaringan	12 bulan						
							12    Virtual Server Privat (VPS)	12 bulan						
							14    Peningkatan Kualitas SDM Pengelola TI	6 kali						
							15    Pembangunan Jaringan optik luar komplek Balaikota	1 paket						
4.3	Pengembangan Smart City						Terkelolanya sistem informasi	26 unit			141,000,000	148,050,000		Seksi Pengembangan Smart City
5	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Tersebar se Kota Yogyakarta	Terwujudnya Pengelolaan Informasi Melalui semua media dan statistik	100%					1,670,961,765	1,754,509,853		Bidang Informasi dan Statistik
5.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi			Tersebar se Kota Yogyakarta			Pameran Sekaten	1 kali	Desemenasi dan distribusi Infromasi melalui media massa (majalah, radio, TV)	100%	1,417,451,965	1,488,324,563		Seksi Promosi, Publikasi dan Kemitraan Informasi
							Penerbitan Media Info Kota	6 kali	-Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media baru internet website					
							Penerbitan majalah Ayodya	2 kali	-Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media tradisional seperti pertunra					
							Pengelolaan Website Jogjakota.go.id	12 Bulan	-Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media interpersonal seperti tatap muka					

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat	12 Bulan	-Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media luar ruang seperti baliho, brosur leflet bulletin					
							Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Radio	1359 kali	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui melalui Media Radio					
							Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Televisi	466 kali	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Televisi					
							Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Luar Ruang	315 kali	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Luar Ruang					
							Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui PERTUNRA	3 kali	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui PERTUNRA					
							Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Kali	Tersusunnya dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta					
5.2	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik			Kec. UH			Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2017	1 dokumen	Tersedianya data penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta	100%	253,509,800	266,185,290		Seksi Statistik
						Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2017	1 dokumen							
						Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2017	1 dokumen							
						Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016	1 dokumen							
							Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2016	1 dokumen						
							Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen						
							Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2016	1 dokumen						
							Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen						
							Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen						
							Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen						
							Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen						
							Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2016	1 dokumen						
							Buku Indeks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2016	1 dokumen						
6	Program Peningkatan Komunikasi Publik	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Tersebar se Kota Yogyakarta	Terwujudnya Komunikasi Publik	100%					1,336,430,858	1,403,252,401		Bidang Komunikasi Publik
6.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Komunikasi dan Informasi		Tersebar se Kota Yogyakarta			Pengkajian Berita	1 kali	Desemenasi dan distribusi Infromasi melalui media massa (majalah, radio, TV)  -Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media baru internet website  -Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media tradisional seperti pertunra  -Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media interpersonal seperti tatap muka	100%	875,138,929	918,895,875		Seksi Humas dan Pelayanan Informasi Publik
							Sosialisasi Perda / Perwal	2 kali						
							Sosialisasi LPPD Akhir Tahun 2016	2 kali						
							Sosialisasi APBD Tahun 2017	2 kali						
							Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2016	1 kali	-Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media luar ruang seperti baliho, brosur leflet bulletin  Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di masyarakat di tingkat kecamatan					
							Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat	2 kali						
							Kerjasama penulisan	86 kali						
							Advetorial	1 kali						
							Ucapan Selamat	17 kali						
							Fasilitasi Jumpa Pers Wartawan	55 kali						
							Fasilitasi Peliputan Wartawan	44 kali						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6.2	Pengelolaan Keluhan dan Aduan			Tersebar se Kota Yogyakarta			Pegelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	12 Bulan	Desemenasi dan distribusi Infromasi melalui media massa (majalah, radio, TV)	100%	461,291,929	484,356,525		Seksi Pengelolaan Keluhan dan Aduan
							Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	12 Bulan	-Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media baru internet website					
							Dialog Interaktif Walikota Menyapa	360 kali	-Deseminasi dan disitrubusi informasi melalui media tradisional seperti pertunra					
7	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Presentase Pelayanan Pengamanan Informasi.	100%					897,958,200	1,198,838,520		Bidang Persandian dan Telekomunikasi
7.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi			Kec. UH			- Pengamanan Sinyal Frekuensi	11 bulan	Presentase pelayanan persandian, untuk pengamanan informasi	100%	371,745,000	408,919,500		Seksi Operasional Persandian dan Telekomunikasi
							- Pemeliharaan Peralatan Persandian	30 Unit				-		
							- Perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan billing	12 kali						
							- Perawatan dan perbaikan perangkat telepon	12 kali						
							- Perawatan dan perbaikan faximilli	12 kali						
							- perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone	12 kali						
							- Pembayaran pajak komunikasi radio (HT)	2 unit						
7.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi			Kec. UH			- Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta	55 JKS	Terlaksananya jaring komunikasi persandian	100%	494,813,200	566,734,520		Seksi Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
							- Forum Komunikasi Persandian	10 kali				-		
							- Pengadaan Perangkat Telekomunikasi	1 paket						
7.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika			Kec. UH			- Laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	1 dokumen	Tersusunnya penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	100%	31,400,000	32,970,000		Seksi Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika
JUMLAH											17,994,994,909	19,150,002,564		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.		- Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%			Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran lancar.	100%	2,225,802,005	2,448,382,206	1	DLH
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DLH			- Materai yang tersedia.	400 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	841,756,125	925,931,738	1	DLH
							- Pembayaran listrik.	12 bulan						
							- STNK kendaraan Roda 6	49 unit						
							- STNK kendaraan Roda 4	15 unit						
							- STNK kendaraan Roda 3	32 unit						
							- STNK kendaraan Roda 2	24 unit						
							- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 jenis						
							- Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							- Alat tulis kantor yang tersedia.	60 jenis						
							- Jasa percetakan.	4 jenis						
							- Jasa penggandaan.	40.000 lembar						
							- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia.	9 jenis						
							- Peralatan kantor yang tersedia.	20 jenis						
							- Peralatan rumah tangga yang tersedia.	10 jenis						
							- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia.	2 jenis						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Jasa perbaikan peralatan kerja.	12 jenis						
							- Jasa Keamanan kantor	12 bulan						
							- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.	9 jenis						
							- Pakaian kerja lapangan yang tersedia.	485 buah						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			DLH			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun.	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	1,030,297,880	1,133,327,668	1	DLH
							- Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola.	50 dokumen ASN						
							- Jasa tenaga bantuan (NABAN)	42 orang						
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi			DLH			- Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai.	347 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	353,748,000	389,122,800	1	DLH
							- Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi.	75 kali						
							- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	42 laporan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.	DLH	- Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.				Sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik.	100%	2,016,540,000	2,218,194,000	1	DLH
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			DLH			- Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor dan sektor.	7 sektor	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	80,575,000	88,632,500	1	DLH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			DLH			- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 2	22 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	1,935,965,000	2,129,561,500	1	DLH
						- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 3	35 unit							
						- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 4	15 unit							
						- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 6	46 unit							
						- Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional alat berat	1 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.	DLH	- Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100%			Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan meningkat .	100%	218,902,000	240,792,200	1	DLH
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			DLH			- Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran.	12 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu dan kualitas.	100%	218,902,000	240,792,200	1	DLH
							- Laporan kinerja SKPD.	15 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD.	B				
							- Diklat formal yang diikuti.	5 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.	100%				
4	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat.	DLH	- Indeks Pencemaran Udara	78,5 (Baik)					2,143,070,150	2,357,377,165	1	DLH
					- Indeks Kualitas Air	52 (Sangat Kurang)								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.1	Kajian Dampak Lingkungan			DLH			- Dokumen kajian tentang lingkungan hidup.	5 dokumen	Peningkatan jumlah dokumen kajian lingkungan hidup.	20%	849,027,200	933,929,920	2	DLH
							- Dokumen lingkungan yang disetujui.	850 dokumen	Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan.	17.00%				
4.2	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3			DLH			- Fasilitas konservasi air tanah yang terbangun/terpelihara.	100 unit	Peningkatan jumlah fasilitas konservasi air tanah.	52.94%	1,294,042,950	1,423,447,245	2	DLH
							- Usaha yang memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara B3	50 usaha	Peningkatan jumlah usaha yang memiliki izin TPS B3.	8.33%				
							- Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina.	40 usaha / kegiatan	Peningkatan jumlah usaha/kegiatan berpotensi pencemaran yang terbina.	68.75%				
5	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat.	DLH	- Penghargaan lingkungan yang diterima.	3 penghargaan					3,582,300,000	3,940,530,000		DLH
					- Tingkat pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha.	66.67%								
5.1	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup			DLH			- Sekolah dan PP yang dibina menjadi sekolah/PP berwawasan lingkungan.	- 25 sekolah - 2 PP	Seluruh sekolah dan PP berpredikat berwawasan lingkungan.	72.64%	1,720,000,000	1,892,000,000	1	DLH
							- Publikasi dan informasi tentang lingkungan hidup.	18 kali	Cakupan informasi LH meningkat.	20.00%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.2	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan			DLH			- Lokasi Kualitas udara (ambien roadsite, ambien permukiman, ambien indoor, ozon, uji emisi gas buang kendaraan) yang terpantau.	100 lokasi	Kualitas udara terpantau.	71.43%	615,000,000	676,500,000	2	DLH
							- Lokasi kualitas air yang terpantau.	300 lokasi	Kualitas air terpantau.	20.00%				
							- % usaha/kegiatan yang mentaati pengelolaan lingkungan perusahaan.	80%	Peningkatan jumlah usaha kegiatan yang mentaati pengelolaan lingkungan perusahaan.	2.00%				
5.3	UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan			DLH			- Jumlah sampel parameter kualitas air yang diuji.	300 sampel	Tersedianya data dan analisa hasil pemeriksaan kualitas air sungai / sumur.	1 dokumen	1,247,300,000	1,372,030,000	1	BLH
							- Parameter pengujian kualitas air terakreditasi yang terlayani.	5 parameter	Layanan pengujian lab meningkat.	20.83%				
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat.	DLH	- % luasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola.	0.22%					8,032,337,110	8,835,570,821		DLH
6.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik			DLH			- Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta yang tertata.	1.100 m2	Peningkatan luasan RTHP yang dikelola.	0.02%	1,216,120,540	1,337,732,594	2	DLH
							- Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta yang terpelihara.	24.345 m2	RTHP yang terpelihara kondisinya.	100%				
6.2	Pertamanan dan Perindang Jalan			DLH			- Taman kota yang direhab/direnov.	3 lokasi	Taman kota dalam kondisi baik.	63.63%	6,816,216,570	7,497,838,227	2	DLH
							- Pohon perindang yang ditanam di jalur hijau di Kota Yogyakarta.	500 pohon	Peningkatan jumlah pohon perindang.	2.86%				
7	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat.	DLH	- Tingkat pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat.	94.27%					20,165,699,100	22,182,269,010		DLH
					- Tingkat layanan penanganan sampah.	89.67%								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7.1	Pengurangan Sampah			DLH			- Kelompok masyarakat pengelola sampah yang dibina.	350 kelompok	Meningkatnya jumlah kelompok pengelola sampah.	20.69%	1,445,000,000	1,589,500,000	2	DLH
							- Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dan terkelola.	1 lokasi	Meningkatnya jumlah sampah yang dikelola di TPST 3R.	0.51%				
7.2	Penanganan Sampah			DLH			- Sarana dan prasarana penanganan sampah yang tersedia.	20 unit	Peningkatan Sarana dan prasarana penanganan sampah.	34%	10,313,000,000	11,344,300,000	2	DLH
							- Sarana prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPSS) yang direnovasi.	7 lokasi	Peningkatan pemeliharaan sarpras penanganan sampah.	6.93%				
7.3	Pemungutan Retribusi Kebersihan			DLH			- Pendapatan retribusi kebersihan.	Rp 3,308,000,000	Peningkatan pendapatan retribusi kebersihan.	4.97%	1,387,648,700	1,526,413,570	2	DLH
7.4	Pembersihan Sampah			DLH			- Pelayanan pengangkutan sampah dari TPS/Depo ke TPA.	100%	Terangcutnya timbulan sampah dari TPS ke TPA.	100%	7,020,050,400	7,722,055,440	2	DLH
							- Penyapuan jalan di Kota Yogyakarta.	526 penggal	Jalan di Kota Yogyakarta bersih dari sampah.	94.26%				
TOTAL											38,384,650,365	42,223,115,402		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	URUSAN PILIHAN													
	Urusan Pariwisata													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					523,537,460	537,547,461		Dinas pariwisata
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan			GK			Materai 6000 an yang tersedia	100 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	325,595,332	327,595,332		
							Materai 3000 an yang tersedia	400 buah						
							Jasa Pengiriman / Paket	-						
							STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit						
							STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 Unit						
							STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	6 Unit						
							tenaga teknis taman	1 orang						
							Retribusi sampah	12 bulan						
							Jasa Kebersihan Kantor	1 paket						
							bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 jenis						
							Alat tulis kantor Yang tersedia	49 jenis						
							Alat tulis kantor tersedia (UPT Malioboro)	49 jenis						
							Cetak Amplop Dinas	4000 exemplar						
							Cetak Amplop UPT Malioboro	1000 exemplar						
							Cetak Stop map Dinas	1600 exemplar						
							Cetak Stop map UPT	400 exemplar						
							Jasa Penggandaan / FC	134.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jasa perbaikan peralatan kerja	2 jenis						
							Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis						
							Komponen Komputer yang tersedia	22 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 jenis						
							Peralatan Rumah tangga yang tersedia	9 jenis						
							bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	-						
							Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1 paket						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			GK			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	99,040,128	109,050,129		
							- Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang terkelola	12 dokumen ASN						
							- Jasa Tenaga Bantuan	2 oarang						
1.3	Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			GK			Makan dan Minum yang tersedia untuk		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	98,902,000	100,902,000		
							a. Koordinasi	100 kali						
							b. Pegawai	242 kali						
							c. makan minum tamu	58 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							a. perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi	19 laporan						
							b. perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi	9 laporan						
							c. Konsultasi ke Jakarta	4 laporan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					125,352,540	127,352,540		Dinas pariwisata
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			GK			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	24,953,040	25,953,040		
							Gedung kantor Dinas	1 unit						
							Gedung kantor UPT malioboro	1 unit						
							Bahan baku bangunan	3 jenis						
							Bahan / Bibit Tanaman	2 jenis						
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional			GK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100,399,500	101,399,500		
							- Roda 4 - Roda 3 - Roda 2	4 unit 2 unit 11 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					90,730,000	91,735,000		Dinas pariwisata

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			GK			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA, dll )	6 Dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	100%	90,730,000	91,735,000		
							Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD)	6 Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	Pertumbuhan Ekonomi	Kunjungan Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata	3.000.000 orang				100%	12,862,807,857	13,066,551,856		Dinas Pariwisata
4.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata				Dukungan terhadap pencapaian jumlah kunjungan wisatawan	33%	1,695,139,000			
							A. Penyusunan Event Informasi Pariwisata							
							1. Calendar Event Mingguan	52 kali						
							2. Calendar Event Tahunan	1 kali						
							B. Pengembangan ODTW							
							1. Pengembangan Potensi Kampung Wisata	1 kali						
							2. Gelar Potensi	1 kali						
							3. Sosialisasi Kampung Wisata / Pokdarwis	1 kali						
							4. Workshop Kampung Wisata	1 kali						
4.2	Kegiatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata						1. Pameran Dalam Negeri		Dukungan terhadap pencapaian jumlah kunjungan wisatawan	33%	5,167,728,830			
						-	- Pameran Pariwisata	3 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
4.3	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro						- Travel Dialog	2 kali			5,999,940,027							
							- Jogja Kraetif	12 kali										
							- Jogja Night Carnival ( Pawai Budaya Jogja )	1 kali										
							- Famtrip	1 kali										
							- Jogja Day	1 kali										
							- Pembuatan Materi Pariwisata	6 jenis										
							- Pelayanan Informasi	2 jenis										
							- Promosi Media Masa	3 kali										
							- Pemilihan Dimas Diajeng Yogyakarta	1 kali										
							2. Promosi Luar Negeri											
							- Pameran Pariwisata	2 kali										
							- Promosi Media Masa	1 kali										
							3. Kerjasama Pemasaran Pariwisata											
							- TPO	1 kali										
							- Java Promo	1 kali										
							- Pengiriman Misi Promosi Pariwisata	2 kali										
							- Perikatan Kerjasama Pariwisata	2 kali										
							- Penjajagan Pariwisata	2 kali										
							- Workshop dan seminar Pariwisata	12 kali										
							4. Survey dan Analisa Pasar											
							- Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan	2 kali										
							A. Pengelolaan Keamanan Kawasan Malioboro							Dukungan terhadap pencapaian jumlah kunjungan wisatawan	33%			
							1. Pengamanan Kawasan Malioboro	60 orang										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							2. . Pengawasan CCTV	12 bendel laporan						
							3. Pengurusan Frekuensi Radio pancar ulang/HT	1 kali ijin						
							B. Pengelolaan Kebersihan Kawasan Malioboro							
							1. . Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl.Malioboro	11.209 m2 dan 18.230 m2 /12 bln						
							2. Penyapuan TKP I	12 bulan						
							3. Penyemprotan Jalan dan trotoar	200 kali						
							C. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Malioboro							
							1. Pemeliharaan Taman dan Pergola	1 paket						
							2. Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro	1 paket						
							3. Pemeliharaan panggung mobile	1 buah						
							4. Pemeliharaan CCTV	1 ruang kendali, 22 cctv						
							5. Pemeliharaan Studio Radio dan jaringan bawah tanah	1 studio dan jaringannya						
							6. Prunning	2 kali						
							D. Pengelolaan Informasi Kawasan Malioboro							
							1. Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro	12 bulan / laporan						
							2. Pengelolaan Pengaduan	1 paket						
							E. Peningkatan SDM Kawasan Malioboro							
							1. Pembinaan PKL	1 kali						
							2. Pembinaan Angkutan Non Mesin	1 kali						
							3. Pembinaan Lesehan	1 kali						
							4. Pembinaan Seniman Malioboro	1 kali						
							5. Pembinaan guide kawasan Malioboro	1 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							6. Laporan hasil kunjungan konsultasi/undangan/ promosi	3 laporan konsultansi, 1 lap study banding						
							F. Pengelolaan Pendapatan Parkir TKP							
							1. Cetak blanko	8 jenis						
							2. pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2	12 bulan						
5	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	Lama Tinggal Wsatawan meningkat	Kota Yogyakarta	Rata -rata lama tinggal wisatawan meningkat	2 hari				100%	5,001,278,040	5,170,519,040		Dinas Pariwisata
5.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif			Kota Yogyakarta			1. Kajian Ekonomi Kreatif	1 kali	Dukungan Terhadap Peningkatan rata rata lama tinggal	50%	1,831,500,000			
							2. Gelar Potensi Ekonomi Kreatif	3 kali						
							3. Pembinaan Usaha Pariwisata	40 kali						
							4. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata	40 kali						
							5. Survey Kepuasan Wisatawan	1 dokumen laporan						
							6. Penghitungan lama tinggal wisatawan	1 dokumen laporan						
							7. Penyusunan Dosier Jogja Creatif City	1 dokumen laporan						
5.2	Kegiatan Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata			Kota Yogyakarta			1. Pentas kangen Jogja	10 kali	Dukungan Terhadap Peningkatan rata rata lama tinggal wisatawan	0.5	3,169,778,040			
							2. PMPS	1 kali						
							3. Pentas Atraksi Wisata di kampung wisata	17 kali						
							4. Pentas Kawasan	10 kali						
							5. Pentas Event Khusus	40 kali						
							6. Pengiriman Misi Kesenian							
							- Luar DIY	1 kali						
							- Dalam DIY	1 kali						
							7. FGD Atraksi Wisata	1 kali						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	Program Pengembangan Taman Pintar	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	Kec. Gondomanan	Pengunjung Taman Pintar Meningkat	800,000 orang				100%	13,000,000,000	13,000,000,000		Dinas Pariwisata
6.1	Kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar						Layanan Taman Pintar	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan jumlah kunjungan Taman Pintar	100%	13,000,000,000	13,000,000,000		
JUMLAH TOTAL											31,603,705,897	31,993,705,897		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			1/2/3	1/2/3	
	Wajib														
	Pemberdayaan Masyarakat Desa														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					440,000,000	484,000,000			
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa, Peralatan, dan perlengkapan kantor			Umbulharjo			- Materai 6000 yang tersedia	300 bh;	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	165,000,000	181,500,000	Berjalan	KPMP	
							- Materai 3000 yang tersedia	600 bh							
							- STNK roda 4 yang terbayar	3 unit							
							- STNK roda 2 yang terbayar	6 unit							
							- Alat Kebersihan Kantor yang tersedia	4 Kantor							
							- Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	12 unit komputer							
							- Alat tulis kantor yang tersedia	kertas dan buku, alat tulis, bahan penghapus, dan tationery							
							- Jasa pengandaan	300.000 lembar							
							- Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	24 Titik lampu dan peralatan koneksinya							
							- Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia	supplies 6 unit printer							
							- Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Pengisian Tabung gas 2 TPA dan KPMP							
							- Bahan Bacaan & Peraturan Per UU yang tersedia	16 Buku							
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Umbulharjo			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	110,000,000	121,000,000	Berjalan	KPMP	
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	25 Dokumen ASN							
							Jasa Tenaga Bantuan	3 org							
1.3	Kegiatan Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi			Umbulharjo			Makanan & Minuman yang tersedia untuk pegawai	23 pegawai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	165,000,000	181,500,000	Berjalan	KPMP	
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					283,000,000	311,300,000			

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
2.1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Umbulharjo			Jasa pemeliharaan Gedung / bangunan kantor/tempat	4 gedung kantor	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD		208,000,000	228,800,000	Berjalan	KPMP
2.2	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan rutin/Berkala Kend			Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana		75,000,000	82,500,000		
							a. Roda 4 (empat)	3 unit						
							a. Roda 2 (dua)	6 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					67,000,000	73,700,000		
3.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Umbulharjo			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	67,000,000	73,700,000	Berjalan	KPMP
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	nilai akuntabilitas kinerja SKPD	BB				
							Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	50 org	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				
4	Program Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun		Swadaya murni masyarakat meningkat	5%					2,890,000,000	3,179,000,000		
4.1	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan			Umbulharjo			Pendampingan Kelembagaan LPMK dan RW	45 Kel, 14 Kec			1,660,000,000	1,826,000,000	Berjalan	KPMP
							Pendampingan Kelembagaan Pokjanal Posyandu	1 Gugus tugas						
							Pendampingan Kelembagaan PKK (sekretariat, honor lembaga, tpa beringharjo, tk pkk)	1 TP PKK, 14 Kec, 45 Kel						
4.2	Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			Umbulharjo			Pendataan Swadaya Murni Masyarakat	45 Kel, 1 Dokumen			1,230,000,000	1,353,000,000	Berjalan	KPMP
							Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kegiatan						
							Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa(TMMD)	2 Tahap						
							Gelar TTG (TeknologiTepat Guna)	1 Pemenang						
							Peningkatan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	90 org						
							Pendampingan 10 Program Pokok PKK	1 TP PKK						

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan								Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	1/2/3			1/2/3	
							Pendampingan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan	1 Kegiatan								
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun		Persentase kasus kekerasan dalam Rumah Tangga	0.49%					1,500,000,000	1,650,000,000				
5.1	Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender			Umbulharjo							795,000,000	874,500,000	Berjalan	KPMP		
							Pendampingan pemenuhan penelaian Anugreah Parahita Ekapraya	1 Anugerah								
							Pendampingan Anggaran Responsif Gender	51 SKPD								
							Pendampingan Kelompok Sadar Gender	1 Gugus Tugas								
							Pennyusunan Data terpilah	1 Dokumen								
							Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan (GOW, DWP, Tpa Prabhadarma), Hari Besar Perempuan	14 Organisasi								
							Penyusunan Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender	1 Dokumen								
							Penyusunan Database Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Database								
							Penyusunan Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak pada situasi bencana	1 Dokumen								
5.2	Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan			Umbulharjo			Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha	27 Kelompok			705,000,000	775,500,000	Berjalan	KPMP		
							Pendampingan P2W-KSS	6 Kelurahan					-			
							Pendampingan UP2K-PKK	45 Kelurahan								
							Pendampingan Usaha Perempuan Kepala Keluarga Korban kekerasan	20 KK								
							Pendampingan GSI	1 Pokjatap								
							Pendampingan FPKK	1 Forum								
							Pendampingan Gugus Tugas PTPPO	1 Gugus Tugas					-			
6	Program Perlindungan Anak	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun		Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	2.00%					1,600,000,000	1,760,000,000				
6.1	Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak			Umbulharjo			Pendampingan Forum Anak	1 Kegiatan			735,000,000	808,500,000	Berjalan	KPMP		
							Peringatan Hari Anak	1 Kegiatan								
							Pendampingan TMPI	1 Kegiatan					-			
							Pendampingan dan pembentukan KLA - KRA	1 Kegiatan								
							Pengelolaan SIGA	1 Kegiatan								
							Pengelolaan Data Korban Kekerasan	1 Kegiatan								
6.2	Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak			Umbulharjo				1 Kegiatan			565,000,000	621,500,000	Berjalan	KPMP		
							Sosialisasi KHA									
							Pendampingan Kegiatan Anak	1 Kegiatan					-			
							Penanganan Korban Kekerasan	1 Kegiatan					-			
								1 Kegiatan								
							Pembentukan Puskesmas Ramah Anak									
							Pembentukan Sekolah Ramah Anak	1 Kegiatan								
							Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak	1 Kegiatan								
							Pendampingan KPAI-D	1 Kegiatan								

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
6.3	UPT P2TP2A			Umbulharjo			Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20 Kasus			300,000,000	330,000,000	Berjalan	KPMP
							Monev Penanganan Korban	500 data kasus						
JUMLAH											6,780,000,000	7,458,000,000		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,729,870,260	1,816,363,773		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
1.1	Penyediaan Jasa , Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			- Materai	450 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	778,181,900	817,090,995	sdg berjalan	sdg berjalan
				- Perangko	5600 buah					sdg berjalan	
				STNK roda 4 yang terbayar	4 unit					sdg berjalan	
				STNK roda 2 yang terbayar	15 unit					sdg berjalan	
				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis					sdg berjalan	
				Jasa kebersihan kantor	12 bulan					sdg berjalan	
				Alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis					sdg berjalan	
				Jasa percetakan	16 jenis					sdg berjalan	
				Jasa penggandaan	90.000 lbr					sdg berjalan	
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis					sdg berjalan	
				Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis					sdg berjalan	
				Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis					sdg berjalan	
				Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	34 jenis					sdg berjalan	
				Peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis					sdg berjalan	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
				Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
				Penyediaan pakaian dinas harian	90 stel					sdg berjalan	
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	503,522,860	528,699,003		
				Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	61 dokumen ASN						
				Jasa tenaga bantuan	20 orang						
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Penyediaan makanan dan minuman pegawai,rapat maupun tamu :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	448,165,500	470,573,775	sdg berjalan	
				- Makan dan minum pegawai	90 orang						
				- Makan dan minum rapat	10 kali						
				- Makan dan tamu	8 kali						
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 laporan					sdg berjalan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					315,128,000	330,884,400		Dinas Penanaman Modal dan
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung / Bangunan Kantor			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor	6 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	173,185,000	181,844,250	sdg berjalan	
2.1	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	141,943,000	149,040,150	sdg berjalan	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					81,324,000	85,390,200		dinzin
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			- Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran ( renstra, reiew renstra, Renja, PK, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun )	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	81,324,000	85,390,200	sdg berjalan	
				- Laporan kinerja SKPD (LAKIP,Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun)	6 jenis laporan	Nilai akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Penerbitan Izin sesuai standar pelayanan perizinan	91%					3,189,050,985	4,966,041,974		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
4.1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan			1. Pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan	400 izin	1. Meningkatnya kegiatan membangun bangunan gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki izin melalui dinas perizinan	400 izin	755,682,125	793,466,231	sdg berjalan	
				2. Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di dinzin	2798 izin	2. Meningkatnya kepastian hukum di bidang pembangunan gedung dan usaha di Kota Yogyakarta	2.798 izin				

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
				3. Analisa gambar situasi di dinas perizinan	950 GS	3. Selesaiya gambar situasi IMB di Dinas Perizinan	950 GS				
				4. Analisa struktur bangunan gedung	129 IMB	4. Perhitungan struktur bangunan gedung sesuai dengan standar nasional indonesia (SNI)	129 IMB				
				5. Pengolahan berkas permohonan IMB	1.300 berkas	5. Meningkatnya kepastian berkas yang terkendali	1.300 berkas				
				6. Klinik pelayanan perizinan	129 berkas	6. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang	129 berkas				
				7. Koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun	10 dok	7. Terselasaikannya dokumen gambar dan uraian pertelaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10 dok			baru	
				8. Koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen pertelaan	10 dok	8. Selesaiya dokumen gambar dan pertelaan sesuai persyaratan teknis dan adminstrasi	10 dok				
4.2	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan			1. Pelayanan pemohon izin	8000 pemohon	Izin terbit tahun 2017	8000 izin	2,029,770,000	2,131,258,500	sdg berjalan	
				2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin	8000 berkas						
				3. Pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice Planing	500 berkas						
				4. Laporan hasil pengendalian administrasi perizinan	12 laporan						

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
4.3	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan			1. Pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin 2. Laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin 3. Penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	8000 pemohon 12 kali laporan 8 kel izin	Izin terbit tahun 2017	8000 izin	403,598,860	423,778,803	sdg berjalan	
5	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	Kesesuaian antara izin dengan pelaksanaan kegiatan	60					668,263,930	701,677,127		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
5.1	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta			1. Pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas PM dan Perizinan 2. Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin 3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota Yogyakarta 4. Proses pencermatan permohonan SLF	1200 izin 1 dokumen 1 dokumen 50 permohonan	1. Terlaksananya pengawasan izin yang diterbitkan di Kota Yogyakarta 2. Tersusunnya dokumen hasil analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin 3. Tersusunnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan perizinan di kota yogyakarta 4. Terlaksananya proses pencermatan permohonan SLF	1200 Berita Acara 1 dok 1 laporan 50 dok	478,582,930	502,512,077	sdg berjalan	
5.2	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta			1. Pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat	60 pengaduan	1. Terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat	60 pengaduan	189,681,000	199,165,050	baru	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
				2. Analisa permasalahan pengaduan perizinan	1 dokumen	2. Tersusunnya dokumen hasil analisa permasalahan pengaduan perizinan	1 dokumen				
				3. Pengecekan lokasi pengaduan	30 pengaduan	3. Terlaksananya pengecekan lokasi pengaduan perizinan	30 berita acara				
				4. Evaluasi permasalahan perizinan	1 dokumen	4. Tersusunnya laporan hasil evaluasi permasalahan perizinan	1 laporan				
6	Program Pengembangan Penanaman Modal	Peningkatan investasi	10%					1,201,652,430	1,261,735,052		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan			Pemeliharaan :		Tersedianya:		584,452,430	613,675,052	sdg berjalan	
				Aplikasi SIM PM dan Perizinan, SPIPISE,SIPO,Simjaki	4 aplikasi	Aplikasi SIM PM dan Perizinan, SPIPISE, SIPO, Simjaki	1 aplikasi				
				Sub domain Dinas PM dan Perizinan	1 sub domain	Sub domain Dinas PM dan Perizinan	1 sub domain				
				Pengembangan SIM PM dan Perizinan, SPIPISE,SIPO,Simjaki	1 unit	Tersedianya SIM di bidang Perizinan	1 unit				
				Penyediaan hardware	2 macam	Tersedianya hardware	24 unit				
				a. Printer dot matrik	4 unit						
				b. Monitor	10 unit						
				Berkas arsip perizinan terkelola dengan baik	31 jenis izin	Tersedia berkas arsip dalam pelayanan data	92.400 berkas				

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
				Ahli media (scan & entri) dokumen gambar pada berkas IMB	19.482 lembar	Tersedianya alih media ( scan & entri ) gambar pada berkas IMB	19,482				
				Penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur	7500 berkas	Tersusunnya arsip in aktif	7.500 berkas				
				Duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur	220 pemohon	Terlayaninya duplikat dan legalisir izin	220 pemohon				
6.2	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal			Identifikasi potensi PM	1 dok	Teridentifikasinya potensi PM	1 dok	296,655,000	311,487,750	sdg berjalan	
				Bahan Promosi	1 jenis	Terpenuhinya bahan promosi	1 jenis				
				Pelayanan informasi PM	1 dok	Terlaksananya pelayanan informasi PM	1 dok				
6.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM			Pengendalian pelaksanaan PM	1 dok	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan PM	1 dok	320,545,000	336,572,250	sdg berjalan	
				Monev kegiatan PM	1 dok	Terlaksananya monev kegiatan PM	1 dok				
				Sosialisasi dan forum komunikasi di bidang PM	2 kali	Terselenggaranya sosialisasi dan forum komunikasi di bidang PM	2 kali				
7	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan perizinan	Ketersediaan Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100%					891,111,730	935,667,317		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
7.1	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan perizinan			1. Kajian peraturan dibidang palayanan perizinan	3 dokumen	Kepastian hukum dalam bidang perizinan	100%	362,794,950	380,934,698	sdg berjalan	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
				2. Draft rancangan peraturan daerah/peraturan walikota/keputusan kepala dinas	4 dok draft						
				3. Sosialisasi peraturan perizinan melalui :							
				- Dialog interaktif melalui radio	3 x siaran						
				- Sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan kelurahan	2x pertemuan						
				- Penyederhanaan perizinan IMB dan izin gangguan	Proses izin lebih sederhana						
				- Penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec. Sesuai dengan ketentuan	Proses izin IMB dan HO sesuai dengan SPP dan SOP						
7.2	Pengelolaan Data Perizinan			1. Berkas arsip perizinan terkelola dengan baik	31 jenis izin	1. Tersedianya berkas arsip dalam pelayanan data	92.400 brks	277,762,000	291,650,100	sdg berjalan	
				2. Alih media (scan dan entri) dokumen gambar pada berkas IMB	19.482 lbr	2. Tersedianya alih media (scan dan entri) dokumen gambar pada berkas IMB	19.482 lbr				
				3. Penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur	7.500 berkas	3. Tersusutnya arsip in aktif	7.500 berkas			baru	
				4. Duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur	220 pemohon	4. Terlayani duplikat dan legalisir izin	220 pemohon				
7.3	Pengukuran Kinerja Pelayanan			1. Pengukuran kinerja melalui :		Peningkatan kinerja pelayanan perizinan	81,26 (skor)	528,316,780	554,732,619	sdg berjalan	
				- Survey IKM	6000 resp						
				- Pelaksanaan IHT	6 kali						
				2. Pemantapan pelembagaan ISO pada Dinzin kota Yogyakarta	1 dok						
TOTAL								8,076,401,335	10,097,759,842		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

Rencana Perangkat Daerah: Dinas Sosial														
No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,261,695,754	1,324,780,542		
1.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			Umbulharjo			materai 6000 yang tersedia	1400 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	709,938,450	745,435,373	sedang berjalan	
						materai 3000 yang tersedia	2300 buah							
						Jasa pengiriman/paket	175 paket							
						STNK Roda 4 yang terbayar	17 unit							
						STNK Roda 2 yang terbayar	35 unit							
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis							
						Jasa kebersihan kantor	12 bulan	100%		sedang berjalan				
						Jasa Tenaga Keamanan	7 orang							
						Alat tulis kantor yang tersedia	66 jenis	100%		sedang				
						Jasa Percetakan	2 jenis	100%		sedang				
						Jasa penggandaan	393,751	100%		sedang				
						Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 jenis			berjalan				
						Pembayaran listrik	12 bulan							
						Pembayaran telepon	12 bulan							
						Bahan bacaan/surat kabar	3 jenis	100%		sedang				
						Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	4 jenis	100%		sedang				
						Jasa Perbaikan peralatan kerja	3 jenis							
						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	32 jenis							
						Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	4 kali			berjalan				
						jasa pemeliharaan Taman	12 bulan							
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Umbulharjo			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	293,757,304	308,445,169	sedang	
						Dokumen Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen							
						Jasa Tenaga Bantuan	11 orang	100%		sedang				
1.3	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Umbulharjo			Makan dan minum yang tersedia untuk a. koordinasi	54 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	258,000,000	270,900,000	sedang berjalan	
						b pegawai	90 orang			sedang				
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 laporan			sedang berjalan				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%			738,655,000	775,587,750		Dinsosnakertrans
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	177,295,000	177,295,000	sedang	Dinsosnakertrans
2.2	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Umbulharjo			1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional a. roda 4 (empat)	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	561,360,000	561,360,000	sedang	
						b. roda 2 (dua)	35 unit							
						c. Roda 3	1 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					99,565,000	104,543,250		Dinsosnakertrans
3.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Umbulharjo			1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : renstra, renja, PK, RKA, DPA	7 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program		99,565,000	104,543,250	sedang berjalan	
						2. Laporan Kinerja SKPD : LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, SKM, SPIP	5 laporan							
						3. Profil SKPD	1 dokumen							
						4. Penyusunan SPP	1 dokumen							
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	70%					4,152,913,304	4,360,558,969		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.1	Kegiatan Perlindungan Sosial			Umbulharjo			1. Jumlah Anak Panti Asuhan se Kota Yk yang mengikuti forum Kreativitas	550 anak			862,614,378	905,745,097		Seksi Perlindungan Sosial
						2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana Bantuan Korban Bencana	12 kali							
						3. Jasa Piket Tagana	365 hari							
						4. Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan	80 orang							
						5. Forum Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial	2 kali							
							7. Laporan Pelaksanaan Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta	1 kali						
							8. Laporan Pelaksanaan Workshop Komisi Daerah Lanjut Usia	15 kali						
4.2	Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial			Umbulharjo			1. Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Asistensi Sosial	250 orang			955,103,966	1,002,859,164		Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial
						2. Jasa Monitoring dan Evaluasi Distribusi Rastra	14 kali							
						3. Jasa Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kali							
						4. Laporan Hasil Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki KMS	800 orang							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							5. Laporan Hasil Evaluasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)	1 kali						
							6. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan						
							7. Jenazah Terlantar Yang Dimakamkan	40 Jenazah						
							8. Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta	125 orang						
4.3	Kegiatan Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo			Umbulharjo			Anak terlantar yang dilayani	30 anak			888,891,728	933,336,314		UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo
4.4	Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma			Umbulharjo			Jompo terlantar yang dilayani	70 Lansia			1,446,303,232	1,518,618,394		UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Budhi Dharma"
5	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun		Prosentase PMKS yang tertangani	70%					1,226,317,318	1,287,633,184		Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
5.1	Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Umbulharjo			1. Panyandang disabilitas yang mengikuti kursus kerajinan dan mendapatkan bantuan modl usaha	15 orang			482,082,992	506,187,142		Seksi Rehabilitasi Sosial
							2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang						
							3. Keluarga dengan anak disabilitas yang tergabung dalam FKKADK/Paguyuban Keluarga dengan Disabilitas	5 lembaga						
							4. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang						
							5. Klien Pemasarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	40 orang						
							6. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihandan medapatkan bantuan modal usaha	20 orang						
							7. Anak rentan hidup di Jalan yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha	20 orang						
							8. Masyarakat peserta penanganan anjal, dan gepeng	14 kecamatan						
							9.Anak jalanan yang mendapatkan motivasi	60 orang						
							10.Gelandangan Pengemis yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang						
							11.Penyandang Disabilitas memperingati hari kelahirannya	500 orang						
							12.Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang						
							13. Penyandang Sakit Jiwa yang dikirim ke RS Jiwa	50 orang						
							14. Penguatan sosial psikologis korban Napza dan HIV AIDS	20 orang						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.2	Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Umbulharjo			1. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 2. Permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas 3. Bayi Terlantar yang ditangani dan Rekomendasi yang diberikan untuk Pengangkatan anak 4. Surat Rekomendasi bagi PMKS 5. Advokasi penanganan PMKS 6. KUBE FM yang memperoleh Pembinaan Lanjut (Binjut) 7. Jasa KIE KUBE FM dan USEP KM bagi pengurus 8. LKM KUBE FM dan USEP KM yang memperoleh pendampingan 9. Pendampingan KUBE FM dan USEP KM 10. Penyusunan Profil KUBE FM 11. Peringatan HDI	1 unit 8 kali 25 bayi 300 orang 100 kali 10 KUBE FM 6 Kegiatan (125 KUBE FM,56 USEP KM) 6Kegiatan 10 orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan			744,234,326	781,446,042		Seksi Advokasi dan Pendampingan
6	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun		Persentase PSKS yang aktif	80%					1,959,993,394	2,057,993,064		Bidang Pemberdayaan Sosial
6.1	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS			Umbulharjo			1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial 2. Data base PSKS 3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi 4. Perwal Pendataan Keluarga Sasaran jaminan Perlindungan Sosial 5. Kepwal Parameter Keluarga Sasaran jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen			1,218,829,768	1,279,771,256		Seksi Data dan Informasi Sosial
6.2	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)			Umbulharjo			1. PSM petugas verifikasi data yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelolaan Data 2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar 3. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut 4. Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan 5. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN 6. PSM, Karang Taruna, LKS, TKSK berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta 7. Optimalisasi PSKS dengan : - Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial - Karang Taruna yang dibina	150 orang 80 orang 80 orang 45 orang 100 anak 5 Jenis kejuaraan  80 orang 45 Kelurahan			741,163,626	778,221,807		Seksi Pemberdayaan Sosial
							- PSM yang dibina - LKS yang dibina	45 Kelurahan 30 lembaga						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- WKSBM yang dibina	22 buah						
							- TKSK yang dibina	2 kegiatan						
							- Peserta Workshop PSKS	75 orang						
							- Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk	12 bulan						
							8. Peserta Sosialisasi Peraturan tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial dan Undian Berhadiah	120 orang						
							9. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pendafta	140 orang						
							10. KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta	30 orang						
TOTAL											9,439,139,770	9,911,096,759		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan	100%					1,119,304,582	1,119,304,582		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			Kec. Umbulharjo			Materai 6000 yang tersedia	950 lbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	476,306,370	476,306,370		
						Materai 3000 yang tersedia	2550 lbr							
						Jasa Pengiriman / Paket	175 paket							
						STNK roda 4 yang terbayar	6 unit							
						STNK roda 3 yang terbayar	0 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	29 unit							
						bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	69 jenis							
						alat tulis kantor yang tersedia	153 jenis							
						barang cetakan dan penggandaan	654,600 lbr							
						komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan							
						Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	2 jenis							
						Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia	4 jenis							
						Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9 jenis							
						Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	18 jenis							
						Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135 kali							
						Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	2 jenis							
						Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan							
1.2	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan perkantoran			Kec. Umbulharjo			Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	242,748,212	242,748,212		
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	14 dokumen ASN						
							Jasa Tenaga bantuan	8 orang						
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi			Kec. Umbulharjo			rapat koordinasi	111 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400,250,000	400,250,000		
						tamu	1,990 orang							
						pegawai	50 orang							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	87 laporan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					475,296,000	475,296,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec Umbulharjo			Pemeliharaan Gedung Dinas Koperasi	1 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	146,410,000	146,410,000		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec			kendaraan roda 4	6 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	328,886,000	328,886,000		
							kendaraan roda 3	0 unit						
							kendaraan roda 2	29 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					140,922,500	140,922,500		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec Umbulharjo			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	140,922,500	140,922,500		
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat		Kenaikan omset pertahun	10%					1,249,999,930	1,249,999,930		
					Kenaikan aset pertahun	10%								
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi			UH			1. Penyuluhan dan Bimbingan Teknik:		1. Kepastian hukum bagi kelompok dan peningkatan teknis pengelolaan koperasi	10 klp, 110 kop	504,467,450	504,467,450		
							- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok pra koperasi	10 Kelompok						
							- Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi	30 Koperasi						
							- Bimbingan Kelembagaan Koperasi	20 Koperasi						
							- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP	30 Koperasi						
							- Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi	30 Koperasi						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target
						2. Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah	20 Koperasi	2. Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi pengurus/pengawas manajemen syariah	20 Koperasi					
						3. Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah	20 Koperasi	3. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan DPM	20 Orang					
						4. Sosialisasi Dewan Pengawas Syariah	20 Koperasi	4. Peningkatan pemahaman peran DPS Dewan Syariah Nasional	20 Orang					
						5. Pelatihan Sistem Manajemen Koperasi bagi koperasi syariah	20 Koperasi	5.Penerapan Sistem Manajemen koperasi sesuai ketentuan	20 Koperasi					
						6. Sosialisasi perkoperasian di 14 Kecamatan	14 kecamatan	6. Peningkatan pengetahuan perkoperasian masyarakat	14 Kecamatan					
						7. Sosialisasi BPJS dan Perpajakan	30 orang	7. Peningkatan keikutsertaan koperasi pada program penjaminan dan perpajakan	30 orang					
						8. Workshop / Sarasehan dalam rangka Harkop ke 70	50 orang	8. Peningkatan pengetahuan pengelolaan dan pengembangan koperasi	50 orang					
						9. Monitoring dan Evaluasi Koperasi Syariah	15 Kopsyah	9. Tersedianya data perkembangan dan inventarisasi permasalahan kopsyah di Yogyakarta	15 Kopsyah					
						10. Lomba Tangkas Trampil Perkoperasian	15 siswa SMP, 15 siwa SMA, 5 PT	10. Peningkatan pengetahuan perkoperasian bagi siswa/mahasiswa	15 siswa SMP, 15 siswa SMA, 5 PT					
						11. Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke 70	2 Koperasi	11. Partisipasi peringatan Hakopnas ke 70	2 Koperasi					
						12. Monev Koperasi yang belum RAT	30 Koperasi	12. Peningkatan melaksanakan RAT oleh koperasi	30 Koperasi					
						13. Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif	10 Koperasi	13. Peningkatan kelembagaan dan usaha koperasi	10 Koperasi					
						14. Lomba Koperasi berprestasi menurut kelompok	5 koperasi 4 jenis	14. Peningkatan tatakelola koperasi	5 koperasi 4 jenis					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	Kota Yogyakarta			Monitoring dan Evaluasi	17 macam	Data Perkembangan Program Pembiayaan dan Bantuan	17 macam	745,532,480	745,532,480			
							1. Program Dana Bergulir APBD	11 LKM	1. Program Dana Bergulir APBD	11 LKM					
							2. Program BBM	21 LKM/ Kop	2. Program BBM	21 LKM/ Kop					
							3. Program MAP	2 LKM/ Kop	3. Program MAP	2 LKM/ Kop					
							4. Program Agribisnis	2 LKM/kop	4. Program Agribisnis	2 LKM/kop					
							5. Program P3KUM	21 LKM/kop	5. Program P3KUM	21 LKM/kop					
							6. Program DB Syariah	5 Kop	6. Program DB Syariah	5 Kop					
							7. Program Mitigasi	7 LKM/ Kop	7. Program Mitigasi	7 LKM/ Kop					
							8. Program PERKASA	1 LKM/kop	8. Program PERKASA	1 LKM/kop					
							9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan	72 LKM/ Kop	9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan	72 LKM/ Kop					
							10. Pinjaman Daerah MKPL	5 Kop	10. Pinjaman Daerah MKPL	5 Kop					
							11. Program Dana Bergulir DIY	30 Kop	11. Program Dana Bergulir DIY	30 Kop					
							12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL	8 Kec	12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL	8 Kec					
							13. UED SP	25 UED SP	13. UED SP	25 UED SP					
							14. BUKP	14 BUKP	14. BUKP	14 BUKP					
							15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan	20 Kop	15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan	20 Kop					
							16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU	5 Kop	16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU	5 Kop					
							17. Penerima LPDB	9 Kop	17. Penerima LPDB	9 Kop					
							Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM	5 Kegiatan	Pembinaan Usaha Koperasi dan UKM	5 Kegiatan					
							1. Penilaian Kesehatan Koperasi	75 koperasi	Data tingkat kesehatan koperasi	75 Koperasi					
							2. Pengawasan Koperasi								
							- Pengawasan Koperasi dilapangan	20 Koperasi	Pembinaan tatakelola koperasi	20 Koperasi					
							- Pembinaan dan pengawasan koperasi head to head	5 Koperasi	Intensifikasi tatakelola koperasi	5 Koperasi					
							3. Klinik Koperasi Sehat	1 Kegiatan	1. Konsultansi, Pendampingan dan atau Kebijakan terkait Program Perkuatan bagi Koperasi, LKM dan BUKP	1 Kegiatan					
							- Perangkat komputer untuk operator KKS	1 paket							
							- Forum updating data KKS	100 koperasi							
							- Penyusunan studi kebijakan pembukaan kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas	1 paket							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							- Forum komunikasi pembina, assosiasi, dan lembaga gerakan koperasi	4 kali							
							4. Gelar Produk Koperasi dan UKM	8 Koperasi	4. Sarana promosi melalui Gelar Produk Koperasi dan UKM	8 Koperasi					
							5. Cooperatif Fair	4 Koperasi	5. Sarana promosi melalui Cooperatif Fair	4 Koperasi					
							6. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	14 BUKP	6. Pengelola BUKP bertambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan	14 BUKP					
							7. Jogja Expo	4 Koperasi	7. Sarana promosi produk koperasi melalui Jogja Expo	4 Koperasi					
							8. Gelar Potensi dan Produk koperasi dalam rangka Hari Koperasi	20 Koperasi	8. Sarana Promosi melalui Gelar potensi dan Produk Koperasi dalam Rangka Hari Koperasi	20 Koperasi					
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Ekonomi	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun		Meningkatnya omset	5%					2,849,989,880	2,849,989,880			
					Meningkatnya nilai program	10%									
5.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK			Kota Yogyakarta			Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK	8 kali	Kemitraan UMKM dan stakeholder terjalin baik	240 UMKM	1,250,000,000	1,250,000,000			
							UMK Promo	4 kali	Meningkatnya inovasi dan Produk unggulan UMK	16 UMKM					
							Gebyar UMK	1 kali	Meningkatnya Produk UMK	44 UMKM					
							Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK	2 kali	Meningkatnya Pemasaran UMK	30 UMKM					
							Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK	8 kali	Terjalannya Kemitraan UN	8 UMKM					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK			Kota Yogyakarta			Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp ) IV	1 kali/paket	Bertambahnya pelaku Aneka Usaha	40 UMKM	1,599,989,880.00	1,599,989,880		
				Kota Yogyakarta			Pengembangan wawasan Dekranasda	1 Kali	Menambah wawasan pengurus dan member dekranasda	40 UMKM			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Gathering kemitraan member dekranas	1 kali	Silaturahmi dan tukar pengalaman antar member dekranasda	200 UMKM			Baru	
				Kota Yogyakarta			Ajang promosi dekranas pameran	2 kali	Sarana informasi dan promosi produk UMKM	1 paket			Baru	
				Kota Yogyakarta			Pemasaran Produk dalam Kota member Dekranas	4 orang ,2 loka	Produk member Dekranasda dapat terpasarkan di gerai kriya dan XT Square	11 bulan, 40 UMKM			Lanjutan	
				Jawa			Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja	500 eksemplar	Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja	250 eksemplar			Lanjutab	
				Kota Yogyakarta			Cetak Buku batik warna alam	500 eksemplar	Buku batik warna alam	200 eksemplar			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			IUM	14 Kec	Pelaku Usaha semakin paham pentingnya legalitas usaha mikro dan kecil	14 Kec, 2 kali				
				Kota Yogyakarta			Operasional Pusat Pengembangan UMKM	5 org/11bln	Pelayanan di Griya UMKM	11 Bln			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM	3 org x 11 bln	Konsultasi Bisnis bagi UMKM	300 UMKM			Lanjutan	
				Kota Yogyakarta			Up dating data base UMKM	1 paket	Bertambahnya Up date data base UMKM	4000 UMKM			Baru	
				Kota Yogyakarta			Pengembangan produk UMKM di luar Daerah	2 kali	Adanya pasar baru untuk mempromosikan	3 lokasi			Lanjutan	
				Jakarta			Indonesia Fashion Week (IFW)	1 paket	Pelaku usaha fashion mempromosikan produknya	4 stand, 4 UKM				
				Kota Yogyakarta			Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil	1 paket	Pelaku usaha termotivasi untuk pemasaran	14 Kec, 30 UKM				
				Kota Yogyakarta			Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM	1 paket	Dokumen Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM	1 dokumen				
				Kota Yogyakarta			Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM	3 kali	Kebijakan dan Peraturan pemerintah pusat dapat diterapkan di daerah/Kota Yogyakarta	3 kali				
				Kota Yogyakarta			Studi komparasi Hasil Kajian	3 kali	Materi baru untuk inovasi	3 lokasi				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun								4,282,716,500		Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
6.1	Kegiatan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja			Kota Yogyakarta			Pencari Kerja yang dilatih melalui:				2,527,617,600	2,527,617,600		Seksi Pengembangan
							Pelatihan MTU :							
							Pelatihan Teknisi HP	16 orang						
							Pelatihan Sablon/Percetakan	16 orang						
							Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fot	16 orang						
							Pelatihan Bengkel Mobil	16 orang						
							Pelatihan Institusional :							
							Satpam	40 orang						
							Stir Mobil dan SIM A	60 orang						
							Perhotelan	25 orang						
							Front Office	32 orang						
							Travel Agent	16 orang						
							Pembuatan Kue Roti	32 orang						
							Tata Boga	32 orang						
							Tata Rias Kecantikan	16 orang						
							Tata Rias Pengantin	16 orang						
							Tata Rias Pengantin Paes Ageng	16 orang						
							Pelatihan Menjahit Dasar	16 orang						
							Spa Terapis	16 orang						
							Menjahit Mahir	16 orang						
							Menjahit kebaya dan Surjan	16 orang						
							Pelatihan untuk Difabel	16 orang						
							Pelatihan Teknik Pendingin	16 orang						
							Pelatihan Cleaning Service	16 orang						
							Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon	16 orang						
							Pelayanan Perdagangan Retail	16 orang						
							Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	16 orang						
							Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	16 orang						
							Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 orang						
							Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalamannya	169 orang						
							Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK	20 orang						
							Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi Instruktur LPK	20 orang						
							Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK	20 orang						
							LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK						
							LPK yang memperoleh penilaian Kinerja	20 LPK						
							LPK yang memperoleh pembinaan (2 kali)	20 LPK						
6.2	Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja			Kota Yogyakarta			1. Calon tenaga kerja terseleksi	500 orang			1,269,832,050	1,269,832,050		Seksi Rimbungan
							2. Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja	350 orang						
							3. Daerah penempatan AKAD yang mendapat komunikasi dan monitoring (Job canvasing)	8 lokasi						
							4. Laporan hasil temu konsultasi BKK,PPTKIS, PPTKS	4 laporan						
							5. Tenaga kerja mandiri (TKM) yang terbentuk	7 angkatan @16 orang						
							6. Laporan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL, AKAD dan AKAN	14 kec						
							7. Peserta padat karya infrastruktur	48 orang						
							8. Data penganggur Kota YK yang tersedia	1 dokumen						
							9. Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	100 perusahaan						
							10. Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online	15 sekolah						
							11. Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015	1 dokumen						
							12. Bursa kerja (Job fair)	1 kali						
6.3	Kegiatan Penempatan Transmigrasi			Kota Yogyakarta			1. Calon transmigran trampil Pra PDU Pertanian	15 KK			485,266,850	485,266,850		Seksi Pengembangan
							2. Calon transmigran yang mendapat pengarah dan perpindahan	10 kali						
							3. Transmigran memperoleh pengarah tentang transmigrasi	10 kali						
							4. Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat	5 kali						
							5. Calon transmigran yang terealisir penempatannya	15 KK						
							6. Lokasi penjajagan/checking/monitoring dan pengawalan transmigrasi dengan daerah penempatan	9 lokasi						
							7. Calon transmigran berkualitas	80 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							8. Calon transmigran yang siap berangkat	60 orang						
							9. Uang saku, alat dan bibit pertanian yang tersedia	15 KK						
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun								1,599,897,950	1,599,897,950		Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan			Kota Yogyakarta			1. Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	11 Bulan			660,626,500	660,626,500		Seksi Kesejahteraan
							2. Pembinaan, Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	40 perusahaan						
							3. Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial	40 perusahaan						
							4. FGD Jaminan Sosial	2 kali						
							5. Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	3 kali						
							6. THR Keagamaan bagi pekerja yang dipantau pembayaran	1 kali						
							7. Sosialisasi Penetapan UMK 2018	1 kali						
7.2	Kegiatan Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			Kota Yogyakarta			Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN .	3000 siswa			939,271,450	939,271,450		Seksi Perselisihan
							Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	40 kasus						
							Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 perusahaan						
							Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	40 perusahaan						
							Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 kesepakatan						
							Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh.	1 buah						
							Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 kali						
							Laporan hasil Temu Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.	1 buah						
							Verifikasi SP/SB.	1 kali						
							Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	1 buah						
							Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain.	11 Bulan						
							TOTAL							

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya daya dukung pengembangan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	KEC. UH													
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			KEC. UH	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					3,115,174,540	3,426,691,994		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor						UMBULH ARJO			Materai yang tersedia	1300 helai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1,045,694,200	1,150,263,620	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN
										Jasa Pengiriman surat	60 kali		100%				
										STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	64 unit		100%				
										Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	22 unit, 2 kali						
										Nomor Polisi (Plat nomor) kendaraan dinas/operasional yang diganti	1 unit						
										Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	11 jenis		100%				
										Jasa kebersihan Kantor dan gudang	12 laporan						
										Jasa cuci/laundry	12 kali						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC	10 unit, 2 kali		100%				
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan Komputer	13 unit						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan Printer	10 unit, 2 kali						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT	48 buah						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan Mesin Ketik	13 buah, 2 kali						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang Elektronik	5 unit, 2 kali						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera	8 buah						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan Laptop	7 unit						
										Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air	2 unit						
										Alat Tulis Kantor yang tersedia	64 jenis		100%				
										Jasa percetakan	13 jenis		100%				
Jasa penggandaan	449.170 lembar																

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
										Jasa penjiilidan	100 buku						
										Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 jenis		100%				
										Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	18 jenis		100%				
										Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	17 jenis						
										Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	13 jenis		100%				
										Buku bacaan perpustakaan yang tersedia	12 buku						
										Surat kabar yang tersedia	12 bulan (4 jenis tiap bulan)						
										Pakaian dan sepatu dinas harian pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi	245 stel		100%				
										Pakaian dan sepatu dinas lapangan beserta kelengkapannya terpenuhi	245 stel						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Keuangan						UMBULH ARJO			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan dan barang yang tersusun (SPP,SPM,SPJ,Laporan akuntansi & Laporan persediaan barang)	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1,593,772,340	1,753,149,574	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN
										Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	54 Dokumen ASN		100%				
										Jasa tenaga bantuan							
										a. Pol PP	73 orang (14 bulan)						
										b. Dan ops lap (polisi)	1 orang (12 bulan)						
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi						UMBULH ARJO			Minuman harian pegawai yang tersedia	242 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	475,708,000	523,278,800	sedang berjalan	DINAS KETERTIBA
										Makanan dan minuman rapat yang tersedia	172 sesi		100%				
										Makanan dan minuman tamu yang tersedia	24 sesi						
										Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	27 laporan						
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			KEC. UH	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					991,781,000	1,090,959,100		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung/Bangunan Kantor									Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	75,900,000	83,490,000	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional						UMBULHARJO			Jasa service kendaraan dinas/operasional	64 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	915,881,000	1,007,469,100	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN
										Kendaraan dinas/operasional yang diganti suku cadangnya	57 unit						
										BBM dan Pelumas kendaraan dinas/operasional yang tersedia	70.764 liter						
										Kendaraan tidak bermotor yang terawat dan terpelihara	13 unit						
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		KEC. UH	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					76,369,500	84,006,450		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD						UMBULHARJO			Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	20 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	76,369,500	84,006,450	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN
										Laporan kinerja yang tersusun	28 dokumen						
4	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			KEC. UH	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	80%					3,958,939,965	4,354,833,962		
4.1	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi						Kecamatan se-Kota Yogyakarta			Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi	1000 tersangka	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara pro yustisi	100%	1,359,425,000	1,495,367,500	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN
										Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan	700 dokumen						
										Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa	8 kasus						
										Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah	7 kasus						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target					
										Penjemputan tersangka dalam daerah	24 kasus						
										Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS	15 orang						
4.2	Operasi Ketertiban Umum						Kecamat an se- Kota Yogyakar ta			Operasi Gugus Ramadhan dilaporkan	20 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi	100%	2,599,514,965	2,859,466,462	Nama Kegiatan Baru	DINAS KETERTIBAN
									Operasi Penindakan Hukum Terpadu dilaporkan	80 laporan							
									Operasi Jogobaran dilaporkan	28 laporan							
									Operasi Penertiban Mandiri di Kawasan Jogja Utara dan Jogja Selatan dilaporkan	12 laporan							
									Operasi penertiban gabungan dilaporkan	96 laporan							
									Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah	20 orang							
									Operasi Tertib puntung Rokok dilaporkan	10 laporan							
									Operasi Tertib kawasan bebas Rokok dilaporkan	20 laporan							
									Operasi Tertib cukai Rokok dilaporkan	10 laporan							
5	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			KEC. UH	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Cakupan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60%					5,934,708,000	6,528,178,800		
5.1	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus						Kecamat an se- Kota Yogyakar ta			Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot dilaporkan	137 laporan	Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	5,214,903,000	5,736,393,300	Nama kegiatan baru	DINAS KETERTIBAN
										Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara dilaporkan	2 laporan						
										Pengamanan tempat penting milik Pemkot dilaporkan	12 laporan	Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di Kawasan Khusus Kota Yogyakarta	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
										Kegiatan monitoring penjagaan khusus terlaporkan	288 laporan							
										Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus terlaporkan	12 laporan							
5.2	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat						Kecamatan se-Kota Yogyakarta			Piket Intel Pol.PP terlaporkan	730 laporan	Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	719,805,000	791,785,500	Nama kegiatan baru	DINAS KETERTIBA ..	
									Mediasi kasus pelanggaran perda	4 laporan								
									Kegiatan monitoring dan penyelidikan terlaporkan	150 laporan								
									Patroli Bina Pelajar terlaporkan	32 laporan								
									Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung terlaporkan	24 laporan								
									Patroli sambang wilayah terlaporkan	72 laporan								
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			KEC. UH	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Persentase keakurasian Pol PP dalam bertindak	60%					467,995,780	514,795,358			
6.1	Peningkatan Kapasitas Pol.PP						UMBULHARJO			Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	33 laporan	Meningkatnya kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP	100 orang	309,223,280	340,145,608	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN	
										Tes kesamaptaan	1 dokumen	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan PPNS dan Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda	40 orang					
										Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 laporan							
										Lintas Alam bagi PPNS dan Pol.PP	2 laporan							
										Pemahaman peraturan perundang-undangan	11 dokumen							
										Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang							
										Workshop Pol.PP	2 dokumen							
										Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 dokumen							
										Penyusunan Profil Sat Pol PP	100 buku							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6.2	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan						UMBULH ARJO			Hasil kajian penegakan peraturan perundang-undangan yang tersusun	5 dokumen	Tersedianya hasil kajian dan resume peraturan perundang undangan	37 perda	158,772,500	174,649,750	sedang berjalan	DINAS KETERTIBAN
									Hasil kajian rancangan produk hukum daerah	10 dokumen							
									Hasil kajian penanganan aduan	7 dokumen							
									Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada pakar hukum	4 dokumen							
									Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun	7 dokumen							
									Hasil naskah kerjasama yang tersusun	8 dokumen							
7	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT			KEC. UH	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Persentase partisipasi kampung dalam perlindungan masyarakat	60%					3,915,881,045	4,307,469,150		DINAS KETERTIBAN
7.1	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas						UMBULH ARJO			Pembekalan Sat Linmas dilaporkan	12 laporan	Meningkatnya kemampuan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta	100%	2,079,398,565	2,287,338,422	Nama kegiatan baru	DINAS KETERTIBAN
									Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas dilaporkan	24 laporan							
										Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas dilaporkan	1 laporan	Terkendalnya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%				
										Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi	450 stel						
										KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi	1.200 buah						
										Pengamanan wilayah dilaporkan	365 laporan						
										Piket rescue linmas dilaporkan	365 laporan						
										Pengamanan pemilukada dilaporkan	3 laporan						
										Penanganan musibah dan bencana dilaporkan	36 laporan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7.2	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib						Kecamat an se- Kota			Operasional Duta Ketertiban dilaporkan	2688 laporan	Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	38.613 orang	1,836,482,480	2,020,130,728	sedang berjalan	DINAS KETERTIBA N
										Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	60 laporan						
										Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib	180 laporan						
										Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	15 kampung						
										Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib dilaporkan	6 laporan						
										Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib dilaporkan	21.600 Laporan						
JUMLAH														18,460,849,830	19,296,869,449		

**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif sesuai SE	Prakiraan Maju	Prakiraan Maju sesuai SE	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						
	Urusan Wajib Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik yang baik													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					814,819,455	894,819,455	839,264,039	864,441,960	sedang berjalan	Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Kec. UH			<div><div>– Materai Rp. 3000</div><div>– Materai Rp. 6000</div><div>– Perangko</div><div>– Jasa Pengiriman</div><div>– Pembayaran Jasa Komunikasi</div><div>– STNK roda 4 yang terbayar</div><div>– STNK roda 2 yang terbayar</div><div>– Jasa Kebersihan Kantor</div><div>– Jasa Perbaikan peralatan kerja</div><div>– Alat tulis kantor yang tersedia</div><div>– Jasa Percetakan</div><div>– Jasa Penggandaan</div><div>– Jasa Penjilidan</div><div>– Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia</div><div>– Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia</div></div>	<div><div>400 buah</div><div>400 buah</div><div>150 buah</div><div>1 kali</div><div>12 bulan bulan</div><div>18 unit</div><div>4 unit</div><div>12 bulan</div><div>7 jenis</div><div>55 jenis</div><div>3 jenis</div><div>91,000 lembar</div><div>350 buku</div><div>13 jenis</div><div>17 jenis</div></div>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	337,086,671	417,086,671	347,199,271	357,615,249	sedang	Dinas

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif sesuai SE	Prakiraan Maju	Prakiraan Maju sesuai SE	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						
							<div><div>– Peralatan rumah tangga yang tersedia</div><div>– Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia</div><div>– Buku Kependudukan/Capil</div></div>	<div>7 jenis</div> <div>3 jenis</div> <div>10 buku</div>								
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran			Kec. UH			<div><div>– Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan Akuntansi tersusun</div><div>– Dokumen administrasi kepegawaian terkelola</div><div>– Jasa tenaga bantuan</div></div>	<div>4 jenis</div> <div>63 dokumen ASN</div> <div>6 orang</div>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	174,638,784	174,638,784	179,877,948	185,274,286	sedang berjalan	Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil
1.3	Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH			<div>Makan dan Minuman yang tersedia untuk :</div> <div><div>– Pegawai</div><div>– Koordinasi</div><div>– Makan minum Tamu Dinas</div><div>– Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</div></div>	<div>63 orang</div> <div>88 kali</div> <div>151 kali</div> <div>38 laporan</div>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	303,094,000	303,094,000	312,186,820	321,552,425	sedang berjalan	Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kec. UH	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	100%					290,165,000	210,165,000	298,869,950	307,836,049		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung /Bangunan Kantor			Kec. UH			<div>Pemeliharaan Gedung/ Kantor :</div> <div><div>– Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat</div></div>	<div>3 jenis</div>	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100,325,000	45,325,000	103,334,750	106,434,793	sedang berjalan	Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			<div>Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</div> <div><div>– Kendaraan roda 2</div><div>– Kendaraan roda 4</div></div>	<div>17 unit</div> <div>4 unit</div>	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	189,840,000	164,840,000	195,535,200	201,401,256	sedang berjalan	Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif sesuai SE	Prakiraan Maju	Prakiraan Maju sesuai SE	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Capaian kinerja dan Keuangan	100%					152,978,500	152,978,500	157,567,855	162,294,891		
4.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. UH			1. Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun  2. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Review RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, RKPA, DPA, DPPA, TAPKIN yang tersusun  3. Penyusunan SOP Adminduk  4. Pelaksanaan pembinaan teknis adminduk	7 dokumen  8 dokumen  1 dokumen  1 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD  Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran  Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	152,978,500	152,978,500	157,567,855	162,294,891	sedang	Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil
5.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH	Persentase Pelayanan Dokumen dan Surat - Surat Kependudukan	90%					1,301,625,970	1,301,625,970	1,340,674,749	1,380,894,992		
5.1	Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk			Kec. UH			1. Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT  2. Pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk  3. Pelayanan Percepatan KTP-EL  4. Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk  5. Pelaksanaan Mobile KTP EL untuk lansia dan keterbatasan fisik 6. Mobile KIA untuk pelajar SLTA  7. Penilaian dan Penghapusan Arsip Adminduk  8. Pengadaan blanko / formulir pendaftaran penduduk	150 orang  14 kecamatan  14 kecamatan  18 lokasi  45 Kelurahan  12 sekolah  46 bendel  16 jenis	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat - surat kependudukan	100%	601.098,040	601.098,040	619.130.981	637.704.911		Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif sesuai SE	Prakiraan Maju	Prakiraan Maju sesuai SE	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						
5.2	Kegiatan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			Kec. UH			1. Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk 2. Penyelenggaraan Sosialisasi Adminduk 3. Penyelenggaraan verifikasi Rentan Adminduk 4. Pendataan Penduduk Non Permanen	20 laporan 45 kegiatan 150 orang 3,148 RT/RW	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat - surat kependudukan	100%	700,527,930	700,527,930	721,543,768	743,190,081		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
6.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil			Kec. UH	Persentase Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	100.0%					936,605,110	936,605,110	964,703,263	993,644,361		
6.1	Kegiatan Pelayanan Kelahiran dan Kematian			Kec. UH			1. Pelayanan Proses Pencatatan Kelahiran – Surat Keterangan Kelahiran 2. Pelayanan Proses Pencatatan Kematian – Surat Keterangan Kematian – Surat AV 3. Penataan & Pengelolaan Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil 4. Pemutakhiran Register Lama 5. Pengadaan Dokumen Non Security Printing Pencatatan Sipil 6. Restorasi Register Akta 7. Percepatan Pelayanan Akta di wilayah 8. Pelayanan Pencatatan kelahiran Kerja sama dengan Rumah sakit	12 kegiatan 6,000 Lembar 10 kegiatan 1,500 Lembar 290 Lembar 15000 berkas 400 buku 22 jenis 1,500 lembar 45 kelurahan 4 Rumah sakit	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	534,190,250	534,190,250	550,215,958	566,722,436		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
6.2	Kegiatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan			Kec. UH			1. Forum komunikasi dan advokasi 2. Sosialisasi Pencatatan Sipil 3. Keikutsertaan stand PMPS 4. Persidangan & Pencatatan Perkawinan di lokasi	8 Pertemuan 2,680 orang 1 Kegiatan 450 persidangan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	402,414,860	402,414,860	414,487,306	426,921,925		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif sesuai SE	Prakiraan Maju	Prakiraan Maju sesuai SE	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data			Kec. UH	SIAK berfungsi dengan baik	100%					1,306,505,965	1,306,505,965	1,345,701,144	1,386,072,178		
7.1	Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan			Kec. UH			1. Fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan 2. Pembinaan SDM teknologi informasi dan komunikasi 3. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan 4. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan	15 titik  4 kali  1 modul  1 kali	SIAK berfungsi dengan baik	100%	1,029,189,000	1,029,189,000	1,060,064,670	1,091,866,610		Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil
7.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Kec. UH			1. Pengelolaan data perkembangan kependudukan tahun 2016  2. Pengelolaan data laporan kependudukan tahun 2017   3. Penerbitan buku Analisis kependudukan 4. Penyajian informasi kependudukan melalui Web dan SMS Masking 5. Penerbitan buku induk penduduk	1 buku profil  19 buku laporan (bulanan, triwulan, semester, tahunan)  1 jenis  1 kegiatan  1 kegiatan	SIAK berfungsi dengan baik	100%	277,316,965	277,316,965	285,636,474	294,205,568		Dinas Kependuduka n dan pencatatan Sipil
	TOTAL										4,802,700,000	4,802,700,000	4,946,781,000	4,944,000,000		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,566,727,682.00	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Gondomanan			Materai 6000 yang tersedia	1280 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,673,725,350.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Materai 3000 yang tersedia	2666 buah					
						Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	5 jenis					
						STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit					
						STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	9 unit					
						STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	5 unit					
						STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	30 unit					
						KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit					
						KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	5 unit					
						Jasa kebersihan kantor	12 bulan					
						Jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis					
						Alat tulis kantor yang tersedia	85 jenis					
						Jasa Percetakan	1 jenis					
						Jasa Penggandaan	2 jenis					
						komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 jenis					

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis				
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	69 jenis				
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	5 jenis				
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor			Kec. Gondomanan			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,632,918,332.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 jenis					
						Jasa Tenaga Bantuan	73 orang					
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Gondomanan			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	334 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	260,084,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi	222 kali					
						Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu	11 bulan					
						Makan dan minum harian umum	11 bulan					
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	66 laporan					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akunta bilitas Kinerja Pemer		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					650,657,000.00	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kec. Gondomanan			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	52 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	650,657,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Gondomanan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	650,657,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemeri		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					128,150,000.00	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. Gondomanan			Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	128,150,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun	4 dokumen	Nilain Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB		
4	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Pertumbuh an Ekonomi	Pendap atan masyar		- prosentase kualitas komoditi perdagangan						4,218,475,300.00	
					- nilai ekspor							
4.1	Pembinaan Usaha Perdagangan										2,968,592,500	Dinas Perindustrian dan
				Jakarta			Pameran dan gelar potensi	124 Pengusaha	Telah diikutsertakannya UKM dalam event pameran dan bertambahnya informasi peluang pasar yang baru	124 UKM		
							Kontak dagang potensi bisnis bagi UMKM	5 UKM, 1 kali	Kemitraan UMKM dengan pelaku usaha luar daerah	5 UKM		
							Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	45 hari	Sarana promosi produk UKM dan potensi Kecamatan serta pelayanan publik	42 UKM		
							Pemanfaatan lahan	5 Zona	Sarana lahan bagi UMKM	5 Zona		
							Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang	8 kali	Peningkatan kemampuan diversifikasi usaha bagi pedagang	8 kali		
			Kota Yogyakarta			Pengembangan Kemitraan Pedagang dengan Distributor/Toko Modern	8 kali	Terjalin Kemitraan pedagang eceran dengan distributor/ Toko Modern	8 kali			
				Kota Yogyakarta			Operasi pasar	14 kecamatan	Masyarakat mendapat harga di bawah harga pasar yang tinggi	14 kecamatan		
							Pengembangan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern	2 kali	Terjalin Kemitraan antar Toko modern dengan UMKM	2 kali		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
				Kota Yogyakarta			Penyusunan Perubahan Perwal	1 dok	Perwal menjadi lebih sempurna	1 dok		
				Sosialisasi Hasil Kajian			1 kali	Masyarakat menjadi lebih termotivasi dalam mengembangkan usahanya	1 kali			
				Workshop Display Toko Kelontong			2 kali	Pedagang menjadi lebih paham mengenai penataan display yang benar	2 kali			
				Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong			2 kali	Omzet penjualan para pemilik warung kelontong meningkat	2 kali			
				Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong			2 kali	Omzet penjualan para pemilik warung kelontong meningkat	2 kali			
				Sosialisasi Konsumen Cerdas			4 kali	Konsumen lebih kritis dan selektif dalam membeli suatu produk	4 kali			
4.2	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri									875,031,250	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Kota Yogyakarta			Monitoring harga bahan pokok	8 pasar	Data monitoring harga sembako	8 pasar		
				Kota Yogyakarta			Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	1 kali	Terjalin Kemitraan Ketersediaan Bahan dan Pasar	1 kali		
				Kota Yogyakarta			Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	2 kali	Data Pengawasan Barang Berbahaya	2 kali		
				Kota Yogyakarta			Monitoring Penggunaan BTM/P	Kota Yk, 4 kali	Data Pengawasan BTM/P	Kota Yk, 4 kali		
				Kota Yogyakarta			Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	Data Pengawasan LPG 3 kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
				Kota Yogyakarta			Monitoring Distributor dan Pergudangan	12 distributor, 30 gudang	Data Pengawasan Distributor dan Gudang	12 distributor, 30 gudang		
				Kota Yogyakarta			Pengendalian Harga	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali	Data Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali		
				Kota Yogyakarta			Pengawasan UTTP	Pasar, Perseorangan, Lembaga	Data Pengawasan UTTP	Pasar, Perseorangan, Lembaga		
				Kota Yogyakarta			Sosialisasi Penataan PKL	4 kali	Meningkatnya pemahaman PKL ttg penataan penertiban PKL	160 PKL		
				Kota Yogyakarta			Pengelolaan SIM PKL	1 SIM PKL	SIM PKL terkelola lebih baik	1 sistem		
				Kota Yogyakarta			Updating Pendataan PKL	14 Kecamatan	Data PKL di wilayah Kota Yogyakarta lebih akurat	7000 data PKL		
				Kota Yogyakarta			Penyusunan Draft Raperwal tentang Penataan PKL	1 dokumen	Dokumen draft raperwal Penataan PKL	1 dokumen		
				Kota Yogyakarta			Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yogyakarta	1 kali	Lebih tertatanya PKL di Kota Yogyakarta	14 Kecamatan		
				Kota Yogyakarta			Pembinaan dan pemberdayaan kawasan AlunAlun Utara	1 paket	Lebih tertatanya PKL di kawasan Alun-alun Utara Kota Yogyakarta	3 shelter		
		4.3	UPT Metrologi									
	Penyelenggaraan Metrologi Legal			Kota Yogyakarta			Penyuluhan dan Sosialisasi UTTP, BDKT, dan SI	20 kali	Peningkatan pemahaman konsumen tentang kegiatan metrologi legal di Kota Yogyakarta	20 kali		
				Kota Yogyakarta			Pengawasan UTTP, BDKT, dan SI	47 kali	Peningkatan pengawasan metrologi	47 kali		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
				Kota Yogyakarta			Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	47 kali	Akurasi peralatan UTTP	47 kali		
				Kota Yogyakarta			Penyusunan Draf Raperda Pelayanan Metrologi	1 dokumen	Raperda Pelayanan Metrologi	1 dokumen		
5	Program Pembinaan Perindustrian	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat		jumlah penumbuhan dan pengembangan sentra Industri Mikro Kecil dan menengah						4,905,691,000.00	
5.1	Pembinaan Teknis Perindustrian			Kota Yogyakarta			Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IMKM				1,639,392,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Pelatihan teknik membatik di Kel pandeyan dan Kel Sorosutan	40 orang 5 hr 1 kali	Meningkatnya ketrampilan membatik	40 orang		
							Sosialisasi sertifikasi PIRT , Sertifikasi Halal dan Merk	30 orang 3 hari 2 kali	Meningkatnya pemahaman PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk	60 orang		
							Pelatihan pengemasan produk olahan makanan di Kel Notoprajan	20 org 3 hari 1 kali	Meningkatnya pengetahuan pengemasan produk olahan makanan	20 orang		
							Pelatihan membuat tas rajut di Kel Purbayan	20 orang 5 hr 1 kali	Meningkatnya ketrampilan pembuatan tas rajut	20 orang		
							Pelatihan peningkatan mutu dan desain produk kerajinan kulit di Kelurahan Keparakan RW 8	20 orang 6 hr 1 kali	Meningkatnya mutu dan desain produk kerajinan kulit	20 orang		
							Pelatihan membatik di Kel Pringgokusuman	20 orang 5 hr 1 kali	Meningkatnya ketrampilan teknik membatik	20 orang		
							-Pelatihan jumputan di Kel Suryatmajan	20 orang 5 hr 2 kali	Meningkatnya ketrampilan dalam membuat produksi jumputan	40 orang		
							Pelatihan jumputan di Kel Purbayan RW 11	20 orang 5 hr 1 kali	Meningkatnya ketrampilan dalam membuat produksi jumputan	20 orang		
							Pelatihan sablon di Kel Suryatmajan	20 orang 5 hr 1 kali	Meningkatnya ketrampilan menyablon	20 orang		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							Pelatihan dasar pembuatan desain grafis	20 orang 5 hr 1 kali	Meningkatnya ketrampilan pembuatan produk desain grafis	20 orang		
							Pelatihan industri di Kec Jetis	20 orang 5 hr 1 kali	Meningkatnya ketrampilan pembuatan produk industri	20 orang		
							Pelatihan menjahit busana Jawa Surjan Gagrak Yogyakarta	20 orang 6 hari 1 kali	Meningkatnya ketrampilan produksi busana Jawa gaya Yogyakarta	20 orang		
							Pameran Industri Kreatif Berbasis Budaya	4 IKM 3 kali	Proses produksi industri berbasis budaya semakin dikenal masyarakat	4 IKM 3 kali		
							Pembentukan sentra baru di Kel Warungboto (shuttle cock)	1 sentra baru, 1 kali	Terbentuk sentra shuttle cock di kel Warungboto	1 sentra baru		
							Pemberdayaan sentra produksi batik	1 sentra 1 kali	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi di sentra batik	1 sentra		
							Pemberdayaan sentra produksi kulit	1 sentra 1 kali	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi di sentra kulit	1 sentra		
							Pemberdayaan dan pengembangan OVOP Produk batik	1 OVOP 1 kali	Terjaganya Batik sebagai produk OVOP	1 OVOP		
							Pemberdayaan dan pengembangan OVOP Produk kulit	1 OVOP 1 kali	Terjaganya Kulit sebagai produk OVOP	1 OVOP		
							Pengembangan produk unggulan batik	1 PUD 1 kali	Daya saing dan potensi sumberdaya lokal serta pendapatan dan kemampuan SDM meningkat	1 PUD		
							Pengembangan produk unggulan kulit	1 PUD 1 kali	Daya saing dan potensi sumberdaya lokal serta pendapatan dan kemampuan SDM meningkat	1 PUD		
							Expo produk sentra produksi batik	4 IKM 1 kali	Produktivitas meningkat sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai	4 IKM, 1 kali		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							Expo produk sentra produksi kulit	4 IKM 1 kali	Produktivitas meningkat sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai	4 IKM, 1 kali		
5.2	Pembinaan Sarana Produksi			Kota Yogyakarta							3,266,299,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator	20 orang, 11 bulan	Pengelolaan dana bergulir PEW lebih dapat dimanfaatkan,dipantau dan difasilitasi	1.389 kelompok		
							Bimbingan teknis administrasi dan pembukuan kelompok PEW	30 orang, 1 hari, 3 angkatan	Keterampilan administrasi dan pembukuan kelompok PEW lebih baik	90 orang		
							Sosialisasi program dan pengembangan PEW di Kecamatan	30 orang, 1 hari, 14 kali	Terfasilitasinya Kelompok PEW di 14 Kecamatan	45 Forkom PEW		
							Pelatihan pengolahan makanan	30 org, 3 hr, 5 angkatan	Ketrampilan pengolahan makanan pada anggota kelompok PEW lebih meningkat	150 orang		
							Pengembangan wawasan produk olahan makanan dan kerajinan ke luar daerah	30 org, 3 hr, 2 kali	Wawasan anggota kelompok PEW tentang produk olahan makanan menjadi meningkat	60 orang		
							Forum komunikasi kelompok PEW di Kelurahan	45 kali	Bertambahnya pengetahuan dan perkembangan PEW di kelurahan	1.389 kelompok		
							Pilot project 5 kelompok PEW untuk menjadi koperasi	250 orang	Kelompok PEW menjadi koperasi	5 kop		
							Pengembangan wawasan kemasan produk	25 org, 3 hr, 1 kali	Wawasan anggota kelompok PEW tentang produk olahan makanan menjadi meningkat	25 orang		
							Pelatihan E-Commerce	20 org, 3 hr, 3 kali	Meningkatnya kemampuan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mengelola usaha	60 org		
							Pelatihan Total Motivation Training (TMT)	30 org, 3 hr, 3 kali	Meningkatnya motivasi dalam pengembangan usaha	90 org		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							Manajemen resiko bencana bagi IMK	30 org, 3 hr, 3 kali	Kesiapsiagaan IKM dalam menghadapi keadaan darurat bencana	90 org		
							Pelatihan Kewirausahaan	30 org, 3 hr, 3 kali	Meningkatnya kemampuan dalam berwirausaha	90 orang		
							Penyusunan Perda Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)	1 paket	Terbentuk Perda yang mengatur tentang industri daerah	1 paket		
							Naskah Akademik RIPIDA	1 paket	Mempersiapkan Konsep Perda Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)	1 paket		
							Pelatihan Industri Kreatif berbasis TI/Animasi di BCIC/ BDI Denpasar	20 orang, 30 hari, 1 kali	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam pembuatan animasi	20 orang		
						Pameran/Expo Industri Kreatif berbasis TI/Animasi	4 IKM 2 kali	Meningkatkan kemampuan dan pengalaman dari masing-masing IKM industri kreatif berbasis fashion	8 orang			
						Pameran/Expo Industri Kreatif berbasis fashion	4 IKM 3 kali	Meningkatkan kemampuan dan pengalaman dari masing-masing IKM industri kreatif berbasis fashion	12 orang			
						Festival Animasi "Animpiade 2017"	1 paket	Memberikan wadah bagi para animator khususnya yanga di Kota Yogyakarta untuk menampilkan hasil karya animasinya	80 orang			
6	Program Pengembangan Industri Logam	Pertumbuh an Ekonomi	Pendap atan masyar akat mening		Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Logam						7,810,420,529.00	
	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Logam			Kota Yogyakarta							7,810,420,529	
							Operasional Pelayanan UPT Logam	12 bulan	Pelayanan UPT Logam lebih baik	12 bulan		
							Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam	1 paket	Mesin dan Peralatan UPT Logam cukup untuk melayani perajin	1 paket		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							Pemeliharaan dan Penggantian Sparepart Mesin UPT Logam	9 mesin	Sparepart Mesin UPT Logam terawat dengan baik	9 mesin		
							Pelatihan Inovasi Produk Rumah tangga	10 orang, 1 angkt	IKM Logam terbiasa melakukan inovasi produk yang berorientasi pada kebutuhan pasar	10 orang 1 angkt		
							Penelitian Peralatan Kerja Tepat Guna	2 penelitian	Berkembangnya produksi yang lebih inovatif	2 penelitian		
							Pendampingan Tenaga Ahli untuk Revitalisasi Pelayanan UPT Logam	1 orang, 6 bulan	Perajin dan pelaku usaha logam terdampingi dan terlayani lebih baik	1 orang, 6 bulan		
							Sewindu UPT Logam	1 paket	Inovasi teknologi dan prestasi UPT Logam selama sewindu lebih dikenal masyarakat luas	1 paket		
							Pameran INAPA 2017	2 IKM	Dikenalnya potensi IKM Logam Kota Yogyakarta di tengah persaingan komponen presisi internasional	2 IKM		
							Sosialisasi dan promosi dalam rangka meningkatkan pendapatan UPT Logam	12 bulan	Pendapatan UPT Logam meningkat	12 bulan		
7	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Pertumbuh an Ekonomi	Pendap atan masyar akat mening kat		Prosentase kondisi pasar memenuhi standar sarpras, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar	84.50%					8,697,348,060.00	
7.1	Pengelolaan Kebersihan Pasar			Gondomanan			Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	31 pasar	Kebersihan pasar yang terpelihara	31 pasar	4,181,901,204.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya	31 pasar	Kebersihan pasar yang terpantau	31 pasar		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							Jumlah pasar yang dipelihara tamannya	22 pasar	Taman pasar yang terpelihara	22 pasar		
							Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan	1 paket	Peralatan Kebersihan yang tersedia	1 paket		
							Pengolahan dan Pemilahan Sampah yang dikelola	1 pasar	Sampah pasar yang terpilah dan terolah	1 pasar		
7.2	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar			Gondomanan			Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	Keamanan dan kertertiban pasar yang terwujud	31 pasar	2,562,564,540.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Pengamanan dan penertiban pasar	31 pasar	Pengetahuan pedagang pasar yang dibina	27 kegiatan		
							Tenaga teknis pengamanan dan penertiban pasar yang direkrut	80 orang				
							Pengetahuan pengamanan dan penertiban pasar bagi pedagang yang ditingkatkan	27 kegiatan				
7.3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta			Gondomanan			Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	10 pasar	Sarana dan prasarana pasar yang terpelihara	10 pasar	1,952,882,316.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar	Instalasi dan distribusi listrik dan air yang terpelihara dan terpantau	21 pasar		
							Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan Genset pasar yang dipelihara	1 paket 2 pasar	Alat listrik dan elektronik yang tersedia Cadangan listrik yang tersedia	1 paket 2 pasar		
8	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pertumbuh an Ekonomi	Pendap atan masyar		Optmalisasi lahan pasar	96%					8,622,172,972.00	
					Optimalisasi pengelolaan retribusi	14,9 M						
					Peningkatan frekuensi promosi	70 kali						
8.1	Pengelolaan Pendapatan Pasar			Umbulharjo			Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	31 pasar	Target pendapatan retribusi yang tercapai	14,8 m	419,832,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							Pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dikoordinasikan	40 kali	Sarana administrasi dan pemungutan retribusi yang tersedia	100%		
							Pelayanan administrasi pedagang pasar yang dikelola	31 pasar	Barang cetakan yang tersedia	1 kali		
							Bahan percetakan sarana administrasi yang dicetak	1 kali	Listrik pasar yang terdata	1100 pelanggan		
							Jumlah listrik pelanggan yang dikelola	1100 pelanggan				
8.2	Penataan Lahan dan Pedagang			Umbulharjo			Penataan lahan dan pedagang pasar yang dikelola	31 pasar	Penataan lahan dan pedagang pasar yang tertata	31 pasar	1,336,805,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Pemutakhiran data pedagang pasar yang dikelola	31 pasar	data pedagang pasar yang valid	31 pasar		
							Sosialisasi pedagang pasar	3 pasar	Sosialisasi pedagang pasar yang terlaksana	3 pasar		
							Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar yang dikelola	20 pasar	Lahan penunjang dan fasilitas pasar yang terdata	20 pasar		
							Workshop Peningkatan SDM yang dibina	60 orang	Pengetahuan SDM yang meningkat	60 orang		
							Tanah Pasar yang disewa	4 pasar	Tanah pasar yang digunakan	4 pasar		
8.3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I			Gondomanan			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	1 pasar	Pendapatan retribusi pasar yang tercapai	100%	1,226,697,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Petugas pungut yang dibina	36 orang	Tertib administrasi pungutan yang tercapai	36 orang		
							Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	3 jenis	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	3 jenis		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
8.4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II			Kota Yogyakarta			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	1 pasar	Pendapatan retribusi pasar yang tercapai	100%	802,012,200.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Petugas pungut yang dibina	37 orang	Tertib administrasi pungutan yang tercapai	37 orang		
							Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	2 jenis	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	3 jenis		
8.5	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III			Kota Yogyakarta			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	12 pasar	Pendapatan retribusi pasar yang tercapai	100%	712,311,000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Petugas pungut yang dibina	31 orang	Tertib administrasi pungutan yang tercapai	31 orang		
							Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	2 jenis	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	2 jenis		
8.6	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV			Kota Yogyakarta			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	10 pasar	Pendapatan retribusi pasar yang tercapai	100%	1,176,655,200.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Petugas pungut yang dibina	48 orang	Tertib administrasi pungutan yang tercapai	48 orang		
							Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	2 jenis	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	2 jenis		
8.7	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta			Mergangsan			Sarana dan prasarana pasar dan peralatan kerja yang dipelihara	8 kegiatan	Sarana dan prasarana dan peralatan kerja yang terpelihara	8 kegiatan	1,255,246,700.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Pedagang PASTY yang dibina	160 pedagang	Pedagang PASTY yang dibina	160 pedagang		
							Instalasi pasar yang dipelihara	7 kegiatan	Pemeliharaan Instalasi Pasar	7 kegiatan		
8.8	Pengembangan Pasar Tradisional			Umbulharjo			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	420 pedagang	Pendapatan retribusi pasar	420 pedagang	1,692,613,872.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	2 jenis	Pengembalian retribusi pelayanan pasar sesuai MOU	2 jenis		
							Promosi undian belanja berhadiah	20 kegiatan	Meningkatnya pengunjung pasar tradisional	75 % menjadi 80%		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahn Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
							Promosi melalui berbagai kegiatan	10 kegiatan	Pelayanan pedagang dengan sistem komputerisasi	10% menjadi 20%		
							Kajian pasar tradisional	3 kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan pedagang akan hak dan kewajibannya	60%		
							Pelayanan menggunakan SIM Pasar	3 pasar	Meningkatnya Pengetahuan komunitas pasar akan hak dan kewajibannya	60%		
							Radio pasar yang tersedia	3 pasar	Meningkatnya usaha pedagang pasar	31 pasar		
							sarasehan pedagang pasar yang dilaksanakan	15 kegiatan				
							Peningkatan pengetahuan pedagang dalam berbisnis	5 kegiatan				
	FGD pedagang pasar tradisional	1 kegiatan										
9	Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pertumbuh an Ekonomi	Pendap atan masyar		Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	77%					5,262,717,405.00	
9.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis			Umbulharjo			Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang terlaksana	1 kegiatan	5,262,717,405.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah											44,862,359,948.00	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					767,776,496	767,776,496		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			Kec Umbulharjo			Materai 6000 yang tersedia	300 lbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	366,393,300	366,393,300		
						Materai 3000 yang tersedia	1200 lbr							
						STNK roda 4 yang terbayar	8 unit							
						STNK roda 3 yang terbayar	7 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	29 unit							
						alat kebersihan,	6 paket							
						alat kantor	2 paket							
						retribusi	12 kali							
						alat tulis kantor	87 jenis							
						barang cetakan dan penggandaan	315,500 lbr							
						komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan							
						Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	3 jenis							
						Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia	10 jenis							
						Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9 jenis							
						Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	18 jenis							
						Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135 kali							
						Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	2 jenis							
						Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan							
						Jasa keamanan	1 paket							
1.2	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec Umbulharjo			Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	268,733,196	268,733,196		
						Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	14 Dokumen ASN							
						Jasa Tenaga bantuan	9 orang, 14 bulan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi			Kec Umbulharjo			Rapat	47 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	132,650,000	132,650,000		
						Tamu	1,410 orang							
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	2 Kementrian/ Lembaga							
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					557,439,000	557,439,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kntor			Kec Umbulharjo			Pemeliharaan Bangunan RPH, Poliklinik Hewan dan Lab C	1 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	265,930,000	265,930,000		
						Pemeliharaan Gedung Dinas Pertanian	1 paket							
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec			kendaraan roda 4	8 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	291,509,000	291,509,000		
						kendaraan roda 3	7 unit							
						kendaraan roda 2	29 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					85,425,000	85,425,000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec Umbulharjo			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	85,425,000	85,425,000		
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Pembinaan Pertanian	Pertumbuhan ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat		Peningkatan Klas Kelompok Pertanian						669,592,350	669,592,350		
4.1	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian						Penyusunan Data Statistik Pertanian	1 dok	Tersusunnya Data Pertanian	1 dok	558,081,350	558,081,350		
							Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	4 kali	Terlaksanannya monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk	4 kali				
							Kontes Tanaman Hias	1 kali	Terlaksanannya Kontes Tanaman Hias	1 kali				
							Lomba Kelompok Tani / Gapoktan	1 kali	Terseleksinya Kelompok Tani/Gapoktan	1 kali				
							Gelar Potensi Pertanian	1 kali	Terlaksananya Gelar Potensi Pertanian	1 kali				
							Monitoring dan Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan	45 kelurahan	Termonitoringnya dan Terbinanya Kelompok Tani/Gapoktan	45 kelurahan				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Bimtek Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan	1 kali	Meningkatnya Pengetahuan Teknis Budidaya Hortikultura di Lahan	1 kali				
							Informasi, Promosi dan Pemasaran Pertanian	2 paket	Terlaksananya Kegiatan Informasi, Promosi dan Pemasaran	2 paket				
							Kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian	12 Bulan, 3 lokasi	Terkelolanya UPT Pelayanan Pertanian	3 lokasi				
							Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang	12 Bulan	Tercapainya penyediaan benih pisang	2,700 btg				
							Pengelolaan Kebun Hortikultura	12 Bulan	Tercapainya penyediaan benih hortikultura, tanaman hias dan	2,035 btg				
							Pengelolaan Kebun Giwangan	12 Bulan	Tercapainya pengelolaan kebun Giwangan	14.500 kg calon benih				
							Pengelolaan Kebun Tegalrejo	12 Bulan	Tercapainya pengelolaan kebun Tegalrejo	15.200 kg calon benih				
							Pemeliharaan gedung	1 paket, 1 lokasi	Terwujudnya pemeliharaan gedung	1 lokasi				
4.2	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian			Kota Yogyakarta			Pemantauan, Pembinaan serta pengawasan mutu hasil pertanian	12 bln	Mutu hasil pertanian lebih terkendali	12 bln	111,511,000	111,511,000		
							Sosialisasi hasil mutu pertanian	7 kali	Meningkatnya pengetahuan tentang mutu hasil pertanian	7 kali				
							Uji mutu lab	1500 sampel	Uji mutu lab	1500 sampel				
5	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Pertumbuhan ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat		Peningkatan unit usaha ke hewan dan perikanan						2,645,026,132	2,645,026,132		
5.1	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan			Kota Yogyakarta			Pengendalian penyakit zoonosa	12 bln	Terkendalnya penyakit zoonosa di Kota Yk	12 bln	1,851,430,303	1,851,430,303		
							Workshop dokter hewan praktisi	1 kali	Kegiatan dokter hewan praktisi dapat terpantau dan tersosialisasinya peraturan pemerintah	1 kali				
							Penguatan jejaring komunitas pecinta satwa	1 kali	Terjalin komunikasi dan relasi para pecinta satwa	se-Kota Yk				
							Pelayanan Poliklinik Hewan	12 Bulan	Pelayanan Poliklinik Hewan	9.740 Tindakan				
							Jasa Kantor	4 Paket	Jasa Kantor	4 paket				
							Peningkatan Sumber Daya Manusia	2 orang	Peningkatan SDM	2 orang				
							Promosi Poliklinik Hewan	1 paket	Promosi Poliklinik Hewan	Masyarakat mengenal Poliklinik Hewan dan jenis-jenis pelayanannya				
							Pengelolaan BBI Nitikan	12 Bulan	Tersedianya benih ikan hias di BBI Nitikan	10.200 ekor benih aneka ikan hias				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pengelolaan BBI Mendungan	12 Bulan	Tersedianya benih ikan konsumsi di BBI Mendungan	39.250 ekor benih ikan ; 320kg ikan konsumsi				
							Pengelolaan subraiser ikan hias	12 bulan	Terkelolanya subraiser ikan hias	1 lokasi				
							Pelatihan Pengolahan Limbah Peternakan	1 kali	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Hasil Peternakan	30 peserta				
							Pelatihan Budidaya Lovebird	1 kali	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Ternak Lovebird	30 peserta				
							Penyusunan/Updating Data Peternakan	1 paket	Tersedianya Data Peternakan	10 buku				
							Pembinaan Kelompok Ternak	12 bulan	Meningkatnya Sumber Daya Kelompok Ternak	12 bulan				
							Lomba Ternak	2 kali	Meningkatnya nilai ekonomi dan pelestarian ternak	2 kali				
							Promosi, Informasi dan Pemasaran	12 bulan	Meningkatnya sarana promosi dan Informasi Peternakan	12 bulan				
							Pembinaan Kelembagaan Perikanan	45 klrh	Mewujudkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)	45 kelurahan				
							Promosi, Informasi dan Pemasaran Perikanan	45 klrh	Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat Tentang Perikanan Meningkat	45 kelurahan				
							Penyusunan Data Perikanan	10 dokumen	Data Perikanan	10 dokumen				
							Restocking Ikan	30000 bibit	Pelestarian Sumber Daya Ikan	30000 bibit				
5.2	Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewan			Kota Yogyakarta			Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	415 TPH	Meningkatnya Pengetahuan Pemotongan Hewan Qurban	415 TPH	793,595,829	793,595,829		
							Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	7 kali	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Keamanan Pangan dan Pangan Segar Bebas dari Bahan Berbahaya	10 kali				
							Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	149 tempat penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan, perikanan	Mutu dan Keamanan Pangan lebih terkendali	149 tempat penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan, perikanan				
							Pelayanan Rumah Potong Hewan	12 bulan	Pelayanan Rumah Potong Hewan	6.935 ekor sapi, 6.360 ekor kambing				
							Penyediaan Jasa Kantor	5 paket	Penyediaan Jasa Kantor	5 paket				
							Pemeliharaan sarana prasarana kerja	1 paket, 12 bulan	Pemeliharaan sarana prasarana kerja	4 jenis				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Cetak Buku	100 buku profil	Cetak Buku	100 buku profil				
							Terlaksananya Uji Mutu Laboratoris	1750 sampel	Terlaksananya Uji Mutu Laboratoris	99% layak konsumsi				
							Uji Cepat Pangan Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	450 sampel	Terdeteksinya Kandungan Bahan Berbahaya Pada Pangan Secara Cepat	Berkurangnya bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya				
6	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	Pertumbuhan ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat		Skor PPH						938,477,300	938,477,300		
6.1	Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan			Kota Yogyakarta			Penyuluhan Pertanian	2 paket	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	2 paket	855,307,300	855,307,300		
							Peningkatan SDM Pertanian	1 paket	Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	20 orang				
							Pembuatan Database Bidang Ketahanan Pangan	1 paket	Data Bid Ketahanan Pangan	1 paket				
							Pembuatan Database Kelompok Tani	1 paket	Data kelompok Tani	se Kota Yogyakarta				
							Penyusunan PPH dan SKPG	4 paket	Data PPH dan SKPG	2 laporan				
							Lomba bidang Ketahanan Pangan	3 kali	Menambah pengetahuan masyarakat tentang wawasan dan teknologi pengolahan makanan	14 kec				
							Sosialisasi Penganekaragaman Pangan	7 kali	Menambah pengetahuan masyarakat tentang pengembangan penganekaragaman pangan	7 kali				
							Pekan Nasional	1 kali	Menambah pengetahuan masyarakat tentang hasil pembangunan pertanian dan pelayanan bidang pertanian	1 kali				
							Gelar Potensi Ketahanan Pangan	2 kali	Promosi hasil pertanian Kota Yogyakarta	2 kali				
6.2	Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan			Kota Yogyakarta			Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan	4 kali	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	4 kali	83,170,000	83,170,000	Lanjutan	
							Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 dok	Data NBM	1 dok				
							Distribusi beras baru	5 kali	Mewujudkan kedaulatan pangan Kota Yogyakarta	5 kec				
TOTAL											5,663,736,278	5,663,736,278		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					706,211,080	0		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			UMBULHARJO			Materai 6000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,862,500			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							Materai 3000 yang tersedia	300 buah						
							Jasa Pengiriman/paket	17 kali						
							STNK roda 4 yang terbayar	4 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	13 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	71 jenis						
							Jasa Penggandaan	170000 lembar						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis						
							Peraturan perundangan-undangan yang tersedia	4 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis						
Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis													

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur				
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UMBULHARJO			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		65,100,000			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola							
							Jasa Tenaga Nabab	1 orang			20,950,580			
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UMBULHARJO			Makan dan minum yang tersedia untuk	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	56,760,000			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							a.koordinasi,	99 kali						
							b.pegawai	70 orang						
							b.Tamu	100 orang						
							b. Operasional/Survey/ Monitoring	20 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 laporan			150,375,000			
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					237,012,000	0		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			UMBULHARJO			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	118,100,000			
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UMBULHARJO			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	118,912,000			
							a.roda 4 (empat),	4 unit						
							b.roda 2 (dua)	13 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					129,683,930	0		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UMBULHARJO			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	129,683,930			
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur				
4	Program Pengelolaan Pertanahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah								25,898,327,860	0		
4.1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan			UMBULHARJO			Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	20 bidang	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	283,922,860			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							Penyelesaian Permohonan rekomendasi tanah negara	60 Permohonan	Persentase permohonan yang dapat diselesaikan	100%				
4.2	Pemanfaatan Pertanahan			UMBULHARJO			Pengadaan tanah pembangunan kantor kelurahan	3 kelurahan	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	4606 m2	25,548,255,000			
							Pengadaan tanah untuk RTHP	3 lokasi	Data Rekomendasi Pemanfaatan Tanah	1 dokumen				
							Appraisal Pemanfaatan Tanah	1 dokumen	Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan	100%				
							Pengadaan tanah untuk balai serbaguna	1 lokasi	Pengadaan Tanah untuk Balai serbaguna	1 lokasi				
4.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan			UMBULHARJO			Penyelesaian masalah pertanahan	5 bidang tanah	Kejelasan status pertanahan	5 bidang tanah	66,150,000			
5	Program Pembinaan Tata Ruang	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah								972,786,930	0		
5.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci			UMBULHARJO			Naskah Akademik Review RTRW	1 dokumen	Tersedianya Aturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	3 dokumen	304,866,965			
						Draft Raperda RTRW	1 dokumen							
						Draft Raperwal Juknis Perda RDTR	1 dokumen							
5.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan			UMBULHARJO			Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Jl. Solo	1 dokumen	Tersedianya Kajian dan Aturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan perkotaan	2 dokumen	545,671,965			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
						Kajian Blok Kawasan Strategis	1 dokumen							
5.3	Pembinaan Tata Ruang			UMBULHARJO			Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dokumen	Meningkatnya sinergitas dan keselarasan pembangunan kota Yogyakarta dengan tata ruang kota maupun tata ruang keistimewaan	1 dokumen	122,248,000			
						Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta	14 kecamatan							
6	Program Pengendalian Tata Ruang	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah								476,503,930	0		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
6.1	Pengendalian Tata Ruang			UMBULHARJO			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	1 dokumen	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	1 dokumen	162,671,965			

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
6.2	Pengawasan Tata Ruang			UMBULHARJO			Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas)	1 dokumen	Meningkatnya tertib tata ruang	50%	187,076,965			
							Neraca Penatagunaan Tanah, Sumber Daya Air, Udara, dan Sumber Daya Alam lainnya	1 dokumen						
6.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang			UMBULHARJO			Peta Updating RTRW	1 dokumen	Terkelolanya data dan Informasi tata ruang dan pertanahan Kota Yogyakarta	4 dokumen	126,755,000			
							Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 kali						
							Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2 kali						
	TOTAL ANGGARAN										28,420,525,730	0		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
	Urusan Pekerjaan Umum														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1,793,982,331	1,973,370,000		Dinas PU PKP	
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			UMBULHARJO			Materai 6000 tersedia	450 buah	Terpenuhinya jasa kebutuhan surat-menyurat	100%	923,674,550	1,016,040,000	Sedang Berjalan	Dinas PU PKP	
							Materai 3000 tersedia	400 buah							
							Jasa Pengiriman Paket	6 kali							
							Pembayaran rekening air & listrik Rusunawa	12 bulan	Terpenuhinya pembayaran rekening, air, dan listrik	12 bulan					
							Penyediaan jasa KIR	20 Kendaraan	Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas	12 bulan					
							Penyediaan Perpanjangan STNK	51 Kendaraan							
							Penyediaan Perpanjangan SIM	1 SIM							
							Pemeliharaan kebersihan kantor	1 unit gedung	Terciptanya ruang kerja yang bersih dan nyaman	1 dinas					
							Perbaikan Peralatan Kerja	4 item	Terpeliharanya Peralatan Kerja	1 dinas					
							Pengadaan Alat Tulis Dinas	54 item	Tersedianya ATK untuk menunjang Tupoksi Dinas	1 dinas					
							Penyediaan Kebutuhan Cetak & penggandaan	Cetak : 6 cetakan Penggandaan : 364.000 lbr	Tersedianya kebutuhan cetak & penggandaan	1 dinas					
							Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung	komponen listrik : 5 item	Tersedianya kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	1 dinas					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Penyediaan KebutuhanBahan Komputer	13 item	Tersedianya kebutuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	1 dinas				
							Pengadaan Printer	6 unit						
							Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			1 Dinas				
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14 item	Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 dinas				
							Penyediaan bahan bacaan surat kabar dan buku perpustakaan	12 bulan dan 2 paket	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangan	1 dinas				
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UMBULHARJO			Honorarium pengelola keuangan dan barang	17 orang	Kelancaran tugas pengelola keuangan dan barang	12 bulan	466,569,781	513,220,000	sedang berjalan	Dinas PU PKP
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	126 dokumen ASN		12 bulan				
							Jasa Tenaga Bantuan (NABAN)	12 bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1 dinas				
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UMBULHARJO			Penyediaan makanan dan minuman Pegawai	180 orang	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	1 dinas	403,738,000	444,110,000	sedang berjalan	Dinas PU PKP
							Penyediaan makanan dan minuman Rapat	14 kali						
							Perjalanan dinas luar daerah dan dalam DIY	26 Laporan	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Umbulharjo	Meningkatnya Sarana dan Aparatur	100%					1,176,486,486	10,794,980,000		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	Sarana dan Prasana gedung/peralatan memadai	1 dinas	216,800,000	238,480,000		Dinas PU PKP
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	64 kendaraan	Kendaraan dinas berfungsi secara memadai	1 dinas	959,686,486	10,556,500,000		Dinas PU PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Umbulharjo	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					291,500,000	320,650,000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas	8 dokumen	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dinas	1 dinas	291,500,000	320,650,000		Dinas PU PKP
							Profil Dinas	1 paket						
4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Ketimpangan antar wilayah menurun	Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	85.5%					56,418,876,921	61,510,760,000		
4.1	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah						Rapor penilaian penyedia jasa konstruksi	1 Dokumen	Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	8%	1,657,056,780	1,272,760,000	Baru	Dinas PU PKP
							Laporan pelaksanaan pembinaan penyedia jasa konstruksi	2 Laporan	Data Ledger Bangunan	1 Dokumen				
							Laporan Forum komunikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyedia jasa konstruksi	1 Laporan	Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	4 Bidang Bangunan				
							Opersional SIPJAKI	12 Laporan	Tersedianya dokumen perencanaan untuk pelaksanaan fisik konstruksi	11 Dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Updating Data Legder Bangunan Gedung	1 Dokumen	Meningkatnya pengetahuan dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan pada seluruh SKPD	49 Dokumen				
							Rekomendasi keandalan Bangunan Gedung	4 Dokumen						
						Dokumen Perencanaan	11 Dokumen							
						Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	49 SKPD							
4.2	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah						Pembangunan Kantor SKPD	1 Lokasi	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	33 Lokasi	54,761,820,141	60,238,000,000	Baru	Dinas PUPKP
						Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 Paket							
						Renovasi Bangunan Pemerintah	31 Lokasi							
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Ketimpangan antar wilayah menurun	Kota Yogyakarta	Persentase kualitas saluran Pengairan dan Drainase	81.86%					30,449,621,656	33,494,580,000		
5.1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase		Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta			Pembangunan Saluran	1913,83 m	Penambahan Aset	Kota Yk	19,319,093,000	21,251,000,000	Baru	Dinas PU PKP
5.2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase		Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Saluran	1848 m	Peningkatan umur manfaat	Kota Yk	11,130,528,656	12,243,580,000	Baru	Dinas PU PKP
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Ketimpangan antar wilayah menurun	Kota Yogyakarta	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	92.59%					45,716,365,972	50,287,990,000		
6.1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan		Jalan, Jembatan dan Trotoar	Kota Yogyakarta			Peningkatan Jalan, Peningkatan Jembatan	28.000 m2 , 1 buah	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	4 ruas jalan	12,231,525,000	13,454,670,000	Baru	Dinas PU PKP
6.2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Jalan, Jembatan dan Trotoar	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	900 m2	Peningkatan umur manfaat jalan dan jembatan	2 ruas jalan	8,470,229,972	9,317,250,000	Baru	Dinas PU PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
6.3	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum		Penerangan Jalan Umum	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1.900 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kota Yk	25,014,611,000	27,516,070,000	Baru	Dinas PU PKP
							Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	579 titik	Terlaksananya penggantian Lampu PJU habis umur pakai					
							Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	Terlaksananya pembayaran rekening air dan rekening listrik					
							Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	Terlaksananya pemeliharaan lampu hias					
7	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Ketimpangan antar wilayah menurun	Kota Yogyakarta	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	75%					15,628,104,555	16,970,900,000		
7.1	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman		Prasarana Dasar Umum	Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Permukiman	43,3 m2	Terwujudnya Perumahan dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	wilayah kota Yk	5,648,556,929	6,213,410,000	Baru	Dinas PU PKP
						Pemeliharaan talud dan Sarpras Tersebar	39,3 m2							
						Pemeliharaan Sarpras Tersebar	3 unit							
						Pembangunan Sarana dan Prasarana PMPS	1 paket							
						Land Cleaning Pasca PMPS	1 paket							
						Sambungan Rumah	1 paket							
7.2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Kawasan Permukiman	Kota Yogyakarta			Penataan Kawasan	10 Kawasan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Perumahan/ Permukiman Kumuh	Masyarakat Kota Yogyakarta	3,965,812,929	4,142,390,000		
						Pemeriksaan Kelaikan Bangunan	13 unit bangunan							
7.3	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa		Sarpras Rusunawa	Rusunawa			Operasional pengelolaan Rusunawa	2 unit	Terkelolanya rusunawa	2 unit	528,863,391	581,740,000	Baru	Dinas PU PKP
7.4	Kegiatan Pengelolaan Saluran Air Limbah		Saluran Air Limbah	Kota Yogyakarta			Operasional Pengelolaan Saluran Air limbah	540 m	Terpeliharanya Saluran Air Limbah	wilayah kota Yk	5,484,871,306	6,033,360,000	Baru	Dinas PU PKP
TOTAL											151,474,937,921	175,353,230,000		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggunjawa b
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
												(13)	(14)	(15)
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%					506,361,071	531,679,125		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Kec. Kotagede			Meterai 6.000 yang tersedia	250 meterai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		213,196,107	1	
							Meterai 3.000 yang tersedia	250 meterai					1	
							Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	2 saluran telepon, 2 sambungan listrik					1	
							Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	5 jenis					1	
							STNK roda 4 yg terbayar	3 unit					1	
							STNK roda 2 yg terbayar	37 unit					1	
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis					1	
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan					1	
							Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	3 jenis					1	
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	80 jenis					1	
							Jasa penggandaan	166.416 lembar, 65 jilid					1	
							Jenis cetak	10 digital print					1	
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis					1	
							Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	9 jenis					1	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggunjawa b
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	15 jenis				(13)	(14)	(15)
							Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	15 jenis					1	
							Jumlah pemeliharaan meubelair yang tersedia	1 paket						
							Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	6 buah buku 2 jenis harian						
							Jasa keamanan Kantor	2 orang						
							Jasa pemeliharaan taman	3 taman 12 bulan						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. Kotagede			Dokumen adm. Penatausahaan keuangan dan barang: SPP, SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	114,805,160	120,545,418	1	
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	35 dokumen ASN					3	
							Jasa Tenaga Bantuan	2 orang					1	
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Kotagede			Minum pegawai yang tersedia	11 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	188,512,000	197,937,600	1	
							Jamuan makan dan minum rapat koordinasi yang tersedia	28 kali						
							Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia	12 kali						
							Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	11 laporan						
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. Kotagede	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					263,382,000	276,551,100		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor			Kec. Kotagede			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	1 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%		97,125,000	1	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggunjawa b
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
												(13)	(14)	(15)
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Kotagede			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  - Roda 4 - Roda 2	3 unit 37 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd			179,426,100	1	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. Kotagede	Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja dan keuangan	100%					28,062,000	29,465,100		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. Kotagede			Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%		29,465,100	1	
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				
							Jumlah pertemuan In House Training yang diikuti	4 pertemuan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun	Kota Yogyakarta	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,173					1,728,794,500	1,815,234,225		
4.1	Pengendalian Penduduk			Kota Yogyakarta, 14 Kecamatan, 45 Kelurahan			1 Jumlah penyusunan grand design kependudukan	1 buku	Dukungan 33,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengendalian penduduk	100%	86,877,500	91,221,375	2	
							2 Jumlah pertemuan FAPSEDU	18 pertemuan	Dukungan 33,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengendalian penduduk	100%				
							3 Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan bagi Camat, Lurah dan PKB	85 orang	Dukungan 33,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengendalian penduduk	100%				
4.2	Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi			Kota Yogyakarta, 14 Kecamatan, 45 Kelurahan			1 Jumlah pertemuan updating data keluarga dan pencatatan pelaporan	70 pertemuan	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%	1,641,917,000	1,724,012,850	1	
							2 Jumlah cetak SIDUGA	1 paket	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			1	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggunjawa b
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
												(13)	(14)	(15)
							3 Jenis media promosi dan publikasi program KKBPK	8 jenis	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			2	
							4 Jumlah hari KIE melalui Mupen	36 hari	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			1	
							5 Jumlah hari promosi program KB KS melalui PMPS	45 hari	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			1	
							6 Jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi TMKK (TNI Manunggal KB Kesehatan)	15 pertemuan	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			1	
							7 Jumlah pertemuan KKG PKK KB Kesehatan	19 pertemuan	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			1	
							8 Jumlah pertemuan seleksi pembinaan KB KS tingkat Kota	9 lomba	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			2	
							9 Jumlah pertemuan rakercab IPeKB	1 pertemuan	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			1	
							10 Jumlah peringatan Hari Keluarga tingkat Propinsi	1 kegiatan	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			2	
							11 Jumlah orang yang mendapatkan bantuan Operasional IMP	3192 IMP	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			1	
							12 Jumlah pembinaan paguyuban IMP	9 kegiatan	Dukungan 8,33% terhadap capaian kinerja kegiatan pengelolaan data, advokasi, dan KIE	100%			3	
5	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun	Kota Yogyakarta	Ckupan peserta KB aktif	75,91%					2,476,100,429	2,599,905,450		
5.1	Pelayanan Keluarga			Kota, 14							1,493,818,529	1,568,509,455		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggunjawa b
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	berencana			kecamatan dan 45 Kelurahan			1 Jumlah PUS yang terlayani pelayanan KB	1130 PUS	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%		(13)	(14)	(15)
							2 Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB	15 kegiatan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			1	
							3 Jumlah pertemuan pembinaan dan evaluasi program KB	16 pertemuan tingkat Kota, 62 pertemuan tingkat Kecamatan, 180 pertemuan tingkat Kelurahan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			2	
													1	
							4 Jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan, dan evaluasi kelompok KB Pria	32 kegiatan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			1	
							5 Jumlah remaja yang mengikuti pelatihan konseling bagi pendidik dan konselor sebaya	50 orang	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			1	
							6 Jumlah kelompok yang disasar sosialisasi kespro	26 pertemuan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			2	
							7 Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R	204 pertemuan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			1	
							8 Jumlah yang disasar kegiatan lomba remaja dan PIK R	3 kegiatan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			2	
							9 Jumlah kegiatan yang disasar dialog remaja	14 kegiatan	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			3	
							10 Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah	1 draft	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			3	
							11 Jumlah remaja yang disasar kegiatan Outbond PIK R	180 remaja	Dukungan 9,09% terhadap capaian kinerja kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	100%			2	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggunjawa b
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
												(13)	(14)	(15)
5.2	Pembinaan Pembangunan Keluarga			Kota Yogyakarta, 14 Kecamatan, 45 Kelurahan							982,281,900	1,031,395,995	1	
							1 Jumlah pertemuan pembinaan kegiatan KS	120 pertemuan tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	
							2 Jumlah pertemuan kelompok BKS	1.395 pertemuan BKB, BKR, BKL	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	
							3 Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS	14 Kecamatan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			3	
							4 Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan	16 pertemuan tk Kota dan Kecamatan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	
							5 Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas kader BKS	11 pertemuan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			2	
							6 Jumlah Family Gathering BKL	1 kegiatan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			3	
							7 Jumlah draft perda ketahanan keluarga	1 draft	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			3	
							8 Jumlah draft buku pegangan program KKBPK	1 draft	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			3	
							9 Jumlah pertemuan kelompok UPPKS	705 pertemuan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	
							10 Jumlah promosi hasil kelompok UPPKS	5 kegiatan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			2	
							11 Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta	1 kali event	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	
							12 Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja	2 pertemuan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	
							13 Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota	18 pertemuan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggunjawa b
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
												(13)	(14)	(15)
							14 Jumlah kegiatan peningkatan kewirusahaan dan keterampilan kelompok UPPKS	3 kegiatan	Dukungan 7,14% terhadap capaian kinerja kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	100%			1	
											5,002,700,000	5,252,835,000		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
	Urusan Wajib															
	Urusan Perhubungan															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					4,883,258,143	4,980,923,306				Dinas Perhubungan
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			UH			Materai 6000	2400 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,743,142,829	1,778,005,686	Baru		Kenaikan harga barang dan jasa	Dinas Perhubungan
							Materai 3000	2400 buah								
							Perangko 3000	4500 buah								
							Kilat khusus	5 buah								
							listrik , telepon/telekomuni kasi ,air	12 bulan								
							STNK Sky Lift	1 unit								
							STNK roda 2	35 unit								
							STNK roda 3	2 unit								
							STNK roda 4	9 unit								
							KIR	5 unit								
							Bahan dan peralatan	20 jenis								
							Retribusi sampah TKP	2 jenis								
							Pemeliharaan taman	4 jenis								
							Jasa pemeliharaan kerumahtanggaan	1 jenis								
							Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis								
							ATK	39 jenis								
							Jasa percetakan	7 jenis								
							Jasa penggandaan	356.400 lembar								
							Komponen Instalasi/ penerangan	7 jenis								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan								Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							Tolok Ukur	Target		
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis						Kenaikan harga barang dan jasa				
				peralatan-peralatan rumah tangga	9 jenis								Kenaikan harga barang dan jasa					
				Peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 jenis						Dinas Perhubungan							
				Surat kabar	3 jenis													
				Pengadaan pakaian dinas harian	105 buah													
				Pakaian Kerja lapangan	121 buah													
				Keamanan kantor PKB	4 orang													
				Bimbingan teknis	50 orang													
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun		4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,796,695,314	2,852,629,220		Baru	Dinas Perhubungan	
								dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		86 dokumen ASN						Kenaikan UMK	Kenaikan UMK dan BPJS	
							Informasi Website terkelola	22 orang										
							Jasa Tenaga Bantuan	15 orang						Kenaikan harga barang dan jasa				
							Petugas Teknis	90 orang						Kenaikan harga barang dan jasa				
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UH			Penyediaan makanan dan minuman untuk :	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	343,420,000	350,288,400	Baru		Kenaikan harga barang dan jasa	Dinas Perhubungan		
							a. Koordinasi	145 kali										
							b. Pegawai	125 orang										
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 laporan										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					805,017,000	821,117,340	Baru			Dinas Perhubungan
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor			UH			gedung	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	423,895,000	432,372,900	Baru	Dinas Perhubungan	Tambah kendaraan	Dinas Perhubungan
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			UH			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	381,122,000	388,744,440	Baru	Dinas Perhubungan	Tambah kendaraan	Dinas Perhubungan
							STNK Sky Lift	1 unit								
							STNK roda 2	35 unit								
							STNK roda 3	2 unit								
							STNK roda 4	9 unit								
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					131,178,000	135,113,340	Baru	Dinas Perhubungan		Dinas Perhubungan
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja,Renja Perubahan,KUAPPA S,KUPPA, Penetapan Kinerja, RKA,RKA Perubahan, DPA,DPPA,RUP Murni,RUP Perubahan)	11 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	131,178,000	135,113,340	Baru	Dinas Perhubungan	ASB	Dinas Perhubungan
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, Laporan Pencapaian Penetapan Kinerja, LPPD/LKPJ)	3 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
							frekuensi diklat formal yang diikuti	2	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur							
4	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun		Rasio Kecepatan perjalanan	0.8					5,469,827,787	5,579,224,343	Baru		Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan
4.1	Kegiatan Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas						1.Survey bangkitan dan perjalanan tarikan serta kebutuhan Parkir Pusat layanan Kesehatan	1 dokumen	Peningkatan perencanaan manajemen lalu lintas	100%	581,925,000	593,563,500				
						2.Survey tarikan dan bangkitan perjalanan dan kebutuhan parkir Pasar Tradisional	1 dokumen									
						3.Survey updating kinerja lalu lintas jalan (volume per kapasitas dan kecepatan)	1 dokumen									
						4. Kajian Andalalin	15 dokumen									
4.2	Kegiatan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas			sekota yogyakarta			Survey manajemen rekayasa LL kawasan	1 dokumen	Peningkatan perencanaan manajemen lalu lintas	100%	624,836,787	637,333,523	Baru		Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan
						Manajemen dan rekayasa LL	2 laporan									
4.3	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan			-Sekota Yogyakarta			1.Cermin tikungan,	100 unit	Peningkatan jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang Perhubungan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang Perhubungan		4,263,066,000	4,348,327,320	Baru		Kenaikan harga barang dan jasa	Dinas Perhubungan
						2.rambu lalu lintas,	100 buah									
						3.papan nama jalan antik	20 unit									
						4.papan nama jalan antik lingkungan	60 unit									
						5.FO ATCS	1 paket									
						6.ATCS 1 simpang	1 unit									
						7.APILL tenaga surya	2 unit									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
							8. Pemeliharaan rambu lalu lintas,	110 unit								
							9. Pemeliharaan marka jalan,	5000 m <sup>2</sup>								
							10. Pemeliharaaan ruang tunggu sepeda,	500 m <sup>2</sup>								
							11. Pemeliharaan marka jalur sepeda,	500 m <sup>2</sup>								
							12.Marka ZOSS	500 m <sup>2</sup>								
							13.pemeliharaan APILL,	50 unit								
							14.pemeliharaan warning light,	28 unit								
							15.perbaikan instalasi kabel,	4 simpang								
							16.battery	20 buah								
5	Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun		Prosentase angkutan umum yang melewati jalan kota yang memenuhi standar keselamatan	93%					2,208,365,000	2,252,532,300	Baru	SHBJ snack , makan	Pemenuhan SPM dan target Renstra dan Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan			UH			optimalisasi perizinan angkutan	1000 ijin dispensasi jalan, 30 rekomendasi	optimalisasi perizinan angkutan dan Peningkatan Ketertiban kendaraan tidak bermotor	100%	662,524,000	675,774,480	Baru	SHBJ snack , makan	Pemenuhan SPM dan target Renstra dan Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan
							Pengadaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum	10 unit								
							Survey Penyusunan Jaringan Trayek Bus Sekolah di Kota Yogyakarta	1 paket								
							Kampanye ketertiban KTB tahap V	600 KTB								
							Plat KTB/TNKTb	200 pasang								
							SIOKTB	200 set								
							Reflektor KTB	500 unit								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
							Identitas Pengemudi KTB	200 set								
							Penyusunan Desain dan Penempatan Sarana Prasarana KTB	1 paket								
							Tempat Sepeda	5 unit								
5.2	Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			UH			Rehabilitasi perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB	1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	698,025,000	711,985,500	Baru			Dinas Perhubungan
							Stiker tanda sampling	18200 set								
							Buku uji berkala	8000 buku								
							Tanda uji berkala	35300 set								
							pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor/PKB	100%								
5.3	Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas			-sekota yogyakarta			1.pelajar,	700 orang	Peningkatan pemahaman keselamatan transportasi	100%	457,930,000	467,088,600	Baru	Pemeliharaan Taman Edukasi LL	Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan
						2.masyarakat umum,	400 orang									
						3.kegiatan taman edukasi keselamatan LL	7200 kunjungan									
5.4	Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan			-sekota yogyakarta			1.Pengawasan, pengendalian dan pengawalan LL.	348 kali	Peningkatan ketertiban dan keselamatan transportasi	100%	389,886,000	397,683,720	Baru	SHBJ snack , makan	Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan
						2.patrolI penegakan perda bidang perhubungan	132 kali									
						3.Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan	44 kali									
						4.piket di hari libur	120 kali									
						5.koordinasi persiapan penegakan perda	44 kali									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan											
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
							6.Pengaturan dan pengendalian angkutan dan lalu lintas : lebaran, natal dan tahun baru,hari besar keagamaan,dan di Pasar Malam Perayaan Sekaten	72 hari												
							7.koordinasi persiapan kegiatan,	45 kali												
6	Program Pengelolaan Perparkiran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun		Jumlah laporan pelanggaran perparkiran	20 laporan					7,976,972,000	8,136,511,440	Baru	SHBJ snack , makan	Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan				
6.1	Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran			-sekota yogyakarta			1.operasional penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	Peningkatan operasional penyelenggaraan perparkiran	91%	7,522,176,500	7,672,620,030								
							2.pengadaan karcis parkir	13 macam												
							3.pengadaan pakaian jukir	900 bh												
							4.pemungutan retribusi parkir	100%												
							5.Pengawasan perparkiran	12 bulan												
6.2	Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran			-sekota yogyakarta			1.koordinasi di bidang perparkiran	100%	Optimalisasi penyelenggaraan perparkiran	91%	454,795,500	463,891,410	Baru	SHBJ snack , makan	Kenaikan Barang dan jasa	Dinas Perhubungan				
							2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran	600 lokasi											Pemenuhan SPM dan target Renstra	
							3.pembinaan terhadap juru parkir	850 jukir												
							4.pembinaan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP	4 TKP												
							5.pengadaan papan tarif parkir TJU	20 buah												
							6.kegiatan POKJA perparkiran	100%												
							7.perbaikan papan tarif parkir	50 bh												

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan	Keterangan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
							8.pemeliharaan TKP(ngabean, senopati,sriwedani)	3 bh								
							9.pemeliharaan TKP (Limaran)	1 bh								
							10.Penyediaan sarpras TJU (Marka,Rambu, papan informasi)	1 paket								
TOTAL											21,474,617,930	21,904,110,289	-			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

SKPD: Dinas Kebakaran

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
URUSAN WAJIB															
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					2,109,964,586	2,146,910,443			
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			UMBULHA RJO			Materai 6000 yang tersedia	160 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	798,028,575	821,969,432	baru	Dinas Kebakaran	
							Materai 3000 yang tersedia	500 buah							
							STNK roda 10 yang terbayar	2 unit							
							STNK roda 6 yang terbayar	7 unit							
							STNK roda 4 yang terbayar	7 unit							
							STNK roda 3 yang terbayar	1 unit							
							STNK roda 2 yang terbayar	8 unit							
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 jenis							
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							Alat tulis kantor yang tersedia	77 jenis							
							Jasa percetakan	3 jenis							
							Jasa Penggandaan	250.000 lembar							
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis							
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis							
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis							
							Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis							
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis							
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali							
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan							
							Pengadaan pakaian dinas harian	88 buah							
							Pakaian Kerja lapangan	126 buah							
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UMBULHA RJO			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	878,436,011	878,436,011	baru	Dinas Kebakaran	
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	88 dokumen ASN							
							Jasa Tenaga Bantuan	19 orang							

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target					
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UMBULHARJO			Makan dan minum yang tersedia untuk	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	433,500,000	446,505,000	baru	Dinas Kebakaran
							a.koordinasi,	24 kali						
							b.pegawai	88 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19 laporan						
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					1,258,187,000	1,295,932,610		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			UMBULHARJO			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	134,000,000	138,020,000	baru	Dinas Kebakaran
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UMBULHARJO			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	25 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1,124,187,000	1,157,912,610	baru	Dinas Kebakaran
							a. roda 10	2 unit						
							b. roda 6	7 unit						
							c. roda 4	7 unit						
							d. roda 3	1 unit						
							e. roda 2	8 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					270,705,000	278,826,150		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UMBULHARJO			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	270,705,000	278,826,150	baru	Dinas Kebakaran
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
							Frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
4	Program Pencegahan Kebakaran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Pelayanan Pencegahan Kebakaran	80%					1,793,050,000	1,846,841,500		
4.1	Pencegahan Bahaya Kebakaran			UMBULHA RJO			Pelayanan Rekomendasi Kebakaran	12 bulan	Terbitnya Rekomendasi Sarana Perlindungan Bangunan	12 bulan	1,447,675,000	1,491,105,250	baru	Dinas Kebakaran
							Pemeriksaan Sarana Perlindungan Bangunan	200 kali	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemenuhan Proteksi Kebakaran	200 bangunan				
							Penyusunan DED Hidran Kampung	1 paket	Tersedianya Detail Engineering Desain Hidran	5 dokumen				
							Pengadaan Konstruksi Hidran Kampung	3 paket	Terbangunnya Konstruksi Instalasi Hidran Kampung	3 paket				
4.2	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran			UMBULHA RJO			Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran	50 kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Kebakaran	2500 orang	345,375,000	355736250	baru	Dinas Kebakaran
							Simulasi Penanggulangan Kebakaran	11 bulan	Terlaksananya Simulasi Penanggulangan Kebakaran	200 orang				
							Penerimaan Kunjungan Siswa KB/TK/SD	11 bulan	Meningkatnya Kesadaran Anak-anak/Siswa dalam Penanggulangan Kebakaran	11 bulan				
							Pameran PMPS	50 hari	Terlaksananya Pameran PMPS	50 hari				
5	Program Penanggulangan Kebakaran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Tingkat waktu tanggap (response time rate) 15 menit	75%					1,739,010,000	1,779,420,900		
5.1	Penanganan Kebakaran			UMBULHA RJO			Pemadaman Kebakaran	140 kali	Pemadaman Kebakaran berhasil	140 kali	1,347,030,000	1,387,440,900	baru	Dinas Kebakaran
							Evakuasi Bencana	50 kali	Evakuasi Bencana Dilakukan	50 hari				
							PAM Kegiatan Insidentil / Sewa Mobil PK / Penyiraman	125 kali	Kegiatan Insidentil Aman / Sewa Mobil PK Dilayani / Penyiraman Terlaksana	125 kali				
							PAM PMPS	50 kali	PMPS Aman	50 hari				
							Pelatihan Rutin Petugas Pemadam	6 kali	Meningkatnya Ketrampilan Petugas	6 kali				
							Piket Pemadam Kebakaran	365 hari	Kesiapsiagaan Petugas Pemadam kebakaran	365 hari				
5.2	Pengelolaan Sarana Prasarana Kekabaran			UMBULHA RJO			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	240 tabung	Tabung Pemadam Kebakaran Siap pakai	240 tabung	391,980,000	403,739,400	baru	Dinas Kebakaran
							Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2 paket	Selang dan kelengkapan pemadam kebakaran	2 paket				
											7,170,916,586	7,347,931,603		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggungjawab
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
URUSAN WAJIB														
Urusan Kepemudaan dan Olahraga														
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur & Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik						310,271,670	341,298,837		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. UH			Materei 6000 yang tersedia Materei 3000 yang tersedia STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Jasa kebersihan kantor Alat tulis kantor yang tersedia Jasa percetakan Jasa penggandaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia  Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia  Peraturan penrundang-undangan yang tersedia Jasa perbaikan peralatan kerja Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan rumah tangga yang tersedia Jasa pemeliharaan taman	75 buah 250 buah 2 buah 9 buah 12 jenis 12 bulan 48 jenis 1 jenis lembar 9 jenis  2 jenis  5 buah 3 jenis 6 jenis 11 jenis 10 jenis 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	168,591,670	185,450,837	Sedang berjalan	Dinas Pemuda & Olahraga
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meingkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					108,280,000	119,108,000		Dinas Pemuda dan Olah Raga

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung / bangunan kantor			Umbulharjo			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20,000,000	22,000,000	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	88,280,000	97,108,000	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meingkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					33,400,000	36,740,000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
3.1.	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD			Umbulharjo			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	100%	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	33,400,000	36,740,000	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) Frekuensi diklat formal yang diikuti	100% 2 kali	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					
4	Program Pengembangan Kepemudaan	Sosial Budaya	Meningkatnya kapasitas pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter		Terwujudnya generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi	100%					3,346,000,000	3,680,600,000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
4.2.	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan			Umbulharjo			Pemilihan Pemuda Pelopor	1 kegiatan	Kualitas generasi muda Kota Yogyakarta sesuai standar	100%	2,372,500,000	2,609,750,000	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
							Peningkatan Kualitas SDM Pemuda di Kota Yogyakarta	3 kegiatan						
							Aksi Damai dan Apresiasi Seni Pemuda Indonesia	3 kegiatan						
							Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda	1 kegiatan						
							Seleksi, pendidikan dan pelaksanaan Paskibraka	1 kegiatan						
							Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA	2 kegiatan						
4.2..	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan			Umbulharjo			Konsolidasi Kelembagaan OKP di Kota Yogyakarta	2 kegiatan			973,500,000	1,070,850,000	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
							Forum Sosilisasi Program Pemerintah	2 kegiatan						
							Kerjasama Lembaga Kepemudaan	3 kegiatan						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD
					Hasil program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.	Program Pengembangan Olahraga	Sosial Budaya	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter		Terwujudnya kualitas kesehatan dan prestasi olahraga Kota Yogyakarta	100%					5,037,664,040	5,541,420,544		Dinas Pemuda dan Olah Raga
5.1.	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat			Umbulharjo			Pengiriman kontingen Kota Yogyakarta dalam Tri Lomba Juang	1 kegiatan	Prestasi olahraga Kota Yogyakarta dalam kejuaraan yang diikuti	100%	3,148,543,400	3,463,387,840	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
						Pengembangan Kelas Khusus Olah Raga	2 kegiatan							
						Kegiatan keolahragaan bagi masyarakat dan olahraga prestasi Peningkatan kualitas SDM olahraga	3 kegiatan 2 kegiatan							
5.2.	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan			Umbulharjo			Pengembangan FORMY melalui:	3 kegiatan	Cakupan kelembagaan keolahragaan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga masyarakat Kota Yogyakarta	100%	1,889,120,640	2,078,032,704	Sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
							Pengembangan KONI Kota Yogyakarta	2 kegiatan						
							Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Yogyakarta	1 kegiatan						
Jumlah											8,835,615,710	9,719,167,381		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Bagian Tata Pemerintahan

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur					Target
Urusan Wajib															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja dan Aparatur Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Akuntabilitas Kinerrja Pemerinrtah Daerah Meningkat	100%					714,960,746	788,814,531			
	Penyediaan jasa, peralatan, dan			UMBULHA RJO -			Materai 6000 yang tersedia	400 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	89,985,900	99,100,000	Baru	Bag. Tapem	
							Materai 3000 yang tersedia	124 buah							
							STNK Roda 4 yang terbayar	3 unit		100%			Baru	Bag. Tapem	
							STNK Roda 4 yang terbayar	4 unit							
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis		100%					
							Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis		100%			Baru	Bag. Tapem	
							Alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis		100%					
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000 lembar		100%			Baru	Bag. Tapem	
Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis		100%	Baru	Bag. Tapem										
1.2	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran			UMBULHA RJO -			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan Laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57,646,846	63,411,531	Baru	Bag. Tapem	
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	20 dokumen		jumlah dokumen asn					20 dokumen
							Jasa Tenaga bantuan	2 orang		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran					100%
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi						makan dan minum yang tersedia untuk			100%	489,542,000	544,000,000	Baru	Bag. Tapem	

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							koordinasi	30 kali		100%			Bag. Tapem	
						rapat dinas walikota	12 kali							
						Pegawai	15 orang							
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan							
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					62,056,000	65,000,000		
2.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UMBULHA RJO			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	62,056,000	65,000,000		
							a.roda 4 (empat), b.roda 2 (dua)	3 unit 4 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	UMBULHA RJO -	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					15,730,000	17,303,000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD						Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja pogram yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	15,730,000	17,303,000		Bag. Tapem

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggun- g Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Laporan kinerja SKPD, LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan						
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Prosentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100%					2,740,248,930	3,014,273,823		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot Yogyakarta	B								
					Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggar-an Pemda	Tinggi								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			UMBULHA RJO -			Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya	4 buku, 600 eksp	Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD	4 buku, 600 eksp	1,016,248,880	1,117,873,768		Bag. Tapem
							Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 buku,65 eks	Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaaan Pemda Tahun 2015	1 buku,65 eks				Bag. Tapem
							ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2016	1 dokumen		100%				
							Fasilitasi Forpi	6 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	49 SKPD				
							Fasilitasi Tim koordinasi Pilkada	6 bulan	Kelancaran persiapan penyelenggaraan pilkada	11 bulan				Bag. Tapem
							Memori Jabatan Penjabat Walikota Yogyakarta	1 Buku	Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun	4 buku. 600 eksp				Bag. Tapem
							Tersusunya buku topomini	25 eksp	Inventarisasi unsur buatan toponimi	1 dokumen				
							Penegasan Batas Wilayah	50 pathok batas	pemeliharaan pathok batas wilayah	50 pathok batas				

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggun- g Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan						Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	Tersedianya Dukungan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan UPD	3 dokumen	1,000,000,050	1,100,000,055		Bag. Tapem
							Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014	1 dokumen	Tersedianya Laporan Monev Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota	1 dokumen				
							Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan pelaksanaan Pelimpahan kewenangan sesuai peraturan yang ada	1 kali				
							Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	1 dokumen	Tersedianya Dukungan bahan Pertimbangan Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen				
							Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 kali	Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan	1 dokumen				
							Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	Dukungan peningkatan terhadap kualitas petugas teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan	1 kali				Bag. Tapem

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
						Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	Penyediaan bahan dan data perencanaan pembangunan masyarakat di Tingkat Kelurahan	2 dokumen (semester I dan II)					
						Pendampingan Teknis pelimpahan Kwenangan	1 kali	Penyediaan data potensi, perkembangan dan data dasar keluarga berbasis Kelurahan	1 dokumen					
						Penyusunan Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen (semester I dan II)	Pemanfaatan hasil rakor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Kec & Kel	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan					
						Penyusunan Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dokumen	Pemanfaatan data perangkat Kecamatan & Kelurahan sebagai bahan masukan penataan perangkat Kec & Kel	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan					
						Pelaksanaan Koordinasi antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan	Peningkatan wawasan dan kemampuan perangkat Kec & Kel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kec & Kel	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan				Bag. Tapem	
						Penyusunan data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan	Penciptaan iklim persaingan yang sehat dan kondusif antar Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN	3 Kecamatan					
						Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yogyakarta	3 kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kecamatan dan Kelurahan	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan					
						Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan	Penetapan status tertentu dari capaian hasil perkembangan Kel	45 Kelurahan					

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	45 Kelurahan	Penyediaan bahan dan data pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan berbasis Kel	6 kelurahan				
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat						Peningkatan Kehidupan Beragama	1 dokumen	Terwujudnya Pendampingan dan Pengembangan kegiatan keagamaan	1 dokumen	724,000,000	796,400,000		
							Penguatan lembaga sosial dan keagamaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Penguatan lembaga sosial dan keagamaan	1 dokumen				
							Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen hasil Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat	1 dokumen				
TOTAL											3,455,209,676	3,803,088,354	-	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah: Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					475,059,020	522,324,922		Bagian Hukum
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor						Materai 6000 tersedia	200 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	61,152,500	67,267,750	Sedang berjalan	Bagian Hukum
							Materai 3000 tersedia	300 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 macam	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							STNK Roda 4 yang terbayar	2 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							STNK Roda 2 yang terbayar	4 Unit						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	10 Kali service	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	62 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Penyediaan Kebutuhan Cetak & penggandaan	Cetak : 2 jenis Penggandaan : 5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Peralatan Rumah tangga yang tersedia	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Surat kabar yang tersedia	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Buku peraturan perundang-undangan/ buku referensi yang tersedia	14 Buku						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan laporan barang yang tersusun	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	73,650,520	80,775,572	sedang berjalan	Bagian Hukum
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	15 ASN, 2 Naban	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan				
							Jasa Tenaga Bantuan (NABAN)	2 Orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi						Penyediaan makanan dan minuman Pegawai	21 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	340,256,000	374,281,600	sedang berjalan	Bagian Hukum
							Penyediaan makanan dan minuman Rapat	14 kali						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran					
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan	UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					72,700,000	79,970,000		Bagian Hukum
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15,000,000	16,500,000		
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Roda 4 : 2 Unit Roda 2 : 4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57,700,000	63,470,000		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	UH	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					51,889,000	32,327,900				
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD						Dokumen perencanaan dan panganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	51,889,000	32,327,900		Bagian Hukum		
							Laporan Kinerja SKPD : LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 Jenis Laporan								
							Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7 orang								
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	UH	Persentase rancangan produk hukum yang tepat waktu	100%					2,813,904,970	2,813,904,970				
4.1	Kegiatan Peraturan PerUndang-Undangan						Publikasi Raperda ke Media Cetak	6 Raperda	Terpublikasinya Raperda ke Media cetak	6 Raperda	162,195,000		Sedang berjalan	Bagian Hukum		
							Draft Raperda, Konsinyering, Pembahasan Raperda dengan DPRD, Perwal & Kepwal, Analisis Perwal, Naskah Akademik Raperda, Naskah Paripurna Raperda	7 Sub Kegiatan	Tersusunnya Produk Hukum daerah	455 produk hukum	1,118,395,000					
4.2	Kegiatan Bantuan Hukum						Perkara/sengketa yang ditangani	5 Perkara	Terselesaikannya perkara/sengketa yang ditangani	5 Perkara	889,150,000					
							Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 bulan	Terdampinginya masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum	100%						
							Jumlah Raperda/Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda, 3 Raperwal	Terwujudnya nilai-nilai HAM dalam Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta dan Kegiatan di SKPD	3 Raperda, 3 Raperwal	171,468,000					
							Jumlah dokumen laporan kegiatan	2 dokumen laporan kegiatan		2 dokumen laporan kegiatan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
4.3	Kegiatan Dokumentasi dan Informasi hukum daerah						Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	8 Kali	Tersampaikannya Informasi produk hukum kepada masyarakat	8 Kali				
							Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	4 Kali	Meningkatnya pemahaman Masyarakat	5 Kali				
							Pembinaan Masyarakat Sadar hukum	14 kecamatan	Terbinanya masyarakat Sadar Hukum Kota Yogyakarta	14 Kecamatan				
							Bendel cetakan Perda, Perwal, Peraturan DPRD	7875 bendel cetakan produk hukum	tersedianya bendel cetakan, Perda, Perwal, Peraturan DPRD	7875 bendel cetakan produk hukum				
TOTAL											3,413,552,990	3,448,527,792		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan**

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Prakiraan Maju	Jenis Keg SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif		1/2/3	1/2/3
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Target			
												(13)	(14)	(15)
	Urusan Wajib													
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Outcome : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					262,922,300	276,068,415		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Kec. UH			- Materai 3000 yang tersedia	350 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	128,926,300	135,372,615	sedang berjalan	Bagian Adbang
							- Materai 6000 yang tersedia	120 buah						
							STNK Roda 2 Yang terbayar	4 Unit						
							STNK Roda 4 Yang terbayar	2 Unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis						
							Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	30 Unit						
							Jasa Pemeliharaan komputer	10 Unit						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	64 jenis						
							Jasa Penggandaan	167.980 lembar						
							komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	19 jenis						
							peralatan rumah tangga tersedia	3 jenis						
							Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Buku Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	16 buku						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	27,000,000	28,350,000	sedang berjalan	Bagian Adbang
							Dokumen administrasi kepegawaian	12 Dokumen ASN						
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH			1. Makan dan Minum Yang Tersedia Pegawai Koordinasi Tamu	242 kali 33 kali 20 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	106,996,000	112,345,800	sedang berjalan	Bagian Adbang
							2 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	19 laporan						
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					78,121,000	82,027,050		

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Prakiraan Maju (13)	Jenis Keg (14)	SKPD Penanggung Jawab (15)
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Target			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor			Kec. UH			1. Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20,525,000	21,551,250	sedang berjalan	Bagian Adbang
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional			Kec. UH			1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat )  Roda 2 (dua )	4 Unit  2 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	57,596,000	60,475,800	sedang berjalan	Bagian Adbang
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Outcome : Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%				100%	101,484,574	106,558,802		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. UH			1. Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA, DPA dan PK)  2. Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)  3. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4 Pegawai yang mengikuti service excellent	5 Dokumen  5 Dokumen  16 orang 20 orang	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran  Nilai akuntabilitas kinerja SKPD  Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%  BB  100% 100%	101,484,574	106,558,802	sedang berjalan	Bagian Adbang
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. UH	Outcome : Persentase kesesuaian realisasi terhadap target kegiatan	92%					1,231,394,929	1,292,964,676		
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda						1. Dokumen Renstra Setda	1 dokumen	Tersedianya renstra setda	100%	108,400,000	113,820,000	sedang berjalan	Bagian Adbang
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			Kec. UH			1. Laporan Evaluasi Dokuman Kontrak konstruksi 2. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM pelaporan 3. Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 4. Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan 5. Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi 6. Laporan pengendalian Kontrak Kritis	1 laporan 12 laporan 4 laporan 20 laporan 150 laporan 1 laporan	Terwujudnya Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Terwujudnya Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Terwujudnya Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan Terwujudnya Laporan hasil pengendalian fisik kegiatan Terwujudnya Laporan operasional SIM Pelaporan Tersedianya Uji Lab Konstruksi	100% 100% 100% 100% 100% 100%	748,566,929	785,995,276	sedang berjalan	Bagian Adbang

Nomor	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Target			
												(13)	(14)	(15)
							7. Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan kosntruksi	1 laporan	Terwujudnya Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	100%				
							8 Pembuatan dan updating data pengendalian berbasis digital	12 bulan	Terwujudnya updating data pengendalian berbasis digital	100%				
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			Kec. UH			1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%	374,428,000	393,149,400	sedang berjalan	Bagian Adbang
							2. Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan	Tersedianya Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	100%				
							3. Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan	Tersedianya Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan	100%				
							4. Lapoaran Evaluasi AHSP	1 laporan	Terwujudnya Laporan Evaluasi AHSP	100%				
							5. Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen	Tersedianya Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	100%				
							6. Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan	1 laporan	Terselenggaranya Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan	100%				
					TOTAL						1,673,922,803	1,757,618,943		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Bagian Perekonomian, Pengembangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan								Hasil Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntantabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%						622,947,900	650,000,000		Bagian P3ADK
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan			UH			Materai 3000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%	81,115,000				
							Materai 6000 yang tersedia	175 buah							
							Jasa Pengiriman/paket	2 paket							
							STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan							
							STNK roda 2 yang terbayar	2 kendaraan							
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis							
							Jasa kebersihan kantor	1 paket							
							Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis							
							Jasa percetakan	2 jenis							
							Jasa penggandaan	116,000 lembar							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis							
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis							
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis							
							Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis							
							Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis							
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis							
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis							
							Jasa pemeliharaan taman	6 bulan							

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UH			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis			92,926,900			
							Dokumen administrasi kepegawaian yang di kelola	21 dokumen ASN						
							Jasa tenaga bantu	3 orang						
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			UH			Makan dan minum yang tersedia untuk : a. koordinasi b. pegawai c. tamu	44 kali 21 pegawai 18 kali			448,906,000			
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan						
2	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntantabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					116,380,000	100,000,000		Bagian P3ADK
2.1	Pmeliharaan rutin / berkala gedung / kantor			UH			Jasa pemeliharaan Gedung/Bangunan kantor/tempat	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%	50,000,000			
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			UH			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kerdaraan dinas / operasional :  Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)	2 buah 4 buah	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD		66,380,000			
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntantabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					25,075,000	50,000,000	APBD	Bagian P3ADK
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	25,075,000	50,000,000		
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	nilai akuntabilitas kinerja SKPD					

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target						
							Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur						
4	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	UH	Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan kerjasama daerah	100%					1,594,218,160	863,000,000		Bagian P3ADK	
4.1	Kegiatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			UH			Data Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan kerjasama daerah	100%	713,840,160	-			
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Pajak Daerah	12 bulan							
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Retribusi Daerah	12 bulan							
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Lain-lain PAD	12 bulan							
							Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2017	1 rencana target							
							Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 2017	1 rencana target							
							Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD Th 2017	1 rencana target							
							Penyusunan RencanaTarget Pajak Daerah Th 2018	1 rencana target							
							Penyusunan RencanaTarget Retribusi Daerah Th 2018	1 rencana target							
							Penyusunan RencanaTarget Lain-lain PAD Th 2018	1 rencana target							
							Pendukung Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah	1 Dokumen							

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Pendukung Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah	1 Dokumen							
							Pendukung Kebijakan Peraturan Pajak Daerah	1 Dokumen							
							Pendukung Kebijakan Peraturan Retribusi Daerah	1 Dokumen							
							Pendukung Kebijakan Optimalisasi Aset Daerah	1 Dokumen							
							Studi /Kajian Retribusi	2 Dokumen							
							Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen							
							Update data perekonomian daerah	1 dokumen							
4.2	Kegiatan Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD			UH			Data pendapatan BLUD	1 dokumen		Tersedianya Data Pendapatan BLUD dan BUMD	100%	348,550,000	-		
							Data pendapatan BUMD	1 dokumen							
							Rancangan Pedoman pelaporan kinerja BUMD	1 dokumen							
							Bahan pendukung kebijakan pendapatan BLUD	1 dokumen							
							Monitoring dan Evaluasi Pendapatan BLUD	12 bulan							
							Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	12 bulan							
							Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2017	1 rencana target							
							Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2018	1 rencana target							
							Rencana Target Pendapatan BUMD 2018	1 rencana target							
4.3	Kegiatan Kerjasama Daerah			UH			Kajian/telaah rencana Kerjasama Daerah	50 kajian/ telaah		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan baik	100%	531,828,000			
							Penawaran Kerjasama Daerah	4 penawaran							
							Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 dokumen							
							Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen							

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 update						
							Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen						
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 Dokumen						
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 Dokumen						
							Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 dokumen						
							Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	15 koordinasi						
							Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi	5 iuran						
JUMLAH											2,358,621,060	1,663,000,000		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	1/2/3
	Perencanaan Pembangunan													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					472,548,870	496,176,314		Bagian Layanan Pengadaan
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			1. Materai 3000 yang tersedia 2 Materai 6000 yang tersedia 3 STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya 4 STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Jasa Kebersihan Kantor 7 Alat Tulis Kantor yang tersedia 8 Jasa Penggandaan 9 komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 10 Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia 11 Peraturan perundang-undangan yang tersedia 12 Jasa Perbaikan peralatan kerja 13 Komponen peraltan dan perlengkapan kantor tersedia 14 Peralatan rumah tangga tersedia	600 buah 100 buah 2 Unit 2 Unit 18 jenis 12 bulan 70 Jenis 30,000 lembar 6 jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 21 Jenis 7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	182,782,350	191,921,468	1	
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. UH			1. Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi) 2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 3 Jasa Tenaga Bantuan	4 Jenis 12 Dokumen ASN 7 Orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	187,992,520	197,392,146	1	
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH			1. Makan dan Minum yang tersedia 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	313 Kali 16 Laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	101,774,000	106,862,700	1	

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	1/2/3	1/2/3
2.	Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah meningkat	Kec. UH	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%						106,495,000	111,819,750		
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor			Kec. UH			1. Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelanaran tugas dan fungsi SKPD	100%	50,525,000	53,051,250	1		
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. UH			1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelanaran tugas dan fungsi SKPD	100%	55,970,000	58,768,500	1		
							- Roda 4	2 Unit							
							- Roda 2	2 Unit							
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%						131,778,280	138,367,194		
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan,Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. UH			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra,Renja,RKT,RKA,DPA,Tapkin yang tersusun	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	131,778,280	138,367,194	1		
							2 Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan keuangan dan fisik, SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas kinerja SKPD						
							3 Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			-			
4	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Kec. UH	Prosentase pelayanan pengadaan sesuai dengan paket pelimpahan	8%						2,172,305,680	2,280,920,964		
4.1	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			Kec. UH							100%	479,807,000	503,797,350	1	
							1 Laporan Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 laporan	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	100%					
							2 Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan	Terwujudnya Laporan Pendampingan Institusi	100%					
							3 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan	Terwujudnya Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	100%					
							4 Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan	Terwujudnya Laporan Pendampingan Sirup	100%					
							5 Laporan Hasil Surveillance ISO	1 laporan	Terwujudnya Laporan Hasil Surveyllance ISO	100%					

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan								Hasil Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	1/2/3	1/2/3
							6	Laporan Verifikasi Berkas	1 laporan	Terwujudnya Laporan'Verifikasi Berkas	100%				
							7	Laporan Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	120 Peserta	Terselenggaranya Pelatihan Penyedia/Institusi	100%				
4.2	Operasional Pengadaan Barang/Jasa			Kec. UH							100%	1,229,241,780	1,290,703,869	1	
							1	Laporan Pendampingan RPP dan RUP	48 SKPD/Unit Kerja	Terselenggranya Pendampingan RPP dan RUP	1 Laporan				
							2	Kajian Kebijakan dan Penyempurnaan Perwal Pengadaan Barang/Jasa	1 dokumen	Terwujudnya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen				
							3	Peraturan Walikota Pengadaan Barang/Jasa	1 Perwal	Meningkatnya Pengelolaan Proses	1 Laporan				
							4	Paket Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	250 Paket	Meningkatnya Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan				
							5	Laporan Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan	Terwujudnya Analisa Survey	1 Laporan				
							6	Laporan Analisa Survey	1 Laporan						
							7	Laporan Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan						
							8	FGD Evaluasi Pelaksanaan lelang dengan	2 kali						
							9	FGD Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1 kali						
							10	Sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa	2 kali						
4.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			Kec. UH								463,256,900	486,419,745	1	
							1	Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 laporan	Terselenggaranya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Laporan				
							2	Laporan Pelaksanaan Klinik Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan	Terselenggaranya Pelaksanaan Klinik Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan				
							3	Laporan Pengelolaan Resiko Pengadaan	1 laporan	Terwujudnya Laporan Pengelolaan Resiko Pengadaan	1 Laporan				
							4	Laporan Pembekalan PPKom,PA,Pejabat Pengadaan,PPHP	2 Kali	Terselenggaranya Laporan Pembekalan PPKom,PA,Pejabat Pengadaan,PPHP	2 kali				
							5	Bimtek Peningkatan Kompetensi POKJA	1 laporan	terselenggaranya Peningkatan Kompetensi POKJA	1 Laporan				
							6	Kebijakan Katalog Lokal	1 Laporan	Terlaksnanya Kebijakan Katalog Lokal	1 Laporan				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target	1/2/3
						7	Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/Jasa Lokal	1 Laporan	Terwujudnya Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/Jasa Lokal	1 Laporan				
	TOTAL										2,883,127,830	3,027,284,222		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
												13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntantabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					539,850,200	593,835,220		
1.1	Penyediaan Jasa Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			- Materai 6000 yang tersedia	200 Buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	204,140,600	224,554,660	Sedang berjalan	Bagian Umum
						- Materai 3000 yang tersedia	500 Buah							
						- STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit							
						- STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit							
						- STNK roda 2 yang terbayar	9 Unit							
						- Jenis peralatan kerja	2 Jenis							
						- Jenis Pemeliharaan peralatan kerja	5 Jenis							
						- Bahan & peralatan kebersihan yang tersedia	22 jenis							
						-	14 jenis							
						- Peralatan rumah tangga yang tersedia								
						- Alat tulis kantor yang tersedia	78 Jenis							
						- Jasa percetakan	5 Jenis							
						- Jasa penggandaan	85.000 Lembar							
						- Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 Jenis							
						- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis							
						- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	26 Jenis							
						- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair	10 unit							
						- Belanja bahan/ bibit tanaman	8 unit							
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. UH			- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	296,549,600	326,204,560	Sedang berjalan	Bagian Umum
						- Dokumen administrasi kepegawaian	35 dokumen ASN							
						- Jasa Tenaga Bantuan	5 orang							
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH			- Makan dan minum yang tersedia untuk:		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	39,160,000	43,076,000	Sedang berjalan	Bagian Umum
						a. koordinasi	77 kali							
						b. pegawai	35 orang							
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntantabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					191,351,000	210,486,100		
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. UH			- Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	8 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan fungsi SKPD	100%	20,000,000	22,000,000	Sedang berjalan	Bagian Umum
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal			Kec. UH			- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaraan tugas dan	100%	171,351,000	188,486,100	Sedang berjalan	Bagian Umum
						- Roda 6 (enam)	1 Unit							
						- Roda 4 (empat)	8 Unit							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							- Roda 2 (dua)	9 Unit	fungsi SKPD			13	14	15
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntantabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					37,647,000	41,411,700		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. UH			- Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA)	5 Dokumen	Tersediaanya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	37,647,000	41,411,700	Sedang berjalan	Bagian Umum
							- Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil	5 Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntantabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	100%					2,748,890,022	3,023,779,024		
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan			Kec. UH			- Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk dan Dinas Perijinan lantai 3	2 lokasi	Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	100%	1,746,456,272	1,921,101,899	Sedang berjalan	Bagian Umum
							- Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, dan Pos jaga pintu keluar	5 lokasi						
							- Pelayanan Kegiatan Isidentil Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Jenis						
							- Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Unit						
							- Pemeliharaan kebersihan Rumah Dinas Walikota & Wakil Walikota	2 unit 12 bulan						
							- Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Unit						
							- Pemeliharaan tanaman, taman dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan	Taman = 9 lokasi						
								Parkir = 8 lokasi						
								Jalan di kompleks balaikota						
							- Laporan administrasi barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen						
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			Kec. UH			- Sinkronisasi Pengelola Keuangan Setda	1 Dokumen	Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas	100%	900,653,750	990,719,125	Sedang berjalan	Bagian Umum

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
												13	14	15
							- Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda Semesteran	1 Dokumen	persuratan dinas, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah					
							- Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda	1 Dokumen						
							- Pelayanan Perjalanan Dinas	150 Kali						
							- Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen						
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			Kec. UH			- Pembinaan Persuratan Dinas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	9 Bagian	Presentase pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	100%	101,780,000	111,958,000	Sedang berjalan	Bagian Umum
JUMLAH											3,517,738,222	3,869,512,044		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama SKPD: Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
	Pemerintahan Umum													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemer		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				1,490,668,639	1,565,202,071			
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan			Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	559,628,500	587,609,925	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Materai 6000 yang tersedia	650 buah			7,462,500			
							Materai 3000 yang tersedia	1000 buah						
							Perangko	70 buah						
							Jasa Pengiriman/paket	15 kali						
							Sewa mesin fotokopi	1 unit			17,800,000			
							Servis HT	10 kali						
							STNK roda 4 yang terbayar	13 unit			25,250,000			
							STNK roda 2 yang terbayar	6 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis			14,599,000			
							Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis			30,841,000			
							Cetak	1.800 eks			27,300,000			
							Penggandaan	64.000 lembar						
							Jilid	50 jild						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis			19,636,000			
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis			357,750,000			
Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	58,990,000												
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Umbulharjo					100%	238,312,139	250,227,746			
							Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,		21,600,000		sedang berjalan	Bagian Protokol

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
							Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	42 dokumen ASN	keuangan dan operasional perkantoran		2,400,000		baru	Bagian Protokol	
						Jasa Tenaga Bantuan	9 orang			214,312,139		sedang berjalan	Bagian Protokol		
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	692,728,000	727,364,400	sedang berjalan	Bagian Protokol	
							Koordinasi dan konsultasi luar daerah	90 kali			595,400,000				
							Makan dan minum pegawai	44 orang		97,328,000					
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemer	Umbulharjo	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					358,321,750	376,237,838			
2.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100%	358,321,750	376,237,838	sedang berjalan	Bagian Protokol	
	a.roda 4 (empat),	13 unit													
	b.roda 2 (dua)	6 unit													
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah	Umbulharjo	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					27,915,000	29,310,750			
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD						Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	27,915,000	29,310,750	sedang berjalan	Bagian Protokol	
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen	Tersedianya dokumen kinerja	100%					
4	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Terwujudnya Layanan Keprotokolan yang baik		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	65			1,932,734,459	2,029,371,182			
4.1	Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil						Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja	300 kali	Terlaksananya pemanduan kegiatan kepala daerah	100%	249,272,060	261,735,663			
							Penerimaan Audiensi dan silaturahmi	296 kali							

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 orang						
4.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota						Apel dan Upacara	13 kali	Terselenggaranya Upacara dan Seremonial	100%	1,292,447,560	1,357,069,938		
							Latihan Korps musik	24 kali						
							Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	200kali						
							Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	45 kali						
							Peningkatan performa staf penatalaksanaan acara	25 orang						
							Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah	500 naskah						
4.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli						Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	240 kali	Terselenggaranya pemanduan dan rapat Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	100%	391,014,839	410,565,581		
							Pemanduan Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	240 kali						
							Penerimaan Tamu Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	120 kali						
JUMLAH											3,809,639,848	4,000,121,840		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
												13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					586,135,776	615,442,565		
	Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan			Kec. Umbulharjo			Keluaran : - Materai 6000 yang tersedia  - Materai 3000 yang tersedia - Jasa Pengiriman/paket  Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer  - STNK Roda 4 yang terbayar - STNK Roda 2 yang terbayar  - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia - Alat Tulis Kantor yang tersedia - jasa percetakan  -Jasa penggandaan  - komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia - komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia  - Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia  - buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	150 buah  560 buah 30 kali  2 mesin ketik, 10 komputer/laptop, 7 AC, 2 kipas angin, 6 printer 2unit 5 unit  25 jenis  61 jenis 1 jenis  426.079 lembar  9 jenis  22 jenis  2 surat kabar  10 buku	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	166,523,500	174,849,675	sedang berjalan	Bagian Organisasi
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. Umbulharjo			-dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun  dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola Jasa Tenaga bantuan	4 jenis  50 dokumen ASN 3 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	107,124,276	112,480,490	sedang berjalan	Bagian Organisasi
1.3	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kec. Umbulharjo			makan dan minum yang tersedia untuk - koordinasi  - pegawai - Tamu dinas  - Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	  39 kali 35 orang 28 kali 17 laporan	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	312,488,000	328,112,400	sedang berjalan	Bagian Organisasi

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
												13	14	15
2	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					92,449,000	97,071,450		
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung /bangunan kantor			Kec. Umbulharjo			Keluaran :		dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%	30,495,000			
							- jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit				32,019,750	sedang berjalan	Bagian Organisasi
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Kec. Umbulharjo			Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%	61,954,000	65,051,700	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							- roda 4 (empat) - roda 2 (dua)	2 unit 5 unit	kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					83,840,000	88,032,000		
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan,pengendalian,laporan capaian kinerja SKPD			Kec. Umbulharjo			Keluaran : Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran ( renstra,renja,PK,RKA,DPA)  Laporan kinerja SKPD( LKIP,Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)  frekuensi diklat formal yang diikuti	5 dokumen  5 dokumen  5 kali	tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%  BB  100%	83,840,000	88,032,000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		persentase implementasi indikator standar pelayanan yang	70%					5,724,660,547	5,993,188,199		

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
				Kec. Umbulharjo			Keluaran :				1,486,000,493	13	14	15		
4.1	Pelaksanaan Analisa						- Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi	49 OPD / unit kerja	Laporan Analisa Jabatan Konversi sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai dan penyusunan formasi	49 OPD / unit kerja			1,560,300,518	sedang berjalan		
						- Penyusunan Informasi Jabatan Dinas	21 OPD /unit kerja	Laporan Informasi Jabatan Dinas sebagai sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai dan penyusunan formasi	21 OPD /unit kerja							
							-Penyusunan formasi	48 OPD/unit kerja	daftar formasi	48 OPD/unit kerja						
							- Penyusunan evaluasi jabatan dinas & kecamatan	35 OPD	data grading jabatan	1 laporan						
							- penyusunan pola karir	1 laporan	draft pola karir	1 laporan						
							- Penyusunan sistem pengukuran kinerja pegawai	1 laporan	standar kinerja kesejahteraan pegawai	1 laporan						
4.2	Pemantapan Pelayanan Publik			Kec. Umbulharjo			Keluaran :				951,449,000	999,021,450	sedang berjalan			
							- Pembinaan pelayanan publik	1 dokumen laporan penyelenggaraan PP	Bahan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik	1 dokumen laporan penyelenggaran PP						
							-Monev pelayanan publik	1 dokumen monev PP	Hasil monev Pelayanan publik sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik SKPD/unit kerja	1 dokumen monev PP						
							- Evaluasi SPP Kecamatan	14 kecamatan	bahan perbaikan standar pelayanan kecamatan	14 kecamatan						
							-Monev pencapaian SPM	2laporan pencapaian SPM	Pencapaian target SPM sesuai yang telah ditetapkan	2laporan pencapaian SPM						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							-Persiapan kompetensi inovasi pelayanan publik	5 SKPD/unit kerja pelayanan publik	partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat	5 SKPD/unit kerja pelayanan publik		13	14	15
							-Evaluasi Regulasi Pelayanan Perizinan	penyederhanaan,penyatuan regulasi jenis dan persyaratan perizinan	grand design pelayanan perizinan	1 dokumen			sedang berjalan	
							- Evaluasi PPK-BLUD	1 dokumen	Bahan Rekomendasi Peningkatan Kinerja BLUD	1 dokumen				
							- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yk	1 dokumen	Perkembangan Pelaksanaan IKM sebagai bahan rekomendasi kebijakan IKM	1 dokumen				
							-survey pengaduan masyarakat	16 sekolah	rekomendasi janji perbaikan pelayanan	16 sekolah				
							- pelaksanaan SKM Utilitas Kota	4 jenis layanan	kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan pemkot	1 dokumen				
4.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah			Kec. Umbulharjo			Keluaran : - evaluasi kelembagaan	1 dokumen	kapasitas kelembagaan yang rightsizing	1 dokumen	1,939,323,385	2,036,289,554	sedang berjalan	
							- Evaluasi penyusunan Rincian Tugas	37 Organisasi Perangkat Daerah	penjabaran tugas,pokok dan fungsi sesuai urusan	37 Organisasi Perangkat Daerah				
							Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi	1 laporan	rekomendasi penyempurnaan SIM aplikasi organisasi	1 laporan				
							-Penataan kelembagaan UPT Dinas /Badan	62 UPT	kelembagaan UPT yang rightsizing	62 UPT				
							Kajian Kelembagaan	1 dokumen kajian	rekomendasi kebijakan peningkatan kelembagaan	1 dokumen kajian				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
												13	14	15
4.4	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Daerah			Kec. Umbulharjo			Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 dokumen	rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan di Pemkot Yogyakarta	1 dokumen			sedang berjalan	
							- Evaluasi & Pendampingan pelaksanaan RB	8 area perubahan	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dalam dan pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8 area perubahan	723,094,643	741,544,000		
							-Workshop Reformasi Birokrasi	1 kali	Peningkatan SDM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	135 orang				
							-Penyusunan roadmap RB	1 dokumen	Pedoman teknis pelaksanaan RB	1 dokumen				
							-Evaluasi kinerja SKPD melalui SPEKOP	1 dokumen	Peningkatan kinerja SKPD	1 dokumen				
							-Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Adanya Dokumen LKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen				
							-Evaluasi LKIP	1 kali	Adanya Laporan hasil Evaluasi LKIP oleh Menpan sebagai rekomendasi perbaikan akuntabilitas pemerintah kota yogyakarta	1 kali				
							-Pendampingan LKIP	1 kali	Dukungan peningkatan kualitas penyusunan LKIP	1 kali				
							-Pengukuran Capaian Data LKIP	1 dokumen	Adanya Laporan Pengukuran Capaian Data LKIP	1 dokumen				
							-Evaluasi E-LKIP	1 dokumen	Adanya Laporan Evaluasi E-LKIP sebagai bahan rekomendasi penyempurnaan E-LKIP	1 dokumen				
							-Pendampingan E-LKIP	1 kali	Dukungan peningkatan kualitas petugas E-LKIP	1 kali				
							- Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT	2 Dokumen	- Dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT	2 Dokumen				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	Penanggungjawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Pendampingan penyusunan Tapkin dan RKT	1 kali	Dukungan peningkatan kualitas penyusunan Tapkin dan RKT	1 kali		13	14	15
							- Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen	- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen				
							- Penyusunan Perubahan RKT Instansi	1 dokumen	- Dokumen Perubahan RKT Instansi	1 dokumen				
							- Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen	Laporan Tribunalan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 dokumen				
4.5	Pemantapan Ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi			Kec. Umbulharjo			Keluaran : - Penyusunan Sistem & Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	4 draft Perwal/Kepwal,	pengembangan sistem & prosedur ketatalaksanaan	4 draft Perwal/Kepwal,	624,793,026	656,032,677	sedang berjalan	
							- Penyelenggaraan Forkompan tingkat propinsi dan kota	2 kali penyelenggaraan	Pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur daerah	2 kali penyelenggaraan				
							-Evaluasi Standar Sarana Prasarana kerja	1 dokumen	kesesuaian standar sarana prasarana kerja dengan kebutuhan dan ketentuan	1 dokumen				
							_Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 dokumen	Penerapan standarisasi harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							_Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 dokumen	Penerapan analisa standar belanja di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							Pendampingan penyusunan SOP	48 SKPD /unit kerja	kesesuaian SOP dengan tupoksi	48 SKPD/unit kerja				
							- Pengembangan budaya kerja	1 dokumen	Penerapan budaya kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
					JUMLAH						6,487,085,323	6,793,734,214		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur
	Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														
	Bidang Urusan : Sekretariat DPRD														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					7,937,993,877	8,731,793,265			
1.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			UMBULHARJO			- Meterai 6000 yang tersedia	720    buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,400,844,225	3,740,928,648	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD	
							- Meterai 3000 yang tersedia	960    buah							
							- Perangko	40    buah							
							- Jasa Pengiriman / Paket	100    kali							
							Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12    bulan							
							STNK roda 4 yang terbayar	19    unit							
							STNK roda 2 yang terbayar	13    unit							
							Jasa kebersihan kantor	12    bulan							
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	76    jenis							
							1. Jasa percetakan	12    jenis							
							2. Jasa penggandaan	440,000    lembar							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	31    jenis							
							Jasa perbaikan peralatan kerja	18    jenis							
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	54    jenis							
							Jasa Tenaga Keamanan	12    bulan							
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UMBULHARJO			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4    jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	1	179,403,477	197,343,825	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD	
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	46    dokumen ASN							
							Jasa Tenaga Bantuan	6    orang							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target					
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UMBULHARJO			Makan dan minum yang tersedia untuk: 1. Rapat / Koordinasi 2. Pegawai Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bimtek DPRD Adeksi DPRD	 396 kali 50 orang 250 laporan 3 kali 2 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	1	4,357,746,175	4,793,520,793	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat		Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%					822,927,000	905,219,700		
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung /Kantor			UMBULHARJO			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	105,019,000	115,520,900	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional						Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Roda 4 ( empat ) 2. Roda 2 ( dua )	4 unit   15 unit 13 unit		1	717,908,000	789,698,800	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					538,885,000	592,773,500		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UMBULHARJO			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran :   Renstra, Renja,RKT,PK,RKA, DPA	   6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	538,885,000	592,773,500	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							2. Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM,SPIP,SOP yang tersusun	6 dokumen						
							3. Pegawai yang mengikuti Diklat, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Asdeksi	52 ok						
4	Program Pengelolaan Informasi, Humas Dan Keprotokoleran DPRD	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat		Jumlah media publikasi informasi ke masyarakat	3					2,157,712,000	2,373,483,200		
4.1	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD			UMBULHARJO			Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di media cetak	6 kali	Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di media cetak	6 kali	2,157,712,000	2,373,483,200	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali				
							Talkshow DPRD di radio	18 kali	Talkshow DPRD di radio	18 kali				
							Talkshow DPRD di Televisi	18 kali	Talkshow DPRD di Televisi	18 kali				
							Kolom Khusus DPRD di Media Cetak	16 kali	Kolom Khusus DPRD di Media Cetak	16 kali				
							Pengadaan Plaquet Cinderamata	150 buah	Plaquet Cinderamata	150 buah				
							Publikasi baliho	1 kali	Publikasi baliho	1 kali				
							Ucapan Selamat di media cetak	10 kali	Ucapan Selamat di media cetak	10 kali				
							Master DVD Profil DPRD	1 Paket	Master DVD Profil DPRD	1 Paket				
							Pembuatan Kalender DPRD	4000 eks	Kalender	4000 eks				
							Greetings di TV	6 kali	Greetings di TV	6 kali				
							Pembuatan Majalah DPRD	4 edisi	Majalah DPRD	4 edisi				
							Penerimaan Tamu DPRD dan Set. DPRD	150 kali	Penerimaan Tamu DPRD dan Set. DPRD	150 kali				
							Pengelolaan Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial Lainnya	12 bulan	Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media website, SIM Agnda Dewan dan Media Sosial Lainnya	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5	Program Penguatan Kapasitas DPRD	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat		Persentase pelaksanaan sidang paripurna DPRD	100%					40,034,475,000	44,037,922,500		
5.1	Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risalah			UMBULHARJO			Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	30 Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	30 Dokumen	33,194,730,000	36,514,203,000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Pelaksanaan Rapat Rapat DPRD	12 bulan	Laporan Pelaksanaan Rapat Rapat DPRD	12 dokumen				
							Pengawasan Mitra Kerja	138 kali	Laporan Pengawasan mitra kerja	138 dokumen				
							Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja	Rencana Kerja DPRD	2 dokumen				
							Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS P	2 Nota Kesepakatan	- Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS	2 dokumen				
							Persetujuan Bersama RAPBD - RAPBD P	2 Persetujuan Bersama	- Dokumen Persetujuan Bersama RAPBD	2 dokumen				
							Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Persetujuan Bersama	- Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen				
							Kajian Ilmiah	4 Kajian	Laporan Kajian Ilmiah	4 dokumen				
							Penyusunan Prolegda/PropemPerda	1 dokumen	Prolegda/Propemperda	1 dokumen				
							Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna	60 Risalah	Risalah Rapat Paripurna	60 Risalah				
							Penyusunan Data hasil Rapat Alat Kelengkapan	108 Catatan Rapat Alat Kelengkapan	Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan	108 dokumen				
							Aspirasi Masyarakat lewat Komisi	40 Aspirasi	Laporan Aspirasi Masyarakat	40 dokumen				
							Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Kecamatan se Kota Yk	12 bulan	Laporan Aspirasi Masyarakat dari Wilayah se Kecamatan se Kota Yk	12 laporan				
							Audiensi	48 kali	Laporan Hasil Audiensi	48 laporan				
5.2	Penjaringan Aspirasi Masyarakat			UMBULHARJO			Kaukus Perempuan	2 kali	Laporan Koordinasi Kaukus Perempuan	2 laporan	4,600,795,000	5,060,874,500	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Kegiatan Reses DPRD	3 kali	Laporan Pelaksanaan Reses DPRD	3 dokumen				
							Penyusunan Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Pokir	Pokok Pokok Pikiran DPRD	1 dokumen				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.3	Penyusunan Produk Hukum DPRD			Umbulharjo			Penyusunan Draft Raperda Prakarsa DPRD	8 dokumen	Naskah Akademik dan Darft Raperda Prakarsa DPRD	8 dokumen	2,238,950,000	2,462,845,000	Sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Penyiapan Draft Peraturan DPRD	2 Draft	Draft Peraturan DPRD	2 dokumen				
							Penyiapan Draft Keputusan DPRD	30 Draft	Draft Keputusan DPRD	30 dokumen				
							Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 Draft	Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 dokumen				
							Penyiapan Draft Persetujuan Bersama	25 Draft	Draft Persetujuan Bersama	25 dokumen				
							Pengkajian/Telaah Hukum	15 Telaah	Pengkajian/Telaah Hukum	15 dokumen				
							Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	35 Buku	Buku Peraturan Perundang Undangan	35 buku				
	TOTAL ANGGARAN										51,491,992,877	56,641,192,165		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tegalrejo

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
	Pemberdayaan Masyarakat													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	TR	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					802.616.080	596.559.788		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor						1. Materai 3000	1000 lbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	448.176.500	492.994.150	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
							2. Materai 6000	400 lbr						
							3. Jasa Listrik	5 Rekening						
							4. Jasa Sumber Daya Air	4 Rekening						
							5. Jasa Komunikasi Telepon	5 Rekening						
							- Sewa Meja dan Kursi	150 buah, 600						
							6. Sewa Tenda	10 unit						
							7. Sewa Sound System	5 unit						
							8. Pemeliharaan Peralatan	3 jenis						
							9. STNK Kendaraan Roda 4	1 unit						
							10. STNK Kendaraan Roda 3	2 unit						
							11. STNK Kendaraan Roda 2	15 unit						
							12. Kebersihan Kantor	12 bulan						
							13. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis						
							14. Retribusi Kebersihan	12 bulan						
							15. BBM Peralatan Kerja	3 jenis						
							16. Pemeliharaan Komputer	2 jenis						
							17. Alat Tulis Kantor	52 jenis						
							18. Penggandaan	152.950 lembar						
							19. Cetakan	30 buah						

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							20. Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10 jenis						
							21. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis						
							22. Peralatan rumah tangga	20 jenis						
							23. Tabung Pemadam	51 tabung						
							24. Pemeliharaan Alat	3 jenis						
							25. Bahan bacaan	61 buah						
							26. Surat Kabar	12 bulan, 72 exemplar						
							27. Piket, PAM Hari Raya, Hari Besar dan Hari Libur	4 kali						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	94.150.580	103.565.638	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
							2. Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	48 dokumen ASN						
							3. Jasa tenaga bantuan	14 bulan						
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi						1. Makan Minum Rapat Koordinasi	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	260.289.000	286.317.900	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalreio
							2. Minum Pegawai	51 orang, 11 bulan						
							3. Makan Minum Tamu	1 kegiatan						
							4. Makan Minum Harian	11 bulan						
							5. Monitoring	11 bulan						
							6. Konsultasi keluar Daerah	3 kegiatan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan	TR	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					152.635.000	167.898.500		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor						1. Pemeliharaan gedung kantor	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	100%	88.300.000	97.130.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
						2. Bahan dan Bibit Tanaman	2 jenis							
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional						1. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	64.335.000	70.768.500	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
						2. Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 unit							
						3. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	15 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Kecamatan Tegalrejo	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					99.485.000	109.433.500		
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD						1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	99.485.000	109.433.500	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
						2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 laporan							
						3. Pelatihan Penyusunan Musrenbang	50 orang							
						4. Pelatihan Keuangan dan Barang	50 orang							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							5. Pelatihan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	50 orang	Peningkatan inf. Dan kemampuan dlm menyusun DPA, RKA					
							6. Sinergitas Pegawai	50 orang	Peningkatan kerjasama antar pegawai					
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah	TR	Jumlah pelimpahan yang dilaksanakan dengan baik	10					567.717.216	624.488.938	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan			TR							310.706.000	341.776.600	Sedang	Kecamatan
							1. Monografi Kelurahan dan Kecamatan	10 dokumen	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	100%				
							2. Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK	2 kegiatan	Meningkatnya kemampuan perangkat RT/ RW/ LPMK	100%				
							3. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan untuk mewakili tingkat Kota	100%				
							4. Papan Informasi Kewilayahan	236 buah	Papan penanda identitas wilayah RT RW	100%				
							5. Pembinaan dan Penataan PKL	107 PKL	Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur	100%				
							6. Pengawasan Perizinan	12 bulan	Peningkatan ketertiban perizinan, wilayah aman	100%				
							7. Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	100%				

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							8. Pembinaan Anggota Satuan Linmas	4 kelurahan	Peningkatan kemampuan anggota satuan Linmas	100%				
							9. Operasi Vandalisme	24 kali	Berkurangnya aksi vandalisme dan kebersihan tembok di wilayah	100%				
							10. Operasi Ketertiban	72 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	100%				
							11. Pengamanan Umum	4 kali	Pengamanan di hari besar	100%				
							12. Sambang Kampung	8 kali	Penjaringan aspirasi masyarakat	100%				
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			TR							257.011.216	282.712.338	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
							1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	Kelancaran pelayanan	100%				
							2. Perekaman dan pengambilan E-KTP	12 bulan	Kelancaran perekaman dan pengambilan E-KTP	100%				
							3. Pemungutan Retribusi HO dan IMB	2 izin IMB, 80 izin HO	Kelancaran pelayanan perizinan HO dan IMB	100%				
							4. Sosialisasi SPP	1 kegiatan	Tersosialisasinya standar dan aturan kegiatan kewenangan kecamatan	100%				
4,3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			TR							678.656.700	746.522.370	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
							1. Pembinaan Mitra Keluarga	215 orang	Pengurangan angka KDRT, perceraian dan pernikahan	100%				
							2. Pembinaan Pemberdayaan Disabilitas	50 orang	Peningkatan ketrampilan penyandang Difabel	100%				

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							3. Sapaan Anak Kos	2 kegiatan	Ketertiban Izin Pondokan dan peningkatan kesadaran penghuni kos utk bermasyarakat	100%				
							4. Gebyar PAUD	300 anak	Peningkatkan dan pengembangan kreativitas anak	100%				
							5. Penguatan Paguyuban Lansia	2 kegiatan	Peningkatan wawasan dan kesehatan Lansia	100%				
							6. Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai	2 kegiatan	Peningkatan kebersihan sungai	100%				
							7. Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2 kegiatan	Meningkatkan sinergi dan pengetahuan wawasan kebangsaan	100%				
							8. Lintas Hijau	3 kegiatan	Terwujudnya penghijauan wilayah	100%				
							9. Pembinaan Kampung Ramah Anak	3 kegiatan	Peningkatan kreativitas dan potensi anak	100%				
							10. Pembinaan PSN Jumantik	2 kegiatan	Pengurangan jentik-jentik nyamuk penyebab penyakit DBD	100%				
							11. Pendistribusian Raskin	12 bulan	Distribusi raskin dengan lancar dan tepat waktu	100%				
							12. Inisiasi Kawasan Tanpa Rokok	2 kegiatan	Perlindungan thdp resiko gangguan kesehatan akibat rokok	100%				
							13. Gerbang Mas	2 kegiatan	Peningkatan kedisiplinan anak	100%				
							14. KKG KB Kes	200 orang	Pelaksanaan KKG berjalan lancar	100%				
							15. Lomba Balita Sehat	4 kelurahan	Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan untuk mewakili tingkat Kota	100%				
							16. Administrasi PKK	1 Kec, 4 kel	Kelancaran administrasi PKK Kecamatan & Kelurahan	100%				
							17. PMPS	1 kegiatan	Pelestarian budaya	100%				

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							18. Pawai Budaya	1 Kec, 4 kel	Pelestarian budaya	100%				
							19. HUT RI	1 kegiatan	Kelancaran peringatan HUT RI	100%				
							20. Gelar Kesenian	2 kegiatan	Pelestarian budaya	100%				
4,4	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			TR							120.237.525	132.261.278	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
							1. Gelar Potensi UMKM	45 orang	Peningkatan Usaha UMKM Warga	100%				
							2. TKPK	1 Kec, 4 kel	Penurunan angka kemiskinan	100%				
							3. Pasar Rakyat	1 kegiatan	Peningkatan Usaha Warga/ Promosi	100%				
4,5	Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo			TR							1.009.416.000	1.110.357.600	Sedang Berjalan	Kecamatan Tegalrejo
							1. Pemeliharaan Jalan Conblok	30 lokasi	Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas jalan	100%				
							2. Pemeliharaan SAH	7 lokasi	Kelancaran saluran air hujan	100%				
							3. Pemeliharaan MCK dan Air Bersih	3 lokasi	Kebutuhan air bersih terpenuhi	100%				
							4. Pemeliharaan Taman RTH	1 lokasi	Kenyamanan lingkungan	100%				
							5. Pemeliharaan TPU Utaralaya	1 lokasi	TPU terpelihara dan terawat dengan baik	100%				
							6. Pemeliharaan PJU	225 titik	PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan baik	100%				
							7. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	100%				

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							8. Buku Informasi Program Kegiatan (Inmen)	2 dokumen	Informasi Pembangunan dan Kegiatan Wilayah tercukupi	100%				
							9. Dokumen Profil Kecamatan & kelurahan	5 dokumen	Tersusunnya Profil Kelurahan dan Kecamatan	100%				
							10. Pemeliharaan TPU Utaralaya	12 bulan	Pemeliharaan dan Perawatan TPU Utaralaya	100%				
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo			TR							245.099.800	269.609.780	Sedang Berjalan	Kelurahan Tegalrejo
							1. Pelatihan Jumputan	30 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							2. Pelatihan Dekorasi dari Janur	30 orang	Peningkatan ketrampilan	100%				
							3. Pelatihan Pangkas Rambut	30 orang	Peningkatan ketrampilan	100%				
							4. Pelatihan Pembuatan Kompos dari Sampah	20 orang	Peningkatan ketrampilan	100%				
							5. Pelatihan Aneka Kuliner	30 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							6. Pelatihan Menjahit Dasar	30 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							7. Pelatihan Sablon	30 orang	Peningkatan ketrampilan	100%				
							8. Pelatihan Rintisan Usaha Warung Kopi	20 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							9. Penyuluhan Kanker Serviks	50 orang	Kesadaran kesehatan reproduksi	100%				
							10. Penyuluhan Narkoba	30 orang	Remaja terhindar narkoba	100%				
							11. Pelatihan Pranotocoro	20 orang	Peningkatan SDM	100%				
							12. Pembinaan Kamling	47 orang	Peningkatan Kapasitas	100%				
							13. Pembinaan RT/RW	59 orang	Peningkatan Kapasitas	100%				
							14. Pembinaan DBKS	59 orang	Peningkatan Kapasitas	100%				
							15. Pelatihan dan Pentas jathilan Anak	2 kegiatan	Pelestarian budaya	100%				

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							16. Administrasi PKK RT dan RW	12 RW, 47 RT	Peningkatan kelancaran administrasi PKK					
							17. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	45 orang	Peningkatan kesehatan masyarakat	100%				
							18. Operasional JBM	2 kegiatan	Terciptanya suasana belajar mengajar yg kondusif	100%				
							19. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	Peningkatan Potensi Seni Budaya	100%				
4,7	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak			Kelurahan Kricak							285.360.000	313.896.000	Sedang Berjalan	Kelurahan Kricak
							1. Pelatihan Membuat Makanan Tradisional	40 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							2. Pelatihan ketrampilan Packing PIRT	40 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							3. Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Kricak Kampung Budaya	35 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							4. Pelatihan Kelompok Pedagang Usaha Kecil	30 orang	Peningkatan ekonomi warga	100%				
							5. Gelar Potensi Kricak Kampung Budaya	1 kegiatan	Pelestarian budaya	100%				
							6. Pelatihan Kader Posyandu Balita	75 orang	Peningkatan SDM kader	100%				
							7. Pelatihan Kelompok Pendukung Ibu	75 orang	Peningkatan SDM kader	100%				
							8. Pelatihan Pendataan SIM PKK	60 orang	Peningkatan SDM kader PKK	100%				
							9. Pelatihan Pembuatan Komposter	50 orang	Peningkatan SDM	100%				

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
							10. Pelatihan Ketrampilan Membatik	30 orang	Peningkatan SDM	100%						
							11. Pembinaan Kapasitas Lansia	50 orang	Peningkatan SDM	100%						
							12. Sarasehan Kampung Budaya	150 orang	Pelestarian budaya	100%						
							13. Launching Kricak Kampung Budaya	250 orang	Pelestarian budaya	100%						
							14. Penguatan Kelembagaan Kelompok Kesenian	75 orang	Pelestarian budaya	100%						
							15. Administrasi PKK RT dan RW	13 RW, 61 RT	Peningkatan kelancaran administrasi PKK	100%						
							16. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	45 orang	Peningkatan kesehatan masyarakat	100%						
							17. Operasional JBM	2 kegiatan	Terciptanya suasana belajar mengajar yg kondusif	100%						
							18. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	Peningkatan Potensi Seni Budaya	100%						
4,8	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener			Kelurahan Bener							154.954.000	170.449.400	Sedang Berjalan	Kelurahan Bener		
							1. Pelatihan membuat Masakan Kuliner	40 orang	Peningkatan pengetahuan	100%						
							2. Pelatihan Pembuatan Suvenir daur Ulang	30 orang	Peningkatan pengetahuan	100%						
							3. Pelatihan Perkoperasian	30 orang	Peningkatan pengetahuan	100%						
							4. Pelatihan Kader Paguyuban PAUD	50 orang	Peningkatan pengetahuan	100%						

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							5. Pelatihan Kesperasian Berbusana	30 orang	Peningkatan pengetahuan	100%				
							6. Pelatihan Tabulapot, Hidroponik dan Holtikultura	40 orang	Peningkatan pengetahuan	100%				
							7. Roadshow Posyandu Balita	100 orang	Untuk mengetahui Perkembangan Balita	100%				
							8. Penguatan Kapasitas Kader Yandu	42 orang	Peningkatan SDM kader	100%				
							9. Pembinaan Keluarga Sakinah	50 orang	Peningkatan pengetahuan	100%				
							10. Workshop Pendidikan Berbasis Keluarga	50 orang	Peningkatan pengetahuan	100%				
							11. Administrasi PKK RT dan RW	7 RW, 26 RT	Peningkatan kelancaran administrasi PKK	100%				
							12. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	45 orang	Peningkatan kesehatan masyarakat	100%				
							13. Operasional JBM	2 kegiatan	Terciptanya suasana belajar mengajar yg kondusif	100%				
							14. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	Peningkatan Potensi Seni Budaya	100%				
4,9	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru			Kelurahan Karangwaru							252.958.000	278.253.800	Sedang Berjalan	Kelurahan Karangwaru
							1. Pelatihan Public Speaking	40 orang	Peningkatan SDM	100%				
							2. Pelatihan Marketing	40 orang	Peningkatan SDM	100%				

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab											
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/ 2/ 3	1/ 2/ 3											
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target															
							3. Pelatihan Kewirausahaan	40 orang	Peningkatan SDM	100%															
							4. Pelatihan Pijat Bayi	40 orang	Peningkatan SDM	100%															
							5. Pelatihan Agro Politan	40 orang	Peningkatan SDM	100%															
							6. Pelatihan penanaman Toga & sayuran	40 orang	Peningkatan SDM	100%															
							7. Pelatihan Instruktur Inisiasi Kampung Wisata	30 orang	Peningkatan SDM	100%															
							8. Pelatihan Kelembagaan Lemsos	100 orang	Peningkatan SDM	100%															
							9. Pembinaan dan Perlindungan Anak	50 orang	Peningkatan SDM kader	100%															
							10. Pelatihan Kader GSI/SIP/DDTKA	40 orang	Peningkatan SDM kader	100%															
							11. Pelatihan Posbindu	40 orang	Peningkatan SDM	100%															
							12. Pelatihan Administrasi PKK RT/RW	50 orang	Peningkatan SDM pengurus PKK	100%															
							13. Pelatihan Kelompok Lansia	70 orang	Peningkatan SDM Lansia	100%															
							14. Administrasi PKK RT dan RW	14 RW, 54 RT	Peningkatan kelancaran administrasi PKK	100%															
							15. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	45 orang	Peningkatan kesehatan masyarakat	100%															
							16. Operasional JBM	2 kegiatan	Terciptanya suasana belajar mengajar yg kondusif	100%															
							17. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	Peningkatan Potensi Seni Budaya	100%															
							JUMLAH TOTAL											4.369.135.321	4.662.889.903						

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN JETIS

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur					Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					504.085.366	554.493.903			
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			JETIS			materai 3000 materai 6000	1150 lbr 330 lbr	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	293.938.750	323.332.625	sedang berjalan	Kecamatan Jetis	
						Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran								
						Pengisian ulang APAR	37 unit								
						Sewa peralatan & perlengkapan kantor	sewa kursi: 400 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda: 3 kali								
						STNK roda 4	1 unit								
						STNK roda 2	13 unit								
						STNK roda 3	2 unit								
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	26 jenis								
						Retribusi kebersihan & assenering	12 bulan								
						Jasa kebersihan kantor	11 bulan								
						Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	9 jenis								
						Alat tulis kantor yang tersedia	46 jenis								
						Cetakan	1 jenis								
						Penggandaan	2 jenis								
						Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 jenis								
						Bahan komputer yang tersedia	4 jenis								
						Reffil Printer	12 bulan								
						Peralatan dan perlengkapan rumah tangga	15 jenis								
						Surat Kabar Lokal	12 bulan								
						Bahan bacaan dan buku pendukung	21 buku								

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur				
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			JETIS			Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntansi	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.630.116	12.793.128	sedang berjalan	Kecamatan Jetis
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN						
							Jasa Tenaga Bantuan	2 orang						
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			JETIS			Makan dan minum yang tersedia untuk :	41 orang 187 kali 11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	198.516.500	218.368.150	sedang berjalan	Kecamatan Jetis
							1. Pegawai							
							2. Koordinasi							
							3. Harian Umum							
						Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah	363 laporan							
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 laporan						
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					214.634.000	236.097.400		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			JETIS			Pemeliharaan Taman Kantor	100 tanaman dan 21 kg pupuk	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	138.800.000	152.680.000	sedang berjalan	Kecamatan Jetis
							Pemeliharaan Gedung kantor	4 kantor						
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			JETIS			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Roda 2 (dua) Roda 3 (dua)	1 unit 13 unit 2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	75.834.000	83.417.400	sedang berjalan	Kecamatan Jetis
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					53.497.000	58.846.700		

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur				
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			JETIS			Pelatihan untuk Sumber Daya Aparatur	2 pelatihan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	53.497.000	58.846.700	sedang berjalan	Kecamatan Jetis
							Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%				
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Meningkatnya swadaya masyarakat	100%					2.567.597.341	2.824.357.075		
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis			JETIS			Monografi Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	429.489.000	472.437.900	Baru	KECAMATAN JETIS
							Penguatan Kapasitas RT/RW	203 orang	Meningkatnya kemampuan perangkat RT/ RW	203 orang				
							Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 Kelurahan	Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan untuk mewakili tingkat Kota	1 Kelurahan				
							Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan RT/RW	3 LPMK 166 RT 37 RW	Dukungan terhadap Kegiatan LPMK atau RT/RW	100%				
							Pembinaan dan Penataan PKL	107 PKL	Jumlah PKL yang terdata	107 PKL				
							Piket Kantor	4 kali	Keamanan kantor terjaga	4 kali				
							Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	12 kali				
							Operasi Vandalisme	15 kali	Berkurangnya aksi vandalisme dan kebersihan tembok di wilayah	15 kali				
							Operasi Ketertiban	72 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	72 kali				
							Pengamanan Umum	30 kali	Pengamanan hari besar dan kegiatan wilayah	30 kali				
							Sambang Kampung	12 kali	Pemantauan poskamling warga	12 kali				
							Pemberdayaan LINMAS	3 Kelurahan	Memberdayakan LINMAS di tiap Kelurahan	3 Kelurahan				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target					
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan Dan Informasi Kecamatan Jetis			JETIS			Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	11 bulan	Meningkatnya angka IKM	82	187.946.720	206.741.392		
							Percepatan EKT	1 kegiatan	informasi perekaman dan distribusi EKT	1 kegiatan				
							Pemungutan Retribusi HO dan IMB	1 tahun	Perijinan HO dan IMBB	1 tahun				
4,3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis			JETIS			Pasar Rakyat	50 umkm	Promosi produk hasil UMKM wilayah	100%	25.351.000	27.886.100	Baru	KECAMATAN JETIS
							Pendampingan KUBE	140 org	Peningkatan KUBE wilayah	100%				
							Pembinaan UMKM	2 kegiatan	Dukungan terhadap UMKM wilayah	100%				
4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis			JETIS			Peningkatan kapasitas lembaga sosial	19 Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengurus lembaga masyarakat	19 Kegiatan	291.208.250	320.329.075	Baru	KECAMATAN JETIS
						Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	9 Kegiatan	berkurangnya angka kesenjangan sosial di wilayah Jetis	100%					
							Pelestarian budaya daerah	5 Kegiatan	Aktivitas seni dan budaya	5 Kegiatan				
4,5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis			JETIS			1.Conblokisasi ,	3802 m2	1.Meningkatnya kenyamanan lalu lintas warga ,	100%	831.048.871	914.153.758	Baru	KECAMATAN JETIS
							2. Hand Ralling	31,6 m2	2.Meningkatnya keamanan pejalan kaki ,	100%				
							3. Pemeliharaan PJU	258 titik	3.PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan baik ,	100%				
							4.Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan ,	4 dokumen	4.Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan ,	4 dokumen				
							5.Profil Wilayah	4 dokumen	dokumen profil wilayah	4 dokumen				
							6. Informasi Program dan kegiatan pembangunan yang disusun	10 dokumen	6. Dokumen informasi pembangunan yang relevan	10 dokumen				
4,6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo			JETIS - Kelurahan Bumijo			1. Gebyar Lansia	150 orang	1. Meningkatkan produktifitas lansia	100%	306.410.500	337.051.550	Baru	KECAMATAN JETIS
							2. Pelatihan Membuat SPJ/Laporan	30 orang	2. Menambah kemampuan administrasi PKK	100%				
							3. Pelatihan membuat APE	40 orang	3. Meningkatkan kreatifitas pendidik PAUD	100%				
							4.Pelatihan Senam PAUD	30 orang x 3 hari	4. Menambah kemampuan pendidik PAUD	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							5. Pelatihan UP2K	40 orang	5. Meningkatnya perekonomian warga	100%				
							6. Gebyar PAUD	150 orang	7. Mengasah keberanian dan kreatifitas anak	100%				
							7.Pelatihan memasak menu balita	30 orang	8. Menambah variasi masakan bagi balita	100%				
							8. Pelatihan Tata Boga	40 orang	9. Meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga	100%				
							9. Pelatihan Paduan Suara	30 orang	9. Meningkatkan kemampuan Ibu -ibu PKK	100%				
							10. Pelatihan kuliner lokal (tumpeng)	30 orang	10. Melestarikan masakan tradisional	100%				
							11. Pentas Seni HUT Kota	300 orang	11. Melestarikan kebudayaan daerah	100%				
							12. Penyuluhan pertanian	60 orang	12. Menambah pengetahuan dalam pertanian	100%				
							13. Pelatihan membuat sabun, shampo dan toiletris lainnya	30 orang	13. Meningkatkan perekonomian warga	100%				
							14. Pelatihan membuat tas rajut	30 orang	14. Menambah kemampuan warga	100%				
							15. Pelatihan membuat kue kering	30 orang	15. meningkatkan perekonomian warga	100%				
							16. Workshop parenting skill	30 orang	16. Meningkatkan kemampuan	100%				
							17. Pelatihan pangruti laya	30 orang	17. Meningkatkan kempuan menangani jenazah	100%				
							18. Workshop Keluarga harmonis dan tangguh	30 orang	18. Mengurangi angka perceraian dalam masyarakat	100%				
							19. Penyuluhan Pranikah	30 orang	19. Mengurangi pernikahan dini	100%				
							20. Workshop Pengelolaan informasi dan dokumentasi	30 orang	20. Menambah keahlian pengurus lembaga sosial	100%				
							21. Pawai Budaya	1 kegiatan	21. Melastarikan Budaya daerah	100%				
							22. JBM	57 RT	22. Meningkatkan kualitas belajar	100%				
							23. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW	57 RT	23. Administrasi Pkk menjadi lebih tertata	100%				
							24. Operasional Kelurahan Siaga	1 kegiatan	24. Menjadi lebih tanggap terhadap bencana	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
4,7	Pembinaan Ekonomoi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan			JETIS - Kelurahan Cokrodinin gratan			1. Pentas Seni HUT Kota Yogyakarta	350 orang	1. Merayakan HUT Kota Yogyakarta	100%	245.147.950	269.662.745	Baru	KECAMATAN JETIS	
							2. Gebyar PAUD	130 orang	2. Menambah kreatifitas anak PAUD	100%					
							3. Pelatihan tanggap bencana bagi perempuan	40 orang	3. Menambah keahlian dalam penanganan bencana	100%					
							4. Senam Lansia	50 orang x 2 kali	4. Meningkatkan kesehatan Lansia	100%					
							5. Penyuluhan Kader Posdaya	40 orang	5. Meningkatkan kinerja kader posdaya	100%					
							6. Lomba SIM & SIP PKK antar RT dan RW	45 orang	6. Meningkatkan Admininstrasi PKK	100%					
							7. Penyuluhan Kader Posyandu	60 orang	7. Meningkatkan kinerja kader Posyandu	100%					
							8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKK	50 orang	8. Kinerja PKK menjadi lebih baik	100%					
							9. Penyuluhan Kesehatan Lansia	80 orang	9. Meningkatkan kesehatan lansia	100%					
							10. Gebyar Lansia	100 orang	10. Menambah produktifitas lansia	100%					
							11. Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sekelurahan	60 orang	11. Mengurangi wabah DBD	100%					
							12. Pelatihan Public Speaking dan Etika Kepribadian	50 orang x 2 kali	12. Menambah keahlian warga	100%					
							13. Penguatan kapasitas Kader Mitra Keluarga (MK)	50 orang	13. Meningkatkan dan menguatkan kapasitas Kader MK baik RW dan Kelurahan	100%					
							14. Penyuluhan Administrasi Usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga (UP2K)	40 orang	14. Meningkatnya perekonomian warga	100%					
							15. Penyuluhan Kesehatan Remaja	40 orang	15. Meningkatkan Pemahaman tentang Kesehatan Remaja	100%					
							16. Rapat Koordinasi 11 bulan	360 orang	16. Meningkatkan koordinasi antar lembaga sosial	100%					
							17. Jam belajar Masyarakat	11 RW	17. Menambah kualitas belajar	100%					
							18. Pawai Budaya	1 kegiatan	18. Melestarikan budaya daerah	100%					
							19. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW	1 kegiatan	19. Administrasi menjadi lebih tertata	100%					
							20. Operasional Kelurahan Siaga	1 kegiatan	20. Meningkatkan kesiap-siagaan akan bencana	100%					

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							21. Pelatihan Pembuatan Sandal Hotel	40 orang	21. Meningkatkan perekonomian warga	100%				
							22. Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk Souvenir	40 orang	22. Meningkatkan perekonomian warga	100%				
4,8	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan			JETIS - Kelurahan			1. Penyuluhan pijat bayi	30 orang	1. Menambah ketrampilan ibu bayi	100%	250.995.050	276.094.555	Baru	KECAMATAN JETIS
							2. Pelatihan memasak jajan pasar	30 orang	2. meningkatkan perekonomian warga	100%				
							3. Pelatihan Sablon &jahit kaos	15 orang	3. Meningkatkan perekonomian warga	100%				
							4. Pelatihan kreasi seserahan	50 orang	4. Meningkatkan perekonomian warga	100%				
							5. Pentas Seni	1 kegiatan	5. Melestarikan budaya daerah	100%				
							6. Jam belajar Masyarakat	13 orang	6. Meningkatkan kualitas belajar	100%				
							7. Pawai Budaya	1 kegiatan	7. Melestarikan budaya daerah	100%				
							8. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW	30 orang	8. Administrasi menjadi lebih tertata	100%				
							9. Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	9. Meningkatkan kesiap-siagaan akan bencana	100%				
							10. Penyuluhan Toga	50 orang	10. Pengetahuan masyarakat tentang TOGA meningkat	100%				
							11. Penginformasian tentang HIV/AIDS dan Narkoba	50 orang	11. Kesadaran warga akan HIV/AIDS dan Narkoba bertambah	100%				
							13. UMKM yang dibina	50 orang	13. Taraf ekonomi pelaku usaha meningkat	100%				
							14. Sosiaisasi PHBS tingkat RW	50 orang	14. Pola hidup bersih warga meningkat	100%				
							15. Penyuluhan Gizi	50 orang	15. Pengetahuan warga akan gizi bertambah	100%				
							16. Sosialisasi PIKR	50 orang	16. Keorganisasian PIKR meningkat	100%				
							17. Muskel Raskin	70 orang	17. Pendistribusian Raskin sesuai sasaran	100%				
JUMLAH TOTAL											3.339.813.707	3.673.795.078	-	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Gondokusuman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					935.091.564	1.028.600.720		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			GK			Meterai 3000 Meterai 6000 yang tersedia	500 lb, 210 lb	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	579.340.100	637.274.110	sedang berjalan	Kec. GK
						Pembayaran rekening listrik, telepon, air	12 bln							
						jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan							
						STNK roda 4 yang terbayar	1 unit							
						STNK roda 3 yang terbayar	2 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	18 unit							
						bahan kebersihan yang tersedia	10 jenis							
						Pebaikan peralatan kerja	6 jenis							
						jasa Perbaikan mebelair	5 Jenis							
						Alat tulis kantor yang tersedia	57 Jenis							
						Jasa cetak dan penggandaan	150 buku, 220.000 lembar foto copy, 150 cetak kartu							
						Komponen instalasi listrik/penerangan yang memadai	17 jenis							
						Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang memadai	10 jenis bahan bacaan, 1 jenis surat kabar							
						Peralatan rumah tangga yang memadai								
1.2	Penyediaan jasa Pengelolaan Pelayanan perkantoran						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	52 orang						
							Jasa Tenaga Bantuan	1 orang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1.3	Penyediaan rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi									Dukungan terhadap kelanvaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	257.795.000	283.574.500	sedang berjalan	Kec. GK
							Makan dan minum yang tersedia								
							a. kordinasi	77 kali							
							b. pegawai	52 orang							
							Laporan monitoring dan Kordinasi, konsultasi keluar daerah	10 laporan							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GK	Terwujudnya sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai				Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			449.198.000	494.117.800		
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan kantor			GK			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit		348.400.000	383.240.000	sedang berjalan	Kec. GK
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			GK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100.798.000	110.877.800	sedang berjalan	Kec. GK
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%						117.843.500	129.627.850		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			GK			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%				sedang berjalan	Kec. GK
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD						
							frekuensi diklat formal yang diikuti	4 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%					
							Sosialisasi PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai	1 kali							
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Kec. Gondokusuman	Meningkatnya Indeks indeks kepuasan layanan masyarakat dari 79 menjadi 79.50	100%	Tertingkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	0,50%	Masyarakat semakin puas terhadap pelayanan	0,50%		3.311.585.779	934.456.247		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indokator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kecamatan Gondokusuman			GK						406.026.500	446.629.150	sedang berjalan	Kec. GK	
						Tim Kegiatan Pelatihan dll	4 bulan		100%					
						Pembuatan Monografi	15 dokumen	Tersedianya data Monografi	100%					
						Terlaksananya Perluasan Wawasan RT,RW,LPMK	275 / 65	Tertingkatnya kapasitas Rt/RW	100%					
						Terlaksananya evaluasi Kelurahan	5 kelurahan	Terevaluasinya kinerja kelurahan	100%					
						Sosialisasi Segoro Amarto	11 kali	terjalinnnya komunikasi dg masyarakat	100%					
						Musrenbang			100%					
						Inmen			100%					
						Hibah RT			100%					
						Lomba Kampung Bersih dan Sehat			100%					
						Penyusunan Profil			100%					
						Pendataan PKL	5 kelurahan		100%					
						Pembinaan Anggota Linmas			100%					
						Pertemuan Sar Linmas			100%					
						Pertemuan Sat Linmas	5 kelurahan		100%					
						Terlaksananya forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	12 bulan	terkordinasikannya kondisi di wilayah	100%					
						Terlaksananya peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana( SAR LIN MAS )	25 orang	tertingkatnya Kapasitas Sar Linmas	100%					
						Terlaksananya peningkatan kapasitas Taruna siaga bencana ( TAGANA )	40 orang	Tertingkatnya kapasitas Taruna siaga bencana ( TAGANA )	100%					
						Terlaksananya pelatihan Penanggulangan bencana bagi ,masyarakat	50 Orang	Masyarakat lebih Tanggap terhadap situasi bencana Bencana	100%					
						Terlaksananya pembinaan LINMAS ( pengamanan )	5 kelurahan	Tertingkatnya kapasitas LINMAS	100%					
						Terlaksananya pengaman umum, operasi vandal, sambang kampung, operasi ketertiban	12 bulan	Terjaganya keamanan umum, lingkungan tertib bersih dari corat coret	100%					
						Piket bencana dan kegiatan keramian	12 bulan		100%					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indokator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan			GK							63.022.929	69.325.222	sedang berjalan	Kec. GK
							Tim Pelaksana Kegiatan	4 bulan		100%				
							Pelayanan Perizinan	3 jenis	Terlaksananya Pelayanan Perijinan	100%				
							Sosialisasi Undang undang kependudukan	50 orang	Tertingkatnya pemahaman tentang undang Undang kependudukan	100%				
							Sosialisasi U U Peraturan Perizinan	50 orang	Tertingkatnya pemahaman tentang undang Undang / peraturan kependudukan	100%				
							Terlaksananya Pembinaan Pemilik Pondokan	50 orang	tertingkatnya Pondokan yang tertib	100%				
4,3	Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gondokusuman			GK			Tim Pelaksana Kegiatan	3 bulan		100%	20.922.500	23.014.750	sedang berjalan	Kec. GK
							Pelatihan Kewirausahaan UMKM	50 orang		100%				
							Gelar potensi UMKM			100%				
4,4	Pembinaan Sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Gondokusuman			GK							359.533.750	395.487.125	sedang berjalan	Kec. GK
							Tim Pelaksana Kegiatan	5 bulan		100%				
							TIM TKPK	11 bln	Terdatanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masrakat guna penanggulangan kemiskinan	100%				
							Lomba HKG	1 kali	Tercukupinya kebutuhan lomba	100%				
							Bina Keluarga Sejahtera	70 orang		100%				
							Petugas Pengamanan Umum	12 kali	Kegiatan lancar	100%				
							Pembinaan Mental Spiritual Anak dan Remaja	250 Org	Silaturohmi dan bertambahnya ilmu anak anak TPA	100%				
							Bimbingan Teknik Kader Jumantik	65 orang	pengndalian kembangbiak nyamuk	100%				
							Penguatan Kelembagaan PKK	60 orang	Peningkatan kinerja PKK	100%				
							Penyegaran kader PSM	60 orang	Peningkatan kinerja PSM	100%				
							Gelar potensi seni dan budaya bagi generasi muda	300 orang	tertingkatnya Generasi muda yg berbudaya	100%				
							Pemberdayaan Lansia	12 kali	Lansia yg sehat dan bersemangat	100%				
							Penyuluhan bahaya Narkoba	50 Org	wilayah bebas narkoba	100%				
							Sosialisasi Mutu Pangan	50 Orang	meningkatkan kualitas pangan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indokator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Pentas Seni dan Budaya	100 orang	Memperkenalkan dan memelihara seni dan budaya	100%				
							Pelestarian Budaya Mocopat	50 orang	lestarinya budaya mocopat	100%				
							Kegiatan Segoro Amarto	11 kali	terjalannya komunikasi dg masyarakat	100%				
							Pawai budaya HUT Kota	3 Hari	Meriahnya HUT Kota	100%				
							Pelatihan Seni Budaya	12 kali	Latihan seni lancar	100%				
							Pembinaan pengelolaan keuangan bagi pengurus PKK	1 kali	Peningkatan kinerja PKK	100%				
							Fasilitasi Kegiatan PKK	10 kali	Tertingkatnya kapasitas kader PKK	100%				
							pembinaan Administrasi SIM PKK	30 orang	Peningkatan kinerja PKK	100%				
							Bimbingan konseling mitra keluarga	50 orang	Keluarga sejahtera	100%				
							Kader BKB	50 orang	Peningkatan kinerja kader BKB	100%				
							Kader Posyandu	65 orang	Peningkatan kinerja kader Posyandu	100%				
							PIK R	50 orang	Tertanggulangnya kenakalan remaja	100%				
							Piket Hari Besar Keagamaan, Pentas Seni Budaya			100%				
							Petugas / Surveyor			100%				
4,5	Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Demangan			GK							200.388.500	220.427.350	sedang berjalan	Kec. GK
							Administrasi PKK Kelurahan RT & RW	12 bln	Kegiatan lancar	100%				
							Pawai Budaya	1 Kegiatan	Melestarikan Kebudayaan	100%				
							Operasional JBM	12 bln	Tertib belajar	100%				
							Operasional Kelurahan Siaga	12 bln	Siaga Kesehatan	100%				
							Pelatihan MC	50 orang	Terampil	100%				
							Pembinaan Posyandu	60 anak	sehat	100%				
							Peningkatan Kapasitas Lansia	50 orang	Kegiatan lancar	100%				
							Kegiatan Lansia	12 x 2 x 50 x 8000	Kegiatan lancar	100%				
							Pelatihan Ketrampilan berbahasa Jawa dan Berbusana Jawa yang baik dan benar	30 orang	Terampil bahasa jawa	100%				
							Pentas Budaya HUT Kota			100%				
							Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	10 bln	Terdatanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masrakat guna penanggulangan kemiskinan	100%				
							Kegiatan Segoro Amarrto	12 bulan		100%				
							ANGKUT RASKIN	12 bln	Kelancaran distribusi raskin	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					Target
4,6	Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Kota Baru			GK							200.132.000	220.145.200	sedang berjalan	Kec. GK
							Terlaksananya :							
							Gebyar PAUD	1.560 orang	Tumbuh kembang anak	100%				
							Tim Fasilitasi PKK			100%				
							Gebyar Lansia	100 orang	Kesehatan Lansia	100%				
							Penguatan Kapasitas PKK	4 RW	kegiatan Pkk lancar	100%				
							Fasilitas kegiatan paguyuban kesenian	20 x 20	nyaman,semangat	100%				
							Sosialisasi kesehatan reproduksi Remaja	50 remaja	SDM, Keluarga berencana	100%				
							Kegiatan Jambore Anak	90 anak	pendidikan sosial dasar	100%				
							Pawai Alegoris Serbuan Kotabaru	400 org	nilai semangat pejuang	100%				
							Pentas Budaya		Dikenang masyarakat	100%				
							Operasional KESI Kotabaru	1 tahun	Optimalisasi	100%				
							Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	10 bln	Terdatanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masrakat guna penanggulangan kemiskinan	100%				
							Pawai Budaya	1 kali	berbudaya	100%				
							Administrasi PKK Kelurahan RT & RW	12 bln	Kegiatan lancar	100%				
							Oprasional JBM Kotabaru		peningkatan prestasi	100%				
							ANGKUT RASKIN	12 bln	Kelancaran distribusi raskin	100%				
							Sosialisasi/Penyuluhan Napza	50 orang						
							Kegiatan Segoro Amarto	12 bulan						
							Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	50 orang	Lapangan kerja / peluang usaha					
							Sosialisasi/bintek pengelola UED-SP	50 orang	semangat bekerja, SDM					
4,7	Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			GK			Terlaksananya :				329.780.500	362.758.550	sedang berjalan	Kec. GK
							Peningkatan Kapasitas PKK	40 orang	Pemanfaatan lahan sempit	100%				
							Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW			100%				
							Oprasional JBM Kotabaru	16 rw	peningkatan prestasi	100%				
							Operasional Kelurahan Siaga	12 bln	Siaga Kesehatan	100%				
							Tim Fasilitasi PKK			100%				
							Sosialisasi tentang kesehatan	80 orang	Meningkatkan derajat kesehatan	100%				
							Pelatihan karawitan/gamelan	25 orang	Pelestarian budaya	100%				
							Pemanfaatan lahan sempit	16 orang	Memberikan pengetahuan pemanfaatan lahan	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indokator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Pelatihan bimb. konseling mitra keluarga	40 orang	Meningkatkan ketrampilan menghadapi klien	100%				
							Pembentukan pokja DB	32 orang	Kelancaran koordinasi kesehatan	100%				
							Penyuluhan deteksi tumbuh kembang anak	63 orang	Peningkatan kemampuan kader	100%				
							Pelatihan Vocal	30 orang	Peningkatan skill	100%				
							Sarasehan FPUB	50 orang	melestarikan budaya Jawa	100%				
							Pelatihan pranata adicara bahasa Jawa	40 orang	Pengembangan potensi	100%				
							Penguatan Kapasitas PKK	60 orang	Pengembangan kreatifitas anak	100%				
							Gebyar PAUD	200 anak	Menjaga kesehatan	100%				
							Gebyar LANSIA	100 orang	Tumbuh kembang anak	100%				
							Pendidikan Keorangtuaan ( Parenting )	50 orang	Menambah wawasan hukum	100%				
							Penyuluhan kadarkum	50 orang	Tersedianya kelengkapan data	100%				
							Pembentukan PIKK	50 Orang	Peningkatan kemampuan kader	100%				
							Pembinaan Dasawisma	63 orang	Meningkatkan pengetahuan kesehatan remaja	100%				
							Pelatihan PikR	50 orang	Meningkatkan keakraban	100%				
							Pelatihan perawatan jenazah	32 orang	Pelestarian budaya	100%				
							Pelatihan tari tradisional ( 5 Paguyuban Seni )	40 orang	Pelestarian budaya	100%				
							Pawai Budaya	1 kali	Pelestarian budaya	100%				
							Pentas Budaya	1 kali	Pelestarian budaya	100%				
							KESI	12 bln		100%				
							Kegiatan Segoro Amarto			100%				
							Pelatihan pembuatan jamu tradisional	40 orang	Meningkatkan ekonomi keluarga	100%				
							Pelatihan dekorasi/janur	40 orang	Mengurangi pengangguran	100%				
							Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		Terdatanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masrakat guna penanggulangan kemiskinan	100%				
							ANGKUT RASKIN		Kelancaran distribusi raskin	100%				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab							
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan												
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target											
4,8	Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			GK							345.618.500	380.180.350	sedang berjalan	Kec. GK							
							Terlaksananya :	Terlaksananya :													
							Penyuluhan HIV AIDS	30 orang													
							Tim Fasilitasi PKK														
							Pawai Budaya	1 kali	Pelestarian budaya												
							Pentas Budaya	1 kali	Pelestarian budaya												
							Pembinaan Sanggar Tari Anak-anak	1 kegiatan	Pelestarian Budaya												
							Peningkatan kapasitas Hadroh	1 set	Pelestarian Kesenian												
							Gebyar PAUD	200 anak	Tumbuh kembang anak												
							Parenting	40 orang	Keluarga sejahtera												
							Lomba kebersihan lingkungan	21 RW	terciptanya lingkungan yang bersih												
							Penyuluhan Kader Bumil		Mengenal, mengetahui tugas dan ketugasan Kader Bumil secara profesional												
							Penyuluhan Gizi Buruk		Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman												
							Pembinaan Yandu		Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman												
							Administrasi PKK Kelurahan RW RT														
							Operasional JBM														
							KESI														
							Pelatihan Kewirausahaan	42 orang	Penciptaan lapangan kerja												
														Pelatihan pengelolaan koperasi dan UMKM	1 paket	Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan					
														Membuat Makanan Olahan	42 orang	Menambah ketrampilan dan pengetahuan					
Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		Terdatanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masrakat guna penanggulangan kemiskinan																			
ANGKUT RASKIN		Kelancaran distribusi raskin																			
Kegiatan Segoro Amarto																					
																		237.834.000	261.617.400	sedang berjalan	Kec. GK
														Terlaksananya :							
							Administrasi PKK Kelurahan RW RT	12 paket	BOP Lembaga												

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat	12 paket	BOP Lembaga					
							Kelurahan Siaga							
					Tim Fasilitasi PKK									
					Pembinaan POKMAIR		50 orang							
					Pentas Budaya		100 org	Pelestarian Budaya						
					Pawai Budaya		1 paket	Pelestarian Budaya						
					Gebyar PAUD		200 anak	Kreativitas anak						
					Gebyar Lansia		200 org	Kesehatan lansia						
					Pembinaan Lansia									
					Pembinaan WKSBM		100 orang							
					Pembinaan LKT (Lembaga Kebudayaan Terban)		50 orang	Kesehatan lingkungan						
					Peningkatan Kapasitas PKK		40 orang	Pelestarian Budaya Jawa						
					Festival Kali Belik		1 kali	Kebersamaan						
					Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)			Terdatanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masrakat guna penanggulangan kemiskinan						
					ANGKUT RASKIN			Kelancaran distribusi raskin						
					Kegiatan Segoro Amarto					1.148.326.600				
		Tertingkatnya kenyamanan lingkungan	5 kelurahan											
Perbaikan Jalan	5 Kelurahan													
Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 Kelurahan													
PJU Lingkungan	40 titik x 5 kelurahan													
Biaya Pengadaan dan honorarium pelaksana kegiatan	2 orang x 2 bulan													
Konsultan perencana dan pengawas	2 kegiatan													
Musrenbang,	1 Kec. 5 Kel	Terlaksananya Musrenbang,	100%											
Penyusunan Profil Kecamatan	15 dok	tersedianya Informasi ttg Wilayah	100%											
Laporan Profil	1 dok	tersedianya Informasi ttg Wilayah	100%											
Pembuatan Inmen			100%											
Terlaksananya Lomba Kampung Bersih dan Sehat			100%											
JUMLAH TOTAL										4.813.718.843	5.295.090.727			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Danurejan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					765.215.559	841.737.115		
1.1	Penyediaan jasa , peralatan dan perlengkapan kantor			Danurejan			materai 600 tersedia,	495 lembar	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	404.652.400	445.117.640	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							materai 3000 tersedia	990 lembar						
							STNK roda 4 terbayar	1 unit						
							STNK roda 3 terbayar	3 unit						
							STNK roda 2 terbayar	13 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	4 paket						
							Alat tulis kantor yang tersedia	31 jenis						
							Jasa percetakan	100 buku						
							Jasa penggandaan	69222 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	18 jenis						
							Pembayaran listrik	4 rekening						
							bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							peraturan perundang undangan yang tersedia	3 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	13 jenis						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis, 14 buah						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	isi tabung APAR 53 buah, sewa kursi 100, sewa meja 40, sewa tenda 10 sewa sound sistem 1 unit						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	9 jenis						
1,2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Danurejan			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	116.301.159	127.931.275	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN						
							Jasa Tenaga Bantuan	3 orang						
1.3	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Danurejan							244.262.000	299.479.400	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							a. Koordinasi	255 kali						
							b. Pegawai	60 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					202.550.000	222.805.000		
2,1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor			Danurejan			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	116.310.000	127.941.000	sedang berjalan	Kec. Danurejan
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			Danurejan			Jas pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	86.240.000	94.864.000	sedang berjalan	Kec. Danurejan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							a. Roda 4 (empat)	1 unit					sedang berjalan	Kec. Danurejan
							b. Roda 3 (tiga)	3 unit					sedang	Kec.
							c. Roda 2 (dua)	13 unit					sedang	Kec.
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					60.044.000	66.048.400		
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	60.044.000	66.048.400	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan Keuangan, dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas kinerja SKPD	100%				
							Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Hukum dan Aparatur			Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	100%					2.528.950.441	2.781.845.485		
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan						Dokumen monografi yang tersusun	8 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec. Danurejan meningkat	100%	305.340.108	335.874.119	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							PKL yang dibina dan ditata	80 orang						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	12 kali						
							Pembinaan Linmas	90 orang						
							Penegakan Perda	5 kali						
							Pengurangan Risiko Bencana	17 kali						
							Jogobaran	60 orang						
							Pembinaan forum relawan	5 forum						
							Pengamanan wilayah	24 kali						
							Sambang Kampung	120 orang						
							Operasi Vandalisme	660 orang						
							Operasi Ketertiban	264 orang						
							Penguatan kapasitas RT	3 kelurahan						
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan			Danurejan			1. PATEN	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	100%	167.963.500	184.759.850	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							2. Sistem Inovasi Pelayanan	1 paket						
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan			Danurejan			1. Danurejan Expo	60 UMKM	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec. Danurejan meningkat	100%	56.760.000	62.436.000	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							2.Pengembangan usaha wanita	80 orang						
							3. Sentra berbasis kewilayahan	50 orang						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masvarakat Kecamatan			Danurejan			1. TKPK	4 paket	Dukungan terhadap kelancaran peningkatan	100%	626.016.000	688.617.600	sedang berjalan	Kec. Danurejan
							3. Pembinaan Kesenian	1 paket						
							4. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak Kos	150 orang						
							5. Lomba Balita Sehat	1 paket						
							6. Danurejan Expo	60 UMKM						
							7. Pembinaan PAUD	200 orang						
							8. Pokjanal Posyandu							
							9. Penguatan Kapasitas Kader PKK	60 orang						
							10. Penguatan Kader Kesehatan	50 orang						
							11. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan	1 paket						
							12. Monev Pemberdayaan	1 paket						
							13. Penanganan KDRT	40 orang						
							14. Distribusi Raskin	43 RW						
							15. Lomba-lomba Masyarakat	1 paket						
							16. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	4 paket						
							17. Pembinaan pemuda dan OR	100 orang						
							18. Fasilitasi PKK	1 paket						
							19. Jumlah kelurahan yang dievaluasi	3 kelurahan						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							20.Kegiatan Lansia	50 orang						
							21. Paguyuban/Forum kecamatan	50 orang						
							22. Sentra berbasis kewilayahan	50 orang						
							23. Forum kecamatan sehat	40 orang						
							24. Fasilitasi kesehatan	100 orang						
							25. Laskar berlian	320 orang						
							28. Bergodo	100 oirang						
4,5	Pembinaan ekonomi, sosial, budaya kelurahan Suryatmajan			Danurejan			1. pemberdayaan kelurahan	10 orang		100%	257.370.000	283.107.000		Kec. Danurejan
							2. Pelatihan Kader PAUD	80 orang						
							3. Pelatihan Daur Ulang Sampah	80 orang						
							4. Penyuluhan Pendampingan Psikologi Rumah Tangga	205 orang						
							5. Pelatihan Kader Lansia	80 orang						
							6. Pelatihan Pertanian Perkotaan/Hidroponik	55 orang						
							7. Pelatihan Kader Yandu	80 orang						
							8. Pelatihan Memakai Kerudung	30 orang						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							9. Pelatihan Merajut	60 orang						
							10. Pentas Seni	470 orang						
							11. Pelatihan PKK	50 orang						
							12. Pelatihan Rias Kecantikan	40 orang						
							13. Pelatihan Membuat Hantaran	60 orang						
							14. Pelatihan Linmas	100 orang						
							15. Kesi	60 orang						
							16. JBM	60 orang						
							17. PKK	480 orang						
							18. Pelatihan Senam	360 orang						
							19. Kursus Bahasa Inggris	50 orang						
							20. Pelatihan Memasak Olahan Nusantara	60 orang						
4,6	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya Kelurahan Tegalpanggung				Danurejan				100%	289.421.000	318.363.100	sedang berjalan	Kec. Danurejan	
							</							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							9. Sosialisasi KSA	58 orang						
							10. Sosialisasi PKDRT, Narkoba, & PEKAT	50 orang						
							11. Sosialisasi Penyakit TB	58 orang						
							12. Kesi	70 orang						
							13. JBM	60 orang						
							14. Pelatihan Kader PKK	60 orang						
							15. Pelatihan Kader Pendidik PAUD	80 orang						
							16. Pentas seni	470 orang						
							17. Pelatihan Linmas	70 orang						
							18. PKK	480 orang						
4,7	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya Kelurahan Bausasran				Danurejan				100%	278.330.000	306.163.000	sedang berjalan	Kec. Danurejan	
							1. Pemberdayaan kelurahan	10 orang						
							2. Pelatihan SIM PKK	60 orang						
							3. Pelatihan Kader PAUD	61 orang						
							4. Gebyar PAUD	110 orang						
							5. Pelatihan Bergodo Bausasran	50 orang						
							6. Pelatihan Tari Tradisional/Modern	50 orang						
							7. Pelatihan Memasak Makanan Sehat Untuk Bayi	60 orang						
							8. Kejuaraan Tenis Meja	55 orang						
							9. Pentas Seni	600 orang						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							10. Pelatihan Merawat Jenazah	60 orang						
							11. Sosialisasi Bahaya Narkoba	60 orang						
							12. Sosialisasi PKDRT	60 orang						
							13. Pelatihan Pengolahan Ikan	50 orang						
							14. Pelatihan Ketoprak	50 orang						
							15. Pelatihan Kader PKK	110 orang						
							16. Pelatihan RT/RW	60 orang						
							17. Sapa Anak Kos	110 orang						
							18. Sosialisasi KP Ibu ASI	60 orang						
							19. Pelatihan Linmas	70 orang						
							20. Kesi	60 orang						
							21. JBM	60 orang						
							22. PKK	480 orang						
4,8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan			Danurejan						100%	547.749.833	602.524.816		
							1. dokumen musrenbang yang tersusun	4 dokumen						
							5. Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan	5 eksemplar						
							1. Perbaikan pos ronda	1 paket						
							3. Perbaikan MCK Umum	1 paket						
							4. PJU lingkungan	100 titik						
							Peningkatan debit air sumur	1 paket						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							SAH	1 paket						
							7. Sosialisasi dan monev pembangunan	110 orang						
							8. Konsultasi	1 paket						
							Petugas pemantau PJU	198 orang						
							Taman vertikal	1 paket						
							Perbaikan coblok, corblok, paving blok	1 paket						
							Honor	124 orang						
JUMLAH TOTAL											3.556.760.000	3.912.436.000		

TABEL 3.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017  
KOTA YOGYAKARTA

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN GEDONGTENGEN

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab												
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan																	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%					610.763.403	696.530.000														
1.1	Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor			GEDONGTENGEN			- Materai 6000 yang tersedia	240 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.390.000		sedang berjalan	Gedongtengen												
							- Materai 3000 yang tersedia	650 lembar			2.355.000															
							- Jumlah STNK kendaraan dinas roda 4 yang terbayar	1 unit																		
							Jumlah STNK kendaraan dinas roda 3 yang terbayar	1 unit																		
							- Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 yang terbayar	11 unit																		
							- Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia	15 jenis			3.856.525															
							- Jasa Kebersihan kantor	12 bulan																		
							- Alat tulis kantor yang tersedia	44 jenis			22.597.400															
							- Jumlah Penggandaan	104.000 lembar			9.909.550															
							- Jumlah Penjilidan	40 buku																		
							- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 paket			2.730.410															
							- Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan			83.100.000															
							- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	12 bulan			2.340.000															
							- Jasa perbaikan peralatan kerja	3 paket			16.000.000															
							- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis			6.995.000															
							- Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 paket			7.255.000															
							- Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia	4 jenis			5.580.000															
							- Jasa piket gedung kantor	12 bulan			131.400.000															
							1.2	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Perkantoran								GEDONGTENGEN		13	- Dokumen administrasi penatauaahan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akutansi yang tersusun	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	58.200.000		sedang berjalan	Gedongtengen
																			- Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	29 ASN						
- Jumlah Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	83.802.318																								

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			GEDONGTENGEN		14	- Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	102.186.200		sedang berjalan	Gedongtengen
							- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat	12 bulan						
							- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan						
							- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum	11 bulan						
						15	- Laporan Monitoring dan Koordinasi konsultasi keluar daerah	8 laporan			69.066.000			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					118.340.000			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/ Bangunan Kantor			GEDONGTENGEN			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat kerja		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	55.757.000		sedang berjalan	Gedongtengen
							1. Rumah Dinas Camat	1 unit						
							2. Gedung Kantor Kecamatan	1 unit						
							3.Gedung Kantor Kel. Sosromenduran	1 unit						
							3.Gedung Kantor Kel. Pringgokusuman	1 unit						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			GEDONGTENGEN			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	62.583.000		sedang berjalan	GEDONGTENG EN
							1. Roda empat	1 unit						
							2. Roda Tiga	1 unit						
							3. Roda Dua	11 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					80.716.850			
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			GEDONGTENGEN			- Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Rensta, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	- Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	80.716.850		sedang berjalan	GEDONGTENG EN
							- Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	- Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
							- Dokumen Kepegawaian	6 Dokumen	- Tersedianya dokumen kepegawaian					
							- Peningkatan Kapasitas PNS	4 kali	- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur					

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik								1.748.896.753			
4.1	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			GEDONGTENGEN			- Jumlah E-KTP	4 orang	- Dokumen E-KTP yang berhasil terdistribusikan ke masyarakat	100%	171.220.103			Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat
							- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	1 kegiatan	- Meningkatnya Pelayanan PATEN kepada Masyarakat	100%				
							- Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan	2 kegiatan	- Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	100%				
							- Kegiatan Retribusi HO & IMBB Kecamatan	3 kegiatan	- Meningkatnya pendapatan retribusi HO dan IMBB Kecamatan	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen			GEDONGTENGEN			- Monitoring, Pembinaan dan Penataan PKL	5 bulan	- Meningkatnya Ketertiban PKL	100%	244.827.500			Seksi Trantib Masyarakat
							- Pengawasan Perijinan	8 bulan	- Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman dalam lingkungan masyarakat	100%				
							- PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	12 bulan	- Adanya suasana tertib dan aman dalam kegiatan kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota, Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	100%				
							- Kegiatan Monitoring Trantibum	11 bulan	- Sinergitas aparat wilayah Kecamatan Gedongtengen terjalin dengan baik	100%				
							- Monitoring dan Pemberdayaan LINMAS	6 bulan	- Meningkatnya SDM dan kedisiplinan anggota Linmas	100%				
							- Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana (Kebakaran dan SAR )	1 kegiatan	- Terwujudnya Masyarakat Kelurahan Tangguh menghadapi bencana yang terarah, terencana, terpadu,dan terkoordinasi	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Pengamanan Umum	28 kali	- Terciptanya suasana i aman dan tertib di lingkungan masyarakata Gedongtengen	100%				
							- Sambang Kampung	12 kali	- Terjalinnya komunikasi aparat keamanan dengan masyarakat untuk memberi rasa aman	100%				
							- Operasi Ketertiban	72 kali	- Terwujudnya budaya tertib di tengah- tengah lingkungan masyarakat Gedongtengen	100%				
							- Operasi Vandal	24 kali	- Terjaganya kebersihan, keamanan fasilitas umum dari tindakan vandalisme	100%				
							- Jumlah dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	- Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan gedongtengen	100%				
							- Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 dokumen	- Menjadikan dasar bagi kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.	100%				
							- Kegiatan Sinergitas antar Lembaga Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen	2 kegiatan	- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing lembaga sosial dalam pembangunan wilayah	100%				
4,3	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			GEDONGTENGEN			- GT Expo	1 kegiatan	- Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengekspos potensi perekonomian wilayah.	100%	74.604.000			Seksi Pembinaan Perekonomian Masyarakat
							- Pelatihan Penyandang Disabilitas	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan penyandang Disabilitas agar mandiri dan produktif	100%				
							- Pelatihan Kerajinan Daur Ulang Bagi Anggota PKH	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan kerajinan daur ulang dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Pelatihan Pembuatan Kue Kering	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan membuat kue kering dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Pelatihan Hantaran	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan membuat hantaran dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Pelatihan Olahan dari Ikan	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan olahan ikan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Pelatihan Makanan Olahan Berprestasi	1 kegiatan	Meningkatnya ketrampilan olahan makanan berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			GEDONGTENGEN			- TKPK se Kecamatan	4 kegiatan	- Forum TKPK	100%	259.677.500			Seksi Pemberdayaa n Sosial dan Budaya Masyarakat
							- TP PKK Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	- Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan, RW dan RT	100%				
							- Raskin se Kecamatan	13 kali	- Pendistribusian RASKIN se Kecamatan	100%				
							- Kegiatan Unsur Kelembagaan Sosial	12 kali	- Falisitasi kegiatan sosial se kecamatan Gedongtengen	100%				
							- Gebyar Lansia	1 kegiatan	- Fasilitasi terhadap aktivitas lansia diberbagai kegiatan	100%				
							- Gebyar Paud	1 kegiatan	- Meningkatkan aktivitas anak usia dini untuk mengembangkan kreativitasnya	100%				
							- Monitoring Hibah /Bansos RT dan stimulan RW	1 kegiatan	- Tersedianya data penerima Hibah/Bansos RT dan Stimulan RW dan termonitornya penggunaannya.	100%				
							- Paguyuban Rumongso	2 kegiatan	- Tersedianya data / informasi potensi perekonomian dan pariwisata wilayah Kecamatan Gedongtengen	100%				
							- LBSI	1 kegiatan	- Terpilihnya Bayi Sehat Tingkat Kecamatan.	100%				
							- Pembinaan Kader PKK se Kecamatan Gedongtengen	3 kegiatan	- Menigkatnya partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Pembinaan Pondokan	2 kegiatan	- Meningkatkan kesadaran induk semang mematuhi peraturan pondokan dan menjaga lingkungan yang tertib dan aman	100%				
							- Pembinaan Anggota Karang Taruna se Kecamatan Gedongtengen	2 kegiatan	- Meningkatanya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
							- GT Sehat	1 kegiatan	- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	100%				
							- Pembinaan Kader Pos Yandu	1 kegiatan	- Meningkatnya Peran Kader Pos Yandu di wilayah kecamatan	100%				
							- GT Award	1 kegiatan	- Partisipasi Masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih aman dan tertib.	100%				
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusman			GEDONGTENGEN			- Gelar Potensi Seni Budaya dan Kerajinan	1 Kegiatan	- Meningkatnya Partisipasi warga Kelurahan Sosromenduran dalam melestarikan kebudayaan	100%	314.706.750			
							- Festival Kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	- Partisipasi warga Kelurahan Sosromenduran 100%	100%				
							- KESI	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI	100%				
							- Operasional JBM	1 Kegiatan	- Meningkatnya kesadaran belajar menjadi budaya masyarakat Yogyakarta	100%				
							- Pawai Budaya	1 Kegiatan	- Partisipasi warga Kelurahan Sosromenduran 100%	100%				
							- Pembinaan Wawasan TP PKK dan Kegiatan Operasional PKK RT dan RW	2 Kegiatan	- Menigkatnya partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Operasional Posyandu	1 Kegiatan	- Mantapnya kesinambungan Posyandu	100%				
							- Pembinaan dan Penyegaran Kelembagaan SATGAS Anti Narkoba Kelurahan	1 Kegiatan	- Meningkatkan Kualitas Satgas Anti Narkoba	100%				
							- Pembinaan Lansia	1 Kegiatan	- Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dalam melaksanakan perannya di tengah-tengah keluarga serta masyarakat.	100%				
							- Pelatihan Kesenian Karawitan	1 Kegiatan	- Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal	100%				
							- Pembinaan GSI	1 Kegiatan	- Meningkatkan Motivasi GSI dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga	100%				
							- Pembinaan Mitra Keluarga	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak	100%				
							- Pembinaan Karang Taruna	2 Kegiatan	- Meningkatanya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
							- Pembinaan Lembaga PAUD	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendidikan PAUD	100%				
							- Pelatihan Batik Sablon dan Jumputan	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan membuat batik sablon dan jumputan serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Pembinaan dan Penyegaran Kelompok Seni Budaya (KSB)	1 Kegiatan	- Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Pelatihan MC	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan sebagai MC dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran			GEDONGTENGEN			- Pembinaan Mitra Keluarga	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak	100%	288.791.500			
							- Gebyar PAUD dan Pelatihan Pendidikan PAUD	2 Kegiatan	- Meningkatkan aktivitas anak usia dini untuk mengembangkan kreativitasnya	100%				
							- Gebyar Lansia	1 Kegiatan	- Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dan melaksanakan perannya dalam keluarga serta masyarakat.	100%				
							- Workshop Karang Taruna	1 Kegiatan	- Meningkatnya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya	100%				
							- Pembinaan Kader PIK-R	2 Kegiatan	- Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi untuk mencetak remaja yang aktif, sehat dan berkualitas serta jauh dari risiko kenakalan remaja, seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA	100%				
							- Pelatihan Kesenian Karawitan	5 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan karawitan warga dan pelestarian seni budaya	100%				
							- Pembinaan Kelurahan Pariwisata Berbasis Gelar Potensi /Apeman	1 Kegiatan	- Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal	100%				
							- Kegiatan Jambore dan Operasional PKK RT RW	2 Kegiatan	- Menigkatnya partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	100%				
							- Festival Kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	- Partisipasi warga Kelurahan Sosromenduran 100%	100%				
							- Pembinaan dan Operasional KESI	2 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI	100%				
							- Pembinaan Kelembagaan PSM	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas kader PSM	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Pawai Budaya	1 Kegiatan	- Partisipasi warga Kelurahan Sosromenduran 100%	100%				
							- Operasional JBM	1 Kegiatan	- Meningkatnya kesadaran belajar menjadi budaya masyarakat Yogyakarta	100%				
							- Pembinaan Manajemen Pariwisata	1 Kegiatan	- Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata di wilayah Kelurahan Sosormenduran	100%				
							- Pelatihan Olahraga	2 Kegiatan	- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	100%				
							- Pelatihan Olahan Tanaman Obat	1 Kegiatan	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat manfaat tanaman yang berfungsi sebagai obat	100%				
							- Pembinaan Kader dan Operasional Posyandu	1 Kegiatan	- Meningkatnya kemampuan dan partisipasi aktif peran kader dan mantapnya kesinambungan Posyandu.	100%				
							- Pelatihan Tambulampot dan Vertikultur	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan membuat tambulampot dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
							- Pelatihan Kerajinan	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan membuat kerajinan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%				
				GEDONGTENGEN			- Pelatihan Kecantikan	1 Kegiatan	- Meningkatnya ketrampilan kecantikan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat	100%	395.069.400			
							- Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	- Satu rujukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pada Umumnya dan Kecamatan Gedongtengen pada khususnya yang selanjutnya menjadi APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							- Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	- Tersedianya informasi Program dan kegiatan Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta	100%				
							- Profil Kecamatan	1 dokumen	- Tersajinya Profil Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta	100%				
							- Pemeliharaan Jalan Umum se-Kelurahan Sosromenduran	166 m <sup>2</sup>	- Dukungan terhadap terwujudnya sarana dan prasarana jalan umum, fasilitas umum penerangan jalan umum yang lebih	100%				
							- Pemeliharaan Jalan Umum se-Kelurahan Pringgokusuman	200 m <sup>2</sup>						
							- Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran	35 m <sup>2</sup>						
							- Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman	55 m <sup>2</sup>						
							- Pemeliharaan Gapura dan Pintu In se-Kelurahan Sosromenduran	5 unit						
							- Pemeliharaan Gapura dan Pintu In se-Kelurahan Pringgokusuman	5 unit						
							- Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan Sosromenduran	2 unit						
							- Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan Pringgokusuman	2 unit						
							- Pemeliharaan MCK se-Kelurahan Pringgokusuman	2 unit						
JUMLAH TOTAL										2.558.717.006				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pakualaman

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					526.599.605	507.812.652		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Kec. PA			Materai Rp 6.000,- yang tersedia	300 buah	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	271.041.865	298.146.052	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							Materai Rp 3.000,- yang tersedia	600 buah						
							Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia	12 bulan						
							Tenaga piket kantor yang tersedia	365 hari						
							Tabung APAR yang terpelihara	19 buah						
							Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa meja 10 buah, Sewa kursi 100 buah, Sewa Tenda 3 unit, Sewa Sound System 1 unit						
							STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit						
							STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	11 unit						
							bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	24 jenis						
							Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	45 jenis						
							Jasa Penggandaan	86.400 lbr						

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	17 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan						
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. PA			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	117.751.740	58.080.000	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN						
							Jasa Tenaga Bantuan	3 orang						
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec.PA			Makan minum rapat yang tersedia untuk		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	137.806.000	151.586.600	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							-pegawai	46 orang						
							-koordinasi	108 kali						
							- tamu	2 keg						
							-harian umum	11 bulan						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 laporan						
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					120.187.000	129.935.700		
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kec.PA			Rumah dinas kecamatan yang terpelihara dengan baik	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	53.225.000	56.277.500	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor			Kec.PA			Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	3 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas				Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
2.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec.PA			Kendaraan Roda 4 yang terawat	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		66.962.000	73.658.200	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							Kendaraan Roda 3 yang terawat	1 unit						
							Kendaraan Roda 2 yang terawat	11 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					32.881.500	36.169.650		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec.PA			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	7 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	32.881.500	36.169.650	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik		Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik dan Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	100%					1.322.717.995	1.454.989.795		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kec.PA						100%	86.607.500	95.268.250	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							Dokumen Monografi yang tersusun	3 dokumen	Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan					
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW	1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW					
							Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya	83 RT	Terverifikasi dan termonitoringnya proposal Hibah dan pelaksanaan Hibah					
							Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	1 Kelurahan	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan )					

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan						
						Pembinaan LINMAS	3 kali	Terselenggaranya peningkatan Kemampuan						
						Pedagang kaki lima yang dibina dan diawasi	80 pedagang	Terselenggaranya peningkatan jumlah PKL yang						
						PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial	12 kali	Terselenggaranya pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Kegiatan Sosial						
						Pengamanan Lebaran	10 hari	Terselenggaranya Pengamanan Lingkungan saat Lebaran						
						Pengamanan Umum	7 kali	Terselenggaranya peningkatan Keamanan						
						Sambang Kampung	2 kali	Terselenggaranya peningkatan Kemanan						
						Operasi Ketertiban	24 kali	Terselenggaranya peningkatan keamanan dan						
						Operasi Vandalisme	4 kali	Terlaksananya pengurangan aksi vandalisme dan						
4.2	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kec.PA						100%	92.524.395	101.776.835	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
						Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan						
						Pelayanan Perizinan & Adminduk	12 bulan	Tertibnya administrasi perizinan dan kependudukan						
						Verifikasi dan distribusi e-ktip dan KK	12 bulan	Terlaksananya Kelancaran perekaman dan pengambilan						
						Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan	4 bulan	Tersedianya database pelaku usaha di kecamatan						
						Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	1 kali	Tersosialisasinya standar dan aturan kegiatan kewenangan						
4.3	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kec.PA						100%	364.994.650	401.494.115	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
						Dokumen Musrenbang yang tersusun	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan						
						Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun	2 Dokumen	Tersusunnya Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan						

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan	1 kegiatan	Tersusunnya Profil Kelurahan dan Kecamatan	100%	242.879.350	267.167.285		
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	95 titik	Terpeliharanya PJU					
							Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Pakualaman	2 paket	Terpeliharanya akses jalan yang baik					
							Pemeliharaan SAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 paket	Terpeliharanya Kelancaran SAH					
							Pendampingan Pengembangan Dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Dan Klp Masyarakat Tk Kec.	6 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Tk Kecamatan					
							Gelar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1 kali	Terselenggaranya peningkatan kesejahteraan					
							Pelatihan Merangkai Bunga	1 kali	Terselenggaranya penambahan pengetahuan &					
							Pelatihan Olahan Ikan	1 kali	Terselenggaranya penambahan pengetahuan &					
							Pakualaman Expo	1 kali	Terselenggaranya ajang promosi & pengenalan					
							Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan	2 kali	Terselenggaranya peningkatan kemampuan					
							4.4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman						
							Pendistribusian Raskin	12 bulan	Terselenggaranya distribusi raskin dengan lancar dan tepat waktu	100%	242.879.350	267.167.285	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							Pembinaan Seni Budaya Di Kecamatan	6 kegiatan	Terselenggaranya penguatan dan peningkatan Kesenian Tradisional					
							Pembinaan Kesehatan Di Kecamatan	6 kegiatan	Terselenggaranya Penguatan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat					
							Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular Dan Peredaran Narkoba	1 kali	Terlaksananya antisipasi bahaya Narkoba					
							Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel.	Terselenggaranya peningkatan kelembagaan PKK dan pemberdayaan					

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pelaksanaan Gebyar Paud	1 kali	Terselenggaranya penggalian kreativitas anak					
							Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak	1 kali	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan ibu & anak					
							Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK	1 kali	Terselenggaranya Evaluasi dan pembinaan PKK					
							Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan	1 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan					
							Rakor Pemberdayaan Kecamatan	12 bulan	Terselenggaranya rapat koordinasi pemberdayaan kecamatan					
							Koordinasi TKPK	5 kali	Terlaksananya Penurunan Angka Kemiskinan					
							Pembinaan Keagamaan	4 kegiatan	Terselenggaranya Peningkatan keimanan masyarakat					
							Pelatihan Pola Asuh Anak	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan pengetahuan ibu balita					
							Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	1 kali	Tercapainya kebangkitan rasa nasionalisme					
							Pelatihan Ngadi Saliro Ngadi Busana	2 kali	Terselenggaranya Peningkatan pengetahuan penampilan					
							Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	1 kali	Terselenggaranya penambahan pengetahuan tentang PPGD					
							Penguatan Kelembagaan TKPK	1 kali	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dalam penanggulangan					
							Pembinaan Antar Umat Beragama	1 kali	Terjalinnya kerukunan antar umat beragama					
							Pembinaan Pondokan	1 kali	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan tentang aturan					
							Peningkatan Kapasitas Lembaga PKK	1 kali	Terselenggaranya peningkatan pemahaman tentang program pemerintah					

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti			Kec.PA						100%	287.223.550	315.945.905	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							Pentas Seni Kewilayahan	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Potensi Seni Budaya					
							Pawai Budaya	1 kali	Terselenggaranya Pelestarian Budaya					
							Kelompok PKK RW yang terbina	10 kelompok	Terselenggaranya Peningkatan Adm. PKK					
							Kelompok PKK RT yang terbina	47 kelompok	Terselenggaranya Peningkatan Adm. PKK					
							Operasional Jam Belajar Masyarakat (JBM)	10 RW	Terciptanya suasana belajar mengajar yg kondusif					
							Kelembagaan Kelurahan Siaga yang terbina	10 RW	Terselenggaranya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat					
							Pemberantasan Sarang Nyamuk	10 kali	Terselenggaranya Pemberantasan Sarang Nyamuk					
							Pemberdayaan Kelompok Lansia	10 Kelompok	Terselenggaranya Peningkatan derajat Kesehatan lansia					
							Pemberdayaan Kelompok Belajar Masyarakat	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Lansia Potensial	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Paguyuban Paud	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Apsari	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Mitra Keluarga	8 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Kelompok PEW	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Paguyuban MC	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan IPSM	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Paguyuban Kesenian Mocopat	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Senam PKK	10 kali	Terselenggaranya Peningkatan derajat Kesehatan					
							Pemberdayaan Kesenian Karawitan	10 kali	Terselenggaranya Pelestarian Budaya					

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pemberdayaan Gamelan Religi	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Kelompok Rontek Bambu Nada	6 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Kelompok Gebyok Purwومانunggal	6 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Komisi Lansia	12 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pembinaan Administrasi Dasawisma	3 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Usep Km Purwo Makaryo	11 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	12 kali	Terselenggaranya Peningkatan Pemberdayaan Wanita					
							Pemberdayaan Kelompok Seni Kroncong	10 kali	Terselenggaranya Penguatan Lembaga					
							Pemberdayaan Yandu Balita	6 kali	Terselenggaranya Peningkatan Gizi Balita					
							Pemberdayaan Yandu Lansia	6 kali	Terselenggaranya Peningkatan Kesehatan Lansia					
							Pembinaan Keamanan Lingkungan	10 kali	Terselenggaranya Peningkatan Keamanan Lingkungan					
							Pembinaan Administrasi Pkk Rw	2 Kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Kelompok Tari Anak -Anak	10 kali	Terselenggaranya Pelestarian Seni Budaya					
							Pemberdayaan Kelompok Batik Purwotaruntum	5 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pemberdayaan Panca Tertib	6 kali	Teciptanya Ketertiban Lingkungan					
							Pemberdayaan Jaga Warga	6 kali	Terciptanya Kesiap siagaan masyarakat					
							Pembinaan Yandu Balita	1 Kali	Terselenggaranya peningkatan derajat kesehatan masyarakat					
							Pelatihan Kewirausahaan	1 kali	Terselenggaranya peningkatan Pengelolaan Usaha					
							Pelatihan Rajut Sulam	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Jumputan Lanjutan	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Kursus Membuat Abon Ayam	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Budidaya Toga	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Sablon	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Membuat Kue	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Pembuatan Peyek	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Budi Daya Sayuran	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
							Pelatihan Kuliner Ayam Bebek	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan					
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur			Kec.PA						100%	248.488.550	273.337.405	Sedang Berjalan	Kecamatan Pakualaman
							Pentas Seni Kewilayahan	1 kali	Terselenggaranya Gelar Potensi Seni					
							Monitoring Kamling	15 kali	Terselenggaranya Peningkatan Kamling					
							Pembinaan Kepemudaan	4 kali	Terselenggaranya Peningkatan Kelembagaan					
							Gerakan Jum'at Bersih	9 kali	Terselenggaranya Peningkatan Kesehatan					
							Pembinaan Kader Kesehatan	4 kali	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
							Penguatan Kelembagaan Rt/Rw	2 kali	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas RT/RW					
							Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Orsos					
							Peningkatan Kapasitas Linmas	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Linmas					
							Workshop Kerukunan Antar Umat Beragama	1 kali	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan					
							Pelatihan Adm. Pkk Kelurahan, Rt, Rw Dan Dasawisma	2 kali	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
							Workshop Mitra Keluarga	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
							Workshop Kader Paud	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan SDM					

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Sosialisasi P4GN	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
							Sosialisasi Kesehatan Lingkungan	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
							Pawai Budaya	1 kali	Terselenggaranya Gelar Potensi Seni					
							Kelompok PKK RW yang terbina	36 kelompok	Terselenggaranya Peningkatan Adm. PKK					
							Kelompok PKK RT yang terbina	9 kelompok	Terselenggaranya Peningkatan Adm. PKK					
							Kelembagaan Kelurahan Siaga yang terbina	9 RW	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
							Operasional Jam Belajar Masyarakat (JBM)	9 RW	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
							Pelatihan Budidaya Lele	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi					
							Pelatihan Tata Boga	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi					
							Pelatihan Pembuatan Bedcover, Bantal Guling	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi					
							Pelatihan Kerajinan Tas Dan Sandal Batik	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi					
							Pelatihan Memasak Ayam Presto	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi					
							Pelatihan Budidaya Toga Dan Tanaman Kebun Keluarga	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi					
							Pelatihan Pembuatan Aneka Keripik	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi					
							Sosialisasi PIRT	1 kali	Terselenggaranya Peningkatan SDM					
JUMLAH TOTAL											2.002.386.100	2.128.907.796		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampilan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pemberdayaan Masyarakat													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					680.022.240	748.024.464		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor			Kec. Ngampilan			Materai 6000 yang tersedia	135 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	399.120.500	439.032.550	sedang berjalan	Kec NG
							Materai 3000 yang tersedia	750 bh				4.180.000	sedang berjalan	Kec NG
							STNK Roda 4 yang terbayar	1 unit						
							STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit						
							STNK Roda 2 yang terbayar	11 unit						
							1. Retribusi kebersihan	12 bulan				106.037.800	sedang berjalan	Kec. NG
							2. Kebersihan kantor kecamatan & kelurahan	1 paket						
							Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis						
							Jasa Pencetakan	2 jenis				8.074.000	sedang berjalan	Kec. NG
							Jasa Penggandaan	73.610 lbr						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 jenis				21.899.900		
							Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia	12 bulan				7.027.900	sedang berjalan	Kec. NG
							Bahan bacaan surat kabar yang tersedia	2 jenis				61.248.000	sedang berjalan	Kec NG
							Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis				4.356.000	sedang berjalan	Kec NG
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis				19.140.000	sedang berjalan	Kec. NG
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan				26.677.200	sedang berjalan	Kec NG
							Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	21 jenis				128.480.000		
							Jasa Pemeliharaan Taman	14 Jenis				13.735.700	sedang berjalan	Kec NG
		6.990.500												

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.2	Penyediaan jasa pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. Ngampilan			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	115.351.740	126.886.914	sedang berjalan	Kec. NG
							Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	30 dokumen ASN						
							Jasa Tenaga Bantuan	3 orang					-	sedang berjalan
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi						Makanan dan minuman yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	165.550.000	182.105.000	sedang berjalan	Kec NG
							a. Koordinasi	85 kali						
							b. pegawai	50 org						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 laporan					sedang berjalan	Kec NG
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					280.475.000	308.522.500		
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor						Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	4 gedung kantor	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	222.600.000	244.860.000	sedang berjalan	Kec. NG
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100%	57.875.000	63.662.500	sedang berjalan	Kec. NG
							Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 2	1 unit 1 unit 11 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan Capaian Kinerja dan keuangan	100%					60.401.500	66.441.650		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kec. Ngampilan			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Target Fisik, Target Keunangan, Renja RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	7 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	60.401.500	66.441.650	sedang berjalan	Kec. NG
							2. Laporan kinerja SKPD ; IKM, LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, SPIP yang tersusuns	5 jenis laporan						
							Pegawai yang mengikuti pendidikan peningkatan sumber daya aparatur	4 keg	Dukungan terhadap peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan f	100%				
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan				Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	100%					1.637.721.515	1.801.493.667		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Keamanan & Ketertiban Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kec. Ngampilan	Pelayanan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Ngampilan yang terselenggara dengan baik					100%	247.007.500	271.708.250	sedang berjalan	Kec. NG
							Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan					
							Evaluasi Kelurahan	1 kegiatan	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan )					
							Pembinaan Administrasi Pengurus RT/RW	1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW					
							Rakoordinasi bidang Pemerintahan	12 bulan	Terselenggaranya rapat koord pemerintahan kecamatan & Kelurahan					
							Pengamanan Wilayah	12 bulan	Keamanan dan ketertiban wilayah					
							Pembinaan Trantib Kec & Kel	8 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan Trantib					
							Pelatihan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	Terselenggaranya pelatihan Penanggulangan					
							Pelatihan Penanggulangan Napza	1 kegiatan	Terselenggaranya pelatihan Penanggulangan Napza					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Rapat Kordinasi Trantib	12 bulan	Terselenggaranya pelatihan Penanggulangan Bencana					
							Pengamanan Umum	16 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah					
							Operasi Trantib	384 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah					
							Operasi Vandal	96 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah					
							Sambang Kampung	48 keg	Keamanan dan ketertiban wilayah					
							Lomba Ketertiban	1 kegiatan	Terselenggaranya Lomba Trantib					
4.2	Pelayanan Informasi dan pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kec. Ngampilan	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan yang terselenggara dengan baik						99.967.865	109.964.652	sedang berjalan	Kec. NG
							Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	5 jenis izin	Terselenggaranya pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan	100%				
							Pendataan Potensi Perijinan	1 keg	Tercapainya pelayanan masyarakat yang lebih	100%				
							Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	1 keg	Terselenggaranya sosialisasi SPP	100%				
							Penyusunan Profil Wilayah	1 keg	Tersusunnya profil wilayah	100%				
							Sosialisasi Review SPP	1 keg	Terselenggaranya sosialisasi review SPP	100%				
							Sosialisasi Perijinan & Adminduk	1 keg	Terselenggaranya sosialisasi adminduk & perijinan	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan										232.512.750	255.764.025	sedang berjalan	Kec. NG
							Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100%				
							Monitoring & Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terwujudnya tingkat pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	100%				
							Festival Olahraga Rekreasi dan Tradisional	1 kegiatan	Terselenggarannya kegiatan festival Olahraga Rekreasi dan	100%				
							Koordinasi TKPK	11 bulan	Terselenggarakannya	100%				
							Gebyar PAUD	1 kegiatan	Terselenggaranya gebyar Paud	100%				
							Gebyar Lansia	1 kegiatan	Terselenggaranya gebyar Lansia	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Sarasehan Kelembagaan Komisi Lansia	1 kegiatan	Terciptanya Kelembagaan Komisi Lansia yang Kuat	100%				
							Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kec	12 bulan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kec	100%				
							Pendistribusian Raskin	12 kali	Terwujudnya pendistribusian raskin	100%				
							Lomba Senam antar TK	1 kegiatan	Terselenggaranya Lomba Senam antar TK	100%				
							Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1 kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi wawasan	100%				
							Sosialisasi Pembinaan Keluarga Penderita Kejiwaaan	1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan Keluarga	100%				
							Sarasehan Kelembagaan Rumangsa	1 kegiatan	Terciptanya kelembagaan Rumangsa	100%				
							Pelatihan Tari Kreasi Anak	1 kegiatan	Terselenggaranya pelatihan Tari Kreasi	100%				
							Pelatihan Mendongeng untuk guru TK	1 kegiatan	Terselenggaranya pelatihan mendongeng guru TK	100%				
							Sarasehan Kelembagaan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)	1 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas kelemb.HIMPAUDI	100%				
							Workshop keterpaduan BKB,PAUD, SDIDTK di Posyandu	1 kegiatan	Terselenggaranya workshop keterpaduan kegiatan di posyandu	100%				
							Pawai Budaya Kecamatan	1 Kegiatan	Terselenggaranya keg Pawai Budaya	100%				
							Pembinaan Administrasi PKK	1 kegiatan	Terselenggaranya administrasi PKK yang	100%				
							Pembinaan Penggerak PKK Kecamatan	1 kegiatan	Terciptanya kelompok PKK yang berkualitas	100%				
4.4	Pembinaan Perekonomian Masyarakatan Kecamatan Ngampilan				Peningkatan perekonomian masyarakat						77.121.800	84.833.980		
							Pembinaan Pondokan	1 keg	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat kel. Ngampilan					
							Sarasehan Kelembagaan UMKM	1 kegiatan	Terselenggaranya keg.penguatan kelembagaan UMKM	100%				
							Pembinaan &Penataan PKL	4 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan & penataan PKL					
							Gelar Potensi UMKM	1 kegiatan	Terselenggaranya gelar Potensi UMKM	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan			Kel. Ngampilan							317.556.750	349.312.425		
							Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat kel. Ngampilan	100%				
							Pembinaan Administrasi PKK	83 Klmpk	Meningkatkan kemampuan PKK	100%				
							Pemasyarakatan Jam Belajar Masyarakat	13 RW	Terwujudnya Gerbangmas	100%				
							Sosialisasi RW Siaga	1 keg	Menambah wawasan bagi terciptanya RW Siaga	100%				
							Pelatihan Batik Jumputan	30 warga	meningkatkan ketrampilan warga	100%				
							Pelatihan Budidaya Tanaman Organik, Toga dan Pengelolaan Bank Sampah	45 Orang	Meningkatkan pengetahuan warga dalam bidang penghijuan dan pemanfaatan lahan sempit	100%				
							Pelatihan Kader PHBS, LBS dan Kader Yandu Lansia Balita	75 orang	Meningkatkan pengetahuan Kader lansia, balita, menjaga	100%				
							Pembinaan Administrasi RT/RW	110 orang	Meningkatkan pengetahuan dan	100%				
							Pelatihan Kader Lansia, penggunaan Alat Medis dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia	50 orang	Meningkatkan kesehatan lansia	100%				
							Sosialisasi penanggulangan Bencana	1 keg	Menambah pengetahuan ttg cara penanggulangan	100%				
							Sosialisasi Mitra Keluarga dan Kelompok Pendukung Ibu (KPI)	50 orang	Pemahaman ttg perwal KDRT dan terbentuknya Kader BUMIL	100%				
							Pelatihan Pembuatan Bakpia	50 orang	Menambah pengetahuan ttg cara pembuatan Bakpia	100%				
							Pelatihan MC Bahasa Jawa	1 keg	Menambah pengetahuan ttg budaya Jawa	100%				
							Pelatihan membuat souvenir dr sampah plastik dan Bahan Planel	50 orang	meningkatkan ketrampilan warga	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD	30 orang	Meningkatkan Kualitas kemampuan Pendidik dan pengelola PAUD	100%				
							Pawai Budaya	150 orang	Pengembangan Potensi Budaya	100%				
							Gelar Pentas Seni dan Budaya	200 orang	Promosi Potensi Wilayah	100%				
							Sosialisasi dan Sarasehan Budaya	50 orang	Peningkatan Wawasan Kebudayaan	100%				
							Karnaval Potensi Kesenian Kel. Ngampilan	250 orang	Unjuk Potensi Kesenian Wilayah	100%				
							Pelatihan Tari	20 orang	Pengembangan Potensi Seni Tari	100%				
							Pembinaan Olahraga Kelurahan	60 orang	Meningkatkan Kemampuan	100%				
							Pelatihan Karawitan	40 orang	Peningkatan Kemampuan Masyarakat	100%				
							Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kel	11 bulan	Terselenggaranya koordinasi dengan baik	100%				
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan			Kel. Notoprajan							297.495.100	327.244.610		
							Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100%				
							Pelatihan SIM PKK	8 RW	tertib administrasi	100%				
							Pembinaan Olahraga Senam	4 kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga	100%				
							Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan	60 orang	menambah wawasan	100%				
							Pelatihan Ngrukti Jenazah Muslim	1 kegiatan	Menambah Wawasan	100%				
							Pelatihan Ngrukti Jenazah non Muslim	1 kegiatan	Menambah Wawasan	100%				
							Pelatihan Memdongeng bagi pendidik PAUD	1 kegiatan	Menambah wawasan para pendidik PAUD	100%				
							Kegiatan Belajar Mengajar Bersama untuk anak PAUD	1 kegiatan	menambah pengetahuan	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
							Pelatihan Public Speaking dan kepribadian	50 orang	menambah ketrampilan	100%							
							Pelatihan Tanaman Hidroponik	40 orang	menambah ketrampilan	100%							
							Sosialisasi tentang Anemia bagi PUS dan WUS	1 kegiatan	menambah pengetahuan	100%							
							Pelatihan Administrasi PHBS	1 kegiatan	tertib administrasi	100%							
							Sosialisasi kesehatan Reproduksi Remaja	1 kegiatan	Menambah Wawasan	100%							
							Pelatihan seni budaya bregada Wiragending	2 kegiatan	menambah ketrampilan	100%							
							Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga	1 kegiatan	Menambah Wawasan	100%							
							Pentas Budaya	1 kegiatan	mengembangkan potensi budaya	100%							
							Pelatihan Managemen Pemasaran Online	30 orang	peningkatan kesejahteraan	100%							
							Pelatihan membuat sandal batik	30 orang	peningkatan kesejahteraan	100%							
							Pelatihan pemanfaatan limbah konveksi	30 orang	peningkatan kesejahteraan	100%							
							Pelatihan Pembuatan Souvenir Hiasan Dinding Tehnik Sodet	30 orang	peningkatan kesejahteraan	100%							
							Pembinaan Administrasi PKK	70 kelompok	tertib administrasi	100%							
							Rapat Koordinasi kewilayahan	11 bulan	Terselenggaranya koordinasi dengan baik	100%							
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan			Kec. Ngampilan		100%			Lingkungan yang terpelihara dengan baik		366.059.750	402.665.725		Kecamatan Ngampilan			
							Musyawarah perencanaan Pembangunan	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan	100%							
							Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	1 keg	Tersusunnya informasi kegiatan pembangunan	100%							
							Bimtek Musrenbang	1 keg	Terselenggarakannya Bimtek Musrenbang	100%							
							Profil Kelurahan	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan								
							Pendampingan Keg Fisik Wilayah	6 bulan	Terlaksananya Kegiatan fisik wilayah dg lancar	100%							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pemeliharaan conblock kel. Ngampilan	1 paket	Terciptanya akses jalan yang lancar	100%				
							Pemeliharaan conblock kel. Notoprajan	1 paket	Terciptanya akses jalan yang lancar	100%				
							Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan	1 paket	Terciptanya sarpras yang baik	100%				
							Pemeliharaan PJU	100 titik	Perpeliharanya PJU	100%				
JUMLAH TOTAL											2.658.620.255			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Kota Yogyakarta														
Nama SKPD : Kec. Wirobrajan														
Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Wajib														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kec. WB	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan operasional perkantoran	100%					765.607.318	765.607.318		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. WB			Materai 6000 yang tersedia	1500 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	304.935.500	304.935.500	sedang berjalan	Kec. WB
						Meterai 3000 yang tersedia	900 bh							
						STNK Roda 4 yang terbayar	1 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	13 unit							
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis							
						Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan							
						Jasa Percetakan	1 jenis							
						Jasa Penggandaan	107.000 lbr							
						Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis							
						Pembayaran Listrik	12 bulan							
						Bahan Bacaan / surat kabar yang tersedia	4 jenis							
						Peraturan peundang-undangan yang tersedia	5 jenis							
						Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3 jenis							
						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis							
						Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali							
						Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis							
						Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan							
						Jasa Piket Pengamanan Kantor	12 bulan							
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. Wirobrajan			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		153.752.318	153.752.318	sedang berjalan	Kec. WB
							Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN						Kec. WB
							Jasa Tenaga Bantuan	4 orang						Kec. WB

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Penyediaan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi			Kec. Wirobrajan			Makan dan minum yang tersedia untuk :				306.919.500	306.919.500	sedang berjalan	Kec. WB
							a. Koordinasi	24 kali						Kec. WB
							b. Pegawai	40 orang			Kec. WB			
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48 laporan			Kec. WB			
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					84.028.000	84.028.000		Kec. WB
2.1	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kec. Wirobrajan			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	4 jenis	Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	12.200.000	12.200.000	sedang berjalan	Kec. WB
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			Kec. Wirobrajan			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional  a. Roda 4 (empat) b. Roda 3 (tiga)  b. Roda 2 (dua)	1 unit 1 unit 13 unit	Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	71.828.000	71.828.000	Sedang berjalan	Kec. WB
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					34.860.900	34.860.900	Sedang berjalan	Kec. WB
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. Wirobrajan			1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran ( Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran		34.860.900	34.860.900	Sedang berjalan	Kec. WB
							2. Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
							Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan						Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 81,5% menjadi 82,5 %	100%			2.745.504.024	2.745.504.024		Kec. WB

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Wirobrajan						Musrenbang Kec dan kelurahan	4 dokumen		100%	348.205.000	348.205.000	Sedang berjalan	Kec. WB
							Data Monografi	8 buku						
							Penyuluhan Penguatan Kapasitas	165 RT    34 RW						
							Sosialisasi E-KTP	3 kel						
							Evaluasi kelurahan	1 kel						
							Penyusunan Informasi Program & Kegiatan	3 buku						
							Verifikasi dan distribusi E-KTP	3 kel						
							Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tk.	15 orang						
							Pembinaan Kesiapsiagaan Bencana (KTB)	3 kel						
							Pembinaan PK5	90 orang						
							Pembinaan Pondokan	90 orang						
							Pembinaan Linmas	90 orang						
							Pembinaan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Generasi Muda	150 orang						
							Pengamanan Umum, Sambang Kampung, Operasi ketertiban, & Operasi Vandal	130 keg						
PAM hari raya dan Insidentil	8 keg													
4.2	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan						Pemeliharaan jalan	1    paket			1.024.775.500	1.024.775.500		Kec. WB
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan	1 paket						
							Pemeliharaan Gapura	1 paket						
							Pemeliharaan Gedung Fasilitas Umum	1 paket						
							Pemasangan papan petunjuk	1 paket						
							Pemeliharaan MCK, pos kampling dan revitalisasi Lap olah raga	1 paket						
							Pemeliharaan makam umum	1 paket						
							Pemeliharaan PJU Kampung	99 titik						
4.3	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. Wirobrajan						Sosialisasi Ijin Usaha Mikro	50 orang	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	100%	166.756.924	166.756.924		Kec. WB
							Sosialisasi IMB dan HO	40 orang						
							Pengolahan berkas IMB	40 orang						
							Pelayanan Paten	4 orang						

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelayanan Terpadu	10 orang						
							Sosialisasi masalah makam Pracimalaya	30 orang						
							Monitoring IMB & HO	40 orang						
4.4	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Wirobrajan						Pembinaan Pendidikan Kewirausahaan (1 keg, 50 org)	50 org	Meningkatnya swadaya Masyarakat Kec. WB	100%	49.925.000	49.925.000		Kec. WB
							Sosialisasi gemar makan ikan (50 org x 1keg)	50 org						
							Sosialisasi menu gizi seimbang (50 org x 1 keg)	50 org						
							Pembinaan administrasi UP2K se kecamatan (30 org x 1 keg)	30 org						
							Pelatihan hantaran nikah Kec. WB (30 org x 1 keg)	30 org						
							Pelatihan Perpajakan bagi UMKM (30 org x 1 keg)	30 org						
							Rapat FORKOM UMKM	30 org						
								50 org						
							Pelatihan manajemen kewirausahaan (50 org x 1 keg)							
							Pengenalan komputer dan pelatihan mengenai hardware dan software (30 org x 1 keg)	40 org						
							Pelatihan budidaya dan pengolahan ikan	50 org						
							Terlaksananya Pasar Rakyat	90 org						
							Rapt Raskin	40 org						
							Rapat Forkom UMKM	120 org						
4.5	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. Wirobrajan						Penyusunan Profil	28 org	Meningkatnya swadaya Masyarakat Kec. WB	100%	327.059.250	327.059.250		Kec. WB
							TKPK Tingkat Kecamatan	15 org						
							Pembinaan Mitra Keluarga (1 keg , 50 org)	50 org						
							Sosialisasi Gerakan Perlindungan anak & Perempuan (1 keg, 50 org)	50 org						
							Rapat FPKK Kecamatan WB (50 org x 12 )	50 org						
							Pembinaan sapaan anak kost (40 org x 3keg)	120 org						
							Sosialisasi Anti Traficing (30 orgx1keg)	30 org						
							Sosialisasi Kegiatan PKBN (simulasi) (1 keg, 50 org)	50 org						
							Rakor FP PAUD (45 orgx 4)	180 org						

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sosialisasi HATINYA (Halaman asri, teratur,indah & nyaman) PKK (50org x 1 keg)	50 org						
							Pembinaan Administrasi khusus Pokja IV (40 oragx1keg)	40 org						
							Pelaksanaan HKG dan KB KES Kec. WB (200 orgx1keg)	200 org						
							Sosialisasi update data PMKS & PSKS Kec. WB (40 orgx1keg)	40 org						
							Rapat PMI se Kec. Kota Yk (30 org x 4 keg)	30 org						
							Rakor komisi Lansia se Kec. WB (30 org x 4 keg)	30 org						
							Rapat kecamatan sehat (30 org x 4 keg)	30 org						
							Sosialisasi kelompok KB Pria (30 org x 1 keg)	30 org						
							Sosialisasi Posyandu remaja (30 org x 1 keg)	30 org						
							Sosialisasi Kampung KB (50 org x 1 keg)	50 org						
							Pelatihan Petugas Pemantau jentik Kec. WB	165 org						
							Sosialisasi STBM (40 org x1 keg)	40 org						
							Pelatihan STBM (40 org x 1 keg)	40 org						
							Pemicuan STBM (60 ORG X 1 keg)	60 org						
							Lomba bayi sehat, ibu cerdas tk. Kec	135 org						
							Senam masal hari ibu (300 org x 1 keg)	300 org						
							Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja (40 org x 1 keg)	40 org						
							Pelatihan Pranata Adicara (40 org x 1 keg)	40 org						
							Pelatihan Gamelan (20 org x 24 keg)	20 org						
							Pembinaan Pranikah (40orgx 1kg)	40 org						
							Pembinaan kerukunan antar umat beragama (40 org x 1 keg)	40 org						
							Festival anak sholeh (300orgx1keg)	300 org						
							Sosialisasi sadar bela negara utk pemuda (30orgx1 keg)	30 org						
							Sosialisasi Perijinan di kampung Panca Tertib (50 org x 1 keg)	50 org						
							Jambore PAUD Wirobrajan (520orgx1keg)	520 org						

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan publik speaking (50 org x 1 keg)	50 org						
							Gebyar anak difabel (100 org x 1 keg)	100 org						
							Sosialisasi kawasan bebas asap rokok (40 org x 3 kel)	120 org						
							Deklarasi kawasan bebas asap rokok (40 orgx 3 kel)	120 org						
							Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk serentak (Gertak PSN) (120 orgx1keg)	120 org						
							Gebyar PHBS tk. Kecamatan (300 org x 1 keg)	300 org						
							Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi (50 orgx1keg)	50 org						
							Pembinaan keluarga sakinah (50 orgx1keg)	50 org						
							Pelatihan karawitan	25 org						
							Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	135 orang						
4.6	Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Pakuncen						TKPK	15 orang	Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Pakuncen	100%	300.090.000	300.090.000		Kec. WB
							Pelatihan sesorah Jowo Kel. Pkc (40orgx2hr)	40 org						
							Peningkatan kapasitas pengurus PKK Kel. Pkc (40orgx1hr)	40 org						
							Pentas Seni dlm rangka Peringatan hari ibu (250 orgx1keg)	250 org						
							Pentas Seni dlm rangka Peringatan Hari Kartini Kel. Pkc (250 orgx1keg)	250 org						
							Pelatihan tehnik vokal paduan suara Kel. Pkc (40orgx2hr)	40 org						
							Sosialisasi dan penegakan jam belajar masyarakat (70orgx1keg)	70 org						
							Pembinaan kelurahan siaga (40 orgx1keg)	40 org						
							Pelatihan hantaran pengantin (40 orgx1keg)	40 org						
							Pelatihan Bergodo Pakuncen Budaya (40orgx2hr)	40 org						
							Gebyar PAUD (200orgx1)	200 org						
							Gebyar Lansia (200 orgx1keg)	200 org						
							Pelatihan Instruktur senam (40orgx1hr)	40 org						
							Pelatihan Pengolahan makanan bahan jamur (40orgx1hr)	40 org						
							Pelatihan busana hijab (40orgx1hr)	40 org						

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pentas Seni HUT Kota	1 kali						
							PKK	1 kel						
							Rapat koord Raskin	80 org						
							Rapat koord Kesenian	120 org						
							Rapat IK-PSM	100 org						
							Rapat Bimbingan Sosial PSM	100 org						
							Rapat koord. Dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	150 org						
							Rapat koordinasi Lansia	160 org						
							Rapat koordinasi jagawarga	120 org						
							Rapat koordinasi kelompok kesenian	120 org						
							Pawai Budaya	75 org						
							Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)	34 RW						
							Operasional Kelurahan Siaga	50 org						
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Wirobrajan						TKPK	15 orang	Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Wirobrajan	100%	272.178.500	272.178.500		Kec. WB
							Pelatihan manajemen Wirausaha (30orgx1hr)	30 orang						
							Pelatihan MC Bahasa Indonesia (30orgx4hr)	30 orang						
							Sosialisasi jam belajar Masyarakat (70orgx1keg)	70 orang						
							Pembinaan kader Posyandu (36orgx1keg)	36 orang						
							Pembinaan BKL dan BKR (40orgx1keg)	40 orang						
							Sosialisasi kesehatan lingkungan (40orgx1keg)	40 orang						
							Pelatihan tanggap bencana (30orgx1hr)	30 orang						
							Pembinaan Gerakan Kampung Panca Panca Tertib (40orgx1keg)	40 orang						
							Pembinaan kampung ramah anak RW. 03 dan RW.11 (30orgx1keg)	30 orang						
							Pembinaan pedagang kaki lima (30orgx1hr)	30 orang						
							Pembinaan ketahanan pangan perkotaan (30orgx1keg)	30 orang						
							Pembinaan wawasan kebangsaan (60orgx1keg)	60 orang						

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
							Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS (40orgx1keg)	40 orang											
							Pembinaan Seni Budaya Jawa (40 orgx1keg)	40 orang											
							Pelatihan Administrasi SIM PKK (40 org x 2 hr)	40 orang											
							Gebyar PAUD kelurahan (200orgx1keg)	200 orang											
							Pentas Seni HUT Kota	725 orang											
							Pembinaan Karang Taruna	30 orang											
							PKK	12 RW 58 RT											
							Rapat kesenian	80 orang											
							Rapat Bimbingan IKPSM	50 orang											
							Rapat PSM	50 orang											
							Rapat Raskin	40 orang											
							Rapat Lansia	40 orang											
							Pawai Budaya	75 orang											
							Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)	34 RW											
							Operasional Kelurahan Siaga	50 orang											
4.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Patangpuluhan						TKPK	15 orang	Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kel. Patangpuluhan	100%	256.513.850	256.513.850		Kec. WB					
							Pelatihan membuat Bakso (30orgx1keg)	30 orang											
							Pelatihan sablon (30orgx1keg)	30 orang											
							Penyelenggaraan pasar sore pada setiap Ramadhan, HUT Kota dan akhir tahun (25orgx3keg)	25 orang											
							Pelatihan SDIDTK bagi kader Posyan	40 orang											
							Pembinaan kader posyandu balita (30 orngx1keg)	30 orang											
							Pelatihan penyusunan kurikulum PAUD berbasis Budaya (30orgx1keg)	65 orang											
							Pelatihan administrasi Dasa Wisma PKK RT, PKK RW (65 orgx1keg)	40 orang											
							Sosialisasi dan cara pengisian SIM PKK (40 orgx2hr)	40 orang											
							Sosialisasi ngadibusana Gagrak Jogja (30orgx1keg)	30 orang											

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg.	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan BSL bagi PSM kelurahan (30orgx1keg)	30 orang						
							Sosialisasi Hatinya PKK (30orgx1keg)	30 orang						
							Sosialisasi membuat menu B2SA (30orgx1keg)	30 orang						
							Sosialisasi warga Peduli AIDs (40orgx1keg)	40 orang						
							Pembinaan Administrasi UP2K (40orgx1keg)	40 orang						
							Workshop dan Pelatihan bagi Pendidik PAUD (30orgx1keg)	30 orang						
							Pembinaan anak usia dini dalam kegiatan parenting (40orgx1keg)	40 orang						
							Gebyar PAUD kelurahan (200orgx1keg)	200 orang						
							Sosialisasi jam belajar Masyarakat (70x1keg)	70 orang						
							Pentas Seni HUT Kota	725 orang						
							Pembinaan Karang Taruna	30 orang						
							PKK	10 RW 51 RT						
							Rapat Raskin	40 orang						
							Rapat Kesenian	40 orang						
							Rapat koordinasi Lansia	40 orang						
							Pawai Budaya	75 orang						
							Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)	10 RW						
							Operasional Kelurahan Siaga	50 orang						
	Jumlah										3.630.000.242	3.630.000.242		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mantrijeron

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
	Pemberdayaan Masyarakat													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					626.427.480	642.584.787		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Kec. Mantrijeron			Materai 6000 & 3000 yang tersedia	1060 lembar	Dukungan terhadap	100%	316.000.900	325.480.927	sedang berjalan	Kec. Mantrijeron
							Pembayaran telpon	12 bulan						
							Pembayaran listrik	12 bulan						
							Jasa Piket Harian	360 oh						
							Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 event						
							Pemeliharaan APAR	4 jenis						
							STNK roda 4, 2 & 3 yang terbayar	1 unit, 13 unit, 1 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 macam						
							pembayaran retribusi	3 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	6 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	33 jenis						
							Jasa penggandaan & penjilidan	106.000 lbr & 77 buah						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	10 macam						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	4 paket						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. Mantrijeron			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional	100%	87.850.580	87.850.580	sedang berjalan	Kec. Mantrijeron
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	40 dokumen ASN						
							Jasa Tenaga Bantuan	1 orang						
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Mantrijeron			Makan dan minum yang tersedia untuk: a. Koordinasi; b. Pegawai; c. Tamu; d. Harian umum	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%	222.576.000	229.253.280	sedang berjalan	Kec. Mantrijeron
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2 jenis laporan						
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					225.114.400	247.625.840		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kec. Mantrijeron			Jasa pemeliharaan rumah dinas	1 paket	sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	40.875.000	44.962.500	sedang berjalan	Kec. Mantrijeron
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kec. Mantrijeron			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	4 paket		100%	111.214.400	122.335.840	sedang berjalan	Kec. Mantrijeron
2.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Mantrijeron			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional: a.roda 4 (empat); b.roda 2 (dua); c. Roda 3 (tiga)	1 unit, 13 unit, 1 unit		100%	73.025.000	80.327.500	sedang berjalan	Kec. Mantrijeron

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					29.445.000	32.389.500		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kec. Mantrijeron		1	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	29.445.000	32.389.500	sedang berjalan	Kec. Mantrijeron
						2	Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron										2.488.261.725	2.737.087.898		
	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron			Kec. Mantrijeron			Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/ RW	55 RW						
							Koordinasi Pemerintahan	1 Dokumen						
							Kegiatan Forum Pemerintahan Umum Kecamatan Mantrijeron	12 bulan						
							Pembinaan PK5	40 orang						
							PAM hari raya dan Insidentil	5 hari raya						
							Pembinaan Penyakit Masyarakat	4 sub keg						
							Peningkatan kapasitas KTB	30 org						

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
							Pembinaan Pondokan	24 kali					
4.2	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron						Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen		100%	144.542.325	158.996.558	
							Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen					
							Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan	2 kali, 3 kelurahan					
							Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan	2 kali, 3 kelurahan					
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron						Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk	21 RW		100%	184.885.500	203.374.050	
							peningkatan kapasitas PKK	8 sub keg					
							pembinaan kepemudaan dan Kesenian	5 sub keg					
							kapasitas forum mocopat	125 org					
							evaluasi kelurahan	3 kel					
							Pengembangan PAUD	2 sub keg					
							Jam Belajar Masyarakat	3 kel					
4.3	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mantrijeron						TKPK	3 Kel		100%	192.406.500	211.647.150	
							kegiatan raskin	3 kel					
							Pelatihan peningkatan ketrampilan	30 org					
							Gelar UMKM	1 event					
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo						Penyuluhan Gizi Lansia	90 org		100%	360.740.600	396.814.660	
							Pelatihan Senam Sehat	100 orang					
							Penyul Kesehatan Reproduksi	50 org					
							Lomba Balita Sehat	150 org					
							Penyuluhan HIV/Aids&Narkoba	60 org					
							Sosialisasi Bebas Asap Rokok	70 org					
							Pembinaan Paguyuban Seni	50 org					
							Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan	50 org					
							Pembinaan Kader BKS	90 org					
							Pelatihan/Bimbingan Sosial Dasar PSM	30 org					

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Pelat Pemahaman Organisasi Kelembagaan	40 org				
							Administrasi PKK	18 RW & 86 RT PKK				
							Pembinaan Administrasi bagi Pengurus RW dan RT	110 org				
							Pelatihan Kader PAUD	52 org				
							Lomba Kolase Batik Anak	100 org				
							Penyuluhan Perlindungan Anak	60 org				
							Penyuluhan Perundang2an	110 org				
							Gelar Potensi Seni dan UMKM (Festival Kesenian)	350 org				
							Pelatihan Wayang Bocah	60 org				
							Pelatihan Pedalangan	20 org				
							Pelatihan Panembromo	60 org				
							Pelatihan Jathilan	30 org				
							Karnaval Pawai Budaya	1 kegiatan				
							Pelatihan Batik Jumput	40 orang				
							Pelatihan Membuat Kue Kering	40 orang				
							Pelatihan membuat Masakan Siomay,Bakso, Galantin	50 orang				
							Pelatihan Hantaran Manten	40 orang				
							Pelatihan Tanaman Organik	40 orang				
							Pelatihan rajut	40 orang				
							Pelatihan Olahan Aneka Kripik	60 orang				
							Pelatihan Daur Ulang Sampah	3 lingkungan				
							Pelatihan membuat kue tradisional	60 orang				
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan						Pelat Pengelolaan Data SIP Posyandu & SIM PKK	17 RW		100%	293.513.000	322.864.300
							Pembinaan PSM dalam penanganan PMKS	25 org.				
							Sosialisasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	40org.				
							Penyuluhan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak	40 org.				
							Lomba Bidang Kesehatan Antar RW	17 RW				
							Penyuluhan Pengurangan Resiko Penyakit Degeneratif	40 org				
							Pembinaan dan Monitoring Kelompok Siskamling (sambang kamling)	17 RW				
							Pelatihan Linmas Kel. SYD	50 org.				
							Gebyar Lansia	150 org.				
							Festival Kesenian Kelurahan	1 paket				
							Penyuluhan Estetika Berbusana	40 org.				
							Pembinaan Kader Lansia	40 org.				
							Pembinaan Kampung Ramah Anak	40 org.				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
							Pembinaan Group Kesenian	5 grup					
							Administrasi PKK	17 RW & 70 RT PKK					
							pelat penguatan kapasitas pamong paud	1 paket					
							pawai budaya	1 kegiatan					
							Pelatihan Batik	30 org					
							Pelatihan Packing dan Branding Produk Makanan	25 org.					
							Gelar Potensi Ekonomi Wilayah (SURYA EXPO 2017)	25 org.					
							Pelatihan memasak keaneka ragaman olahan ayam dan bebek	34 org.					
							Pelatihan Pembuatan Kue	10 org.					
							Pelatihan Budidaya Pertanian Terpadu	40 org.					
							Pelatihan Pertanian Hidroponik	35 org.					
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron						Festival 45 Kelurahan	2 Kelompok Kesenian	100%	288.975.000	317.872.500		
							Pembinaan Kesenian	2 Kelompok Kesenian					
							Senam Lansia	5 Kelompok Senam					
							Pembinaan PKK	6 Kegiatan					
							Pembinaan PSM	40 orang					
							Pelatihan MC dan berbusana Jawa	30 orang					
							Administrasi PKK	20 RW & 86 RT PKK					
							Karnaval pawai budaya	1 kegiatan					
							Pelatihan Hantaran	25 orang					
							Pelatihan Budidaya Tanaman Buah	25 orang					
							Pelatihan Potong Rambut	25 orang					
							Pelatihan Website	25 orang					
							Pelatihan Jumputan dan batik	25 orang					
							Pelatihan Tata Boga	25 orang					
							Pelatihan Pengelolaan Sampah	25 orang					
							Pelatihan Pijat Reflexi	25 orang					
4.8	Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kecamatan Mantrijeron						Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	1 paket	100%	814.462.800	895.909.080		
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	1 paket					
							Pemeliharaan Fasilitas Umum	1 paket					
							Pemeliharaan Makam Sarilaya	1 paket					
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	1 paket					

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan				
							Penyelenggaraan kegiatan pembangunan	1 keg					
						Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen						
						Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron	130 exp.						
						Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	3 kel						
						Pelatihan Kader Pembangunan	55 Kader						
						JUMLAH					3.369.248.605	3.659.688.025	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kraton

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target
	Pemberdayaan Masyarakat											3.501.906.750		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					831.336.600	831.336.600		
1,1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor									422.947.700	422.947.700	sedang berjalan	Kec. KT	
						Materai 6000 yang tersedia	505 buah	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
						Materai 3000 yang tersedia	1290 buah							
						Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis							
						Pembayaran Listrik	12 bulan							
						Sumber daya air yang tersedia	7000 m3							
						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 unit, 12 bulan							
						Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 orang 365 hari							
						STNK Roda 4 yang terbayar	1 unit							
						STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit							
						STNK Roda 2 yang terbayar	14 unit							
						Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan							
						Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 jenis							
Alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis													
Jasa Pencetakan dan Penggandaan	145.000 lbr													

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	42 btg, 3 jenis, 3 jenis, 8 jenis, 12 bulan							
							Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang tersedia	3 jenis, 12 bulan							
1,2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			KT			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akutansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	350.157.650	195.014.400	sedang berjalan	Kec. KT	
						Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	39 orang								
						Jasa Tenaga Bantuan	6 orang								
1,3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			KT			Makan dan minum yang tersedia	12 bulan	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	213.374.500	213.374.500	sedang berjalan	Kec. KT	
						a. Koordinasi b. Pegawai Laporan hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan, 10 org, 3 hr								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Terwujudnya Sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%					124.190.000	124.190.000			
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor			KT			Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan Kantor/tempat	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	44.500.000	8.000.000	sedang berjalan		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2,2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			KT			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	79.690.000	79.690.000	sedang berjalan	
						a. roda 4 (empat)	1 unit							
						b. roda 3 (tiga)	1 unit							
						c. roda 2 (dua)	13 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			KT							103.173.000	73.158.000		
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaa, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			KT			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	103.173.000	73.158.000	sedang berjalan	
							Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD					
							Karyawan dan karyawan yang terbina	48 orang	Dukungan terhadap peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		30.015.000	sedang berjalan	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton				Terwujudnya Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton						2.258.048.900	2.258.048.900		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban			KT							246.679.250	77.182.000		
							1. Evaluasi Kelurahan,	3 kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kelurahan,	100%				
							2. Pembinaan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat,	256 orang	Terlaksananya Pembinaan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat,	100%				
							3. Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat.	225 orang	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat.	100%				
							4. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Kec dan 3 kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	100%				
							5. Monitoring Kampung Hijau	10 kali	Terlaksananya Monitoring Kampung Hijau	100%				
							6. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	7 eksemplar	Terlaksananya Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	100%				
							7. Rakorpem	3 Kelurahan	Terlaksananya Rakorpem	100%				
							8. Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	50 orang	Terklaksananya Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	100%				
							9. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika)	10 orang, 11 bulan	Terlaksanannya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika)	100%				
							10. Pelayanan Masyarakat (Sekaten)	45 kegiatan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat (Sekaten)	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							11. Pembinaan Anggota Satlinmas	65 orang	Terlaksananya Pembinaan Anggota Satlinmas	100%				
							12. Pengamanan Umum;	4 kali	Terlaksananya Pengamanan Umum;	100%				
							13. Sambang Kampung	6 kali	Terlaksananya Sambang Kampung	100%				
							14. Pendataan Izin Pondokan	6 kali	Data Izin Pondokan	100%				
							15. Pendataan Izin HO	6 kali	Data Izin HO	100%				
							16. Operasi Ketertiban	96 kali	Terlaksananya Operasi Ketertiban	100%				
							17. Operasi Vandal	24 kali	Terlaksananya Operasi Vandal	100%				
							18. Operasi Gabungan	9 kali	Terlaksananya Operasi Gabungan	100%				
							19. PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	PAM 61 kali	Terlaksananya PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	100%				
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan			KT							179.377.300	179.377.300		
							1. Verifikasi dan distribusi E-KTP	Kecamatan dan 3 Kelurahan	Terlaksananya Verifikasi dan distribusi E-KTP	100%				
							2. Pembinaan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame	Kecamatan dan 3 Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame	100%				
							3. Verifikasi dan Penerbitan IMB,	Kecamatan dan 3 Kelurahan	Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan IMB,	100%				
							4. Verifikasi dan Penerbitan HO	Kecamatan dan 3 Kelurahan	Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan HO	100%				
							5. Verifikasi dan Penerbitan Ijin Pondokan	Kecamatan dan 3 Kelurahan	Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan Ijin Pondokan	100%				
							6. Penetapan	4 kali	Terlaksananya Penetapan	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							7.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4 org, 11 bulan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%				
4,3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton			KT							69.577.250	69.577.250		
							1. Distribusi Raskin	Kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya Distribusi Raskin	100%				
							2. Gelar Potensi Ekonomi Wilayah	Kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya Gelar Potensi Ekonomi Wilayah	100%				
							3. Pembinaan UMKM Kewilayahan	Kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya Pembinaan UMKM Kewilayahan	100%				
							4. Pembinaan dan koordinasi raskin	10 kali	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi raskin	100%				
							5.Pertemuan Pokja 3 Kec dan Kel	25 orang	Terlaksananya Pertemuan Pokja 3 Kec dan Kel	100%				
							6. Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta	75 orang	Terlaksananya Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta	100%				
							7. Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA	6 kelompok	Terlaksananya Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA	100%				
							8. Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri	30 orang	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri	100%				
4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton										465.582.500	465.582.500		
							1. TKPK Kecamatan Kraton	8 kali	TKPK Kecamatan Kraton	100%				
							2. Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton;	Kecamatan dan 3 Kelurahan;	Terlaksananya Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton;	100%				
							3. Pembinaan Pendidikan Politik	Kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Politik	100%				
							4. Pembinaan Kecamatan Sehat	50 orang	Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Sehat	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							5. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian	Kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian	100%				
							6. Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton;	Kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton;	100%				
							7. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian (Festival Kelurahan)	Kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian (Festival Kelurahan)	100%				
							8. Senam dan Kerja Bakti Massal	300 orang	Terlaksananya Senam dan Kerja Bakti Massal	100%				
							9. Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan	60 orang	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan	100%				
							10. Pembinaan Kethoprak	60 orang	Terlaksananya Pembinaan Kethoprak	100%				
							11. Pembinaan Keluarga Harapan	60 orang	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Harapan	100%				
							12. Pembinaan dan Penyegaran Data PKK	550 orang	Terlaksananya Pembinaan dan Penyegaran Data PKK	100%				
							13 Studi Wawasan Anggota TP PKK Kec	30 orang	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Anggota TP PKK Kec	100%				
							14. Pertemuan Pengurus TP PKK Kec	30 orang	Terlaksananya Pertemuan Pengurus TP PKK Kec	100%				
							15. Pembinaan Kader MK	60 orang	Terlaksananya Pembinaan Penguatan Kader MK	100%				
							16. Pembinaan Kader Lansia	60 orang	Terlaksananya Pembinaan Penguatan Kader Lansia	100%				
							17. Senam Lansia	100 orang	Terlaksananya Senam Lansia	100%				
							18. Pertemuan POKJA I Kec dan Kel	12 kali	Teralaksananya Pertemuan POKJA I Kec dan Kel	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							19. Studi Wawasan	100 orang	Terlaksananya Studi Pengembangan Wawasan	100%				
							20. Rakordasi/Pertemuan Pokja II se Kec. Kraton	30 orang	Terlaksananya Rakordasi/Pertemuan Pokja II se Kec. Kraton	100%				
							21. Gebyar PAUD	5 kali	Terlaksananya Gebyar PAUD	100%				
							22.Pembinaan & Rakordasi PAUD	30 orang	Terlaksananya Pembinaan & Rakordasi PAUD	100%				
							23. Pembinaan PHBS	40 orang	Terlaksananya Pembinaan PHBS	100%				
							24. Pembinaan LBS	40 orang	Terlaksananya Pembinaan LBS	100%				
							25 Pembinaan Posyandu	40 orang	Terlaksananya Pembinaan Posyandu	100%				
							26. Lomba KKG dari PKK Kota ke Kecamatan	150 orang	Terlaksananya Lomba KKG dari PKK Kota ke Kecamatan	100%				
							27. Lomba Bayi Sehat (LBSI)	150 orang	Terlaksananya Lomba Bayi Sehat (LBSI)	100%				
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan										202.610.000	202.610.000		
							1. Pelatihan Tritik Jumputan	40 org	Terlaksananya Pelatihan Tritik Jumputan	100%				
							2. Pelatihan Pemandu Wisata	50 org	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata	100%				
							3. Pelatihan Pemanfaatan Sampah Organik	40 org	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Sampah Organik	100%				
							4. PelatihanKader ttg KDRT & Kekerasan pd Anak	25 org	Terlaksananya PelatihanKader ttg KDRT & Kekerasan pd Anak	100%				
							5. Sosialisasi GSI	50 org	Terlaksananya Sosialisasi GSI	100%				
							6. Pelatihan Keserasian Busana & Makeup	40 org	Terlaksananya Pelatihan Keserasian Busana & Makeup	100%				
							7. Pelatihan Kader PAUD	50 org	Terlaksananya Pelatihan Kader PAUD	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan						Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
							8. Pelatihan Pembuatan Proposal & Laporan Tahunan PKK	50 org	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Proposal & Laporan Tahunan PKK	100%				
							9. Pelatihan KP Ibu & 1000 hari pertama Kehidupan pada Balita	30 org	Terlaksananya Pelatihan KP Ibu & 1000 hari pertama Kehidupan pada Balita	100%				
							10. Pelatihan SIP Mendagri	20 org	Terlaksananya Pelatihan SIP Mendagri	100%				
							11. Pelatihan Administrasi PHBS & LBS	30 org	Terlaksananya Pelatihan Administrasi PHBS & LBS	100%				
							12. Sosialisasi B2SA	30 org	Terlaksananya Sosialisasi B2SA	100%				
							13. Sosialisasi Paugeran Jeron Bateng	60 org	Terlaksananya Sosialisasi Paugeran Jeron Bateng	100%				
							14. Sarasehan Kebudayaan	30 org	Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan	100%				
							15. Sosialisasi Pedagang sekitar obyek Wisata	30 org	TerlaksananyaSosialisasi Pedagang sekitar obyek Wisata	100%				
							16. Sosialisasi Sejarah Tamansari	40 org	Terlaksananya Sosialisasi Sejarah Tamansari	100%				
							17, Gelar Budaya	50 org	Terlaksananya Gelar Budaya	100%				
							18. Sarasehan Sadar Wisata	30 org	Terlaksananya Sarasehan Sadar Wisata	100%				
							19. Pengembangan Wawasan LPMK,RT,RW,Lembaga	100 org	Terlaksananya Pengembangan Wawasan LPMK,RT,RW,Lembaga	100%				
							20. Kordinasi Komisi Lansia	30 org	Terlaksananya Kordinasi Komisi Lansia	100%				
							21. Sarasehan Lansia	100 org	Terlaksananya Sarasehan Lansia	100%				
							22. Refreshing Pengurus Komisi Lansia	50 org	Terlaksananya Refreshing Pengurus Komisi Lansia	100%				
							23. Kordinasi Kesi	30 org	Terlaksananya Kordinasi Kesi	100%				
							24. Sosialisasi Pos Bindu	40 org	Terlaksananya Sosialisasi Pos Bindu	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan						Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
							25. Refreshing bagi Pengurus TP PKK+Kelompok PKK RW	50 org	Terlaksananya Refreshing bagi Pengurus TP PKK+Kelompok PKK RW	100%				
							26. Sosialisasi Kaderkes+Tomas dlm Pembangunan Kesi	40 org	Terlaksananya Sosialisasi Kaderkes+Tomas dlm Pembangunan Kesi	100%				
							27. Kordinasi Paguyuban PAUD	30 org	Terlaksananya Kordinasi Paguyuban PAUD	100%				
							28. Pelatihan Origami bg Guru PAUD	30 org	Terlaksananya Pelatihan Origami bg Guru PAUD	100%				
							29. Kordinasi Mitra Keluarga	30 org	Terlaksananya Kordinasi Mitra Keluarga	100%				
							30. Kordinasi Karang Taruna	30 org	Terlaksananya Kordinasi Karang Taruna	100%				
							31. Kordinasi TKPK	30 org	Terlaksananya Kordinasi TKPK	100%				
							32. Administrasi PKK RT/RW	Kader PKK	Terlaksananya Administrasi PKK RT/RW	100%				
							33. Pawai Budaya	Masyarakat	Terlaksananya Pawai Budaya	100%				
							34. Operasional JBM	10 RW	Terlaksananya Operasional JBM	100%				
							35. Kelurahan Siaga	Masyarakat	Kelurahan Siaga	100%				
5.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan										290.572.000	290.572.000		
							1. Pelatihan Rajut	40 org	Terlaksananya Pelatihan Rajut	100%				
							2. Pelatihan MC	25 org	Terlaksananya Pelatihan MC	100%				
							3. Penyuluhan Petugas Pos Bindu	50 org	Terlaksananya Penyuluhan Petugas Pos Bindu	100%				
							4. Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil	25 org	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil	100%				
							5. Studi Wawasan TP PKK	70 org	Terlaksananya Studi Wawasan TP PKK	100%				
							6. Studi Wawasan UP2K	50 org	Terlaksananya Studi Wawasan UP2K	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							7. Studi Wawasan Gapoktan	50 org	Terlaksananya Studi Wawasan Gapoktan	100%				
							8. Studi Wawasan Lansia	60 org	Terlaksananya Studi Wawasan Lansia	100%				
							9. Sos. Raport Keluarga	50 org	Terlaksananya Sos. Raport Keluarga	100%				
							10. Sos. Data KMS	50 org	Terlaksananya Sos. Data KMS	100%				
							11. Ev. Data Kemiskinan	50 org	Terlaksananya Ev. Data Kemiskinan	100%				
							12. Studi Kelemb.PSM	25 org	Terlaksananya Studi Kelemb.PSM	100%				
							13. Penguatan Kelemb.Surveyor	40 org	Terlaksananya Penguatan Kelemb.Surveyor	100%				
							14. Pemb.Adm. Pengurus PAUD	40 org	Terlaksananya Pemb.Adm. Pengurus PAUD	100%				
							15. Pemb.Adm. Pengurus Pos Yandu	40 org	Terlaksananya Pemb.Adm. Pengurus Pos Yandu	100%				
							16. Sosialisasi Parenting	40 org	Terlaksananya Sosialisasi Parenting	100%				
							17. Peny. Toponomi Kamp. Jeron Beteng	30 org	Terlaksananya Peny. Toponomi Kamp. Jeron Beteng	100%				
							18. Sarasehan Budaya tnt Lingk. Jeron Beteng	100 org	Terlaksananya Sarasehan Budaya tnt Lingk. Jeron Beteng	100%				
							19. Pembinaan & Pengembangan	200 org	Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan	100%				
							20. Sos. Prodok Makanan Asal Hewan	120 org	Terlaksananya Sos. Prodok Makanan Asal Hewan	100%				
							21. Pembinaan Bela Negara	50 org	Terlaksananya Pembinaan Bela Negara	100%				
							22. Pelatihan Aneka Olahraga dari Pisang	30 org	TerlaksananyaPelatihan Aneka Olahraga dari Pisang	100%				
							23. Administrasi PKK RT/RW	Kader PKK	Data Administrasi PKK RT/RW	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							24. Pawai Budaya	Masyarakat	Terlaksananya Pawai Budaya	100%				
							25. Operasional JBM	18 RW	Terlaksananya Operasional JBM	100%				
							26. Kelurahan Siaga	Masyarakat	Kelurahan Siaga	100%				
5.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten										281.933.000	281.933.000		
							1. Bazar Potensi Wilayah Bidang Ekonomi	Warga Masyarakat	Terlaksananya Bazar Potensi Wilayah Bidang Ekonomi	100%				
							2. Pelatihan Sanggul & Hijab	Warga Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Sanggul & Hijab	100%				
							3. Pelatiha SPA	Warga Masyarakat	Terlaksananya Pelatiha SPA	100%				
							4. Pelatihan Baby Care	Warga Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Baby Care	100%				
							5. Pelatihan Memasak Gudeg	Warga Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Memasak Gudeg	100%				
							6. Pelatihan Hidroponik/Aquaponik/Tabulampot	Warga Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Hidroponik/Aquaponik/Tabulampot	100%				
							7. Kursus Penanganan Permasalahan Sosial	PSM	Terlaksananya Kursus Penanganan Permasalahan Sosial	100%				
							8. Penyegaran Survaylans RT	Survaylans RT	Terlaksananya Penyegaran Survaylans RT	100%				
							9. Kursus ESQ	Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya Kursus ESQ	100%				
							10. Pelatihan SIM PKK, Dasa Wisma	Ketua Dasa Wisma	Terlaksananya Pelatihan SIM PKK, Dasa Wisma	100%				
							11. Penyegaran Kader Lansia	Kader Lansia RT	Terlaksananya Penyegaran Kader Lansia	100%				
							12. Gebyar Potensi Budaya	Warga Masyarakat	Terlaksananya Gebyar Potensi Budaya	100%				
							13. Kursus Panatacara	Warga Masyarakat	Terlaksananya Kursus Panatacara	100%				
							14. Kursus Karawitan	Warga Masyarakat	Terlaksananya Kursus Karawitan	100%				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							15. Pengadaan Koesum Bergada Kampung Wisata	Warga Masyarakat	Terlaksananya Pengadaan Koesum Bergada Kampung Wisata	100%					
							16. Pembinaan Administrasi Pos Yandu	Kader Yandu	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pos Yandu	100%					
							17. Sosialisasi dan Sarasehan Budaya	Warga Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi dan Sarasehan Budaya	100%					
							18. Administrasi PKK RT/RW	Kader PKK	Data Administrasi PKK RT/RW	100%					
							19. Pawai Budaya	Masyarakat	Terlaksananya Pawai Budaya	100%					
							20. Operasional JBM	15 RW	Terlaksananya Operasional JBM	100%					
							21. Kelurahan Siaga	Masyarakat	Kelurahan Siaga	100%					
5.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton										521.717.600	521.717.600			
							1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan,	15 kal	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan,	100%					
							2. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	7 eksemplar	Data Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	100%					
							3. Penyusunan Profil Kelurahan	4 buku;	Data Profil Kelurahan	100%					
							4. Pemeliharaan Jalan Lingkungan	70 m	Terpeliharanya Jalan Lingkungan	100%					
							5. Pemeliharaan Jalan Lingkungan	60 m	Terpeliharanya Jalan Lingkungan	100%					
							6. Pemeliharaan Jalan Conblok	135 m	Terpeliharanya Jalan Conblok	100%					
							7.Pemeliharaan Paving Blok	190 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							8.Pemeliharaan Paving Blok	120 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							9.Pemeliharaan Paving Blok	75 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							10.Pemeliharaan Paving Blok	250 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							11.Pemeliharaan Paving Blok	150 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							12.Pemeliharaan Paving Blok	180 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							13.Pemeliharaan Paving Blok	208 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							14.Pemeliharaan Paving Blok	119 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							15.Pemeliharaan Paving Blok	134 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							16.Pemeliharaan Paving Blok	70 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							17.Pemeliharaan Paving Blok	100 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							18.Pemeliharaan Paving Blok	60 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							19.Pemeliharaan Paving Blok	150 m2	Terpeliharanya Paving Blok	100%					
							Normalisasi SAH	600 m	Normalisasi SAH	100%					
							Perbaikan Penutup SAH	100 m	Perbaikan Penutup SAH	100%					
							Perbaikan SAH Nagan Kidul & Nagan Tengah	250 m	Perbaikan SAH Nagan Kidul & Nagan Tengah	100%					
							Perbaikan SAH Nagan Kulon & Nagan Lor	500 m	Perbaikan SAH Nagan Kulon & Nagan Lor	100%					
							Papan Nama/Toponim Lokasi Obyek Wisata	6 unit	Papan Nama/Toponim Lokasi Obyek Wisata	100%					
							Papan Penunjuk arah Obyek Wisata Budaya	10 unit	Papan Penunjuk arah Obyek Wisata Budaya	100%					
							Water Torn	3 unit	Water Torn	100%					
							Kelurahan Patehan ( 20 titik)	20 titik	Kelurahan Patehan ( 20 titik)	100%					
							Survey (2 or x 20 titik)	40 oh	Survey (2 or x 20 titik)	100%					
							Kelurahan Panembahan (85 titik)	85 titik	Kelurahan Panembahan (85 titik)	100%					
							Survey (2 or x 85 titik)	170 oh	Survey (2 or x 85 titik)	100%					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Kelurahan Kadipaten (27 titik)	27 titik	Kelurahan Kadipaten (27 titik)	100%				
							Survey (2 or x 27 titik)	54 oh	Survey (2 or x 27 titik)	100%				
JUMLAH TOTAL											3.607.317.750	3.607.317.750		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017 Kota Yogyakarta														
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Gondomanan														
No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
	Pemberdayaan Masyarakat													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					662.958.831,04	729.254.714		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			GONDOMANAN			Materai 6000 yang tersedia	500 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	380.585.400	392.002.962		
							Materai 3000 yang tersedia	750 buah						
							Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 rekening listrik						
								1 rekening air kel.						
								4 rekening telp						
							Terlaksananya pengamanan kantor dan sewa peralatan	12 bulan						
							Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan						
							Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	roda 4 ,1 unit						
								roda 2, 11 unit						
								roda 3, 1 unit						
							Retribusi kebersihan	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	1 paket 12 bulan						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis						
							Jasa percetakan	1 jenis						
							Jasa Penggandaan	132.000 lembar						
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 paket													
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit													
Peralatan rumah tangga	23 jenis													

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			GONDOMANAN			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	93.955.431	93.955.431		
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	28 ASN			2.400.000			
							Jasa Tenaga Bantuan	2 orang			40.855.431,04			
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			GONDOMANAN			Makan dan minum yang tersedia untuk	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	188.418.000	194.070.540		
							a.pegawai	35 orang						
							b.koordinasi	14 jenis rapat						
							c. Tamu							
							d. Harian umum untuk pelayanan	14 jenis rapat						
							Frekuensi Koordinasi (pemantauan pengamanan)	19 kali						
							Frekuensi perjalanan dinas	3 laporan						
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					240.674.000	264.741.400		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			GONDOMANAN			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	168.220.000	90.046.000		

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			GONDOMANAN			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	72.454.000	127.494.400		
							a.roda 4 (empat),	1 unit						
							b.roda 2 (dua)	11 unit						
							c. Roda 3	1 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					40.350.000	44.385.000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			GONDOMANAN			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	24.215.000	55.000.000		
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	37 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	16.135.000			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan				Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	100%					1.739.542.354			
4,1	Peyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah								87.819.929,12	96.601.922,03		
							PATEN (Tenaga Teknis, BBM Genset, Jemput Bola KIA,	11 bulan	Terselenggaranya PATEN	100%				
							Penyusunan SOP	4 bulan	Tersusunya SOP Kecamatan	100%				
							Penyusunan Buletin	320 eks	Buletin Gondoarum	100%				
							Sosialisasi Perundangan	2 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Perundangan	100%				
							Jemput Bola KIA	4 bulan	Terselenggaranya Jemput Bola KIA	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
4,2	Peyelenggaraan Pemertintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	GONDOMANAN							342.198.000,00	376.417.800		
							Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	50 Orang	Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100%				
							Pembinaan Kelembagaan	50 orang	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	100%				
							Monografi Kelurahan		Buku Monografi Kelurahan	100%				
							10 buku							
							Evlauasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 kelurahan	Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan	100%				
							Pembinaan Parkir	20 orang	Pengelolaan Parkir yang Baik	100%				
							Pemantauan Wilayah se Kecamatan Gondomanan	2 kelurahan	Terpantaunya Wilayah Kec. Gondomanan	100%				
							Jogobaran		Terciptanya kondisi lebaran yang tertib dan aman	100%				
							1 kec							
							Pengamanan Hari Besar dan Insidentil	12 bulan	Penyelenggaraan Kegiatan hari besar yang aman	100%				
							Piket Siaga Bencana	15 orang	Terantisipasiya Bencana	100%				
							Pembinaan Satuan Linmas	65 orang	Terbinanya Satlinmas Kecamatan	100%				
							Pengamanan Umum	2o kali	Terciptanya Keamanan wilayah Kec. GM	100%				
Sambang Kampung	6 kali	Terpantaunya keamanan kampung	100%											

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan						Hasil Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
							Operasi Ketertiban	80 kali	Terpantaunya pelaksanaan perda	100%				
							Operasi Vandal	12 kali	Terwujudnya kebersihan dinding	100%				
4,3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Kinerja Aparatur dan	Akuntabilitas kinerja	GONDOMANAN GONDOMANAN			Muda Kreatif 0,0 Gondomanan	70 orang	Terselenggaranya bazar	100%	58.970.000,00	64.867.000		
							Pelatihan batik kaos	30 orang	Terselenggaranya pelatihan	100%				
							Pelatihan membuat kripik jamur bagi penerima PKH	22 orang	Terselenggaranya pelatihan	100%				
							Pengamanan Hari Besar dan Insidentil	12 bulan	Penyelenggaraan Kegiatan hari besar yang	100%				
							Pembinaan PKL	50 PKL	Pembinaan dan Penertiban PKL	100%				
							Pembinaan Satuan Linmas	65 orang	Terbinanya Satlinmas Kecamatan	100%				
							Pembinaan UMKM	50 orang	Terselenggaranya Pembinaan UMKM	100%				
							4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan			GONDOMANAN			Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga
Sapaan Anak Kos	6 bulan	Anak Kos yang tertib	100%											
Pendistribusian Beras Sejahtera	15 kali	Terdistribusinya Raskin ke RTS	100%											
TKPK	10 bulan	Terkoordinasinya TKPK	100%											
Pembinaan GOPTKI	6 TK	Terbinanya Kegiatan TK	100%											
Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	250 orang	Terbinanya kerukunan antar umat beragama	100%											
Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	1 kali	Terselenggaranya KKG PKK	100%											
Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	1 kali	preventif tentang kekerasan dalam rumah	100%											
Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	Termonitornya Kegiatan Pemberdayaan	100%											
Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan	60 orang	lansia yang sehat	100%											
Gebyar PAUD	24 SPS	pemenang lomba paud	100%											
Administrasi PKK	6 kali	Terfasilitasinya Administrasi PKK	100%											
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan			GONDOMANAN										TKPK Kelurahan
							Pembinaan PKK	4 keg	Terlaksananya sosialisasi SIM PKK, Penyuluhan HATInya PKK dan KIA	100%				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 347

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Pendampingan forum anak kelurahan	40 orang	Terselenggaranya pendampingan forum anak kelurahan	100%				
							Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga Kelurahan	70 orang	Terselengganya Pembinaan seni budaya dan olahraga	100%				
							Administrasi PKK	1 kel	Terfasilitasinya administrasi PKK	100%				
							Pembinaan Wawasan Kepemudaan	2 kali	Terselenggaranya pembinaan wawasan kepemudaan	100%				
							Gerakan bersih lingkungan menuju kampung sehat	4 kampung	Terselenggaranya gerakan bersih lingkungan	100%				
							Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	86 orang	Terlaksananya Pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%				
							Pentas Budaya Kelurahan	250 orang	Terlaksananya pentas budaya kelurahan	100%				
							Gebyar Potensi Generasi Muda Kelurahan Ngupasan	100 orang	Terlaksananya gebyar potensi generasi muda kelurahan	100%				
							Pawai Budaya Kelurahan	1 kali	Terselenggaranya pawai budaya kelurahan	100%				
							Jam Belajar Masyarakat	13 RW	Terselenggaranya JBM	100%				
							Pembinaan Kelurahan Siaga	50 orang	Terselenggaranya Pembinaan Kelurahan Siaga	100%				
							Pelatihan membuat makanan dan kue cina	20 orang	Terselenggaranya Pelatihan membuata kue cina	100%				
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan			GONDOMANAN			Pelatihan Dekorasi Janur	30 orang	Terselenggaranya Pelatihan Dekorasi Janur	100%	303.645.250			
							Peningkatan Kapasitas Toga, Tomas tentang KB Pria	85 orang	Terselenggaranya sarasehan tentang KB Pria bagi Toga dan	100%				
							Evaluasi SPS Paud	16 SPS	Terselenggaranya evaluasi SPS PAUD	100%				
							Pelatihan Membuat Mainan Anak	36 orang	Terselenggaranya Pelatihan Membuat Mainan Anak	100%				
							Pelatihan Tari Aruming Prawiro	45 orang	Terselenggaranya Pelatihan Tari Aruming Prawiro	100%				

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					Penanggung Jawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Administrasi PKK Kelurahan	18 RW 61 RT	Tertatanya Administrasi PKK kel, RW dan RT	100%				
							JBM	18 RW	Terselenggaranya JBM	100%				
							Pembinaan Kelurahan Siaga	1 keg	Terciptanya Kesi	100%				
							Pawai Budaya Kelurahan	1 keg	Terlaksananya Pawai Budaya Keluarahan	100%				
							TKPK Kelurahan	18 RW	Data Kewilayahan TKPK yang Uptodate	100%				
							Pembinaan Kelembagaan RT RW	61 RT 18 RW	Bertambahnya wawasan tentang Kelmbagaan RT RW	100%				
							Pembinaan Karanag Taruna	1 keg	Peningkatan Peran Karang Taruna dalam pembangunan	100%				
							Evaluasi Adm PKK RW	18 RW	Terlaksananya evaluasi adm PKK RW	100%				
							Pentas Budaya Kelurahan (PAF #7) Prawirodirjan Arts Festival ke-7 Tahun 2017	61/18 RT/RW	Terfasilitasinya Kegiatan Budaya Kelurahan	100%				
							Pelatihan Batik Jumputan	20 orang	Terlaksananya Pelatihan Batik Jumputan	100%				
							Pelatihan Membuat Lampion	30 orang	Terlaksananya Pelatihan Membuat Lampion	100%				
							Gerhana Sehat	1 keg	Terlakanaya gerakan sederhana untuk kesehatan	100%				
							Pelatihan Membuat Kue Tradisional	32 orang	Terlaksananya Pelatihan Membuat Kue Tradisional	100%				
							Pelatihan Batik Tulis Lanjutan	10 orang	Terlaksanya Pelatihan Batik Tulis Lanjutan	100%				
4,7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	Kinerja Aparatur dan	Akuntabilitas kinerja	GONDOMA NAN	Terwujudnya Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	100%	Pembangunan fisik	4 Bulan	Pembangunan Wilayah yg terlaksana dg baik	443.862.175,00	488.248.393			
							Musrenbang	3Bulan	Terselenggaranya Musrenbang					
							Informasi Program Pembangunan	6 Bulan	Tersusunnya buku inmen					

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan		Penanggung Jawab
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				Tolak Ukur	Target	
							Profil Kelurahan	3 Bulan	Tersusunnya Buku Profil Kel					
							Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan	2 Kel	Terlaksananya Evaluasi Pembangunan dan lingkungan	100%				
							Monev Pembangunan Fisik	9 Bulan	Termonitornya Pembangunan dan lingkungan Wilayah	100%				
							Perbaikan Konblok se Kel. Ngupasan	1 Paket	Jl Konblok yg baik se Kel Ngupasan	100%				
							Perbaikan Konblok se Kel. Prawirodirjan	1 Paket	Jl Konblok yg baik se Kel Prawirodirjan	100%				
							Pemeliharaan Sarpras, Fasum se Kec Gondomanan	1 Paket	Terpeliharaanya Fasum se Kec. Gondomanan	100%				
							Pemeliharaan SAH se Kec. Gondomanan	1 Paket	Terpeliharanya SAH se Kec. Gondomanan	100%				
							Konsultan Perencana Pembangunan Fisik	1 Paket	Jasa Konsultan Perencana Pemb Fisik	100%				
							Pemeliharaan Lampu	22 Titik	Terpeliharanyan PJU se Kec. Gondomanan	100%				
JUMLAH TOTAL									2.683.525.185,16					

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mergangsan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					611.826.639	673.009.303		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			MG			Meterai 6000 yang tersedia	120 buah	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	297.703.000	327.473.300	sedang berjalan	Kec. Mergangsan
							Meterai 3000 yang tersedia	370 buah						
							pembayaran rekening listrik	4 rek listrik						
							pembayaran rekening air	1 air						
							pembayaran rekening telpon	4 telpon						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 kali						
							STNK roda 4 yang terbayar	1 unit						
							STNK roda 3 yang terbayar	2 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	13 unit						
							Bahan dan Alat kebersihan tersedia	3 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis						
							Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer	3 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jasa pencetakan	1 jenis				-		
							Jasa penggandaan	66.388 lbr				-		
							Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis				-		
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	17 jenis				-		
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis				-		
							Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari)	4 kali				-		
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			MG			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		100%	110.144.639	121.159.103	sedang berjalan	Kec. Mergangsan
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	36 ASN						
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			MG			Jasa tenaga bantuan	3 orang		100%	203.979.000	224.376.900	sedang berjalan	Kec. Mergangsan
							Makan dan minum yang tersedia untuk:							
							a. Koordinasi	70 kali						
							b. Pegawai	52 orang						
							c. Tamu	440 org						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 laporan						
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					307.413.500	338.154.850		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab																																																										
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan																																																															
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																																																														
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor			MG			Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	241.038.500	265.142.350	sedang berjalan	Kec. Mergangsan																																																										
							Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	3 jenis							2,2	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional			MG			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	66.375.000	73.012.500	sedang berjalan	Sekretariat	a. Roda 4	1 unit	b. Roda 3	2 unit								c. Roda 2	13 unit							3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					44.892.900	49.382.190			3,1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD			MG			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dok.
2,2	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional			MG			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	66.375.000	73.012.500	sedang berjalan	Sekretariat																																																										
							a. Roda 4	1 unit																																																																
							b. Roda 3	2 unit																																																																
							c. Roda 2	13 unit																																																																
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					44.892.900	49.382.190																																																												
3,1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD			MG			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dok.	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	44.892.900	49.382.190	sedang berjalan	Kec. Mergangsan																																																										
							2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan																																																																
							Pegawai yang telah mengikuti pelatihan / workshop/IHT	36 orang																																																																

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi serta Sosial Budaya	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik dan peningkatan kualitas sosial masyarakat		Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik dan meningkatnya swadaya masyarakat	100%					2.439.533.215	2.683.486.537		
4.1	Penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mergangsan			MG			1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan	8 buku	Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban	100%	144.035.750	158.439.325	sedang berjalan	Kec. Mergangsan
							2. Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW	278 org						
							3. Evaluasi Pembangunan Kelurahan	3 kel						
							4. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 kali						
							5. Operasi Ketertiban	48 kali						
							6. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar	14 hari						
							7. Pengamanan Umum	3 kali						
							8. Pembinaan Linmas	1 kali						
							9. Pembinaan PKL	1 kali						
							10. Operasi Vandal	20 kali						
							11. Sambang Kampung	6 kali						
							12. Pembinaan pengurangan risiko bencana	1 kali						
4,2	Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Mergangsan			MG			1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya penjangkaran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang pelayanan		82.920.965	91.213.062		Kec. Mergangsan
							2. Pengelolaan Retribusi:							
							a. TPU Sasanalaya	26.000.000						
							b. Retribusi IMB = 3 ijin	1.206.000						
							c. Retribusi HO = 54 ijin	10.152.000						
							3. Distribusi KTP-el	3 kel						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab						
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan											
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
4,3	Pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Mergangsan			MG			Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM	1	Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang perekonomian	100%	57.085.000	62.793.500		Kec. Mergangsan						
							Pelatihan ekonomi masyarakat tk kecamatan	3												
4,4	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan			MG			Pembinaan Administrasi dan penguatan kelembagaan PKK	2	Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang sosial budaya		322.425.000	354.667.500		Kec. Mergangsan						
							Distribusi Raskin	1												
							Pembinaan dan pengarahan ketugasan TKPK	1												
							Pengembangan wawasan pendidik PAUD	1												
							Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	1												
							Pembinaan pemuda, Olah raga dan kesenian	1												
							Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat	1												
							Penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan tk kecamatan	5												
							Penyuluhan/sosialisasi kepada masy tk kecamatan	3												
4,5	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman			MG			Pelatihan kelompok masyarakat	13		100%	426.551.000	469.206.100		Kel BR						
							Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	9												
							Gebyar Lansia	1												
							Gebyar PAUD dan pendidik PAUD	2												
							Pentas seni Kelurahan	2												
							Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	7												

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4,6	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan			MG			Pelatihan kelompok masyarakat	12		100%	460.210.000	506.231.000		Kel. WG
							sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat.	17						
							Gebyar PAUD	2						
							Pentas seni Kelurahan	2						
							Gebyar Lansia	1						
							Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	7						
4,7	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan			MG			Pelatihan kelompok masyarakat	14		100%	351.232.000	386.355.200		Kel. KP
							Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat	9						
							Gebyar PAUD dan monitoring PAUD	1						
							Pentas seni Kelurahan	1						
							Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	7						
							Gebyar Lansia	1						
4,8	Penyelenggaraan pembangunan wilayah Kecamatan Mergangsan			MG			1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	8 dok	Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat dalam jalan	100%	595.073.500	654.580.850		Kec. Mergangsan
							2. Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	70 buku						
						3. Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan	6 buku							
						4. Pemeliharaan Jalan	1 paket							
						5. Pemeliharaan PJU	1 paket							
						7. Pemeliharaan Makam	1 makam							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							8. Jasa Konsultansi perencanaan	1 dok						
							9. Jasa konsultan pengawas	1 dok						
JUMLAH TOTAL											3.403.666.254	3.744.032.879		

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017														
KOTA YOGYAKARTA														
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Umbulharjo														
NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pemberdayaan Masyarakat													
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1.855.491.307	2.041.040.438		
1,1	Penyediaaan Jasa , Peralatan, dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Materai 6000	370 lembar	Dukungan terhadap Kelancaran Adminstrasi Keuangan & Operasional Perkantoran	100%	1.116.133.250	1.227.746.575	sedang berjalan	Kec. UH
							materai 3000	2050 lembar						
							Pembayaran Telepon	12 Bulan						
							Pembayaran Air	12 Bulan						
							Pembayaran Listrik	12 Bulan						
							Piket Kantor	12 bulan						
							Kursi	1900 buah						
							Meja	215 buah						
							Tenda	24 buah						
							Sound System	7 buah						
							STNK Roda 4	1 unit						
							STNK Roda 2	22 unit						
							STNK Roda 3	4 unit						
							Retribusi kebersihan	12 bln						
							Bahan dan alat kebersihan	28 jenis						
							Pemeliharaan Peralatan kerja	12 bulan						
							Alat Tulis Kantor	93 macam						
							barang cetakan	3250						
							Penggandaan	345421 lembar						
							Jilid	238 bendel						
							Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	16 macam, 12 bulan						

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Jasa Penyediaan & Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan							
							Surat Kabar	12 bln							
							Buku Bacaan	8 paket							
							Jasa Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	12 Bulan							
							Jasa Pemeliharaan Taman	12 Bulan							
1,2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. UH		100%	Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntansi	4 Jenis Dokumen	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	246.254.057	270.879.463	Sedang Berjalan		
							Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Terkelola	71 dokumen							
							Jumlah Jasa Tenaga Bantuan	7 Orang, 14 Bulan							
1,3	Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi			Kec. UH		100%	Jumlah Penyediaan Makan & Minum :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional perkantoran	100%	493.104.000	542.414.400	sedang berjalan		
							a. Minum harian Pegawai	11 bln							
							b. Makan minum rapat	12 bln							
							c. Makan minum tamu	11 bln							
							d. Makan minum harian umum	11 bln							
							Jumlah Perjalanan Dinas :								
							Perjalanan Dinas dalam Daerah	12 bln							
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bln							
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Kinerja Aparatur dan birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					384.849.175	423.334.093			
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. UH	100%		Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang	100%	245.967.675	270.564.443	sedang Berjalan		
							Tenaga Teknis	12 Bulan							

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Kec. UH	100%		Bahan Banguna		mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				sedang Berjalan sedang berjalan	Kec. UH
			Kec. UH			Pemeliharaan Rumah Dinas	12 Bulan							
						Pemeliharaan Rutin/								
						Berkala Mebelair								
						Pemeliharaan	12 bln							
2,2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. UH			Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	138.881.500	152.769.650	sedang  berjalan	
							a. Roda 4	12 bulan						
							b. Roda 2	12 Bulan, 22 unit						
							c. Roda 3	12 Bulan , 4 unit						
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					130.936.250	144.029.875		
3,1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi SKPD			Kec. UH			1. Jumlah Dokumen Perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	4 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan menejemen pencapaian kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD	100%	130.936.250	144.029.875	sedang	Kec. UH
							2. Jumlah Dokumen Evaluasi; RKT dan LAKIP	2 dokumen						
							3. Jumlah Dokumen IKM, SPIP dan PMPRB ON LINE	2 dokumen						
							Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan & Pendidikan	70 orang					47.943.500	sedang berjalan
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Kec. UH	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dan Swadaya Murni	100%					5.198.201.540	5.718.021.694		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kec. UH					Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan fasilitasi pelayanan kecamatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	503.489.250	553.838.175	sedang berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Musrenbang Kecamatan & Kelurahan	8 dokumen	100%	sedang berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan	16 dok	100%						sedang berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Penguatan Kelembagaan RT & RW	340 RT	100%							sedang berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								87 RW	100%								sedang berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 kel	100%									sedang baru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Sinergitas Kelembagaan Kecamatan	200 orang	100%										sedang Berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda	12 bulan	100%											Sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Penataan dan Penertiban PKL	12 bulan	100%												sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Pembinaan PKL	400 orang	100%													sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Pembinaan LINMAS	4 kali/640 orang				100%	sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Pembinaan Pemilik Pondokan	200 orang				100%		sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Upacara bendera 17 Agustus	1 kali				100%			sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Sambang Kampung	14 kali				100%						sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Operasi Ketertiban	12 bulan				100%								sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Pembinaan Masyarakat oleh MUSPIKA	7 Kelurahan				100%									sedang berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Operasi Gepeng	12 bulan				100%										baru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Pengamanan Hari Besar Agama, Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana	12 bulan				100%											sedang berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Pembinaan KTB	40 orang				100%												baru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	50 orang				100%													baru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Sosialisasi Peraturan Kependudukan	435 orang		100%			sedang berjalan	
							Jasa Tenaga Tekhnis	11 bulan		100%			sedang	
							Inovasi Kecamatan	2 bulan		100%			baru	
4,3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kec. UH						100%	42.190.000	46.409.000	sedang berjalan	
							Gelar Expo Industri Rumahan	3 hari		100%				
								7 kelurahan						
							Koordinasi forum UMKM	6 bulan		100%				
							Pelatihan Packing Bagi UPPKS	30 orang		100%				
4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kec. UH						100%	369.237.700	406.161.470	sedang berjalan	Kec. UH
							Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	8 dok		100%				
								4 bulan						
							Asisstensi Profil	2 bulan		100%				
							Pelatihan Pemandu Wisata Lokal	30 orang		100%				
							Pelaksanaan Distribusi raskin	12 bulan						
							Tim Ketahanan Pangan	4 bln						
							Evaluasi Keterisian Data PKK	4 bulan		100%				
							Pelaksanaan TKPK	8 bulan		100%				
							Festival Kesenian	2 bln		100%				
							Lomba Bidang Kesehatan	1 kelurahan		100%				
							Gebyar Balita	200 orang		100%				
							Sarasehan Mocopat Kecamatan	7 kelurahan		100%				
							Gelar Mocopat	100 orang		100%				
							Asisstensi Profil	2 bulan		100%				
							Evaluasi Keterisian Data PKK	4 bulan		100%				
							Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak ( KKG ),PKK, KB & Kesehatan	250 org		100%				
							Gerakan sapaan Anak Kos	4 bln		100%				
							Pemberdayaan PKK	5 kali		100%				
							Rapat Koordinasi Forum	15 forum		100%				
							Gebyar Lansia	225 orang		100%				
							Gelar Potensi PKH	250 orang		100%				

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Sosialisasi Perda ASI Eklusif	430 orang		100%			baru		
							FGD Potensi Seni Budaya dan Adat Tradisi	60 orang		100%			baru		
							Pelatihan Simulasi Trafiking & KDRT	50 orang		100%			baru		
							Workshop Program TP PKK Kecamatan	100 orang		100%			baru		
							Profil Potensi Seni Budaya	1 dokumen 4 bln		100%			baru		
4,5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo								Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo yang mendukung Pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sosial.	100%	1.777.677.625	1.955.445.388			
								Pelatihan Perencanaan	102 orang		100%				
								Informasi Program kegiatan Wilayah							
								Paving Blok yang di pasang	1pkt		100%			Lanjutan	Kec. UH
								SAH yang dipelihara	1 pkt					Lanjutan	
								Paving blok yang dipasang	1 paket		100%				
								SAH yang diperbaiki dan SAH yang ditutup	1 paket					Lanjutan	
								Paving Blok yang dipasang	1 paket		100%				
								SAH yang diperbaiki dan SAH yang ditutup	1 paket						
								Paving blok yang dipasang	1 paket		100%			Lanjutan	
								SAH yang diperbaiki	1 paket						
								Balai RW dan Septi Tank yang di perbaiki	1 paket						
								Pos Ronda yang diperbaiki	1 paket						
								Taman Toga ynag dibuat	1 paket					baru	
								Paving Blok yang di buat	1 paket%		100%			Lanjutan	
								Griil SAH	1 paket						
								Portal Yang dipasang	2 paket					baru	
								Paving Blok yang dipasang	1 paket		100%			Lanjutan	
								SAH yang ditutup	1 paket						
								Balai RT yang diperbaiki	1 paket						
								RTHP yang dipelihara	1 paket						

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Kegiatan	SKPD
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Paving blok yang dipasang	1 paket		100%			Lanjutan	
							Normalisasi SAH dan Tutup SAH	1 paket						
							Balai RW yang diperbaiki	1 paket						
							PJU Lingkungan yang dipelihara	7 kelurahan		100%			Lanjutan	
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan									100%	340.433.500	374.476.850		
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	12 bln	Menanggulangi Penyebaran Wabah Demam Berdarah di Wilayah	100%			sedang berjalan	Kec. UH
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Mengembangkan budaya daerah	100%		sedang berjalan		
							Karnaval Budaya	1 kali	Mengembangkan Kreativitas budaya Masyarakat	100%		baru		
							TKPK	8 bulan	Menanggulangi Permasalahan Kemiskinan di Wilayah	100%		sedang berjalan		
							RASTRA	11 bln 14 kali	Menanggulangi permasalahan RASKIN di Wilayah	100%		sedang berjalan		
							Penguatan Kapasitas Kesi	8 koordinasi 1 kali Sosialisasi	Meningkatkan Kapasitas Kesi	100%		baru		
							Gebyar PAUD	1 kali	Meningkatkan Potensi Anak didik PAUD	100%		baru		
							Roadshow Sosialisasi JBM tingkat RW	13 RW	Meningkatkan minat belajar usia sekolah	100%		baru		
							Pemberdayaan PKK Kelurahan	5 kali	Peningkatan PKK Kelurahan	100%		sedang		
							Pemberdayaan PKK RW	13RW	Peningkatan Pengetahuan PKK RW	100%		sedang berjalan		
							Pemberdayaan PKK RT	42 RT	Peningkatan Pengetahuan PKK RT	100%		sedang berjalan		
							Gebyar Lansia	1 kali	Menjaga Potensi Lansia	100%		baru		
							Peserta Pelatihan Pengecatan	10 orang	Meningkatkan Ketrampilan	100%		baru		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Mobil		Masyarakat					
							Lomba Takbir	1 kali	Menjaga Toleransi umat	100%			baru	
							Peserta Pelatihan Pranata Adicoro dan Ngadi Busono	30 orang	Meningkatkan Ketrampilan Masyarakat	100%			baru	
							Peserta Pelatihan Tata Rias Karakter	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan Masyarakat	100%			baru	
							Sosialisasi UP2K	50 orang	Meningkatkan Pengetahuan masyarakat	100%			baru	
4,7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan									100%	464.920.000	511.412.000		
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	12 bln	Menanggulangi Penyebaran Wabah Demam Berdarah di Wilayah	100%			sedang berjalan	Kec. UH
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Mengembangkan budaya daerah	100%			sedang berjalan	
							Karnaval Budaya	1 kali	Mengembangkan Kreativitas budaya Masyarakat	100%			baru	
							TKPK	8 bulan	Menanggulangi Permasalahan Kemiskinan di Wilayah	100%			sedang berjalan	
							RASTRA	11 bln 14 kali	Menanggulangi permasalahan RASKIN di Wilayah	100%			sedang berjalan	
							Penguatan Kapasitas Kesi	8 koordinasi 1 kali Sosialisasi	Meningkatkan Kapasitas Kesi	100%			baru	
							Gebyar PAUD	1 kali	Meningkatkan Potensi Anak didik PAUD	100%			baru	
							Pemberdayaan PKK Kelurahan	5 kali	Peningkatan PKK Kelurahan	100%			sedang	
							Pemberdayaan PKK RW	18 RW	Peningkatan Pengetahuan PKK RW	100%			sedang berjalan	
							Pemberdayaan PKK RT	70 RT	Peningkatan Pengetahuan PKK RT	100%			sedang berjalan	
							Roadshow Sosialisasi JBM tingkat RW	18 RW	Meningkatkan minat belajar usia sekolah	100%			baru	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Peserta pembuatan batik Tulis	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan Masyarakat	100%			lanjutan	
							Peserta Pembuatan Kue Kering & Makanan Tradisional	20 org	Meningkatkan Ketrampilan Masyarakat	100%			baru	
							Peserta Pembuatan Sangkat Burung	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan Masyarakat	100%			baru	
							Peserta pembuatan Pelet Kelinci	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan Masyarakat	100%			baru	
							Peserta Pelatihan Pembenihan Lele & Gurameh	20 org	Meningkatkan Ketrampilan Masyarakat	100%			baru	
							Sapaan Anak Kos	11 bln	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	100%			baru	
							BKB Holistik yang dibina	56 orang	Meningkatkan Pengetahuan bagi Kader BKB	100%			baru	
4,8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan									100%	334.608.000	368.068.800		Kec. UH
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	12 bln	Menanggulangi Penyebaran Wabah Demam Berdarah di Wilayah	100%			sedang berjalan	
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Mengembangkan budaya daerah	100%		sedang berjalan		
							Karnaval Budaya	1 kali	Mengembangkan Kreativitas budaya Masyarakat	100%		baru		
							TKPK	8 bulan	Menanggulangi Permasalahan Kemiskinan di Wilayah	100%		sedang berjalan		
							RASTRA	11 bln 14 kali	Menanggulangi permasalahan RASKIN di Wilayah	100%		sedang berjalan		
							Peserta Pembuatan Bakpia	26 orang	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi masyarakat	100%		baru		
							Peserta Pembuatan Yogurt	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi masyarakat	100%		baru		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Inovasi Sistem Buku Tamu	11 bulan	Meningkatkan Pelayanan masyarakat	100%			baru	
							Inovasi Sapaan Anak Kos	11 bulan	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	100%			baru	
							Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kelurahan	70 orang	Meningkatkan Pengetahuan Personil Lembaga Kelurahan	100%			baru	
							Penguatan Kapasitas Kesi	8 koordinasi 1 kali Sosialisasi	Meningkatkan Kapasitas Kesi	100%			baru	
							Gebyar PAUD	1 kali	Meningkatkan Potensi Anak didik PAUD	100%			baru	
							Pemberdayaan PKK Kelurahan	5 kali	Peningkatan PKK Kelurahan	100%			sedang berjalan	
							Pemberdayaan PKK RW	13 RW	Peningkatan Pengetahuan PKK RW	100%			sedang berjalan	
							Pemberdayaan PKK RT	52 RT	Peningkatan Pengetahuan PKK RT	100%			sedang berjalan	
							Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW	13 RW	Meningkatkan minat belajar usia sekolah	100%			baru	
							Roadshow Karang Taruna	1 kali	Meningkatkan Pengetahuan Anggota Karang Taruna	100%			baru	
4,9	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto									100%	289.586.000	318.544.600		Kec. UH
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	12 bln	Menanggulangi Penyebaran Wabah Demam Berdarah di Wilayah	100%			sedang berjalan	
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Mengembangkan budaya daerah	100%			sedang berjalan	
							Karnaval Budaya	1 kali	Mengembangkan Kreativitas budaya Masyarakat	100%			baru	
							TKPK	8 bulan	Menanggulangi Permasalahan Kemiskinan di Wilayah	100%			sedang berjalan	
							RASTRA	11 bln	Menanggulangi permasalahan	100%			sedang berjalan	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								14 kali	Raskin di wilayah	100%			berjalan		
							Pelatihan Bisnis On Line	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan masyarakat				baru		
							Pelatihan Bakpia dan Lauk Pauk	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan masyarakat				baru		
							Peserta Pelatihan Hidroponik	40 orang	Meningkatkan Panghijauan Lingkungan				baru		
							Peserta Pelatihan Budidaya Ikan & Pembuatan Pelet	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi Masyarakat				baru		
							Pesrta Pelatihan Pembuatan Pupuk & TOGA	20 orang	Meningkatkan Ketrampilan dan Ekonomi Masyarakat				sedang berjalan		
							Pemberdayaan PKK Kelurahan	5 kali	Peningkatan PKK Kelurahan				sedang		
							Pemberdayaan PKK RW	9 RW	Peningkatan Pengetahuan PKK RW				sedang berjalan		
							Pemberdayaan PKK RT	38 RT	Peningkatan Pengetahuan PKK RT				sedang berjalan		
							Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW	9 RW	Meningkatkan minat belajar usia sekolah				baru		
							Penguatan Kapasitas Kesi	8 koordinasi 1 kali Sosialisasi	Meningkatkan Kapasitas Kesi				baru		
							Gebyar PAUD	1 kali	Meningkatkan Potensi Anak didik PAUD				baru		
							Motivasi Belajar Akibat Game & Kenakalan Remaja	70 orang	Menanggulangi Kecanduan Game & Kenakalan Remaja				baru		
4.10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan									100%	303.239.000	333.562.900			
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	12 bln	Menanggulangi Penyebaran Wabah Demam Berdarah di Wilayah	100%			sedang berjalan		Kec. UH
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Mengembangkan budaya daerah	100%			sedang berjalan		
							Karnaval Budaya	1 kali	Mengembangkan Kreativitas	100%			baru		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
									budaya Masyarakat	100%			baru		
							TKPK	8 bulan	Menanggulangi Permasalahan Kemiskinan di Wilayah						
							RASTRA	14 bulan	Menanggulangi permasalahan RASKIN di Wilayah				100%		sedang berjalan
							Peserta Pembuatan Kripik Wortel & Waluh	30 orang	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat				100%		baru
							Pemberdayaan PKK Kelurahan	5 kali	Peningkatan PKK Kelurahan				100%		sedang
							Pemberdayaan PKK RW	12 RW	Peningkatan Pengetahuan PKK RW				100%		sedang berjalan
							Pemberdayaan PKK RT	50 RT	Peningkatan Pengetahuan PKK RT				100%		sedang berjalan
							Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW	12 RW	Meningkatkan minat belajar usia sekolah				100%		baru
							Peserta Pembuatan Batik Tulis & Jumputan dengan Pewarna Alam	24 orang	Peningkatan Pengetahuan tentang Pewarnaan kain				100%		baru
							Peserta Kewirausahaan & Manajemen Kuliner	20 orang	Peningkatan Pengetahuan masyarakat				100%		baru
							Penguatan Kapasitas Kesi	8 koordinasi 1 kali Sosialisasi	Meningkatkan Kapasitas Kesi				100%		baru
							Gebyar PAUD	1 kali	Meningkatkan Potensi Anak didik PAUD				100%		baru
							Pelatihan Keterisian data PKK	50 orang	Meningkatkan Pengetahuan keteriasian data PKK				100%		baru
							Pendataan Pondokan	2 bulan	Data Pondokan				100%		baru
							Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Kader PKK & Kader Posyandu	50 orang	Meningkatkan dan Menguatkan Kader PKK & Posyandu				100%		baru
							Pelatihan Komputer Bagi PKK	24 orang	Meningkatkan Ketrampilan bagi Kader PKK				100%		baru

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.11	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-muju									100%	310.547.500	341.602.250		Kec. UH	
							UKM Kerajinan yang dibina	30 orang	Meningkatkan Pengetahuan Peserta UMKM Kerajinan	100%					baru
							Kader BKS yang dibina Bina Keluarga Sejahtera	50 orang	Meningkatkan Pengetahuan Kader BKS	100%					baru
							WRSE ( Wanita Rawan Sosial Ekonomi ) yang dibina	20 orang	Menaggulangi Peningkatan WRSE	100%					baru
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	12 bulan	Antisipasi Peningkatan Demam Berdarah	100%					sedang berjalan
							RASTRA	14 bulan	Menanggulangi permasalahan RASKIN di Wilayah	100%					sedang berjalan
							Festival Kesenian	1 kali	Mengembangkan budaya daerah	100%					sedang berjalan
							Pemberdayaan PKK Kelurahan	5 kali	Peningkatan PKK Kelurahan	100%					sedang berjalan
							Pemberdayaan PKK RW	12 RW	Peningkatan PKK RW	100%					sedang berjalan
							Pemberdayaan PKK RT	50 RT	Peningkatan PKK RT	100%					sedang berjalan
							Senam Lansia	4 kali	Menjaga Kesehatan Lansia	100%					baru
							Gebyar PAUD	1 kali	Meningkatkan Potensi Anak didik PAUD	100%					baru
							Penguatan Kapasitas PIK R	50 orang	Meningkatkan Pengetahuan Anggota PIK R	100%					baru
							Penguatan Kapasitasi Kesi	8 koordinasi 1 kali Sosialisasi	Meningkatkan Kapasitas Kesi	100%					baru
							Karnaval Budaya	1 kali	Mengembangkan Kreativitas budaya Masyarakat	100%					baru
							Festival Kampung Ramah Anak	1 kali	Peningkatan Potensi Kampung Ramah Anak	100%					sedang berjalan
							Gelar hari AID Sedunia	125 orang	Meningkatkan Kesadaran	100%					baru

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis	SKPD			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
									Masyarakat tentang AID	100%			sedang berjalan				
						TKPK	8 bulan	Menanggulangi Permasalahan Kemiskinan di Wilayah									
						Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW	12 RW	Meningkatkan minat belajar usia sekolah	100%							baru	
						Pendampingan Pembentukan Forum RT/ RW berbasis Kampung	12 RW	Mengembangkan Koordinasi Forum berbasis Kampung	100%							baru	
4.12	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Semaki									100%	264.895.700	291.385.270					
							Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	12 bulan	Antisipasi Peningkatan Demam Berdarah	100%				sedang berjalan	Kec. UH		
							Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	Mengembangkan budaya daerah	100%						baru	
							Karnaval Budaya	1 kali	Mengembangkan Kreativitas Budaya Masyarakat	100%							
							TKPK Kelurahan	8 bln	Menanggulangi permasalahan Kemiskinan di wilayah	100%							sedang berjalan
							RASTRA	14 bln	Menanggulangi permasalahan RASKIN di wilayah	100%							sedang berjalan
							Pemberdayaan PKK Kelurahan	5 kali	Peningkatan PKK Kelurahan	100%							sedang berjalan
							Pemberdayaan PKK RW	10 RW	Peningkatan PKK RW	100%							sedang berjalan
							Pemberdayaan PKK RT	34 RT	Peningkatan PKK RT	100%							sedang berjalan
							Penguatan Kapasitas Kesi	8 Koordinasi 1 kali Sosialisasi	Peningkatan Kapasitas Kesi	100%							baru
							Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW	10 RW 4 kali Koord	Meningkatkan minat belajar usia sekolah	100%							baru
							Peserta Pelatihan Veltikulture dan Hortikultura	34 orang	Meningkatkan ketrampilan bertanam masyarakat	100%							baru
							Gebyar PAUD	1 kali	Meningkatkan Potensi anak	100%							baru

NO	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Pagu Indukatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
									didk PAUD					
							Peserta Simulasi Penanggulangan KDRT	50 orang	Meningkatkan Kepedulian masyarakat akan KDRT	100%			baru	
							BKB Holistik yang dibina	80 orang	Peningkatan Pengetahuan tentang BKB	100%			baru	
							Senam Lansia	4 kali	Menjaga Kesehatan Lansia	100%			baru	
JUMLAH TOTAL											7.569.478.272			

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kotagede

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target	
Pemberdayaan Masyarakat																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaa n pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%							793.188.245	872.507.070		
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kotagede			1 Materai 6.000 yang tersedia 2 Materai 3.000 yang tersedia 3 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 4 STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 5 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 7 Retribusi kebersihan yang terbayar 8 Alat tulis kantor yang tersedia 9 Jasa Penggandaan 10 Jasa penjilidan 11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 12 Pembayaran Telephone 13 Pembayaran Air 14 Pembayaran Listrik 15 Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia 16 Jasa perbaikan mesin ketik 17 Jasa perbaikan mebelair 18 Bahan Komputer/printer yang tersedia 19 Piket kantor  20 Pengisian tabung pemadam 21 Pemeliharaan komputer 22 sewa tenda 23 sewa sound sistem 24 Peralatan rumah tangga yang tersedia 25 Jasa Pemeliharaan Taman	390 buah 600 buah 1 unit 1 unit 14 unit 27 jenis  12 bln 45 jenis 180.000 lbr 70 exp 14 jenis  12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 8 kali 5 jenis 8 org x 365 hr  45 buah 34 kali 4 kali 2 kali 19 jenis 5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	394.909.925	434.400.918	sedang berjalan	Kec. Kotagede		
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kotagede			1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun  2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang 3 Jasa tenaga bantuan	4 jenis  46 dokumen 4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		158.202.320	174.022.552				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1.3	Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kotagede			1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 3 Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan 4 Monitoring Wilayah 5 Konsultasi ke luar daerah	65 org 231 kali 4 jenis 12 kali 4 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		240.076.000	264.083.600		
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaa n pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					130.327.500	143.360.250		
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor			Kotagede			1 Jasa pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor 2 Jasa Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Gedung kantor	1 paket 27kali	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	69.010.000	75.911.000	sedang berjalan	Kec. Kotagede
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kotagede			1 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4  2 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3 3 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	1 unit  1 unit 14 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang	100%	61.317.500	67.449.250	sedang berjalan	Kec. Kotagede
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaa n pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					64.750.000	71.225.000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian kinerja SKPD						1 Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun  2 Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang tersusun	5dokumen  5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran  Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%  BB	64.750.000	71.225.000	sedang berjalan	Kec. Kotagede

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
4	Program peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Pembanguna n Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaa n pemerintah daerah yang berkualitas		Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	100%						2.514.134.255	1.936.862.681			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kotagede			1	Linmas yang terbina	10 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede	100%	218.685.500	240.554.050	sedang berjalan	Kec. Kotagede	
							2	PKL yang tertib dan tertata	50 orang							
							3	Operasi Ketertiban yang terlaksana	84 kali							
4	Operasi Vandalisme yang terlaksana	36 kali														
5	Pengamanan Umum yang terlaksana	12 kali														
6	Sambang Kampung yang terlaksana	12 kali														
7	Koordinasi Forkompika yang terlaksana	11 kali														
8	Pelaksanaan Hari Raya yang lancar	8 kegiatan														
9	Lomba Poskamling yang terlaksana	3 kali														
10	BMR yang terlatih untuk situasi darurat	2 kali														
11	Relawan yang terlatih untuk mengatasi kebakaran	2 kali														
12	Pelaporan buku monografi kelurahan	1 buku														
13	Kelurahan yang terpilih	1 kelurahan														
14	Kelembagaan masyarakat yang bersinergi	2 kali														
					15	Koordinasi RT RW yang terselenggara	14 kali									
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede			Kotagede			1	HO IMBB yang diterbitkan	47 izin	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede	100%	162.416.255	178.657.881	sedang berjalan	Kec. Kotagede	
2	Operasional PATEN yang terlaksana	12 bulan														
3	Buletin Warta Kotagede yang terbit	6 kali														
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kotagede			1	PKH yang terlatih dalam membuat kue	30 orang	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede	100%	65.990.000	72.589.000	sedang berjalan	Kec. Kotagede	
2	PKH yang terbina untuk melakukan wirausaha	100 orang														
3	Warga yang terlatih berkreasi dengan daur ulang sampah	100 orang														

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede						1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 Kader P4K yang terlatih 3 TP PKK Kecamatan yang ter koordinasi 4 Raskin yang terdistribusi dengan lancar	4 kali 165 orang 11 kali 12 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede	100%	383.539.350	421.893.285	sedang berjalan	Kec. Kotagede
							5 Gelar Potensi Wil. Kotagede yang terselenggara 6 Hatinya PKK yang terbina 7 Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang bersinergi 8 Kader PHBS dan LBS yang terbina 9 KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana  10 Lomba Permainan Tradisional yang terlaksana 11 Atlit OR prestasi yang terlatih 12 Kader PKK yang tertib administrasi 13 TP PKK yang termonitoring 14 Kader PKBN yang terbina 15 Gebyar PAUD yang terlaksana 16 Kader SDIDTK yang terbina 17 Kader MK yang tertib administrasi 18 Kader BKS yang tertib administrasi 19 Kader IMP yang dibina 20 Kader PKADD yang dibina 21 Paduan Suara yang terlatih	1 kali 95 orang 10 Kelompok 175 orang 1 kali  1 kali 3 cabang 150 orang 55 orang 70 orang 1 kali 100 orang 60 orang 150 orang 210 orang 165 orang 6 kali						
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun			Kotagede			1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi  3 Kampung Wisata yang terbina 4 Siskamling yang dibina 5 Kampung Agro yang terbentuk 6 Kampung Kuliner yang terbentuk 7 Kampung Kerajinan yang terbentuk 8 Kampung Herbal yang terbentuk 9 Kampung Budaya yang terbentuk 10 Kelurahan Siaga yang terbina 11 Komisi Lansia yang terbina 12 warga yang dibina tentang wirausaha  13 Bangmahat yang dibina 14 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi  15 Kampung KB yang terbina 16 Gelar Potensi UMKM yang terselenggara  17 Gelar Potensi Wilayah Rejowinangun yang terselenggara	4 kali 13 RW, 49 RT  2 kali 2 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 20 orang 20 orang 50 orang  100 orang 13 RW  50 orang 1 kali  1 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kelurahan Rejowinangun	100%	303.178.050	333.495.855	sedang berjalan	Kec. Kotagede

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
							18 Pawai Budaya yang terselenggara	1 kali							
							19 Warga yang terlatih kesenian Kulintang	6 kali							
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan			Kotagede			1 Koordinasi TKPK yang terselenggara	4 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kelurahan	100%	361.628.950	397.791.845	sedang berjalan	Kec. Kotagede	
							2 TP PKK Prenggan yang terkoordinasi	13 RW, 57 RT							
							3 Instruktur Senam yang terlatih	5 kali							
							4 kampung ramah anak yang terbina	100 kali							
							5 Paguyuban Kesenian Kethoprak yang terbina	50 orang							
							6 Pawai Budaya yang terselenggara	1 kali							
							7 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi	13 RW							
							8 Kelurahan Siaga yang terbina	20 orang							
							9 Gelar Potensi Wilayah Prenggan yang terseler	1 kali							
							10 PKK RT yang tertib administrasi	70 orang							
							11 Warga yang paham Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	40 orang							
							12 Warga yang paham Penanggulangan KDRT/MK	40 orang							
							13 Lomba Peningkatan Tumbuh Kembang Anak yang terlaksana	2 kali							
							14 Gebyar Lansia yang terlaksana	1 kali							
							15 Rintisan Kebun Hydroponik yang terlatih	40 orang							
							16 Pengrajin Perak yang terlatih	20 orang							
							17 Warga yang terlatih Patiseri	40 orang							
							18 Warga yang terlatih membuat Jamu/Obat Tra	30 orang							
							19 Warga yang terlatih mengemas Produk	30 orang							
							20 Warga yang terlatih Budidaya Jamur	30 orang							
							21 Warga yang terlatih Budidaya Cacing	20 orang							
							22 Warga yang terlatih Membuat Olahan Jamur	20 orang							
							23 Kader PAUD dan Posyandu yang terbina	85 orang							
							24 Gelar Potensi UMKM yang terlaksana	1 kali							
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan			Kotagede			1 Koordinasi TKPK yang terselenggara	4 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kelurahan Purbayan	100%	265.346.150	291.880.765	sedang berjalan	Kec. Kotagede	
							2 TP PKK Purbayan yang terkoordinasi	14 RW, 58 RT							
							3 Warga yang terlatih Budidaya Jamur Tiram	20 orang							
							4 Kelompok Karawitan yang terlatih	20 orang							
							5 Warga yang terlatih membuat seserahan	20 orang							
							6 Kelompok Keroncong Timpasko yang terlatih	20 orang							
							7 Kampung Hijau yang terbina	20 orang							
							8 Kelompok Karawitan Anak yang terlatih	20 orang							
							9 Kampung Sayur yang terbina	20 orang							
							10 Kelompok Tari Anak yang terbina	20 orang							
							11 Kelompok Budidaya Kelinci yang terlatih	20 orang							
							12 Warga yang terlatih memotong Rambut	20 orang							
							13 Warga yang terlatih membuat Tas Rajut	20 orang							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju 2018	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
							14 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi	14 RW						
							15 Gelar Potensi Wilayah Purbayan yang terselenggara	1 kali						
							16 Gelar Potensi UMKM yang terlaksana	1 kali						
							17 Pawai Budaya yang terlaksana	1 kali						
							18 Kelurahan Siaga yang terbina	14 RW						
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede			Kotagede			1 Dokumen Inmen yang tersusun	1 buku	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayananKecamatan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	100%	753.350.000	828.685.000	sedang berjalan	Kec. Kotagede
							2 Dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen						
							3 Petugas input profil yang terlatih	40 orang						
							4 Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah	3 Kelurahan						
							5 Renovasi Konstruksi Jalan tersebar di wilayah	1 Kecamatan						
							6 Renovasi Konstruksi Jaringan air tersebar di wilayah	1 Kecamatan						
							7 Renovasi Konstruksi bangunan tersebar di wilayah	1 Kecamatan						
JUMLAH TOTAL											3.502.400.000	3.023.955.000		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
Urusan Kesatuan Bangsa														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meingkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					310,271,670	341,298,837		Kantor Kesatuan Bangsa
1.1.	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor			Umbulharjo			Materei 6000 yang tersedia Materei 3000 yang tersedia STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Jasa kebersihan kantor Alat tulis kantor yang tersedia Jasa percetakan Jasa penggandaan  Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Peraturan penrundang-undangan yang tersedia  Jasa perbaikan peralatan kerja Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan rumah tangga yang tersedia Jasa pemeliharaan taman	75 buah 250 buah 2 buah 9 buah 12 jenis 12 bulan 48 jenis 1 jenis 125.000 lembar  9 jenis 2 jenis 5 buah  3 jenis 6 jenis 11 jenis 10 jenis 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	168,591,670	185,450,837	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
1.2.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Umbulharjo			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun  Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola Jasa Tenaga Bantuan	4 jenis  25 dokumen ASN 2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	91,224,640	100,347,104	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
1.3.	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Umbulharjo			Makan dan minum yang tersedia untuk a. Koordinasi b. Pegawai Laporan hasil koordinasi dan konsultai ke luar daerah	50 kali 40 orang 15 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	125,688,000	138,256,800	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meingkat		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					108,280,000	119,108,000		Kantor Kesatuan Bangsa
2.1.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung / bangunan kantor			Umbulharjo			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20,000,000	22,000,000	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
2.2.	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops a. Roda 4 (empat) b. Roda 2 (dua)	2 unit 9 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	88,280,000	97,108,000	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meingkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					33,400,000	36,740,000		Kantor Kesatuan Bangsa
3.1.	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD			Umbulharjo			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)  Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) Frekuensi diklat formal yang diikuti	100%  100%  2 kali	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran  Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%  100%  100%	33,400,000	36,740,000	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Sosial Budaya	Meningkatnya nasionalisme		Terwujudnya masyarakat yang memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi	100%					1,484,930,860	1,633,423,946		Kantor Kesatuan Bangsa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis kegiatan	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.1.	Pemantapan ideologi dan kewaspadaan nasional			Umbulharjo			Sosialisasi cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	4 kali	Rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan di masyarakat sebagai pengendali konflik sesuai standar	100%	685,562,500	754,118,750	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat	2 kali						
							Pemantapan rasa nasionalisme bagi pemuda dan mahasiswa asrama daerah	6 kali						
							Pemantapan rasa nasionalisme bagi ormas/LSM	2 kali						
							Peningkatan cinta tanah air bagi kelompok pelajar luar sekolah se-Kota Yogyakarta	1 kali						
							Peringatan SO 1 Maret	2 kali						
							Penguatan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) Kota Yogyakarta	24 kali						
							Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	10 kali						
							Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kota Yogyakarta	5 kali						
							Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	5 kali						
4.2.	Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			Umbulharjo			Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik	8 kali	Politik yang kondusif di daerah sesuai standar	100%	103,940,000	114,334,000	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Monitoring pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta	3 bulan						
							Penelitian lapangan dan pengeluaran SKT bagi ormas di Kota Yogyakarta	12 kali						
4.3.	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi			Umbulharjo			Pemantapan bagi Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	1 kali	Ketahanan nasional di semua bidang sesuai standar	100%	695,428,360	764,971,196	Sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	7 kali						
							Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	7 kali						
							Pemantapan Forum P4GN dan Pencegahan Penyalahgunaan Napza	1 kali						
	Jumlah										1,936,882,530	2,130,570,783		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

SKPD: BPBD Kota Yogyakarta

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur				
URUSAN WAJIB														
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					842,490,225	866,495,932		
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			UMBULHARJO			Materai 6000 yang tersedia	160 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	548,930,225	565,398,132	Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Materai 3000 yang tersedia	500 buah						
							STNK roda 6 yang terbayar	7 unit						
							STNK roda 4 yang terbayar	7 unit						
							STNK roda 3 yang terbayar	1 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	8 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	77 jenis						
							Jasa percetakan	3 jenis						
							Jasa Penggandaan	250.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis						
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali													
Pengadaan pakaian dinas harian	60 buah													
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UMBULHARJO			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	42,300,000	42,300,000	Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	60 dokumen ASN						
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UMBULHARJO			Makan dan minum yang tersedia untuk	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	251,260,000	258,797,800	Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							a.koordinasi,	27 kali						
							b.pegawai	60 orang						
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 laporan						

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target					
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					490,440,000	505,153,200		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			UMBULHARJO			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	2 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	67,000,000	69,010,000	Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UMBULHARJO			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	87 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	423,440,000	436,143,200	Lanjutan	
							b. roda 6	1 unit						
							c. roda 4	2 unit						
							d. roda 3	76 unit						
							e. roda 2	8 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					203,205,000	209,301,150		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UMBULHARJO			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	203,205,000	209,301,150	Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB				
							Frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%				
4	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana	80%					2,839,550,275	2,924,736,783		
4.1	Pencegahan Bahaya Bencana Alam			UMBULHARJO			Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana	12 bulan	Kesiapsiagaan Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana	12 bulan	1,760,403,775	1,813,215,888	Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Kampung Tangguh Bencana (KTB) Lanjutan	15 kampung	Review Kampung Tangguh Bencana	15 kampung				
							Pelatihan Penanggulangan Bencana	10 Kali	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana	300 org				
4.2	Penanganan Bencana Alam			UMBULHARJO			Tim Reaksi Cepat ( TRC )	12 bulan	Kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat ( TRC )	12 bulan	702,957,500	724,046,225	Lanjutan	Badan Penanggulangan

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Manajemen Logistik	12 bulan	Terlaksananya Menejemen Logistik	12 bulan				Bencana Daerah
							Pelatihan Kedaruratan Bencana	7 kali	Meningkatnya Pengetahuan tentang Tanggap Darurat Bencana	175 org				
							Evakuasi Kedaruratan	50 kali	Terlaksananya evakuasi kedaruratan	50 kali				
							Pengadaan Perlengkapan TRC	41 paket	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan TRC	41 paket				
							Siaga Darurat	12 bulan	Kesiapsiagaan kedaruratan	12 bulan				
							Apel Siaga Bencana	1 Kali	Kesiapsiagaan seluruh komponen penanggulangan bencana	1000 org				
4.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			UMBULHARJO			Pemeriksaan Kebakaran	12 bulan	Pemeriksaan Kebakaran	12 bulan	376,189,000	387,474,670	Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Monitoring Daerah Rawan Bencana	12 bulan	Monitoring Daerah Rawan Bencana	12 bulan				
							Kerja Bhakti Bencana dan Pasca bencana	12 bulan	Kerja Bhakti Bencana dan Pasca bencana	12 bulan				
							Penyediaan Bahan Bangunan	1 paket	Penyediaan Bahan Bangunan	1 paket				
											4,375,685,500	4,505,687,065		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : RSUD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungj awab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan Kesehatan													
1	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat		Indeks Kepuasan Layanan	75					65,000,000,000	71,500,000,000		
1.1.	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja			Umbulharjo			Operasional Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan	12 bln	Pelayanan kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar	12 bln	61,920,000,000		Sedang Berjalan	RSUD Kota YK
1.2.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja			Umbulharjo			Operasional Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan	2 jenis 1 unit	Pelayanan kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar	100%	3,080,000,000		Sedang Berjalan	RSUD Kota YK
TOTAL											65,000,000,000	71,500,000,000		

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh walikota dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2017, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI